SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR: 100.3.3.2/316/BAPPEDALITBANG – 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4.Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Darah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I memuat pendahuluan;
b. Bab II memuat hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu;
c. Bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d. Bab IV memuat rencana kerja dan perangkat daerah; dan
e. Bab V memuat penutup.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Tembusan:
Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/316/BAPPEDALITBANG – 2024
TANGGAL 12 Agustus 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan tahapan penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) mengacu kepada rancangan Rencana Strategis (RENSTRA), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efiensi dan efektifitas serta agar mampu dan eksis dalam persaingan yang semakin ketat, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyusunan usulan fasilitasi pembangunan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional. Penyusunan Renja perangkat daerah mempunyai sasaran kepada kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan fasilitasi yang memadai di perangkat daerah dan meningkatkan kualitas aparatur, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam RKPD, serta meningkatkan kesinambungan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diarahkan di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2016-2021.

Rencana kerja merupakan langkah awal perangkat daerah untuk menjawab tuntutan daerah, nasional dan global dengan pendekatan rencana kerja yang jelas dan sinergis dalam sistem akuntabilitas kinerja sehinga dalam melaksanakan kegiatan akan lebih terarah dan tepat sasaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi serta berisi jumlah program dan kegiatan yang digunakan perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 dan juga memuat jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendanai prioritas-prioritas pembangunan perangkat daerah guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada masing-masing perangkat daerah.

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2025. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi setiap triwulan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

RENJA 2025

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR

MELAYANI DENGAN PRIMA

Alamat :
Jalan MT. Haryono Nomor 10 Batusangkar

(0752) 574715

08116616149

www.pmptsp.tanahdatar.go.id

1708

dpmptsptanahdatar@gmail.com

dpmptsptanahdatar

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 10 Batusangkar 27281
Telepon/Wa 08116665544, e-mail: dpmptsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsp_tanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.7.2/ 24 /PMPTSP-2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar perlu didukung dengan Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah.

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2029-2024

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daeerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023, target kinerja Tahun 2023 yang terukur baik sasaran maupun indikator sasarannya, Rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dengan *output* dan *outcome* yang jelas serta sumber pembiayaannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 2 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

Tembusan :
1. Yth. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Yth. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridhanya maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dirasa perlu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merumuskan Rancangan Rencana Kerja untuk menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025. Keberhasilan ini akan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah perencanaan yang baik.

Perumusan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar ini masih jauh dari apa yang diharapkan, oleh karenanya sangat diharapkan sekali kritikkan dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Batusangkar, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOFA BUDIANTO,SH
NIP. 19740612 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD **6**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 6

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 18

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PMPTSP 21

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 24

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD **35**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 35

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025 ..... **41**

BAB V PENUTUP **42**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun. Renja OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun perencanaan tahunan yang bersumber dananya dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Disamping itu Renja OPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi seluruh Aparat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya sehingga target Kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan Baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan Strategis yang perlu ditindak lanjuti atau di antisipasi.

Dengan adanya Rencana kerja ini maka seluruh proses kegiatan pelaksanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan Sistem yang jelas dan terukur, baik dari segi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daeerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman perencanaan program/ kegiatan tahun 2025 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis di Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan Pembangunan, kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan Indikator Kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Priode 2021-2026 dan hasilnya dari proses ini adalah berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.
2. Perencanaan Kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan target kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
3. Secara Umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.
4. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan Program Kegiatan ke dalam KUA PPAS dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Keberhasilan suatu proses perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan Pembangunan di tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 (TC 29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (2024)

KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (N-2)				Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan dan pengembangan system pelaporan kinerja**																
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen		
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	6	dokumen	6	Dokumen	6	dokumen	100%	6	Dokumen	6	dokumen		
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	Laporan	3	Dokumen	3	dokumen	100%	3	Dokumen	3	dokumen		
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan dan pengembangan system pelaporan**																
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang/Bulan	41	Orang	41	Orang	41	Orang	100%	41	Orang	41	Orang		
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen		
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang sudah megikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya**																
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Paket	41	Orang												
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	4	Orang	7	Orang	7	Orang	100%	2	Orang	2	Orang		
2	18	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100%	10	Paket	10	Paket		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (N-2)					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	4	Paket						14	Paket	14	Paket		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket	23	Paket	23	Paket	23	Paket	100%	26	Paket	26	Paket		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	5	Paket	9	Paket	9	Paket	100%	6	Paket	6	Paket		
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100%	24	Dokumen	24	Dokumen		
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan		
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000	Dokumen													
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem Informasi Pendukung MPP)	45000	Dokumen													
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (kendaraan roda 4)	4	Unit	1	Unit											
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	32	Unit						1	Unit	1	Unit		
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	Unit								4	Unit	4	Unit		
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang Ditata**															
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (N-2)					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan		
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan													
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan		
2	18	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100%	11	Unit	11	Unit		
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	Unit													
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100%	1	Tahun	1	Tahun		
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan pembayaran honor TENAGA JASA LAINNYA	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	2	Unit		
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif**															
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang Disusun**															
2	18	02	2..01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen													
2	18	02	2..01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen													
2	18	02	2..01	04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5	Dokumen													

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (N-2)				Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang Disusun**														
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen												
2	18	02	2.02	04	Penyediaan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen		
2	**18**	**02**	**3.04**		**Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**															
2	18	02	3.04	01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Badan Usaha												
2	**18**	**02**	**3.06**		**Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota**															
2	18	02	3.06	01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Laporan												
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah**														
2	18	03	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan/Diikuti**														
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Dokumen	1	Dokumen		
2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal kab/kota	1	Dokumen												
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang Dilaksanakan**														
2	18	04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang**														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (N-2)				Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
					kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Dilaksanakan**																
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota	1000	Pelaku Usaha	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100%	1	Tahun	1	Tahun		
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500	Kegiatan Usaha	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100%	1	Tahun	1	Tahun		
2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12	Orang	1	Orang	4	Orang	4	Orang	100%	12	Orang	12	Orang		
2	18	04	2.01	08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	350	Kegiatan Usaha	336	Kegiatan Usaha	271	Kegiatan Usaha	271	Kegiatan Usaha	100%	170	Kegiatan Usaha	170	Kegiatan Usaha		
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan**																
2	18	05	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**															
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku usaha dalam Melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	8	Kegiatan usaha													
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	120	Pelaku Usaha	270	Pelak Usaha	376	Pelaku Usaha	376	Pelaku Usaha	100%	560	Pelaku Usaha	560	Pelaku Usaha		
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	120	Kegiatan usaha	70	Kegiatan usaha	71	Kegiatan usaha	71	Kegiatan usaha	100%	17	Kegiatan usaha	17	Kegiatan usaha		
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang Disusun**																
2	18	06	2.01		**Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi**																

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (N-2)					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
					tingkat daerah Kabupaten/ Kota																
2	18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen		

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sepanjang Tahun 2023

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1) KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERA PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang telah rampung dibuat dan telah dilaksanakan kegiatan dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas PMPTSPNAKER.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, Pergeseran Anggaran tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2023 telah rampung dibuat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas PMPTSPNAKER tahun 2023

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Output dari kegiatan ini adalah Laporan Kinerja (LkjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2023. Pembuatan laporan-laporan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habis tahun berjalan (setelah 31 Desember 2022), semua laporan telah dapat diselesaikan.

2) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Realisasi kegiatan ini berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Penyusunan laporan keuangan juga serupa dengan laporan kinerja, dibuat setelah 31 Desember 2022. Mulai tanggal 5 Januari 2023 telah mulai dilakukan pengumpulan bahan dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022

3) KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

   Realisasi kegiatan ini berupa diikutinya Bimtek Penyampaian data pajak 2 Orang, Bimtek SIPD 3 orang, Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 1 Orang dan Pelatihan Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi 1 Orang

4) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Dinas PMPTSPNAKER dan Balai Latihan Kerja (BLK) Batusangkar terpenuhi dan berfungsi dengan baik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Dinas PMPTSPNAKER Kabupaten Tanah Datar terpenuhi dengan baik.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, berupa cetak blangko Pajak Restoran SPTPD, cetak Bon Minyak NCR, cetak lembar disposisi, cetak Map Kop Dinas dan penggandaan terpenuhi dengan baik
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan penyediaan bahan bacaan berupa Koran/ surat kabar harian dan mingguan terlaksana dengan baik
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk Dinas PMPTSPNAKER maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana dengan baik

5) PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancar.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan kantor terlaksana selama 1 tahun, serta pembayaran honor 4 (empat) orang tenaga jasa lainnya.

6) PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, ajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional atau lapangan

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 7 (tujuh) unit kendaraan dinas roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua dan semua pajak kendaran dinas baik roda empat maupun roda dua telah dibayar lunas dan tepat waktu serta pembayaran 1 orang tenaga jasa lainnya.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, terealisasi berupa pemeliharaan peralatan kantor dan mesin-mesin pelatihan pada BLK.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

   Realisasi kinerja sesuai dengan target, terealisasi berupa Pembayaran Honor 2 (dua) Orang tenaga jasa lainnya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

Realisasi kegiatan ini berupa

- Pengumpulan data-data baru terkait potensi investasi dari setiap Nagari dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar
- *Up-date* data Peluang investasi yang telah dimiliki seperti Peluang Pengembangan Kawasan Istano Pagaruyung, Pengembangan Kawasan Wisata Aua Sarumpun, Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Puncak Pato, serta Pengembangan Hilirisasi Tomat,
- Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Workshop SIPOPEI (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- Mengikuti Workshop Strategi Promosi Peluang Investasi Daerah Sumatera Barat Tahun 2023.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

   kegiatan ini terlaksana dengan mengikuti

   - Mengikuti Pameran Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Expo tahun 2023 di *Main Lobby Assembly Hall Jakarta Convention Center* (JCC) Senayan Jakarta.
   - Mengikuti Kegiatan *West Sumatera Investment Forum 2023* (WSIF 2023) di Harris Hotel Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
   - Mengikuti Kegiatan Pameran APKASI Otonomi Expo 2023 (AOE 2023) di Hall 3 – 3A Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PELAYANAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

   Kegiatan ini terealisasi berupa Pembayaran Honor 3 (tiga) orang tenaga jasa lainnya dan penyelenggaran pelayanan perizinan.

2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

   Kegiatan ini terealisasi berupa melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan perizinan dan Non Perizinan terhadap 271 perusahaan.

3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan

   Kegiatan ini terealisasi memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait pembuatan sumur bor di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, memfasilitasi konsultasi masyarakat baik secara lansung maupun melalui WhatsApp sebanyak 4 laporan/ pengaduan

5. PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

   Kegiatan ini terealisasi berupa

   - Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kabupaten Tanah Datar terhadap 11 (sebelas Pelaku/Kegiatan Usaha
   - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko terhadap 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) Pelaku Usaha yang dibagi kedalam VIII angkatan pelatihan

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pengawasan

   Kegiatan ini terealisasi berupa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko terhadap 71 (tujuh puluh satu) Pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Tanah Datar

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

   Kegiatan ini terealisasi berupa

   - Penyebarluasan informasi pelayanan perizin izin usaha melalui Baliho, Spanduk, Banner
   - Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Layanan Perizinan Terpadu (PRN)
   - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi Layanan Perizinan Terpadu (PRN).
   - Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berupa survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu meningkat sangat signifikan dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik pada sasaran OPD, Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif

Faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan yaitu antara lain :

1) Adanya komitmen dan maklumat pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2) Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas syaratnya, jelas tarifnya dan jelas waktu penyelesaiannya.
3) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai standar prosedur penyelesaian izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4) Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan OPD teknis terkait.

Tabel 2.2 (TC 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PMPTSP Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Nilai Investasi			141,7 M	146,7M	151,7 M	156,7 M	219,17M	98,75 M	220 M	225 M	
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten			3,50	3,50	3,50	3,50	154,67	67,31	140,40	143,58	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			84	86	88	91	88,36	90,59	95	95	
4	Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mall Pelayanan Publik			5	8	10	12	0	15	20	20	
5	Nilai SAKIP perangkat daerah			BB (71)	BB (75)	BB (80)	A (91)	BB (70,95)	74,25	80	81	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Invetasi

   Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Realisasi Investasi dapat meningkat karena adanya penambahan Investasi oleh pelaku usaha baru dan adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk melaporkan penambahan investasinya melalui Sistem LKPM serta adanya kebijakan pemerintah dalam hal penyederhanaan aturan terkait dengan investasi. Hal tersebut dapat terlihat dari target investasi kita sebesar Rp. 141.700.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 219.171.688.558,-

2. Persentase Peningkatan Investasi di Tanah Datar

   Dengan terealisasinya Investasi sebesar Rp. 219.171.688.558,- maka untuk persentasi peningkatan Investasi sebesar 154,67%

3. Indek Kepuasan Masyarakat

   Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat penilaiannya dalam kategori B dengan Kinerja Unit Pelayan Baik. Ini dapat ditunjukan oleh nilai SKM konversi sebesar 88,36. Adapun untuk masing-masing ruang lingkup yaitu (1) Persyaratan Pelayanan pada kategori Baik (2) Prosedur Pelayan berada pada ketegori Baik (3) Waktu pelayanan pada kategori Baik (4) Biaya/ tarif pelayanan pada ketegori Sangat Baik (5) Produk layanan pada kategori Baik (6) Kompetensi pelaksana pelayanan pada ketegori Baik (7) perilaku pelaksana pelayanan Baik (8) Maklumat Pelayanan pada kategori Baik dan (9) Penanganan Pengaduan Sangat Baik, namun demikian untuk tahun berikutnya kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan perlu ditingkatkan pada unsur pelayanan yang nilainya masih kurang dan mempertahankan nilai yang cukup tinggi

4. Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik

   Untuk Tahun 2023 jumlah Instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik masih belum ada dikarenakan Mal Pelayanan Publiknya belum beroperasional.

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

   Berdasarkan tabel diatas tergambarkan bahwa penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bernilai BB (Sangat Baik) dengan nilai (70,95) dari yang ditargetkan BB (71) dan untuk masa yang akan datang masih diperlukan perbaikan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PMPTSP

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar terdapat isu- isu penting yaitu :

1. Melayani dengan PRIMA (Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani dan Atraktif)

   Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu unit kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang memberikan pelayanan dengan PRIMA kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kuantitas Aparatur

   Ketersediaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, jumlah aparatur harus memadai dan memenuhi persyaratan kompetensi. Oleh sebab itu perlu upaya dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas serta perlu penambahan jumlah aparatur.
3. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif

   Dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal/ investasi di Kabupaten Tanah Datar perlu diciptakan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi.
4. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

   RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dapat menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang penanaman modal, menjadi informasi awal bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal serta eksplorasi potensi unggulan dan strategis untuk pengembangan lebih lanjut
5. Belum adanya peta investasi yang komprehensif dan lengkap

   Peta potensi investasi harus disusun mengacu kepada kondisi dan potensi yang terbaru dengan memanfaatkan digitalisasi sehingga lebih komprehensif, menarik dan lengkap
6. Melahirkan regulasi daerah yang menciptakan daya saing daerah di bidang investasi dengan memberikan insentif dan kemudahan investasi.

7. Optimalisasi promosi investasi

   Promosi investasi merupakan kegiatan strategis untuk mengenalkan dan menawarkan peluang investasi daerah kepada calon-calon investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Datar. Promosi investasi dapat dilakukan melalui kegiatan pameran investasi, temu bisnis maupun memanfaatkan media-media informasi dan pihak-pihak yang punya jangkauan nasional dan internasional

8. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

   Masih kurang dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan wajib penanaman modal dan pelayanan perizinan. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan fasilitasi investasi dan pelayanan prima perizinan maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan hal yang perlu menjadi perhatian.

9. Informasi pemanfaatan ruang belum dapat diakses oleh pelaku usaha dengan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detil.

10. Masih minimnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya ruang bermain anak, ruang multimedia, dan kendaraan untuk mobilisasi pelayanan.

11. Belum optimalnya layanan sistem satu pintu

    Untuk memaksimalkan layanan satu pintu dibutuhkan koordinasi dengan instasi teknis, khususnya tim teknis layanan perizinan secara intensif. Oleh karena itu diperlukan penempatan tim teknis layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar, sehingga sistem pengkoordinasian dengan perangkat daerah teknis menjadi efektif dan efisien.

12. Masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha.

    Kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas suatu usaha yang masih perlu dioptimalkan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya perizinan berusaha dan non berusaha di Kabupaten Tanah Datar.

13. Pengembangan aplikasi Sipintar yang digunakan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dengan pengembangan aplikasi ini, maka seluruh penyelenggaraan perizinan non berusaha yang kewenangannya sudah dilimpahkan ke Dinas PMPTSP dapat diakomodasi dalam aplikasi perizinan. Dengan aplikasi *online* ini diharapkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran perizinan tidak harus ke Dinas PMPTSP, namun dapat melakukannya secara *online,*

sehingga dipantau status permohonannya. Sedangkan untuk menghindari dari kemungkinan adanya pemalsuan, maka setiap produk perizinan dilengkapi dengan *barcode* atau *QR Code.* Hal tersebut bisa dicapai nantinya dengan dukungan penuh dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar

14. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submisson/OSS)* bahwa pelaksanaan perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi secara elektronik. Melalui OSS pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Dengan demikian penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya terjadinya permasalahan di dalam pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan yang dilakukan pada Mal Pelayanan Publik karena keterbatasan sarana dan SDM / personil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Persetujuan/ keputusan teknis merupakan kunci terhadap dikabulkan/ ditolaknya permohonan perizinan oleh Tim Teknis. Namun hal ini sepertinya tidak dianggap penting oleh Pemerintah Daerah jika dilihat dari anggaran yang disediakan untuk proses persetujuan/ keputusan teknis tersebut

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Adanya komitmen dan maklumat pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas syaratnya, jelas tarifnya dan jelas waktu penyelesaiannya.
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai standar prosedur penyelesaian izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan OPD teknis terkait.

INOVASI YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Untuk mendukung dan menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat Inovasi sebagai berikut:

1. SiPINTAR 2.0
2. PASTI ANTAR (Peta Potensi Investasi dan Perusahaan Terdaftar) adalah Sistem Informasi Peluang/Potensi Investasi dan Perusahaan yang sudah menjalankan investasi di Kabupaten Tanah Datar Berbasis Website

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Pembandingan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/ kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/ kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2025. Oleh karena itu akan ada program/ kegiatan yang berubah nilainya dan ada kegiatan yang tidak bisa dimasukan dalam rencana kerja.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan untuk melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.8.475.000.000,- dan dalam rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merencanakan melaksanakan 5 (Lima) Program 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.6.300.475.375,-. Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut:

Tabel 2.4.(T-C 3.1)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tanah Datar

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**8.475.000.000**						**6.300.475.375**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**5.850.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.818.208.375**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja**	**100%**	**35.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja**	**100%**	**5.628.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	Tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	Tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tanah Datar	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koorinasi penyusunan dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD yang disusun	6 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tanah Datar	Tersedianya okumen DPA-SKPD dan laporan hasil koorinasi penyusunan dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD yang disusun			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	Tersedianya laporan capaian kinerja an ikhtisar reasliasasi kinerja SKPD dan laporan hasil koorinasi penyusuunan laporan capaian kinerja an ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	Tersedianyan laporan capaian kinerja an ikhtisar reasliasasi kinerja SKPD dan laporan hasil koorinasi penyusuunan laporan capaian kinerja an ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	628.0000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan**	**100%**	**3.798.500.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan**	**100%**	**4.110.121.284**	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Datar	Tersedianya gaji an tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 Orang	3.786.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Datar	Tersedianya gaji an tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang	4.108.121.284	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD an laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD an laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya**	**100%**	**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya**	**100%**		
	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah Datar	Tersedianya pakaiian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	60 Paket	0	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah Datar	Tersedianya pakaiian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah Datar	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	50.000.000	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah Datar	Pendidikan an pelatihan pegawai berdasarkan tugas an fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**561.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**79.227.420**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Datar	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Datar	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Datar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Datar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Datar	Tersdianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 Paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Datar	Tersdianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 Paket	6.227.420	
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tanah Datar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tanah Datar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	7.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tanah Datar	Tersedianya bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	30 Dokumen	16.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tanah Datar	Tersedianya bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	30 Dokumen		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanah Datar	Terlaksanakan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanah Datar	Terlaksanakan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	Terlaksanaya penyelenggaraan rapat koorindasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	Terlaksanaya penyelenggaraan rapat koorindasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	60.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya penatausahan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya penatausahan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	0'00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik paa SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem	45000 Dokumen 1 Unit MPP	15.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik paa SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem	45000 Dokumen	0'00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**100%**	**600.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100%**	**225.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (kendaraan roda 4)	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianya kenaraan dinas opersasionalatau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (kendaraan roda 4)			
	Pengadaan Mebel	Tanah Datar	Tersedianya mebel	Penyediaan Mebel	Interior MPP	100.000.000	Pengadaan Mebel	Tanah Datar	Tersedianya mebel	Penyediaan Mebel	1 Unit	75.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lannya	Tanah Datar	Tersedianya peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya baru yang disediakan	TV layar lebar (2 Unit) Laptop (2 Unit), Personal Computer dan printer (10 set) pendukung MPP	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lannya	Tanah Datar	Tersedianya peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya baru yang disediakan	Laptop 8 unit, Personal Compputer 8 Unit, Printer 16 Unit pendukung MPP	150.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Jumlah sarana pendukung yang disediakan		100.000.000							

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Cakupan administrasi umum perkantoran yang ditata**	**100%**	**345.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Cakupan administrasi umum perkantoran yang ditata**	**100%**	**235.264.462**	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tanah Datar	Terlaksanya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tanah Datar	Terlaksanya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Datar	Tersedianya jasa komiunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Datar	Tersedianya jasa komiunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	125.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa peralatan an perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa peralatan an perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Pembayaran Honor TENAGA JASA LAINNYA	12 Laporan, 4 tenaga jasa lainnya	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Pembayaran Honor tenaga jasa lainnya	12 Laporan, 4 tenaga jasa lainnya	109.764.462	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**460.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**162.967.209**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianyan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak an perizinan kenaraan dinas poperasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Pembayaran Honorarium tenaga jasa lainnya	11 Unit Kendaraan (7 Unit roda 4, 5 unit roda 2), 1 tenaga jasa lainnya	230.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianyan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak an perizinan kenaraan dinas poperasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Pembayaran Honorarium tenaga jasa lainnya	8 Unit Kendaraan (5 Unit roda 4, 3 unit roda 2), 1 tenaga jasa lainnya	111.590.409	
	Pemeliharaan Mebel	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Mebel	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Terlaksanya pemeliharaan peralatan an mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara	25 Unit, 12 Bulan	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Terlaksanya pemeliharaan peralatan an mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara	2 Unit	1.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor an bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan pembayaran honor tenaga jasa lainnya	2 Unit, 2 Orang tenaga jasa lainnya	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor an bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan pembayaran honor tenaga jasa lainnya	2 Unit, 2 Orang tenaga jasa lainnya	50.376.800	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung dan bangunan Kantor	Tanah Datar		Jumlah saran dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		25.000.000							
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			**Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif**	**100%**	**350.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif**	**100%**		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota			**Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang disusun**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**			**Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang disusun**	**1 Dokumen**		
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitasi/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Tanah Datar	Ditetapkanya kebijakan daerah dalam peberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	100.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitasi/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Tanah Datar	Ditetapkanya kebijakan daerah dalam peberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen		
							Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		
							Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Tanah Datar	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	5 Dokumen		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			**Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun**	**100%**	**250.000.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			**Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun**	**100%**		
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersusunnya peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten /kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersususnya peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten /kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		
	Penyediaan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota						
							Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Badan Usaha		
							Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.						
							Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modaldi Wilayah Kabupaten/Kota.		Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	1 Laporan		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			**Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah**	**100%**	**400.000.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah**	**100%**	**120.000.000**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan/diikuti**	**100%**	**400.000.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan/diikuti**	**100%**	**120.000.000**	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman moal kabupaten /kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	2 Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman moal kabupaten /kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	5 Dokumen	120.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tanah Datar	Tersusunnya peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Peraturan Daerah yang mengtur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota, Media Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen , 3 Media	150.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tanah Datar	Tersusunnya peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Peraturan Daerah yang mengtur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota, Media Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			**Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**100%**	**700.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**100%**	**568.500.000**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**100%**	**700.000.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**100%**	**568.500.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tanah Datar	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	1 Kegiatan, 1 Dokumen	140.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tanah Datar	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen		
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem palayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	Teredianya pelayanan terpadu perizian dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizian berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha	ISO Perizinan, Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Bersauaha Terintegrasi secara lektonik dan Pembayaran Honor tenaga jasa lainnya	1 Kegiatan, 1000 pelaku usaha, 9 Orang tenaga jasa lainnya (pendukung MPP)	250.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizian berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasisi Risiko Terintegrasi secara elektronik	1500 pelaku usaha, 9 Orang tenaga jasa lainnya (pendukung MPP)	535.000.000	
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Tanah Datar	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap pelatanan terpadu perizinan dan non perizinan	12 Orang	60.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tanah Datar	Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	75 Pelaku Usaha	3.500.000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tanah Datar	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan penananman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantuan penemuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	600 Kegiatan Usaha	250.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tanah Datar	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten KOta bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	350 Kegiatan Usaha	30.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**100%**	**675.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**100%**	**783.767.000**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota			**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**		**675.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**			**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**		**783.767.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	Tanah Datar	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	100.000.000	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya	Tanah Datar	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	8 Kegiatan Usaha	117.564.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Tanah Datar	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	280 Pelaku usaha	350.000.000	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Tanah Datar	Terlaksananya bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah pelaku usaha yeng mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	120 Pelaku usaha	431.074.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Tanah Datar	Terlaksananya koordiansi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	30 Kegaitan Usaha	225.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Tanah Datar	Terlaksananya analisa dan Verifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisas dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	120 Kegaitan Usaha	235.129.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			**Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang disusun**	**100%**	**500.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang disusun**	**100%**	**10.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota			**Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	**2 Kegiatan**	**500.000.000**	**Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota**			**Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	**2 Kegiatan**	**10.000.000**	
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan barbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah,dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Cetak Buku Informasi, cetak leaflet dan cetak Spanduk/ Baliho/Media Informasi Banner dan Honor PRN Perizinan, Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi secara Elktronik yang dolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen, 1 Dokumen, 12 Bulan	500.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan barbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah,dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	10.000.000	

Sesuai analisis kebutuhan Rencana Kerja terdapat beberapa sub kegiatan yang anggaran melebihi pagu anggaran yang terdapat pada RPJMD dan Renstra OPD antara lainya:

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat penambahan angaran hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan Gaji dan tambahan ASN dan PPPK pada Dinas PMPTSP
2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik terdapat penambahan anggaran, anggaran tersebut ditambah untuk Penyediaan Tenaga Jasa Lainnya, anggaran operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Honor PRN dan Bimtek bagi Tim Pelayanan Perizinan (Petugas Registrasi Nagari Perizinan)

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerah. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melaui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Nagari, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten Tanah Datar hingga tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang yang telah di usulkan melalui Aplikasi SIPD oleh pihak Nagari/ Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar. Usulan tersebut akan diteruskan ke OPD terkait untuk dilakukan Penyusunan Renja OPD tersebut. Namun untuk Tahun 2025 tidak terdapat usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan perizinan terpadu merupakan pelayanan publik juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan sebagai berikut

Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".

Berdasarkan visi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan mendukung **Misi Kelima** "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.*

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 menetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif

Berdasarkan tujuan di atas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar menetapkan Sasaran Renja tahun 2025 sebagai berikut:

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan	Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif	Jumlah Nilai Investasi	151,7 M
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Mal Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
				Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik	10
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP perangkat daerah	BB (80)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemilihan program dan kegiatan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan Pembangunan dan mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1) Meningkatkan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya;
2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi;
3) Meningkatkan Produksi dan Produktifitas serta Nilai Tambah Hasil Pertanian;
4) Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Unggulan Daerah;
5) Meningkatkan Kualitas SDM;
6) Meningkatkan Infrastruktur Daerah, Penanggulangan Bencana Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas;

Dari tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ada 2 Prioritas yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas.

Untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan. Adapun prioritas program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

Program : 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program : 2. Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Program : 3. Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

- Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik
- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko

Program : 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya
- Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

Program : **5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan : 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merencanakan melaksanakan 5 (Lima) Program 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (Dua puluh lima) Sub Kegiatan sebagaimana daftar terlampir

BAB V
PENUTUP

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun sebagai pedomam rencana kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025.

Untuk keberhasilan Rencana Kerja tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang memadai, sehingga dapat diwujudkan program unggulan bupati yang terkait dengan Investasi dan pelayanan perizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat, dan akurat.

Rencana Kerja merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati perkenankan kami untuk menyampaikan ribuan terima kasih atas semua dukungan moral dan materil kepada semua pihak (seluruh staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pimpinan dan satuan kerja terkait), sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT, Amin ya robbal‘alamin.

Batusangkar, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOFA BUDIANTO,SH
NIP. 19740612 199403 1 005

Tabel T-C 33

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Tahun Perencanaan : 2025

Nama Organisasi **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Jumlah Pagu 2025	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**6.300.475.375**				**10.562.458.930**
					URUSAN PENANAMAN MODAL					**6.300.475.375**				**10.562.458.930**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**4.818.208.375**				**7.387.458.930**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja**		**100%**	**5.628.000**				**39.000.000**
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	8 Dokumen	5.000.000				12.000.000
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD yang disusun	Tanah Datar						15.000.000
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianyan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reasliasasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	3 Laporan	628.000				12.000.000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan**		**100%**	**4.110.121.284**				**5.325.958.930**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tanah Datar	30 Orang	4.108.121.284				5.313.958.930
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	2 Laporan	2.000.000				12.000.000
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya**		**100%**	**-**				**120.000.000**
2	18	01	2.05	0002	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Tanah Datar	Paket					60.000.000
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tanah Datar	orang					60.000.000
2	18	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**79.227.420**				**584.500.000**
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tanah Datar	10 Paket	4.000.000				30.000.000
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanah Datar	5 Paket / Pendukung MPP (Infocus 2 Unit, CCTV, Peralatan Area Bermain Anak					150.000.000
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tanah Datar	50 Paket	6.227.420				70.000.000
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tanah Datar	10 paket	7.000.000				70.000.000
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tanah Datar	Dokumen					19.500.000
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanakan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanah Datar	12 Laporan	2.000.000				70.000.000
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	12 Laporan	60.000.000				150.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Jumlah Pagu 2025	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Datar	1000 Dokumen	0'00				10.000.000
2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik paa SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem Informasi pendukung MPP)	Tanah Datar	45000 Dokumen	0'00		untuk pendukung MPP		15.000.000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100%**	**225.000.000**				**500.000.000**
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (kendaraan roda 4)	Tanah Datar	2 Unit Kendaraan roda 4, 2 unit roda 2					300.000.000
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tanah Datar	1 Unit	75.000.000		untuk pendukung MPP		100.000.000
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lannya	Tersedianya peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya baru yang disediakan	Tanah Datar	Laptop (8 Unit), Personal Computer 8 Unit) dan printer (16 set) pendukung MPP	150.000.000		untuk pendukung MPP		100.000.000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan administrasi umum perkantoran yang ditata**		**100%**	**235.264.462**				**348.000.000**
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksanya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Datar	12 Laporan	500.000				13.000.000
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tanah Datar	12 Laporan	125.000.000				160.000.000
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan an perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanah Datar	12 Laporan					25.000.000
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tanah Datar	12 Laporan, 4 THL	109.764.462				150.000.000
2	18	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**162.967.209**				**470.000.000**
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Tersedianyan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Pembayaran Honorarium THL	Tanah Datar	8 Unit Kendaraan (5 Unit roda 4, 3 unit roda 2), 1 THL	111.590.409				250.000.000
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Tanah Datar	15 Unit					50.000.000
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara	Tanah Datar	2 Unit	1.000.000				70.000.000
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi geung kantor an bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan pembayaran honor THL	Tanah Datar	2 Unit, 2 Orang THL	50.376.800				100.000.000
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif**		**100%**	**0**				**700.000.000**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang disusun**		**1 Dokumen**	**0**				**400.000.000**
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitasi/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Ditetapkanya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Tanah Datar	1 Dokumen	-				100.000.000
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Tanah Datar	1 Dokumen	-				100.000.000
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Tanah Datar	5 Dokumen	-				200.000.000
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun**		**100%**	**0**				**300.000.000**
2	18	02	2'02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten /kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	1 Dokumen					150.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Jumlah Pagu 2025	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	02	2.02	004	Penyusunan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tersusunnya peta potensi investasi kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	1 Dokumen					150.000.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah**		**100%**	**120.000.000**				**450.000.000**
2	18	03	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan/diikuti**		**100%**	**120.000.000**				**450.000.000**
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten /kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	Tanah Datar	5 Dokumen	120.000.000				300.000.000
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Tanah Datar	1 Dokumen					150.000.000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang dilaksanakan**		**100%**	**568.500.000**				**800.000.000**
2	18	04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang dilaksanakan**		**100%**	**568.500.000**				**800.000.000**
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	3 Dokumen	-				150.000.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizian berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasisi Risiko Terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	1500 Pelaku Usaha	535.000.000		untuk pendukung MPP		300.000.000
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	75 Pelaku Usaha	3.500.000				80.000.000
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten KOta bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Tanah Datar	350 Kegiatan usaha	30.000.000				270.000.000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**		**100%**	**783.767.000**				**700.000.000**
2	18	05	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**		**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota**			**783.767.000**				**700.000.000**
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Tanah Datar	8 Kegiatan Usaha	117.564.000				100.000.000
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Terlaksananya bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah pelaku usaha yeng mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Tanah Datar	120 Pelaku Usaha	431.074.000				350.000.000
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya analisa dan Verifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisas dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Tanah Datar	120 Kegiatan Usaha	235.129.000				250.000.000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang disusun**		**100%**	**10.000.000**				**525.000.000**

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Jumlah Pagu 2025	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	06	2.01		**Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**		**2 Kegiatan**	**10.000.000**				**525.000.000**
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan barbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah,dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tanah Datar	2 Dokumen	10.000.000				525.000.000

Batusangkar, Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

ISKOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199301 1005

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAI TARAB

RENCANA KERJA
(RENJA)



TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR`

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya lah kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tarab tahun 2025, Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 pada pasal 137 sampai dengan 150, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di haruskan menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimana Rencana Kerja ini mengacu kepada rancangan Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam pembuatan penyelesaian Renja Kantor Kecamatan Sungai Tarab, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pencapaian target kinerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan kesulitan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan , dimana dalam penyelesaian Renja ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang tanggapan, saran dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam memberikan data/kegiatan, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikianlah harapan kami semoga mendapat dukungan yang baik dari semua pihak

Sungai Tarab, AGUSTUS 2024
CAMAT SUNGAI TARAB

AH.MIZA AZIZ,S.Sos
PENATA TK.I/IIId
NIP. 197109122002121005

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Tarab 33

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40

BAB V PENUTUP 44

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Ranwal Renja OPD menjadi bahan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD.

Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Ranwal Renja OPD

   Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja

   Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

   Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

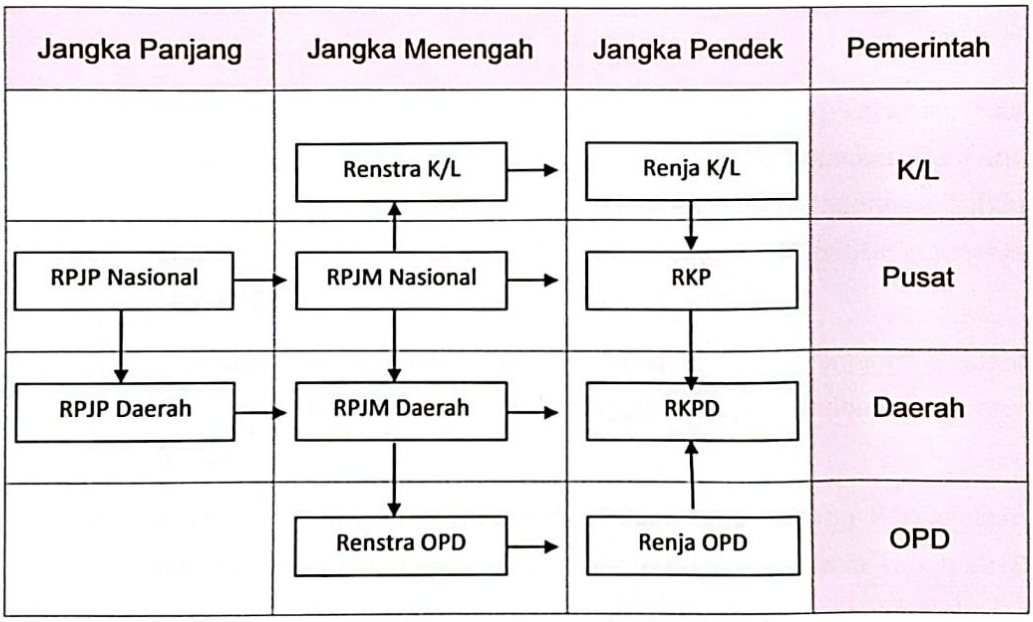
   1. Pengolahan data dan informasi
   2. Analisis gambaran pelayanan OPD
   3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
   4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Dipindai dengan CamScanner

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara peyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD,RPJMD,Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada Rancangan awal RKPD dan Renstra OPD dimana Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD, sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, dan RENJA OPD :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tarab disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infornasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam periode Renstra 2021-2026, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD 2025.

Sedangkan Tujuan penyusunan Ranwal Renja OPD Tahun 2025 adalah :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Dipindai dengan CamScanner

2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Pada dasarnya penyusunan Renja OPD ini bertujuan untuk lebih terjaminnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan prioritas Kecamatan Sungai Tarab dalam turut mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tarab tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Tarab
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan misi Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sungai Tarab, tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga periode renstra 2021-2026 Kecamatan Sungai Tarab telah melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan dengan 27 Sub Kegiatan, berikut penjabaran singkat mengenai Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Tarab tahun 2023 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%, hasil diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100% ditahun 2023 hasil program dapat dicapai 100% ditahun 2024, Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran 1.874.850,- dapat direalisasikan 1.874.700,- realisasi anggaran tercapai 99.99%. Keluaran dari kegiatan ini Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD anggaran Rp. 3.975.000.-dapat direalisasikan Rp. 3.975.000,- realisasi anggaran tercapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD.
3. Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD anggaran Rp. 1.965.000,- dapat direalisasikan Rp. 1.965.000,- realisasi anggaran 100%. Tersedianya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian Program ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN serta meningkatkan disiplin pegawai dalam melakukan aktifitas kerja

Dipindai dengan CamScanner

Perangkat daerah di Kecamatan dengan target 100%, ditahun 2023 hasil program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2024 juga tercapai 100%

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dari anggaran Rp. 1.290.207.887,- dapat direalisasikan Rp. 1.274.199.298,- realisasi anggaran tercapai 98.76%, Keluaran jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan. Keluaran dari kegiatan ini Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp. 2.550.000,- dapat direalisasikan Rp. 2.550.000,- realisasi anggaran tercapai 100%, Keluaran kegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian program ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya ASN berdasarkan tugas dan fungsi sesuai kemampuan yang dimiliki, hasil yang diharapkan tahun 2023 dengan target dapat dicapai 100% dan diharapkan pada tahun 2024 juga tercapai 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran Rp. 1.710.000,- dapat terealisasi Rp. 1.705.000,- realisasi anggaran tercapai 99.71%, Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian program ini adalah untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dibidang Komponen penerangan bangunan Kantor, hasil yang diharapkan tahun 2023 dengan target 100% dan diharapkan pada tahun 2024 juga tercapai 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor anggaran Rp.751.500,- dapat terealisasi Rp. 751.500,- realisasi anggaran 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor.

Dipindai dengan CamScanner

2. Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dari anggaran Rp. 5.215.800,-dapat terealisasi 5.202.500,- realisasi anggaran tercapai 99,75%, Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan logistik kantor.
3. Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari anggaran Rp. 4.825.000,- dapat terealisasi Rp. 4.824.747,- realisasi anggaran tercapai 99.99% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu anggaran Rp. 9.538.500,- dapat terealisasi Rp. 9.512.100,- realisasi anggaran tercapai 99,72% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Fasilitasi Tamu.
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi anggaran Rp. 37.066.563,- dapat terealisasi Rp. 36.926.000,- realisasi anggaran tercapai 99,62% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program adalah Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023, target capaian program dapat dicapai 100% tahun 2024.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat anggaran Rp. 600.000,- dapat terealisasi Rp. 600.000,- realisasi anggaran tercapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan listrik anggaran Rp. 18.500.000,- dapat terealisasi Rp. 17.305.117,-realisasi anggaran tercapai 93.54%.Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianyan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listerik .
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor anggaran Rp.24.801.433,- dapat terealisasi Rp.24.766.400,-realisasi anggaran tercapai 99,86% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor.

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program ini adalah untuk terpenuhinya jasa biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dengan target 100% tahun

Dipindai dengan CamScanner

2023, target capaian program tahun 2024 dapat tercapai 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan anggaran Rp. 50.610.000,- dapat terealisasi Rp. 49.829.669,-realisasi anggaran tercapai 98.46% Keluaran dari sub kegiatan tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya anggaran Rp. 2.500.000,- dapat terealisasi Rp. 2.499.800,- realisasi anggaran tercapai 99.99%, Keluaran Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran Rp. 6.000.000,- dapat terealisasi Rp. 5.976.000,- realisasi anggaran tercapai 99.6% Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
   Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

   2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

   Capaian kegiatan ini adalah untuk percepatan Pencapaian standar pelayanan di Tingkat kecamatan tahun 2023 target 100%, target capaian program tahun 2024 dapat tercapai 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

   1. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan anggaran Rp. 22.764.400,- dapat terealisasi Rp. 22.764.400,- realisasi anggaran 100%, Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan.
   2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan anggaran Rp. 22.764.400,- dapat terealisasi Rp. 22.764.400,- realisasi anggaran 100%, Keluaran dari kegiatan ini Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Capaian kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang dilimpahkan ke Kecamatan tahun 2023 target 100%, target capaian program tahun 2024 dapat tercapai 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan anggaran Rp. 832.000,- dapat terealisasi Rp. 810.000,- realisasi anggaran 97.36%, Keluaran dari kegiatan ini Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan**

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Partisipasi Musyawarah di Kecamatan tahun 2023 target 100%,target capaian program tahun 2024 dapat tercapai 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa anggaran Rp. 8.794.900,- dapat terealisasi Rp. 8.742.250,- realisasi anggaran 99.40%,- Keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Kecamatan tahun 2023 target 100%, target capaian program 2024 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat anggaran Rp. 3.000.000,- dapat terealisasi Rp. 3.000.000,- realisasi anggaran tercapai 100%, Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Capaian kegiatan ini adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah tahun 2023 target 100%, target capaian program 2024 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional anggaran Rp. 19.483.000,- dapat terealisasi Rp. 19.456.800,- realisasi anggaran tercapai 99.87%, Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Fasilitasi ,koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional anggaran Rp. 13.000.000,- dapat terealisasi Rp. 12.991.500,- realisasi anggaran tercapai 99.87%, Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

6. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

6.1 Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Capaian Kegiatan ini adalah untuk Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat tahun 2023 target 100%, target capaian program tahun 2024 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa anggaran Rp. 2.223.000,- dapat terealisasi Rp. 2.190.000,- realisasi anggaran tercapai 98.52% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran Rp. 13.500.000,- dapat terealisasi Rp. 13.500.000,- realisasi anggaran tercapai 100% Keluaran dari

Dipindai dengan CamScanner

kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan anggaran Rp. 17.737.600,- dapat terealisasi Rp. 17.646.800,- realisasi anggaran tercapai 98,49%, Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelaksanaan Tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.

Berikut Tabel Realisasi Anggaran Per Subkegiatan Tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.874.850	1.874.700	99.99
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.975.000	3.975.000	100
3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.965.000	1.965.000	100
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.290.207.887	1.274.199.298	98.76
5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.550.000	2.550.000	100
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.710.000	1.705.000	99.71
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	751.500	751.500	100
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.215.800	5.202.500	99.75
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.825.000	4.824.747	99.99
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.538.500	9.512.100	99.72
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.066.563	36.926.000	99.62
12	Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.500.000	17.305.117	93.54
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.801.433	24.766.400	99.86
15	Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	50.610.000	49.829.669	98.46
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	2.500.000	2.499.800	99.99
17	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan	6.000.000	5.976.000	99.6

Dipindai dengan CamScanner

	Bangunan Lainnya			
18	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	22.764.400	22.764.400	100
19	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.764.400	22.764.400	100
20	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan	832.000	810.000	97.36
21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.794.900	8.742.250	99.40
22	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000	3.000.000	100
23	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.483.000	19.456.800	99.87
24	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	13.000.000	12.991.500	99.93
25	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	2.223.000	2.190.000	98.52
26	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	13.500.000	13.500.000	100
27	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17.737.600	17.646.800	99.49

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2021-2026 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 1 Tujuan dan 2 sasaran strategis pada Renstra OPD Kecamatan Sungai Tarab.

Tujuan dari Kecamatan Sungai Tarab yang ditetapkan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
3. Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Dipindai dengan CamScanner

T-C.29

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

Kabupaten Tanah Datar

KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (N-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (2021)					Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (N-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023(N-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan															
7.01	Kecamatan															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		843		353		138		138		100.00	137		607		72.00
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata	54		18		9		9		100.00	8		35		64.81
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00	2	Dokumen	8	Dokumen	66.67
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00	3	Dokumen	15	Dokumen	62.50
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	6	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100.00	3	Laporan	12	Laporan	66.67
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Derah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan	96		32		14		14		100.00	14		60		62.50
7.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang	28	Orang	12	Orang	12	Orang	100.00	12	Orang	52	Orang	61.90
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	12	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100.00	2	Laporan	8	Laporan	66.67

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**90**		**42**		**15**		**15**		**100.00**	**15**		**59**		**65.56**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya	13	Paket	13	Paket	-	Paket	-	Paket	#DIV/0!	-	Paket	13	Paket	100.00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	90	Orang	29	Orang	15	Orang	15	Orang	100.00	15	Orang	59	Orang	65.56
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**279**		**147**		**46**		**46**		**100.00**	**46**		**239**		**85.66**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	10	Paket	5	Paket	5	Paket	100.00	5	Paket	20	Paket	66.67
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	*	Paket	-	Paket	#VALUE!	-	Paket	3	Paket	100.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180	Paket	116	Paket	30	Paket	30	Paket	100.00	30	Paket	176	Paket	**97.78**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42	Paket	10	Paket	7	Paket	7	Paket	100.00	7	Paket	24	Paket	57.14
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00	2	Dokumen	8	Dokumen	66.67
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	umlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**18**		**6**		**3**		**3**		**100.00**	**3**		**12**		**66.67**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**6**		**-**		**-**		**0.00**	**-**		**6**		**0.00**
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	3	unit	-	unit	-	unit	#DIV/0!	-	unit	3	unit	100.00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	unit	2	unit	-	unit	-	unit	#DIV/0!	-	unit	2	unit	100.00

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	-	Unit	-	Unit	#DIV/0!	-	Unit	1	Unit	100.00
7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**306**		**102**		**51**		**51**		**100.00**	**51**		**196**		**64.05**
7.01.01.2.09.02	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	Unit	12	Unit	6	Unit	6	Unit	100.00	6	Unit	24	Unit	66.67
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	258	Unit	86	Unit	43	Unit	43	Unit	100.00	43	Unit	172	Unit	66.67
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	4	Unit	2	Unit	2	Unit	100.00	2	Unit	8	Unit	66.67
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**78**		**26**		**13**		**13**		**100.00**	**13**		**52**		**66.67**
7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**60**		**20**		**10**		**10**		**100.00**	**10**		**40**		**66.67**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Dokumen	20	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100.00	10	Dokumen	40	Dokumen	66.67
7.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**12**		**4**		**2**		**2**		**100.00**	**2**		**8**		**66.67**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**6**		**2**		**1**		**1**		**100.00**	**1**		**4**		**66.67**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**30**		**10**		**5**		**5**		**100.00**	**5**		**20**		**66.67**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**30**		**10**		**5**		**5**		**100.00**	**5**		**20**		**66.67**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24	Lembaga	8	Lembaga	4	Lembaga	4	Lembaga	100.00	4	Lembaga	16	Lembaga	66.67
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**6**		**2**		**1**		**1**		**100.00**	**1**		**4**		**66.67**

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**6**		**2**		**1**		**1**		**100.00**	**1**		**4**		**66.67**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	4	Laporan	66.67
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**780**		**260**		**130**		**130**		**100.00**	**130**		**520**		**66.67**
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**780**		**260**		**130**		**130**		**100.00**	**130**		**520**		**66.67**
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	390	Orang	130	Orang	65	Orang	65	Orang	100.00	65	Orang	260	Orang	66.67
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	390	Orang	130	Orang	65	Orang	65	Orang	100.00	65	Orang	260	Orang	66.67
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**216**		**72**		**36**		**36**		**100.00**	**36**		**144**		**66.67**
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**216**		**72**		**36**		**36**		**100.00**	**36**		**144**		**66.67**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	120	Dokumen	40	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100.00	20	Dokumen	80	Dokumen	66.67
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	Dokumen	20	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100.00	10	Dokumen	40	Dokumen	66.67
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	36	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100.00	6	Dokumen	24	Dokumen	66.67
J U M L A H			**1,953**		**723**		**323**		**323**		**600.00**	**322.00**		**1,347**		**68.97**

Sungai Tarab, Agustus 2024

CAMAT SUNGAI TARAB

AH.MIZA AZIZ,S.Sos

NIP. 19710912200212100 5

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat nagari, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perarturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah yang secara pekerjaan bertatap muka lansung dengan masyarakat menjadi koordinator dan fasilitator di wilayah kecamatan, berikut tabel pencapaian Kinerja Pelayanan.

Dipindai dengan CamScanner

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kinerja Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).				Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		100 %	100 %	100 %	100%	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.				BB	BB	BB	BB	BB	B	B	B	B		80 %	80 %	80 %	80 %	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan .				-	1	1	1	1	-	1	1	1		-	100 %	100 %	100%	

Dipindai dengan CamScanner

Untuk kegiatan pelayanan yang sudah berhasil mencapai target yang direncanakan, semuanya merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama yang dibina dengan baik dengan instansi tekhnis yang ada di kecamatan dan konsultasi yang intens ke Dinas Teknis Kabupaten serta Kerjasama yang selalu terjaga dengan Pemerintahan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima yang optimal kepada masyarakat, secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Sungai Tarab.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor.
2. Biaya Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor.
3. Penambahan Personil Aparatur.

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sebagaimana dijelaskan pada BAB II poin 2 Kecamatan Sungai Tarab telah melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diembankan untuk mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan dalam periode Renstra 2021-2026, tahun 2023 Kecamatan Sungai Tarab secara umum dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah dijelaskan pada BAB II Poin 1 Sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah kecamatan, Kecamatan Sungai Tarab adalah Penghubung Pemerintahan Nagari dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, tentunya Kecamatan Sungai Tarab tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari, koordinasi dengan Pemerintahan Nagari inilah yang seringkali menjadi kendala karena adanya kekurang siapan aparatur Pemerintahan Nagari dalam menyikapi instruksi-instruksi, dan pelaksanaan pelayanan publikpun tidak lepas dari permasalahan dan hambatan karena masyarakat menginginkan birokrasi yang lebih singkat dan tidak berlama-lama, berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tarab

No	Permasalahan	No	Hambatan
1	Kurangnya Jumlah Aparatur	1	Jarak yang cukup jauh ke pusat Kabupaten
2	Kurangnya Kapasitas Aparatur	2	Tranportasi umum ke pusat Kabupaten kurang
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana	3	Kurangnya kendaraan dinas pada Kantor Camat Sungai Tarab
4	Biaya Operasional Tidak memadai	4	Kapasitas Aparatur Nagari

Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dikecamatan Sungai Tarab adalah Sungai Tarab Sejahtera Bersama Sedekah (SUTERA BERKAH), yang Inovasi ini dibuat untuk percontohan dalam perbaikan dan upaya menigkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga berasal dari masyarkat umum lainnya. Proses pelaksanaan Sutera Berkah dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi Mengenai Program Sutera Berkah ke unit-unit kerja dan sekolah Di Kecamatan Sungai Tarab.
2. Penyerahan Kotak Sutera Berkah ke unit-unit Kerja dan Sekolah untuk Pengumpulan Dana Sutera Berkah.

Dipindai dengan CamScanner

3. Dana yang dikumpulkan di unit-unit kerja dan sekolah di Pungut oleh BPR Balerong Bunta.
4. Launching Program Sutera Berkah bersamaan dengan penyerahan bantuan perdana Sutera Berkah.
5. Penyaluran dana Sutera Berkah ke Masyarakat yang membutuhkan dan yang telah diseleksi.

Inovasi Sutera Berkah ini akan dimasukan ke dalam Program kegiatan di DPA yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025 mengacu kepada rancangan RKPD Tahun 2025 supaya Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD sehingga prinsip satu kesatuan dalam perencanaan daerah tercapai dan adanya keselarasan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar pemutakhiran Renja OPD dan sebaliknya setelah proses pembandingan, Renja OPD menjadi dasar penambahan dan pengurangan terhadap rancangan awal RKPD.

Kecamatan sebagai OPD pelaksana program-program tersebut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung program yang sudah diamanahkan pada tahun 2024 akan tetapi ada beberapa program baru yang dipandang strategis bagi pencapaian misi daerah yang hendaknya bisa jadi pertimbangan untuk ditambahkan kedalam RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, untuk lebih jelasnya kami paparkan dengan tabel

Dipindai dengan CamScanner

TABEL -C- 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH DATAR

Nama OPD : Kantor Camat Sungai Tarab

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**Cakupan Administrasi perkantoran yang diIata**		**1.586.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**Cakupan Administrasi perkantoran yang diIata**		**1.542.880.570**	
1	**Perencanaan, Pengganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tarab		Nilai LAKIP perangkat daerah		**6.000.000**	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tarab		Nilai LAKIP perangkat daerah		**4.000.000**	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Tarab	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA, RENJA)	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kec.Sungai Tarab	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA, RENJA)	1.000.000	
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	3 dokumen (RKA, DPA, DPPA)	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	3 dokumen (RKA, DPA, DPPA)	2.000.000	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapo ran(LKjIP, LKPJ, LPPD)	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapo ran(LKjIP, LKPJ, LPPD)	1.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

2	**Administrasi Keuangan Derah**	Kec.Sungai Tarab		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan		**1.493.000.000**	**Administrasi Keuangan Derah**	Kec.Sungai Tarab		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan		**1.399.880.294**	
-	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.490.000.000	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/Bulan	1.398.380.294	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	2 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	2 Laporan	1.500.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal		**2.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal		**2.000.000**	
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	2.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	2.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		**37.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		**43.190.943**	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik disediakan	5 Paket	800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik disediakan	5 Paket	1.000.000	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	30 Paket	4.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	10 Paket	3.836.230	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 Paket	3.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	3.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacan dan Perundang-undangan yang disdiakn	1 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacan dan Perundang-undangan yang disdiakn	1 Dokumen	300.000	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.054.713	
-	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah**											**0**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		**24.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		**41.699.333**	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000	
-	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedaan komunikasi, sumber daya air dan Listrik	1 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedaan komunikasi, sumber daya air dan Listrik	1 Laporan	18.000.000	
-	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	1 Laporan	16.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	1 Laporan	23.399.333	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		**23.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Kec.Sungai Tarab		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		**52.110.000**	

Dipindai dengan CamScanner

-	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	20.000.000	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Sungai Tarab	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	47.610.000	
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	43 unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	43 unit	1.500.000	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	3.000.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**50.100.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**48.798.666**	
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**5.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**1.000.000**	
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	1.000.000	
2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**42.100.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**46.798.666**	

Dipindai dengan CamScanner

	Kecamatan												
-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamata	1 Laporan	21.100.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamata	1 Laporan	23.399.333	
-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	23.399.333	
3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec.Sungai Tarab		Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable		**3.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec.Sungai Tarab		Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable		**1.000.000**	
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.000.000	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		**16.600.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		**4.000.000**	
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		**16.600.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		**4.000.000**	
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatnya yang Berpatisipasi dalam Forum Umsyawarah Perencanaan Pembangunan	4 Lembaga	14.900.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatnya yang Berpatisipasi dalam Forum Umsyawarah Perencanaan Pembangunan	5 Lembaga	3.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

	Desa		Desa				Desa		Desa				
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tarab	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**36.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**2.000.000**	
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		**36.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		**2.000.000**	
-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	1 Laporan	36.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	1 Laporan	2.000.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**164.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**10..000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesual Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		**164.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesual Penugasan Kepala Daerah**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		**10.000.000**	
-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	76.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	5.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	88.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional jumlah festival yang diikuti dan MTQ	50 Orang	5.000.000	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**44.600.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**29.000.000**	
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		**44.600.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Sungai Tarab		Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		**29.000.000**	
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasindalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasindalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	1.000.000	
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	8.400.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	18..000.000	
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	33.200.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Sungai Tarab	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	10.000.000	
		Total				**1.897.300.000**			**Total**			**1.636.679.236**	

Dipindai dengan CamScanner

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang disusun menjadi Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025.

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau Masyarakat Tahun 2025 berdasarkan hasil Musrembang yang tersaji dalam Tabel C.32 sebagai Berikut :

Dipindai dengan CamScanner

T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB

Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7

NIHIL

Sungai Tarab, Agustus 2024
CAMAT SUNGAI TARAB

AH.MIZA AZIZ,S.Sos
NIP197109122002121005

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM;
2. Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi;
3. Peningkatkan Infrastruktur Daerah, Penanggulangan Becncana Alam Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peningkatkan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya;
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas;
6. Peningkatan Produksi dan Produktifitas serta Nilai Tambah Hasil Pertanian;
7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata Unggulan Daerah;

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Tarab

Tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Sungai Tarab untuk mewujudkan tercapainya suatu rencana kerja satu tahun ke depan yang telah dituangkan dalam forum SKPD Kabupaten Tanah Datar secara berkesinambungan dengan berpedoman program jangka menengah yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kecamatan Sungai Tarab serta dapat menampung isu-isu aktualitas yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku mudah, cepat, efisien dan tepat waktu.

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

Dipindai dengan CamScanner

MISI :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN

SASARAN

Adapun sasaran dari Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tarab agar terlaksananya program kerja yang telah disusun selama satu tahun ke depan sesuai dengan sistematika standar yang telah ditetapkan serta berkesinambungan.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Usulan Program dan Kegiatan pada Renja Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi dan telaahan terhadap kebutuhan di lapangan, berikut program dan kegiatan usulan Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025 :

1. Program

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

2. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Dipindai dengan CamScanner

Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitas Kunjungan Tamu
   - Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Sub Kegiatan :

   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

   Sub Kegiatan :

   - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Sub Kegiatan :

   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

    Sub Kegiatan :

    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

    Sub Kegiatan :

    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

    Sub Kegiatan :

    - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

    Sub Kegiatan :

    - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyalahgunaan Aset Desa
    - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Dipindai dengan CamScanner

T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Rencana 2025 RKPD			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A. Urusan Kewilayahan									
	Kecamatan						***Rp 1,636,679,236***			***Rp 1,897,300,000***
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						**Rp 1,542,880,570.00**			**Rp 1,586,000,000.00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**			**Rp 4,000,000.00**			**Rp 6,000,000.00**
7.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	STR	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	STR	2 Dokumen, 2 dokumen (RENTRA DAN RENJA)	Rp 1,000,000.00		2 Dokumen, 2 dokumen (RENTRA DAN RENJA)	Rp 2,000,000.00
7.01.01.2.01.04	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	STR	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	STR	3 Dokumen	Rp 2,000,000.00		3 Dokumen	Rp 2,000,000.00
7.01.01.2.01.06	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	STR	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	STR	3 Laporan	Rp 1,000,000.00		3 Laporan	Rp 2,000,000.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Derah**			**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**		100%	**Rp 1,399,880,294.00**		**100%**	**Rp 1,493,000,000.00**
7.01.01.2.02.01	1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	STR	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	STR	11 Orang	Rp 1,398,380,294.00		11 Orang	Rp 1,490,000,000.00
7.01.01.2.02.05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	STR	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	STR	2 Laporan	Rp 1,500,000.00		2 Laporan	Rp 3,000,000.00
7.01.01.2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**			**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**			**Rp 2,000,000.00**			**Rp 2,500,000.00**
7.01.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	STR	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	STR	14 Orang	Rp 2,000,000.00		15 Orang	Rp 2,500,000.00
7.01.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	STR		Persentase terpenuhunya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	STR	100%	**Rp 43,190,943.00**		100%	**Rp 37,000,000.00**
7.01.01.06.04	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	STR	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	STR	5 Paket	Rp 1,000,000.00		5 Paket	Rp 800,000.00
7.01.01.06.05	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	STR	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	STR	10 Paket	Rp 3,836,230.00		10 Paket	Rp 4,000,000.00
7.01.01.06.01	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	STR	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	STR	4 Paket	Rp 3,000,000.00		4 Paket	Rp 3,000,000.00
7.01.01.06.06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	STR	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	STR	2 Dokumen	Rp 300,000.00		2 Dokumen	Rp 1,000,000.00
7.01.01.06.08	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	STR	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	STR	1 Laporan	Rp 5,054,713.00		1 Laporan	Rp 4,000,000.00

Dipindai dengan CamScanner

7.01.01.06.09		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	STR	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	STR	1 Laporan	Rp	30,000,000.00		1 Laporan	Rp	24,200,000.00
7.01.01.2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**		**Rp**	-			**Rp**	-
7.01.01.2.07.01		1	Pengadaan Kendaraan DinasPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	STR	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	STR	1 Unit	Rp	-		1 Unit	Rp	-
7.01.01.2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**		**Rp**	**41,699,333.00**			**Rp**	**24,500,000.00**
7.01.01.2.03.01		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	STR	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	STR	1 Laporan	Rp	300,000.00		1 Laporan	Rp	1,000,000.00
7.01.01.2.03.02		2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	STR	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	STR	1 Laporan	Rp	18,000,000.00		1 Laporan	Rp	7,500,000.00
7.01.01.2.03.04		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	STR	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	STR	1 Laporan	Rp	23,399,333.00		1 Laporan	Rp	16,000,000.00
7.01.01.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**STR**		**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 %**		**Rp**	**52,110,000.00**		**100%**	**Rp**	**23,000,000.00**
7.01.01.09.09		1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	STR	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	STR	6 Unit	Rp	47,610,000.00		6 Unit	Rp	20,000,000.00
7.01.01.09.09.01		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	STR	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	STR	43 unit	Rp	1,500,000.00		43 unit	Rp	3,000,000.00
7.01.01.09.09.06		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	STR	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	STR	2 unit	Rp	3,000,000.00		2 unit	Rp	-
7.01.02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**Rp**	**48,798,666.00**		**100%**	**Rp**	**50,100,000.00**
7.01.02.2.01			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		100%	**Rp**	**1,000,000.00**		100%	***Rp***	***5,000,000.00***
7.01.02.2.01.02		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	STR	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	STR	10 Dokumen	Rp	1,000,000.00		10 Dokumen	Rp	5,000,000.00
7.01.02.2.02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**STR**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**STR**		**Rp**	**46,798,666.00**			**Rp**	**42,100,000.00**
7.01.02.2.02.02		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	STR	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	STR	1 Laporan	Rp	23,399,333.00		1 Laporan	Rp	21,100,000.00
7.01.02.2.02.03		2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	1 Laporan	Rp	23,399,333.00		1 Laporan	Rp	21,000,000.00
7.01.02.2.04			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**75%**	**65%**	**Rp**	**1,000,000.00**		**75%**	**Rp**	**3,000,000.00**
7.01.02.2.04.03		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	STR	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	STR	1 Laporan	Rp	1,000,000.00		1 Laporan	Rp	3,000,000.00
7.01.03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**		**Rp**	**4,000,000.00**		**100%**	**Rp**	**16,600,000.00**
7.01.03.2.01			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**		**Rp**	**4,000,000.00**		**100%**	**Rp**	**16,600,000.00**

Dipindai dengan CamScanner

7.01.03.2.01.01		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	STR	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	STR	4 Lembaga	Rp	3,000,000.00		4 Lembaga	Rp	14,900,000.00
7.01.03.2.01.03		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	1 Laporan	Rp	1,000,000.00		1 Laporan	Rp	1,700,000.00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**STR**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**		**Rp**	**2,000,000.00**			**Rp**	**36,000,000.00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			STR		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**		**Rp**	**2,000,000.00**			**Rp**	**36,000,000.00**
7.01.04.2.01.02		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	STR	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	STR	1 Laporan	Rp	2,000,000.00		1 Laporan	Rp	36,000,000.00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**STR**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**		**Rp**	**10,000,000.00**		**100%**	**Rp**	**164,000,000.00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**		**Rp**	**10,000,000.00**		100%	Rp	164,000,000.00
7.01.05.2.01.02		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	STR	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	STR	150 Orang	Rp	5,000,000.00		150 Orang	Rp	76,000,000.00
7.01.05.2.01.04		2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	STR	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	STR	50 Orang	Rp	5,000,000.00		50 Orang	Rp	88,000,000.00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**		**Rp**	**29,000,000.00**		**100%**	**Rp**	**44,600,000.00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	100%		**Rp**	**29,000,000.00**		100%	**Rp**	**44,600,000.00**
7.01.06.2.01.03		1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	STR	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	STR	20 Dokumen	Rp	1,000,000.00		20 Dokumen	Rp	3,000,000.00
7.01.06.2.01.11		2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	STR	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	STR	10 Dokumen	Rp	18,000,000.00		10 Dokumen	Rp	8,400,000.00
7.01.06.2.01.12		3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	STR	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	STR	6 Dokumen	Rp	10,000,000.00		6 Dokumen	Rp	33,200,000.00

Sungai Tarab, Agustus 2024

CAMAT SUNGAI TARAB

H. MIZA AZIZ, S.Sos

NIP. 197109122002121005

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangkan isu-isu strategis, serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kabupaten Tanah Datar Khususnya, maka dirumuskanlah Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapat setiap tahunnya. Pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya APBD dan sumber dana lainnya rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 050-5889 TAHUN 2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Nama Organisasi (7.01...) KECAMATAN SUNGAI TARAB

Rekapitulasi Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Program / Kegiatan	Rencana 2025 RKPD			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A. Urusan Kewilayahan									
	Kecamatan						***Rp 1,636,679,236***			***Rp 1,897,300,000***
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						**Rp 1,542,880,870.00**			**Rp 1,586,000,000.00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**			**Rp 4,000,000.00**			**Rp 6,000,000.00**
7.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	STR	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	STR	2 Dokumen, 2 dokumen (RENTRA DAN RENJA)	Rp 1,000,000.00		2 Dokumen, 2 dokumen (RENTRA DAN RENJA)	Rp 2,000,000.00
7.01.01.2.01.04	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	STR	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	STR	3 Dokumen	Rp 2,000,000.00		3 Dokumen	Rp 2,000,000.00
7.01.01.2.01.06	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	STR	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	STR	3 Laporan	Rp 1,000,000.00		3 Laporan	Rp 2,000,000.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Derah**			**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**		100%	**Rp 1,399,880,294.00**		**100%**	**Rp 1,493,000,000.00**
7.01.01.2.02.01	1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	STR	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	STR	11 Orang	Rp 1,398,380,294.00		11 Orang	Rp 1,490,000,000.00
7.01.01.2.02.05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	STR	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	STR	2 Laporan	Rp 1,500,000.00		2 Laporan	Rp 3,000,000.00
7.01.01.2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**			**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**			**Rp 2,000,000.00**			**Rp 2,500,000.00**
7.01.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	STR	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	STR	14 Orang	Rp 2,000,000.00		14 Orang	Rp 2,500,000.00
7.01.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	STR		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	STR	100%	**Rp 43,190,943.00**		100%	**Rp 37,000,000.00**
7.01.01.06.04	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	STR	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	STR	5 Paket	Rp 1,000,000.00		5 Paket	Rp 800,000.00
7.01.01.06.05	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	STR	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	STR	10 Paket	Rp 3,836,230.00		10 Paket	Rp 4,000,000.00
7.01.01.06.01	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	STR	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	STR	4 Paket	Rp 3,000,000.00		4 Paket	Rp 3,000,000.00
7.01.01.06.06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	STR	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	STR	2 Dokumen	Rp 300,000.00		2 Dokumen	Rp 1,000,000.00

Dipindai dengan CamScanner

7.01.01.06.08		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	STR	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	STR	1 Laporan	Rp	5,054,713.00		1 Laporan	Rp	4,000,000.00
7.01.01.06.09		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	STR	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	STR	1 Laporan	Rp	30,000,000.00		1 Laporan	Rp	24,200,000.00
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**				**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**		**Rp**	**-**			**Rp**	**-**
7.01.01.2.07.01		1	Pengadaan Kendaraan DinasPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	STR	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	STR	1 Unit	Rp	-		1 Unit	Rp	-
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**				**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**		**Rp**	**41,699,333.00**			**Rp**	**24,500,000.00**
7.01.01.2.03.01		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	STR	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	STR	1 Laporan	Rp	300,000.00		1 Laporan	Rp	1,000,000.00
7.01.01.2.03.02		2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	STR	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	STR	1 Laporan	Rp	18,000,000.00		1 Laporan	Rp	7,500,000.00
7.01.01.2.03.04		3	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	STR	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	STR	1 Laporan	Rp	23,399,333.00		1 Laporan	Rp	16,000,000.00
7.01.01.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		STR		**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 %**		**Rp**	**52,110,000.00**		**100%**	**Rp**	**23,000,000.00**
7.01.01.09.09		1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	STR	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	STR	6 Unit	Rp	47,610,000.00		6 Unit	Rp	20,000,000.00
7.01.01.09.09.01		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	STR	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	STR	43 unit	Rp	1,500,000.00		43 unit	Rp	3,000,000.00
7.01.01.09.09.06		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	STR	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	STR	2 unit	Rp	3,000,000.00		2 unit	Rp	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**Rp**	**48,798,666.00**		**100%**	**Rp**	**50,100,000.00**
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		100%	**Rp**	**1,000,000.00**		100%	***Rp***	***5,000,000.00***
7.01.02.2.01.02		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	STR	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	STR	10 Dokumen	Rp	1,000,000.00		10 Dokumen	Rp	5,000,000.00
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		STR		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	STR		**Rp**	**46,798,666.00**			**Rp**	**42,100,000.00**
7.01.02.2.02.02		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	STR	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	STR	1 Laporan	Rp	23,399,333.00		1 Laporan	Rp	21,100,000.00
7.01.02.2.02.03		2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	1 Laporan	Rp	23,399,333.00		1 Laporan	Rp	21,000,000.00
7.01.02.2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	75%	65%	**Rp**	**1,000,000.00**		75%	**Rp**	**3,000,000.00**
7.01.02.2.04.03		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	STR	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	STR	1 Laporan	Rp	1,000,000.00		1 Laporan	Rp	3,000,000.00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	100%		**Rp**	**4,000,000.00**		**100%**	**Rp**	**16,600,000.00**

Dipindai dengan CamScanner

7.01.03.2.01			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	100%		**Rp**	**4,000,000.00**		100%	**Rp**	**16,600,000.00**
7.01.03.2.01.01		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	STR	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	STR	4 Lembaga	Rp	3,000,000.00		4 Lembaga	Rp	14,900,000.00
7.01.03.2.01.03		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	STR	1 Laporan	Rp	1,000,000.00		1 Laporan	Rp	1,700,000.00
7.01.04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	STR		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	100%		**Rp**	**2,000,000.00**			**Rp**	**36,000,000.00**
7.01.04.2.01			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	STR		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	100%		**Rp**	**2,000,000.00**			**Rp**	**36,000,000.00**
7.01.04.2.01.02		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	STR	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	STR	1 Laporan	Rp	2,000,000.00		1 Laporan	Rp	36,000,000.00
7.01.05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	STR		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	100%		**Rp**	**10,000,000.00**		**100%**	**Rp**	**164,000,000.00**
7.01.05.2.01			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	100%		**Rp**	**10,000,000.00**		100%	**Rp**	**164,000,000.00**
7.01.05.2.01.02		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	STR	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	STR	150 orang	Rp	5,000,000.00		150 orang	Rp	76,000,000.00
7.01.05.2.01.04		2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	STR	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	STR	50 Orang	Rp	5,000,000.00		50 Orang	Rp	88,000,000.00
7.01.06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	100%		**Rp**	**29,000,000.00**		**100%**	**Rp**	**44,600,000.00**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	100%		**Rp**	**29,000,000.00**		100%	**Rp**	**44,600,000.00**
7.01.06.2.01.03		1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	STR	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	STR	20 Dokumen	Rp	1,000,000.00		20 Dokumen	Rp	3,000,000.00
7.01.06.2.01.11		2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	STR	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	STR	10 Dokumen	Rp	18,000,000.00		10 Dokumen	Rp	8,400,000.00
7.01.06.2.01.12		4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	STR	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	STR	6 Dokumen	Rp	10,000,000.00		6 Dokumen	Rp	33,200,000.00

Sungai Tarab, Agustus 2024

CAMAT SUNGAI TARAB

AFLMIZA AZIZ, S.Sos

NIP. 197109122002121005

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tarab 2025 sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, evaluasi-evaluasi yang dideskripsikan didalam Renja ini merupakan hasil pembahasan bersama Tim pembuat Rancangan Awal Renja dan diharapkan berguna bagi pihak yang memerlukan,

Program-program dan Kegiatan – kegiatan yang diusulkan merupakan hasil evaluasi dan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari pemangku kepentingan dan hasil informasi yang didapatkan dilapangan mengenai permasalahan-permasalahan pelayanan, keamanan dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap Usulan-usulan program dan kegiatan dari Kecamatan Sungai Tarab ini dapat terakomodir demi untuk kemajuan Masyarakat Sungai Tarab.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tarab 2025 ini bisa menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat bagi penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran Sementara Tahun 2025, serta berkontribusi positif terhadap pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Sungai Tarab.

CAMAT SUNGAI TARAB

AH.MIZA AZIZ,S.SOS
NIP. 197109122002121005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAI TARAB
JL. RAYA SUNGAI TARAB (PAGARUYUNG - BUKIT TINGGI KM 5) TELP. 0752 – 579088

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TARAB
Nomor : 16 /Perencanaan&Keuangan-2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

CAMAT SUNGAI TARAB

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyususunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Tarab.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5758) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjasi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Kedua Keputusan Camat Sungai Tarab
Nomor : 15 /Set-2024
Tanggal :

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 , tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50).
16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tim Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025 dengan daftar terlampir

Kedua : Kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Dimaksud diktum kesatu diberikan tugas :
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Berdasarkan Renstra OPD.
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
5. Menelaah rancangan awal RKPD.
6. Perumusan Tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan tujuan dan sasaran daerah.
7. Menelaah usulan program dan kegiatan.
8. Perumusan kegiatan prioritas.
9. Penyajian Awal dokumen rancangan Renja OPD.

Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sungai Tarab Tahun sebelumnya, target kinerja Tahun 2025 yang terukur : Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran, rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan output dan outcome serta sumber pembiayaan.

Keempat : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Sungai Tarab Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Camat Sungai Tarab.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan Di Sungai Tarab
Pada Tanggal, Januari 2024

CAMAT SUNGAI TARAB

A.H.MIZA AZIZ,S.Sos
Penata Tk.I,
NIP. 197109122002121005

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Kesatu Keputusan Camat Sungai Tarab
Nomor : 16 /Set-2024
Tanggal : Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	A.H. MIZA AZIZ, S.Sos	Camat Sungai Tarab	Ketua
2.	SRI HANDAYANI, S.IP.MM	Sekretaris Camat Sungai Tarab	Wakil Ketua
3.	VIVI RIANTI, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Camat Sungai Tarab	Sekretaris
4.	TAMSIL, SE	Kasi PMD Camat Sungai Tarab	Anggota
5.	RINA FRANSISCA, S.KOM	Kasi Pelum Camat Sungai Tarab	Anggota
6.	ULFA REPELITA	Kasi Pemerintahan Camat Sungai Tarab	Anggota
7.	PENDRIYASNI, S.AP	Kasubag Umum dan Kepegawaian Camat Sungai Tarab	Anggota

Ditetapkan Di Sungai Tarab
Pada Tanggal, Januari 2024

CAMAT SUNGAI TARAB

A.H.MIZA AZIZ,S.Sos
Penata Tk.I,
NIP. 197109122002121005

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

KANTOR CAMAT
SUNGAYANG

JALAN RAYA BATUSANGKAR – LINTAU KM 6 SUNGAYANG – BATUSANGKAR 27295
TELP / FAX (0752) 71056

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAYANG

Jln. Raya Batusangkar Lintau KM. 6 Sungayang-Batusangkar
27295Tlp. (0752)71056 Fax. (0752)71056

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAYANG
NOMOR : 059/ 09.1/SGY-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025 KANTOR CAMAT SUNGAYANG

CAMAT SUNGAYANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Kedua Penyusunan Renja SKPD pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN CAMAT SUNGAYANG
NOMOR : 059 / 09.1 /SGY-2024
TANGGAL : 10 - 01 - 2024

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;

10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Sungayang Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir

KEDUA : Kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan tugas:
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereviw hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Sungayang Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Camat Sungayang

KEEMPAT.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN CAMAT SUNGAYANG
NOMOR : 059 / 09.1 /SGY-2024
TANGGAL : 10 - 01 - 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungayang
Pada tanggal 10 – 01 – 2024
CAMAT SUNGAYANG

NARTI, S.STP
NIP. 19791205 199810 2 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth :
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung

LAMPIRAN KESATU KEPUTUSAN CAMAT SUNGAYANG
NOMOR : 059 / 09.1 /SGY-2024
TANGGAL : 10 - 01 - 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NARTI, S.STP	Camat Sungayang	Ketua
2.	YOGHI ALFINDER, S.STP	Sekretaris Kecamatan Sungayang	Wakil Ketua
3.	LINDA AMELIA, A.Md	Kasubag Perkeu p/k Camat Sungayang	Sekretaris
4.	YERI TRIANDA, ST	Kasi Tapem p/k Camat Sungayang	Anggota
5.	REZA MAHAR DINI, SE	Kasi PMD p/k Camat Sungayang	Anggota
6.	ELVIA, S.SOS	Kasi Pelum p/k Camat Sungayang	Anggota
7.	MAISYAF HENDRI, S.SOS	Kasi Kessos p/k Camat Sungayang	Anggota
8.	SEPDAWENDAHAYALIS, SE	Kasubag Umpeg p/k Camat Sungayang	Anggota

CAMAT SUNGAYANG

NARTI, S.STP
NIP. 19791205 199810 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 tepat pada waktunya.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sungayang tahun 2025 sesuai dengan Undang-undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sungayang Tahun 2025 dimaksudkan agar Kecamatan Sungayang mempunyai arah, kebijakan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 untuk periode tahunan yang terkait dengan APBD dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 dan kami mengharapkan masukan untuk kesempurnaan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 ini.

Sungayang, Juli 2024

CAMAT SUNGAYANG

NARTI, S.STP

Pembina Tk. I (IV/B)

NIP. 19791205 199810 2 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Sungayang 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungayang 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungayang 21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja 35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungayang.... 36
3.3 Program dan Kegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Pada Perubahan Anggaran Tahun 2025..... 45

BAB V PENUTUP 49

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 49
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 49
5.3 Rencana Tindak Lanjut 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan lansung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Renja OPD menjadi bahan pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD. Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Renja OPD

Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

b) Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Rancangan Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah Rancangan RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD

c) Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD, Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan simtem perencanaan bawah atas

(bottom-up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja OPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten

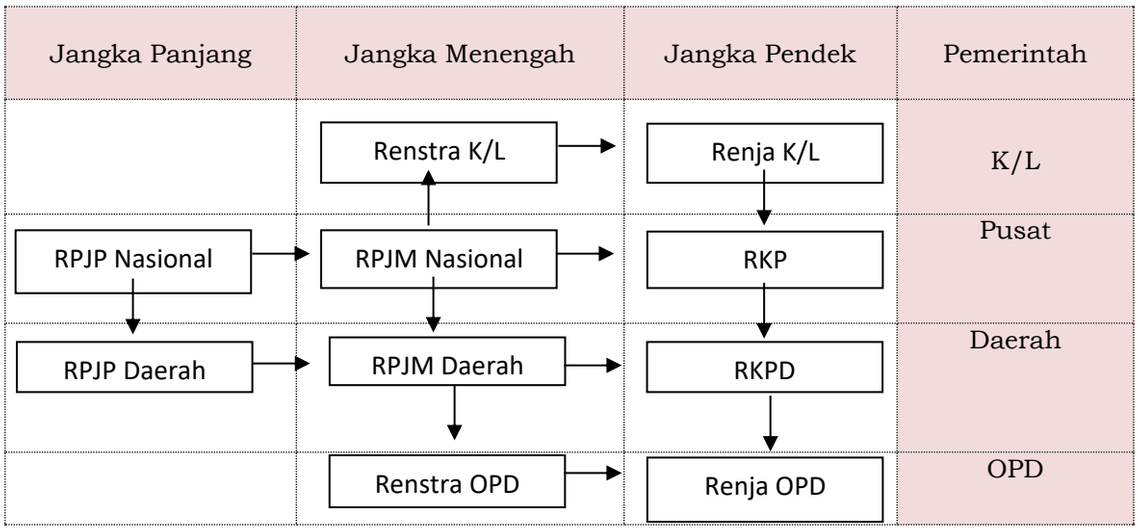
d) Penetapan Renja

Penetapan renja merupakan proses verivikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara peyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD,RPJMD,Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada Rancangan RKPD dan Renstra OPD dimana Rancangan RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan RKPD, sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, dan RENJA OPD :



1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkunga Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerinyah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancanga Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah dan Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah, Serat tata Cara Perubahaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana Kerja pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi pemerintahan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nonor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nonor 9) sebagaimana telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturaan Daerah Nonor 11 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sungayang dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai Program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar serta sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan dalam periode Renstra 2021-2026, dan Perencanaan Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungayang tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran–sasaran strategis, program–program pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan.
1.4 Sistimatika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungayang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungayang.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungayang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008, Kecamatan Sungayang mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungayang Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA- Perangkat Daerah) Tahun 2023.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Kecamatan Sungayang selaku Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan Sungayang dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungayang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun 2023 (n-2), pelaksanaan kinerja Kecamatan Sungayang ditunjang dengan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Tanah Datar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Derah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01				**Urusan Kewilayahan**									
7.01				**Kecamatan**									
7.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**								
7.01	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**								
7.01	**01**	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen (Renstra dan Renja)	4 Dokumen (Renstra dan Renja)	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	100%	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	8 Dokumen (Renstra dan Renja)	66,67%
7.01	**01**	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-	12 dokumen (DPA, DPAP)	4 dokumen (DPA, DPAP)	2 dokumen (DPA, DPAP)	2 dokumen (DPA, DPAP)	100%	2 dokumen (DPA, DPAP)	8 dokumen (DPA, DPAP)	66,67%

					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
7.01	**01**	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	18 dokumen (LKJIP, LKPJ, IKK)	6 dokumen (LKJIP, LKPJ, IKK)	3 dokumen (LKJIP, LKPJ, IKK)	3 dokumen (LKJIP, LKPJ, IKK)	100%	3 dokumen (LKJIP, LKPJ, IKK)	12 dokumen (LKJIP, LKPJ, IKK)	66,67%
7.01	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**								
7.01	**01**	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang/ bulan	28 orang/ bulan n	14 orang/ bulan	14 orang/ bulan	100%	14 orang/ bulan	56 orang/ bulan	66,67%
7.01	**01**	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	6 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	66,67%
7.01	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**								
7.01	**01**	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72 orang	24 orang	12 orang	12 orang	100%	12 orang	48 orang	66,67%
7.01	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**								
7.01	**01**	2.06	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	48 paket	16 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	32 paket	66,67%

7.01	**01**	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	30 paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	60 Paket	66,67%
7.01	**01**	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	164.104 lembar foto copy, 3 paket	29.104 lembar foto copy, 6 paket	25.000 lembar foto copy, 3 paket	25.000 lembar foto copy, 3 paket	100%	25.000 lembar foto copy, 3 jenis cetak	70.104 lembar foto copy, 3 jenis cetak	66,67%
7.01	**01**	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	66,67%
7.01	**01**	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	66,67%
7.01	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang disediakan**								
7.01	**01**	2.07	06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	11 unit	6 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	6 unit	54,54%
7.01	**01**	2.07		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan	4 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**								
7.01	**01**	2.08	01	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	940 lembar materai 10.000	200lembar materai	0 lembar materai 10.000	0 lembar materai 10.000	0%	0 lembar materai 10.000, 1 THL	200 lembar materai 10.000, 1 THL	21,28%
7.01	**01**	2.08	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	72 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	66,67%

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
7.01	**01**	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 paket, 6 THL	20 paket, 2 THL	10 paket, 1 THL	10 paket, 1 THL	100%	10 paket, 1 THL	40 jenis, 4, 1 THL	66,67%
7.01	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**								
7.01	**01**	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit roda 4 , 18 unit roda dua	2 uni rida 4, 6 unit roda 2	1 unit roda 4 , 3 unit roda dua	1 unit roda 4 , 3 unit roda dua	100%	1 unit roda 4 , 4 unit roda dua	4 unit roda 4 , 13 unit roda dua	66,67%
7.01	**01**	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	32 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	62 unit	64,58%
7.01	**01**	2.09	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	8 unit	66,67%
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								
7.01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**								

7.01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	20 dokumen	66,67%
7.01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								
7.01	02	2.02	**02**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 laporan	2 laporan	1 laporan/ 1 orang THL	1 laporan / 1 orang THL	100%	2 laporan, 1 orang THL	5 laporan, 1 orang THL	66,67%
7.01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	66,67%
7.01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**								
7.01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	66,67%

7.01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								
7.01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**								
7.01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 lembaga unsur	10 lembaga unsur	5 lembaga unsur	5 lembaga unsur	100%	5 lembaga unsur	20 lembaga unsur	66,67%
7.01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	0%	1 laporan	4 laporan	66,67 %
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								
7.01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**								
7.01	**04**	**2.01**	**02**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	54 mesjid	18 mesjid	9 mesjid	9 mesjid	0%	0 mesjid	27 mesjid	50%

					Masyarakat								
7.01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								
7.01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**								
7.01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 cabang, 18 organisasi (paskibra, pramuka dan pemuda)	4 cabang , 6 organisasi	2 cabang , 3 organisasi	2 cabang , 3 organisasi	100%	2 cabang , 3 organisasi	4 cabang , 12 organisasi	66,67%
7.01	05	2.01	**04**	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	30 cabang seni dan budaya, 276 cabang MTQ	10 cabang seni dan budaya, 92 cabang MTQ	5 cabang seni dan budaya, 46 cabang MTQ	5 cabang seni dan budaya, 46 cabang MTQ	1000%	5 cabang seni dan budaya, 46 cabang MTQ	20 cabang seni dan budaya, 184 cabang MTQ	66,67

					Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
7.01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								
7.01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**								
7.01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	20 dokumen	66,67%
7.01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	54 dokumen	18 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	25 dokumen	46,30%
7.01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	30 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	20 dokumen	66,67%

CAMAT SUNGAYANG

NARTI, S.STP
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP.19791205 199810 2 001

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Kecamatan Sungayang Kab. Tanah Datar sepanjang Tahun 2023 :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa dokumen RENJA dan RENSTRA Kecamatan Sungayang tahun 2023 telah selesai dibuat dan telah mulai di laksanakan kegiatannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sungayang.
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksaan Anggartan (DPPA) Tahun 2023 selesai dibuat. Pada anggaran perubahan ada tambahan anggaran untuk belanja modal personal komputer untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sungayang.
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   Output dari kegiatan ini adalah Laporan Kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kecamatan Sungayang tahun 2023. Pembuatan laporan-laporan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habis tahun berjalan (setelah 31 Desember 2023). Per 31 Desember 2023 semua laporan telah dapat dikatakan telah selesai dan tinggal penyempurnaan saja.

II. Administrasi Keuangan perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Output dari kegiatan ini adalah jumlah gaji dan tunjangan yang telah terealisasikan kepada seluruh ASN Kecamatan Sungayang.
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun
   Penyusunan laporan keuangan juga serupa dengan laporan kinerja, dibuat setelah 31 Desember 2023. Per 5 Januari 2024 telah mulai dilakukan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023, dan ditargetkan akan selesai pada bulan Februari 2024.

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
   Realisasi kinerja tidak sesuai dengan target karena di tahun 2023 tidak banyak ASN mengikuti Diklat sehingga realisasi keuangan tidak mencapai target yg telah di tentukan.

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Kecamatan Sungayang terpenuhi dan berfungsi dengan baik.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Kecamatan Sungayang terpenuhi dengan baik.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan barang cetakan amplop dinas, map dan jasa photocopy terpenuhi dengan baik
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk rapat internal Kecamatan Sungayang maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana dengan baik

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

1. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
   Tahun 2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak ada tapi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya di anggarkan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

VI. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   Realiasi kinerja tidak sesuai dengan target, karena pada anggaran perubahan anggaran sub kegiatan penyedian Surat menyurat di refocusing sehingga realisasi menjadi 0% tapi tidak mempengaruhi kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancar
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan kantor terlaksana selama 1 tahun

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 2 Kendaraan roda 4 dan 9 kedaraan roda 2 kendaraan dinas di Kecamatan Sungayang
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Realisasi kinerja sesuai target, telah terpenuhinya semua kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin di Kecamatan Sungayang.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Realisasi kinerja sesuai target, telah terpenuhinya semua kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin di Kecamatan Sungayang

VIII. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Realisasi Kinerja sesuai dengan target, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan realisasi kegiatan dan keuangan 100%.

IX. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan PATEN di Kecamatan Sungayang dan terpenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya target masyarakat yang telah wajib merekam KTP.

X. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah melakukan monitoring ke nagari-nagari mendampingi petugas kolektor pemungutan PBB kepada masyarakat agar target pemungutan PBB tercapai.

XI. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat Nagari dan Kecamatan dimana terdapat 5 nagari di kecamatan Sungayang yang melaksanakan Musrenbang dan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dan telah terealisasikan pada triwulan I penganggaran.

2. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Realisasi Kinerja sesuai dengan target, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan realisasi kegiatan dan keuangan 100%.

XII. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

   Kinerja sesuai dengan target kegiatan walupun adanya pengurangan anggaran tapi kegiatan ini tetap terlaksana dan realisasi kegiatan dan keuangan 100%

XIII. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target setelah adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Paskibra untuk HUTRI pelaksanaannya bisa dengan anggota Paskibra 12 orang dan adanya pengurangan kegiatan fisik cabang olah raga Voli dan bola kaki di tiadakan

2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan telah terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan yg melombakan 13 cabang kegiatan ini terlaksana dengan baik

XIV. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan telah terlaksananya penyusunan APB di 5 nagari di kecamatan Sungayang dan kegiatan ini terlaksana dengan baik

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dan kegiatan ini terlaksana dengan baik

3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan terlaksananya kegiatan Lembaga Unsur di Kecamatan Sungayang dan pembinaan ke nagari-nagari, kegiatan ini terlaksana dengan baik

Berdasarkan realisasi capaian kinerja keuangan, secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungayang telah mencapai target.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Pelayanan publik yang ingin dicapai dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Pada dimensi internal, pelayanan publik merupakan salah satu isu utama sejalan dengan tuntutan demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi pada hakekatnya menyuarakan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemegang kekuasaan, yang dengan demikian suara masyarakat diletakkan pada derajat yang paling tinggi. Semangat demokratisasi dalam peneyelenggaraan pemerintahan akan menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu penyelenggaraan fungsi pelayanan public kepada masyarakat dan memungkinkan untuk menyelesaikan komplain (bila ada) dengan pihak penyelengaran pelayanan. Pada sisi perencanaan, penyelengaraan pelayanan publik yang terdesentralisasi akan meningkatkan responsifitas (daya tanggap) terhadap kebutuhan lokal dan membantu Pemerintah daerah (lembaga penyedia layanan) mengindentifikasi dan memahami karakteristik khas masyarakat setempat.

Pada dimensi eksternal, pelayanan publik tidak akan memainkan kunci dalam mengahadapi tatangan globalisasi. Paling tidak tantangan globalisasi tersebut memerlukan jawaban dalam hal peningkatan daya saing (competitivanss) dan daya tarik (Attractiveness) baik ditingkat regional maupun internasional.

Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan, maka perlu dilakukan pelayanan prima yang merupakan palayanan yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan, keinginan, dan harapan masyarakat yang mempunyai nilai yang tinggi dan bermutu (berkualitas). Dengan demikian dapat ditarik pengertian secara sederhana bahwa pelayanan bermutu.

Lebih jauh lagi hakekat dari pelayanan umum yang prima adalah berupa upaya-upaya sebagai berikuit :

a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasilguna (efektif dan efisien).

c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan inovasi peran serta masyarakat secara luas.

Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima, pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Sederhana, artinya dalam pelaksanaan tidak menyulitkan, prosedurnya, tidak berbelit-belit dan persyaratannya mudah dipenuhi.
2. Terbuka, artinya masyarakat ingin dilayani secara terbuka, transparan sejujur-jujurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lancar, artinya pemberian pelayanan harus bekerja secara ikhlas dan sepenuh hati, dengan didukung sarana dan prasarana penunjang untuk kecepatan pelayanan itu sendiri.
4. Tepat, artinya pemberian pelayanan dapat dilakukan secara tepat arah, sasaran jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang dan tepat waktu.
5. Lengkap, artinya apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat terhadap suatu pelayanan tertentu dapat tersedia secara lengkap.
6. Wajar, artinya pelayanan dilakukan sebagaimana terjangkau, artinya biaya pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.

Setelah dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat suatu pelayanan publik yang prima, sehingga dengan demikian persepsi masyarakat terhadap kinerja reformasi dan birokrasi pemerintah akan menjadi lebih baik lagi.

Yang pada akhirnya nanti dapat dibangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi pemerintah akan memiliki legitimasi yang kuat dihadapan masyarakat dan pada sisi lain masyarakat akan mendapat pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah.

Berikut tabel Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Sungayang :

Tabel T-C . 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Sungayang

Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				BB	BB	BB	BB	BB	B	B	B	B		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan				-	1	1	1	1	-	1	1	1		-	100 %	100 %	100 %	100 %

CAMAT SUNGAYANG

NARTI, S.STP
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP.19791205 199810 2 001

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SUNGAYANG

Setelah melalui pengkajian atas masalah-masalah yang sedang berkembang, dari agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2021–2026, didapatkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan Sungayang yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan

   Peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat yang berurusan ke Kecamatan Sungayang dan peningkatan pengelolaan tata pemerintahan diperlukan guna menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas SDM dan sarana dan prasarana pemerintahan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerintahan.

b. Bidang Pemerintahan Nagari.

   Terciptanya pemerintahan Nagari yang baik dan bersih sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan kecamatan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas aparatur Nagari, pembinaan terhadap lembaga dan organisasi Nagari serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Nagari.

c. Bidang Keagamaan, Kesenian, Olah Raga dan Sosial Budaya

   Kegiatan di bidang keagamaan, kesenian, olah raga dan sosial budaya ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Sungayang telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya perlu untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal pembinaan terhadap lembaga-lembaga kesenian, agama, sosial budaya dan olah raga.

d. Bidang Ekonomi

   Masih banyaknya keluarga miskin di Kecamatan Sungayang, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi jumlah keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Serta perlu dilakukan update data jumlah keluarga tidak mampu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

Perlu adanya evaluasi terhadap KK yang mendapat bantuan baik dari daerah maupun pusat (Bantuan Program Nasional) sehingga yang sudah tidak layak dibantu dapat dikeluarkan dari data penerima bantuan, sedangkan yang layak dibantu dapat masuk kedalam data penerima bantuan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

RKPD tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisa kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala proiritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan. Tabel review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 sebagai berikut ;

Tabel-TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar

Nama Perangkat Daerah :
Kecamatan Sungayang

	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Kewilayahan				**1.544.205.000,00**	**Urusan Kewilayahan**				**2.051.328.000,00**	
	Kecamatan				**1.544.205.000,00**	**Kecamatan**				**2.051.328.000,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**1.279.400.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**1.740.728.000,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**13.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**18.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	4.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sungayang	Jumlah dokumen laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sungayang	Jumlah dokumen laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	4.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**1.084.100.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**1.361.500.000,00**	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sungayang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.082.100.000,00	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sungayang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang/bulan	1.357.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sungayang	Jumlah dokumen laporan	2 laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sungayang	Jumlah dokumen laporan	2 laporan	4.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**4.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**10.000.000,00**	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sungayang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang ASN	4.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sungayang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang ASN	10..000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungayang	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**80.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**151.000.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	5 paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	5 paket	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	8.500000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	12.000.000,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dalam Kec. Dlm Kab dan Luar Prop	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	4.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dalam Kec. Dlm Kab dan Luar Prop	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	8.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sungayang	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Paket	500.000,00	Penyediaan buku bacaan dan perundang-undangan	Kecamatan Sungayang	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Paket	2.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	37.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	90.000.000,00	

	dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase barang milik daerah yang disediakan**	**100%**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang disediakan**	**100%**	**25.000.000,00**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan kantor	0 unit	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah peralatan kantor	2 unit	25.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan		-	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan		-	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang diperbaiki		-	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang diperbaiki		-	
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sungayang	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan		-	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sungayang	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**41.300.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**69.228.000,00**	
	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 laporan	500.000,00	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 laporan	23.464.000,00	

	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	18.000.000,00	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	18.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.800.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	27.764.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sungayang	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**57.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**106.000.000,00**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	45.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	82.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungayang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	2.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungayang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	4.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungayang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungayang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	20.000.000,00	

			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sungayang	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**30.400.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**41.000.000,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**	**100%**	**5.000.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**	**100%**	**5.000.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	5.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	5.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sungayang	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**20.400.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Kecamatan Sungayang	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**33.000.000,00**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 laporan	28.000.000,00	

			di Wilayah Kecamatan					di Wilayah Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	5.400.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	5.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**100%**	**5.000.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**100%**	**3.000.000,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	5.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	3.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**13.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**19.000.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**13.000.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**19.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungayang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	11.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungayang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	15.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	4.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**25.100.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**15.000.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	25.100.000,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	**15.000.000,00**	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 laporan	25.100.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sungayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 laporan	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**128.005.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**125.600.00000**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**128.005.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**125.600.000,00**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Sungayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 orang	43.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Sungayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 orang	60.000.000,00	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sungayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	85.005.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sungayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	65.600.000,00	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**68.300.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**110.000.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**68.300.000,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**110.000.000,00**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	9.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	2 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban umum	2 dokumen	0	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Laporan	12.500.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	6 Laporan	35.000.000,00	

								Kemasyarakatan			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Laporan	46.800.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Laporan	65.000.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungayang Tahun 2025 merupakan rencana kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungayang 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungayang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sungayang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sungayang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergis antara dokumen perencanaan.

Tabel T-C 32

Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Nihil	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 69 Tahun 2011, merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta untuk Penyusunan Reencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daerah tahun 2021-2026 dapat menjawab kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan dengan program prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan pemukiman dengan program prioritas Penyediaan Perumahan Layak dan Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan program prioritas Pengembangan 3 Kawasan pariwisata, pengembangan 5 kawasan Ekonomi khusus, Pengembangan 3 kawasan Industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan energi dengan program prioritas EBT dan Konservasi Energi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan pangan dengan program prioritas Peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian
7. Penanggulangan kemiskinan dengan program prioritas jaminan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman dengan program prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat,laut udara dan inter-moda) dan pengembangan telekomunikasi dan informatika

9. Pembangunan wilayah dengan program prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan, reforma agraria, pencegahan dan penanggulangan bencana dan percepatan pembangunan papua
10. Politik, Hukum dan pertahanan keamanan dengan program prioritas penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum dan reformasi birokrasi

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SUNGAYANG.

TUJUAN

1. Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk mewujudkan tercapainya suatu rencana kerja satu tahun kedepan, merupakan unsur penting dalam memulai suatu perencanaan baik dalam merencanakan program dan kegiatan maupun dalam merencanakan pengangaran (Budget) pada setiap Perangkat Daerah setiap tahunnya.

   Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dalam bentuk penyusunan LKJIP setiap akhir tahun anggaran
2. Renja merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

SASARAN

Sasaran dari rencana kerja adalah agar terlaksananya program kerja yang telah disusun selama satu tahun kedepan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sasaran dari penyusunan Renja adalah :

1. Tertib administrasi dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Meningkatnya pengelolan adimistrasi perkantoran.
3. Meninkatnya sistim perencanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatnya pengukuran kinerja.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2025 Kecamatan Sungayang menyelenggarakan Urusan kewilayahan yang terdiri 6 program 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Tahun anggaran 2025 Kecamatan Sungayang memiliki anggaran sebesar Rp. **1.251.571.803,00**,-

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026

Secara umum, program dan kegiatan Kecamatan Sungayang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi / Kabupaten / Kota :Sumatera Barat/Tanah Datar

Kecamatan Sungayang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**Urusan Kewilayahan**				**1.521.571.803,00**				**2.285.500.000,00**
7	01				**Kecamatan**				**1.521.571.803,00**				**2.285.500.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Administrasi kantor yang ditata**		**100%**	**1.442.079.407,00**			**100%**	**1.924.500.000,00**
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**		**100%**	**6.000.000,00**			**100%**	**18.500.000,00**
7	**01**	**01**	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungayang	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	4.500.000,00			2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	5.000.000,00
7	**01**	**01**	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sungayang	4 dokumen	0,00			4 dokumen	8.500.000,00

7	**01**	**01**	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kecamatan Sungayang	3 dokumen	1.500.000,00			3 dokumen	5.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**		**100%**	**1.263.965.007,00**			**100%**	**1.506.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.02**	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sungayang	13 orang/bulan	1.261.265.007,00			13 orang/bulan	1.500.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kecamatan Sungayang	2 laporan	2.700.000,00			2 laporan	6.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**		**100%**	**1.650.000,00**			**100%**	**12.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.05**	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Sungayang	10 orang ASN	1.050.000,00			13 orang ASN	12.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**48.900.000,00**			**100%**	**170.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Sungayang	8 paket	1.000.000,00			8 paket	4.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sungayang	16 paket	7.500.000,00			17 paket	15.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaaan yang Disediakan	Kecamatan Sungayang	3 paket	3.000.000,00			3 paket	13.000.000,00

7	**01**	**01**	**2.06**	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Sungayang	2 Dokumen	0,00			2 Dokumen	3.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sungayang	12 laporan	13.500.000,00			12 laporan	40.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Kec. Dlm Kab dan Luar Prop	12 laporan	23.900.000,00			12 laporan	95.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**0,00**				**25.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**	05	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sungayang	3 unit	0,00			3 unit	25.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**64.564.400,00**			**100%**	**72.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**	01	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sungayang	14 laporan	23.064.000,00			150 laporan	25.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Sungayang	12 laporan	18.000.000,00			12 laporan	18.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kecamatan Sungayang	12 laporan	23.500.000,00			12 laporan	29.000.000,00

						Kantor yang Disediakan							
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**		**100%**	**57.000.000,00**			**100%**	**121.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Sungayang	5 unit	54.000.000,00			5 unit	90.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Sungayang	18 unit	1.000.000,00			20 unit	6.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Sungayang	3 unit	2.000.000,00			3 unit	25.000.000,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**24.564.400,00**			**100%**	**41.000.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**		**100%**	**450.000,00**			**100%**	**5.000.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungayang	8 dokumen	450.000,00			1 dokumen	5.000.000,00

7	**01**	**01**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**23.664.400,00**			**100%**	**33.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.02**	**02**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	14 laporan	23.214.400,00			14 laporan	28.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**	**03**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	2 laporan	450.000,00			2 laporan	5.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**		**100%**	**450.000,00**			**100%**	**3.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.04**	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	5 laporan	450.000,00			5 laporan	3.000.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**3.450.000,00**			**100%**	**25.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		**100%**	**3.450.000,00**			**100%**	**25.000.000,00**

7	**01**	**03**	**2.01**	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungayang	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00			5 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
7	**01**	**03**	**2.01**	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungayang	1 laporan	450.000,00			1 laporan	5.000.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**0,00**			**100%**	**15.000.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**		**100%**	**0,00**			**100%**	**15.000.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**	**02**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		5 laporan	0,00			5 laporan	15.000.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**23.027.996,00**			**100%**	**160.000.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**		**100%**	**23.027.996,00**			**100%**	**160.000.000,00**

7	**01**	**05**	**2.01**	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Sungayang	70 orang	3.000.000,00			70 orang	85.000.000,00
7	**01**	**05**	**2.01**	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sungayang	50 orang	20.027.996,00			50 orang	75.000.000,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**28.450.000,00**			**100%**	**120.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**100%**	**28.450.000,00**			**100%**	**120.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sungayang	5 dokumen	450.000,00			5 dokumen	20.000.000,00

7	**01**	**06**	**2.01**	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Sungayang	2 dokumen	0			2 dokumen	6.000.000,00
7	**01**	**06**	**2.01**	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Sungayang	3 dokumen	18.000.000,00			3 dokumen	35.000.000,00
7	**01**	**06**	**2.01**	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungayang	5 dokumen	10.000.000,00			5 dokumen	65.000.000,00

CAMAT SUNGAYANG

NARTI, S.STP
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP.19791205 199810 2 001

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sungayang tahun 2025 sesuai kebutuhan sebagai berikut :

T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

KECAMATAN SUNGAYANG

Kode	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	*2*			*3*	*4*	*7*	*8*
	A.	***Urusan Kewilayahan***					
		Kecamatan				***1.521.571.803,00***	
7.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**1.442.079.407,00**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**	**6.000.000,00**	
7.01.01.2.01.01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan angkat	Sungayang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	
7.01.01.2.01.04		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Sungayang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0,00	
7.01.01.2.01.06		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungayang	Jumlah dokumen laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Derah**			**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**	**1.263.965.007,00**	
7.01.01.2.02.01		1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Sungayang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.261.265.007,00	
7.01.01.2.02.05		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungayang	Jumlah dokumen laporan	2.700.000,00	
7.01.01.2.04		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**		SUNGAYANG	Sungayang	**1.650.000,00**	
7.01.01.2.05.09		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sungayang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.660.000,00	
7.01.01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	**48.900.000,00**	
7.01.01.06.04		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungayang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	1.000.000,00	

7.01.01.06.05		2	Penyediaan bahan logistik kantor	Sungayang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.500.000,00	
7.01.01.06.01		3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sungayang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.000.000,00	
7.01.01.06.07		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sungayang	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0,00	
7.01.01.06.08		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungayang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	
7.01.01.06.09		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungayang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.900.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**Persentase barang milik daerah yang disediakan**	**0,00**	
7.01.01.2.07.06		1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan kantor yang disediakan	0,00	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**64.564.400,00**	
7.01.01.2.08.01		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungayang	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.064.000,00	
7.01.01.2.08.02		2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Sungayang	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang di sediakan	18.000.000,00	
7.01.01.2.08.04		3	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Sungayang	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor yang disediakan	23.500.000,00	
7.01.01.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		SUNGAYANG	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**57.000.000,00**	
7.01.01.09.01		2	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sungayang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54.000.000,00	
7.01.01.09.06		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungayang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.000.000,00	
7.01.01.09.09		1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungayang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.000.000,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Sungayang	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**24.564.400,00**	

7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Sungayang		**450.000,00**	
7.01.02.2.01.02		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sungayang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000,00	
				Sungayang			
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Sungayang		**23.664.000,00**	
7.01.02.2.02.02		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Sungayang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	23.214.400,00	
7.01.02.2.02.03		2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000,00	
7.01.02.2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**450.000,00**	
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**3.450.000,00**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		Sungayang	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**3.450.000,00**	
7.01.03.2.01.01		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungayang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.000.000,00	
7.01.03.2.01.03		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Sungayang	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**0,00**	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Sungayang	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	0,00	
7.01.04.2.01.02		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sungayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	0,00	

					Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Sungayang	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**23.027.996,00**	
7.01.05.2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Sungayang	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**23.027.996,00**	
7.01.05.2.01.02		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sungayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.000.000,00	
7.01.05.2.01.04		2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sungayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.027.996,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			Sungayang	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**28.450.000,00**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Sungayang	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**28.450.000,00**	
7.01.06.2.01.03		1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Sungayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	450.000,00	
7.01.06.2.01.06		2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	Sungayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	0,00	
7.01.06.2.01.11		3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	
7.01.06.2.01.12		4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Sungayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,00	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektiftivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sungayang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan, agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri No, 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang RPJP Daerah RPJMD serta tata cara perubahan RPJP Daerah , RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tatacara penyusunan sudah mulai baik dan tertata.

c. Rencana Kerja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJM, RPJMD Provinsi, RKPD provinsi, RPJP Kabupaten, RKPD Kabupaten Tanah Datar dan Renstra Perangkat Daerah

5.3 Rencana Tindak lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas dan kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
c. Menerapkan sistem reward and punisment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif bedasarkan beban kerja.
d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yag dilaksanakan agar berdaya dan berhasil guna.
e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditentukan.

Sungayang, Juli 2024
CAMAT SUNGAYANG

NARTI, S.STP
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP.19791205 199810 2 001

RENJA AKHIR

KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA

Tahun 2025

Batubulek,
Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 tepat pada waktunya.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kantor Camat Lintau Buo Utara tahun 2025 sesuai dengan Undang-undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah athun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2025 dimaksudkan agar Kantor Camat Lintau Buo Utara mempunyai arah, kebijakan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 untuk periode tahunan yang terkait dengan APBD dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rancangan Akhir Renja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2025 dan kami mengharapkan masukan untuk kesempurnaan Rancangan Akhir Renja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2025 ini.

Batu Bulek, Agustus 2024
CAMAT LINTAU BUO UTARA

EDO FAKHRHAZI HERIZAL, S.STP
Pengatur Tk.I, III/d
NIP. 19871020 201010 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Kantor Camat Lintau Buo Utara 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara ... 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Lintau Buo Utara 19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja 35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Lintau Buo Utara 35
3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Pada Perubahan Anggaran Tahun 2025..... 40

BAB V PENUTUP 45

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 45
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 45
5.3 Rencana Tindak Lanjut 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepeda RPJMD dan bersifat Indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 126 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Kecamatan Lintau Buo Utara juga dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja

Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Mengingat strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Lintau Buo Utara menyusun Renja untuk tahun 2025 dan disampaikan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lintau Buo Utara dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai Program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar serta sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan dalam periode Renstra 2021-2026, dan Perencanaan Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan.
1.4 Sistimatika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008, Kecamatan Lintau Buo Utara mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Kecamatan Lintau Buo Utara selaku Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Utara dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan misi Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Lintau Buo Utara, tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga periode renstra 2021-2026. Kecamatan Lintau Buo Utara telah melaksanakan 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, berikut penjabaran singkat mengenai Program dan Kegiatan Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2023.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Tanah Datar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Derah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01				**Urusan Kewilayahan**									
7.01				**Kecamatan**		**9.381.245.801**	**1.683.339.130**	**1.506.957.216**	**1.487.704.433**		**1.782.234.590**	**4.953.278.153**	**52,80**
7.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**7.822.532.226**	**1.497.608.720**	**1.341.204.716**	**1.345.484.033**		**1.642.020.489**	**4.485.113.242**	**57,34**
7.01	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**180.599.725**	**28.896.940**	**10.299.900**	**12.160.500**		**2.700.000**	**43.757.440**	**24,23**
7.01	**01**	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.999.950	2.119.000	2.720.00	2.720.000	128,3	1.950.000	6.789.000	28,29
7.01	**01**	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	137.499.800	24.977.940	6.379.900	7.640.500	119,76	0	32.618.440	23,72

7.01	**01**	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	19.099.975	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	750.000	4.350.000	22,77
7.01	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**6.051.432.265**	**1.228.513.358**	**1.147.984.505**	**1.135.632.293**		**1.309.777.777**	**3.673.923.428**	**60,71**
7.01	**01**	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.023.932.315	1.226.993.698	1.146.464.680	1.134.113.393	98,92	1.309.027.777	3.670.134.868	60,93
7.01	**01**	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	27.499.950	1.519.660	1.519.825	1.519.000	99,9	750.000	3.788.660	13,78
7.01	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**19.950.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**1.650.000**	**42,857**	**0**	**5.500.000**	**27,57**
7.01	**01**	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19.950.000	3.850.000	3.850.000	1.650.000	42,86	0	5.500.000	27,57
7.01	**01**	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas yang Disediakan	0	1.925.000	0	0	0	0	1.925.000	
7.01	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**657.528.576**	**106.318.246**	**53.609.046**	**63.255.300**		**42.773.200**	**212.346.746**	**32,29**
7.01	**01**	2.06	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	12.499.200	1.999.700	743.000	742.OOO	99,9	0	2.741.700	21,94
7.01	**01**	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44.057.100	7.246.000	6.445.300	6.445.150	100	3.412.000	17.103.150	38,82
7.01	**01**	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44.926.476	7.285.125	4.855.000	4.854.850	100	1.331.200	13.471.175	29,98

7.01	**01**	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.132.800	19.017.900	13.059.500	13.048.200	99,9	8.030.000	40.096.100	34,23
7.01	**01**	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438.913.000	70.769.521	28.506.246	38.165.100	134	30.000.000	138.934.621	31,65
7.01	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang disediakan**	**70.000.000**	**14.824.000**	**-**	**-**	**-**	**0**	**14.824.000**	**21,18**
7.01	**01**	2.07	06	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	70.000.000	14.824.000	-	-	-	0	14.824.000	21,18
7.01	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**97.409.660**	**19.471.115**	**37.828.600**	**37.134.960**	**297,116**	**36.272.000**	**92.878.075**	**95,35**
7.01	**01**	2.08	01	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.445.000	500.000	500.000	500.000	100	100.000	1.100.000	31,93
7.01	**01**	2.08	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	71.164.960	10.293.815	11.200.000	11.155.050	100	11.200.000	32,648.865	45,88
7.01	**01**	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22.799.700	8.677.300	26.128.600	25.479.910	98	24.972.000	59.129.210	259,34
7.01	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**745.612.000**	**95.735.061**	**87.632.665**	**95.650.800**	**311,87**	**250.497.512**	**441.883.373**	**59,26**

7.01	**01**	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	504.222.000	61.180.661	60.223.265	68.886.480	114,37	57.733.112	187.800.253	37,25
7.01	**01**	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	100	0	6.000.000	25
7.01	**01**	2.09	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	217.390.000	30.554.400	25.399.400	24.764.400	97,50	192.764.400	248.083.200	114,12
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**258.195.125**	**47.432.500**	**74.042.800**	**72.138.200**	**294,80**		**119.570.700**	**46,31**
7.01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**	**15.999.975**	**0**	**450.000**	**450.000**	**-**	**0**	**450.000**	**2,81**
7.01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.999.975	0	450.000	450.000	0	0	450.000	2,81
7.01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**223.119.750**	**45.932.500**	**73.142.800**	**71.238.200**	**194,80**	**68.293.200**	**185.463.900**	**83,12**
7.01	02	2.02	**02**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**157.699.850**	22.794.100	48.593.800	47.323.800	97,39	45.528.800	115.651.700	73,34

7.01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.499.900	23.138.400	24.549.000	23.914.400	97,41	22.764.400	69.817.200	106,59
7.01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**1.195.200**	**1.195.200**	**1.195.200**	**1.195.200**	**1.195.200**	**1.195.200**	**1.195.200**	**1.195.200**
7.01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.995.400	1.500.000	450.000	450.000	100	0	1.950.000	10,27
7.01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**103.999.525**	**6.776.675**	**7.427.000**	**7.183.700**	**96,513**		**13.960.375**	**13,42**
7.01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**103.999.525**	**6.776.675**	**7.427.000**	**7.183.700**	**96,513**	**2.500.000**	**16.460.375**	**15,83**
7.01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80.599.750	6.776.675	6.977.000	6.733.700	96,51	2.500.000	16.010.375	19,86
7.01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.399.775	0	450.000	450.000	0	0	450.000	1,92
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**105.017.400**	**0**	**1.195.200**	**-**	**-**	**0**	**1.195.200**	**1,14**

7.01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**105.017.400**	**0**	**1.195.200**	**-**	**-**	**0**	**1.195.200**	**1,14**
7.01	**04**	**2.01**	**02**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	105.017.400	0	1.195.200	-	-	0	1.195.200	1,14
7.01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**636.013.600**	**64.049.500**	**38.377.500**	**31.089.200**			**95.138.700**	**14,96**
7.01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**636.013.600**	**64.049.500**	**38.377.500**	**31.089.200**		**0**	**95.138.700**	**14,96**
7.01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	285.439.200	4.848.800	19.932.500	12.686.400	64	0	17.535.200	6,14
7.01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350.574.400	59.200.700	18.405.000	18.402.800	100	39.003.401	116.606.901	33,26

7.01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**455.487.925**	**67.471.735**	**44.750.000**	**31.809.300**	**174,86**		**99.281.035**	**21,80**
7.01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**455.487.925**	**67.471.735**	**44.750.000**	**31.089.300**	**174,86**	**30.417.500**	**128.978.535**	**28,32**
7.01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	150.999.975	21.564.400	2.494.000	677.600	27,17	0	22.242.000	14,73
7.01	06	2.01	06	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**	Terlaksannya pemilihan Wali Nagari	**4.000.000**						0	0
7.01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	66.988.000	7.151.840	18.000.000	13.500.000	75	18.000.000	38.651.840	57,70
7.01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	233.499.950	38.755.495	24.256.000	17.631.700	72,69	12.417.500	68.804.695	29,47

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar sepanjang Tahun 2023 :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa dokumen RENJA dan RENSTRA SKPD.

2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 selesai dibuat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Lintau Buo Utara.

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   Output dari kegiatan ini adalah Laporan Kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2023. Pembuatan laporan-laporan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habis tahun berjalan (setelah 31 Desember 2023).

II. Administrasi Keuangan perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Output dari kegiatan ini adalah jumlah gaji dan tunjangan yang telah terealisasikan kepada seluruh ASN Kecamatan Lintau Buo Utara.

2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun

   Penyusunan laporan keuangan juga serupa dengan laporan kinerja, dibuat setelah 31 Desember 2023. Per 5 Januari 2024 telah mulai dilakukan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023, dan ditargetkan akan selesai pada bulan Februari 2024.

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

   Realisasi kinerja sesuai dengan target bahkan realisasi fisik jauh melebihi realisasi keuangan disebabkan karena banyaknya diklat yang di ikuti oleh ASN dalam durasi waktu yg lama sedangkan anggaran tidak memenuhi untuk kegiatan tersebut.

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Kecamatan Lintau Buo Utara terpenuhi dan berfungsi dengan baik.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Kecamatan Lintau Buo Utara terpenuhi dengan baik.

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan barang cetakan amplop dinas, map dan jasa photocopy terpenuhi dengan baik
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk rapat internal Kecamatan Lintau Buo Utara maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana dengan baik

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

1. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
   Pada Tahun 2023 tidak ada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena tidak terakomodir pada Anggaran APBD Kabupaten Tanah Datar untuk kecamatan Lintau Buo.

VI. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancar
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan kantor terlaksana selama 1 tahun

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   Realiasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 2 Kendaraan roda 4 dan 9 kedaraan roda 2 kendaraan dinas di Kecamatan Lintau Buo Utara
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Realisasi kinerja sesuai target, telah terpenuhinya semua kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin di Kecamatan Lintau Buo Utara.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Realisasi kinerja sesuai target, telah terpenuhinya semua kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin di Kecamatan Lintau Buo Utara

VIII. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   Realisasi Kinerja sesuai dengan target, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan realisasi kegiatan dan keuangan 100%.

IX. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan PATEN di Kecamatan Lintau Buo Utara dan terpenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya target masyarakat yang telah wajib merekam KTP.

X. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah melakukan monitoring ke nagari-nagari mendampingi petugas kolektor pemungutan PBB kepada masyarakat agar target pemungutan PBB tercapai.

XI. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

   Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat Nagari dan Kecamatan dimana terdapat 5 nagari di kecamatan Lintau Buo Utara yang melaksanakan Musrenbang dan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dan telah terealisasikan pada triwulan I penganggaran.
2. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Realisasi Kinerja sesuai dengan target, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan realisasi kegiatan dan keuangan 100%.

XII. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

   Kinerja tidak sesuai dengan target kegiatan karena adanya pengurangan anggaran sehingga kegiatan ini tidak terlaksana dan realisasi kegiatan dan keuangan 0%

XIII. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target setelah adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Paskibra untuk HUTRI pelaksanaannya bisa dengan anggota Paskibra 70 orang dan adanya pengurangan kegiatan fisik cabang olah raga Voli dan bola kaki di tiadakan

2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan telah terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan yg melombakan 38 cabang kegiatan ini terlaksana dengan baik

XIV. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan telah terlaksananya penyusunan APB di 5 nagari di kecamatan Lintau Buo Utara dan kegiatan ini terlaksana dengan baik
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dan kegiatan ini terlaksana dengan baik
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan terlaksananya kegiatan Lembaga Unsur di Kecamatan Lintau Buo Utara dan pembinaan ke nagari-nagari, kegiatan ini terlaksana dengan baik

Berdasarkan realisasi capaian kinerja keuangan, secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lintau Buo Utara telah mencapai target.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahakan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah yang secara pekerjaan bertatap muka lansung dengan masyarakat menjadi koordinator dan fasilitator di wilayah kecamatan.

Untuk mendukung Visi dan Misi diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, aparatur, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan dan perlengkapan.
- Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup kecamatan Lintau Buo Utara dengan prinsip koordinasi, Integritas dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
- Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah meliputi bidang : pemerintahan umum, pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, Penanggulangan bencana, kependudukan, pertanahan, pemberdayaan Nagari dan lain-lain.
- Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Datar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lintau Buo Utara masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia, sumber daya manusia di Kecamatan Lintau Buo Utara masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitasnya. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan terutama sumber daya manusia antara lain :

1. Jumlah aparatur belum sesuai dengan beban kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penempatan aparatur yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kapasitas aparatur serta kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga belum optimalnya kinerja aparatur.
3. Pola pembinaan Aparatur yang belum terorientasi pada peningkatan kinerja.

Pada tahun 2023 masih adanya pengurangan anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan akibatnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Lintau Buo Utara ada yang tidak terlaksanan karena anggarannya Rp. 0,- , sehingga tidak tercapainya target kinerja seperti yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

18

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lintau Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik 97	Sangat Baik 97,5	Sangat Baik 96,8	Sangat Baik 95,08	97	97,5	
2	Nilai Hasil Evaluasi AkuntabilitasKinerja			B	BB	BB	BB	B	66,69	67,80	70	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan			1	2	1	1	2	1	1	1	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PerangkatDaerah

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai salah satu OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pelayanan Prima kepada masyarakat	- Sering tertundanya pelayanan KTP Elektronik	- Jaringan Internet yang tidak stabil di kecamatan, alat perekaman sering mengalami kerusakan serta blangko yang sering tidak tersedia
2	Belum Maksimal realisasi pendapatan penerimaan PBB dan penerimaan retribusi perizinan	- Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak - Masih belum maksimalnya Kepala Jorong selaku kolektor Nagari melaksanakan tugasnya - Masyarakat masih enggan mengurus perizinan	- Kurangnya sosialisasi tentang PBB - Kurang tegasnya Pemerintahan Nagari terhadap Kolektor Nagari - Kurangnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat

3	Terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas	- Tidak adanya pemerataan jumlah ASN pada setiap SKPD - Jumlah ASN yang terdapat pada Kecamatan Lintau Buo Utara sangat terbatas - Tidak adanya pelatihan khusus bagi ASN yang sesuai dengan tupoksi nya masing-masing	- Kurangnya SDM di bidang Pelayanan - Terbatasnya kuota penerimaan ASN di Pemkab Tanah Datar sehingga sedikit sekali adanya penambahan ASN terutama di Kantor Camat Lintau Buo Utara sementara ada ASN yang pensiun, meninggal dan pindah. - masih terbatasnya pembinaan skill (ketrampilan), disiplin, dan etos kerja (budaya kerja)
4	Pelaksanaan Pembangunan di Nagari	- Menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang Nagari	- Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Musrenbang - Kurang tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Musrenbang terutama di Kecamatan

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Lintau Buo Utara dimaksud untuk menentukan permasalahan, hambatan, atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lintau Buo Utara berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lintau Buo Utara tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

RKPD tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisa kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal terdapat banyak perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2021-2026 banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Tabel review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 sebagai berikut ;

Tabel-TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lintau Buo Utara

	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Kewilayahan				**1.555.300.000,00**	**Urusan Kewilayahan**				**2.420.199.353,00**	
	Kecamatan				**1.555.300.000,00**	**Kecamatan**				**2.420.199.353,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**1.288.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**1.830.263.753,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**33.150.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**17.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	4.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	26.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	8.000.000,00	

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah dokumen laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3.150.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah dokumen laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	4.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**985.334.508,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**1.461.499.353,00**	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang/bulan	980.834.508,00	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang/bulan	1.457.499.353,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah dokumen laporan	2 laporan	4.500.000,00,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah dokumen laporan	2 laporan	4.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**3.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**10.000.000,00**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang ASN	3.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang ASN	10..000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lintau Buo Utara	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**110.562.300,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**145.000.000,00**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	8 paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	8 paket	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 paket	7.250.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 paket	12.000.000,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dalam Kec. Dlm Kab dan Luar Prop	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	7.285.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dalam Kec. Dlm Kab dan Luar Prop	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	10.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	19.027.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase barang milik daerah yang disediakan**	**100%**	**14.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang disediakan**	**100%**	**30.000.000,00**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan kantor	3 unit	14.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah peralatan kantor	3 unit	30.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan		-	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan		-	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang diperbaiki		-	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang diperbaiki		-	

	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan		-	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**16.153.192,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**43.000.000,00**	
	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 laporan	500.000,00	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 laporan	1.500.000,00	
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	11.853.192,00	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.800.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	28.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lintau Buo Utara	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**125.800.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**123.764.400,00**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	84.400.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	87.000.000,00	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	4.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	4.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	37.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	32. 764.400,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lintau Buo Utara	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**44.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**83.500.000,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**	**100%**	**2.500.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**	**100%**	**2.500.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.500.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**38.500.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Kecamatan Lintau Buo Utara	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**78.000.000,00**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	25.800.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	52.000.000,00	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	12.700.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	26.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**100%**	**3.000.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**100%**	**3.000.000,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	3.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	3.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**18.100.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**19.100.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**18.100.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**19.100.000,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	14.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	15.000.000,00	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	4.100.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	4.100.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**20.300.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**15.000.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	20.300.000,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	**15.000.000,00**	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 laporan	20.300.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 laporan	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**110.900.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**150.600.00000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**110.900.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**150.600.000,00**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	70 orang	45.391.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	70 orang	85.000.000,00	

			Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 orang	65.509.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	65.600.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**74.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**125.000.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**74.000.000,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**125.000.000,00**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	25.800.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	20.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan	2 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan	2 dokumen	5.000.000,00	

			Ketertiban umum					Ketertiban umum			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 dokumen	12.500.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 dokumen	35.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	35.700.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	65.000.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 merupakan rencana kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Utara 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Lintau Buo Utara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Lintau Buo Utara dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergis antara dokumen perencanaan.

Tabel T-C 32

Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Nihil	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan dengan program prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan pemukiman dengan program prioritas Penyediaan Perumahan Layak dan Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan program prioritas Pengembangan 3 Kawasan pariwisata, pengembangan 5 kawasan Ekonomi khusus, Pengembangan 3 kawasan Industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan energi dengan program prioritas EBT dan Konservasi Energi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan pangan dengan program prioritas Peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian
7. Penanggulangan kemiskinan dengan program prioritas jaminan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman dengan program prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat,laut udara dan inter- moda) dan pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan wilayah dengan program prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan, reforma agraria, pencegahan dan penanggulangan bencana dan percepatan pembangunan papua
10. Politik, Hukum dan pertahanan keamanan dengan program prioritas penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum dan reformasibirokrasi

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran Kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program Nasional maupun Provinsi tersebut.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN LINTAU BUO UTARA.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Lintau Buo Utara dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi, Kecamatan Lintau Buo Utara menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatkan Kinerja

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lintau Buo Utara dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kecamatan Lintau Buo Utara menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. Sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara dirumuskan untuk masing-

masing tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 dapat dilihatpada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efesien.	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2025 Kecamatan Lintau Buo Utara menyelenggarakan Urusan kewilayahan yang terdiri 5 program 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Lintau Buo Utara memiliki anggaran sebesar Rp. 1.553.182.498,- dimana anggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan RKPD Awal sebesar Rp. 1.928.325.113 sehingga ada 1 Program 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan yang tidak dapat dianggarkan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026

Secara umum, program dan kegiatan Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Provinsi / Kabupaten / Kota :Sumatera Barat/Tanah Datar

Kecamatan Lintau Buo Utara

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**Urusan Kewilayahan**				**1.553.182.498,00**				**2.427.500.000,00**
7	01				**Kecamatan**				**1.553.182.498,00**				**2.427.500.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Administrasi kantor yang ditata**		**100%**	**1.421.971.798,00**			**100%**	**2.083.500.000,00**
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**		**100%**	**2.700.000,00**			**100%**	**17.500.000,00**
7	**01**	**01**	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lintau Buo Utara	8 dokumen (RENSTRA DAN RENJA, Evaluasi Renja)	1.950.000,00			2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	6.000.000,00
7	**01**	**01**	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 dokumen	0,00			4 dokumen	8.500.000,00

7	**01**	**01**	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kecamatan Lintau Buo Utara	3 dokumen	750.000,00			3 dokumen	3.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**		**100%**	**1.259.729.086,00**			**100%**	**1.503.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.02**	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lintau Buo Utara	10 orang/14 bulan	1.258.979.086,00			13 orang/bulan	1.500.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kecamatan Lintau Buo Utara	2 laporan	750.000,00			2 laporan	3.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**		**100%**	**0,00**			**100%**	**12.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.05**	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 Orang ASN	0,00			13 orang ASN	12.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**42.773.200,00**			**100%**	**151.500.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 paket	0,00			8 paket	4.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo Utara	8 paket	3.412.000,00			22 paket	10.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaaan yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo Utara	3 paket	1.331.200,00			3 paket	7.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lintau Buo Utara	12 laporan	8.030.000,00			12 laporan	30.000.000,00

7	**01**	**01**	**2.06**	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Kec. Dlm Kab dan Luar Prop	12 laporan	30.000.000,00			12 laporan	100.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**0,00**				**50.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**	05	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 unit	0,00			5 unit	50.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**36.272.000,00**			**100%**	**47.500.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**	01	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lintau Buo Utara	50 laporan	100.000,00			150 laporan	1.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo Utara	12 laporan	11.200.000,00			12 laporan	16.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo Utara	12 laporan	24.972.000,00			12 laporan	30.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**		**100%**	**80.497.512,00**			**100%**	**302.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Lintau Buo Utara	8 unit (1 unit Roda 4, 7 unit roda 2)	57.733.112,00			9 unit	98.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 unit	0,00			10 unit	6.000.000,00

7	**01**	**01**	**2.09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Lintau Buo Utara	2 unit	195.363.800,00			2 unit	198.000.000,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**68.293.200,00**			**100%**	**94.000.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**		**100%**	**0,00**			**100%**	**4.000.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	1 dokumen	0,00			1 dokumen	4.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**68.293.200,00**			**100%**	**82.500.000,00**
7	**01**	**01**	**2.02**	**02**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	2 laporan	45.528.800,00			2 laporan	53.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**	**03**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	4 laporan	22.764.400,00			4 laporan	29.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**		**100%**	**0,00**			**100%**	**7.500.000,00**

7	**01**	**01**	**2.04**	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	5 laporan	0,00			5 laporan	7.500.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**2.500.000,00**			**100%**	**17.500.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		**100%**	**2.500.000,00**			**100%**	**17.500.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lintau Buo Utara	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00			7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000,00
7	**01**	**03**	**2.01**	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 laporan	0,00			1 laporan	5.000.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**0%**	**0,00**			**100%**	**15.000.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**		**0%**	**0,00**			**100%**	15.000.000,00
7	**01**	**04**	**2.01**	**02**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0 laporan	0,00			5 laporan	15.000.000,00

7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**30.000.000,00**			**100%**	**110.000.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**		**100%**	**30.000.000,00**			**100%**	**110.000.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 orang	0,00			70 orang	35.000.000,00
7	**01**	**05**	**2.01**	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lintau Buo Utara	50 orang	30.000.000,00			50 orang	75.000.000,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**30.417.500,00**			**100%**	107.500.000,00
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**100%**	**30.417.500,00**			**100%**	**107.500.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lintau Buo Utara	0 dokumen	0,00			5 dokumen	7.500.000,00

7	**01**	**06**	**2.01**	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Lintau Buo Utara	12 dokumen	18.000.000,00			12 dokumen	35.000.000,00
7	**01**	**06**	**2.01**	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lintau Buo Utara	5 dokumen	12.417.500,00			5 dokumen	65.000.000,00

CAMAT LINTAU BUO UTARA

EDO FAKHRHAZI HERIZAL, S.STP

NIP. 19871020 201010 1 001

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Tanah Datar khususnya, maka dirumuskanlan Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025. Karena keterbatasan anggaran belum semua rencana kegiatan dapat terakomodir. Meskipun demikian Kecamatan Lintau Buo Utara tetap akan berupaya untuk melaksanakan kegiatan secara profesional dan maksimal.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya.

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Tanah Datar Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : Kecamatan Lintau Buo Utara

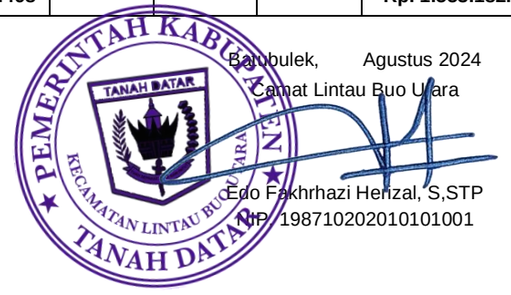
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Lintau Buo Utara														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
7	01	02	2,02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 45.528.800				Rp. 45.528.800	Rp. 60.000.000
7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 22.764.400				Rp. 22.764.400	Rp. 30.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 17.500.000

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	05	2,01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 75.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2,01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 37.500.000
7	01	06	2,01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 12.417.500				Rp. 12.417.500	Rp. 70.000.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 1.950.000				Rp. 1.950.000	Rp. 5.000.000
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000				Rp. 750.000	Rp. 5.500.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 1.258.979.086				Rp. 1.258.979.086	Rp. 1.500.000.000
7	01	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000				Rp. 750.000	Rp. 6.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 3.412.000				Rp. 3.412.000	Rp. 15.000.000

7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 1.331.200				Rp. 1.331.200	Rp. 13.000.000
7	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 8.030.000				Rp. 8.030.000	Rp. 35.000.000
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 100.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000				Rp. 100.000	Rp. 1.800.000
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 11.200.000				Rp. 11.200.000	Rp. 16.000.000
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 24.972.000				Rp. 24.972.000	Rp. 29.000.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 57.733.112				Rp. 57.733.112	Rp. 90.000.000
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 22.764.400				Rp. 22.764.400	Rp. 43.500.000
Jumlah									**Rp. 1.553.182.498**				**Rp. 1.553.182.498**	**Rp. 2.149.800.000**

Batubulek, Agustus 2024
Camat Lintau Buo Utara



Edo Fakhrhazi Henzal, S,STP
NIP. 198710202010101001

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektiftivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lintau Buo Utara, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing- masing Satuan kerja Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan, agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri No, 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang RPJP Daerah RPJMD serta tata cara perubahan RPJP Daerah , RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor

   8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

b. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tatacara penyusunan sudah mulai baik dan tertata.

c. Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJM, RPJMD Provinsi, RKPD provinsi, RPJP Kabupaten, RKPD Kabupaten Tanah Datar dan Renstra Perangkat Daerah

5.3 Rencana Tindak lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas dan kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

c. Menerapkan sistem reward and punisment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif bedasarkan beban kerja.

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yag dilaksanakan agar berdaya dan berhasil guna.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditentukan.

Batu Bulek, Agustus 2024
Camat Lintau Buo Utara

EDO FAKHRHAZI HERIZAL,S.STP
NIP. 19871020 201010 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

Jalan Labuah Kumbuang – Batu Bulek – Telp. (0752) 777784
Website : www.lintaubuoutara.go.tanahdatar.id Email : lintaubuo.utara@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINTAU BUO UTARA
NOMOR : 000.7.2/04/KPTS/LBU-2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025 KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA

CAMAT LINTAU BUO UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Ketujuh Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN
CAMAT LINTAU BUO UTARA
NOMOR : 000.7.2/04/KPTS/LBU-2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2025 sesuai dengan daftar terlampir

KEDUA : Kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan tugas:

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereviw hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan awal RKPD

6.Perumusan Tujuan.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN
CAMAT LINTAU BUO UTARA
NOMOR : 000.7.2/04/KPTS/LBU-2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

: 6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Camat Lintau Buo Utara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batubulek
Pada tanggal 15 Januari 2024
CAMAT LINTAU BUO UTARA

EDO FAKHRHAZI HERIZAL,S.STP
NIP. 19871020 201010 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth :
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung

LAMPIRAN KESATU KEPUTUSAN
CAMAT LINTAU BUO UTARA
NOMOR : 000.7.2/04/KPTS/LBU-2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	EDO FAKHRHAZI HERIZAL,S.STP	Camat Lintau Buo Utara	Ketua
2.	ANJAKRI,S.Pd.SD	Sekretaris Kecamatan Lintau Buo Utara	Wakil Ketua
3.	SYAFNI EVEMI,S.Pd	Kasubag Perkeu p/k Camat Lintau Buo Utara	Sekretaris
4.	JACK RAHMADONA,S.AP	Kasi Tapem p/k Camat Lintau Buo Utara	Anggota
5.	HIBATUL AZIZI, SE	Kasi PMD p/k Camat Lintau Buo Utara	Anggota
6.	ELFI DARLIS,S.Pd	Kasi Pelum p/k Camat Lintau Buo Utara	Anggota
7.	DASRIL.S.Sos	Kasi Kessos p/k Camat Lintau Buo Utara	Anggota
8.	RIKA ANGGRAINI	Plt. Kasubag Umkep p/k Camat Lintau Buo Utara	Anggota

CAMAT LINTAU BUO UTARA

EDO FAKHRHAZI HERIZAL,S.STP
NIP. 19871020 201010 1 001

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TANJUANG BARU
TAHUN 2025



Tanjuang Alam, Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNYA, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, telah dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tanjuang Baru merupakan Rancangan Akhir perencanaan anggaran tahun 2025 yang dapat disusun berkat kerjasama Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Baru serta bimbingan dari Instansi Tekhnis yang membidangi.

Untuk itu kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan masukan yang telah diberikan demi tercapainya ketepatan dalam pembuatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Baru ini, Semoga Allah SWT memberkati segala sumbangsih yang telah diberikan.

Tanjung Baru, Agustus 2024

CAMAT TANJUANG BARU

RIKY AFRIZALDI, S.STP

PEMBINA

NIP.19830123 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II 7
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUANG BARU 7
TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjuang Baru 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 23
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III 32
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANJUANG BARU 32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjuang Baru 33
3.3 Program dan Kegiatan 33
BAB IV 42
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 42
KECAMATAN TANJUANG BARU 42
BAB V PENUTUP 58
5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja 58
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 58
5.3 Rencana Tindak lanjut 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan lansung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Renja OPD menjadi bahan pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD.

Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Renja OPD

Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

b) Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Rancangan Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah Rancangan RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD

c) Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD, Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan simtem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja OPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten

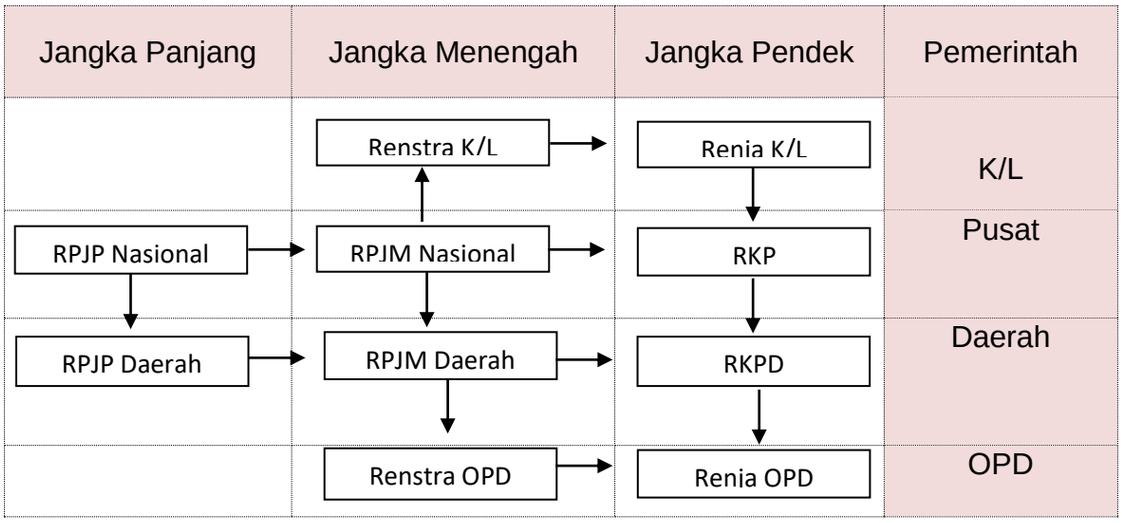
d) Penetapan Renja

Penetapan renja merupakan proses verivikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara peyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD,RPJMD,Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada Rancangan RKPD dan Renstra OPD dimana Rancangan RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan RKPD, sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, dan RENJA OPD :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjuang Baru disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37)
14. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Adanya kerangka acuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanjuang Baru.

2. Terlaksananya proses perencanaan yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjuang Baru 2025.
3. Menyediakan dokumen rencana teknis Kantor Camat Tanjuang Baru dalam menyusun RKPD/ KUA, dan PPAS dengan menggunakan pendekatan Kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi sasaran kegiatan.
4. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Tanjuang Baru atas program secara terukur.
5. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kantor Camat Tanjuang Baru.
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat Tanjuang Baru sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Tanjuang Baru.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Tanjuang Baru dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Tanjuang Baru untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
9. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Renja OPD Tahun 2025 adalah :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.
2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
3. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Tanjuang Baru dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;

5. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

Pada dasarnya penyusunan Renja OPD ini bertujuan untuk lebih terjaminnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan prioritas Kecamatan Tanjuang Baru dalam turut mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TANJUANG BARU TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjuang Baru
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjuang Baru.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjuang Baru.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANJUANG BARU

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjuang Baru
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANJUANG BARU

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUANG BARU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjuang Baru

Dalam rangka pelaksanaan misi Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tanjuang Baru, tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga periode renstra 2021-2026. Kecamatan Tanjuang Baru telah melaksanakan 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, berikut penjabaran singkat mengenai Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjuang Baru tahun 2023:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Capaian Program adalah Cakupan administrasi perkantoran yang ditata target 100 %, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 hasil program dan kegiatan dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2024 juga tercapai 100%.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran 1.849.825,- dapat terealisasi 1.848.650,-. Realisasi anggaran tercapai 99,94 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen renstra dan renja.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD anggaran 2.831.825,-. dapat terealisasi 2.831.500,-. Realisasi anggaran tercapai 99,99 % Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPAP.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran 1.510.820,-. dapat terealisasi 1.510.600,-. Realisasi anggaran tercapai 99,99 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah LkjIP, LPPD dan LKPJ.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran 1.176.619.366,-. dapat terealisasi 1.172.406.736,-. Realisasi anggaran tercapai 99,64 % Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran 2.890.800,-. dapat terealisasi 2.890.500,-.

Realisasi anggaran tercapai 99,99 % Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran 660.000,-. dapat terealisasi 660.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kecamatan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggaran 443.600,- dapat terealisasi 442.000,-. Realisasi anggaran tercapai 99,63 % Keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik tersedia.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran 5.758.881,- dapat terealisasi 5.462.000,-. Realisasi anggaran tercapai 94,84 % Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah jenis alat tulis kantor tersedia.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran 3.221.300,- dapat terealisasi 3.218.000,-. Realisasi anggaran tercapai 99,90 %Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia.
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran 6.790.500,- dapat terealisasi 6.681.950,-. Realisasi anggaran tercapai 98,40 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah makanan dan minuman tersedia.
5. Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD anggaran 20.280.000,- dapat terealisasi 20.280.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan luar Daerah terlaksana.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran 180.000,- dapat terealisasi 180.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Materai yang disediakan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran 14.212.400,- dapat terealisasi 14.009.426,-. Realisasi anggaran tercapai 98,58 % Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tagihan listrik, telepon dan internet yang dibayarkan.
3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor anggaran 24.308.800,- dapat terealisasi 24.280.520,-. Realisasi anggaran tercapai 99,90 % Keluaran

dari sub kegiatan ini adalah Jumlah jenis alat kebersihan disediakan/ jasa THL dibayarkan, serta luas halaman kantor dibersihkan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran 63.823.820,- dapat terealisasi 61.072.363,-. Realisasi anggaran tercapai 95,70 % Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan KIR nya.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran 2.500.000,- dapat terealisasi 2.500.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran 1.000.000,- dapat terealisasi 1.000.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah bangunan Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Aula yang Dipelihara.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dengan target 100 %, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 hasil program dan kegiatan dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2024 juga tercapai 100%

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan anggaran 450.000,- dapat terealisasi 450.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monev proyek di Kecamatan.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan anggaran 26.864.400,- dapat terealisasi 26.864.400,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pelayanan yang dilaksanakan / jasa tenaga THL dibayarkan serta terselenggaranya inovasi di bidang Pelayanan.
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan anggaran 750.000,- dapat terealisasi 750.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pelayanan KTP Elektronik.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan anggaran 900.000,- dapat terealisasi 900.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian Program adalah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari dengan target 100 %, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 hasil program dan kegiatan dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2024 juga tercapai 100%.

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa anggaran 7.801.500,- dapat terealisasi 7.801.500,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah musrenbang yang dikuti dan dilaksanakan.
2. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan anggaran 450.000,- dapat terealisasi 450.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan bulan bhakti goro.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program adalah Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan target 100 %, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 hasil program dan kegiatan dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2024 juga tercapai 100%

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat anggaran 8.030.000,- dapat terealisasi 8.030.000,- Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Masjid yang dikunjungi safari ramadhan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman nilai-nilai adat budaya dengan target 100 %, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun

2023 hasil program dan kegiatan dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2024 juga tercapai 100%

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional anggaran 12.739.000,- dapat terealisasi 11.604.000,-. Realisasi anggaran tercapai 91,09 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksanakan.
2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional anggaran 12.250.000,- dapat terealisasi 10.800.000,-. Realisasi anggaran tercapai 88,16 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah festival yang diikuti dan MTQ Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program adalah Meningkatnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dengan target 100 %, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 hasil program dan kegiatan dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2024 juga tercapai 100%

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa anggaran 1.718.400,- dapat terealisasi 1.360.900,-. Realisasi anggaran tercapai 79,19 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah APB Nagari yang dievaluasi
2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa anggaran 1.850.000,- dapat terealisasi 1.800.000,-. Realisasi anggaran tercapai 97,29 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah terselenggara dan terfasilitasinya pemilihan Wali Nagari di Kecamatan Tanjuang Baru
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum anggaran 13.500.000,- dapat terealisasi 13.500.000,-. Realisasi anggaran tercapai 100 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah terselenggaranya forum koordinasi pimpinan Kecamatan di Kecamatan Tanjuang Baru.
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan anggaran 21.404.000,- dapat terealisasi 19.205.700,-. Realisasi anggaran tercapai 89,72 % Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah nagari dan lembaga yang dibina.

Berikut Tabel T-C.29: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjuang Baru dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Kecamatan Tanjuang Baru dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Tanjuang Baru s/d Tahun 2024
Kabupaten Tanah Datar
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tanjuang Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**Unsur Kewilayahan**									
7.01	**Kecamatan**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan Administrasi Perkantoran yang ditata**	**100 %**							
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100 %**							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen (Renja, Renstra)	4 dokumen (Renja, Renstra)	2 dokumen (Renja, Renstra)	2 dokumen (Renja, Renstra)	100%	2 dokumen (Renja, Renstra)	8 dokumen (Renja, Renstra)	66,67%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	8 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	100%	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	16 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	66,67%

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	6 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	3 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	3 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	100%	3 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	12 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	66,67%
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Derah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	84 orang/bulan	20 orang/bulan	12 orang/bulan	11 orang/bulan	91,67%	12 orang/bulan	43 orang/bulan	51,19%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	66,67%
7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	72 orang	12 orang	12 orang	6 orang	50.00%	12 orang	12 orang	#DIV/0!
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	Paket	11 Paket	-	-	-	-	11 Paket	0.00
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48 paket	16 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	-	1,901,900	#DIV/0!
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	1 Paket	1 paket	-	-	-	-	1 Paket	100%

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga tersedia	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	24 paket	4 paket	4 paket	100%	1 paket	29 paket	48.33 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18 paket	6 paket	5 paket	5 paket	100%	2 paket	13 paket	72.22%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	33.33%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	66,67%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	3 Laporan	39 Laporan	65%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler yang diadakan	3 Unit	3 unit	-	-	**-**	-	3 unit	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	11 Unit	6 unit	-	-	-	-	6 unit	54,55%
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100.00**	-	3 laporan	50 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**100.00**	2 laporan	8 laporan	66,67%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**100.00**	2 laporan	8 laporan	66,67%

7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 Unit	14 unit	7 unit	7 unit	100 %	7 unit	28 unit	66,67%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 unit	10 unit	15 unit	5 unit	33,33 %	15 unit	15 unit	22,22%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	4 unit	3 unit	2 unit	66,67 %	3 unit	9 unit	50 %
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4 dokumen	2 dokumen	-	-	-	6 dokumen	50%
7.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	66,67 %

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33,33 %`
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	2 Laporan	-	-	-	-	2 laporan	33,33 %`
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	30 Lembaga Kemasyarakatan	12 lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan	100.00	6 lembaga kemasyarakatan	22 lembaga kemasyarakatan	73,33 %
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2 Laporan	-	-	-	-	2 laporan	33,33 %`
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	2 Laporan	-	-	-	-	2 laporan	33,33 %`

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 orang	100 orang	3 orang	3 orang	100 %	-	103 orang	294%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 orang	80 orang	35 orang	35 orang	100 %	50 orang	103 orang	550%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	8 dokumen	66,67 %
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan wali nagari	2 Nagari	2 nagari	-	-	-	-	2 nagari	100 %

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	6 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	4 dokumen	66,67 %
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	30 Dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 dokumen	20 dokumen	66,67 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat nagari, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan Camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perarturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan, maka perlu dilakukan pelayanan prima yang merupakan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan, keinginan, dan harapan masyarakat yang mempunyai nilai yang tinggi dan bermutu (berkualitas).

Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima, pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Sederhana, artinya dalam pelaksanaan tidak menyulitkan, prosedurnya, tidak berbelit-belit dan persyaratannya mudah dipenuhi.
2. Terbuka, artinya masyarakat ingin dilayani secara terbuka, transparan sejujur-jujurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lancar, artinya pemberian pelayanan harus bekerja secara ikhlas dan sepenuh hati, dengan didukung sarana dan prasarana penunjang untuk kecepatan pelayanan itu sendiri.

4. Tepat, artinya pemberian pelayanan dapat dilakukan secara tepat arah, sasaran jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang dan tepat waktu.
5. Lengkap, artinya apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat terhadap suatu pelayanan tertentu dapat tersedia secara lengkap.
6. Wajar, artinya pelayanan dilakukan sebagaimana terjangkau, artinya biaya pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah yang secara pekerjaan bertatap muka lansung dengan masyarakat menjadi koordinator dan fasilitator di wilayah kecamatan, berikut tabel Analisis pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjuang Baru

Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik				100 %	100 %	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB	B	BB				100 %	100 %	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan			-	1	1	1	1	-	1				100 %	100 %	

Untuk kegiatan pelayanan yang sudah berhasil mencapai target yang direncanakan, semuanya merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama yang dibina dengan baik dengan instansi tekhnis yang ada di kecamatan dan konsultasi yang intens ke Dinas Teknis Kabupaten serta Kerjasama yang selalu terjaga dengan Pemerintahan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima yang optimal kepada masyarakat, secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Tanjuang Baru.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
2. Biaya Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
3. Penambahan Personil Aparatur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai salah satu OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pelayanan Prima kepada masyarakat	- Sering tertundanya pelayanan KTP Elektronik	- Jaringan Internet yang tidak stabil di kecamatan, serta blangko yang sering tidak tersedia
2	Belum Maksimal realisasi pendapatan penerimaan PBB dan penerimaan retribusi perizinan	- Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak - Masih belum maksimalnya Jorong selaku kolektor Nagari melaksanakan tugasnya - Masyarakat masih enggan mengurus perizinan	- Kurangnya sosialisasi tentang PBB - Kurang tegasnya Pemerintahan Nagari terhadap Kolektor Nagari - Kurangnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat
3	Terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas	- Tidak adanya pemerataan jumlah ASN pada setiap SKPD - Jumlah ASN yang terdapat pada Kecamatan Tanjuang Baru sangat terbatas - Tidak adanya pelatihan khusus bagi ASN yang sesuai dengan tupoksi nya masing-masing	- Kurangnya SDM di bidang Pelayanan - Terbatasnya kuota penerimaan ASN dari Pemerintah Pusat secara keseluruhan di Pemkab Tanah Datar sehingga dari tahun 2011-2020 Kecamatan Tanjuang Baru hanya mendapat 1 orang tambahan ASN sementara ada ASN yang pensiun, meninggal dan pindah sedangkan penggantinya tidak ada - masih terbatasnya pembinaan skill (ketrampilan), disiplin, dan etos kerja (budaya kerja)
4	Pelaksanaan	- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam	- Kurangnya SDM di bidang

	Pembangunan di Nagari	mengikuti musrenbang Nagari	pengelolaan dana Nagari

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. Masih adanya keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal yang dimiliki daerah, karena terkendala kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan menyebar di berbagai lokasi serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.
3. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
4. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.
5. Masih banyaknya ditemui tumpukan sampah yang dibuang sembarangan yang berpotensi merusak lingkungan
6. Masih banyaknya jalanan yang rusak yang termasuk dalam jalan Provinsi, sehingga jarak tempuh menjadi kurang efektif terutama untuk akses jalan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.1.2 Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi.
2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS dimana belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
5. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.

2.3.1.3 Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

1. Keterbatasan wawasan masyarakat tentang pertanian yang produktif dan berkualitas.
2. Masih banyaknya hasil pertanian yang terbuang karena tidak laku terjual tatkala panen raya.
3. Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
4. Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.

5. Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, sehat, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.
7. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
8. Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.

2.3.1.4 Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
7. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
8. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
9. Masih adanya kasus narkoba yang terjadi di wilayah Kecamatan Tanjuang Baru
10. Masih terjadinya aksi ranmor di tempat ibadah

2.3.1.5 Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

1. Masih terbatasnya fasilitas serta kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
2. Masih terbatasnya fasilitas serta kualitas jaringan dari provider telekomunikasi sehingga untuk akses internet sangat susah.
3. Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).
4. Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
5. Belum optimalnya pemanfaatan TTG (teknologi Tepat Guna) yang telah dikembangkan oleh POSYANTEK yang ada.

secara umum dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah dijelaskan pada BAB II Poin 1. Sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah kecamatan, Kecamatan Tanjuang Baru adalah Penghubung Pemerintahan Nagari dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, tentunya Kecamatan Tanjuang Baru tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari. Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari inilah yang seringkali menjadi kendala karena adanya kekurangsiapan aparatur Pemerintahan Nagari dalam menyikapi instruksi-instruksi, dan pelaksanaan pelayanan publikpun tidak lepas dari permasalahan dan hambatan karena masyarakat menginginkan birokrasi yang lebih singkat dan tidak berlama-lama, berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjuang Baru

No	Permasalahan	No	Hambatan
1	Kurangnya Jumlah Aparatur	1	Jarak yang cukup jauh ke pusat Kabupaten
2	Kurangnya Kapasitas Aparatur	2	Tranportasi umum ke pusat Kabupaten kurang
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana	3	Tanjuang Baru daerah Perbatasan dengan Kabupaten Lain
4	Biaya Operasional Tidak memadai	4	Kapasitas Aparatur Nagari

Tanjuang Baru sebagai daerah yang berbatasan lansung dengan Kabupaten lain mestinya menjadi pintu gerbang yang melambangkan keberhasilan Tanah datar dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sebagai daerah perbatasan Kecamatan Tanjuang Baru sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari kabupaten dan kota Terdekat, sebagai contoh maraknya peredaran Narkoba di Tanjuang Baru.

Penduduk Kecamatan Tanjuang Baru mayoritas pekerjaannya bergerak di sektor pertanian ladang, bukan pertanian sawah karena kesulitan air dengan tidak adanya aliran sungai aktif yang melewati daerah Tanjuang Baru, Masyarakat Tanjuang Baru dalam kesehariannyapun sangat kesulitan mendapatkan sumber air bersih karena kondisi gegografis Tanjuang baru yang cukup tinggi.Beberapa hal tersebut diatas bisa berkontribusi negatif terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Renja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 mengacu kepada rancangan RKPD Tahun 2024 supaya Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD sehingga prinsip satu kesatuan

dalam perencanaan daerah tercapai dan adanya keselarasan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rancangan RKPD digunakan sebagai dasar pemutakhiran Renja OPD dan sebaliknya setelah proses pembandingan, Renja OPD menjadi dasar penambahan dan pengurangan terhadap Rancangan RKPD.

Pagu Indikatif Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 telah memuat program-program yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian misi daerah, Kecamatan sebagai OPD pelaksana program-program tersebut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung program yang sudah diamanahkan tersebut pada tahun 2023 dan 2024, akan tetapi ada beberapa program baru yang dipandang strategis bagi pencapaian misi daerah yang hendaknya bisa jadi pertimbangan untuk ditambahkan kedalam RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan dengan table T-C.31 sebagai berikut:

TABEL -C- 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN TANAH DATAR

SKPD : KECAMATAN TANJUANG BARU

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	A. Urusan Kewilayahan					***A. Urusan Kewilayahan***					
	Kecamatan				***Rp 1,620,000,000***	***Kecamatan***				***Rp 2,079,445,400***	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**Rp 1,360,000,000.00**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***				**Rp 1,700,245,400.00**	
	Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tj. Baru	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata	100%	Rp 7,700,000.00	*Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		Rp 20,500,000.00	
	Administrasi Keuangan Derah	Kec. Tj. Baru	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan	100%	Rp 1,189,055,000.00	*Administrasi Keuangan Derah*		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan	100%	Rp 1,395,055,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tj. Baru	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 2,000,000.00	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kec. Tj. Baru	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 13,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tj. Baru	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 57,004,600.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tj. Baru	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 129,900,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp -	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Rp 41,450,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec. Tj. Baru	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Rp 56,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec. Tj. Baru	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara		Rp 62,790,400.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Rp 85,790,400.00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**Rp 42,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**100%**	**Rp 53,200,000.00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Rp 3,000,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tj. Baru	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	*Rp 5,000,000.00*	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Tj. Baru	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Rp 36,800,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Rp 43,000,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	1 laporan	Rp 2,200,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	1 Laporan	Rp 5,200,000.00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		Rp 15,000,000.00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 18,000,000.00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		Rp 15,000,000.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		Rp 18,000,000.00	APBD Kabupaten
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Tj. Baru	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 28,000,000.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Tj. Baru	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	**Rp 31,000,000.00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tj. Baru	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	100%	Rp 28,000,000.00	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kec. Tj. Baru	100%	100%	Rp 31,000,000.00	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Tj. Baru	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 137,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Tj. Baru	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Rp 162,000,000.00**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		Rp 137,000,000.00	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		Rp 162,000,000.00	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 38,000,000.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Rp 115,000,000.00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		Rp 38,000,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		Rp 115,000,000.00	
TOTAL					Rp 1,620,000,000.00					Rp 2,079,445,400.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengenai usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan dari para pemangku Kepentingan yang berasal dari kelompok masyarakat Tahun 2025 tertuang dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut:

TABEL
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH DATAR

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tanjuang Baru

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANJUANG BARU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan dengan program prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan pemukiman dengan program prioritas Penyediaan Perumahan Layak dan Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan program prioritas Pengembangan 3 Kawasan pariwisata, pengembangan 5 kawasan Ekonomi khusus, Pengembangan 3 kawasan Industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan energi dengan program prioritas EBT dan Konservasi Energi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan pangan dengan program prioritas Peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian
7. Penanggulangan kemiskinan dengan program prioritas jaminan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman dengan program prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat,laut udara dan inter-moda) dan pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan wilayah dengan program prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan, reforma agraria, pencegahan dan penanggulangan bencana dan percepatan pembangunan papua
10. Politik, Hukum dan pertahanan keamanan dengan program prioritas penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum dan reformasi birokrasi

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjuang Baru

Tujuan Renja Kecamatan Tanjuang Baru merupakan penajaman dari tujuan Renstra periode 2021-2026 setelah dilaksanakan evaluasi kinerja pelayanan, maka ditetapkanlah rumusan tujuan Renja Kecamatan Tanjuang Baru sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian dan mengembangkan kegiatan-kegiatan seni tradisi
2. Meningkatkan pemahaman agama dan kecintaan terhadap Al-Qur'an
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga, organisasi masyarakat dan pemuda didalam pembangunan
4. Menciptakan lingkungan dan sekolah yang sehat dan aman
5. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan pemerintah kecamatan.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, hukum serta seluruh kewajiban perpajakan

Berdasarkan rumusan Tujuan Renja Kecamatan Tanjuang Baru dan sasaran strategis pada Renstra 2021-2026 didapat rumusan sasaran Renja Kecamatan Tanjuang Baru 2025 sebagai berikut :

1. Aktifnya grup kesenian dan kegiatan – kegiatan seni tradisi di tengah masyarakat
2. Meningkatnya pemahaman terhadap agama
3. Berkurangnya perilaku negatif, kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
6. Meningkatnya perilaku positif ditengah masyarakat
7. Meningkatnya pendapatan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan pada Renja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 merupakan usaha pencapaian misi Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tanjuang Baru yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tanjuang Baru Periode 2021 - 2026, dan merupakan hasil evaluasi dan telaahan terhadap kebutuhan di lapangan, berikut program dan kegiatan usulan Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 :

1. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Admimistrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
10. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berikut Rancangan Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai mana tertuang dalam Tabel T-C.33: Rumusan Rencana Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 sebagaimana dibawah ini:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TANJUANG BARU TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjuang Baru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Jumlah Pagu	Sumber Dana			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**				**Urusan Kewilayahan**								
7	**01**				**Kecamatan**				1,588,534,101				2,287,389,940
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**			**1,518,019,701**				**1,870,269,940**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan**		**100%**	**4,600,000**			**100%**	**22,550,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Tanjuang Baru	2 dokumen (Renja, Renstra)	3,100,000	APBD Kabupaten		2 dokumen (Renja, Renstra)	6,600,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Tanjuang Baru	4 dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	0	APBD Kabupaten		4 dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	9,350,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tanjuang Baru	3 laporan (LKjIP dan laporan kinerja triwulanan, LKPJ, LPPD)	1,500,000	APBD Kabupaten		3 laporan (LKjIP dan laporan kinerja triwulanan, LKPJ, LPPD)	6,600,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**		**100%**	**1,378,684,671**			**100%**	**1,534,560,500**

7	01	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Tanjuang Baru	11 Orang/ bulan	1,378,684,671	APBD Kabupaten		11 Orang/ bulan	1,525,210,500
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tanjuang Baru	2 Laporan	0	APBD Kabupaten		2 Laporan	9,350,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek / diklat**		**100%**	**0**			**100%**	**14,300,000**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kecamatan Tanjuang Baru	12 orang	0			12 orang ASN	14,300,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**38,000,000**			**100%**	**142,890,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 Paket	500,000	APBD Kabupaten		1 Paket	3,190,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 paket	4,000,000	APBD Kabupaten		1 paket	14,300,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Tanjuang Baru	2 Paket	2,000,000	APBD Kabupaten		2 Paket	8,250,000
7	01	01	2.06	06	Penyedian bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 dokumen	-	APBD Kabupaten		1 dokumen	770,000

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Kecamatan Tanjuang Baru	2 laporan	4,000,000	APBD Kabupaten		2 laporan	18,700,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Tanjuang Baru	3 Laporan	27,000,000	APBD Kabupaten		3 Laporan	97,680,000
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**40,400,000**			**100%**	**61,600,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tanjuang Baru	1 Laporan	0	APBD Kabupaten		1 Laporan	2,200,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Tanjuang Baru	2 laporan	17,000,000	APBD Kabupaten		2 laporan	19,800,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 laporan	23,400,000	APBD Kabupaten		1 laporan	39,600,000
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**		**100%**	**56,335,030**			**100%**	**94,369,440**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Tanjuang Baru	1 unit Roda 4 dan 6 unit Roda 2	55,335,030	APBD Kabupaten		1 unit Roda 4 dan 6 unit Roda 2	70,169,440
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tanjuang Baru	15 Unit	1,000,000	APBD Kabupaten		15 Unit	6,600,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kecamatan Tanjuang Baru	3 unit	0	APBD Kabupaten		3 unit	17,600,000

						dipelihara/ direhabilitasi							
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**23,064,400**			**100%**	**58,520,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**0**			**100%**	**5,500,000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 dokumen	0	APBD Kabupaten		1 dokumen	5,500,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**23,064,400**			**100%**	**47,300,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjuang Baru		23,064,400	APBD Kabupaten	1 THL Paten	1 Laporan	39,600,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 Laporan	0	APBD Kabupaten		1 Laporan	7,700,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**		**100%**	**0**			**100%**	**5,720,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 Laporan	0	APBD Kabupaten		1 Laporan	5,720,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan**		**100%**	**3,850,000**			**100%**	**19,800,000**

						nagari dan pembangunan nagari							
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		**100%**	**3,850,000**			**100%**	**19,800,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Tanjuang Baru	5 Lembaga kemasyarakatan	**3,850,000**	APBD Kabupaten		5 Lembaga kemasyarakatan	14,300,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjuang Baru	1 Laporan	0	APBD Kabupaten		1 Laporan	5,500,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**		**100%**	**0**			**100%**	**34,100,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**		**100%**	**0**			**100%**	**34,100,000**
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tanjuang Baru	1 Laporan	0	APBD Kabupaten		1 Laporan	34,100,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**		**100%**	**15,000,000**			**100%**	**178,200,000**

7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**		**100%**	**0**			**100%**	**178,200,000**
7	**01**	**05**	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tanjuang Baru	50 Orang	0	APBD Kabupaten		50 Orang	94,600,000
7	**01**	**05**	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	- Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tanjuang Baru	50 Orang	15,000,000	APBD Kabupaten		50 Orang	83,600,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**100%**	28,600,000			**100%**	**126,500,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**100%**	28,600,000	**-**	**-**	**100%**	**126,500,000**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	- Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Tanjuang Baru	2 dokumen	600,000	APBD Kabupaten		2 dokumen	8,800,000

7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan kepala desa	- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Nagari	Kecamatan Tanjuang Baru	2 dokumen	-	APBD Kabupaten		2 dokumen	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Tanjuang Baru	1 Dokumen	18.000,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	50,600,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Tanjuang Baru	5 Dokumen	10,000,000	APBD Kabupaten		5 Dokumen	67,100,000
JUMLAH									**1,727,447,459**				2,287,389,940

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TANJUANG BARU

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu stratetegis, dan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Tanah Datar khususnya, maka dirumuskanlan rencana kerja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025 sebagai acuan bagi Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar baik sekretariat maupun seksi-seksi..

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN TANJUNG BARU KAB. TANAH DATAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TANJUNG BARU						**1,588,534,101.00**							**2,287,389,940.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,588,534,101.00**							**2,287,389,940.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1,588,534,101.00**							**2,287,389,940.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan administrasi kantor yang ditata***	**-**			**100 %**	**1,518,019,701.00**						**-**	**1,870,269,940.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dihasilkan*	-			100 %	4,600,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	22,550,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,100,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		6,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	0.00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		9,350,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1,500,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		6,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan*	-			100 %	1,378,684,671.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	1,534,560,500.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,378,684,671.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1,525,210,500.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0.00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		9,350,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang mengikuti Bimtek/ Diklat*	-			100 %	0.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	14,300,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		14,300,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	38,000,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	142,890,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		3,190,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,500,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		14,300,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		8,250,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		770,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1 8,700,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	27,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		9 7,680,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	40,400,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	61,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		2,200,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	17,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		19,800,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	23,400,000.00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		3 9,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	56,335,030.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	9 4,369,440.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	55,335,030.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		7 0,169,440.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	1,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		6,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		17,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**23,064,400.00**						**-**	**58,520,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	5,500,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		5,500,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Meningkatnya kualitas pelayanan publik*	-			100 %	23,064,400.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	4 7,300,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	23,064,400.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		3 9,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		7,700,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	5,720,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		5,720,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari***	**-**			**100 %**	**3,850,000.00**						**-**	**19,800,000.00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari*	-			100 %	3,850,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	19,800,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	3,850,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		14,300,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0.00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		5,500,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0.00**						**-**	**34,100,000.00**	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	34,100,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		34,100,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum***	**-**			**100 %**	**15,000,000.00**						**-**	**178,200,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya*	-			100 %	15,000,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	178,200,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	0.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		94,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	15,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		83,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa***	**-**			**100 %**	**28,600,000.00**						**-**	**126,500,000.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat*	-			100 %	28,600,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	126,500,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	600,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		8,800,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		50,600,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		67,100,000.00	KECAMATAN TANJUNG BARU
	JUMLAH							**1,588,534,101.00**						**2,287,389,940.00**	

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 yang telah disusun ini telah mendapat komitmen dari Camat dan seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Tanjuang Baru, untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi-evaluasi yang dideskripsikan didalam Renja ini merupakan hasil pembahasan bersama Tim pembuat rancangan Renja dan diharapkan berguna bagi pihak yang memerlukan.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektiftivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjuang Baru , baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan, agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri No, 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan

dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang RPJP Daerah RPJMD serta tata cara Awal RPJP Daerah , RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

b. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tatacara penyusunan sudah mulai baik dan tertata.
c. Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru Tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJM, RPJMD Provinsi, RKPD provinsi, RPJP Kabupaten, RKPD Kabupaten Tanah Datar dan Renstra Perangkat Daerah

5.3 Rencana Tindak lanjut

Program-program dan Kegiatan–kegiatan yang diusulkan merupakan hasil evaluasi dan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari pemangku kepentingan dan hasil informasi yang didapatkan dilapangan mengenai permasalahan-permasalahan pelayanan, keamanan dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap Usulan-usulan program dan kegiatan dari Kecamatan Tanjuang Baru ini dapat terakomodir demi untuk kemajuan Masyarakat Tanjuang Baru.

Berikut rencana tindak lanjut dari rencana kerja tahun 2025:

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas dan kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
c. Menerapkan sistem reward and punisment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif bedasarkan beban kerja.

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yag dilaksanakan agar berdaya dan berhasil guna.
e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditentukan.

Mudah-mudahan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tanjuang Baru 2025 ini bisa menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat bagi penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran Sementara Tahun 2025, serta berkontribusi positif terhadap pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjuang Baru.

CAMAT TANJUANG BARU

RIKY AFRIZALDI, S.STP
PEMBINA
NIP.19830123 200112 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR



RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN LINTAU BUO

TAHUN 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	4
	1.2	Landasan Hukum	6
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH		9
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan RenjaPerangkat daerah dan Capaian Renstra Kecamatan Lintau Buo	9
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
	2.5	Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III	TUJUAN,DAN SASARAN (RENJA) KECAMATAN LINTAU BUO		43
	3.1	Telahaan Kebijakan Nasional	43
	3.2	Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Lintau Buo	43
	3.2	Program dan Kegiatan	44
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		54
BAB V	PENUTUP		74

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNYA, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Lintau Buo, telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Lintau Buo merupakan rancangan perencanaan anggaran tahun 2025 yang dapat disusun berkat kerjasama Tim Penyusun Rencana Kerja Kantor Camat Lintau Buo serta bimbingan dari Instansi Teknis yang membidangi.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan masukan yang telah diberikan dalam penyelesaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Buo, Juli 2024

CAMAT LINTAU BUO

MULKHAIRI, S.Pd

NIP. 19820326 200501 1 006

KEPUTUSAN CAMAT LINTAU BUO
NOMOR : 050 /2/LB-2024

T E N T A N G

RENCANA KERJA KECAMATAN LINTAU BUO
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyususunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.
b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lintau Buo;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera tengah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5758) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan .....

Lembaran Kedua Keputusan Camat Lintau Buo
Nomor : 050 / /LB - 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

7. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Tata cara Perubahan Renacan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pe,bangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor.9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor.9), sebagaiamana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor. 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor. 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Le,baran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 NOmor. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor. 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor. 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Menetapkan .....

Lembaran Ketiga Keputusan Camat Lintau Buo
Nomor : 050 / /LB - 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Dimaksud diktum kesatu diberikan tugas :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Berdasarkan Renstra OPD.
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
5. Menelaah rancangan awal RKPD.
6. Perumusan Tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan tujuan dan sasaran daerah.
7. Menelaah usulan program dan kegiatan.
8. Perumusan kegiatan prioritas.
9. Penyajian Awal dokumen rancangan Renja OPD.

Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun sebelumnya, target kinerja Tahun 2025 yang terukur : Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran, rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan output dan outcome serta sumber pembiayaan

Keempat : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Camat Lintau Buo.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Lintau Buo
Pada tanggal : Januari 2024

CAMAT LINTAU BUO

CAMAT LINTAU BUO

MULKHAIRI, S.Pd
NIP. 19820326 200501 1 006

Lampiran Keputusan Camat Lintau Buo
Nomor : 050/ /LB -2024
Tanggla : 2 Januari 2024

NO.	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Mulkhairi, S.Pd	Camat Lintau Buo	Penanggung Jawab
2.	Dra. Nita Jandru	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Santia Wella, A.Md	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Sekretaris
4.	Ekawati Herminarsih	Kasi Pelum	Anggota
5.	Heriyet	Kasi Tapem	Anggota
6.	Mari Yossefli, S.AP	Kasi Kessos	Anggota
7.	Mailus wedi, A.Md	Kasi PMD	Anggota
8.	Yuliasnita, S.AP	Kasubag Umum&Kepegawaian	Anggota

CAMAT LINTAU BUO

MULKHAIRI, S.Pd
NIP. 19820326 200501 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan lansung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Renja OPD menjadi bahan pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD.

Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Renja OPD
   Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.
b) Penyusunan Rancangan Renja
   Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan akhir yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Rancangan Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereviw hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan akhir RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian akhir dokumen rancangan Renja OPD

c) Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD, Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan simtem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja OPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten

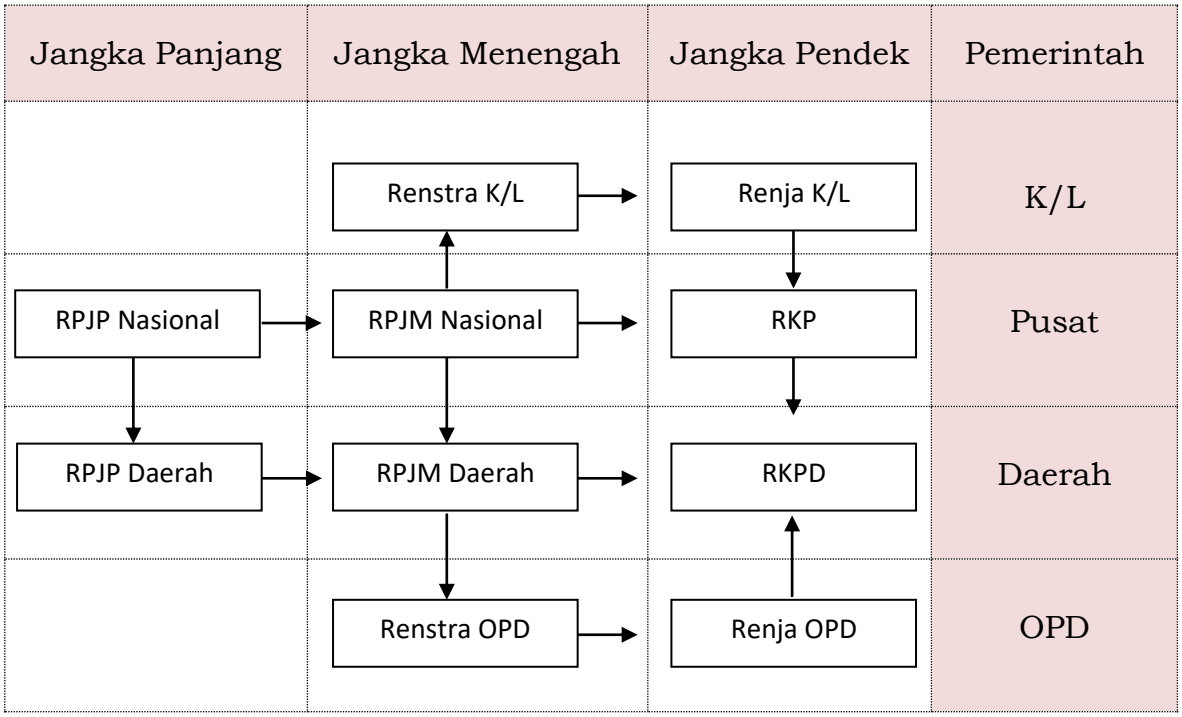
d) Penetapan Renja

Penetapan renja merupakan proses verivikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara peyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD,RPJMD,Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada Rancangan akhir RKPD dan Renstra OPD dimana Rancangan akhir RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD, sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, dan RENJA OPD :



1.2 LANDASAN HUKUM.

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera tengah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5758) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Tata cara Perubahan Renacan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pe,bangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor.9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor.9), sebagaiamana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor. 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor. 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Le,baran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 NOmor. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor. 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor. 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Adanya kerangka acuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan

serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lintau Buo 2025.

2. Terlaksananya proses perencanaan yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lintau Buo 2025.

1.3.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Renja OPD Tahun 2025 adalah :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.
2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Pada dasarnya penyusunan Renja OPD ini bertujuan untuk lebih terjaminnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan prioritas Kecamatan Lintau Buo dalam turut mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERENGKAT DAERAH.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lintau Buo
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LINTAU BUO

3.1 Telahaan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Lintau Buo
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra kecamatan Lintau Buo.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008, Kecamatan Lintau Buo mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) Tahun 2023.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Kecamatan Lintau Buo selaku Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan Lintau Buo dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari

evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja keuangan, secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lintau Buo telah mencapai target.

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Kecamatan Lintau Buo Kab. Tanah Datar sepanjang Tahun 2023 :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa dokumen RENJA dan RENSTRA Kecamatan Lintau Buo tahun 2021 telah selesai dibuat dan telah mulai di laksanakan kegiatannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada kecamatan Lintau Buo .
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu 2023 dan Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 selesai dibuat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada kecamatan Lintau Buo .
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   Output dari kegiatan ini adalah Laporan Kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kecamatan Lintau Buo tahun 2023. Pembuatan laporan-laporan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habis tahun berjalan (setelah 31 Desember 2023). Per 31 Desember 2023 semua laporan telah dapat dikatakan telah selesai dan tinggal penyempurnaan saja.

II. Administrasi Keuangan perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Output dari kegiatan ini adalah jumlah gaji dan tunjangan yang telah terealisasikan kepada seluruh ASN Kecamatan Lintau Buo .

2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun

   Penyusunan laporan keuangan juga serupa dengan laporan kinerja, dibuat setelah 31 Desember 2023 .per 5 Januari 2024 telah mulai dilakukan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023, dan ditargetkan akan selesai pada bulan Februari 2024.

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

   Realisasi kinerja jauh dari target disebabkan karena kesalahan entry rekening kegiatan yang terletak pada rekening Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di luar kabupaten sedangkan kegiatan lebih banyak dilakukan di dalam Kabupaten.

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Kecamatan Lintau Buo terpenuhi dan berfungsi dengan baik.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Kecamatan Lintau Buo terpenuhi dengan baik.

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan barang cetakan amplop dinas, map dan jasa photocopy terpenuhi dengan baik

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk rapat internal Kecamatan Lintau Buo maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana dengan baik

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

1. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, dengan adanya pengadaan laptop dan printer untuk keperluan Kecamatan Lintau Buo .

VI. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancer

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan kantor terlaksana selama 1 tahun

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Realiasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 2 Kendaraan roda 4 dan 9 kedaraan roda 2 kendaraan dinas di Kecamatan Lintau Buo

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Realisasi kinerja sesuai target, telah terpenuhinya semua kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin di Kecamatan Lintau Buo .

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Realisasi kinerja sesuai target, telah terpenuhinya semua kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin di Kecamatan Lintau Buo.

VIII. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya monitoring terhadap proyek-proyek di nagari dan Kecamatan.

IX. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan PATEN di Kecamatan Lintau Buo dan terpenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya target masyarakat yang telah wajib merekam KTP.

X. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

   Keluaran dari kegiatan ini adalah melakukan monitoring ke nagari-nagari mendampingi petugas kolektor pemungutan

PBB kepada masyarakat agar target pemungutan PBB tercapai.

XI. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

   Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat Nagari dan Kecamatan dimana terdapat 5 nagari di kecamatan Lintau Buo yang melaksanakan Musrenbang dan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dan telah terealisasikan pada triwulan I penganggaran.

2. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Kinerja tidak sesuai dengan target kegiatan karena adanya pengurangan anggaran sehingga kegiatan ini tidak terlaksana dan realisasi kegiatan dan keuangan 0%

XII. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

   Kinerja tidak sesuai dengan target kegiatan karena adanya pengurangan anggaran sehingga kegiatan ini tidak terlaksana dan realisasi kegiatan dan keuangan 0%

XIII. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target setelah adanya pengurangan anggaran dan adanya pengurangan kegiatan fisik seperti kegiatan Paskibra untuk HUT.RI pelaksanaannya hanya mengunakan Pasukan delapan dan cabang olah raga bola kaki di tiadakan

2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan telah terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan yg melombakan 32 cabang dan kegiatan ini terlaksana dengan baik

XIV. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan telah terlaksananya penyusunan APB di 4 nagari di kecamatan Lintau Buo dan kegiatan ini terlaksana dengan baik

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dan kegiatan ini terlaksana dengan baik

3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

   Kinerja kegiatan ini sesuai dengan target dengan terlakananya kegiatan Lembaga Unsur di Kecamatan Lintau Buo dan pembinaan ke nagari-nagari, kegiatan ini terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2023 Kecamatan Lintau Buo melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Berikut tabel realisasi anggaran Tahun 2023 :

Tabel 2.1.1

Realisasi Kegiatan Tahun 2023

NO	URAIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN
1	2	**3**	**4**	**5**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.402.835	2.297.000.	95.6
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.145.184	4.144.750.	99.99
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.965.100	1.964.000.	70.00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN	1.253.457.983	1.246.096.903	99.41
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	899.305	899.000	99.97
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000	1.485.000	99
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	448.800	446.000	99.38
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.823.800	5.754.700.	98.81
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	2.996.000.	99.87
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.343.000	9.339.400.	99.96
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.454.842	37.408.005	99.87
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	18.529.966.	92.65

14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.162.900	25.162.900	100
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	41.913.000	38.836.602.	92.66
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	100
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	2.986.500.	99.55
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	750.000	750.000	100
19	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	68.493.200	68.493.200.	100
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.500.000	1.500.000	100
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.000.000	1.972.200.	98.61
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.865.000	4.852.900	99.75
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	750.000	750.000	100
24	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.534.500	1.514.700	98.71

25	Fasilitasi, Koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	10.449.100	10.438.100.	99.89
26	Pembinaan Kerukuna Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional, dan Nasional	23.964.000	23.936.500.	99.89
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.534.500	4.306.800.	94.98
28	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.500.000	1.500.000.	100
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.500.000	13.500.000.	100
30	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15.456.000	14.866.500.	96.19

Berdasarkan realisasi capaian kinerja keuangan, secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lintau Buo telah mencapai target.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Tanah Datar

Kantor Camat Lintau Buo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024
1	2	3	4	5	8	9	10 = (9/8)	11	12	13 = (12/11)
7	**Urusan Kewilayahan**									
7.01	**Kecamatan**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									

7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah jenis dokumen laporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Derah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**								
7.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100 %	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %
7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**								
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	12 Orang	6 Orang	12 Orang	6 Orang	50 %	12 Orang	12 Orang	100 %

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	13 0rang	13 0rang	12 0rang	12 0rang	100%	12 0rang	12 0rang	100 %
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	2Paket	2Paket	2Paket	2Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan uang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	1 2 Laporan	1 2 Laporan	1 2 Laporan	1 2 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.06.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	

7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik. Jumlah tagihan telepon dan internet.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7,01,01,2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**						**-**			
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	umlah Kendaraan Dinas atau lapangan yang disediakan								
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan					-			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/perleng kapan kantor yang disediakan					-			
7,01,01,2,07,09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7,01,01,2,07,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan								

7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**								
7.01.01.2.09.02	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 5Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	100 %	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	100 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	66 %	6 Unit	6 Unit	100 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**									
7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**					-			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan / tenaga THL	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP nya / KK miskin yang menerima bantuan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbang yang dikuti dan dilaksanakan	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**								
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfis yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksanakan.	100 Orang	75 Orang	100 Orang	75 Orang	75 %	100 Orang	100 Orang	100 %
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah festival yang diikuti dan MTQ	150 Orang	100 Orang	150 Orang	100 Orang	67 %	150 Orang	150 Orang	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**									

7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**								
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina dan Koordinasi Forkopinca	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
J U M L A H			-	-	-	-	-	-	-	

Buo , Januari 2024

CAMAT LINTAU BUO

MULKHAIRI, S.Pd
NIP. 19820326 200501 1 006

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelayanan publik yang ingin dicapai dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Pada dimensi internal, pelayanan publik merupakan salah satu isu utama sejalan dengan tuntutan demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi pada hakekatnya menyuarakan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemegang kekuasaan, yang dengan demikian suara

masyarakat diletakkan pada derajat yang paling tinggi. Semangat demokratisasi dalam peneyelenggaraan pemerintahan akan menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu penyelenggaraan fungsi pelayanan public kepada masyarakat dan memungkinkan untuk menyelesaikan komplain (bila ada) dengan pihak penyelengaran pelayanan. Pada sisi perencanaan, penyelengaraan pelayanan publik yang terdesentralisasi akan meningkatkan responsifitas (daya tanggap) terhadap kebutuhan lokal dan membantu Pemerintah daerah (lembaga penyedia layanan) mengindentifikasi dan memahami karakteristik khas masyarakat setempat.

Pada dimensi eksternal, pelayanan publik tidak akan memainkan kunci dalam mengahadapi tatangan globalisasi. Paling tidak tantangan globalisasi tersebut memerlukan jawaban dalam hal peningkatan daya saing (competitivanss) dan daya tarik (Attractiveness) baik ditingkat regional maupun internasional.

Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan, maka perlu dilakukan pelayanan prima yang merupakan palayanan yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan, keinginan, dan harapan masyarakat yang mempunyai nilai yang tinggi dan bermutu (berkualitas). Dengan demikian dapat ditarik pengertian secara sederhana bahwa pelayanan bermutu.

Lebih jauh lagi hakekat dari pelayanan umum yang prima adalah berupa upaya-upaya sebagai berikuit :

a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasilguna (efektif dan efisien)

c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan inovasi peran serta masyarakat secara luas.

Hasil penilaian pelayanan prima di Kecamatan Lintau Buo dapat dilihat hasil penilaian pelayanan yang telah di laksanakan seperti berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (95)	Baik (92)	96.8	
2	Nilai Hasil Ealuasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73)	B (69.86)	95,69	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	3	1	33.33%	

Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima, pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Sederhana, artinya dalam pelaksanaan tidak menyulitkan, prosedurnya, tidak berbelit-belit dan persyaratannya mudah dipenuhi.
2. Terbuka, artinya masyarakat ingin dilayani secara terbuka, transparan sejujur-jujurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lancar, artinya pemberian pelayanan harus bekerja secara ikhlas dan sepenuh hati, dengan didukung sarana dan prasarana penunjang untuk kecepatan pelayanan itu sendiri.

4. Tepat, artinya pemberian pelayanan dapat dilakukan secara tepat arah, sasaran jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang dan tepat waktu.
5. Lengkap, artinya apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat terhadap suatu pelayanan tertentu dapat tersedia secara lengkap.
6. Wajar, artinya pelayanan dilakukan sebagaimana terjangkau, artinya biaya pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.

Setelah dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat suatu pelayanan publik yang prima, sehingga dengan demikian persepsi masyarakat terhadap kinerja reformasi dan birokrasi pemerintah akan menjadi lebih baik lagi.

Yang pada akhirnya nanti dapat dibangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi pemerintah akan memiliki legitimasi yang kuat dihadapan masyarakat dan pada sisi lain masyarakat akan mendapat pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah.

Berikut program dan kegiatan pendukung Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Lintau Buo :

Tabel. T-C . 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo
Kabupaten Tanah Datar

NO	INDIKATOR	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5			6	9		12		13
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	100%	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.			BB	BB	BB	BB	BB	BB	80%	80%	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan .			-	2	2	2	2	2	100%	100%	

Buo, Juli 2024

CAMAT LINTAU BUO

MULKHAIRI, S.Pd

NIP. 19820326 20051 1 006

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN LINTAU BUO

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lintau Buo dimaksud untuk menentukan permasalahan, hambatan, atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lintau Buo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lintau Buo tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Lintau Buo.

Berdasarkan Kondisi pelayanan Kecamatan Lintau Buo saat ini serta kondisi yang diinginkan dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis pada Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

Setelah melalui pengkajian atas masalah-masalah yang sedang berkembang, dari agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2021–2026, didapatkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Camat Pariangan yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan

   Peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat yang berurusan ke Kantor Camat Lintau Buo dan peningkatan pengelolaan tata pemerintahan diperlukan guna menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas SDM dan sarana dan prasarana pemerintahan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerintahan.

b. Bidang Pemerintahan Nagari.

   Terciptanya pemerintahan Nagari yang baik dan bersih sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan kecamatan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas aparatur Nagari, pembinaan terhadap lembaga dan organisasi Nagari serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Nagari.

c. Bidang Keagamaan, Kesenian, Olah Raga dan Sosial Budaya

Kegiatan di bidang keagamaan, kesenian, olah raga dan sosial budaya ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Lintau Buo telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya perlu untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal pembinaan terhadap lembaga-lembaga kesenian, agama, sosial budaya dan olah raga.

d. Bidang Ekonomi

Masih banyaknya keluarga miskin di Kecamatan Lintau Buo, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi jumlah keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Serta perlu dilakukan update data jumlah keluarga tidak mampu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

Perlu adanya evaluasi terhadap KK yang mendapat bantuan baik dari daerah maupun pusat (Bantuan Program Nasional) sehingga yang sudah tidak layak dibantu dapat dikeluarkan dari data penerima bantuan, sedangkan yang layak dibantu dapat masuk kedalam data penerima bantuan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD.

RKPD tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisa kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan akhir tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala proiritas kecuali pagu

indikatif yang ditetapkan. Tabel review terhadap Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 sebagai :

Tabel. T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan Lintau Buo

	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Anggaran	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Kewilayahan				**3.702.000.000**	**Urusan Kewilayahan**				**2.435.057.450**	
	Kecamatan				**3.702.000.000**	**Kecamatan**				**2.435.057.450**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**3.279.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**2.171.557.450**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**23.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**15.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	6.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**2.216.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**1.430.658.200**	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.209.000.000	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.425.658.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**9.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**7.500.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang ASN	9.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang ASN	7.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**169.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Lintau Buo	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**134.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Jenis	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Jenis	12.000.000	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah barang cetak yang disediakan	8 jenis (cetak), 7.500 Lembar fotocopy	7.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah barang cetak yang disediakan	8 jenis (cetak), 7.500 Lembar fotocopy	6.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 paket	4.000.000			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	24.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	90.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase barang milik daerah yang disediakan**		**690.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang disediakan**	**100%**	**440.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		75.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit lemari arsip, 3 buah perinter	30.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan		-	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan		-	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki		-	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki		-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		500.000.000					400.000.000	
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan		65.000.000	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan		-	
	Pengadaan memebl	Kecamatan Lintau Buo			50.000.000					10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**50.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**58.899.250**	

	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 lembar @ 10.000	2.000.000	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 lembar @ 10.000	1.500.000	
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	24.000.000	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/tenagah THL	2 jenis, 1 THL	24.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/tenagah THL	2 jenis, 1 THL	27.399.250	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**122.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Lintau Buo	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**85.000.000**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit roda 4, 5 unit roda 2	55.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit roda 4, 5 unit roda 2	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 jenis	7.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 jenis	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit (Gedung Kantor)	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit (Gedung Kantor)	30.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**96.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Lintau Buo	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**88.500.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**	**100%**	**5.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**	**100%**	**3.500.000**	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	3.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**84.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Kecamatan Lintau Buo	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**82.000.000**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	90% / 3 orang THL	78.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	90% / 3 orang THL	78.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600 Orang, 100 %,	6.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600 Orang, 100 %,	3.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**100%**	**7.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	**100%**	**3.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85%	7.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85%	3.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**19.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**13.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**19.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**13.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Nagari, 1 Kecamatan	14.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Nagari, 1 Kecamatan	10.000.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Nagari	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Nagari	3.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**12.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**22.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	**12.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	**22.000.000**	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Masjid	12.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Masjid	22.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**195.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**80.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**195.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**80.000.000**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 cabang (volly dan sepak bola), 3 Organisasi	70.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 cabang (volly dan sepak bola), 3 Organisasi	30.000.000	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Cabang seni dan budaya, 24 Cabang MTQ	125.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Cabang seni dan budaya, 24 Cabang MTQ	50.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**101.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**60.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**101.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**60.000.000**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	4 Nagari	14.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	4 Nagari	12.000.000	
	Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Pemilihan Wali Nagari	4 Nagari	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Pemilihan Wali Nagari	4 Nagari	-	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Sekolah	27.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Sekolah	18.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Nagari, 6 Organisasi	60.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lintau Buo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Nagari, 6 Organisasi	30.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 merupakan rencana kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Lintau Buo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Lintau Buo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergis antara dokumen perencanaan.

Tabel. T-C. 32

Usulan Program Dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 69 Tahun 2011, merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta untuk Penyusunan Reencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daerah tahun 2021-2026 dapat menjawab kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada. Secara keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 dituangkan dalam 7 agenda pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya.
2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan serta kesejahteraan sosial.
4. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi daearah melalui pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta prioritas pembangunan sektor pertanian, pariwisata dan Industri berbasis pertanian.
5. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat.
7. Mewujudkan reformasi birokrasi mulai dari tingkat pemerintahan nagari sampai tingkat kabupaten .

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN LINTAU BUO .

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, sesuatu yang akan dicapai oleh kecamatan Lintau Buo dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi.

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk mewujudkan tercapainya suatu rencana kerja satu tahun kedepan, merupakan unsur penting dalam memulai suatu perencanaan baik dalam merencanakan program dan kegiatan maupun dalam merencanakan pengangaran (Budget) pada setiap Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dalam bentuk penyusunan LKJIP setiap akhir tahun anggaran.
2. Renja merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

SASARAN

Sasaran dari rencana kerja adalah agar terlaksananya program kerja yang telah disusun selama satu tahun kedepan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sasaran dari penyusunan Renja adalah :

1. Tertib administrasi dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Meningkatnya pengelolan adimistrasi perkantoran.
3. Meninkatnya sistim perencanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatnya pengukuran kinerja .

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
        1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.3 Koordinaasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.3 Administrasi Kepegawaim Perangkat Daerah

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Bahan Logistik

1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.6.2 Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
     - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
     - 2.2.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
     - 2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   - 2.3 Pelaksanan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
     - 2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
     - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
     - 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
     - 4.1.1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.2 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragana, Ras, dan Golongan Lainnyan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembagaa Kemasyarakatan

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kecamatan Lintau Buo

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01				**Urusan Kewilayahan**				**2.038.978.000**				**2.197.304.216**
7.01				**Kecamatan**				**2.038.978.000**				**2.197.304.216**
7.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**		**100%**	**1.824.017.760**	**-**	**-**	**100%1**	**1.923.304.216**
7.01	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**		**100%**	**10.500.000**			**100%**	**21.000.000**
7.01	**01**	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lintau Buo	2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	7.500.000			2 dokumen (RENSTRA DAN RENJA)	7.000.000
7.01	**01**	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Lintau Buo	4 dokumen	-			4 dokumen	7.000.000

7.01	**01**	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lintau Buo	3 dokumen	3.000.000			3 dokumen	7.000.000
7.01	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**		**100%**	**1.443.104.760**				**1.531.304.216**
7.01	**01**	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lintau Buo	14 bulan	1.440.104.760			14 bulan	1.524.304.216
7.01	**01**	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lintau Buo	2 dokumen	3.000.000			2 dokumen	7.000.000
7.01	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**		**100%**	**5.000.000**				**7.000.000**
7.01	**01**	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Lintau Buo	13 orang ASN	5.000.000			13 orang ASN	7.000.000
7.01	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**62.500.000**				**133.000.000**
7.01	**01**	2.06	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo	2 Jenis	1.500.000,00			2 Jenis	2.000.000,00
7.01	**01**	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo	25 Jenis	9.000.000			25 Jenis	12.000.000
7.01	**01**	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan	Kecamatan Lintau	8 jenis (cetak), 7.500 Lembar	4.000.000			8 jenis (cetak), 7.500 Lembar	5.000.000

						Buo	fotocopy				fotocopy	
7.01	**01**	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lintau Buo	1 Tahun	18.000.000			1 Tahun	24.000.000
7.01	**01**	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lintau Buo	12 Bulan	30.000.000			12 Bulan	90.000.000
7.01	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang disediakan**		**100%**	**200.000.000**			**100%**	**75.000.000**
7.01	**01**	2.07	06	Pengadaan Peralatan Gedung dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo	1 unit PC, 2 unit Printer	-			Lap top 3 unit	75.000.000
7.01	**01**	2.07		Pengadaan Perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Lintau Buo		-				-
7.01	**01**	2.07		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Kecamatan Lintau Buo		-				-
7.01	**01**	2.07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo	1 gedung Pertemuan	200.000.000				-
7.01	**01**	2.07		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan	Kecamatan Lintau Buo		-			2 unit roda 2,)	-
7.01	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**46.000.000**			**100%**	**54.000.000**
7.01	**01**	2.08	01	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lintau Buo	120 lembar @ 10.000	1.000.000			120 lembar @ 10.000	2.000.000

7.01	**01**	2.08	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lintau Buo	12 Bulan	20.000.000			12 Bulan	24.000.000
7.01	**01**	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/tenagah THL	Kecamatan Lintau Buo	2 jenis, 1 THL	25.000.000			2 jenis, 1 THL	28.000.000
7.01	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**		**100%**	**56.913.000**			**100%**	**102.000.000**
7.01	**01**	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Lintau Buo	1 unit roda 4, 5 unit roda 2	41.913.000			1 unit roda 4, 5 unit roda 2	55.000.000
7.01	**01**	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Lintau Buo	20 jenis	2.000.000			20 jenis	7.000.000
7.01	**01**	2.09	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Lintau Buo	1 unit (Gedung Kantor)	13.000.000			1 unit (Gedung Kantor)	40.000.000
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**74.447.750**			**100%**	**89.000.000**
7.01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik**		**100%**	**1.500.000**			**100%**	**5.000.000**
7.01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	100%	1.500.000			100%	5.000.000
7.01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**70.947.750**			**100%**	**81.000.000**

7.01	02	2.02	**02**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	90% / 3 orang	70.197.750			90% / 1 orang	78.000.000
7.01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	600 Orang, 100 %, 1 Orang	750.000			100%	3.000.000
7.01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**		**100%**	**2.000.000**			**100%**	**3.000.000**
7.01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lintau Buo	85%	2.000.000			85%	3.000.000
7.01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**5.750.000**			**100%**	**11.000.000**
7.01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		**100%**	5.750.000			**100%**	11.000.000
7.01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lintau Buo	4 Nagari, 1 Kecamatan	5.000.000			5 Nagari, 1 Kecamatan	8.000.000
7.01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lintau Buo	1 Nagari	750.000			1 Nagari	3.000.000
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**9.000.000**			**100%**	**12.000.000**
7.01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**		**100%**	9.000.000			**100%**	12.000.000
7.01	**04**	**2.01**	**02**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lintau Buo	4 Masjid	9.000.000			5 Masjid, 50 Orang	12.000.000

7.01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**65.000.000**			**100%**	**98.000.000**
7.01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**		**100%**	**65.000.000**			**100%**	**98.000.000**
7.01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lintau Buo	2 cabang (volly dan sepak bola), 3 Organisasi	35.000.000			2 cabang (volly dan sepak bola), 3 Organisasi	23.000.000
7.01	05	2.01	**04**	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lintau Buo	5 Cabang seni dan budaya, 24 Cabang MTQ	30.000.000			5 Cabang seni dan budaya, 46 Cabang MTQ	75.000.000
7.01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**60.762.490**			**100%**	**64.000.000**
7.01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**100%**	**60.762.490**			**100%**	**64.000.000**
7.01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	Kecamatan Lintau Buo	4 Nagari	5.000.000			5 Nagari, 1 THL	14.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Wali Nagari	Kecamatan Lintau Buo	4 Nagari	-			4 Nagari	-
7.01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lintau Buo	4 Nagari	30.000.000			4 Nagari, 3 Instansi	20.000.000
7.01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lintau Buo	4 Nagari, 6 Organisasi	25.762.490			4 Nagari, 6 Organisasi	30.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lintau Buo tahun 204sesuai kebutuhan sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN LINTAU BUO KAB. TANAH DATAR

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Lintau Buo						1.691.878.731							2.197.304.216	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.668.078.731							2.096.304.216,	
	7	01				KECAMATAN						1.668.078.731							2.096.304.216,	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata	-			100 %	1.538.709.083						-	1.822.304.216,	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	-			100 %	1.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	-	14.000.000	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		7.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1.500.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		7.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	-			100 %	1.441.196.083,			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	-	1.531.304.216,	

															Narkoba, Judi dan Penyeludupan				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.439.696.083	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		1.524.304.216	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.500.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		7.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/ diklat	-			100 %	1.600.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegaha	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	-	-	7.000.000	

															n dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	yang bersih, akuntabel dan berkualitas				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	1.600.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	15.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	41.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5.000.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.000.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.500.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		24.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	-	75.000.000	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		0,00	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasMeningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		75.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO

	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		0,00	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	44.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	-	52.000.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		24.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO

	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		28.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 %	34.913.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	-	102.000.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	31.913.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		55.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO

	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	1.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		7.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		40.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-			100 %	73.197.750						-	89.000.000	

						PUBLIK														
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-			100 %	1.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	5.000.000	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	1.500.000.	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		5.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-			100 %	70.947.750,			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludu	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	81.000.000,00	

															pan				
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	70.197.750	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		78.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	750.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		3.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	-			100 %	750.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih,	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	3.000.000	

															Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	akuntabel dan berkualitas				
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	750.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		3.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	-			100 %	4.250.000,00						-	11.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	-			100 %	4.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	11.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasMeningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		8.000.000,	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	750.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		3.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-			100 %	0,00						-	12.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	-			100 %	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	12.000.000,00	

															Narkoba, Judi dan Penyeludupan				
	7	01	04	2.01	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	0,00	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		12.000.000,00	KECAMATAN LINTAU BUO
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-			100 %	21.500.000,00						-	98.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	-			100 %	21.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	98.000.000,00	
	7	01	05	2.01	00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				72 Orang	1.500.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		23.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
							0				20	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		75.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-			100 %	30.421.898						-	64.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah	-			100 %	30.421.898,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	64.000.000,00	

						Pemerintahaan Desa	masyarakat								Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan					
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	1.500.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	18.000.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka				5 Dokumen	10.921.898	Kab. Tanah Datar, Lintau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi,	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO

							Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						Buo, Semua Kel/ Desa	ASI UMUM	serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan				
	X					NON URUSAN						23.800.000							101.000.000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						23.800.000							101.000.000	
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata	-			100 %	23.800.000						-	101.000.000	
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	-			100 %	3.000.000.			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	7.000.000	
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	3.000.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO

															Penyeludupan				
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	20.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	-	92.000.000	
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	500.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		2.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20.000.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegaha	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		90.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO

													Desa		n dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	yang bersih, akuntabel dan berkualitas				
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	300.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitasMeningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.000.000	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	300.000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
	JUMLAH											**1.691.878.731,**							**2.197.304.216**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektiftivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lintau Buo , baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan, agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri No, 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang RPJP Daerah RPJMD serta tata cara Awal RPJP Daerah , RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah dan peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

b. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2023 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tatacara penyusunan sudah mulai baik dan tertata.

c. Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2023 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJM, RPJMD Provinsi, RKPD provinsi, RPJP Kabupaten, RKPD Kabupaten Tanah Datar dan Renstra Perangkat Daerah

5.3 Rencana Tindak lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas dan kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

c. Menerapkan sistem reward and punisment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif bedasarkan beban kerja.

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yag dilaksanakan agar berdaya dan berhasil guna.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditentukan.

Buo, Juli 2024

CAMAT LINTAU BUO

MULKHAIRI, S.Pd

NIP. 19820326 200501 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Jalan Raya Saruaso Km 09 Telp.(0752) 7576399

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG EMAS

NOMOR: 954/ 05 /KTE-2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 KANTOR CAMAT TANJUNG EMAS.

CAMAT TANJUNG EMAS

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Kedua Penyusunan Renja SKPD pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Tanjung Emas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 , tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk personil yang namanya tersebut pada Kolom 2 (dua) dan jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2025;

KEDUA : Pejabat Yang ditunjuk mempunyai tugas :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereviw hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan awal RKPD

6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum pertama melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan bertanggungjawab penuh terhadap Camat Tanjung Emas.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 pada DPPA Kantor Camat Tanjung Emas .

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saruaso
pada tanggal : Februari 2024

CAMAT TANJUNG EMAS

ZULKIFLI IDRIS, S,Sos
NIP.19661029 198903 1 007

Tembusan, Yth :
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung

Lampiran : Keputusan Camat Tanjung Emas
Nomor : 954/ /KTE-2024
Tanggal : Februari 2024.

NAMA ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RENJA 2025
PADA KANTOR CAMAT TANJUNG EMAS
TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Nama / NIP	Jabatan dlm Kedinasan	Jabatan dlm Tim
1	2	3	4
1	ZULKIFLI IDRIS,S.Sos	Camat	Ketua
2	Dewi Fetri Yenti, ST	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua
3	Desmira, S.AP	Kasubag Perkeu	Sekretaris
4	Neti Enida, SE.Akt	Kasi Tapem	Anggota
5	Dasril, S.Sos	Kasi PMD	Anggota
6	Hardial, S.Sos	Plt. Kasi Pelum	Anggota
7	Davitril	Kasi Kessos	Anggota
8	Hardial, S.Sos	Kasubag Umpeg	Anggota

Ditetapkan di : Saruaso
Pada tanggal : Februari 2024.

CAMAT TANJUNG EMAS

ZULKIFLI IDRIS,S.Sos
NIP. 19661029 198903 1 007

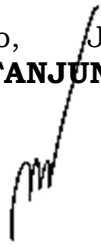
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNYA, sehingga penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja Tahun 2025 Kantor Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Kantor Camat Tanjung Emas merupakan rancangan perencanaan anggaran tahun 2025 yang dapat disusun berkat kerjasama Tim Penyusun Rencana Kerja Kantor Camat Tanjung Emas serta bimbingan dari Instansi Tekhnis yang membidangi.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan masukan yang telah diberikan dalam penyelesaian Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja Tahun 2025.

Saruaso, Juli 2024
CAMAT TANJUNG EMAS



ZULKIFLI IDRIS,S.Sos
NIP. 19661029 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Tanjung Emas
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjung Emas
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjung Emas
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Rankhir Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan lansung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Rankhir Renja OPD menjadi bahan pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD.

Rankhir Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Rankhir Renja OPD

   Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

b) Penyusunan Rancangan Rankhir Renja

   Penyusunan rancangan Rankhir Renja OPD merupakan tahapan Akhir yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Penyusunan Rancangan Rankhir Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereviw hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah Rancangan Akhir RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian Akhir dokumen rancangan Renja OPD

c) Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD, Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan simtem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja OPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten

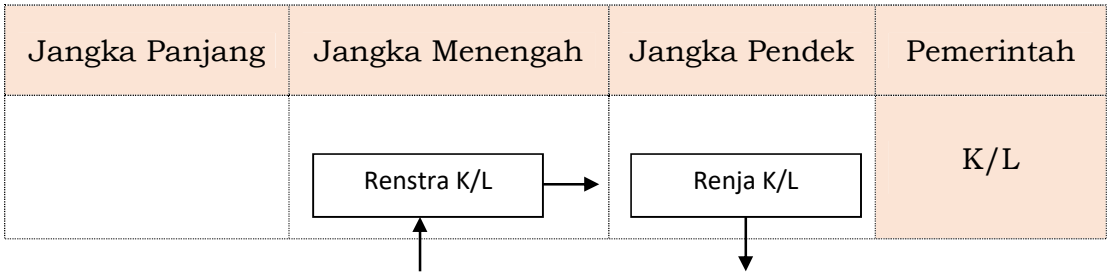
d) Penetapan Renja

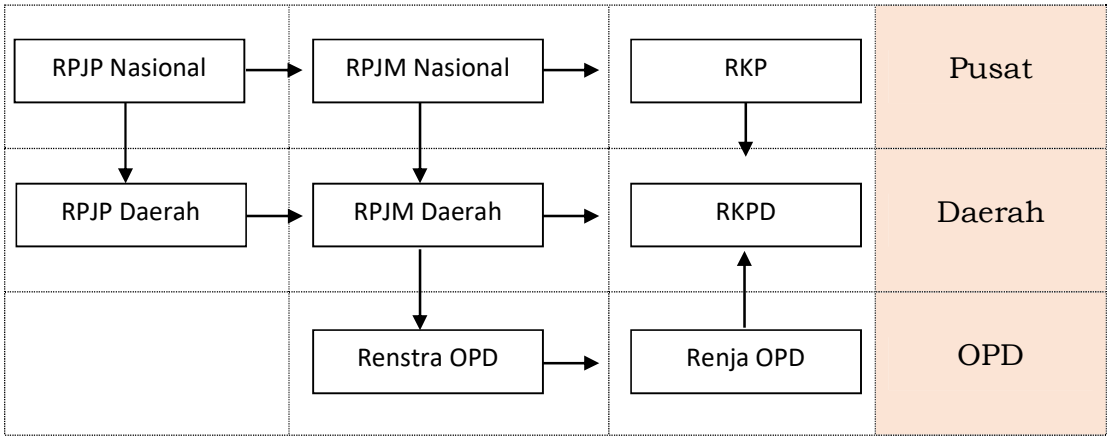
Penetapan renja merupakan proses verivikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan Rancangan Akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara peyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD,RPJMD,Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada Rancangan Akhir RKPD dan Renstra OPD dimana Rancangan Akhir RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir RKPD, sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, dan RENJA OPD :





.

Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Emas disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Mentri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan perda No.06 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9)
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan.
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas kecamatan.
9. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026
10. Perbup Nomor 24 tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Perbup Nomor 28 Tahun 2019 tentang SOTK Baru

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Adanya kerangka acuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanjung Emas 2025.
2. Terlaksananya proses perencanaan yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Emas 2025.

Tujuan penyusunan Rankhir Renja OPD Tahun 2025 adalah :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2025 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2025 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Tanjung Emas beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Tanjung Emas, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan dan mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TANJUNG EMAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Tanjung Emas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjung Emas
2.2 Analisis Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Tanjung Emas.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjung Emas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanah Datar.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TANJUNG EMAS

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjung Emas

BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V :PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka pelaksanaan misi Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor Camat Tanjung Emas, tahun 2025 yang merupakan tahun keempat periode renstra 2021-2026 Kantor Camat Tanjung Emas telah melaksanakan 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, berikut penjabaran singkat mengenai Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Camat Tanjung Emas tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Mesjid yang dikunjungi tim ramadhan			5	5	5	5	-	-	5	5	
2	Jumlah cabang MTQ Kabupaten yang diikuti Jumlah cabang MTQ Kecamatan yang dilaksanakan			30 5	30 5	30 5	30 5	- -	- 5	30 5	30 5	
3	Jumlah kegiatan seni dan budaya yang diikuti			1	1	1	1	-	1	1	1	
4	Jumlah kegiatan kesehatan terfasilitasi			1	1	1	1	-	1	1	1	
5	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan			2	2	2	2	-		2	2	
6	Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat yang diberdayakan			5	5	5	5	5	5	5	5	
7	Jumlah Nagari mengikuti Lomba Nagari berprestasi dan bulan bakti goro			1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Jumlah rapat pelaksanaan musrenbang			11	11	11	11	11	10	11	11	
9	Jumlah Proyek di Kecamatan di evaluasi			4	4	4	4	4	-	4	4	
10	Jumlah Kelompok pemuda yang dibina			2	2	2	2	2	-	2	2	
11	Jumlah Kompetensi Olah raga yang diikuti			2	2	2	2	-	-	2	2	
12	Jumlah Kilogram raskin tersalurkan			911	911	911	911	-	-	911	911	
13	Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina			2	2	2	2	2	2	2	2	
14	Jumlah kasus terfasilitasi			2	2	2	2	2	2	2	2	
15	Jumlah masyarakat yang merekam KTP-E			400	400	400	400	300	375	400	400	
16	Jumlah dokumen profil kecamatan			1	1	1	1	1	1	1	1	
17	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadapa PATEN			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
18	Jumlah APBN dievaluasi			8	8	8	8	8	8	8	8	
19	Jumlah PNS yang terfasilitasi Bimtek dan pelatihan			12	12	12	12	12	12	12	12	
20	Persentaase penerimaan PBB			80	80	5	5	80		5	5	

Tabel. T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Kecamatan Tanjung Emas – Kabupaten Tanah Datar

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indicator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program I Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan (Tahun 2023	Target Program I Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan (Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun..... (Tahun Berjalan/n-l)
					Target	Realisasi	Tkt Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 5+7+9 *	11=10/4 *
7 01 01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kantor yang ditata	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		2 Dokumen	100%
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kantor yang ditata	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		2 Dokumen	100%
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		4 Dokumen	100%

7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	LAKIP	2 dokumen	100%
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 org	11 org	11 org	11 org	100%		11 org	100%
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%		2 laporan	100%
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	11 org	11 org	11 org	11 org	100%		11 org	100%

7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%		1 paket	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%		12 paket	100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%		1 paket	100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		1 laporan	100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		1 laporan	100%
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Tenaga Jasa	1 laporan 1 org	1 laporan 1 org	1 laporan 1 org	1 laporan 1 org	100%		1 laporan 1 org	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%		3 laporan	100%
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	1 laporan 1 org	1 laporan 1 org	1 laporan 1 org	1 laporan 1 org	100%		1 laporan 1 org	100%

7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
7 01 01 2.09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%		7 unit	100%
7 01 01 2.09. 09	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%		10 unit	100%
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**									
7 01 02 2.01	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**									
7 01 02 2.01 02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**									
7 01 02 2,02 02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar	Jumlah laporan fasilitasi	I laporan 1 org	I laporan 1 org	I laporan 1 org	I laporan 1 org	100%		I laporan 1 org	100%

	Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan Jumllah tenaga jasa								
7 01 02 2.02 03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatdi wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah tenaga medis	I laporan 1 org	I laporan 1 org	I laporan 1 org	I laporan 1 org	100%		I laporan 1 org	100%
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**									
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lainnya yang dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		1 laporan	100%
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN**									
7 01 03 2.01	**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**									
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	100%		6 lembaga	100%
7 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	Jumlah laporan yang terselesaikan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		1 lembaga	100%

	masyarakat di wilayah kecamatan									
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									
7 01 04 2 01	**Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**									
7 01 04.2 01 02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	Pembinaan guru tahfiz dan kegiatan safari Ramadhan	2 laporan	100%
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**									
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100%		120 orang	100%
7 01 05 2 01 04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%		100 orang	100%

7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**									
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		2 dokumen	100%
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibanlembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan tupoksi	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%		5 dokumen	100%

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah			97, 50		100%	100%		
	1. Jumlah Capaian Layanan Publik 2. Nilai Hasil survey Kepuasan Masyarakat										

Tabel T-C. 31
RKPD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Tanjung Emas

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**1.697.610.389**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**1.697.610.389**	
	Kegiatan. **1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**28.750.000**	**Kegiatan.** **2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**28.750.000**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Nagari, Kec Tanjung Emas	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen Renja/ Renstra	1.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Nagari, Kec Tanjung Emas	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen Renja/ Renstra	1.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen RKPD	27.000.000.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen	27.000.000.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinrja SKPD	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen LAKIP	1 LAKIP	750.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinrja SKPD	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen LAKIP	1 LAKIP	750.000	
	Kegiatan **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1.379.982.446**	**Kegiatan** **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1.379.982.446**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tanjung Emas	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	1.378.982.446	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tanjung Emas	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	1.378.982.446	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	1.000.000	
	Kegiatan **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Aparatur yang disiplin**	**100**	**1.000.000**	Kegiatan **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Aparatur yang disiplin**	**100**	**1.000.000**	
	Sub Kegiatan Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tupoksi	Kec Tanjung Emas	Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan	14 orang	1.000.000	Sub Kegiatan Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tupoksi	Kec Tanjung Emas	Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan	14 orang	1.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Administrasi Umum PD**	**100**	**22.000.000**	Kegiatan **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Administrasi Umum PD**	**100**	**22.000.000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor	Kec tanjung Emas	Jumlah item komponen instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor	Kec tanjung Emas	Jumlah item komponen instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	1.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec Tanjung Emas	Jumlah logistik yang disediakan	12 paket	4.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec Tanjung Emas	Jumlah logistic yang disediakan	12 paket	4.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	1 paket	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	1 paket	1.000.000	
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tanjung Emas	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan Tamu		1.000.000	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	1 dokumen	1.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan Rapat Rutin		15.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan Rapat Rutin		15.000.000	
	Kegiatan 1. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah penyediaan Urusan PD**	**100**	**76.900.000**	Kegiatan **5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah penyediaan Urusan PD**	**100**	**76.900.000**	

	Pemerintahan Daerah					**Pemerintahan Daerah**					
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan penyediaan dan tenaga jasa	1 dokumen 1 org	27.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan penyediaan dan tenaga jasa	1 dokumen 1 org	27.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Emas	Jumlah jasa yang terpakai	3 Laporan	21.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Emas	Jumlah jasa yang terpakai	3 Laporan	21.900.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanjung Emas	Jumlah kegiatan dan tenaga jasa	1 laporan 1 org	28.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanjung Emas	Jumlah kegiatan dan tenaga jasa	1 laporan 1 org	28.000.000	
	Kegiatan 2. **Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan PD**	**100**	**37.227.943**	Kegiatan **6. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan PD**	**100**	**37.227.943**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/Operasional	1 mobil 6 unit motor	33.211.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/Operasional	1 mobil 6 unit motor	33.211.200	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Emas	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	10 unit	2.516.743	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Emas	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	10 unit	2.516.743	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kec. Tanjung Emas	Jumlah perbaikan dan Pemeliharaan berkala gedung kantor	3 unit	1.500.000 -	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kec. Tanjung Emas	Jumlah perbaikan dan Pemeliharaan berkala gedung kantor	3 unit	1.500.000 -	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Capaian Layanan**	**100**	**55.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Capaian Layanan**	**100**	**55.500.000**	
	Kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**500.000**	Kegiatan **1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**500.000**	
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 dokumen	500.000 -	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 dokumen	500.000 -	

	Kegiatan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Tanjung Emas**	**persentase Fasilitasi Percepatan Pencapaian SPM di wilayah kecamatan** **Jumlah tenaga jasa**	**100**	**55.000.000**	Kegiatan **2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**55.000.000**	
	Sub kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal diwilayah kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan SPM Jumlah tenaga jasa	1 dokumen 1 orang	27.500.000	Sub kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal diwilayah kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan SPM Jumlah tenaga jasa	1 dokumen 1 orang	27.500.000	
	Sub kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Laporan kegiatan Jumlah tenaga jasa	1 dokumen 1 orang	27.500.000	Sub kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Laporan kegiatan Jumlah tenaga jasa	1 dokumen 1 orang	27.500.000	
	Kegiatan **Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Tanjung Emas**	**pesentase pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan**	**100**	**750.000**	Kegiatan **3. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Tanjung Emas**	**pesentase pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan**	**100**	**750.000**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 dokumen	750.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan	1 dokumen	750.000	

	dengan kewenangan lain yang dilimpahkan					kewenangan lain yang dilimpahkan		lain yang dilimpahkan			
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**2.441.402**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Program pemberdayaa n masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**2.441.402**	
	Kegiatan **1. Koordinasi kegiatan Permberdayaan Desa**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100**	**2.000.000**	Kegiatan **2. Koordinasi kegiatan Permberdayaan Desa**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah kegiatan pemberdayaa n Masyarakat Desa**	**6 Lembag a Kemasy arakatan**	**2.000.000**	
	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasya rakatan	1.500.000	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasya rakatan	1.500.000	
	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terpenuhi	1 dokumen	500.000	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah kegiatan pemberdayaa n masyarakat yang terpenuhi	1 dokumen	500.000	

	Kegiatan **3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**100**	**1.500.000**	Kegiatan **4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**100**	**1.500.000**	
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	1.500.000	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Emas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	1.500.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase yang akan mengikuti Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi dan konsultasi**	**100**	**30.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase yang akan mengikuti Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi dan konsultasi**	**100**	**30.000.000**	

	Kegiatan **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan**	**100**	**30.000.000**	Kegiatan **2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan**	**100**	**30.000.000**	
	Sub Kegiatan 1. Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tanjung Emas	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	120 orang	15.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tanjung Emas	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	120 orang	15.000.000	
	Sub Kegiatan 2. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	Kec. Tanjung Emas	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	100 orang	10.000.000	Sub Kegiatan 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	Kec. Tanjung Emas	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	100 orang	10.000.000	

6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**67.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Semua Nagari, Kec Tanjung Emas**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**67.000.000**	
	Kegiatan **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Aset Desa**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah Nagari yang tertib administrasi**	**100**	**67.000.000**	Kegiatan **1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Aset Desa**	**Kec. Tanjung Emas**	**Jumlah Nagari yang tertib administrasi**	**100**	**67.000.000**	
	Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen yang difasilitasi dlm pengelolaan keuangan desa dan Aset	2 dokumen	29.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen yang difasilitasi dlm pengelolaan keuangan desa dan Aset	2 dokumen	29.000.000	
	Sub Kegiatan 2. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen terkait kegiatan	1 dokumen	18.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen terkait kegiatan	1 dokumen	18.000.000	
	Sub Kegiatan 3. Fasilitasi pelaksanaan Tupoksi dan Kewajiban lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen terkait kegiatan	5 dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan 4. Fasilitasi pelaksanaan Tupoksi dan Kewajiban lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen terkait kegiatan	5 dokumen	20.000.000	

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fung OPD

Sebagaimana dijelaskan pada BAB II poin 2 Kantor Camat Tanjung Emas telah melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diembankan untuk mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan dalam periode Renstra 2021-2026, sampai dengan tahun 2025 Kantor Camat Tanjung Emas secara umum dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah dijelaskan pada BAB II Poin 1 Sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah kecamatan, Kantor Camat Tanjung Emas adalah Penghubung Pemerintahan Nagari dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, tentunya Kantor Camat Tanjung Emas tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari, koordinasi dengan Pemerintahan Nagari inilah yang seringkali menjadi kendala karena adanya kekurangsiapan aparatur Pemerintahan Nagari dalam menyikapi instruksi-instruksi, dan pelaksanaan pelayanan publikpun tidak lepas dari permasalahan dan hambatan karena masyarakat menginginkan birokrasi yang lebih singkat dan tidak berlama-lama, berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Camat Tanjung Emas.

No	Permasalahan	No	Hambatan
1	Kurangnya Jumlah Aparatur	1	Jarak yang cukup jauh ke pusat Kabupaten
2	Kurangnya Kapasitas Aparatur	2	Tranportasi umum ke pusat Kabupaten kurang
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana	3	Kurangnya kendaraan dinas pada Kantor Camat Tanjung Emas
4	Biaya Operasional Tidak memadai	4	Kapasitas Aparatur Nagari

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Renja Kantor Camat Tanjung Emas Tahun 2025 mengacu kepada rancangan RKPD Tahun 2025 supaya Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD sehingga prinsip satu kesatuan dalam perencanaan daerah tercapai dan adanya keselarasan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rancangan Akhir RKPD digunakan sebagai dasar pemutakhiran Renja OPD dan sebaliknya setelah proses pembandingan, Renja OPD menjadi dasar penambahan dan pengurangan terhadap rancangan Akhir RKPD.

Kecamatan sebagai OPD pelaksana program-program tersebut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung program yang sudah diamanahkan pada tahun 2023 akan tetapi ada beberapa program baru yang dipandang strategis bagi pencapaian misi daerah yang hendaknya bisa jadi pertimbangan untuk ditambahkan kedalam RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, untuk lebih jelasnya kami paparkan dengan tabel .

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. penjelasan tentang proses usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut adalah :

   Usulan program / kegiatan yang dibahas didalam musrebang mekanismenya diAkhiri dari penggalian gagasan dari tingkat jorong / lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, pemuda, unsur PKK dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke usulan musrenbang Nagari dan selanjutnya ditunjuk perwakilan nagari mengAkhir usulan tersebut di Forum Musrenbang Kecamatan

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan sebenarnya bagi masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing perangkat daerah

2. menyajikan Tabel T-C. 32, sebagai berikut :

TABEL T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kecamatan Tanjung Emas – Kabupaten Tanah Datar

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume %	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	
	Kegiatan. 1 Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Emas	Persentase anggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100	
	Kegiatan 2 Administrasi Keuangan PD	Kec. Tanjung Emas	Persentase administrasi Keuangan PD	100	
	Kegiatan 3 Administrasi Kepegawaian PD	Kec. Tanjung Emas	Persentase Aparatur yang disiplin	100	
	Kegiatan 4 Administrasi Umum perangkat daerah	Kec. Tanjung emas	Persentase Administrasi Umum PD	100	
	Kegiatan 5 Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Tanjung Emas	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100	
	Kegiatan 6 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanjung Emas	Jumlah penyediaan urusan penunjang daerah	100	
	Kegiatan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Tanjung Emas	Jumlah pemeliharaan Barang penunjang urusan pemerintah daerah	100	

2	**Program Penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan Publik**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Capaian Layanan**	**100**	
	Kegiatan 1 Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kec. Tanjung Emas	Jumlah nagari yang mendapat fasilitasi kemiskinan	100	
	Kegiatan 2 Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Ke. Tanjung Emas	Jumlah capaian layanan public yang dilaksanakan dan hasil survey kepuasan masyarakat	IKM	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	
	Kegiatan 1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tanjung Emas	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa	100	
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Program Ketentraman dan Ketertiban**	**100**	
	Kegiatan 1 Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Tanjung Emas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban	100	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan Umum**	**100**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanjung Emas	Jumlah orang yang akan mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahan Nasional	120 orang	
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tanjung Emas**	**Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	
	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Kec. Tanjung Emas	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset	100	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan dengan program prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan pemukiman dengan program prioritas Penyediaan Perumahan Layak dan Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan program prioritas Pengembangan 3 Kawasan pariwisata, pengembangan 5 kawasan Ekonomi khusus, Pengembangan 3 kawasan Industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan energi dengan program prioritas EBT dan Konservasi Energi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan pangan dengan program prioritas Peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian
7. Penanggulangan kemiskinan dengan program prioritas jaminan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman dengan program prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat,laut udara dan inter-moda) dan pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan wilayah dengan program prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan dengan program prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan pemukiman dengan program prioritas Penyediaan Perumahan Layak dan Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan program prioritas Pengembangan 3 Kawasan pariwisata, pengembangan 5 kawasan Ekonomi khusus, Pengembangan 3 kawasan Industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan energi dengan program prioritas EBT dan Konservasi Energi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan pangan dengan program prioritas Peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian
7. Penanggulangan kemiskinan dengan program prioritas jaminan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman dengan program prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat,laut udara dan inter-moda) dan pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan wilayah dengan program prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan

perdesaan, reforma agraria, pencegahan dan penanggulangan bencana dan percepatan pembangunan papua

10. Politik, Hukum dan pertahanan keamanan dengan program prioritas penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum dan reformasi birokrasi

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengAkhir dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Tanjung Emas

Tujuan Renja Kantor Camat Tanjung Emas sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian dan mengembangkan kegiatan-kegiatan seni tradisi
2. Meningkatkan pemahaman agama dan kecintaan terhadap Al-Qur'an
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga, organisasi masyarakat dan pemuda didalam pembangunan
4. Menciptakan lingkungan dan sekolah yang sehat dan aman
5. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan pemerintah kecamatan.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, hukum serta seluruh kewajiban perpajakan

Rumusan sasaran Renja Kantor Camat Tanjung Emas 2025 sebagai berikut:

1. Aktifnya grup kesenian dan kegiatan – kegiatan seni tradisi di tengah masyarakat
2. Meningkatnya pemahaman terhadap agama
3. Berkurangnya perilaku negatif, kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

5. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
6. Meningkatnya perilaku positif ditengah masyarakat
7. Meningkatnya pendapatan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan pada Renja Kantor Camat Tanjung Emas Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi dan telaahan terhadap kebutuhan di lapangan, berikut program dan kegiatan usulan Kantor Camat Tanjung Emas Tahun 2025 :

1. Program

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

2. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitas Kunjungan Tamu
   - Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Meubel
   - Pengadaan Kendaraan Dinas
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Sub Kegiatan :

   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

   Sub Kegiatan :

   - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

    Sub Kegiatan :

    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

    Sub Kegiatan :

    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

    Sub Kegiatan :

    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyalahgunaan Aset Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Tabel T-C. 33
Rencana program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2025
Kecamatan Tanjung Emas – Kabupaten Tanah Datar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinrja Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2021 (tahun Rencana) Perubahan				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01		**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	

7 01 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.02 05		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.06 01		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.06 04		Penyediaan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.06 05		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.06 06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.06 08		Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	

			dan Konsultasi SKPD							
7 01 01 2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Tenaga Jasa	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.08 02		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.09		**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.09 02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.09. 09		Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								
7 01 02 2.01		**Koordinasi penyelenggaraan**								

		kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7 01 02 2.01 02		Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 02 2.02		**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 02 2,02 02		Fasilitasi percepatan pencapaian standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan Jumllah tenaga jasa	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 02 2.02 03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatdi wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah tenaga medis	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 02 2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 02 2.04 03		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lainnya yang dilimpahkan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN**								

		MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN								
7 01 03 2.01		**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**								
7 01 03 2.01 01		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 03 2.01 03		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan yang terselesaikan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								
7 01 04 2 01		**Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**								
7 01 04.2 01 02		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								
7 01 05 2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**		Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 05 2.01 02		Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 05 2 01 04		Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	

		lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional								
7 01 06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								
7 01 06 2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7 01 06 2.01 03		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 06 2.01 11		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kegiatan	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	
7 01 06 2.01 12		Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibanlembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan tupoksi	Kec. Tj Emas	100%		DAU		100%	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT TANJUNG EMAS

Untuk Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Pada OPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja dan Pendanaan sebagai berikut sebagaimana pada lampiran :

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Camat Tanjung Emas 2025 sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, evaluasi-evaluasi yang dideskripsikan didalam Renwal ini merupakan hasil pembahasan bersama Tim pembuat rancangan Renwal dan diharapkan berguna bagi pihak yang memerlukan,

Program-program dan Kegiatan – kegiatan yang diusulkan merupakan hasil evaluasi dan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari pemangku kepentingan dan hasil informasi yang di dapatkan di lapangan mengenai permasalahan-permasalahan pelayanan, keamanan dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap Usulan-usulan program dan kegiatan dari Kantor Camat Tanjung Emas ini dapat terakomodir demi untuk kemajuan Masyarakat Tanjung Emas.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Kantor Camat Tanjung Emas 2025 ini bisa menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat bagi penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran Sementara Tahun 2025, serta berkontribusi positif terhadap pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas.

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektiftivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Emas, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masingmasing Satuan kerja Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makan dalam memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Musrenbang Nagari,

Musrenbang Kecamatan dan melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan, agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri No, 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang RPJP Daerah RPJMD serta tata cara perubahan RPJP Daerah , RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2025 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tatacara penyusunan sudah mulai baik dan tertata

5.3 Rencana Tindak lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas dan kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem reward and punisment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif bedasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya dan berhasil guna.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditentukan

Saruaso, Juli 2024

CAMAT TANJUNG EMAS

ZULKIFLI IDRIS,S.SOS

NIP. 19661029 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

KECAMATAN LIMA KAUM

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

LIMA KAUM
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Lima Kaum tahun 2025 ini.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Lima Kaum Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026.

Dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 ini, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan, namun beberapa kendala dan kesulitan masih ditemui untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Renja ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam memberikan data/kegiatan, kami ucapan terima kasih.

Demikianlah, kami berharap dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Lima Kaum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Lima Kaum, Agustus 2024

CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 198510302003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38

3.3. Program dan Kegiatan 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50

BAB V PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju yang disusun berpedoman kepada RKPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lima Kaum Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Dokumen perencanaan program dan kegiatan kantor Camat Lima Kaum selama satu tahun dijabarkan melalui RKA dan DPA setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lima Kaum Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat akan pentingnya dokumen Renja ini dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Kecamatan Lima Kaum menyusun rancangan akhir rencana kerja untuk tahun 2025 dan disampaikan kepada Bapedda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM,

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam periode Renstra 2021-2026, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Lima Kaum 2025. Rencana kerja tersebut akan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kantor Camat Lima Kaum adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Lima Kaum adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan ranwal renja Kecamatan Lima Kaum

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun Renja.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga periode renstra 2021-2026. Sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Kantor Camat Lima Kaum melaksanakan 6 program dengan 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan, yang secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,40%. Berikut penjabaran singkat mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kantor Camat Lima Kaum tahun 2023 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari anggaran Rp.1.500.000,- dapat direalisasikan Rp.1.500.000,- atau sebesar 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis dokumen laporan (renstra dan renja)

   1.2. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD dari anggaran Rp.1.950.000,- dapat direalisasikan Rp.1.950.000,- atau sebesar 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA).

   1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari anggaran Rp.1.210.000,- dapat direalisasikan Rp.1.185.000,- atau sebesar 97,93%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis dokumen laporan (LKjIP, LKPJ, LPPD).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran Rp.1.407.864.749,- dapat direalisasikan Rp.1.401.425.287,- atau sebesar 99,54%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini

adalah jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan dalam 1 tahun.

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dari anggaran Rp.1.297.000,- dapat direalisasikan Rp.1.272.000,- atau sebesar 98,07%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis dokumen laporan (laporan keuangan).

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari anggaran Rp.3.500.000,- dapat direalisasikan Rp.2.840.000,- atau sebesar 81,14%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari anggaran Rp.652.000,- dapat direalisasikan Rp.652.000,- atau sebesar 100%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam 1 tahun.

   4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari anggaran Rp.5.590.500,- dapat direalisasikan Rp.5.574.500,- atau sebesar 99,71%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun.

   4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari anggaran Rp.4.165.928,- dapat direalisasikan Rp. 4.165.800,- atau sebesar 99,99%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun.

   4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari anggaran Rp.150.000,- dapat direalisasikan Rp.149.500,- atau sebesar 99,67%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun.

4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu dari anggaran Rp.10.912.000,- dapat direalisasikan Rp.10.901.000,- atau sebesar 99,89%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah makan dan minum tamu dan minum rapat yang disediakan dalam 1 tahun.

4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran Rp.27.603.929,- dapat direalisasikan Rp.27.602.400,- atau sebesar 99,99%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang disediakan dalam 1 tahun.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran Rp.200.000,- dapat direalisasikan Rp.200.000,- atau sebesar 100%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah materai yang disediakan dalam 1 tahun.

   5.2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari anggaran Rp.18.315.000,- dapat direalisasikan Rp.18.197.450,- atau sebesar 99,35%. Keluaran yang dari sub kegiatan ini adalah jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, telepon dan internet.

   5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari anggaran Rp.24.478.400,- dapat direalisasikan Rp.24.478.400,- atau sebesar 100%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari anggaran Rp.64.266.100,- dapat direalisasikan Rp.63.708.950,- atau sebesar 99,13%.

   6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari anggaran Rp.2.000.000,- dapat direalisasikan Rp.2.000.000,- atau sebesar 100%.

   6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran Rp.2.000.000,- dapat direalisasikan Rp.2.000.000,- atau sebesar 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah

   1.1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dari anggaran Rp.46.758.800,- dapat direalisasikan Rp.46.515.800,- atau sebesar 99,48%.

   1.2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari anggaran Rp.24.659.400,- dapat direalisasikan Rp.22.475.250,- atau sebesar 91,14%.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah

   2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. dari anggaran Rp.4.073.800,- dapat direalisasikan Rp.4.064.900,- atau sebesar 99,78%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. dari anggaran Rp.6.652.000,- dapat direalisasikan Rp.6.652.000,- atau sebesar 100%.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   1.1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat. dari anggaran Rp.0,- dapat direalisasikan Rp.0,- atau sebesar 0%.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. dari anggaran Rp.13.352.100,- dapat direalisasikan Rp.13.349.550,- atau sebesar 99,98%.

   1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. dari anggaran Rp.23.407.500,- dapat direalisasikan Rp.23.402.000,- atau sebesar 99,97%.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   1.1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. dari anggaran Rp.1.410.000,- dapat direalisasikan Rp.1.410.000,- atau sebesar 100%.

   1.2. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. dari anggaran Rp.15.170.000,- dapat direalisasikan Rp.15.125.000,- atau sebesar 38,64%.

   1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. dari anggaran Rp.20.936.900,- dapat direalisasikan Rp.20.896.800,- atau sebesar 99,81%.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2021-2026 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lima Kaum Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 1 Tujuan dan 3 sasaran strategis pada Renstra Kantor Camat Lima Kaum.

Tujuan dari Kecamatan Lima Kaum yang ditetapkan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

3. Terwujudnya inovasi berkelanjutan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan renja Kantor Camat Lima Kaum sampai dengan tahun berjalan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2

T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

PROPINSI SUMATERA BARAT, KABUPATEN TANAH DATAR

KECAMATAN LIMA KAUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 (n-1))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8=(7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11= (10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**548**	**175**	**85**		**84**		**98,82**	**86**		**345**		**62,96**
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**52**	**16**	**9**		**9**		100,00	**9**		**34**		**65,38**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	8	dokumen	66,67

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	22	dokumen	6	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00	4	dokumen	14	dokumen	63,64
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	dokumen	6	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100,00	3	dokumen	12	dokumen	66,67
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Derah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**96**		**32**		**14**		**14**		**100,00**	**15**		**61**		**63,54**
7.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	orang	28	orang	12	orang	12	orang	100,00	13	orang	53	orang	63,10
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	dokumen	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	8	dokumen	66,67
7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**90**		**37**		**13**		**13**		**100,00**	**13**		**63**		**70,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12	helai	12	helai	-	helai	-	helai		**-**	helai	12	helai	100,00

7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78	orang	25	orang	13	orang	13	orang	100,00	13	orang	51	orang	65,38
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**214**		**59**		**34**		**34**		**100,00**	**32**		**125**		**58,41**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	jenis	7	jenis	5	jenis	5	jenis	100,00	5	jenis	17	jenis	56,67
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlh jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	10	jenis	3	jenis	-	jenis	-	jenis		-	jenis	3	jenis	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	jenis	30	jenis	20	jenis	20	jenis	100,00	15	jenis	65	jenis	54,17
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	jenis	12	jenis	5	jenis	5	jenis	100,00	5	jenis	22	jenis	73,33
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	3	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	5	dokumen	10	dokumen	83,33
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	66,67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	66,67

7.01.01.2.07	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**-**		**1**	**unit**	**-**	**unit**	**-**	**unit**		**-**	**unit**	**1**	**unit**	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas atau lapangan yang disediakan	-		-		-		-			-		-		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		1	unit	-	unit	-	unit		-	unit	1	unit	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-		-		-			-		-		
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**18**		**6**		**3**		**3**		**100,00**	**3**		**12**		**66,67**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	66,67
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	66,67
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	66,67
7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**78**		**24**		**12**		**11**		**91,67**	**14**		**49**		**62,82**

7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	unit	12	unit	6	unit	6	unit	100,00	6	unit	24	unit	66,67
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	8	unit	4	unit	4	unit	100,00	6	unit	18	unit	60,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	4	unit	2	unit	1	unit	50,00	2	unit	7	unit	58,33
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**19**		**7**		**3**		**3**		**100,00**	**4**		**14**		**73,68**
7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**6**		**1**		**-**		**-**			**1**		**2**		**33,33**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	dokumen	1	dokumen	-	dokumen	-	dokumen		1	dokumen	2	dokumen	33,33
7.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**12**		**4**		**2**		**2**		**100,00**	**2**		**8**		**66,67**

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	66,67
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	66,67
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel**	**1**		**2**		**1**		**1**		**100,00**	**1**		**4**		**400,00**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	4	laporan	400,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**48**		**15**		**7**		**7**		**100,00**	**8**		**30**		**62,50**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**48**		**15**		**7**		**7**		**100,00**	**8**		**30**		**62,50**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42	lembaga kemasyarakatan	14	lembaga kemasyarakatan	7	lembaga kemasyarakatan	7	lembaga kemasyarakatan	100,00	7	lembaga kemasyarakatan	28	lembaga kemasyarakatan	66,67

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	laporan	1	laporan	-	laporan	-	laporan		1	laporan	2	laporan	33,33
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**6**		**1**		**1**		**-**		**-**	**1**		**2**		**33,33**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**6**		**1**		**1**		**-**		**-**	**1**		**2**		**33,33**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	laporan	1	laporan	1	laporan	-	laporan	-	1	laporan	2	laporan	33,33
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**1.500**		**500**		**300**		**300**		**100,00**	**250**		**1.050**		**70,00**
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**1.500**		**500**		**300**		**300**		**100,00**	**250**		**1.050**		**70,00**
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	600	orang	200	orang	200	orang	200	orang	100,00	100	orang	500	orang	83,33

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	900	orang	300	orang	100	orang	100	orang	100,00	150	orang	550	orang	61,11
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**73**		**24**		**12**		**12**		**100,00**	**3**		**39**		**53,42**
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**73**		**24**		**12**		**12**		**100,00**	**3**		**39**		**53,42**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60	dokumen	20	dokumen	10	dokumen	10	dokumen	100,00	1	dokumen	31	dokumen	51,67
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen		-	dokumen	-	dokumen	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	4	dokumen	66,67

7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 dokumen	2 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	4	dokumen	66,67
Jumlah			**2.194**	**722**	**408**		**406**		**99,51**	**352**		**1.480**		**67,46**

Lima Kaum, Agustus 2024

CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP

NIP. 198510302003121001

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan publik yang ingin dicapai dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Pada dimensi internal, pelayanan publik merupakan salah satu isu utama sejalan dengan tuntutan demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi pada hakekatnya menyuarakan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemegang kekuasaan, yang dengan demikian suara masyarakat diletakkan pada derajat yang paling tinggi. Semangat demokratisasi dalam peneyelenggaraan pemerintahan akan menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu penyelenggaraan fungsi pelayanan public kepada masyarakat dan memungkinkan untuk menyelesaikan komplain (bila ada) dengan pihak penyelengaran pelayanan. Pada sisi perencanaan, penyelengaraan pelayanan publik yang terdesentralisasi akan meningkatkan responsifitas (daya tanggap) terhadap kebutuhan lokal dan membantu Pemerintah daerah (lembaga penyedia layanan) mengindentifikasi dan memahami karakteristik khas masyarakat setempat.

Pada dimensi eksternal, pelayanan publik tidak akan memainkan kunci dalam mengahadapi tatangan globalisasi. Paling tidak tantangan globalisasi tersebut memerlukan jawaban dalam hal peningkatan daya saing (competitivanss) dan daya tarik (Attractiveness) baik ditingkat regional maupun internasional.

Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan, maka perlu dilakukan pelayanan prima yang merupakan palayanan yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan, keinginan, dan harapan masyarakat yang mempunyai nilai yang tinggi dan bermutu (berkualitas). Dengan demikian dapat ditarik pengertian secara sederhana bahwa pelayanan bermutu.

Lebih jauh lagi hakekat dari pelayanan umum yang prima adalah berupa upaya-upaya sebagai berikuit :

a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasilguna (efektif dan efisien)
c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan inovasi peran serta masyarakat secara luas.

Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima, pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Sederhana, artinya dalam pelaksanaan tidak menyulitkan, prosedurnya, tidak berbelit-belit dan persyaratannya mudah dipenuhi.
2. Terbuka, artinya masyarakat ingin dilayani secara terbuka, transparan sejujur-jujurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lancar, artinya pemberian pelayanan harus bekerja secara ikhlas dan sepenuh hati, dengan didukung sarana dan prasarana penunjang untuk kecepatan pelayanan itu sendiri.
4. Tepat, artinya pemberian pelayanan dapat dilakukan secara tepat arah, sasaran jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang dan tepat waktu.
5. Lengkap, artinya apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat terhadap suatu pelayanan tertentu dapat tersedia secara lengkap.
6. Wajar, artinya pelayanan dilakukan sebagaimana terjangkau, artinya biaya pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.

Setelah dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat suatu pelayanan publik yang prima, sehingga dengan demikian persepsi masyarakat terhadap kinerja reformasi dan birokrasi pemerintah akan menjadi lebih baik lagi, yang pada akhirnya nanti dapat dibangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi pemerintah akan memiliki legitimasi yang kuat dihadapan masyarakat dan pada sisi lain masyarakat akan mendapat pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah.

TABEL 2.3

T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LIMA KAUM

KABUPATEN TANAH DATAR

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun2025 (thn n)	Tahun2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun2025 (thn n)	Tahun2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan			1	1	1	1	1	1	1	1	

Lima Kaum, Agustus 2024

Camat Lima Kaum

IKRAR PAHLEPI, S.STP

NIP. 198510302003121001

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kantor Camat Lima Kaum adalah Penghubung Pemerintahan Nagari dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, dalam hal ini tentunya Kantor Camat Lima Kaum tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari. Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari inilah yang seringkali menjadi kendala karena adanya kekurangsiapan aparatur Pemerintahan Nagari dalam menyikapi instruksi-instruksi, dan pelaksanaan pelayanan publikpun tidak lepas dari permasalahan dan hambatan karena masyarakat menginginkan birokrasi yang lebih singkat dan tidak berlama-lama, tapi seringkali tidak mau mengikuti Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan. Berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Camat Lima Kaum :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Nagari sehingga tugas yang dibebankan seringkali kali pada individu-individu tertentu.
2. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Biaya operasional Kecamatan yang kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan baik untuk tingkat kecamatan maupun dalam mengikuti event-event di tingkat Kabupaten.
4. Kurangnya kapasitas aparatur di nagari-nagari sehingga kesulitan dalam menyampaikan ide-ide atau instruksi dan melakukan koordinasi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Lima Kaum termasuk di dalamnya Rencana Kerja telah mengacu kepada RPJMD dan rancangan awal RKPD.

TABEL 2.4

T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN TANAH DATAR

KECAMATAN LIMA KAUM

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	KECAMATAN				***1.912.855.000***	***KECAMATAN***				***2.062.025.000***	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**1.592.500.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**	**100%**	**1.651.525.000**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**12.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**	**100%**	**12.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.500.000	

2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lima Kaum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lima Kaum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lima Kaum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lima Kaum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3.500.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Lima Kaum	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**1.343.525.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Lima Kaum	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**	**100%**	**1.343.525.000**	
1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Lima Kaum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/ bulan	1.339.525.000	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Lima Kaum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/ bulan	1.339.525.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lima Kaum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lima Kaum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	4.000.000	

C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Lima Kaum	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**7.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Lima Kaum	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**	**100%**	**10.000.000**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lima Kaum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang	7.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lima Kaum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang	10.000.000	
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lima Kaum	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**104.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lima Kaum	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**107.500.000**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lima Kaum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lima Kaum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	2.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lima Kaum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lima Kaum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	10.000.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lima Kaum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	7.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lima Kaum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	8.500.000	

4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lima Kaum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	23.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lima Kaum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	25.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	60.000.000	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lima Kaum			**-**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lima Kaum			**25.000.000**	
1	Pengadaan Mebel	Lima Kaum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	Pengadaan Mebel	Lima Kaum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Kaum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Kaum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25.000.000	
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lima Kaum	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**42.200.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lima Kaum	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**53.500.000**	

1	Penyediaan jasa surat menyurat	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	500.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	17.700.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	25.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	24.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lima Kaum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	28.000.000	
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lima Kaum	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**83.275.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lima Kaum	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**100.000.000**	
1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Lima Kaum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	64.000.000	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Lima Kaum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	70.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Kaum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	4.275.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Kaum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	5.000.000	

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lima Kaum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lima Kaum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	25.000.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**76.555.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**94.500.000**	
A	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**2.500.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**3.000.000**	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	2.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	3.000.000	
B	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**66.055.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**83.000.000**	

1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	43.555.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	55.000.000	
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	23.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	28.000.000	
C	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Lima Kaum	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel**	**100%**	**7.500.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Lima Kaum	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel**	**100%**	**8.500.000**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	7.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	8.500.000	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Lima Kaum	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**17.700.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Lima Kaum	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**19.000.000**	

A	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Lima Kaum	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**17.700.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Lima Kaum	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	**100%**	**19.000.000**	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lima Kaum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	13.700.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lima Kaum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	15.000.000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	4.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lima Kaum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	4.000.000	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**26.300.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**27.000.000**	
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Lima Kaum	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	**26.300.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Lima Kaum	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	**100%**	**27.000.000**	

1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lima Kaum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	26.300.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lima Kaum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	27.000.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**146.800.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**165.000.000**	
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Lima Kaum	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**146.800.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Lima Kaum	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	**100%**	**165.000.000**	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Lima Kaum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	72.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Lima Kaum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	75.000.000	

2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Lima Kaum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 orang	74.800.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Lima Kaum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 orang	90.000.000	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**53.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Lima Kaum	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**105.000.000**	
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Lima Kaum	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**53.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Lima Kaum	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**	**100%**	**105.000.000**	
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Lima Kaum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 dokumen	4.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Lima Kaum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 dokumen	5.000.000	

2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	25.000.000	
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	16.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	35.000.000	
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	32.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Lima Kaum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	45.000.000	

Lima Kaum, Agustus 2024

CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP

NIP. 198510302003121001

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi.

TABEL 2.5
T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KANTOR CAMAT LIMA KAUM

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN PENTING
1					2		3	6	7
N I H I L									

Lima Kaum, Agustus 2024
CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP
NIP. 198510302003121001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan nasional mencakup aspek pendidikan; kesehatan; perumahan dan pemukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman; pembangunan wilayah; serta politik, hukum dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional tersebut maka Kabupaten Tanah Datar menetapkan Prioritas pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan agama, adat dan budaya;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi;
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian;
4. Meningkatkan daya saing pariwisata unggulan daerah;
5. Meningkatkan kualitas SDM;
6. Meningkatkan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas.

Maka dalam pelaksanaannya Kecamatan Lima Kaum sebagai unit pemerintahan yang terendah berperan serta dalam menyukseskan program nasional maupun Kabupaten Tanah Datar dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN

Tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Lima Kaum untuk mewujudkan tercapainya suatu rencana kerja satu tahun ke depan yang telah dituangkan dalam forum OPD Kabupaten Tanah Datar secara berkesinambungan dengan berpedoman program jangka menengah yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kecamatan Lima Kaum serta dapat menampung isu-isu aktualitas yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur

guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku mudah, cepat, efisien dan tepat waktu.

SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja Kecamatan Lima Kaum adalah agar terlaksananya program kerja yang telah disusun selama satu tahun ke depan sesuai dengan sistematika standar yang telah ditetapkan serta berkesinambungan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kecamatan Lima Kaum merencenakan akan melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   c. Koordinaasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1.3. Pelaksanan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragana, Ras, dan Golongan Lainnyan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

TABEL 3.3

T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Jumlah Pagu	Sumber Dana			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**				**Urusan Kewilayahan**								
7	**01**				**Kecamatan**				**2.011.008.573**				**2.358.000.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**		**100%**	**1.891.318.273**			**100%**	**1.967.500.000**
7	01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**		**100%**	**3.250.000**			**100%**	**12.500.000**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lima Kaum	6 dokumen	2.300.000	APBD		2 dokumen	5.000.000

7	0 1	0 1	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Lima Kaum	4 dokumen	0	APBD		4 dokumen	4.000.000
7	0 1	0 1	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lima Kaum	3 dokumen	950.000	APBD		3 dokumen	3.500.000
7	**0 1**	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**		**100%**	**1.543.496.827**			**100%**	**1.654.000.000**
7	0 1	0 1	2.0 2	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lima Kaum	12 orang/ bulan	1.542.546.827	APBD		13 orang/ bulan	1.650.000.000
7	0 1	0 1	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lima Kaum	2 laporan	950.000	APBD		2 laporan	4.000.000
7	**0 1**	**0 1**	**2.0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**		**100%**	**1.100.000**			**100%**	**10.000.000**
5	0 1	0 2	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Lima Kaum	12 orang	1.100.000	APBD		13 orang	10.000.000

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**48.281.946**	APBD		**100%**	**107.500.000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	5 paket	652.000	APBD		5 paket	2.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	15 paket	4.997.500	APBD		15 paket	10.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	4 paket	5.132.446	APBD		5 paket	8.500.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	2 dokumen	200.000	APBD		5 dokumen	2.000.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	7.300.000	APBD		1 laporan	25.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	30.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-				30.000.000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum		-	APBD			-
7	01	01	2.08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum		-	APBD			30.000.000

7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	Kecamatan Lima Kaum		**43.323.400**	APBD			**53.500.000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	200.000	APBD		1 laporan	500.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	18.160.000	APBD		1 laporan	25.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	24.963.400	APBD		1 laporan	28.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**251.866.100**	APBD		**100%**	**100.000.000**
7	01	01	2.09	02	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Lima Kaum	6 Unit	49.866.100	APBD		6 Unit	70.000.000
7	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Lima Kaum	5 unit	2.000.000	APBD		6 unit	5.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Lima Kaum	3 unit	200.000.000	APBD		2 unit	25.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**52.398.800**	APBD		**100%**	**94.500.000**

7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**1.020.000**	APBD		**100%**	**3.000.000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	1 dokumen	1.020.000	APBD		1 laporan	3.000.000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**47.678.800**	APBD		**100%**	**83.000.000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	46.518.800	APBD		1 laporan	55.000.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	1.160.000	APBD		1 laporan	28.000.000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel**		**100%**	**3.700.000**	APBD		**100%**	**8.500.000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	3.700.000	APBD		1 laporan	8.500.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**4.744.500**	APBD		**100%**	**19.000.000**

7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		**100%**	**4.744.500**	**APBD**		**100%**	**19.000.000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lima Kaum	7 lembaga kemasyarakatan	4.744.500	APBD		7 lembaga	15.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	0 laporan	-	APBD		1 laporan	4.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**0**	APBD		**100%**	**27.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**		**100%**	**0**	APBD		**100%**	**27.000.000**
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	0	APBD		1 laporan	27.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**24.450.000**	APBD		**100%**	**165.000.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**24.450.000**	APBD		**100%**	**165.000.000**

7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lima Kaum	100 orang	2.680.000	APBD		100 orang	75.000.000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lima Kaum	150 orang	21.770.000	APBD		150 orang	90.000.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**38.097.000**	APBD		**100%**	**85.000.000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**100%**	**38.097.000**	APBD		**100%**	**85.000.000**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lima Kaum	10 dokumen	1.260.000	APBD		10 dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Lima Kaum	0 dokumen	-	APBD		0 dokumen	-

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lima Kaum	1 dokumen	19.110.000	APBD		1 dokumen	35.000.000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lima Kaum	5 dokumen	17.727.000	APBD		1 dokumen	45.000.000
JUMLAH									***2.011.008.573***				***2.358.000.000***

Lima Kaum, Agustus 2024

CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP

NIP. 198510302003121001

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kantor Camat Lima Kaum Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berikut ini :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT LIMA KAUM TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Nama Organisasi **(7.01.04) KECAMATAN LIMA KAUM**

Rekapitulasi Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Jumlah Pagu	Sumber Dana			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**				**Urusan Kewilayahan**								
7	**01**				**Kecamatan**				**2.011.008.573**				**2.358.000.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata**		**100%**	**1.891.318.273**			**100%**	**1.967.500.000**
7	01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan**		**100%**	**3.250.000**			**100%**	**12.500.000**

7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lima Kaum	2 dokumen	2.300.000	APBD		2 dokumen	5.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Lima Kaum	4 dokumen	-	APBD		4 dokumen	4.000.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lima Kaum	3 dokumen	950.000	APBD		3 dokumen	3.500.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan**		**100%**	**1.543.496.827**			**100%**	**1.654.000.000**
7	01	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lima Kaum	13 orang/ bulan	1.542.546.827	APBD		13 orang/ bulan	1.650.000.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lima Kaum	2 laporan	950.000	APBD		2 laporan	4.000.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**		**100%**	**1.100.000**			**100%**	**10.000.000**
5	01	02	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Lima Kaum	13 orang	1.100.000	APBD		13 orang	10.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**48.281.946**	APBD		**100%**	**107.500.000**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	5 paket	652.000	APBD		5 paket	2.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	15 paket	4.997.500	APBD		15 paket	10.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	5 paket	5.132.446	APBD		5 paket	8.500.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	5 dokumen	200.000	APBD		5 dokumen	2.000.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	7.300.000	APBD		1 laporan	25.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	30.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**-**				**30.000.000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum		-	APBD			-
7	01	01	2.08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	2 unit (Dekstop dan printer)	-	APBD			30.000.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	Kecamatan Lima Kaum		**43.323.400**	APBD			**53.500.000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	200.000	APBD		1 laporan	500.000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	18.160.000	APBD		1 laporan	25.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	24.963.400	APBD		1 laporan	28.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**251.866.100**	APBD		**100%**	**100.000.000**
7	01	01	2.09	02	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Lima Kaum	6 Unit	49.866.100	APBD		6 Unit	70.000.000
7	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Lima Kaum	6 unit	2.000.000	APBD		6 unit	5.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Lima Kaum	2 unit	200.000.000	APBD		2 unit	25.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**52.398.800**	APBD		**100%**	**94.500.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**1.020.000**	APBD		**100%**	**3.000.000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	1.020.000	APBD		1 laporan	3.000.000

7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**47.678.800**	APBD		**100%**	**83.000.000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	46.518.800	APBD		1 laporan	55.000.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	1.160.000	APBD		1 laporan	28.000.000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel**		**100%**	**3.700.000**	APBD		**100%**	**8.500.000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	3.700.000	APBD		1 laporan	8.500.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**4.744.500**	APBD		**100%**	**19.000.000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		**100%**	**4.744.500**	**APBD**		**100%**	**19.000.000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lima Kaum	7 lembaga	4.744.500	APBD		7 lembaga	15.000.000

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	-	APBD		1 laporan	4.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**-**	APBD		**100%**	**27.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**		**100%**	**-**	APBD		**100%**	**27.000.000**
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lima Kaum	1 laporan	-	APBD		1 laporan	27.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**24.450.000**	APBD		**100%**	**165.000.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**	Kecamatan Lima Kaum	**100%**	**24.450.000**	APBD		**100%**	**165.000.000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lima Kaum	100 orang	2.680.000	APBD		100 orang	75.000.000

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lima Kaum	150 orang	21.770.000	APBD		150 orang	90.000.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**38.097.000**	APBD		**100%**	**85.000.000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**100%**	**38.097.000**	APBD		**100%**	**85.000.000**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lima Kaum	10 dokumen	1.260.000	APBD		10 dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Lima Kaum	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lima Kaum	1 dokumen	19.110.000	APBD		1 dokumen	35.000.000

7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lima Kaum	1 dokumen	17.727.000	APBD		1 dokumen	45.000.000
JUMLAH									***2.011.008.573***				***2.358.000.000***

Lima Kaum, Agustus 2024

CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP
NIP. 198510302003121001

BAB V
PENUTUP

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun, mendapat komitmen dari Camat Lima Kaum dan seluruh staf pada Kantor Camat Lima Kaum untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang memegang peranan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kecamatan Lima Kaum akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan disusunnya rencana tahunan kerja Kecamatan Lima Kaum telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan yang terencana dan terkoordinir yang ingin dicapai pada tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kerja tahunan inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Lima Kaum di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinir.

Rencana Kerja Tahunan bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Lima Kaum, Agustus 2024
CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP
NIP. 198510302003121001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LIMA KAUM
Alamat : Jln. Sudirman Lima Kaum Telp. / Fax (0752) 71666 Kode Pos : 27213
e-mail : limakaum@tanahdatar.go.id atau kantorcamat_limakaum@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT LIMA KAUM
Nomor : /KLK-2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

CAMAT LIMA KAUM

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyususunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lima Kaum.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5758) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjasi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 , tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50).
16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tim Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lima Kaum Tahun 2025 dengan daftar terlampir

Kedua : Kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Dimaksud diktum kesatu diberikan tugas :
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Berdasarkan Renstra OPD.
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
5. Menelaah rancangan awal RKPD.
6. Perumusan Tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan tujuan dan sasaran daerah.
7. Menelaah usulan program dan kegiatan.
8. Perumusan kegiatan prioritas.
9. Penyajian Awal dokumen rancangan Renja OPD.

Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lima Kaum Tahun 2025 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Lima Kaum Tahun sebelumnya, target kinerja Tahun 2025 yang terukur : Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran, rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan output dan outcome serta sumber pembiayaan.

Keempat : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lima Kaum Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Camat Lima Kaum.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Lima Kaum
Pada Tanggal, Januari 2024

CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP
Pembina,
NIP. 198510302003121001

Lampiran Kedua Keputusan Camat Lima Kaum
Nomor : /KLK-2024
Tanggal : Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	IKRAR PAHLEPI, S.STP	Camat Lima Kaum	Ketua
2.	SRI HANDAYANI,	Sekretaris Camat Lima Kaum	Wakil Ketua
3.	S.IP.MM	Kasubag Perencanaan dan	Sekretaris
	ASNELI RAMLI, SE	Keuangan	
4.		Kasi Kessos	Anggota
5.	TAMSIL, SE	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
6.	RESI YULINDA	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
7.	Dra. SRI HASTUTI, M.Si	Kasi PMD	Anggota
8.	DAVID GUSMAN, SE	Kasubag Umum dan	Anggota
	ANITRA DEWI	Kepegawaian	

Ditetapkan di Lima Kaum
Pada Tanggal, Januari 2024

CAMAT LIMA KAUM

IKRAR PAHLEPI, S.STP
Pembina,
NIP. 198510302003121001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

KECAMATAN RAMBATAN

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

RAMBATAN
2024

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rambatan Tahun 2025, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah mempedomani pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, baik dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang bersifat indikatif.

Pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan bukan merupakan satu-satunya jalan yang dapat menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi rencana kerja ini hanya merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengatasi dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel pada tahun yang akan datang.

Rambatan, Agustus 2024
CAMAT RAMBATAN,



ROZA MELFITA, S.STP
NIP.19860405 200412 2 001

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelahaan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN
JL. RAYA PASAR RAMBATAN TELP. 0752 – 7575201 FAX. 7575201
BATUSANGKAR 27271

KEPUTUSAN CAMAT RAMBATAN

Nomor : 02/Perencanaan&Keuangan-2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN RAMBATAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

CAMAT RAMBATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyususunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Rambatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5758) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan.....

Lembaran Kedua Keputusan Camat Rambatan
Nomor : 02/Set-2024
Tanggal : 16 Januari 2024

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tim Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rambatan Tahun 2025 dengan daftar terlampir

Kedua : Kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan tugas :
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan awal RKPD
6. Perumusan Tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan tujuan dan sasaran daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian Awal dokumen rancangan Renja OPD.

Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rambatan Tahun 2025 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Rambatan Tahun sebelumnya, target kinerja Tahun 2025 yang terukur : Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran, rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan output dan outcome serta sumber pembiayaan.

Keempat : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Rambatan Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Camat Rambatan.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan Di Rambatan
Pada Tanggal, 16 Januari 2024

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 19860405 200412 2 001

Lampiran Kesatu Keputusan Camat Rambatan
Nomor : 02/Set-2024
Tanggal : 16 Januari 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ROZA MELFITA, S.STP	Camat Rambatan	Ketua
2.	MOHD. YAHYA SP, S.STP	Sekretaris Camat Rambatan	Wakil Ketua
3.	MARISA RAHMAYUNI, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Camat Rambatan	Sekretaris
4.	DAYANTOS, S.ST	Kasi PMD Camat Rambatan	Anggota
5.	CODIAH, S.Sos	Kasi Pelum Camat Rambatan	Anggota
6.	ERNOFI, SH	Kasi Pemerintahan Camat Rambatan	Anggota
7.	ISNALDI PADRA, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian Camat Rambatan	Anggota

Ditetapkan Di Rambatan
Pada Tanggal, 16 Januari 2024

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.SP
Pembina, IV/a
NIP. 19860405 200412 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Renja OPD

Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

b) Penyusunan Renja

Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD

c) Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD, Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan simtem perencanaan bawah atas (bottom – up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja OPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing OPD Kabupaten.

d) Penetapan Renja

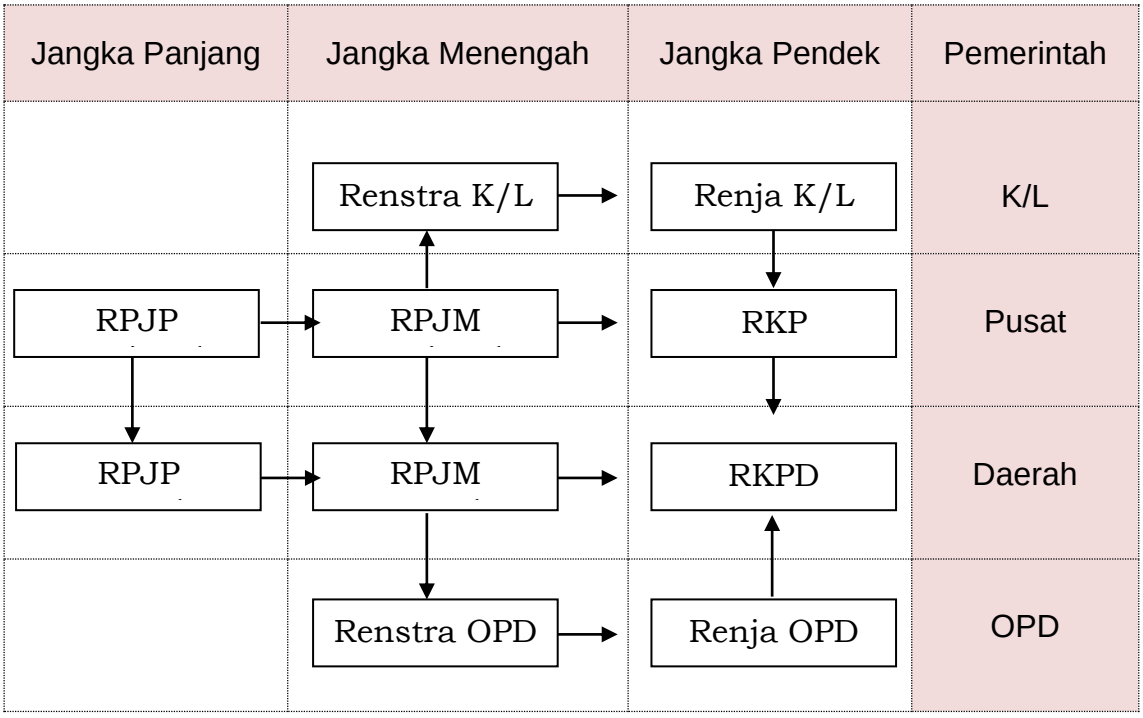
Penetapan renja merupakan proses verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada RKPD dan Renstra OPD dimana RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD, sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD dan RENJA OPD



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah merumuskan dan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar antara lain :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Renja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam Renja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja SKPD sampai tahun 2024 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun – tahun sebelumnya.

Kecamatan Rambatan

Tahun 2025 yang merupakan tahun keempat periode Renstra 2021 – 2026. Kantor Camat Rambatan telah melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 18 sub kegiatan. Berikut penjelasan ringkas mengenai program dan kegiatan Kantor Camat Rambatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari Anggaran Rp.24.864.400,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.9.854.120,- dengan persentase 39,63% keluaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah jenis dokumen laporan (RENSTRA dan RENJA) yang dihasilkan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

B. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Anggaran Rp.1.323.845.160,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.521.181.403,- dengan persentase 39,37% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

C. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari Anggaran Rp.3.334.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.1.810.000,- dengan persentase 54,29% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik adalah Jumlah jenis ATK yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari Anggaran Rp.1.149.284,- belum ada terealisasikan. Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dari Anggaran Rp.4.374.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.3.422.100,- dengan persentase 78,24% keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Anggaran Rp.30.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.14.986.000,- dengan persentase 49,95% keluaran dari Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

D. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari Anggaran Rp.300.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.300.000,- dengan persentase 100%, keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah materai yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Anggaran Rp.16.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.5.537.419,- dengan persentase 34,61% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan internet yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari Anggaran Rp.23.806.900,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.8.552.800,- dengan persentase 35,93% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah jenis alat kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

E. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari Anggaran Rp.62.400.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.23.763.900,- dengan persentase 38,08% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara roda 2 dan roda 4, jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya roda 2 dan roda 4 serta jumlah tenaga supir yang disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari Anggaran Rp.1.686.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.1.032.000,- dengan persentase 61,21% keluaran dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah peralatan kantor yang dipelihara. Keluaran ini diharapkan tahun 2025 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.22.764.400,- belum direalisasikan. Keluaran dari sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP, KK miskin yang menerima bantuan serta jumlah tenaga operator yang disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target keluarannya.

B. KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp.22.764.400,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.7.754.800,- dengan persentase 34,07% keluaran dari sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan adalah Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir serta disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target keluarannya.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp.3.302.500,- telah direalisasikan sebesar Rp.3.246.888,- dengan Persentase 98,32% keluaran dari Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah jumlah musrenbang yang diikuti dan dilaksanakan dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp.801.005.509,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.33.526.653,- dengan Persentase 4,19%. Keluaran dari Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional adalah jumlah festival dan MTQ yang diikuti dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp.22.764.400,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.7.754.800,- dengan Persentase 34,07%. Keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah jumlah APB yang dievaluasi dalam 1 tahun serta jumlah honor/tenaga THL yang disediakan. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp.20.814.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.4.829.000,- dengan Persentase 23,2%. Keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah jumlah sekolah dan kader yang dibina dalam 1 tahun serta jumlah honor/tenaga THL yang disediakan. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.1.611.000,- dengan Persentase 16,11%. Keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan adalah jumlah nagari dan lembaga yang dibina dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

TABEL : 1
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1.491.759.744**	**590.439.742**	**39,58%**
A.	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*24.864.400*	*9.854.120*	*39,63%*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.864.400	9.854.120	39,63%
B.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*1.323.845.160*	*521.181.403*	*39,37 %*
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.323.845.160	521.181.403	39,37 %
C.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*38.857.284*	*20.218.100*	*52,03%*
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.334.000	1.810.000	54,29%
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.149.284	0	0%
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.374.000	3.422.100	78,24%
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	14.986.000	49,95%
D.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*40.106.900*	*14.390.219*	*35,88%*
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100 %
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000	5.537.419	34,61%
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.806.900	8.552.800	35,93%
E.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*64.086.000*	*24.795.900*	*38,69%*
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.400.000	23.763.900	38,08%
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.686.000	1.032.000	61,21%
II.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**45.528.800**	**7.754.800**	**17,03%**
A.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*24.398.200*	*24.327.250*	*99,71%*

1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.764.400	0	0%
B.	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*22.764.400*	*7.754.800*	*34,07%*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.764.400	7.754.800	34,07%
III.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**3.302.500**	**3.246.888**	**98,32%**
A.	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*3.302.500*	*3.246.888*	*98,32%*
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.302.500	3.246.888	98,32%
IV.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**801.005.509**	**32.526.653**	**4,19%**
A.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*801.005.509*	*32.526.653*	*4,19%*
1.	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	801.005.509	32.526.653	4,19%
V.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**53.578.400**	**14.194.800**	**26,49%**
A.	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Desa*	*53.578.400*	*14.194.800*	*26,49%*
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.764.400	7.754.800	34,07%
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.814.000	4.829.000	23,2%
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1.611.000	16,11%

Berikut gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan target – target kinerja yang sudah ditetapkan, tergambar pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal/ Capaian Sebelumnya	Target	Kenaikan/ Turun
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (99,5)	Sangat Baik (100)	0,5
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (70,30)	BB (73)	2,7
3.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran yang dicapai tahun 2024. Dari 3 sasaran stategis yang telah ditetapkan dan Indikator Kinerja Utama, pada tahun 2024 ini seluruh sasaran dapat dicapai dengan baik.

Tabel 2
T-C.29
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Tanah Datar

KANTOR CAMAT RAMBATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024
1	2	3	4	5	8	9	10 = (9/8)	11	12	13 = (12/11)
7	**Urusan Kewilayahan**									
7.01	**Kecamatan**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									

7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD/ 1 THL	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Derah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**								
7.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerina gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100 %	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %

7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat**								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 0rang	12 0rang	12 0rang	12 0rang	100%	12 0rang	12 0rang	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	6 Orang	12 Orang	6 Orang	50 %	12 Orang	12 Orang	100 %
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100 %	15 Paket	15 Paket	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor yang disediakan/ 1 THL	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**						-			

7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					-			
7,01,01,2,07,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan								
7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**								
7.01.01.2.09.02	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya/ 1 THL	1 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	100 %	1 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	100 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	66 %	6 Unit	6 Unit	100 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**									

7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**					-			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**								
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan/ 1 THL	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									

7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**								
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									

7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	75 Orang	100 Orang	75 Orang	75 %	100 Orang	100 Orang	100 %
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	100 Orang	150 Orang	100 Orang	67 %	150 Orang	150 Orang	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**									
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**								
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
J U M L A H			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Rambatan, Agustus 2024

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.STP
NIP. 19860405 200412 2 001

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Secara umum Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tugas Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan fungsi dari Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia;
b. pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan, informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun serta pengembangan sumber daya manusia;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026, berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Rambatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rambatan

Kabupaten Tanah Datar

NO	INDIKATOR	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Perangkat Daerah				Capaian				
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	100%	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB	BB	80%	80%	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan			-	1	1	1	1	1	100%	100%	

Rambatan, Agustus 2024

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.STP

NIP. 19860602 201001 2 028

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagaimana dijelaskan pada BAB II poin 2 Kantor Camat Rambatan telah melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diembankan untuk mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan dalam periode Renstra 2021 – 2026, sampai dengan tahun 2022 Kantor Camat Rambatan secara umum dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah dijelaskan pada BAB II Poin 1 Sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah kecamatan, Kantor Camat Rambatan adalah Penghubung Pemerintahan Nagari dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, tentunya Kantor Camat Rambatan tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari, koordinasi dengan Pemerintahan Nagari inilah yang seringkali menjadi kendala karena adanya kekurangsiapan aparatur Pemerintahan Nagari dalam menyikapi instruksi – instruksi, dan pelaksanaan pelayanan publikpun tidak lepas dari permasalahan dan hambatan karena masyarakat menginginkan birokrasi yang lebih singkat dan tidak berlama – lama, berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Camat Rambatan.

No	Permasalahan	No	Hambatan
1	Kurangnya Jumlah Aparatur	1	Jarak yang cukup jauh ke pusat Kabupaten
2	Kurangnya Kapasitas Aparatur	2	Tranportasi umum ke pusat Kabupaten kurang
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana	3	Kurangnya kendaraan dinas pada Kantor Camat Rambatan
4	Biaya Operasional Tidak memadai	4	Kapasitas Aparatur Nagari

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada RKPD, telah dirumuskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagai berikut “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur dan daya saing produk unggulan daerah” dengan 6 (enam) Prioritas Pembangunan.

Salah satu prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah “Pengembangan budaya kerja birokrasi”, dengan Isu Strategis tahun 2025 yakni “Peningkatan Profesionalitas ASN”.

Maka yang menjadi titik berat program kepegawaian tahun 2025 pada Kantor Camat Rambatan dapat dijelaskan pada kegiatan dibawah ini:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sarana dan prasarana aparatur mempengaruhi kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga setiap tahun harus dilaksanakan evaluasi dari sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini diharapkan sarana dan prasarana yang tersedia menunjang target kegiatan yang direncanakan.
2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawaian ASN

   Dengan kegiatan ini diharapkan sumber daya manusia yang diseleksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan pada Pemerintah Daerah memenuhi kualifikasi yang ditelah ditentukan, guna dimasa akan datang menghasilkan ASN yang berkualitas dan profesional.
3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

   Dengan kegiatan ini diharapkan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditempatkan sesuai dengan kompetensinya serta jenjang karir yang jelas dan terarah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

   Kegiatan ini diharapkan ASN Kabupaten Tanah Datar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya serta memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

   Kegiatan ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat diberikan Penghargaan ataupun hukuman disiplin atas kinerja ASN tersebut.

TABEL -C- 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH DATAR

SKPD : KANTOR CAMAT RAMBATAN

Kode	RANCANGAN PAGU RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	*2*	*3*		*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	A. Urusan Kewilayahan Kecamatan					***Rp 1.829.341.000***	***A. Urusan Kewilayahan Kecamatan***				***Rp 1.628.552.439***
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**Rp 1.465.259.239**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**		**Rp 30.099.500**	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**		**Rp 28.264.400**

7.01.01.2.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	RBT	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENJA & RENJA PERUBAHAN)	Rp 2.999.800	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	RBT	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (RENJA & RENJA PERUBAHAN)/ 1 THL	Rp 26.764.400
7.01.01.2.01.04	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	RBT	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen / 1 THL	Rp 24.099.900	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	RBT	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	Rp -
7.01.01.2.01.06	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RBT	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 dokumen	Rp 2.999.800	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RBT	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 dokumen	Rp 1.500.000

			Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Derah**			**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**	100%	**Rp 1.314.381.600**	**Administrasi Keuangan Derah**		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**	100%	**Rp 1.272.722.646**

7.01.01.2.02.01		1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	RBT	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang /bulan	Rp 1.311.381.850	1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	RBT	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang /bulan	Rp 1.270.722.646
7.01.01.2.02.05		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RBT	Tersediany a Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 2.999.750	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RBT	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 2.000.000

7.01.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	RBT		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	**Rp 76.411.000**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	RBT	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	**Rp 50.507.793**
7.01.01.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RBT	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp 1.999.100	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RBT	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp 1.500.000
7.01.01.06.03	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	Rp -	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RBT	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	Rp -

7.01.01.06.04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RBT	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	Rp	8.789.500	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RBT	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	Rp	6.000.000
7.01.01.06.05	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RBT	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp	4.082.900	2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RBT	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp	3.007.793
7.01.01.06.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RBT	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	Rp	1.000.000	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RBT	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	Rp	-

7.01.01.06.08	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RBT	Terlaksanaya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp 9.454.500	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RBT	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp 10.000.000
7.01.01.06.09	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RBT	Terlaksanaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp 51.085.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RBT	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp 30.000.000
7.01.01	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**Rp -**						**Rp -**
7.01.01.07.02	1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	RBT	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	unit	Rp -	1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	RBT	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	unit	Rp -

7.01.02.07.06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RBT	Tersedinaya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	Rp	-	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RBT	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	Rp -
7.01.02.07.10	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RBT	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	unit	Rp	-	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RBT	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	-	Rp -

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**Rp 46.992.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		**Rp 41.764.400**
7.01.01.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RBT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp 500.000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RBT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp 500.000
7.01.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	RBT	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp 21.000.000	2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	RBT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp 16.000.000

7.01.01.2.08.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	RBT	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan/1 THL	Rp 25.492.500	3	Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	RBT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan/1 THL	Rp 25.264.400
7.01.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		RBT		**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**		**Rp 85.758.400**			RBT	**100%**		**Rp 72.000.000**
7.01.01.09.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RBT	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp 17.000.000	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RBT	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	Rp -

7.01.01.09.09.01	2	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	RBT	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit roda 4, 4 unit roda 2 dan 1 THL	Rp	63.758.400	2	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	RBT	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit roda 4, 4 unit roda 2 dan 1 THL	Rp	70.000.000
7.01.01.09.09.06	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RBT	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Rp	5.000.000	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RBT	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Rp	2.000.000
7.01.01.2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**				Persentase ASN yang mengikuti bimtek/ diklat		**Rp**	**4.975.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**			Persentase ASN yang mengikuti bimtek/ diklat		**Rp**	**-**

7.01.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RBT	Terlaksanaanya Diklat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang ASN	Rp 4.975.000	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RBT	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang ASN	Rp -
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**Rp 39.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**Rp 51.028.800**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	100%	**Rp 5.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	100%	***Rp 1.500.000***	

7.01.02.2.01.02	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	RBT	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	Rp 5.000.000	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	RBT	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	Rp 1.500.000,
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	RBT		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 29.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	RBT	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 24.264.400**
7.01.02.2.02.02	1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	RBT	Terlaksanannya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Rp 4.000.000	1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	RBT	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Rp -

			matan								
7.01.02.2.02.03	2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	RBT	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan / 1 THL	Rp 25.000.000	2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	RBT	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan / 1 THL	Rp 24.264.400
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	1 laporan	**Rp 5.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**	1 Laporan / 1 THL	**Rp 25.264.400**

0	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RBT	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan / 1 THL	Rp 5.000.000	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RBT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan / 1 THL	Rp 25.264.400
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		Rp 17.500.000		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**		**Rp 6.500.000**	

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		**Rp 17.500.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		**Rp 6.500.000**
7.01.03.2.01.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	RBT	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Rp 12.500.000	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	RBT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Rp 6.500.000

7.01.03.2.01.03	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	RBT	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Rp 5.000.000	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	RBT	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Rp	-
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	RBT		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 32.100.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	RBT	100%	100%	**Rp**	**-**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	RBT		**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	100%	Rp 32.100.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	RBT	100%	100%	Rp	-

7.01.04.2.01.02	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	RBT	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp 32.100.000	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	RBT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp -
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		RBT		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 126.123.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		RBT	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 30.000.000**

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**		Rp 126.123.000		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**		Rp 30.000.000	

7.01.05.2.01.02	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	RBT	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	Rp 86.123.000	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	RBT	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	Rp 20.000.000

7.01.05.2.01.04	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	RBT	Terlaksanannya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 orang	Rp	40.000.000	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	RBT	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 orang	Rp	10.000.000

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 56.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Rp 75.764.400**
0	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		**Rp 56.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**		Rp 75.764.400
0	1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	RBT	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen / 1 THL	Rp 6.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen / 1 THL	Rp 24.764.400

0	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	RBT	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp	5.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp -
0	3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	RBT	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp	15.000.000		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp 30.000.000

0	4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	RBT	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	Rp 30.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	Rp 21.000.000
						-	-		-	-	-			

Rambatan, Agustus 2024

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.STP

NIP. 19860405 200412 2 001

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 pada Kantor Camat Rambatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

TABEL -C- 33
USULAN PROGAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	A. Urusan Kewilayahan Kecamatan			***250.000.000***	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**250.000.000**	
7.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**250.000.000**	
7.01.02.07.10	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RBT	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	250.000.000	

Rambatan, Juni 2024

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.STP
NIP. 19860405 200412 2 001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA K/L

Prioritas pembangunan nasional mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional tersebut maka Kabupaten Tanah Datar menetapkan Prioritas pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman beragama, beradat dan berbudaya
2. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian
3. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan digitalisasi pemasaran
4. Pengembangan budidaya kerja birokrasi
5. Meningkatkan infrastruktur daerah
6. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar
7. Penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

Maka dalam pelaksanaannya Kecamatan Rambatan sebagai unit Pemerintahan yang terendah berperan serta dalam mensukseskan program nasional maupun Kabupaten Tanah Datar dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah merupakan unsur penting dalam memulai suatu perencanaan baik dalam merencanakan program dan kegiatan maupun dalam merencanakan penganggaran (Budget). Langkah awal dalam penyusunan Rancangan Awal Renja pada Kantor Camat Rambatan adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisir Kebutuhan Kantor Camat Rambatan selama satu tahun.
2. Menetapkan isu – isu strategis pada Kantor Camat Rambatan.
3. Menetapkan target, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
4. Mereview realisasi fisik keuangan Kantor Camat Rambatan pada dua tahun terakhir

5. Mengevaluasi kebutuhan dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kecamatan
6. Menuangkan dalam bentuk Usulan Program dan Kegiatan dan diusulkan ke Kabupaten sejalan dengan usulan Musrenbang Kecamatan selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dalam bentuk penyusunan LKJIP setiap akhir tahun anggaran.
2. Rancangan Awal Renja merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :

1. Tertib administrasi dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran.
3. Meningkatnya sistim perencanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatnya pengukuran kinerja.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
     - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
   - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - 1.4.1 Penyediaan Bahan Logistik
     - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.6.2 Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Bedasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu – isu strategis di bidang pengelolaan sumber daya aparatur ASN, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kabupaten Tanah Datar khususnya, maka dirumuskanlah rencana kerja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing – masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL -C- 33
RUMUSAN RENCANA PROGAM dan KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TANAH DATAR

SKPD : KANTOR CAMAT RAMBATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*
	A. Urusan Kewilayahan Kecamatan				***1.628.552.439***				***2.311.533.650***
7.01.01 7.01.01.2.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi perkantoran yang ditata**			**28.264.400**				**1.986.381.850 41.000.000**
7.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RBT	2 dokumen (RENJA & RENJA PERUBAHAN) / 1 THL	26.764.400	DAU		2 dokumen (RENJA & RENJA PERUBAHAN)	5.000.000

7.01.01.2.01.04	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RBT	4 dokumen	-	DAU		4 dokumen / 1 THL	31.000.000
7.01.01.2.01.06	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RBT	3 dokumen	1.500.000	DAU		3 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Derah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan**		100%	**1.272.722.646**			1	**1.316.381.850**
7.01.01.2.02.01	1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RBT	12 orang/bulan	1.270.722.646			12 orang/bulan	1.311.381.850

7.01.01.2.02.05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RBT	2 Laporan	2.000.000			2 Laporan	5.000.000
7.01.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	RBT	100%	**50.507.793**			1	**136.000.000**
7.01.01.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	RBT	5 paket	1.500.000	DAU		5 paket	3.000.000
7.01.01.06.03	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	RBT	1 paket	-	DAU		1 paket	20.000.000
7.01.01.06.04	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	RBT	15 paket	6.000.000	DAU		15 paket	15.000.000
7.01.01.06.05	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RBT	2 paket	3.007.793	DAU		2 paket	7.000.000

7.01.01.06.06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	RBT	2 dokumen	-	DAU		2 dokumen	1.000.000
7.01.01.06.08	6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	RBT	1 laporan	10.000.000	DAU		1 laporan	30.000.000
7.01.01.06.09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RBT	1 laporan	30.000.000	DAU		1 laporan	60.000.000
7.01.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**-**				**323.000.000**
7.01.01.07.02	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	RBT	unit	-	DAU		unit	30.000.000
7.01.02.07.06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	RBT	unit	-	DAU		unit	43.000.000
7.01.02.07.10	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	RBT	unit	-	DAU		unit	250.000.000

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**			**41.764.400**				**52.000.000**
7.01.01.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RBT	1 laporan	500.000	DAU		1 laporan	1.000.000
7.01.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RBT	1 laporan	16.000.000	DAU		1 laporan	21.000.000
7.01.01.2.08.04	3 Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RBT	1 laporan/1 THL	25.264.400	DAU		1 laporan/1 THL	30.000.000
7.01.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara**	RBT		**72.000.000**				**110.000.000**
7.01.01.09.09	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RBT	2 unit	-	DAU		2 unit	20.000.000

7.01.01.09.09.01	2 Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	RBT	1 unit roda 4, 4 unit roda 2 dan 1 THL	70.000.000	DAU		1 unit roda 4, 4 unit roda 2 dan 1 THL	85.000.000
7.01.01.09.09.06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RBT	6 unit	2.000.000	DAU		6 unit	5.000.000
7.01.01.2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat			**-**				**8.000.000**
7.01.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RBT	5 orang ASN	-	DAU		5 orang ASN	8.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**100%**	**51.028.800**			**1**	**63.464.400**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		100%	**1.500.000**			1	***10.000.000***

7.01.02.2.01.02	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	RBT	1 laporan	1.500.000	DAU		1 laporan	10.000.000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	RBT		**24.264.400**				**29.000.000**
7.01.02.2.02.02	1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	RBT	1 laporan	-	DAU		1 laporan	4.000.000
7.01.02.2.02.03	2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	RBT	1 Laporan / 1 THL	24.264.400	DAU		1 Laporan / 1 THL	25.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable**		1 laporan	**25.264.400**			1 Laporan / 1 THL	**24.464.400**

7.01.02.2.04.03	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RBT	1 Laporan / 1 THL	25.264.400			1 Laporan / 1 THL	24.464.400
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari**			6.500.000				**17.500.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari			**6.500.000**				**17.500.000**
7.01.03.2.01.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	RBT	7 Lembaga	6.500.000	DAU		7 Lembaga	12.500.000
7.01.03.2.01.03	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	RBT	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	5.000.000

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	RBT		**-**				**32.100.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	RBT	100%	-			1	32.100.000
7.01.04.2.01.02	1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	RBT	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	32.100.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	RBT		**30.000.000**				**126.123.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya**			30.000.000				126.123.000

7.01.05.2.01.02	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	RBT	100 Orang	20.000.000	DAU		200	86.123.000
7.01.05.2.01.04	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	RBT	150 orang	10.000.000	DAU		150 orang	40.000.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**			**75.764.400**				**85.964.400**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat**			**75.764.400**				**85.964.400**

7.01.06.2.01.03	1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12 dokumen/ 1 THL	24.764.400	DAU		12 dokumen/ 1 THL	25.964.400
7.01.06.2.01.06	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-
7.01.06.2.01.11	3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
7.01.06.2.01.12	4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		1 Dokumen	21.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000

Rambatan, Agustus 2024

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.STP
NIP. 19860405 200412 2 001

\- - -

BAB V
ENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun ini telah mendapat komitmen dari Camat dan seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Rambatan untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan supaya berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang memegang peranan penting, Kecamatan Rambatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang muncul serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Tahun 2025 bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja akan menjadi tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih fokus pada perbaikan di masa yang akan datang.

Rambatan, Agustus 2024
CAMAT RAMBATAN,



ROZA MELFITA, S.STP
NIP.19860405 200412 2 001

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025;

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar, Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Ir. HELFY RAHMY HARUN
NIP. 19671029 199403 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	22
	2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah	30
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	30
	3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	32
BAB V	PENUTUP	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan acuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan DaerahSistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50).
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja ini adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjadi acuan dalam menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan menyusun pagu indikatif serta prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini adalah:

1. Sebagai Pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025.
2. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kabijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya.

Dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah tahun 2023 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi Program Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023 dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja tahun 2022 telah tertampung dalam APBD Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

Program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

   - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

     Sub kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Renstra BPKD, Rencana Kerja (Renja BPKD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKD (LkjIP), Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

     Dana yang dianggarkan Rp.7,500,000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.486.200,00 atau 99,75% dan fisik 100%.

   - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

     Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan RKA,RKAP, DPA dan DPPA

     Dana yang dianggarkan Rp.6,458,000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.437.000,00 atau 99,67% dan fisik 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

     Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN

     Dana yang dianggarkan Rp. 4,313,696,145,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.268.278.053,00 atau 98,94% dan fisik 100%

   - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

     Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan keuangan dan pembayaran tenaga administrasi keuangan

     Dana yang dianggarkan Rp.20.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.989.400,00 atau 99,95 % dan fisik 100%

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

     Sub Kegiatan ini terealisasi berupa Bintek ASN

     Dana yang dianggarkan Rp.14.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.13.651.731,00 atau 97,51% dan fisik 100%

4. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

     Sub Kegiatan ini terealisasi berupa, pengadaan komponen instalasi listrik

     Dana yang dianggarkan Rp.8.999.100,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.211.048,00 atau 57,91% dan fisik 100%

- Penyediaan bahan logistik kantor

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa, pembelian alat tulis kantor

  Dana yang dianggarkan Rp. 77,545,170,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.77.545.543,00 atau 100% fisik 100%

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa biaya cetak dan penggandaan Dana yang dianggarkan Rp.25.351.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.346.957,00 atau 99,98% fisik 100%

- Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran biaya langganan surat kabar harian dan mingguan

  Dana yang dianggarkan Rp.3.050.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.658.000,00 atau 87,15% fisik 100%

- Fasilitasi kunjungan tamu

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran biaya makan minum tamu

  Dana yang dianggarkan Rp. 14,217,500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.13.958.300,00 atau 96,04% fisik 100%

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

  Dana yang dianggarkan Rp. 168,507,456,00 dengan realisasi sebesar Rp.161.840.863,00 atau 96,04% fisik 100%

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa, pembelian materai materai 10000 dan paket pengiriman

  Dana yang dianggarkan Rp.3.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.240.000,00 atau 74,67% fisik 100%

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening Internet, air dan listrik kantor.

  Dana yang dianggarkan Rp.113,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.110.183.874,00 atau 97,51% fisik 100%

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran honor tenaga kebersihan

  Dana yang dianggarkan Rp.143,432,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.142.167.608,00 atau 99,12% fisik 100%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran pajak dan KIR 7. unit kendaraan roda 2, 6 unit kendaraan roda 4 dan pembayaran honor Tenaga Harian Lepas

  Dana yang dianggarkan Rp. 234,860,250,00 dengan realisasi sebesar Rp.214.190.622,00 atau 91,20% fisik 100%

- Pemeliharaan Mebel

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan Mebel.

  Dana yang dianggarkan Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000,00 atau 100% fisik 100%

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan peralatan gedung kantor.

  Dana yang dianggarkan Rp. 23,675,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.591.469,00 atau 86,98% fisik 100%

- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor

  Dana yang dianggarkan Rp. 35,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.802.441,00 atau 99,44% fisik 100%

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan KUA dan PPAS tahun 2024

  Dana yang dianggarkan Rp.64,554,405,00 dengan realisasi sebesar Rp.61.228.375,00 atau 94,85% fisik 100%

- Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan KUA dan PPAS perubahan tahun 2023

  Dana yang dianggarkan Rp. 65,096,601,00 dengan realisasi sebesar Rp.63.640.315,00 atau 97,76% fisik 100%

- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa verifikasi RKA dan RKPA Perubahan SKPD

Dana yang dianggarkan Rp. 17,467,160,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.457.500,00 atau 94,22% fisik 100%

- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD

  Dana yang dianggarkan Rp. 18,751,480,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.675.700,00 atau 99,60% fisik 100%

- Koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

  Dana yang dianggarkan Rp. 936,074,820,00 dengan realisasi sebesar Rp.824.277.683,00 atau 88,06% fisik 100%.

- Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD

  Dana yang dianggarkan Rp. 103,274,106,00 dengan realisasi sebesar Rp.101.176.533,00 atau 97,97% fisik 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan regulasi dan kebijakan bidang anggaran

  Dana yang dianggarkan Rp. 35,709,005,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.082.259,00 atau 67,44% fisik 100%

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

   - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

     Output sub kegiatan ini berupa dokumen surat penyediaan dana, laporan DAU Earmark, Laporan DBH, Laporan Dana Insentif Fiskal, Laporan Dana Desa, Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik

     Dana yang dianggarkan Rp. 43,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.948.647,00 atau 99,88% fisik 100%

   - Koordinasi , fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya

     Output sub kegiatan ini berupa dokumen laporan realisasi dana transfer berupa Laporan Konfirmasi Transfer dan Laporan Rekapitulasi Transfer.

     Dana yang dianggarkan Rp. 88,740,376,00 dengan realisasi sebesar Rp.88.246.500,00 atau 99,44% fisik 100%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

  Output sub kegiatan berupa dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

  Dana yang dianggarkan Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.49.765.175,00 atau 99,53% fisik 100%
- Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas

  Output sub kegiatan ini berupa data informasi tentang investasi dan regulasi investasi berupa penyusunan perda investasi perumda tirta alami.

  Dana yang dianggarkan Rp. 2,680,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2,680,000,00 atau 100% fisik 100%.
- Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

  Dana yang dianggarkan Rp. 19,430,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.278.000 ,00 atau 99,52% fisik 100%
- Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban

  Sub kegiatan teralisasi berupa sosialisasi penyusunan pajak pusat, Surat Edaran awal tahun tentang Pengelolaan keuangan daerah, Surat Edaran Akhir Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.964.800 ,00 atau 99,86% fisik 100%

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

     Sub kegiatan ini berupa berupa laporan BKU BUD dan laporan rekonsiliasi Bank

Dana yang dianggarkan Rp.25.371.200,00 dengan realisasi sebesar Rp17.674.289,00 atau 69,66% fisik 100%

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

  Sub kegiatan ini berupa laporan keuangan, laporan realisasi aset APBD bulanan

  Dana yang dianggarkan Rp.82.203.300,00 dengan realisasi sebesar Rp53.267.825,00 atau 64,80% fisik 100%
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

  Sub kegiatan ini berupa laporan keuangan laporan keuangan, laporan realisasi APBD bulanan

  Dana yang dianggarkan Rp.50.993.310,00 dengan realisasi sebesar Rp.43.690.835,00 atau 85,68% fisik 100%
- Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa Perda dan Perbub pertanggungjawaban APBD, Nota penjelasan pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.87.006.970,00 dengan realisasi sebesar Rp.87.006.970,00 atau 100% fisik 100%
- Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK dan LHP APIP atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa tindak lanjut hasil temuan LHP

  Dana yang dianggarkan Rp.3.561600,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.561.600,00 atau 100% fisik 100%

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan

     Sub Kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah laporan hasil penyaluran bantuan keuangan ke Nagari yaitu penyaluran ADN, Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), Dana Bagi Hasil (DBH) PAP, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

     Dana yang dianggarkan Rp.171.610.997.033,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.168.093.674.952,00 atau 97,95% fisik 100%
   - Pengelolaan dana darurat dan mendesak

     Sub Kegiatan ini terealisasi berupa laporan pengelolaan belanja tidak terduga yang terdiri dari realisasi penyaluran Bantuan Stimulan,

Bantuan Uang Duka, Bantuan Pengobatan dan Bantuan Tanggap Darurat Bencana.

Dana yang dianggarkan Rp.2.789.485.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.954.498.507,00 atau 26,57% fisik 35%

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.137.012.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.111.095.875,00 atau 81,08% fisik 100%

III. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan standar harga

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penyusunan Standar Satuan Harga tahun anggaran 2024

  Dana yang dianggarkan Rp.29.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.238.029,00 atau 95,11% fisik 100%

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen RKBMD dan RKPBMD Tahun 2024

  Dana yang dianggarkan Rp.13.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.305.125,00 atau 98,92% fisik 100%

- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

  Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa peraturan kepala Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.22.085.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.912.723,00 atau 99,22% fisik 100%

- Penatausahaan Barang Milik Daerah

  Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Laporan Barang Milik Daerah (BMD)

  Dana yang dianggarkan Rp.23.282.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.843.654,00 atau 98,12% fisik 100%

- Inventarisasi barang milik daerah

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa Penyusunan Data Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Dana yang dianggarkan Rp.24.152.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.900.000,00 atau 69,98% fisik 100%

- Pengamanan barang milik daerah

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran asuransi aset/barang milik daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.1.189.217.525,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.183.493.043,00 atau 99,52% fisik 100%

- Penilaian barang milik daerah

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa pemanfaatan dan pemindatangan barang milik daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.18.047.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.246.100,00 atau 90,02% fisik 100%

- Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah

  Sub kegiatan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah terealisasi berupa dokumen pengalihan status barang milik daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.19.665.665,00 dengan realisasi sebesar Rp.17.620.665,00 atau 89,60% fisik 100%

- Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa Dokumen status penggunaan, dokumen sewa, dokumen pinjam pakai, dokumen penjualan, dokumen hibah, dokumen penyertaan modal dan dokumen penghapusan barang milik daerah

  Dana yang dianggarkan Rp.12.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.962.000,00 atau 92,51% fisik 100%

- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

  Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah terealisasi berupa Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangkah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

  Dana yang dianggarkan Rp. 21.511.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.538.500,00 atau 95,48% fisik 100%

- Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

  Sub Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi dan Bintek pengadaan barang milik daerah bagi penjabat pengelola barang milik daerah pada OPD Dana yang dianggarkan Rp.9.653.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.945.000,00 atau 92,66% fisik 100%

Dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29.

FORMULA T-C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegoatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
					KEUANGAN									
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja**								
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.975	2.971.000	7.500.000	7.486.200,00	99,82	5.097.500	15.554.700	3,11
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA,RKA-P dan DPA, DPA Perubahan	5.000.000	4.435.400	6.458.000	6.437.000,00	99,67	-	10.872.400	2,17
													-	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja**							-	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.038.453.372	7.194.572.082	4.313.696.145	4.268.178.053,00	98,94	4.846.064.828	16.308.814.963	2,03
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	60.015.000	61.126.800	20.000.000	19.989.400,00	99,95	5.482.500	86.598.700	1,44
5	02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	20.091.800	-	-	-	-	-	
													-	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
5	02	01	2.05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	-	10.654.873					10.654.873	#DIV/0!
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegoatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000	71.380.000	14.000.000	13.651.731,00	97,51	15.000.000	100.031.731	5,00
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								-	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.999.100	8.998.000	8.999.100	5.211.048,00	57,91	7.500.000	21.709.048	2,41
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70.000.000	92.514.853	77.545.170	77.543.543,00	100,00	30.000.000	200.058.396	2,86
5 02 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26.885.000	41.520.993	25.351.500	25.346.957,00	99,98	9.275.750	76.143.700	2,83
5 02 01 2.06 06	Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000	3.162.000	3.050.000	2.658.000,00	87,15	3.250.000	9.070.000	3,02
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.900.000	20.448.300	14.217.500	13.958.300,00	98,18	5.000.000	39.406.600	1,89
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	223.652.699	168.507.456	161.840.863,00	96,04	51.342.647	436.836.209	2,50
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	301.940.000	-	-	-	500.000.000	801.940.000	#DIV/0!
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	-	63.758.600		-	-		63.758.600	#DIV/0!
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	113.543.000	-	-	-		113.543.000	#DIV/0!
5 02 01 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-		-	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		-	55.155.012	-	-	-		55.155.012	#DIV/0!
				-	-					
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang ditata**								
5 02 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan perangko	3.900.000	2.528.000	3.000.000	2.240.000,00	74,67	1.000.000	5.768.000	1,48
5 02 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan jaringan internet	100.000.000	125.592.909	113.000.000	110.183.874,00	97,51	102.000.000	337.776.783	3,38
5 02 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, Jumlah THR	108.000.000	127.772.500	143.432.000	142.167.608,00	99,12	120.657.600	390.597.708	3,62
									-	
									-	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegoatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								-	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	142.812.050	248.252.735	234.860.250	214.190.622,00	91,20	176.770.250	639.213.607	4,48
5 02 01 2.09 03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah mebel yang Dipelihara	29.435.000	26.082.023	5.000.000	5.000.000,00	100,00	13.627.212	44.709.235	1,52
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5.000.000	23.675.000	20.591.469,00	86,98	1.000.000	26.591.469	#DIV/0!
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (gedung eks.Puskesmas)	20.000.000	152.983.258	35.000.000	34.802.441,00	99,44	15.000.000	202.785.699	10,14
5 02 02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah**								
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah tepat waktu**								
5 02 02 2.01 01	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	74.999.925	70.796.485	64.554.405	61.228.375,00	94,85		132.024.860	1,76
5 02 ## 2.01 02	Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	74.999.925	72.418.040	65.096.601	63.640.315,00	97,76		136.058.355	1,81
5 02 ## 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	24.996.400	-	17.467.160	16.457.500,00	94,22		16.457.500	0,66
5 02 ## 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Terlaksananya verifikasi DPA, DPA Perubahan SKPD	29.997.000	12.592.800	18.751.480	18.675.700,00	99,60		31.268.500	1,04
5 02 ## 2.01 07	Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	997.157.800	823.556.831	936.074.820	823.824.483	88,01	947.481.943	2.594.863.257	2,60
5 02 ## 2.01 08	Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	205.363.825	132.728.980	103.274.106	101.176.533,00	97,97		233.905.513	1,14
5 02 ## 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50.000.000	11.039.350	35.709.005	24.082.259,00	67,44	18.286.462	53.408.071	1,07
									-	
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							-	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas	100.000.000	98.324.700	43.000.000	42.948.647,00	99,88	79.791.915	221.065.262	2,21

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegoatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100.000.000	57.977.500	88.740.376	88.246.500,00	99,44		146.224.000	1,46
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100.000.000	49.669.100	50.000.000	49.765.175,00	99,53	43.522.403	142.956.678	1,43
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10.026.000	7.169.100	2.680.000	2.680.000,00	100,00		9.849.100	0,98
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	150.000.000	21.799.600	19.430.000	19.278.000,00	99,22		41.077.600	0,27
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15.000.000	24.589.500	25.000.000	24.964.800,00	99,86		49.554.300	3,30
									-	
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								-	
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	14.340.000	9.872.861	25.371.200	17.674.289,00	69,66	-	27.547.150	1,92
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	27.000.000	24.293.801		-			24.293.801	0,90
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	35.512.000	17.935.800	82.203.300	72.487.825,00	88,18		90.423.625	2,55

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegoatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	60.000.000	32.133.800	50.993.310	43.690.835,00	85,68	20.163.819	95.988.454	1,60
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	110.000.000	94.370.112	87.006.970	87.006.970,00	100,00	21.482.000	202.859.082	1,84
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20.000.000	11.668.862	3.561.600	3.561.600,00	100,00	2.760.000	17.990.462	0,90
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perda dan Perbub Pertanggungjawaban APBD, Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD dan LKPD	-	25.871.832					25.871.832	#DIV/0!
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	25.389.902					25.389.902	#DIV/0!
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kota/Kabupaten	-	20.542.000					20.542.000	#DIV/0!
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	-	6.775.400					6.775.400	#DIV/0!
									-	
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								-	
									-	
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	9.872.861					9.872.861	#DIV/0!
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	24.293.801					24.293.801	#DIV/0!

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegoatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	17.935.800					17.935.800	#DIV/0!
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	32.133.800					32.133.800	#DIV/0!
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	-	94.370.112					94.370.112	#DIV/0!
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	11.668.862					11.668.862	#DIV/0!
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perda dan Perbub Pertanggungjawaban APBD, Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD dan LKPD	-	25.871.832					25.871.832	#DIV/0!
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	25.389.902					25.389.902	#DIV/0!
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kota/Kabupaten	-	20.542.000					20.542.000	#DIV/0!
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	-	6.775.400					6.775.400	#DIV/0!
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan penunjang urusan**							-	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	154.833.494.578	151.720.624.358	171.610.997.033	168.093.674.952,00	97,95	158.508.469.902	478.322.769.212	3,09
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	3.005.442.078	2.789.486.800	954.498.507,00	34,22	10.000.000.000	13.959.940.585	1,40
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah**			-	-				-	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegoatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.05 01	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem dan informasi pemerintah daerah bidang keuangan	182.147.950	81.359.000	137.012.000	111.095.875,00	81,08	80.578.507	273.033.382	1,50
									-	
5 02 03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		-	-				-	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Fasilitasi kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah							-	
5 02 03 2.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	58.000.000	25.274.800	29.690.000	28.238.029,00	95,11		53.512.829	0,92
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.000.000	11.963.200	13.450.000	13.305.125,00	98,92		25.268.325	0,84
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.000.000	29.601.450	22.085.000	21.912.723,00	99,22	13.656.000	65.170.173	2,17
5 02 03 2.01 04	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	25.000.000	104.816.368	23.282.000	22.843.654,00	98,12	15.554.100	143.214.122	5,73
5 02 03 2.01 05	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	72.500.000	31.737.000	24.152.500	16.900.800,00	69,98		48.637.800	0,67
5 02 03 2.01 06	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1.000.680.000	1.072.837.120	1.189.217.525	1.183.993.043,00	99,56		2.256.830.163	2,26
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	55.000.000	19.257.000	18.047.500	16.246.100,00	90,02		35.503.100	0,65
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	37.500.000	28.228.250	19.665.665	17.620.665,00	89,60		45.848.915	1,22
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	45.000.000	67.060.735	12.930.000	11.962.000,00	92,51	1.032.334.629	1.111.357.364	24,70
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangkah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.000.000	22.088.700	21.511.800	20.538.500,00	95,48		42.627.200	2,13
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	38.000.000	10.985.000	9.653.400	8.945.000,00	92,66		19.930.000	0,52
	TOTAL		**177.489.114.900**	**167.129.782.622**	**182.857.387.677**	**177.214.641.888**	**96,91**	**176.692.149.967**	**521.016.482.677**	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian realisasi tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	Target Restra BKD				Realisasi		Proyeksi		Ket
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

Pada tahun 2024, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk 13 (tiga belas) kalinya sejak laporan keuangan tahun 2009 dan berturut-turut 12 kali (2012-2023).

Keberhasilan Pemda Kabupaten Tanah Datar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan **daerah** yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;

Berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam hal pengelolaan keuangan, secara garis besar menjadi isu penting sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
2. Masih ditemukan OPD menyusun anggaran belum sesuai standar penganggaran yang ditetapkan.
3. Masih ada OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak tepat waktu.
4. Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah
5. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual
6. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai.
7. Akurasi data aset pada masing-masing OPD belum optimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Melakukan koordinasi penyusunan APBD berbasis Simtem Informasi (SIPD) yang belum berjalan secara optimal
2. Bintek penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP
3. Rekonsiliasi aset dilaksanakan setiap triwulan
4. Melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri dan OPD tentang penggunaan aplikasi SIPD
5. Melakukan Monitoring dokumen aset
6. Melakukan koordinasi penyusunan APBD berbasis Simtem Informasi (SIPD) yang belum berjalan secara optimal

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah kedepan, maka perlu dikembangan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah
2. Membuat time schedule penyusunan KU dan PPAS dan APBD
3. Sosialisasi penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
4. Efektifitas dan efisiensi penyusunan Anggaran Kas
5. Memaksimalkan penggunan aplikasi SIPD

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan, sub kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada **Tabel TC-31** berikut:

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	11
	URUSAN PILIHAN	**BPKD**			**6.714.408.486**	**URUSAN PILIHAN**	**BPKD**			**6.483.823.255**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**6.714.408.486**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**6.483.823.255**	
1	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja**		**10.000.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja**		**10.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah dokumen RKA,RKA-P dan DPA, DPA Perubahan	4 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah dokumen RKA,RKA-P dan DPA, DPA Perubahan	4 Dok	5.000.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja**	**100%**	**4.935.532.136**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja**	**100%**	**5.232.431.605**	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	4.910.532.136	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	5.224.931.605	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	7.500.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan Kapasitas sesuai dengan kompetensinya.**	**100%**	**75.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan Kapasitas sesuai dengan kompetensinya.**	**100%**	**15.000.000**	
1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 ASN	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 ASN	15.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**370.284.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**280.635.000**	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.999.100	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.500.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.885.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.885.000	
4	Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	3.500.000	Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	3.250.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	30.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	15.000.000	

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	Catatan Penting
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	168.000.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**600.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350.000.000**	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit kendaraan dinas roda 4dan kendaraan roda 2	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit kendaraan dinas roda 4dan kendaraan roda 2	300.000.000	
2	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	-	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 paket	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 paket	50.000.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang ditata**	**100%**	**336.822.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang ditata**	**100%**	**298.986.400**	
1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390 buah materai 10000	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390 buah materai 10000	3.000.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	100.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	100.000.000	
3	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Kerjasama ISO Pelayanan Publik	2 Laporan, 5 Org THL	233.822.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Kerjasama ISO Pelayanan Publik	2 Laporan, 5 Org THL	195.986.400	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**386.770.250**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**296.770.250,00**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	roda 4 5 unit, roda 2,7 unit	176.770.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	roda 4 5 unit, roda 2,7 unit	176.770.250	
2	Pemeliharaan mebel	10 unit	Jumlah mebel yang Dipelihara	10 unit	5.000.000	Pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang Dipelihara	0	5.000.000	
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	30.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	15.000.000	
4	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	175.000.000	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
II	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah**		**180.543.305.440**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah**		**184.440.183.719**	

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	Catatan Penting
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah tepat waktu**		**1.482.514.875**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah tepat waktu**		**1.130.000.000**	
5	Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	1.407.514.875	Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	1.100.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dok	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dok	30.000.000	
2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**475.206.000**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**151.000.000**	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	18 Dok	275.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	18 Dok	101.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan ihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	10 Dok	200.206.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan ihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	10 Dok	50.000.000	
3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**		**Terkoordinirnya akuntansi dan pelaporan keuangan**		**412.512.000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan**		**Terkoordinirnya akuntansi dan pelaporan keuangan**		**180.000.000**	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dok	282.512.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dok	75.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dok Nota Jawaban Ranperda, Ranperbub	110.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dok Nota Jawaban Ranperda, Ranperbub	85.000.000	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 LHP	20.000.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 LHP	20.000.000	
4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Terlaksananya kegiatan penunjang urusan**		**178.173.072.565**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan**		**Terlaksananya kegiatan penunjang urusan**		**182.979.183.719**	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	12 Lap	168.173.072.565	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	12 Lap	172.979.183.719	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	10.000.000.000	
5	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah**				**182.147.950**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah**				**137.000.000**	

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Renja 2025	Catatan Penting
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1 Dok	182.147.950	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1 Dok	137.000.000	
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		**1.524.524.942**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		**2.443.722.950**	
1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Fasilitasi kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah		**1.524.524.942**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Fasilitasi kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah		**2.443.722.950**	
1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dok	145.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dok	30.000.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Lap	112.024.942	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Lap	50.000.000	
3	Optimalisasi penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	4 Lap	1.267.500.000	Optimalisasi penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan,		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	4 Lap	2.363.722.950	
					188.964.386.818					**193.504.729.924**	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkannya melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat nagari, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan/sub kegiatan yaitu jenis kegiatan,sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

Untuk rencana kegiatan tahun 2025, sampai dengan bulan Januari 2024 ini belum ada usulan program dan kegiatan/sub kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait lainnya. Berdasarkan hal ini, maka pengisian **Tabel TC.32**.

Tabel T-C. 32

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 kabupaten Tanah Datar

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
2. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan sebagai berikut Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

Berdasarkan visi tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendukung Misi kelima yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 menetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Penyusunan dan Penyajian Pelaporan Keuangan Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

Dari Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
4. Terwujudnya inovasi berkelanjutan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 direncanakan berjumlah 3 (tiga) program, 13 (empat belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan

Rincian rencana program kegiatan untuk Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 direncanakan berjumlah 3 (tiga) program, 13 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.193.504.729.924,-

Berikut ini rincian rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program wajib dilaksanakan di semua SKPD karena mencakup kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk memperlancar pelaksanaan tugas/operasional Badan. Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan adalah :

1. Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan bahan logistik kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan
   - Fasilitasi kunjungan tamu
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
   - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan jasa surat menyurat
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   - Pemeliharaan mebel
   - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
   - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diperlukan oleh semua OPD termasuk Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur. Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan adalah :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
   - Koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
   - Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   - Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
   - Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   - Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
   - Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
   - Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
   - Pengelolaan dana darurat dan mendesak

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
   - Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
- Penatausahaan barang milik daerah
- Optimalisasi penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ini merupakan rencana kerja tahunan yang berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta target dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan antar sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi lain.



Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATARTAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	11
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Sekretariat DPRD	12
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	15
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Renja	15
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	15
	3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	20
BAB V	**PENUTUP**	21

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 III-16

Tabel 4.1 Rencana Kerja Sekretariat DPRD IV-20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah. SWT sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat disusun. Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap Rencana Kerja 2025. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar ini sebagai salah satu dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025.

Rencana Kerja 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi dengan melakukan intervensi pada bidang-bidang strategis pada arah kebijakan lima tahun yang akan datang sehingga kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat terukur, dievaluasi dan ditingkatkan.

Rencana Kerja 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar ini masih jauh dari sempurna sehingga saran, masukan dari berbagai pihak yang paham betul mengenai Rencana Kerja 2025 sangat kami harapkan guna perbaikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar, Juli 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. YUHARDI
NIP. 19650909 199203 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Renca Kerja Pembanguan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Sekretariat DPRD disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan,
2. Penyusunan Rancangan Awal,
3. Penyusunan Rancangan,
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Akhir, dan
6. Penetapan

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 entang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka :

1. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan Indikator kinerja hasil (*outcome*), Indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan Pendanaan yang menunjukan perkiraan maju.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan (*controling*), fungsi penyusunan Peraturan Daerah (*legislasi*) serta fungsi anggaran (*budgeting*).

Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber Daya Daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sera Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010 – 2025
9. Peraturan Daerah Kab Tanah Datar Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar.
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Tahun 2017 tentang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Peraturan Bupati Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rancangan akhir rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja antara lain sebagai berikut :

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen rancangan akhir rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan, serta
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Propinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD tergabung dalam urusan pemerintah daerah. Belanja langsung sekretariat DPRD pada tahun 2023 jumlah anggarannya sebesar Rp. 40.625.729.885,- Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 37.726.307.645,- atau sebesar 93%. Berikut rincian realisasi belanja 2 program program dan 15 kegiatan pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.148.508.216,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 22.642.638.797,- atau 98%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran Rp. 158.180.000,- dengan realisasi Rp. 158.180.000,- atau 100%. target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 138.180.000,- dengan realisasi Rp. 138.180.000,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 20.000.000,- dengan realisasi Rp. 19.982.300,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.445.880.885,- dan dapat direalisasikan Rp. 2.417.129.385,- atau 99% target kinerja tercapai 100%, kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 2.433.260.885,- dan realisasi sebesar Rp. 2.404.525.385,- atau 99% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 12.620.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.604.000,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dan dapat direalisasikan Rp. 67.875.0000,- atau 68% target kinerja tercapai 100%, kegiatan ini terdapat satu Sub Kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 3.792.070.826,- terealisasi Rp. 3.756.801.885,- atau 99% target kinerja tercapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.464.300,- atau 99% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 46.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.186.900,- atau 99% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 194.997.400,- dan realisasi sebesar Rp. 194.664.700,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 185.575.426,- dan realisasi sebesar Rp. 182.650.000,- atau 98% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 130.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 123.780.000,- atau 95% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 299.998.000,- dan realisasi sebesar Rp. 298.917.050,- atau 99% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.890.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.866.138.935,- atau 99% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 446.260.000,- terealisasi Rp. 445.427.677,- atau 100% target kinerja tercapai 100%, kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 136.260.000,- dan realisasi sebesar Rp. 136.097.838,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 280.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 279.431.989,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 29.897.850,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan berupa Review DED bangunan gedung kantor Sekretariat DPRD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 974.000.000,- dapat direalisasikan Rp. 922.746.853,- atau 95% target kinerja tercapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat – Menyurat dengan anggaran Rp. 222.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 210.644.700,- atau 95% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 270.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 257.417.564,- atau 95% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.950.000,- atau 75% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 382.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 379.734.589,- atau 99% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 1.612.781.800,- terealisasi Rp. 1.445.166.394,- atau 90% Target kinerja tercapai 100% . Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 575.415.000,- dan realisasi sebesar Rp. 533.244.460,- atau 93% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 689.150.800,- dan realisasi sebesar Rp. 591.984.334,- atau 86% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

- Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 20.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.410.000,- atau 53% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 102.740.000,- dan realisasi sebesar Rp. 100.463.500,- atau 98% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 225.476.000,- dan realisasi sebesar Rp. 209.064.100,- atau 93% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan anggaran Rp. 13.020.929.105,- terealisasi Rp. 12.862.678.861,- atau 99% target kinerja 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan anggaran Rp. 12.436.429.105,- dan realisasi sebesar Rp. 12.323.633.861,- atau 99% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran Rp. 497.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 473.945.000,- atau 95% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan anggaran Rp. 87.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 65.100.000,- atau 74% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

i. Layaanan Administrasi DPRD dengan anggaran Rp. 598.405.600,- terealisasi Rp. 564.283.442,- atau 94% terget kinerja tercapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan anggaran Rp. 333.405.600,- dan realisasi sebesar Rp. 299.865.200,- atau 90% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dengan anggaran Rp. 265.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 264.418.242,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan pagu anggaran Rp. 17.477.221.669,- realisai sebesar Rp. 15.083.968.648,- atau 86% terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran Rp. 1.447.029.694,- dan dapat direalisasikan Rp. 1.396.044.694,- atau 96% target kinerja tercapai 100%.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan anggaran Rp. 1.597.096.624,- terealisasi Rp. 733.322.324 atau 46% target kinerja tercapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan :

- Pembahasan KUA dan PPAS dengan anggaran Rp. 208.531.000,- dan realisasi sebesar Rp. 133.101.600,- atau 64% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran Rp. 211.914.300,- dan realisasi sebesar Rp. 120.164.600,- atau 57% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembahasan APBD dengan anggaran Rp. 824.806.500,- dan realisasi sebesar Rp. 131.603.300,- atau 16% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembahasan Perubahan APBD dengan anggaran Rp. 93.156.100,- dan realisasi sebesar Rp. 89.768.100,- atau 96% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan anggaran Rp. 258.688.724,- dan realisasi sebesar Rp. 258.684.724,- atau 100% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran Rp. 731.318.024,- terealisasi Rp. 730.242.624,- atau 100%. Target kinerja tercapai 100%.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan anggaran Rp. 3.481.299.000,- terealisasi Rp. 3.034.588.623,- atau 87% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan :

- Pendalaman Tugas DPRD dengan anggaran Rp. 2.310.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.987.467.123,- atau 86% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan anggaran Rp. 865.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 766.744.900,- atau 89% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan anggaran Rp. 290.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 278.187.600,- atau 96% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan anggaran Rp. 14.999.000,- dan realiasasi sebesar Rp. 2.189.000,- atau 15% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan anggaran Rp. 3.513.151.500,- teralisasi Rp. 3.026.528.050,- atau 86% target kinerja tercapai dari 100% sesuai yang direncanakan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan :

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan anggaran Rp. 1.750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.306.064.800,- atau 75% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan anggaran Rp. 45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.170.200,- atau 98% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pelaksanaan Reses dengan anggaran Rp. 1.718.151.,500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.676.293.250,- atau 98% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

f. Fasilitasi Tugas DPRD yang hanya trdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan anggaran Rp. 6.707.326.827,- terealisasi Rp. 6.163.242.333,- atau 92% target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan 15 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel TC-29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tugas dan Fungsinya adalah memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam Keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel TC-30.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN TANAH DATAR
TABEL T-C.29

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Tahun 2024	
													Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					3	4	5			6			7	8	9=8/7	10			11=(6+8+10)	12=(11/5)
							K		Rp	K		Rp				K		Rp		
4	***02***	***01***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA***															
4	***02***	***01***	***2.01***		***PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH***				**150.000.000**											
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gaji THL	1	Orang		1	Orang	103.696.115	138.180.000	140.547.000	102%	2	Orang	89.653.800	333.896.915	223%
						Jumlah Administrasi Keuangan	2500	Dokumen		1500	Dokumen					2500	Dokumen			
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	5	Dokumen		5	Dokumen					5	Dokumen			
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	3	Dokumen		3	Dokumen	14.981.975	20.000.000	19.982.300	100%	3	Dokumen	6.820.000	41.784.275	28%
4	***02***	***01***	***2.02***		***ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH***				**4.000.000.000**											
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	14	Bulan		14	Bulan	2.284.219.313	2.433.260.885	2.404.525.385	99%	14	Bulan	2.855.965.458	7.544.710.156	189%
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	1	Dokumen		1	Dokumen	14.980.065	12.620.000	12.604.000	100%	1	Dokumen	6.820.000	34.404.065	1%
4	***02***	***01***	***2.05***		***ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH***				**310.000.000**											
4	*02*	*01*	*2.05*		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang di sediakan	22	orang		22	orang	3.850.000	0	0	#DIV/0!	22	orang	0	3.850.000	**1%**
4	*02*	*01*	*2.05*	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang di ikuti	1	Tahun		1	Tahun	50.000.000	100.000.000	67.875.000	68%	1	Tahun	25.000.000	142.875.000	46%
4	***02***	***01***	***2.06***		***ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH***				**8.700.000.000**											
4	*02*	*01*	*2.06*	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25	Jenis		25	Jenis	38.074.100	45.000.000	44.464.300	99%	25	Jenis	20.000.000	102.538.400	1%
4	*02*	*01*	*2.06*	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	30	Jenis		30	Jenis	64.005.500	46.500.000	46.186.900	99%	30	Jenis	65.000.000	175.192.400	2%
4	*02*	*01*	*2.06*	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersdia	50	Jenis		50	Jenis	153.369.275	194.997.400	194.664.700	100%	50	Jenis	65.000.000	413.033.975	5%
4	*02*	*01*	*2.06*	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan barang cetakan dan penggandaan	20	Jenis		20	Jenis	184.641.190	185.575.426	182.650.000	98%	20	Jenis	80.000.000	447.291.190	5%
4	*02*	*01*	*2.06*	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang di sediakan	10	Media		10	Media	114.540.000	130.000.000	123.780.000	95%	10	Media	125.000.000	363.320.000	4%
4	*02*	*01*	*2.06*	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gaji THL	3	Orang		3	Orang	257.465.078	299.998.000	298.617.050	100%	3	Orang	175.493.200	7.436.097.769	85%
						Jumlah Jenis tamu yang difasilitasi	1	Tahun		1	Tahun					1	Tahun			
4	*02*	*01*	*2.06*	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat yang terselenggara	1	Tahun		1	Tahun	2.869.958.834	2.890.000.000	2.866.138.935	99%	1	Tahun	1.700.000.000	7.436.097.769	85%
4	***02***	***01***	***2.07***		***PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA***				**2.500.000.000**											
4	02	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	3	unit		3	unit	429.400.000	0	0	#DIV/0!	3	unit	2.010.000.000	2.439.400.000	0,97576
4	02	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2	Unit		2	Unit	148.553.400	0	0	#DIV/0!	2	Unit	-	148.553.400	6%
4	*02*	*01*	*2.07*	05	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel yang diadakan	2	Jenis		2	Jenis	0	0	0	-	2	Jenis	-	-	0%
4	*02*	*01*	*2.07*	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	5	Jenis		5	Jenis	542.838.000	136.260.000	136.097.838	100%	5	Jenis	-	678.935.838	27%
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	unit		1	unit	98.750.000	0	0	#DIV/0!	1	unit	-	98.750.000	4%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Tahun 2024	
													Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					3	4	5			6			7	8	9=8/7	10			11=(6+8+10)	12=(11/5)
4	*02*	*01*	*2.07*		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	1	tahun		1	tahun	241.922.731	280.000.000	279.431.989	100%	1	tahun	-	521.354.720	21%
4	02	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya uang disediakan	4	unit		4	unit	0	30000000	29897850	-	3	unit	-	29.897.850	1%
4	***02***	***01***	***2.08***		***PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***				**1.100.000.000**											
4	*02*	*01*	*2.08*	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gaji THL	8	Orang		8	Orang	165.452.000	222.000.000	210.644.700	95%	8	Orang	251.315.200	627.411.900	57%
						Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	1500	Materai		1500	Materai					1500	Materai			
4	*02*	*01*	*2.08*	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rek listrik, air, telepon serta TV berlangganan	4	Jenis		4	Jenis	227.341.984	270.000.000	257.417.564	95%	4	Jenis	250.000.000	734.759.548	67%
4	*02*	*01*	*2.08*	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	Jenis		4	Jenis	42.400.000	100.000.000	74.950.000	75%	4	Jenis	50.000.000	167.350.000	15%
4	*02*	*01*	*2.08*	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa yang dilayani	###	Jenis		23	Jenis	350.979.731	382.000.000	379.734.589	99%	1	tahun	390.503.085	1.121.217.405	102%
							4	Orang		4	Orang					4	Orang			
4	***02***	***01***	***2.09***		***PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA***				**2.500.000.000**											
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	3	Unit		3	Unit	484.935.607	575.415.000	533.244.460	93%	3	Unit	600.415.000	1.618.595.067	65%
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Gaji THL	7	Orang		7	Orang	492.484.275	689.150.800	591.984.334	86%	7	Orang	875.213.800	1.959.682.409	78%
						Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14	Unit		14	Unit					14	Unit			
						Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	14	Unit		14	Unit					14	Unit			
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	5	Unit		5	Unit	28.870.000	20.000.000	10.410.000	52%	5	Unit	15.000.000	54.280.000	2%
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	10	Unit		10	Unit	134.093.000	102.740.000	100.463.500	98%	10	Unit	60.000.000	294.556.500	12%
#####					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor yg di pelihara	1	Unit		1	Unit	225.978.123	225.476.000	209.064.100	93%	1	Unit	388.380.285	823.422.508	33%
						Jumlah jenis rumah jabatan yang dipelihara	1	Unit		1	Unit					1	Unit			
						tersedianya jasa keamanan kantor	1	tahun		1	tahun					1	tahun			
4	***02***	***01***	***2.15***		***LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD***				**16.000.000.000**											
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	14	Bulan		14	Bulan	12.311.382.108	12.436.429.105	12.323.633.861	99%	14	Bulan	12.737.359.105	37.372.375.074	234%
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang di sediakan	4	Jenis		4	Jenis	405.352.000	497.000.000	473.945.000	95%	4	Jenis	604.000.000	1.483.297.000	9%
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang di selenggarakan	1	Paket		1	Paket	87.500.000	87.500.000	65.100.000	74%	1	Paket	87.500.000	240.100.000	2%
4	***02***	***01***	***2.16***		***LAYANAN ADMINISTRASI DPRD***				**1.500.000.000**											
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	1	Dokumen		1	Dokumen	3.420.000	0	0	#DIV/0!	1	Dokumen	0	3.420.000	0%
#####	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Gaji THL	1	Orang		1	Orang	279.612.250	333.405.600	299.865.200	90%	1	Orang	1.160.437.455	1.739.914.905	116%
						Jenis rapat AKD dan rapat paripurna yg di laksanakan	100	Kali		100	Kali					100	Kali			
4	02	01	16	04	Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga DPRD	Gaji THL	1	orang		1	orang	236.864.184	265.000.000	264.418.242	100%	1	orang	270.000.000	771.282.426	51%
						tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	12	Bulan		12	Bulan					12	Bulan			
4	***02***	***02***			***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***															
4	***02***	***02***	***2.01***		***PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD***				**5.000.000.000**											
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perda yang dihasilkan		6 perda			6 perda	1.369.983.196	1.447.029.694	1.396.044.694	96%		6 perda	3.297.319.500	6.063.347.390	121%
4	***02***	***02***	***2.02***		***PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN***				**4.000.000.000**											

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Tahun 2024	
													Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					3	4	5			6			7	8	9=8/7	10			11=(6+8+10)	12=(11/5)
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	Kali		1	Kali	326.900.100	208.531.000	133.101.600	64%	1	Kali	1.061.820.000	1.521.821.700	38%
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan perubahan PPAS	1	Kali		1	Kali	266.723.700	211.914.300	120.164.600	57%	1	Kali	1.061.820.000	1.448.708.300	36%
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	terlaksananya pembahasan APBD	1	Kali		1	Kali	196.131.790	824.806.500	131.603.300	16%	1	Kali	1.031.445.000	1.359.180.090	34%
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1	Kali		1	Kali	165.861.500	93.156.100	89.768.100	96%	1	Kali	1.031.445.000	1.287.074.600	32%
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1	Kali		1	Kali	303.946.086	258.688.724	258.684.724	100%	1	Kali	843.635.000	1.406.265.810	35%
4	***02***	***02***	***2.03***		***PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN***				**3.300.000.000**											
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	3	Kali		3	Kali	824.274.520	731.318.024	730.242.624	100%	3	Kali	2.063.121.200	3.617.638.344	110%
4	***02***	***02***	***2.04***		***PENINGKATAN KAPASITAS DPRD***				**4.200.000.000**											
					Orientasi DPRD	terlaskananya orientasi dan pembekalan DPRD	1	Kali		1	Kali	-	-	-	-	1	Kali	0		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah bimtek DPRD yang di laksanakan	6	Kali		6	Kali	1.723.626.946	2.310.750.000	1.987.467.123	86%	6	Kali	2.330.570.000	6.041.664.069	144%
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	70	buku		70	buku	665.186.600	865.000.000	766.744.900	89%	70	buku	1.050.510.312	2.482.441.812	59%
						Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	200	Kali		200	Kali					200	Kali			
						Gaji THL	6	Orang		6	Orang					7	Orang			
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	8	Orang		8	Orang	274.699.650	290.550.000	278.187.600	96%	8	Orang	290.550.000	843.437.250	20%
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing dengan masyarakat	20	Kali		20	Kali	12.850.900	14.999.000	2.189.000	15%	20	Kali	30.000.000	45.039.900	1%
4	02	02	2.04		Pengucapan Sumpah/Janji Calon Anggota DPRD	terlaksananya pengucapan sumpah/janji calon Anggota DPRD	1	kegiatan		1	kegiatan					1	kegiatan	0		
4	***02***	***02***	***2.05***		***PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT***				**4.500.000.000**											
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang di adakan	1	Tahun		1	Tahun	1.209.628.550	1.750.000.000	1.306.064.800	75%	1	Tahun	3.400.000.000	5.915.693.350	131%
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Gaji THL	1	Orang		1	Orang	32.278.635	45.000.000	44.170.200	98%	1	Orang	45.000.000	121.448.835	3%
						Terlaksananya penyusunan pokir DPRD	1	Kegiatan		1	Kegiatan					1	Kegiatan			
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya RESES DPRD	3	Kali		3	Kali	1.401.972.010	1.718.151.500	1.676.293.250	98%	3	Kali	1.386.200.000	4.464.465.260	99%
	4.	***02.***	***02.***	***2.***	***FASILITASI TUGAS DPRD***				**17.500.000.000**											
4.	02.	02.	2.	08.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunker, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD	12	Bulan		12	Bulan	6.478.144.337	6.707.326.827	6.163.242.333	92%	12	Bulan	17.000.000.000	29.641.386.670	169%
					JUMLAH							38.344.119.358						60.888.312.400		

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TABEL T-C.30

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Targer Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Akuntabilitas Sekretariat DPRD			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Sekretariat DPRD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)*, serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang *(opportunity)* dan ancaman/tantangan *(threath)*.

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana diatas, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan informasi yang cukup luas, sehingga dibutuhkan Sekretariat Pendamping DPRD yang Kompeten dan selalu *update* terhadap informasi – informasi baru yang menunjang kinerja DPRD serta mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan tekhnologi serta pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi.

Berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai pengemban aspirasi masyarakat khususnya melalui kegiatan reses dan hearing atau dengar pendapat dimana pemenuhan terhadap tuntutan dari aspirasi masyarakat tersebut harus dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD kepada instansi – instansi terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar aspirasi – aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat lebih diperhatikan

Untuk tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan tekhnologi serta pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi.

Rencanan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan yang mana kegiatan-kegiatan tersebut mengalami peningkatan dikarenakan pasca pemilu dan adanya Perpres 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dimana standar harga pembayaran biaya perjalanan dinas DPRD dilakukan secara *lumsum.* Hal ini membuat kebutuhan anggaran meningkat dikarenakan seluruh biaya perjalanan dinas dibayarkan penuh diawal kepada pimpinan dan anggota DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD digunakan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat DPRD dengan melakukan pengentrian awal Renja pada aplikasi SAKIP Tanah Datar dan e-SAKIP Reviu yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) berdasarkan anggaran OPD yang disepakati.

Bahwa perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tentunya berdasarkan pada dokumen Rencana Trategis (Renstra) SKPD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD.

Program dan kegiatan yang diusulkan tersebut dalam upaya mengakomodir rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD guna mendukung fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah maupun kebijakan daerah lainnya.

Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar, maka apabila terjadi perbedaan dengan hasil analisis yang dibuat seperti terdapat rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD atau Program/ Kegiatan yang tidak cocok atau sama tetapi besarannya berbeda hal itu dikarenakan dalam pembuatan rancangan awal RKPD hanya mencantumkan perkiraan Program/ Kegiatan pada awal tahun, dimana dalam perkembangannya mungkin ada penambahan atau perubahan Program/ Kegiatan berdasarkan usulan dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga proses tersebut bisa dilakukan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Program/ Kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan *bottom up planning* berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi baik dari kelompok masyarakat, LSM, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah melalui pengamatan dan pelaksanaan Musrenbang yang ditujukan kepada Perangkat Daerah. Mengingat Program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD pada dasarnya merupakan usulan OPD dan bukan usulan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat secara eksplisit. Tetapi secara implisit karena anggota DPRD merupakan wakil

masyarakat yang notabene menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama dari daerah pemilihannya, maka program dan kegiatan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menfasilitasi anggota DPRD melaksanakan fungsi pembentukan peraturan dearah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Sedangkan program kegiatan yang mengakomodir kepentingan masyarakat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan senantiasa selalu ditingkatkan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka tentu produk hukum terutama peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Sekretariat DPRD yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 adalah OPD yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD
5. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dengan mengemban peran Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka tentu dituntut mempunyai profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dari sisi tekhnis maupun operasionalnya. Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

secara optimal. Hal itu mulai dari proses penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan ketatausahaan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Terkait dengan itu tujuan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sama dengan Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026 dengan maksud konsisten dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan fasilitasi kedewanan"	1. Meningkatkan layanan administrasi	Nilai akuntabilitas Sekretariat DPRD	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	
	2. Meningkatkan fasiltasi kedewanan	Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	
		Hasil survey kepuasan masyarakat dan anggota DPRD	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	

3.3 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan, ditetapkanlah program kerja Sekretariat DPRD yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 32 Sub kegiatan yakni :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja OPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check UP DPRD

i. Layanan Administrasi DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- Fasilistasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan Penggunaan Anggaran

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Pendalaman Tugas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
- Pelakasanaan Reses

f. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR

TAHUN 2025

TABEL T-C.33

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
										Sumber Dana / Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5		6 / 7	8		9
4	***02***	***01***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA***					***26.860.797.846***			***26.813.462.738***
4	***02***	***01***	***2.01***		***PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH***					***188.207.500***			***197.617.875***
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gaji THL	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	2	Orang	APBD 171.407.500	2	Orang	179.977.875
						Jumlah Administrasi Keuangan yang dilakukan		2500	Dokumen		2500	Dokumen	
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia		5	Dokumen		5	Dokumen	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	3	Dokumen	APBD 16.800.000	3	Dokumen	17.640.000
4	***02***	***01***	***2.02***		***ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH***					***2.667.586.743***			**2.800.966.080**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	14	Bulan	APBD 2.650.786.743	14	Bulan	2.783.326.080
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Dokumen	APBD 16.800.000	1	Dokumen	17.640.000
4	***02***	***01***	***2.05***		***ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH***					***100.000.000***			**105.000.000**
4	*02*	*01*	*2.05*	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang di ikuti	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Tahun	APBD 100.000.000	1	Tahun	105.000.000
4	***02***	***01***	***2.06***		***ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH***					***3.838.000.000***			**4.029.900.000**
4	*02*	*01*	*2.06*	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	25	Jenis	APBD 55.000.000		25 jenis	57.750.000
4	*02*	*01*	*2.06*	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	30	Jenis	APBD 65.000.000		30 jenis	68.250.000
4	*02*	*01*	*2.06*	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersdia	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	50	Jenis	APBD 198.000.000	50	Jenis	207.900.000
4	*02*	*01*	*2.06*	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	20	Jenis	APBD 195.000.000	20	Jenis	204.750.000
4	*02*	*01*	*2.06*	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang di sediakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	10	Media	APBD 130.000.000	10	Media	136.500.000
4	*02*	*01*	*2.06*	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gaji THL	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	3	Orang	APBD 295.000.000	3	Orang	309.750.000
						Jumlah Jenis tamu yang difasilitasi		1	Tahun		1	Tahun	
4	*02*	*01*	*2.06*	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat yang terselenggara	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Tahun	APBD 2.900.000.000	1	Tahun	3.045.000.000
4	***02***	***01***	***2.07***		***PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA***					***4.220.000.000***			**3.045.000.000**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	3 unit	APBD	-		
4	02	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	2 Unit	APBD	50.000.000		
4	*02*	*01*	*2.07*	05	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel yang diadakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	2 Jenis	APBD	100.000.000	2 Jenis	105.000.000
4	*02*	*01*	*2.07*	05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1 unit	APBD	2.650.000.000	2 Jenis	2.782.500.000
4	*02*	*01*	*2.07*	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	5 Jenis	APBD	150.000.000	5 Jenis	157.500.000
4	02	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya uang disediakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	4 unit	APBD	1.270.000.000		
4	***02***	***01***	***2.08***		***PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***					***1.026.972.800***		**1.078.321.440**
4	*02*	*01*	*2.08*	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gaji THL	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	8 Orang	APBD	276.315.200	8 Orang	290.130.960
						Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya		1500 Materai			1500 Materai	
4	*02*	*01*	*2.08*	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rek listrik, air, telepon serta TV berlangganan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	4 Jenis	APBD	275.000.000	4 Jenis	288.750.000
4	*02*	*01*	*2.08*	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	4 Jenis	APBD	80.000.000	4 Jenis	84.000.000
4	*02*	*01*	*2.08*	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa yang dilayani	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	23 Jenis	APBD	395.657.600	### Jenis	415.440.480
								4 Orang			4 Orang	
4	***02***	***01***	***2.09***		***PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA***					***2.025.930.408***		**2.127.226.928**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	3 Unit	APBD	604.224.020	3 Unit	634.435.221
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Gaji THL	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	7 Orang	APBD	806.706.388	7 Orang	847.041.707
						Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara		14 Unit			14 Unit	
						Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak		14 Unit			14 Unit	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	5 Unit	APBD	30.000.000	5 Unit	31.500.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
										Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5		6	7	8		9
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	10	Unit	APBD	85.000.000	10	Unit	89.250.000
#####					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor yg di pelihara	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Unit	APBD	500.000.000	1	Unit	525.000.000
						Jumlah jenis rumah jabatan yang dipelihara		1	Unit			1	Unit	
						tersedianya jasa keamanan kantor		1	tahun			1	tahun	
4	***02***	***01***	***2.15***		***LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD***						***12.084.100.395***			**12.683.930.415**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	14	Bulan	APBD	11.396.600.395	14	Bulan	11.966.430.415
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang di sediakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	4	Jenis	APBD	600.000.000	4	Jenis	630.000.000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang di selenggarakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Paket	APBD	87.500.000	1	Paket	87.500.000
4	***02***	***01***	***2.16***		***LAYANAN ADMINISTRASI DPRD***						***710.000.000***			**745.500.000**
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Dokumen	APBD	-	1	Dokumen	-
#####	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Gaji THL	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Orang	APBD	425.000.000	1	Orang	446.250.000
						Jenis rapat AKD dan rapat paripurna yg di laksanakan		100	Kali			100	Kali	
4	02	01	.16	04	Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga DPRD	Gaji THL	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	orang	APBD	285.000.000	1	orang	299.250.000
						tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD		12	Bulan			12	Bulan	
4	***02***	***02***			***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***						***29.471.577.129***			**30.945.155.985**
4	***02***	***02***	***2.01***		***PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD***						***3.150.000.000***			**3.307.500.000**
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perda yang dihasilkan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung		6 perda	APBD	3.150.000.000		6 ranperda	3.307.500.000
4	***02***	***02***	***2.02***		***PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN***						***4.592.258.229***			**4.821.871.140**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Kali	APBD	946.820.000	1	Kali	994.161.000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan perubahan PPAS	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Kali	APBD	946.820.000	1	Kali	994.161.000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	terlaksananya pembahasan APBD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Kali	APBD	921.820.000	1	Kali	967.911.000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	terlaksananya pembahasan APBD perubahan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1	Kali	APBD	921.820.000	1	Kali	967.911.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1 Kali	APBD	854.978.229	1 Kali	897.727.140
4	***02***	***02***	***2.03***		***PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN***					***1.783.121.200***		**1.872.277.260**
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	3 Kali	APBD	1.783.121.200	3 Kali	1.872.277.260
4	***02***	***02***	***2.04***		***PENINGKATAN KAPASITAS DPRD***					***3.868.493.250***		**3.965.446.013**
					Orientasi DPRD	terlaskananya orientasi dan pembekalan DPRD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1 Kali	APBD	-		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah bimtek DPRD yang di laksanakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	6 Kali	APBD	2.582.943.250	6 Kali	2.712.090.413
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	70 buku	APBD	965.000.000		916.778.100
						Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan		200 Kali			200 Kali	
						Gaji THL		6 Orang			6 Orang	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	8 Orang	APBD	290.550.000	8 Orang	305.077.500
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing dengan masyarakat	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	20 Kali	APBD	30.000.000	20 Kali	31.500.000
4	02	02	2.04		Pengucapan Sumpah/Janji Calon Anggota DPRD	terlaksananya pengucapan sumpah/janji calon Anggota DPRD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1 kegiatan	APBD	-		-
4	***02***	***02***	***2.05***		***PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT***					***5.077.704.450***		**5.331.589.673**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang di adakan	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1 Tahun	APBD	3.000.000.000	1 Tahun	3.150.000.000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Gaji THL	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	1 Orang	APBD	45.000.000	1 Orang	47.250.000
						Terlaksananya penyusunan pokir DPRD		1 Kegiatan			1 Kegiatan	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya RESES DPRD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	3 Kali	APBD	2.032.704.450	3 Kali	2.134.339.673
	4.	***02.***	***02.***	***2.***	***FASILITASI TUGAS DPRD***					***11.000.000.000***		**11.550.000.000**
4.	02.	02.	2.	08.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunker, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	12 Bulan	APBD	11.000.000.000	12 Bulan	11.550.000.000
					JUMLAH					***56.332.374.975***		***57.758.618.724***

Batusangkar, Juli 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. YUHARDI
NIP. 19650909199203 1 007

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah melalui proses dan pembahasan bersama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar serta analisis kebutuhan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar maka Rencana Kerja dan Pendanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat dirumuskan sebagai berikut :

TABEL T-C.31

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (program)	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (program)	Target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				***26.960.797.846***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA***				***27.714.568.981***
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				***188.207.500***	***PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH***				***193.457.500***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tanah Datar	Gaji THL	2 Orang	171.407.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tanah Datar	Gaji THL	1 Orang	175.657.500
			Jumlah Administrasi Keuangan yang dilakukan	1500 Dokumen				Jumlah Administrasi Keuangan yang dilakukan	1500 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	5 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	5 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanah Datar	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	3 dokumen	16.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanah Datar	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	3 dokumen	16.800.000
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				***2.667.586.743***	***ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH***				***2.872.785.458***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Datar	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	14 bulan	2.650.786.743	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Datar	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	14 bulan	2.855.985.458
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tanah Datar	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	1 dokumen	16.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tanah Datar	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	1 dokumen	16.800.000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				***100.000.000***	***ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH***				***150.000.000***
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Tanah Datar	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang di ikuti	1 tahun	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Tanah Datar	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang di ikuti	1 tahun	150.000.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				***3.838.000.000***	***ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH***				***4.438.000.000***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25 jenis	55.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25 jenis	55.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	30 jenis	65.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	30 jenis	65.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	50 jenis	198.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	50 jenis	198.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis bahan barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	195.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis bahan barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	195.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis bahan bacaan yang di sediakan	10 media	130.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis bahan bacaan yang di sediakan	10 media	130.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tanah Datar	Gaji THL	3 Orang	295.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tanah Datar	Gaji THL	3 Orang	295.000.000
			Jumlah Jenis tamu yang difasilitasi	1 Tahun				Jumlah Jenis tamu yang difasilitasi	1 Tahun	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis rapat yang terselenggara	1 tahun	2.900.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis rapat yang terselenggara	12 bulan	3.500.000.000
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA				***4.220.000.000***	***PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA***				***4.200.000.000***
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tanah Datar	Tersedianyan kendaraan dinas jabatan	3 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianyan kendaraan dinas jabatan	3 unit	-
	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab Tanah Datar	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2 unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab Tanah Datar	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2 unit	50.000.000
	Pengadaan Mebel	Kab Tanah Datar	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	2 Jenis	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab Tanah Datar	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	2 jenis	80.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	2.650.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	2.650.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah Jenis peralatan dan mesin yang diadakan	5 Jenis	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah Jenis peralatan dan mesin yang diadakan	5 Jenis	150.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Datar		1 Tahun	1.270.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Datar		1 Tahun	1.270.000.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				***1.026.972.800***	***PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***				***1.021.315.200***
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tanah Datar	Gaji THL	5 Orang	276.315.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tanah Datar	Gaji THL	5 Orang	276.315.200
			Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	1500 Materai				Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	1500 Materai	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tanah Datar	Jumlah tagihan rek listrik, air, telepon serta TV berlangganan	4 Jenis	275.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tanah Datar	Jumlah tagihan rek listrik, air, telepon serta TV berlangganan	4 Jenis	275.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	80.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	80.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis jasa yang dilayani	50 Jenis	395.657.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis jasa yang dilayani	50 Jenis	400.000.000
				4 Orang					4 Orang	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA				***2.025.930.408***	***PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA***				***2.035.930.408***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit	604.224.020	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit	604.224.020
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab Tanah Datar	Gaji THL	7 Orang	806.706.388	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab Tanah Datar	Gaji THL	7 Orang	816.706.388
			Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14 Unit				Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14 Unit	
			Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	14 Unit				Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	14 Unit	
	Pemeliharaan Mebel	Kab Tanah Datar	Jumlah mebel yang di pelihara	5 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab Tanah Datar	Jumlah mebel yang di pelihara	5 Unit	30.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	10 Jenis	85.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	10 Jenis	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis gedung kantor yg di pelihara	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis gedung kantor yg di pelihara	1 Unit	500.000.000
			Jumlah jenis rumah jabatan yg di pelihara	1 Unit				Jumlah jenis rumah jabatan yg di pelihara	1 Unit	
			tersedianya jasa kemanan kantor	1 tahun				tersedianya jasa kemanan kantor	1 tahun	
	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD				***12.084.100.395***	***LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD***				***12.084.100.395***
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab Tanah Datar	Terlaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	14 Bulan	11.396.600.395	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab Tanah Datar	Terlaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	14 Bulan	11.396.600.395
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab Tanah Datar	Jumlah pakaian dinas yang di sediakan	4 Jenis	600.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab Tanah Datar	Jumlah pakaian dinas yang di sediakan	4 Jenis	600.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang di selenggarakan	1 Paket	87.500.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab Tanah Datar	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang di selenggarakan	1 Paket	87.500.000
	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD				***710.000.000***	***LAYANAN ADMINISTRASI DPRD***				***710.000.000***

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (program)	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (program)	Target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab Tanah Datar	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	1 dokumen	-	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab Tanah Datar	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	1 dokumen	-
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab Tanah Datar	Gaji THL	1 Orang	425.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab Tanah Datar	Gaji THL	1 Orang	425.000.000
			Jenis rapat AKD dan rapat paripurna yang dilaksanakan	100 kali				Jenis rapat AKD dan rapat paripurna yang dilaksanakan	100 kali	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab Tanah Datar	Gaji THL	1 Orang	285.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab Tanah Datar	Gaji THL	1 Orang	285.000.000
			Tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan				Tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				***29.411.577.129***	***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***				***30.491.577.129***
	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD				***3.150.000.000***	***PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD***				***3.150.000.000***
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab Tanah Datar	Jumlah perda yang di hasilkan	6 Perda	3.150.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab Tanah Datar	Jumlah perda yang di hasilkan	6 Perda	3.150.000.000
	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN				***4.592.258.229***	***PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN***				***4.592.258.229***
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab Tanah Datar	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	946.820.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab Tanah Datar	terlaksananya pembahasan KU dan PPAS	1 kali	946.820.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Tanah Datar	Terlaksananya pembahasan KUA dan perubahan PPAS	1 kali	946.820.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Tanah Datar	terlaksananya pembahasan KU dan perubahan PPAS	1 kali	946.820.000
	Pembahasan APBD	Kab Tanah Datar	Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	921.820.000	Pembahasan APBD	Kab Tanah Datar	terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	921.820.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab Tanah Datar	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	921.820.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab Tanah Datar	terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	921.820.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab Tanah Datar	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 kali	854.978.229	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab Tanah Datar	terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 kali	854.978.229
	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				***1.783.121.200***	***PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN***				***1.783.121.200***
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab Tanah Datar	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	3 kali	1.783.121.200	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab Tanah Datar	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	3 kali	1.783.121.200
	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD				***3.868.493.250***	***PENINGKATAN KAPASITAS DPRD***				***3.888.493.250***
	Orientasi DPRD	Kab Tanah Datar	terlaksananya orientasi dan pembekalan DPRD	1 kali	-	Orientasi DPRD	Kab Tanah Datar	terlaksananya orientasi dan pembekalan DPRD	1 kali	-
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab Tanah Datar	Jumlah bimtek DPRD yang di laksanakan	6 kali	2.582.943.250	Pendalaman Tugas DPRD	Kab Tanah Datar	Jumlah bimtek DPRD yang di laksanakan	6 kali	2.582.943.250
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab Tanah Datar	Jumlah Buku Memori DPRD	70 buku	965.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab Tanah Datar	Jumlah Buku Memori DPRD	70 buku	985.000.000
			Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	200 kali				Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	200 kali	
			Gaji THL	7 Orang				Gaji THL	7 Orang	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab Tanah Datar	Jumlah tenaga ahli fraksi	8 Orang	290.550.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab Tanah Datar	Jumlah tenaga ahli fraksi	8 orang	290.550.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab Tanah Datar	Jumlah hearing dengan masyarakat	20 Kali	30.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab Tanah Datar	Jumlah hearing dengan masyarakat	20 kali	30.000.000
	Pengucapan Sumpah/Janji Calon Anggota DPRD	Kab Tanah Datar	terlaksananya pengucapan sumpah/janji calon Anggota DPRD	1 kegiatan	-	Pengucapan Sumpah/Janji Calon Anggota DPRD	Kab Tanah Datar	terlaksananya pengucapan sumpah/janji calon Anggota DPRD	1 kegiatan	-
	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT				***5.077.704.450***	***PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT***				***5.077.704.450***
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab Tanah Datar	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang di adakan	1 tahun	3.000.000.000	Orientasi DPRD	Kab Tanah Datar	terlaksananya orientasi dan pembekalan DPRD	1 kali	3.000.000.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab Tanah Datar	Gaji THL	1 Orang	45.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab Tanah Datar	Gaji THL	1 Orang	45.000.000
			Terlaksananya penyusunan pokir DPRD	1 Kegiatan				Terlaksananya penyusunan pokir DPRD	1 Kegiatan	
	Pelaksanaan Reses	Kab Tanah Datar	Terlaksananya RESES DPRD	3 Kali	2.032.704.450	Pelaksanaan Reses	Kab Tanah Datar	Terlaksananya RESES DPRD	3 Kali	2.032.704.450
	FASILITASI TUGAS DPRD				***11.000.000.000***	***FASILITASI TUGAS DPRD***				***12.000.000.000***
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Kunker, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD	12 Bulan	11.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab Tanah Datar	Jumlah Kunker, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD	12 Bulan	12.000.000.000
	JUMLAH				***56.332.374.975***					***58.208.146.080***

Batusangkar, Juli 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR

DRS. YUHARDI
NIP. 19650909 199203 1 007

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Datar yang berisi program dan kegiatan Tahun 2025 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi kondisi terhadap dukungan pelayanan dan fasilitasi DPRD.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di Sekretariat DPRD yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan SKPD yang berkompeten, sehingga diharapkan hasil yang lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Semoga rancangan akhir rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Tanah Datar Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Batusangkar, Juli 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. YUHARDI
NIP. 19650909 199203 1 007

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 73185 - 71001 Fax. 574000
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.3.5/02/RENKEU-SETDA-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertampungnya perencanaan dan penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilaksanakan disusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Nomor 900.1.1.2/04/Pem-2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

2. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Nomor 400.8/07/Kesra-2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

3. Surat Kepala Bagian Hukum Setda Nomor 900.1.1.2/17/Hukum-2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

4. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Nomor 000.3.1/45/PBJ-2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

5. Surat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Nomor 500/02/Eko dan SDA-2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

6. Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Nomor 900.1.1.2/02/AP-2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

7. Surat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Nomor 900/02/Prokopim-2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

8.Surat ...

8. Surat Kepala Bagian Organisasi Setda Nomor 900.1.2/05/ORG-2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

9. Surat Kepala Bagian Umum Setda Nomor 900.1.1/98/Umum-Setda-2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

10. Surat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Nomor 900/07/RENKEU-SETDA-2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Usulan Nama Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Dokumen Penganggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. menghimpun data usulan program dan kegiatan serta laporan permasalahan Sekretariat Daerah;
b. menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
c. menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
d. menyusun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
e. menyusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Dearah Kabupaten Tanah Datar;
f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengusulan rencana anggaran pembiayaan pembangunan untuk penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala BPKD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.3.5/02/RENKEU-SETDA-2024
TANGGAL : 29 Januari 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Penanggung Jawab
2	ELIZAR, SH	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Wakil Penanggung Jawab
3	Drs. ALFIAN JAMRAH, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Wakil Penanggung Jawab
4	JASRINALDI, S.Sos, SH	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Wakil Penanggung Jawab
5	AJI SAGITARIUS RISA, SE	Kabag. Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Ketua
6	STEPHANIE AYUTRI, S.Pd.I, M.Si	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Sekretaris
7	ARIEF GANI, S.STP	Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
8	AUDIA SAFITRI, SH, M.Si	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
9	ALI NARDIUS, S.Ag, MA	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
10	MUSTIKA SUARMAN, ST, MT	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
11	MASNI YULETRI, SE, MM	Kabag Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	Anggota
12	WINA MARTA YENI, SE, M.Si	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
13	DEDI TRI WIDONO, S.STP	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
14	RONAL SATRIA, S.IP	Kabag Umum Sekretariat Daerah	Anggota
15	UTRI SATRIA PUTRA, ST, MT	Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
16	NIKHEN AMDA, SH	Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota

17. USNA RAMADENI, SH ...

17	USNA RAMADENI, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
18	AHMAD ZULKIFLI, SHI	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
19	EVALINA, ST	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
20	OFRINALDI, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
21	YELPI JUNIATI, SE	Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
22	ITA WIDIYA NINGSIH	Tenaga Administrasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
23	DEWI FITRIA	Tenaga Administrasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota
24	DIAN KUMALA SARI, ST	Kasubag Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
25	RITA NINGSIH, S.Sos	Analis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Koordinator Sekretariat
26	AYNEL FETRIA, S.Kom	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
27	IRMA JUITA, S.Sos	Pemeriksa Transaksi Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
28	HELMA KRITIEVA, SM	Bendahara Pengeluaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
29	SILVIA MEGA SARI, S.E.Sy	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
30	REZI WULANDARI, SE	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
31	MONARIA SIHOTANG, A.Md	Verifikator pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota

32. MIKE RATNA SARI, S.E.Sy ...

32	MIKE RATNA SARI, S.E.Sy	Tenaga Administrasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
33	DEWI OKTAFIANI	Tenaga Administrasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini.

Dokumen Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 merupakan dokumen selama 1 (satu) tahun ke depan yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Sekretariat Daerah. Selain itu penyusunan dokumen Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja juga merupakan pemenuhan kewajiban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Rencana Kerja berfungsi sebagai pengarah pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Peran Sekretariat Daerah yang sangat penting dalam pembangunan, membantu Bupati dan Wakil Bupati, harus dapat mendukung kinerja pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, dokumen Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan nilai strategis dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dapat ditingkatkan.

Batusangkar, 2024

SEKRETARIS DAERAH



IQBAL RAMADI PAYANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR BAGAN		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH**	14
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	14
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	43
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	46
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Setda	56
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**	57
	3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	57
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah	58
	3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	61
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH**	72
BAB V	**PENUTUP**	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 kabupaten tanah datar	16
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja pelayanan sekretariat daerah kabupaten tanah datar	44
Tabel 2.3	Review terhadap rkpd tahun 2025 kabupaten tanah datar	50
Tabel 2.4	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 kabupaten tanah datar	56
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran sekretariat daerah	60
Tabel 3.2	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 kabupaten tanah datar	63
Tabel 4.1	Rencana pengadaan sekretariat daerah tahun 2025	91

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Alir Hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD dan RENCANA KERJA OPD	4
Bagan 3.1	Alur Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2, ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), maupun perencanaan tahunan (RENJA) sehingga perencanaan tahunan perangkat daerah harus mempedomani perencanaan di atasnya yaitu RPJP dan RPJMD.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Rankhir Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang disusun pada tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Rankhir Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju. Kebijakan Program dan Kegiatan dituangkan dalam Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dengan substansinya menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah.

Penyusunan Rankhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan Renja

   Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

   Penyusunan Rankhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan Akhir yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Akhir RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan rancangan Akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

   Penyusunan Rancangan Rankhir Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

   a. Pengolahan data dan informasi;
   b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
   c. Mereviw hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
   d. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
   e. Menelaah rancangan Akhir RKPD;
   f. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah;
   g. Menelaah usulan program dan kegiatan ;
   h. Perumusan kegiatan prioritas;
   i. Penyajian Akhir dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.

3. Pelaksanaan Desk

   Desk setiap Bagian merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi Bagian untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan desk adalah:

a. Memfasilitasi persoalan Daerah yang dihadapi oleh Perangkat Daerah;
b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Penetapan Renja

Penetapan renja merupakan proses verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

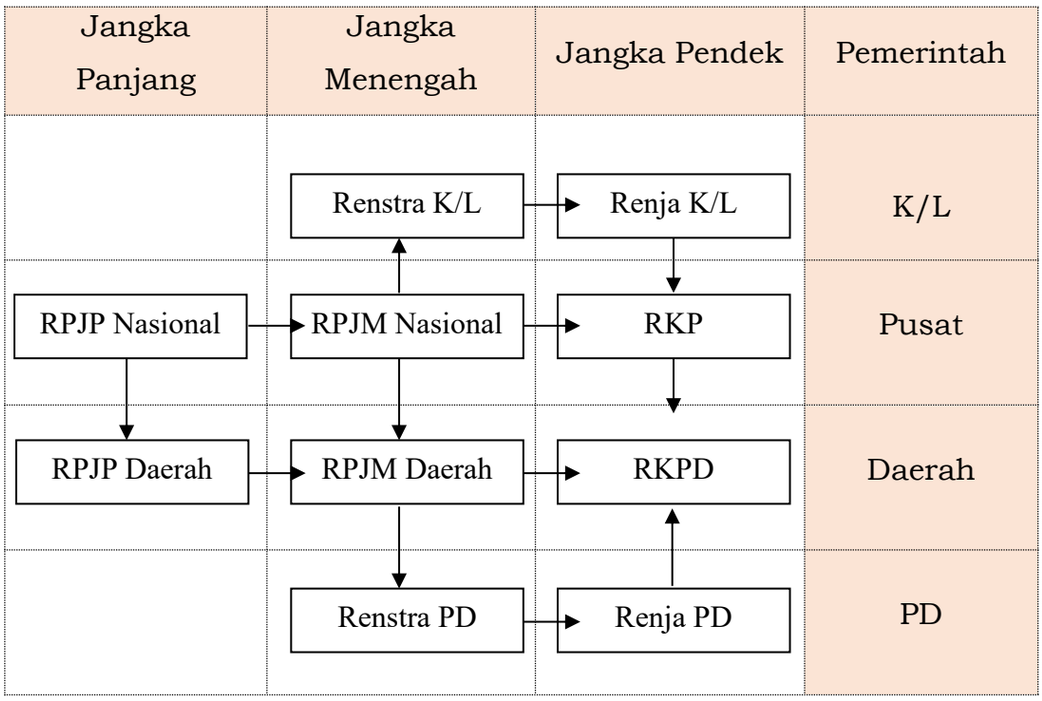
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rancangan Akhir Renja yang telah disampaikan sebelumnya yang merupakan bahan untuk desk dengan Bagian-Bagian. Selain itu rancangan Akhir renja ini juga akan berpedoman pada rancangan Akhir RKPD untuk mensinkronkan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan Akhir RKPD. Kemudian rancangan Akhir Renja akan menjadi Renja yang berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

Selain itu penyusunan Renja juga tidak terlepas dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun sebelumnya. Khusus kegiatan yang berada pada Sekretariat Daerah tidak banyak dipengaruhi oleh Renja K/L terkait, dan Renja Provinsi, hanya saja informasi tentang rencana di provinsi harus dipertimbangkan untuk mengantisipasi kegiatan provinsi ataupun pemerintah pusat yang melibatkan kabupaten. Yang terpenting

dalam penyusunan Rankhir Renja Sekretariat Daerah adalah hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dikaitkan tingkat capaian renstra sampai tahun berjalan dan hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah dalam tahun berjalan sehingga pencapaian target akhir renstra akan dapat dicapai.

Terakhir hasil penyusunan Rankhir Renja ini ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, akan menjadi bahan untuk perumusan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RENJA Perangkat Daerah :



Bagan 1.1 Alir Hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA PERANGKAT DAERAH dan RENJA PERANGKAT DAERAH

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana elah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntasilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Kualifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
26. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah;
35. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
36. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
37. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rankhir Rencana Kerja 2025 adalah terjaminnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah dalam turut mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2025 ini diantaranya adalah :

1. Menyinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah

sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025;

2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Sekretariat Daerah dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris Daerah berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rankhir Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Rankhir Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Rankhir Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD, Rankhir Renstra Sekretariat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rankhir Renja Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rankhir Renja Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Sekretariat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu pada bagian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian mengenai yaitu :

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai yaitu :

1. Proses yang membandingkan rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut;
3. Review terhadap rancangan Akhir RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bagian ini berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang masuk dalam usulan Bagian-Bagian.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menguraikan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dan usulan program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini dijabarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah yaitu berisikan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah beserta usulan pendanaan setiap kegiatan dan perkiraan maju untuk tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini dijabarkan Rencana Kerja dan Pengadaan Sekretariat Daerah yaitu berisikan program dan kegiatan yang terkait pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah beserta usulan pendanaan setiap kegiatan dan perkiraan maju untuk tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagai salah satu instansi publik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan urusan dan program pemerintahan yang dilimpahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar telah diselenggarakan belanja menurut kegiatan yang dijabarkan dalam bentuk sub kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu adanya tahap-tahap dalam perencanaan rencana kerja (renja) Sekretariat Daerah. Salah satunya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya (n-2) yaitu tahun 2023. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan, dan hasil rencana program/kegiatan. Untuk dapat mengevaluasi secara komprehensif maka dalam penyusunan Rankhir Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 harus memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang telah, sedang dan akan dicapai;
c. Sasaran dan prioritas strategis untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan untuk melaksanakannya;
e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
f. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 yang telah direvisi, ada 2 tujuan dan 4 sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Pada Rencana Kinerja Tahun 2023 terdapat 3 program dan 19 kegiatan dan mayoritas kegiatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Evaluasi renja dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah 2023 dan pencapaian Renstra s.d. tahun 2023, dan Renja tahun berjalan 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN TANAH DATAR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Petangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**1**				SEKRETARIAT DAERAH									
4	**1**	**1**			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
4	1	1	**2**	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	18 Dokumen	150	12 Dokumen	10 dokumen	85%
4	1	1	**2**	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	114	7 Laporan	3 Laporan	71%
4	1	1	**2**	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65 Laporan	5 Laporan	13 Laporan	16 Laporan	123	13 Laporan	6 Laporan	42%

4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
4	1	1	**2**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	130 Orang/ Bulan	114 Orang/Bulan	88	130 Orang/Bulan	15 Orang/Bula	57.14%
4	1	1	**2**	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41452 Dokumen	0	10363 Dokumen	5255 Dokumen	51	10363 Dokumen	4100 Dok	39.60%
4	1	1	**2**	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2 dokumen	2 laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	1 Laporan	45%
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
4	1	1	**2**	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN	100	20 ASN	0	5%
4	1	1	**2**	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	117 ASN	117 ASN	0	6 Paket	0	6 Paket	2 Paket	55%

4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	35%
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	62%
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	15%
4	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	1 Paket	30%
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	18 Jenis	2 Paket	1 Paket	50	2 Paket	1 Paket	23%
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100	50 dokumen	50 Dokumen	44%
4	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1199 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	73%
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	5 Laporan	375 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	65%

4	**1**	**1**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**									
4	1	1	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 laporan	0	2 Laporan	1 Laporan	50	2 Laporan	1 Laporan	24%
4	**1**	**1**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
4	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	1 Unit	1 Unit	106 Unit	10600	0	0	81%
4	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 unit	2 unit	106 Unit	5300	0		
4	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Pakte	2 Unit	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	0	22%
4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Paket	8 Unit	9 Paket	9 Paket	100	9 Paket	9 Unit	53%
4	1	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Baru Kantor Bupati	1 Unit	0	0	0	0	2 Unit		

4	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	55%
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 :aporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	47%
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	54%
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	54%
4	**1**	**1**	2		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	500 Unit	3 Unit	106 Unit	106 Unit	100	100 Unit	100 Unit	55%
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	500 Unit	90 Unit	106 Unit	106 Unit	100	100 Unit	100 Unit	29%
4	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	100	3 Paket	3 unit	65%
4	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 unit	11%

4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**									
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/Bulan	100	2 Orang/Bulan	2 Orang/bulan	50%
4	1	1	2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	30 Paket	2 Paket	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	2 Paket	55%
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Orang/Bulan	2 Orang	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	100	8 Orang/Bulan		5%
4	1	1	2	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/Bulan	100	2 Orang/Bulan	2 Orang/bulan	40%

4	**1**	**1**	**2**		**Penataan Organisasi**									
4	1	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	39 Dokumen	10 Dokumen	16 Dokumen (Perda (1), Perbup (14) dan Anjab (1)	320	10 Dokumen	5 Dokumen	45%
4	1	1	2	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	690 Laporan	114 laporan	138 Laporan	1 Laporan	1	138 Laporan	0	65%
4	1	1	2	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	37%
4	1	1	2	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	690 Laporan	137 Dokumen	138 Laporan	3 Dokumen	2	138 Dokumen	0	55%
4	1	1	2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	80%

4	**1**	**1**	**2**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**									
4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3750 Laporan	750 Kali	750 Laporan	750 Laporan	100	750 Laporan	370 Laporan	50%
4	1	1	2	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5000 Laporan	1000 Kali	1000 Laporan	1000 Laporan	100	1000 Laporan	320 Laporan	40%
4	1	1	2	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5000 Laporan	1000 kegiatan	1000 Laporan	1000 Laporan	100	1000 Laporan	512 Laporan	55%
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**									
4	**1**	**2**	2		**Administrasi Tata Pemerintahan**									
4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	30 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	100	6 Dokumen	3 Dokumen	55%
4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	35 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	71	7 Dokumen	4 Dokumen	55%
4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	95%

4	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**									
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	200	2 Dokumen	0	55%
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	2 Dokumen	0	46%
4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	2 Dokumen	0	49%

4	**1**	**2**	**2,03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**									
4	1	2	2,03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	125 Produk Hukum	3 ranperda	5 Produk Hukum	60 Produk Hukum	1200	25 Produk Hukum	3 perda/ perbu	56%
4	1	2	2,03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	2 pidana dan 3 non litigasi	500	1 Perkara	2 Kasus	50%
4	1	2	2,03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen dan 5 JDIH	5 Dokumen dan 5 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	100	1 Dokumen dan 1 JDIH	0	55%
4	**1**	**2**	**2,04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**									
4	1	2	2,04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	125 Dokumen	16 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen	80	25 Dokumen	37 Dokumen	60%
4	1	2	2,04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	50 Laporan	5 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	40	10 Dokumen	0	0%

4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**									
4	**1**	**3**	2		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**									
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	100	1 Dokumen	50 Laporan	50%
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	3 Laporan	60%
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	50 Dokumen	50%
4	**1**	**3**	2		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**									
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	50%
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	1 Laporan	40%
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70 Laporan	14 Bulan	14 Laporan	12 Laporan	86	14 Laporan	3 Laporan	45%

4	**1**	**3**	2		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**									
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	30 Dokumen	60	50 Dokumen	50 Dokumen	65%
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Dokumen	6 Dokumen	45%
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	245 Orang	50 Orang	49 Orang	49 Orang	100	49 Orang	49 Orang	83%
4	**1**	**3**	2		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**									
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	50 Dokumen	50%
4	1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10	2 Dokumen	50 Dokumen	50%

Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja kegiatan Renstra sampai dengan tahun berjalan (2023) adalah 69%. Permasalahan mendasar dalam penentuan indikator capain kegiatan akan sangat berpengaruh kepada indikator hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dimaksud yang pada akhirnya akan memengaruhi hasil capaian program.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja secara optimal adalah :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dalam menetapkan target capaian secara tepat untuk masing-masing kegiatan dan merealisasikan target-target tersebut;
2. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi untuk pencapaian target yang ditetapkan;
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan baik secara fisik keuangan maupun administrasi;
4. Refocusing anggaran yang terjadi sebanyak 2 kali dalam Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan operasional kegiatan menjadi terganggu dan dibatalkan.

Adapun capaian program/kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi terhadap akuntabilitas program/kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

   Program ini memiliki 10 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

   A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Output untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 12 Dokumen dengan realisasi sebanyak 18 Dokumen atau 150%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Output untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 7 Laporan dengan realisasi sebanyak 8 Laporan atau 114%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 100. Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 130 Orang/Bulan dengan realisasi sebesar 114 Orang/Bulan atau 88%. Keluaran sub kegiatan ini jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 2 Laporan dengan 2 Laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari

kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 20 ASN dengan realisasi sebesar 20 ASN atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 8 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 paket dengan realisasi 1 paket atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 paket dengan realisasi sebanyak 1 paket atau 100%. Keluaran

sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 paket dengan realisasi sebanyak 1 paket atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 2 paket dengan realisasi sebanyak 2 paket atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 2 paket dengan realisasi sebanyak 1 paket atau 50%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 50 dokumen dengan realisasi sebanyak 50 paket atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 laporan dengan realisasi sebanyak 1 laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 laporan dengan realisasi 1 laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target

untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan, jumlah paket mebel yang disediakan, dan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 100%. Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pengadaan Mebel

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 5 paket dengan realisasi sebanyak 5 paket atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 9 paket dengan realisasi sebanyak 9 paket atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 Laporan dengan realisasi sebanyak 1 Laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 Laporan dengan realisasi 1 Laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 Laporan dengan realisasi sebanyak 1 Laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 106 unit dengan realisasi fisik sebanyak 106 unit atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 106 unit dengan realisasi 106 unit atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan

perizinannya, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 3 unit dengan realisasi 3 Jenis atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 10 Unit dengan realisasi sebanyak 10 unit atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

H. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan, jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 2 orang/bulan dengan realisasi sebanyak 2 orang/bulan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 6 paket dengan realisasi sebanyak 6 paket atau 100%. Keluaran

sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan.

c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 8 orang/bulan dengan realisasi sebanyak 8 orang/bulan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah.

d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 2 orang/bulan dengan realisasi sebanyak 2 orang/bulan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

I. Penataan Organisasi

Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, dan jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 10 Dokumen dengan realisasi sebanyak 32 dokumen atau 320%. Keluaran sub kegiatan ini jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 138 Laporan dengan realisasi sebanyak 1 Laporan atau 1%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.

c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 138 laporan dengan realisasi 3 dokumen atau 2%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 3 dokumen dengan realisasi 3 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

J. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan, dan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Keprotokolan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 750 laporan dengan realisasi sebanyak 750 laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan.

b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1000 laporan dengan realisasi fisik sebanyak 1000 laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan.

c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1000 laporan dengan realisasi sebanyak 1000 laporan atau 1000%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan.

2. Program Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan, jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan, dan jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Penataan Administrasi Pemerintahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 6 dokumen dengan 6 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan.

b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 7 dokumen dengan realisasi sebanyak 5 dokumen atau 71%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 4 dokumen dengan realisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

B. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target

untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kb, dan jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen atau 200%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual.

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kb.

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga,

pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas.

C. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah produk hukum daerah yang disusun, jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum, dan jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 5 produk hukum dengan realisasi sebanyak 60 produk hukum atau 1200%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah produk hukum daerah yang disusun.

b. Fasilitasi Bantuan Hukum

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 perkara dengan realisasi sebanyak 2 pidana dan 3 non litigasi atau 500%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dan 1 JDIH dengan realisasi sebanyak 1 dokumen dan 1 JDIH atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi.

D. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri, dan jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 25 dokumen dengan realisasi sebanyak 20 dokumen atau 80%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri.

b. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 10 laporan dengan realisasi sebanyak 4 laporan atau 40%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian, dan jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 5 laporan dengan realisasi sebanyak 5 laporan atau 100%.

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian.

c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

B. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah, jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah.

b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 4 laporan dengan realisasi sebanyak 4 laporan atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 14 laporan dengan realisasi sebanyak 12 laporan atau 86%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

C. Pengelolaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa, jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik, dan jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 50 dokumen dengan realisasi sebanyak 30 dokumen atau 60%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 12 laporan dengan realisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik.

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 49 orang dengan realisasi sebanyak 9 orang atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

D. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2023 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja, dan jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2023 ssebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down,* yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan.* Dengan perubahan pola ini akan membawa dampak bahwa pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang benar-benar terjaring dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengkajian terhadap capaian indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sangat tergantung kepada:

1. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan.
2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat.

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANAH DATAR

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI/ CAPAIAN TAHUN KE			PROYEKSI			CATATAN ANALISIS	
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	18 Dokumen	8 Dokumen	15 Dokumen	18 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	18 Dokumen		
2	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	8 Laporan		
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	4 Laporan	13 Laporan	16 Laporan	5 Laporan	0%	16 Laporan	5 Laporan	13 Laporan	16 Laporan		
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			117 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	130 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	125 Orang/ Bulan	117 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	125 Orang/ Bulan	130 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan		
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	10 Dokumen	10363 Dokumen	5240 Dokumen	10 Dokumen	0	5255 Dokumen	10 Dokumen	10363 Dokumen	5240 Dokumen		
6	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
7	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan		
8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			35 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN	35 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN		
9	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya yang tersedia			117 Helai	0	0	6 Paket	0	117 Helai	6 Paket	0	0	6 Paket		
10	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket		

11	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
12	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Paket%	1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket		
13	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		
14	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	1 Tahun	2 Paket	1 Paket	18 Jenis	2 Paket	1 Paket	18 Jenis	2 Paket	1 Paket		
15	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			50 Dokumen	50 Dokumen	50 dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 dokumen	50 Dokumen		
16	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			3895 Laporan	1199 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1199 Laporan	3895 Laporan	1 Laporan	1199 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
17	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1050 Laporan	375 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	375 Laporan	1050 Laporan	1 Laporan	375 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
18	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			14 Unit	1 Unit	0	3 Unit	3 Unit	13 Unit	3 Unit	3 Unit	0	3 Unit		
19	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	2 Unit	5 Paket	5 Paket	2 Unit	1 Paket	5 Paket	2 Unit	5 Paket	5 Paket		
20	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16 Paket	1 Tahun	9 Paket	9 Paket	1 Tahun	16 Paket	9 Paket	1 Tahun	9 Paket	9 Paket		
21	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	2 Unit	0	1 Paket	0	0	1 Paket	2 Unit	0%		
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			94 Unit	4 Unit	100 Unit	106 Unit	3 Unit	94 Unit	106 Unit	3 Unit	100 Unit	106 Unit		
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			94 Unit	97 Unit	100 Unit	106 Unit	90 Unit	94 Unit	106 Unit	90 Unit	100 Unit	106 Unit		
28	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	3 Paket	3 Paket	3 Jenis		
29	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit		
30	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	Menyesuaikan kebutuhan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan		
31	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			6 Paket	2 Paket	6 Paket	6 Paket	2 Paket	6 Paket	6 Paket	2 Paket	6 Paket	6 Paket		
32	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	2 Orang	2 Orang/ Bulan	8 Orang/Bulan	2 Orang	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan		
33	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan		
34	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			39 Dokumen	39 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	39 Dokumen	39 Dokumen	16 Dokumen (Perda (1), Perbup (14) dan Anjab (1)	39 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen		
35	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			114 laporan	114 laporan	138 Laporan	1 Laporan	114 laporan	137 Laporan	1 Laporan	114 laporan	138 Laporan	1 Laporan		
36	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	137 Laporan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
37	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			137 Dokumen	137 Dokumen	138 Dokumen	3 Dokumen	137 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	137 Dokumen	138 Dokumen	3 Dokumen		
38	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		
39	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			750 Kali	750 Kali	750 Laporan	1 Laporan	750 Kali	750 Laporan	750 Laporan	750 Kali	750 Laporan	1 Laporan		
40	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1000 Kali	1000 Kali	1000 Laporan	1 Laporan	1000 Kali	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Kali	1000 Laporan	1 Laporan		

41	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1000 kegiatan	1000 kegiatan	1000 Laporan	1 Laporan	1000 kegiatan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 kegiatan	1000 Laporan	1 Laporan		
42	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			7 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Laporan	5 Dokumen	7 Dokumen	6 Laporan	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Laporan		
43	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen		
44	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
45	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Dokumen	9 Dokumen	2 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan		
46	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan		
47	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan		
48	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			3 ranperda	3 ranperda	25 Produk Hukum	30 Produk Hukum	3 ranperda	10 Perda	60 Produk Hukum	3 ranperda	25 Produk Hukum	30 Produk Hukum		
49	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			5 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	5 Perkara	2 pidana dan 3 non litigasi	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara		
50	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah serta 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH		
51	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			21 Dokumen	16 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen	16 Dokumen	22 Dokumen	20 Dokumen	16 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen		
52	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			5 Laporan	5 Laporan	10 Dokumen	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	10 Dokumen	4 Laporan		
53	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
54	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		
55	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
56	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
57	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan		
58	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			14 Laporan	14 Bulan	14 Laporan	12 Laporan	14 Bulan	14 Laporan	12 Laporan	14 Bulan	14 Laporan	12 Laporan		
59	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	30 Dokumen	50 Dokumen	57 Dokumen	30 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	30 Dokumen		
60	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen		
61	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			50 Orang	50 Orang	49 Orang	49 Orang	50 Orang	50 Orang	49 Orang	50 Orang	49 Orang	49 Orang		
62	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
63	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dalam penyelenggranaan pemerintahan daerah, sangat

ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif.

Isu-isu penting yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah :

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :
   a. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya mampu memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja;
   b. Alokasi sarana dan prasarana pada setiap bagian masih belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal untuk bekerja;
   c. Kurangnya penerapan bimbingan teknis aparatur dalam meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, peningkatan disiplin kerja;
   d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap bagian belum tertata dalam suatu standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu, efektif dan efisien;
   e. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan DIBALE (Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Daerah) belum berjalan secara proporsional;
   f. Pola peningkatan kerja aparatur belum berorientasikan pada kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
   g. Refocusing anggaran yang terjadi beberapa kali sehingga menyebabkan beberapa *event* dibatalkan.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional dari permasalahan dan hambatan di atas adalah lambatnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan akibat kurangnya SDM yang terlatih, sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang kurang memadai dan sebaran yang kurang merataserta mekanisme dan pola kerja yang tidak berdasarkan SOP membuat tujuan akhir pekerjaan yang bermuara pada pencapaian pelayanan kinerja Sekretariat Daerah menjadi terhambat. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang memiliki limit waktu tidak lama ini akan berdampak terhadap lambatnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan perkembangan Daerah.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah adalah :
   a. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas/Badan/Kantor dan Lembaga teknis belum optimal dan proporsional;
   b. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasi pada peningkatan kerja;
   c. Menyesuaikan jumlah dan kompetensi aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
   d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap bagian tertata dalam suatu standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu, efektif dan efisien;
   e. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
4. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah adalah :
   a. SIREMON LAKON (Sistem Informasi Registrasi Monitoring dan Laporan Kontrak)

      Aplikasi SIREMON LAKON digunakan untuk pendaftaran registrasi secara elektronik untuk kontrak kerja antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan pihak ketiga sebagai persyaratan pembayaran di BPKD dan untuk inventarisasi seluruh kegiatan yang digunakan untuk pengendalian kegiatan program pembangunan.
   b. SIJABRI Tanah Datar (Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau Tanah Datar)

      Aplikasi SIJABRI Tanah Datar merupakan aplikasi yang diadopsi dari SIJABRI Provinsi Riau. Aplikasi ini digunakan untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja secara elektronik agar menjadi informasi jabatan yang penting untuk manajemen kepegawaian.
   c. SILACAK (Sistem Informasi Pelacakan SPJ)

      Inovasi SILACAK untuk Tahun 2025 merupakan inovasi pembaharuan SILACAK Tahun 2023 yang dikembangkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah dan akan

direncanakan untuk diaplikasikan dengan Perangkat Daerah lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Pada rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang terdistribusi ke dalam 10 (sepuluh) bagian yang ada di Sekretariat Daerah, sebagaimana pada tahun 2023 juga terdapat 3 (tiga) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, namun dengan beberapa perubahan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan ataupun penyesuaian.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN TANAH DATAR

KODE REKENING	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	
4 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**42.507.831.070**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**81.116.472.667**	
4 1 1 2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**137.831.117**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**213.831.117**	
4 1 1 2 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	78.858.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	98.858.600	
4 1 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	38.523.602	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	38.523.602	
4 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	20.448.915	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	76.448.915	
4 1 1 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**14.440.392.895**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**14.004.386.174**	
4 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/Bulan	14.420.402.987	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/Bulan	13.886.396.266	
4 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5240 Dokumen	8.053.708	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5240 Dokumen	73.053.708	
4 1 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	11.936.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	44.936.200	
4 1 1 2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**85.240.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**85.240.000**	
4 1 1 2 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 ASN	85.240.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		85.240.000	

4	1	1	2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**5.590.113.631**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**7.295.113.631**	
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.997.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.997.000	
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	232.925.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	282.925.450	
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	320.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	
4	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	36.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.500.000	
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	186.550.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	206.550.500	
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	190.760.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	190.760.000	
1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.134.159.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.634.159.500		
1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.399.221.181	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.499.221.181		
1	1	3		**Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**100%**	**37.492.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**100%**	**50.492.000**	
1	1	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	37.492.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.492.000		
1	1	2		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**4.195.060.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**36.949.050.000**	
1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	2.529.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	5.780.000.000		
1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	965.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-		

4	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	481.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	781.000.000	
4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Paket	220.060.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Paket	588.750.000	
4	1	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0%	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0%	29.799.300.000	
4	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.803.440.151**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.636.491.500**	
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.479.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.479.500	
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.191.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.255.000.000	
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	656.012.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.156.012.000	
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	935.948.651	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.210.000.000	
4	**1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**8.710.707.905**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**9.319.707.905**	
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	106 Unit	4.241.226.113	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	106 Unit	4.541.226.113	
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	94.988.592	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	174.988.592	
4	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	363.000.000	
4	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.174.493.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.240.493.200	

4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**4.590.365.583**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**5.671.246.752**	
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.277.206.290	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.065.971.220	
4	1	1	2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	450.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	650.000.000	
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan	40.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan	40.000.000	
4	1	1	2	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.823.159.293	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	3.915.275.532	

1	**1**	**2**			**Penataan Organisasi**		**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**100%**	**242.672.777**	**Penataan Organisasi**		**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**100%**	**1.712.913.588**	
1	1	2	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	30.642.743	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	241.931.892,00	
1	1	2	2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	138.320.545	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	545.331.696	
1	1	2	3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	33.788.357	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	363.000.000,00	
1	1	2	4		Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	15.021.590	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	381.150.000	
1	1	2	5		Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	24.899.542	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	181.500.000	

4	**1**	**1**	**2**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**1.674.514.511**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**2.178.000.000**	
4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	525.680.557	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	605.000.000,00	
4	1	1	2	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	618.561.466	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	726.000.000	
4	1	1	2	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	530.272.488	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	847.000.000,00	

4	**1**	**2**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**6.277.524.703**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**9.339.486.725**	
4	**1**	**2**	**2**			**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**100%**	**1.077.722.888**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**100%**	**1.609.179.000**	
4	**1**	**2**	**2**	**1**	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Laporan	20.988.126	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Laporan	133.100.000,00	
4	**1**	**2**	**2**	**2**	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	41.294.507	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	512.435.000	
4	**1**	**2**	**2**	**3**	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	1.015.440.255	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	963.644.000	
4	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**4.692.950.775**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**6.735.212.725**	
4	**1**	**2**	**2**	**1**	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Laporan	4.677.950.775	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Laporan	6.615.212.725	
4	**1**	**2**	**2**	**2**	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Laporan	70.000.000	
4	**1**	**2**	**2**	**3**	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Laporan	50.000.000	
4	**1**	**2**	**2**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100%**	**491.663.040**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100%**	**905.200.000**	
4	**1**	**2**	**2**	**1**	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	30 Produk Hukum	23.200.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	30 Produk Hukum	300.000.000,00	
4	**1**	**2**	**2**	**2**	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Perkara	395.200.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Perkara	405.200.000,00	
4	**1**	**2**	**2**	**3**	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen dan 1 JDIH	73.263.040	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen dan 1 JDIH	200.000.000	
4	**1**	**2**	**2**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100%**	**15.188.000**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100%**	**89.895.000**	
4	**1**	**2**	**2**	**1**	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	13.188.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	59.895.000	
4	**1**	**2**	**2**	**3**	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	2.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	30.000.000	

4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**510.765.886**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**1.588.589.566**	
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100%**	**144.904.336**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100%**	**595.236.051**	
4	**1**	**3**	**2**	**1**	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	45.941.836	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	129.051.581	
4	**1**	**3**	**2**	**2**	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	78.520.224	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	291.944.470	
4	**1**	**3**	**2**	**3**	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	20.442.276	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	174.240.000	
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**126.315.754**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**314.546.920**	
4	**1**	**3**	**2**	**1**	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	43.511.764	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	116.901.220	
4	**1**	**3**	**2**	**2**	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9 Laporan	36.489.780	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9 Laporan	98.149.560,00	
4	**1**	**3**	**2**	**3**	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	46.314.210	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	99.496.140	
4	**1**	**3**	**2**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**179.149.816**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**473.417.795**	
4	**1**	**3**	**2**	**1**	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	88.068.494	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	237.193.672	
4	**1**	**3**	**2**	**2**	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	61.331.780	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	158.001.302,00	
4	**1**	**3**	**2**	**3**	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	49 Orang	29.749.542	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	49 Orang	78.222.821,00	
4	**1**	**3**	**2**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100%**	**60.395.980**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100%**	**205.388.800**	
4	**1**	**3**	**2**	**1**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	22.186.700	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	115.000.000,00	
4	**1**	**3**	**2**	**2**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	38.209.280	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	90.388.800	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan kegiatan secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (*bottom-up planning*) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme desk Bagian-Bagian.

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN TANAH DATAR

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebutuhan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemeratan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan prioritas RKPD Provinsi Tahun 202 adalah sebagai berikut :

1. Percepatan penurunan prevalensi stunting;
2. Meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja;
3. Pembangunan yang inklusif;
4. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian dengan tetap mengalokasikan sebesar 10% dari total APBD;
5. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung Nasional dan tetap meningkatkan produksi jagung;
6. Mencetak 100 ribu milenial enterprenuer dan woman enterprenuer serta pelaku ekonomi kreatif;
7. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital;
8. Membangun industri pariwisata bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Meningkatkan konektifitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang pada kawasan sentra pertanian, industri, dan pariwisata.

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di

Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawali dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD adalah sudah disebutkan pada poin-poin diatas.

Dalam rangka pencapaian visi Kepala Daerah dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka misi Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri, dan UMKM;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"***. Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

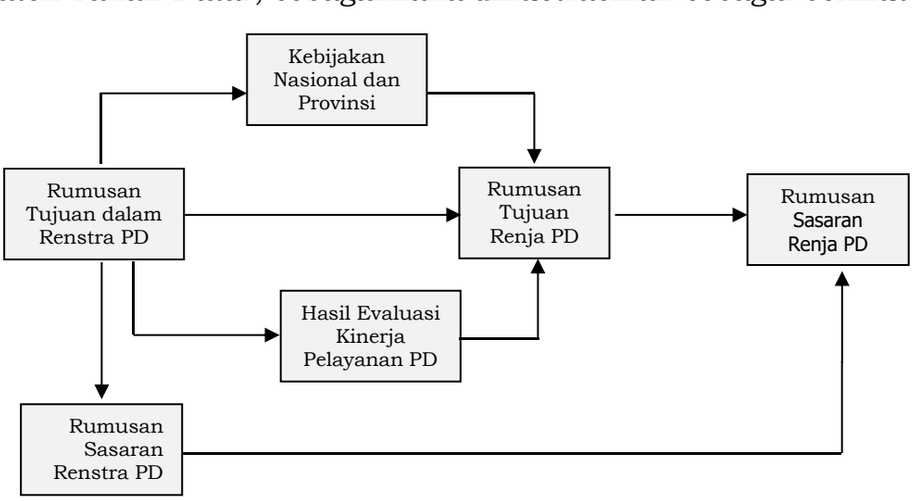
Koordinasi lintas sektor dalam menciptakan sinergitas dan integritas pembangunan di Kabupaten Tanah Datar menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Makna penataan kebijakan dalam visi tersebut memberi implikasi bahwa Sekretariat Daerah menjadi *leading/core unit* dalam proses penyusunan dan pengaturan kebijakan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupeten Tanah Datar, sedangkan maksud koordinasi mengandung pengertian

Sekretariat Daerah menjadi unit yang menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang harus terus diperkuat guna percepatan tujuan pembangunan daerah.

Bagi Sekretariat Daerah hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (***good governance***) yang menerapkan manajemen berbasis kinerja pada sektor publik yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat yang lebih maju sejahtera dan berkeadilan yang dilandasi ABS-SBK. Dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja PD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut adalah RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut :



Bagan 3.1 Alur Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Renja didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Tujuan dan sasaran satu dengan lainnya saling berhubungan menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang akan dicapai, yang tertera pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1. Nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	10,899,359,857.00	11,113,072,796.00	11,326,785,734.00	11,540,498,673.00	11,754,211,611.00	11,967,924,549.00
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	1. Nilai Evaluasi SAKIP	66.00	66.50	66.70	71.00	71.20	71.50
			2. Nilai BPPD	3.0500	3.1626	3.1653	3.1680	3.1707	3.1734
			3. Pengendalian inflasi daerah dengan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif)	85%	85%	90%	100%	100%	100%
			4. Pemenuhan belanja Produk Dalam Negeri	NA	NA	76.78%	76.78%	76.78%	76.78%
			5. Pengendalian dan pengelolaan administrasi kegiatan perangkat daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	88.39	88.39	88.59	88.59	89.00	89.00
		3. Meningkatnya kualitas kebijakan	1. IRH (Indeks Reformasi Hukum)	NA	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00
		4. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	1. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*). Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang akan diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis.

Program merupakan penjabaran lebih rinci tentang apa yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi/kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hubungannya dengan kegiatan, program merupakan kumpulan dari satu atau lebih kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Seketariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-

2026 agar mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapiran masyarakat.

Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah direvisi yaitu 2 tujuan dan 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada Rencana Kinerja Tahun 2025 terdapat 3 program dan 19 kegiatan dan mayoritas kegiatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 tahun ke depan yaitu periode 2025 akan disajikan dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN TANAH DATAR

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	4	6	7	8		9	12	13
	SEKRETARIAT DAERAH				**49.296.121.659**				**103.224.869.221**
4 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**42.507.831.070**	**DAU**		**100%**	**75.429.005.000**
4 1 1 2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**137.831.117**	**DAU**		**100%**	**372.680.000**
4 1 1 2 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Datar	18 Dokumen	78.858.600	DAU		18 Dokumen	159.720.000
4 1 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tanah Datar	8 Laporan	38.523.602	DAU		8 Laporan	46.585.000
4 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tanah Datar	16 Laporan	20.448.915	DAU		16 Laporan	166.375.000

4	1	1	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**14.440.392.895**	DAU		**100%**	**18.853.615.000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tanah Datar	114 Orang/Bulan	14.420.402.987	DAU		114 Orang/Bulan	18.634.000.000,00
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Tanah Datar	5240 Dokumen	8.053.708	DAU		5240 Dokumen	93.170.000,00
4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tanah Datar	2 Laporan	11.936.200	DAU		2 Laporan	126.445.000,00
4	1	1	2		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**85.240.000**	**DAU**		**100%**	**399.300.000**
4	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Tanah Datar	20 ASN	85.240.000	DAU		20 ASN	399.300.000,00
4	1	1	2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**5.590.113.631**	**DAU**		**100%**	**7.060.955.000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	1 Paket	89.997.000	DAU		1 Paket	93.170.000,00
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	1 Paket	232.925.450	DAU		1 Paket	133.100.000,00
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	1 Paket	320.000.000	DAU		1 Paket	232.925.000,00

4	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	2 Paket	36.500.000	DAU		2 Paket	39.930.000,00
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	1 Paket	186.550.500	DAU		1 Paket	133.100.000,00
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	50 Dokumen	190.760.000	DAU		50 Dokumen	133.100.000,00
4	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	3.134.159.500	DAU		1 Laporan	3.633.630.000,00
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	1.399.221.181	DAU		1 Laporan	2.662.000.000,00
4	1	1	3		**Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**100%**	**37.492.000**	**DAU**		**100%**	**102.850.000**
4	1	1	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	37.492.000	DAU		1 Laporan	102.850.000,00
4	1	1	2		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**4.195.060.500**	**DAU**		**100%**	**32.740.810.000**
4	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	3 Unit	2.529.000.000	DAU		3 Unit	798.600.000,00
4	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Kab.Tanah Datar	2 Unit	965.000.000,00	DAU			878.460.000,00
4	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	5 Paket	481.000.000	DAU		5 Paket	199.650.000,00
4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	9 Paket	220.060.500	DAU		9 Paket	1.064.800.000,00
4	1	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	0%	-	DAU		2 Unit	29.799.300.000,00

4	1	1	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**2.803.440.151**	**DAU**		**100%**	**3.580.390.000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	20.479.500	DAU		1 Laporan	53.240.000,00
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	1.191.000.000	DAU		1 Laporan	1.730.300.000,00
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	656.012.000	DAU		1 Laporan	465.850.000,00
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	935.948.651	DAU		1 Laporan	1.331.000.000,00
4	1	1	2		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**8.710.707.905**	**DAU**		**100%**	**4.498.780.000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Tanah Datar	106 Unit	4.241.226.113	DAU		106 Unit	3.194.400.000,00
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Tanah Datar	106 Unit	94.988.592	DAU		106 Unit	106.480.000,00
4	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Tanah Datar	3 Jenis	200.000.000	DAU		3 Jenis	399.300.000,00
4	1	1	2	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab.Tanah Datar	10 Unit	4.174.493.200	DAU		10 Unit	798.600.000,00

4	1	1	2		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**100%**	**4.590.365.583**	**DAU**		**100%**	**3.926.450.000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Datar	2 Orang/Bulan	1.277.206.290	DAU		2 Orang/Bulan	266.200.000,00
4	1	1	2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	6 Paket	450.000.000	DAU		6 Paket	465.850.000,00
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Datar	8 Orang/Bulan	40.000.000	DAU		8 Orang/Bulan	66.550.000,00
4	1	1	2	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Datar	2 Orang/Bulan	2.823.159.293	DAU		2 Orang/Bulan	3.127.850.000,00
4	1	1	2		**Penataan Organisasi**	**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**		**100%**	**242.672.777**	**DAU**		**100%**	**1.497.375.000**
4	1	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Tanah Datar	10 Dokumen	30.642.743	DAU		10 Dokumen	299.475.000,00
4	1	1	2	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	138.320.545	DAU		1 Laporan	179.685.000,00
4	1	1	2	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	33.788.357	DAU		1 Dokumen	399.300.000,00
4	1	1	2	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Tanah Datar	3 Dokumen	15.021.590	DAU		3 Dokumen	419.265.000,00
4	1	1	2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Datar	3 Dokumen	24.899.542	DAU		3 Dokumen	199.650.000,00

4	1	1	2		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**100%**	**1.674.514.511**	**DAU**		**100%**	**2.395.800.000**
4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	525.680.557	DAU		1 Laporan	665.500.000,00
4	1	1	2	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	618.561.466	DAU		1 Laporan	798.600.000,00
4	1	1	2	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	530.272.488	DAU		1 Laporan	931.700.000,00
4	1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**100%**	**6.277.524.703**	**DAU**		**100%**	**25.687.560.221**
4	1	2	2		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**		**100%**	**1.077.722.888**	**DAU**		**100%**	**1.770.096.900**
4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Tanah Datar	6 Laporan	20.988.126	DAU		6 Laporan	146.410.000,00
4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Tanah Datar	6 Dokumen	41.294.507	DAU		6 Dokumen	563.678.500,00
4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Tanah Datar	4 Dokumen	1.015.440.255	DAU		4 Dokumen	1.060.008.400,00

4	1	2	2		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**100%**	**4.692.950.775**	**DAU**		**100%**	**22.687.619.321**
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Tanah Datar	2 Laporan	4.677.950.775	DAU		2 Laporan	22.328.249.320,52
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	199.650.000,00
4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	159.720.000,00
4	1	2	2		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**100%**	**491.663.040**	**DAU**		**100%**	**1.141.998.000**
4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab.Tanah Datar	30 Produk Hukum	23.200.000	DAU		30 Produk Hukum	234.256.000,00
4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Tanah Datar	1 Perkara	395.200.000	DAU		1 Perkara	673.486.000,00
4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen dan 1 JDIH	73.263.040	DAU		1 Dokumen dan 1 JDIH	234.256.000,00

4	1	2	2		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**100%**	**15.188.000**	**DAU**		**100%**	**87.846.000**
4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Tanah Datar	20 Dokumen	13.188.000	DAU		20 Dokumen	65.884.500,00
4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Tanah Datar	4 Laporan	2.000.000	DAU		4 Laporan	21.961.500,00
4	1	3			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**		**100%**	**510.765.886**	**DAU**		**100%**	**2.108.304.000**
4	1	3	2		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**100%**	**144.904.336**	**DAU**		**100%**	**484.484.000**
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	45.941.836	DAU		1 Dokumen	99.825.000,00
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Tanah Datar	5 Laporan	78.520.224	DAU		5 Laporan	192.995.000,00
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	20.442.276	DAU		1 Dokumen	191.664.000,00
4	1	3	2		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**100%**	**126.315.754**	**DAU**		**100%**	**618.915.000**
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	43.511.764	DAU		1 Dokumen	239.580.000,00
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Tanah Datar	9 Laporan	36.489.780	DAU		9 Laporan	232.925.000,00
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Tanah Datar	12 Laporan	46.314.210	DAU		12 Laporan	146.410.000,00

4	1	3	2		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**100%**	**179.149.816**	**DAU**		**100%**	**811.910.000**
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Datar	30 Dokumen	88.068.494	DAU		30 Dokumen	532.400.000,00
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Tanah Datar	12 Dokumen	61.331.780	DAU		12 Dokumen	159.720.000
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Datar	49 Orang	29.749.542	DAU		49 Orang	119.790.000
4	1	3	2		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**100%**	**60.395.980**	**DAU**		**100%**	**192.995.000**
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	22.186.700	DAU		1 Dokumen	119.790.000
4	1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	38.209.280	DAU		1 Dokumen	73.205.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

   Program ini memiliki 11 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

   A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

      Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah, jumlah dokumen LKPJ Sekretariat Daerah, Nilai LKjIP Sekretariat Daerah, jumlah laporan kegiatan bulanan Sekretariat Daerah dan jumlah orang yang menerima gaji jasa kantor (tenaga administrasi) dengan target 100%.

      Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

         Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.78.858.600,-. Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari 18 dokumen diantaranya RKA Induk, DPA Induk, RKA Pergeseran, DPA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renstra, Rankhir Renja, Rancangan Renja, Rankhir Renja, Renja Perubahan, PK Induk, PK Perubahan, Cascading, Pohon Kinerja, Croscutting, Rencana Aksi, Evaluasi Renja.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.38.523.602,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terdiri dari 7 laporan diantaranya LKjIP, LKPJ, Laporan Kinerja Triwulan 1 s/d 4, SOP pengambilan data kinerja.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.20.448.915,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Yang terdiri dari 15 laporan antara lain SPIP, PMPRB, SIMBANGDA, PBB.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dan jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.14.420.402.987,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, yang terdiri dari 114 Orang/Bulan antara lain 108 ASN dan 6 PPPK.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran untuk sub legiatan ini tahun 2025 sebesar Rp. 8.053.708,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Yang terdiri dari 5240 Dokumen antara lain SPJ seluruh bagian.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.11.936.200,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Yang terdiri dari 2 laporan antara lain Laporan Semester, Laporan Keuangan.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.85.240.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Yang terdiri dari 20 ASN antara lain Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 8 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.89.997.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 1 paket antara lain belanja Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.232.925.450-. Keluaran sub kegiatan ini jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediaka. Yang terdiri dari 1 paket antara lain belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.320.000,000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. Yang terdiri dari 1 paket diantaranya belanja Peralatan Rumah Tangga.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.36.500.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 2 paket diantaranya belanja pengisian Tabung Pemadam kebakaran dan Gas.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.186.550.500,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan. Yang terdiri dari 1 paket Barang Cetakan dan Penggandaan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.190.760.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Yang terdiri dari 50 dokumen diantaranya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.3.134.159.500,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan kunjungan tamu.

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.1.399.221.181,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp.37.492.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan, dan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp. 2.529.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

yang Disediakan. Yang terdiri dari 3 unit kendaraan diantaranya Mobil dan kendaraan roda dua.

b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp. 965.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Disediakan. Yang terdiri dari 2 unit kendaraan.

c. Pengadaan Mebel

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.481.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan. Yang terdiri dari 5 paket.

d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.220.060.500,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Yang terdiri dari 9 paket.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.20.479.500,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Yang terdiri dari 1 laporan diantarnya laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.1.191.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Yang terdiri dari 1 laporan

diantaranya laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.656.012.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 1 laporan diantarnya laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.935.948.651,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.4.241.226.113,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Yang terdiri dari 106 unit diantaranya laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.94.988.592,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Yang terdiri dari 106 unit diantaranya laporan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.200.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Yang terdiri dari 3 jenis diantaranya laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.4.174.493.200,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Yang terdiri dari 10 unit diantaranya laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

I. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan, jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.1.277.206.290,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terdiri dari 2 orang/bulan diantaranya Bupati dan Wakil Bupati.

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.450.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan. Yang terdiri dari 6 Paket diantaranya belanja Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.40,000,000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terdiri dari 8 Orang/Bulan diantaranya KDH dan WKDH.

d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.2.823.159.293,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terdiri dari 2 Orang/Bulan diantaranya penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

J. Penataan Organisasi

Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, jumlah

dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana, dan jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.30.642.743,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan. Yang terdiri dari 10 dokumen diantaranya Evaluasi Anjab, Perda SOTK Bappeda dan Rida (Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah, Ranperbup Perangkat Daerah (7 Dokumen), Ranperbup UPTD.

b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.138.320.545,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya 40 OPD, 14 Kecamatan, 75 Nagari.

c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.33.788.357,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Yang terdiri dari 1 Dokumen diantaranya Evaluasi RB Kabupaten.

d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.15.021.590,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana. Yang terdiri dari 3 laporan diantaranya Lapoan Monev (40 OPD, 14 Kecamatan, 75 Nagari), ProBis (Proses Bisnis), TND (Tata Naskah Dinas).

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.24.899.542,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja

Pemerintah Daerah. Yang terdiri dari 3 laporan diantaranya PK, LKJIP, PK Perubahan.

K. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan, dan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Keprotokolan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.525.680.557,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan terfasilitasinya tamu daerah.

b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.618.561.466,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Bahan Komunikasi (Sambutan, Testimoni) dan Kegiatan Dialog / Audiensi.

c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.530.272.488,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan. Yang terdiri dari 1 laporan diantarnya Kegiatan Pimpinan yang terdokumentasi.

2. Program Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan, jumlah dokumen hasil

pengelolaan administrasi kewilayahan, dan jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penataan Administrasi Pemerintahan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.20.988.126,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Yang terdiri dari 6 laporan diantaranya Laporan Rakor Pimpinan ke Forkopimda, Laporan Rakor Pimpinan ke Provinsi, Laporan Raker Pimpinan ke OPD, Laporan Raker Pimpinan ke provinsi, Rapat Paripurna DPRD, Laporan Trantibbummas dengan Kesbangpol.

b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.41.294.507,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan. Yang terdiri dari 6 dokumen diantaranya Batas Daerah, Batas Wilayah/Nagari, Rupa Bumi, Topo Nimi, Urusan rantau, Pembinaan Kecamatan.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.1.015.440.255,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. Yang terdiri dari 4 dokumen diantaranya LKPJ, LPPD, SPM, RLPPD.

B. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.4.677.950.775,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual. Yang terdiri dari 2 laporan diantaranya Laporan Keagamaan dan Laporan Baznas.

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Laporan Hasil Pembinaan Remaja Mesjid Kabupaten.

c. Pelaksanaan kebiajkan, evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.5.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.

C. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah produk hukum daerah yang disusun, jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum, dan jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.23.200.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah

produk hukum daerah yang disusun. Yang terdiri dari 30 produk hukum diantaranya Perda dan Perbup.

b. Fasilitasi Bantuan Hukum

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.395.200.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum. Yang terdiri dari 1 perkara diantaranya Litigasi, Non Litigasi.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.73.263.040,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi. Yang terdiri dari 1 Dokumen dan 1 JDIH diantarnya WEB JDIH.

D. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri, dan jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.13.188.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri. Yang terdiri dari 20 dokumen diantaranya Direncanakan akan dilaksanakan 20 Kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

b. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.2.000,000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama. Yang terdiri dari 4 laporan diantaranya Laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan pertriwulan.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian, dan jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dengan target 85%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.45.941.836,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Laporan Kegiatan.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.78.520.224,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian. Yang terdiri dari 5 laporan Laporan TPID per Triwulan dan Laporan Tahunan TPID.

c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.20.442.276,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Laporan Koordinasi dan Pemantauan.

B. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil

fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah, jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.43.511.764,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah. Yang terdiri dari 2 laporan diantaranya Laporan Tahunan/menghadiri rakor perencanaan yang dilaksanakan oleh provinsi/Pusat.

b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.36.489.780,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Yang terdiri dari 3 laporan diantaranya Laporan DAK Triwulan, Laporan triwulan BKK dan laporan monev.

c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.46.314.210,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Yang terdiri dari 12 laporan diantaranya Laporan Simbangda.

C. Pengelolaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa, jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik, dan jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.88.068.494,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Yang terdiri dari 30 dokumen diantaranya SK Tender Tahun 2025 Belanja pengadaan melalui e-purchasing (Katalog Lokal)

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2024 sebesar Rp.61.331.780,- Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik. Yang terdiri dari 12 dokumen diantaranya Dokumen per bulan dalam Tahun Anggaran.

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.29.749.542,-. Keluaran sub kegiatan ini jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Yang terdiri dari 49 orang diantaranya Admin RUP dari OPD se Kabupaten Tanah Datar.

D. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja, dan jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.22.186.700,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi

kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja. Yang terdiri dari 1 dokumen diantaranya Laporan pelaksanaan kegiatan Monev Tim KP3 dan Koordinasi sektor pertanian.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

   Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.38.209.280,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian. Yang terdiri dari 1 dokumen diantarnya Laporan pelaksanaan Koordinasi sektor Pertambangan, ESDM dan Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana pengadaan penunjang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Pengadaan yang direncanakan tahun 2025 tersebut terletak pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Adapun pengadaan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai terlihat pada tabel 4.1 (terlampir) berikut:

Tabel 4.1

Rencana Pengadaan Sekretariat Daerah Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
				TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**3.230.060.500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	**31.974.300.000**	
4 1 1 2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.230.060.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**31.974.300.000**	
4 1 1 2 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Tanah Datar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0%	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanah Datar	2 Unit	29.799.300.000	
4 1 1 2 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	2.529.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Tanah Datar	3 Unit	726.000.000	
4 1 1 2 5	Pengadaan Mebel	Kab.Tanah Datar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	481.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tanah Datar	5 paket	481.000.000	
4 1 1 2 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tanah Datar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Paket	220.060.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanah Datar	9 Paket	968.000.000	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sesuai dengan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh bidang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan rencana kinerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta tujuan dan sasaran rencana kinerja serta program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar ini akan dituangkan kedalam Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renja ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

SEKRETARIS DAERAH



IQBAL RAMADI PAYANA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho NYA rencana kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 telah selesai disusun. Selanjutnya rencana kerja ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) dan Prioritas Pembangunan Propinsi Tahun 2025.

Dokumen RENJA ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi substansinya maupun sistematika penyajiannya, sehingga kedepannya masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan, review maupun penyempurnaan kembali. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RENJA ini disampaikan ucapan terima kasih dan semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batusangkar, September 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH DATAR

RISWANDI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660515 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.2 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah 37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Renja K/L 55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 60
3.3 Program dan Kegiatan 61

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 63
BAB V PENUTUP..... 74

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diselaraskan dengan prioritas Pembangunan Nasional, Program dan Kegiatan Prioritas Propinsi dan Tema serta Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Tanah Datar, merupakan suatu Tahapan pencapaian dari Rencana Strategis Priode 2021-2026 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Tanah Datar, yang telah disusun setiap tahunnya. Dengan disusunnya Rancangan awal rencana kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya sehingga target Kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan Baik.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum rencana kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor Seri E);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA tahun 2025) adalah sebagai panduan bagi aparatur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan pada tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2025
2. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan dan penganggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2025
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Tentang Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu proses perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan kebijakan perencanaan Pembangunan di tahun mendatang.

Rencana kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana Program/kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2023 terdiri dari 8 (delapan) Program, 18 (Delapan belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.1 (TC. 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	19					**Kepemudaan dan Olahraga**									
2	19	02				**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**									
2	19	02	2			**Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda**									

						dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor									
2	**19**	**02**	**2**	**01**	**01**	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatankapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	100	15 orang	15 orang	
2	**19**	**02**	**2**	**01**	**03**	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	100	28 orang	28 orang	
2	**19**	**02**	**2**	**01**	**04**	Pemenuhan Hak setiap Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan diri, Penggunaan Prasana dan sarana Tanpa diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	15 orang							

2	**19**	**02**	**2**	**01**	09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100	60 orang	60 orang	
2	**19**	**02**	**2**	**02**		**Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah**									
2	**19**	**02**	**2**	**02**	**01**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 orang				100	25 orang	25 orang	
2	**19**	**02**	**2**	**02**	**02**	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
2	**19**	**03**				**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**									
2	**19**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaran olahraga tingkat daerah**									
2	**19**	03	**2**	**02**	**01**	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	

2	**19**	**03**	**2**	**02**	03	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100	1000 orang	1000 orang	
2	**19**	**03**	**2**	**03**		**Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**									
2	**19**	**03**	**2**	**03**	**04**	Pemberian penghargaan olahraga kab/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		400 orang	400 orang	400 orang	100	400 orang	400 orang	
2	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**									
2	**19**	**03**	**2**	**04**	**02**	Pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
2	**19**	**03**	**2**	**05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga rekreasi**									
2	**19**	**03**	**2**	05	01	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan , pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
2	**19**	03	**2**	**05**	**03**	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	

2	**19**	03	**2**	**05**	**04**	Pengembangan Olahraga wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan , olahraga wisata, tantangan dan petualangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
2	**19**	03	**2**	**05**	**05**	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat								
2	**19**	**04**				**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**									
2	**19**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**									
2	**19**	**04**	**2**	**01**	**05**	Penyelenggaraan kegiatan kpramukaan tingkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	**26**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
3	**26**	**01**				**Pariwisata**									
3	**26**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
3	**26**	**01**	**2**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	
3	**26**	**01**	**2**	**01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	

							Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
3	**26**	**01**	**2**	**01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	
3	**26**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
3	**26**	**01**	**2**	**02**	**01**	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	41 orang	41 orang	41 orang	100	40 orang	40 orang	
3	**26**	**01**	**2**	**02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	
3	**26**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
3	**26**	**01**	**2**	**05**	**09**	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100	5 orang	5 orang	

3	26	01	2	05	09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang disediakan					100			
3	26	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
3	26	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	
3	26	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	3 paket	3 paket	
3	26	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	2 paket	2 paket	
3	26	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	15 dokumen	15 dokumen	
3	26	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100	24 laporan	24 laporan	
3	26	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100	100 laporan	100 laporan	
3	26	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									

3	**26**	**01**	**2**	**07**	**05**	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebeleur yang Disediakan	5 unit				100	1 unit	1 unit	
3	**26**	**01**	**2**	**07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit				100	1 unit	1 unit	
3	**26**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
3	**26**	**01**	**2**	**08**	**01**	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	
3	**26**	**01**	**2**	**08**	**02**	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	
3	**26**	**01**	**2**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	
3	**26**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
3	**26**	**01**	**2**	**09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100	13 unit	13 unit	
3	**26**	**01**	**2**	**09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	50 unit	50 unit	
3	**26**	**01**	**2**	**09**	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	2 unit	2 unit	

							Dipelihara/Direhabilitasi								
3	**26**	**02**				**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**									
3	**26**	**02**	**2**	**02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**									
3	**26**	**02**	**2**	**02**	**03**	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis yang Dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100	1 kawasan	1 kawasan	
3	**26**	**02**	**2**	**03**		**Pengelolaan Destinasi pariwisata**									
3	**26**	**02**	**2**	**03**	**03**	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100	1 lokasi	1 lokasi	
3	**26**	**02**	**2**	**03**	**06**	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					100	1 laporan	1 laporan	
3	**26**	**03**				**Program Pemasaran Pariwisata**									

3	**26**	**03**	**2**			**Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**									
3	**26**	**03**	**2**	**01**	**01**	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
3	**26**	**03**	**2**	**01**	**02**	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	
3	**26**	**03**	**2**	**01**	**03**	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
	26	**03**	**2**	**01**	**04**	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
3	**26**	**03**	**2**	**01**	**05**	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokumen				100			

3	**26**	**04**				***Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual***									
3	**26**	**04**	**2**	**02**		**Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**									
3	**26**	**04**	**2**	**02**	**09**	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
3	**26**	**05**				**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**									
3	**26**	**05**	**2**	**01**		**Pelaksanan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**									
3	**26**	**05**	**2**	**01**	**01**	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		5 orang	5 orang	5 orang	100	orang	orang	
3	**26**	**05**	**2**	**01**	**02**	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat	50 orang	360 orang	360 orang	360 orang	100	360 orang	360 orang	

							dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata								
3	**26**	**05**	**2**	**01**	**02**	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi , Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	
3	**26**	**05**	**2**	**01**	**05**	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	orang	orang	
3	**26**	**05**	**2**	**02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**									
3	**26**	**05**	**2**	**02**	**01**	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pendanaan terhadap pelayanan yang dilaksanakan.

TABEL 2.2 (TC.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah kunjungan wisatawan			980.000 orang	1.200.000 orang	1.230.892 orang	1.135.317 orang			
2.	Jumlah PAD dari sektor pariwisata			Rp. 6.491.422.400	Rp. 4.205.465.000	Rp. 5.236.832.000	Rp. 5.306.403.280			
3.	Meningkatnya lama tinggal wisatawan			2 hari	2 hari	2 hari	1 hari			
4.	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan			483 orang	333 orang	350 orang	603 orang			
5.	Jumlah perolehan medali			150 buah	105 buah	110 buah	34 buah			
6.	Predikat akuntabilitas			BB	BB	BB	BB			

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja Dinas Parpora Kab. Tanah Datar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Awal)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	6	7
I	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	980.000 orang	1.135.317 orang	115,84 %
II	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Rp. 6.491.422.400	Rp. 5.306.403 .280	81,74 %
III	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaaan	483 orang	603 orang	124,84%
IV	Meningkatnya aktifitas keolahragaan	Jumlah perolehan medali	150 medali	34 buah	22,67 %
V	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas dinas	BB (72,09)	BB (72,30)	100,29%
VI	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Sasaran pertamayang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan destinasi pariwisata berbasis budaya, meningkatkan pemasaran pariwisata dan mengembangan ekonomi kreatif.

Adapun arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
2. Peningkatan promosi dan kerjasama pemasaran pariwisata
3. Penguatan kelembagaan kepariwisataan
4. Peningkatan pembinaan objek wisata/Pokdarwis
5. Peningkatan SDM pelaku wisata

Jumlah kunjungan wisatawan sangat dipengaruhi oleh promosi dan pemasaran yang dilaksanakan. Dalam rangka peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata, salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah dengan memperbanyak event. Dengan adanya event akan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Seperti halnya tahun 2022, pada tahun 2023 Satu Nagari Satu Event berlanjut dilaksanakan pada nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Untuk nagari yang telah melaksanakan pada tahun 2022, untuk tahun 2023 di bantu anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000. Sedangkan untuk Nagari baru pelaksanaan event di Tahun 2023 di bantu anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000 . Total nagari yang melaksanakan Satu Nagari Satu Event tahun 2023 sebanyak 26 nagari terdiri dari 8 Nagari lama dan 18 Nagari baru. Even-event tersebut mengangkat potensi lokal nagari baik itu potensi pariwisata maupuan ekonomi kreatif seperti kuliner, kerajinan dan juga seni pertunjukan. Disetiap event terdapat pasar rakyat yang menyediakan berbagai produk lokal sehingga terdasi transaksi ekonomi.

Selain 26 event yang merupakan program Satu Nagari Satu Event juga terdapat even lainnya yaitu: Pagaruyung Islamic Art Festival dan Festival Pesona Minangkabau. Pagaruyung Islamic Art Festival ini dilandasi oleh filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi falsafah adat Minangkabau. Event ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar terlaksana atas kolaborasi ninik mamak (tokoh adat), alim ulama dan cadiak pandai (unsur pemerintah) yang lazim disebut sebagai Tali Tigo Sapilin di Minangkabau

Sedangkan Festival Pesona Minangkabau yang merupakan event tahunan dan termasuk Kharisma Event Nusantara yang ditetapkan oleh Kementerian Parekraf RI dilaksanakan di Istano Basa

Pagaruyung. Event ini merupakan puncak dari rangakain event yang dilsaksanakn selama tahun 2023.

Dengan semua event yang dilaksanakan tersebut, terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Tercatat jumlah kunjungan untuk Satu Nagari Satu Event, Pagaruyung Islamic Art Festival dan Festival Pesona Minankabauadalah 180.392 orang Terdapat peningkatan jumlah kunjungan dari tahun 2022. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya event-event kapariwisataan yang dilaksanakan disamping adanya peningkatan kunjungan ke destinasi-destinasi wisata dan juga adanya destinasi –destinasi baru wisata di Kabupaten Tanah Datar.

Adapun data kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2021 s.d 2023, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.2.2 Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Kab. Tanah Datar Periode 2021 s.d 2023

No.	NAMA OBJEK WISATA	2021 (orang)			2022 (orang)			2023 (orang)		
		WISNU	WISMAN	JUMLAH	WISNU	WISMAN	JUMLAH	WISNU	WISMAN	JUMLAH
1	Istano Basa Pagaruyung	238.072	16	238.088	320.959	1.438	322.397	331.696	16.928	348.624
2	Lembah Anai	26.021	0	26.021	76.865	103	76.968	95.130	1.353	96.483
3	Panorama Tabek Patah	65.366	0	65.366	37.655	0	37.655	12.341	328	12.669
4	Puncak Pato	16.138	2	16.138	18.491	2	18.491	28.794	0	28.794
5	Tanjung Mutiara	66.143	0	66.143	64.645	0	64.645	25.007	232	25.239
6	Batu Angkek-Angkek	6.161	0	6.161	6.607	0	6.607	4.015	36	4.051
7	Batu Batikam	10.011	0	10.011	1.840	0	1.840	1.601	76	1.677
8	Batu Basurek	10.285	0	10.285	2.043	0	2.043	1.058	50	1.108
9	Nagari Tuo Pariangan	57.211	0	57.211	184.841	546	185.387	126.905	759	127.664
10	Aie Angek Padang Ganting	81.974	0	81.974	62.691	0	62.691	66.408	0	66.408
11	Tan Kayo	0	0	0	0	0	0	69.795	229	70.024
12	Puncak Aua Sarumpun	75.644	0	75.644	35.069	0	35.069	20.062	99	20.161
13	Pandai Sikek	7.683	0	7.683	2.947	0	2.947	3.250	220	3.470
14	Pacu Jawi	0	0	0	50.229	71	50.300	42.111	769	42.880
15	Wisata Pendaki Gunung	22.732	0	22.732	0	0	0	1.852	255	2.107
16	Event Kepariwisataan	7.720	0	7.720	90.160	0	90.160	175.370	5.022	180.392
17	Van der Capellen	0	0	0	0	0	0	1.000	100	1.100
18	Desa Wisata Pagaruyung Pakarak River Park							2.560	77	2.637
19	Batu Badinding							1.200	200	1.400

20	Tanjung Indah							43.185	409	43.594
21	Tabek Ganggam							31.304	0	31.304
22	Desa Wisata Sumpu							1.598		1.598
23	Lubuak Soda							20.400	24	20.424
24	Rumah Tuo Balimbing							818		818
25	Bukit Siduali							691		691
	TOTAL	**691.161**	**16**	**691.177**	**955.042**	**2.158**	**957.200**	**1.108.151**	**27.146**	**1.135.317**

Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Seperti diketahui PAD sangat ditentukan oleh tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata, jika tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan maka secara langsung akan berdampak terhadap PAD yang juga meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya event-event yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023.

Sektor pariwisata jadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar. Target Pendapatan dari Sektor Pariwisata sebesar Rp. 6.491.422.400,- (Enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) diperoleh realisiasi pendapatan sebesar Rp. 5.306.403.280 (Lima milyar tiga ratus enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah)atau 81,74%. Ini bisa dilihat pada tabel target dan realisasi PAD periode tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Parpora. Kab. Tanah Datar Periode Tahun 2021 s.d 2023

No.	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH									
A.	***Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah***	**292.000.000**	**283.412.000**	**97,06**	**292.000.000**	**283.412.000**	**97,06**	**224.000.000**	**333.585.000**	**148,92**
1	Gedung Nasional Maharajo Dirajo	200.000.000	234.705.000	117,35	200.000.000	234.705.000	117,35	100.000.000	319.625.000	319,63
2	Lapangan Dang Tuanku	1.500.000	500.000		1.500.000	500.000		500.000	500.000	
3	Lapangan Gumarang	3.500.000	3.000.000		3.500.000	3.000.000		5.000.000	1.700.000	
4	Lapangan Cindua Mato	0	0		0	0		0	0	
5	Bumi Perkemahan	15.000.000	23.907.500	159,38	15.000.000	23.907.500	159,38	5.000.000	11.610.000	232,20
6	Gedung Olahraga Cindua Mato	0	0		0	0		0	0	
7	Sewa Balairung Bodi Caniago	2.000.000	1.300.000		2.000.000	1.300.000		3.500.000	150.000	
8	Sewa Toko Lap. Gumarang	70.000.000	20.000.000		70.000.000	20.000.000		110.000.000	0	
B.	***Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga***	**5.000.000.000**	**4.223.957.500**	**84,84**	**5.000.000.000**	**4.223.957.500**	**84,84**	**5.797.422.400**	**4.753.052.420**	**81,99**
1	Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung	0	4.167.457.500		0	4.167.457.500		0	4.683.202.420	
2	Objek Wisata Puncak pato	0	7.500.000		0	7.500.000		0	12.000.000	
3	Objek Wisata Batu Angkek-Angkek	0	1.000.000		0	1.000.000		0	1.500.000	

4	Pelaku Usaha Fotografer dan Penyewaan Pakaian Adat	0	36.000.000		0	36.000.000		0	20.750.000	
5	Pelaku wisata di kawasan OW Istano Basa Pagaruyung							0	20.750.000	
6	Pelaku Usaha Anak2 di OW Istano Basa Pagaruyung	0	4.800.000		0	4.800.000		0	5.900.000	
7	Pelaku Usaha Kuda Tunggangan di OW Istano Basa Pagaruyung		2.400.000			2.400.000			2.950.000	
8	Pelaku Usaha Mobil Odong-odong di OW Istano Basa Pagaruyung		4.800.000			4.800.000			6.000.000	
C	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**	**120.000.000**	**145.806.600**	**121,51**	**120.000.000**	**145.806.600**	**121,51**	**120.000.000**	**176.480.000**	**147,07**
D	**Retribusi Kios**							**350.000.000**	**43.285.860**	**12,37**
	Jumlah	**5.412.000.000**	**4.653.176.600**	**85,95**	**5.412.000.000**	**4.653.176.600**	**85,95**	**6.491.422.400**	**5.306.403.280**	**81,74**

Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Dalam mencapai sasaran indikator kinerja meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditetapkan strategi yaitu meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda dengan 2 (dua) kebijakan yakni peningkatan sumber daya manusia pemuda dan peningkatan kualitas dan kuantitas organisasi pemuda.

Dari tabel 2.2.1 diatas dapat dilihat bahwa tahun 2023 untuk realisasi capaian kinerja jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kwarcab, serta pemuda Tanah Datar yang mengikuti peltihan yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat terealisasi 603 (125 %) dari target yang ditetapkan sebesar 483 orang.

Sasaran 4 : Meningkatnya aktifitas keolahragaan

Dari tabel 2.2.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian perolehan medali tahun 2023 jauh menurun dibandingkan tahun 2022, karena banyaknya kejuaraan yang batal dilaksanakan baik kejuaraan nasional maupun daera seperti Porprov, Popda dan kejuaran lainnya, hal ini diakibatkan karena kondisi anggaran yang berkurang dan menjelang memasuki Pemilu pada tahun 2024. Event keolahragaan yang diikuti berupa Kejuaraan Takwondo, Silat dan Atletik. Total jumlah medali yg didapatkan sebanyak 34 medali dari 150 target yang ditetapkan.

Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan laporan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi nggaran yang menginformasikan keberhasilan, kendala , evaluasi, rekomendasi dan tindak laju pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Ada 5 (lima) bagian yang dievaluasi dalam laporan kinerja OPD yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi intermal dan pencapaian kinerja. Hasil dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 diperoleh nilai 72,30 dengan kategori BB (sangat baik) .

Sasaran 6 : Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Inovasi berkelanjutan merupakan perubahan baru yang dilakukan yang membawa dampak positif sehingga terjadi pembaharuan, dan peningkatan kualitas yang dilakukan terus menerus. Inovasi yang dilakukan berupa E-Ticketing dan E-Parking yang dilakukan pada Istano Basa Pagaruyung

Tabel 2.2.3. Realisasi Anggaran

NO	SASARAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	-	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	20.000.000	20.000.000	100
		-	Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata	1.685.203.093	1.680.680.575	99,73
		-	Sub Kegiatan Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata	6.500.000	6.250.000	96,15
		-	Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	11.086.200	11.043.000	99,61
		-	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	9.880.000	8.716.500	88.22
		-	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	75.000.000	74.849.500	99,80
		-	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi , Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	68.938.6000	68.416.750	99,24
		-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	75.000.000	74.444.000	99,26
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.318.685.000	1.310.510.566	99,38
2.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis PAriwisata	5.769.565.800	4.168.275.498	72,25
			Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.378.932.351	1.357.237.710	98,43

-3.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatankapasitas daya saing pemuda pelopor	45.000.000	31.647.112	70,33
		-	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	53.000.000	37.510.000	70,77
		-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	739.790.000	694.139.210	93,83
		-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atauOrganisasi Kepem	65.000.000	35.182.605	54,13
		-	Sub kegiatan Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	180.000.000	153.962.200	85,53
		-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan kpramukaan tingkat daerah	750.000.000	750.000.000	100
4.	Meningkatnya aktifitas keolahragaan	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event	385.000.000	367.021.400	95,33
		-	Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	217.000.000	205.032.949	94,49
		-	Pemberian penghargaan olahraga kab/kota	3.483.000.000	411.259.968	11,81
		-	Sub Kegiatan Pengembangan organisasi keolahragaan	5.100.000.000	5.099.044.850	99,98

			Sub Kegiatan Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	644.000.000	330.244.134	51,28
		-	Sub Kegiatan Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	730.000.000	692.270.122	94,83
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	6.987.750	99,83
		-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	10.000.000	9.956.000	99,56
		-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.951.200	99,51
		-	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.519.191.703	4.235.504.385	93,72
		-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.764.400	34.758.400	99,98
		-	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan	4.000.000	2.680.000	67
		-	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100
		-	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	17.992.200	17.986.000	99,97
		-	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000	9.000.000	100
		-	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.415.000	2.415.000	100

		-	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	10.585.000	10.567.300	99,83
		-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.280.000	111.206.138	99,93
		-	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1.508.000	1.500.000	99,47
		-	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	294.000.000	288.807.923	98,23
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	7.720.000	7.697.800	99,71
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaa , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	216.615.795	214.825.950	99,17
		-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	31.460.000	31.281.500	99,43
		-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantod dan Bangunan lainnya	71.300.800	70.263.800	98,55

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu :

1. Pengembangan pariwisata daerah
2. Peningkatan Promosi Wisata
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Wisata
4. Peningkatan Kerjasama Promosi Wisata (Kab/Ko, ASITA, PHRI dan ASIPA serta pelaku wisata lainnya)
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Perantau Dalam Pengembangan Pariwisata
6. Pengembangan Ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
7. Pengembangan Kreatifitas Pemuda dan Kepeloporan
8. Peningkatan pembinaan generasi muda
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Perkembanganpariwisata tidak akan maju bila membangun fisiknya saja tetapi pembangunan manusianya juga sangat menentukan. Sehingga untuk mewujudkan pariwisata yang ramah dan berwawasan lingkungan, peningkatan SDM pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif dan masyarakat yang sadar wisata perlu kita wujudkan melalui sosialisasi, pelatihan dan peningkatan SDM pelaku wisata itu sendiri beserta masyarakatnya.

Pengembangan SDM Kepariwisataan dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik bagi Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata maupun Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata (pelaku pariwisata)

Untuk saat ini sektor pariwisata menjadi prioritas unggulan di Kabupaten Tanah Datar, dimana pembangunan kepariwisataan harus bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan baik wisatawan Domestik ataupun wisatawan Mancanegara. Sarana dan prasarana yang mendukung akan menunjang perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar untuk lebih maju.

Dengan meningkatnya promosi pariwisata serta semakin banyaknya event kepariwisataan yang diadakan dan baiknya pelayanan yang diterapkan di kawasan destinasi wisata akan membuat wisatawan merasa aman dan nyaman berkunjung serta dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pada destinasi wisata telah meningkatkan jumlah kunjungan ke Kabupaten Tanah Datar, ini juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di lokasi destinasi wisata.

Pengembangan ekonomi kreatif memiliki kekuatan berupa kekayaan kearifan lokal daerah. Sumber daya budaya merupakan kekayaan yang berasal dari interaksi sosial masyarakat, yang menjadi bagian dari kepribadian dan identitas suatu masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam proses kreasi dan produksi karya kreatif. Pemanfaatan keragaman budaya perlu mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan daerah dan berdaya saing.

Target kunjungan wisatawan Tahun 2023 ditetapkan target sesuai dengan renstra dan RPJMD 2022 - 2026 sebanyak 980.000 orang. Sejak PPKM dihentikan, antusias masyarakat untuk

berkunjung ke objek wisata kembali normal, ini dapat dilihat dengan capaian kunjungan yang telah melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 1.135.317 orang. Terutama Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung yang telah mendapatkan sertifikat CHSE sehingga layak untuk dikunjungi. Adanya sertifikat CHSE menjadikan Istano Basa Pagaruyung sudah memenuhi layak kunjung yang memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan

Sektor pariwisata jadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar. Target Pendapatan dari Sektor Pariwisata sebesar Rp. 6.491.422.400,- (Enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) diperoleh realisiasi pendapatan sebesar Rp. 5.306.403.280 (Lima milyar tiga ratus enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah)atau 81,74%.

Wisata Halal telah menjadi prioritas dalam pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat. Untuk Kabupaten Tanah Datar, wisata halal juga telah diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi kepada pelaku wisata seperti pengusaha rumah makan, home stay, pengusaha hotel dll.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar.

Berbicara masalah Pemuda dan Olahraga juga masih menemui hambatan dalam mencapai target kinerja. Di bidang Pemuda, hambatan antara lain:

1. Masih rendahnya sumber daya manusia generasi muda
2. Masih kurangnya inisiatif generasi muda untuk menunjang kegiatan kepemudaan

Sementara di bidang Olahraga, kendala yang masih dijumpai di tengah masyarakat antara lain:

1. Masih belum optimalnya pembinaan olahraga ditengah-tengah masyarakat
2. Masih kurangnya aktifitas keolahragaan yang dilaksanakan oleh masing-masing cabang olahraga
3. Masih besarnya ketergantungan pembinaan olahraga kepada pemerintah
4. Masih minimnya dukungan dunia usaha, swasta dan masyarakat untuk memajukan olahraga

Untuk mengidentifikasikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar kita menggunakan analisis SWOT dimana dalam analisis SWOT ini meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) yang dikelompokan kedalam lingkungan internal sementara untuk lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (peluang) dan Threaths (ancaman).

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength) meliputi :

a) Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional
b) Tersedianya sumber daya manusia aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

c) Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stakeholder
d) Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi

Kelemahan (Weakness) meliputi :

a) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata
b) Belum memiliki database kepariwisatan yang lengkap
c) Belum menerapkan tekhnologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kepariwisataan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunity)

a) Posisi geografis yang sangat strategis, berada ditengah-tengah Propinsi Sumatera Barat
b) Kondisi sosial masyarakat yang cukup mendukung
c) Kondisi keamanan cukup menunjang
d) Kerjasama dengan biro-biro perjalanan
e) Perkembangan tekhnologi informasi untuk keperluan promosi

Ancaman (Threat)

a) Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat
b) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang belum memadai
c) Belum maksimalnya pelayanan pada destinasi wisata
d) Keberadaan PKL yang belum tertata dengan baik pada destinasi wisata
e) Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang tengah disusun Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tahun kedua periode RPJMD tahun 2021-2026, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka kesinambungan program dan kegiatan. Rencana Kerja Dinas Parpora tahun 2025 merupakan kelanjutan dari program/kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (TC.31)
Kabupaten Tanah Datar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIDANG KEPEMUDAAN											
I	***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan***	Tanah Datar			**1.911.261.048**	***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan***	Tanah Datar			**1.911.261.048**	
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha muda pemula dan Pemuda kader	Tanah Datar			**1.191.261.048**	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha muda pemula dan Pemuda kader**	Tanah Datar			**1.191.261.048**	
1	Koordinasi,Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 orang	75.000.000	Koordinasi,Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 orang	75.000.000	

2	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	28 orang	100.000.000	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	28 orang	100.000.000	
3	Pemenuhan Hak setiap Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan diri, Penggunaan Prasana dan sarana Tanpa diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	15 orang	66.261.048	Pemenuhan Hak setiap Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan diri, Penggunaan Prasana dan sarana Tanpa diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	15 orang	66.261.048	

4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 orang	950.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 orang	950.000.000	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tanah Datar			**720.000.000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	Tanah Datar			**720.000.000**	
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 orang	220.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tanah Datar	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 orang	220.000.000	
6	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten Kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	500.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten Kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	500.000.000	
II	***Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan***	Tanah Datar			**900.000.000**	***Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan***	Tanah Datar			**900.000.000**	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tanah Datar			**900.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Tanah Datar			**900.000.000**	
7	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tanah Datar	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	900.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tanah Datar	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	900.000.000	

BIDANG KEOLAHRAGAAN											
III	***Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan***	Tanah Datar			**1.500.000.000**	***Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan***	Tanah Datar		**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	
	Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Datar			**450.000.000**	**Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tanah Datar		**450.000.000**	**450.000.000**	
9	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	
10	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tanah Datar	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 orang	200.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tanah Datar	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200.000.000	200.000.000	
	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Tanah Datar			**400.000.000**	**Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	Tanah Datar		**400.000.000**	**400.000.000**	
13	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 dokumen	400.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	400.000.000	400.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tanah Datar			**650.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Tanah Datar		**650.000.000**	**650.000.000**	
14	Penyediaan , Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tanah Datar	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	200.000.000				200.000.000	200.000.000	

			Olahraga Rekreasi yang memadai								
15	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 unit	450.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	450.000.000	450.000.000	
SEKRETARIAT											
IV	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	Tanah Datar			**7.571.200.000**	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	Tanah Datar			**7.571.200.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah Datar			**27.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tanah Datar			**27.000.000**	
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.000.000	
17	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tanah Datar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tanah Datar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	10.000.000	

18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanah Datar			**5.050.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tanah Datar			**5.050.000.000**	
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 org/bln	5.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 org/bln	5.000.000.000	
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanah Datar			**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tanah Datar			**50.000.000**	

21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah Datar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah Datar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanah Datar			**445.200.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tanah Datar			**445.200.000**	
22	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tanah Datar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	46.000.000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tanah Datar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	46.000.000	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (ATK)	Tanah Datar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (ATK)	Tanah Datar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	70.000.000	
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanah Datar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	58.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanah Datar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	58.000.000	
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	7.200.000	
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu)	Tanah Datar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	34.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu)	Tanah Datar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	34.000.000	

27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	230.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	230.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanah Datar			**470.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tanah Datar			**470.000.000**	
28	Pengadaan Mebeleur	Tanah Datar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	150.000.000	Pengadaan Mebeleur	Tanah Datar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	150.000.000	
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	320.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	320.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**573.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**573.000.000**	
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	550.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	550.000.000	

34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanah Datar			**956.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tanah Datar			**956.000.000**	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	385.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	385.000.000	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tanah Datar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	221.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tanah Datar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	221.000.000	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Datar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Datar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	350.000.000	
BIDANG PARIWISATA											
V	***PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA***	Tanah Datar			**19.500.000.000**	***PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA***	Tanah Datar			**19.500.000.000**	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar			**16.000.000.000**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Tanah Datar			**16.000.000.000**	

44	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis yang Dikembangkan	1 kawasan	16.000.000.000	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis yang Dikembangkan	1 kawasan	16.000.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar			**3.500.000.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Tanah Datar			**3.500.000.000**	
51	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	1 lokasi	3.500.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	1 lokasi	3.500.000.000	
VI	***PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA***	Tanah Datar			**3.000.000.000**	***PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA***	Tanah Datar			**3.000.000.000**	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar			**3.000.000.000**	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	Tanah Datar			**3.000.000.000**	

60	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	250.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	250.000.000	
61	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 laporan	2.025.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 laporan	2.025.000.000	
62	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	175.000.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	175.000.000	
63	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	500.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	500.000.000	

64	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokumen	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokumen	50.000.000	
BIDANG EKONOMI KREATIF											
VII	***Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual***	Tanah Datar			**200.000.000**	***Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual***	Tanah Datar			**200.000.000**	
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tanah Datar			**200.000.000**	**Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Tanah Datar			**200.000.000**	
65	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	200.000.000	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	200.000.000	
VIII	***Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif***				**800.000.000**	***Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif***				**800.000.000**	

	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				**600.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**600.000.000**	
68	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 orang	300.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 orang	300.000.000	
69	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	200.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	200.000.000	
70	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Tanah Datar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	75 orang	100.000.000	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Tanah Datar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	75 orang	100.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tanah Datar			**200.000.000**	**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Tanah Datar			**200.000.000**	

71	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang	200.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang	200.000.000	
	Total				35.382.461.048					36.710.803.860	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun dengan memperhatikan usulan program kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui tahapan proses perencanaan pembangunan yang diawali dengan musrenbang Nagari, musrenbang Kecamatan, forum Perangkat Daerah dan musrenbang Kabupaten. Dalam penetapan program kegiatan yang dituangkan pada Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Strategi secara umum dapat di artikan sebagi langkah-langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah dirumuskan, yang berisi indikasi program perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang memberi arah dan batasan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang menggambarkan upaya dinas dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah dengan lebih efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah **MISI II: Meningkatkan ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Perluasan Lapangan Kerja Yang Berbasis Pertanian, Industri dan UMKM**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Kawasan ekonomipertanian, pariwisata, industry perdagangan dan jasa

MISI III : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya mutu Pendidikan	1) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang representative 2) Meningkatkan prestasi dan daya saing olahraga 3) Meningkatkan pelaksanaan olahraga budaya 4) Meningkatkanperanserta dan dayasaingpemuda 5) Meningkatkan program keterampilan, kemandirian dan kewirausahaan pemuda	1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang representative 2. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam peningkatan prestasi olahraga 3. Peningkatan event olahraga budaya ditengah masyarakat 4. Pengembangan organisasi olahraga budaya 5. Peningkatan event-event olahraga budaya 6. Peningkatan potensi dan peran pemuda melalui kreatifitas, kepemimpinan dan kepeloporan. 7. Peningkatan program kepemudaan berwawasan kebangsaan 8. Pengembangan kualitas SDM, wirausaha muda 9. Peningkatan kreatifitas dan inovasi pemuda 10. Peningkatan jumlah pelatihan pemuda

MISI IV: Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Adat, Budaya dan Sumber Daya Alam			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	1. Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata unggulan daerah 2) Optimalisasi penyelenggaraan event pariwisata daerah melalui program Satu Nagari Satu Event 3) Meningkatkan promosi dan branding pariwisata daerah 4) Penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah 5) Mendorong kolaborasi BUMNag dan pokdarwis dalam pengelolaan desa wisata 6) Memperkuat manajeman dan kelembagaan pariwisata 7) Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata melalui KPBU/sumber pembiayaan daerah lainnya 8) Penyusunan regulasi pengelolaan	1) Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata daerah yang berdaya saing 2) Penguatan regulasi dan kelembagaan pariwisata daerah 3) Promosi dan branding pariwisata yang handal 4) Pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai modal pembangunan pariwisata daerah 5) Pembangunan infrstruktur pariwisata yang berdaya saing melalui penanaman modal dan pembiayaan daerah

		destinasi wisata daerah 9) Mengembangkan*mass tourism* 10) Peningkatan SDM Pelaku wisata 11) Pengembangan Konsep agro Wisata 12) Meningkatkan Kualitas investasi dan iklim usaha yang kondusif 13) Pemetaan potensi penanaman modal di sektor pariwisata 14) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanaman modal 15) Meningkatkan promosi penanaman modal sektor pariwisata 16) Menyiapkan tenaga Ahli bidang pariwisata pada OPD terkait yang Dapat memperbaiki Cara berpikir untuk membangun pariwisata	

	2. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan	1) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata 2) Melengkapi dan memperbaiki amenitas dan aksesisibilitas destinas iwisata 3) Pengembangan konsep pariwisata *geopark* di Tanah Datar 4) Pengembangan konsep hutan kayu budaya sebagai pelestarian alam yang mendukung pariwisata Daerah 5) Penguatan literasi budaya Minangkabau 6) Penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya 7) Pengembangan paket wisata di daerah oleh pokdarwis 8) Penguatan peran Lembaga adat dan budaya dalam pengembangan pariwisata	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati Tanah Datar dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, untuk itu disusun visi dan misi Dinas parpora yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan.

Visi

" Kepariwisataan Unggulan Berekonomi Kreatif, Prestasi Pemuda dan Olahraga Tingkat Nasional"

Mengacu kepada visi Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar diatas, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun misi Dinas Parpora sebagai berikut :

1. Mengembangkan Destinasi, Meningkatkan Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatkan Prestasi Keolahragaan

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar yang ingin dicapai pada tahun 2025 mengacu pada visi dan misi, maka untuk penjabarannya dari setiap misi perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
2. Meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing
3. Menumbuhkembangkan minat olahraga ditengah masyarakat

Untuk mencapai tujuan perlu ditetapkan sasaran yang akan dituju. Adapun sasaran dimaksud adalah :

1. Sasaran misi pertama yaitu a) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, b) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD,
2. Sasaran misi kedua yaitu Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Sasaran misi ketiga yaitu Meningkatnya aktifitas keolahragaan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2025 disusun mempedomani agenda dan prioritas Pembangunan Nasional, Program dan Kegiatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2025 terdiri dari 8 program dan 19 kegiatan dan 44 sub kegiatan antara lain :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Adapun rincian program/kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian. Sedangkan Program strategis yang dilaksanakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 Program yaitu Program Pariwisata dan Program Pemuda dan Olahraga

Ada perubahan pagu anggaran dari Rancangan Kerja Awal sebesar Rp. 35.382.461.048 menjadi Rp.10.954.997.270 pada Rancangan Kerja Akhir Tahun 2025. Rincian Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (TC.33)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir 2025 (Rp)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG KEPEMUDAAN									
2.19.02	***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan***				**110.000.000**				**1.986.755.860**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha muda pemula dan Pemuda kader**				**50.000.000**				**1.266.755.860**
2.19.02.2.01.01	Koordinasi,Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Tanah Datar		0	APBD		15 orang	75.000.000

2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Tanah Datar		0	APBD		28 orang	100.000.000
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak setiap Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan diri, Penggunaan Prasana dan sarana Tanpa diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Tanah Datar	20 orang	50.000.000	APBD		15 orang	150.000.000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Tanah Datar		0	APBD		70 orang	941.755.860
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota**				**60.000.000**				**720.000.000**
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Tanah Datar	28 orang	60.000.000	APBD		25 orang	220.000.000

2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Tanah Datar		0	APBD		1 dokumen	500.000.000
2.19.04	***Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan***				**750.000.000**				**1.000.000.000**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**750.000.000**				**1.000.000.000**
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tanah Datar	1 laporan	750.000.000	APBD		1 laporan	1.000.000.000
BIDANG KEOLAHRAGAAN									
2.19.03	***Program pengembagnan Kapasitas daya saing Keolahragaan***				**1.056.507.200**				**1.750.000.000**
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**200.000.000**				**550.000.000**
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tanah Datar	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	350.000.000
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Tanah Datar		0	APBD		300 orang	200.000.000
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Daerah**				**100.000.000**				

2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten Kota	Jumlah olahragawan Berprestasi Kab/Kota yang menerima Penghargaan	Tanah Datar	50 orang	100.000.000	APBD			
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**				**400.000.000**				**450.000.000**
2.19.03.2.04.02	Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tanah Datar	1 dokumen	400.000.000	APBD		1 dokumen	450.000.000
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**356.507.200**				**750.000.000**
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Tanah Datar		0	APBD		1 dokumen	200.000.000
2.19.03.2.05.03	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan pemeliharaan pengembangan dan pengawasan	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai	Tanah Datar	3 unit	356.507.200	APBD		3 unit	550.000.000
SEKRETARIAT									
3.26.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***				**6.063.113.270**				**7.874.048.000**
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**28.000.000**				**27.000.000**
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	2 dokumen	8.000.000	APBD		2 dokumen	7.000.000

3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tanah Datar	8 dokumen	10.000.000	APBD		8 dokumen	10.000.000
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	3 laporan	10.000.000	APBD		3 laporan	10.000.000
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.702.481.200**				**5.050.000.000**
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Datar	34 org/bln	4.642.716.800	APBD		40 orang/bulan	5.000.000.000
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	2 laporan	59.764.400	APBD		2 laporan	50.000.000
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**10.000.000**				**50.000.000**
3.26.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tanah Datar	10 orang	10.000.000	APBD		10 orang	50.000.000
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**162.000.000**				**545.200.000**

3.26.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tanah Datar	1 paket	10.000.000	APBD		1 paket	46.000.000
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (ATK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tanah Datar	3 paket	20.000.000	APBD		3 paket	70.000.000
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tanah Datar	2 paket	9.000.000	APBD		2 paket	58.000.000
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tanah Datar	50 dokumen	3.000.000	APBD		50 dokumen	7.200.000
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanah Datar	24 laporan	10.000.000	APBD		24 laporan	34.000.000
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	100 laporan	110.000.000	APBD		100 laporan	330.000.000
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**80.000.000**				**572.848.000**
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tanah Datar	5 unit	55.000.000	APBD		5 unit	250.000.000
3.26.01.2.07.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tanah Datar	10 unit	25.000.000	APBD		10 unit	322.848.000
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**762.000.000**				**673.000.000**

3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Datar	1 laporan	2.000.000	APBD		1 laporan	3.000.000
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tanah Datar	1 laporan	750.000.000	APBD		1 laporan	650.000.000
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tanah Datar	1 laporan	10.000.000	APBD			20.000.000
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**318.632.070**				**956.000.000**
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tanah Datar	13 unit	187.615.795	APBD		13 unit	385.000.000
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tanah Datar	10 unit	58.000.710	APBD		50 unit	221.000.000
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tanah Datar	2 unit	73.015.565	APBD		2 unit	350.000.000
BIDANG PARIWISATA									
3.26.02	***PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA***				**1.905.376.800**				**19.500.000.000**
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Tanah Datar			**200.376.800**				**16.000.000.000**
3.26.02.2.02.03	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis	Tanah Datar	1 kawasan	200.376.800	APBD		1 kawasan	16.000.000.000

	dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	yang Dikembangkan							
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**1.705.000.000**				**3.500.000.000**
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	Tanah Datar	1 lokasi	1.705.000.000	APBD		1 lokasi	3.500.000.000
3.26.03	***PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA***				**920.000.000**				**3.500.000.000**
3.26.03.2.01	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***				**920.000.000**				**3.500.000.000**
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar		0	APBD		1 dokumen	250.000.000
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar	1 laporan	920.000.000	APBD		1 laporan	2.525.000.000
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar		0	APBD		1 dokumen	175.000.000

3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tanah Datar		0	APBD		1 dokumen	500.000.000
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tanah Datar		0			1 dokumen	50.000.000
BIDANG EKONOMI KREATIF									
3.26.04	***Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual***				**0**				**250.000.000**
3.26.04.2.02	**Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**				**0**				**250.000.000**
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Tanah Datar		0	APBD		1 dokumen	250.000.000
3.26.05	***Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif***				**150.000.000**				**850.000.000**
3.26.05.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**100.000.000**				**650.000.000**

3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tanah Datar		0	APBD		50 orang	300.000.000
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tanah Datar	1 laporan	100.000.000	APBD		1 laporan	250.000.000
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Tanah Datar		0	APBD		75 orang	100.000.000
3.26.05.2.02	**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**				**50.000.000**				**200.000.000**
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Tanah Datar	25 orang	50.000.000	APBD		50 orang	200.000.000
	Total				**10.954.997.270**				**36.710.803.860**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Datar yang berisi program dan kegiatan Tahun 2025 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
2. Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataan, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan Perda

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

5. Pembangunan yang bergerak dibidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga lebih berorientasi kepada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan event kepariwisataan serta pembinaan kepada generasi muda dan atlit guna peningkatan prestasi dibidang keolahragaan.
6. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang kepariwisataan, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan, sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Dinas Parpora telah menjabarkannya kedalam 8 (delapan) Program, 18 (Delapan belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub kegiatan.

B. Saran

a) Untuk kedepan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan terus berusaha mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

b) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan berusaha meningkatkan kinerja pelayanan dalam mencapai target kinerja yang berorientasi kepada hasil sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Batusangkar, September 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH DATAR

RISWANDI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660515 199003 1 009



2025

RENJA
DINAS KUKMP

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Jln. M. Yamin, SH Telp. (752) 71039 – Fax (0752) 71147 – Batusangkar 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 000.7.2/ /KUKMP-2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGNAGAN KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar perlu didukung dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. Bahwa unutk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Koulis dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2007 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11);

Memutuskan.....

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar 2023 yang terukur baik sasaran maupun indikator sasarannya, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dengan *output* dan *outcome* yang jelas serta sumber pembiayaannya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal Juli 2024

KEPALA DINAS

Drs. Hendra Setyawan, M.Si
NIP. 197207101992031007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Yth. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematikan Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Program dan Prioritas Daerah 2025
2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Tahun Berjalan
3. Plafon Anggaran OPD Per Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Operasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan seusuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpendoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta merujuk kepada Sasaran Jangka Menengah yang tercangum dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat dan Renstra Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Tanah Datar mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjamahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatankedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan Program kegaitan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025. Ini merupakan dua tahun terakhir pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemeirntah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan awal RKPD, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
2. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.
3. Hasil Evaluasi pelakssanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
4. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegaitan serta prakiran maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
5. Usulan program serta kegaitan yang berasal dari masyarakat, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
6. Renja OPD juga mengakomodir program, kegaitan dan output dari program-program prioritas dalam Renja Dinas Provinsi serta Renja Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
7. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegaitan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasaran Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas-Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pemangunan Dan Keuangan Daerah
14. Permendagri nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif
16. Perda RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 Nomor 4 Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumyna dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan strategis di Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan keadaan satu tahun ke depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar ataupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif dan mendapat pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas (KUKMP) Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan;
3. Memberikan kondisi penciptaaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan;
4. Membuat acuan perencanaan yang membuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
5. Bahan Evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sisitematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capiaan Renstra Dinas KUKMP Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas KUKMP Kab. Tanah Datar s/d Tahun 2023

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas KUKMP)	Jumlah Jenis Dokumen Renstra dan Renja yang Disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	-	-	-
		1 THL Pengolah Data	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	2 laporan	2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Rokok Ilegal	14 kecamatan	14 kecamatan	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daaerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 jenis	30 jenis	30 Jenis	30 Jenis	100	30 Jenis	30 Jenis	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Jumlah Dokumen yang Digandakan	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 jenis	8 jenis	8 Jenis	8 Jenis	100	8 Jenis	8 Jenis	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Disediakan	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulitasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Jumlah	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Rapat Koordinasi ke Luar Daerah								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurar	Jumlah Materai, Perangko dan Paket Pengiriman yang Disediakan	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Tagihan Volume Air yang Digunakan, KWH Listrik dan Tagihan Internet	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantos	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 2)	5 unit	5 unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 4)	6 unit	6 unit	6 Unit	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit	11 unit	11 Unit	11 Unit		11 Unit	11 Unit	100
		1 THL Sopir	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	10 jenis	10 jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis	10 Jenis	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 kantor; 2 UPT	1 kantor; 2 UPT	1 Kantor, 2 UPT	1 Kantor, 2 UPT	100	1 Kantor, 2 UPT	1 Kantor, 2 UPT	100
		1 THL Tenaga Pengaman Kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya.	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	100	70 Unit	70 Unit	100
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian dalam Peningkatan SDM Koperasi	60 koperasi	60 koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi	100	90 orang	90 orang	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan, Koperasi Tidak RAT dan Pembubaran Koperasi yang tidak aktif yang dilaksanakan	56 koperasi	56 koperasi	81	81	100	-	-	-
		1 THL Analis Koperasi			12 Bulan	12 Bulan		-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO									
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan									
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha baru yang dibina	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100	120 orang	120 orang	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	100	120 orang	120 orang	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan peningkatan pengetahuan	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	100	-	-	,-

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		serta keterampilan Usaha UMKM								
		Fasilitasi Bantuan Permodalan bagi UMKM	4014 UMKM	4014 UMKM	3700 UMKM	3700 UMKM		120 Unit Usaha	3700 UMKM	100
		2 Orang THL Pendamping UMKM	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Pasar Penampungan dan Pembayaran Sisa DED Pasar Atas	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	100			100
		Terlaksananya Sarana dan Prasarana Perdagangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 KEgiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Fasilitasi Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan	10 THL K3 Pasar	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pelaksanaan Pengelolaan Pasar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Pasar dan Terlaksananya Penilaian Pasar Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	100 persen	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terpantaunya Fluktuasi Harga	156 dokumen	156 dokumen	156 Dokumen	156 Dokumen	100	2 Laporan; 2 Pasar	2 Laporan; 2 Pasar	100
		1 THL	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlindunginya Konsumen dan Terawasinya Penyaluran Pupuk Bersubsidi	14 kecamatan	14 kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	100	156 Barang; 2 Pasar	156 Barang; 2 Pasar	100
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan									
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Tera, Tera Ulang UTTP di Kabupaten	400 UTTP	400 UTTP	400 UTTP	400 UTTP	400	150 UTTP	150 UTTP	100
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
	Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									

KODE	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capainan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabuapten/Kota	Fasilitasi Pemasaran Produk Melalui Pasar Lelang; Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi	1 Pasar Lelang	1 Pasar Lelang	1 Pasar Lelang	1 Pasar Lelang	66,65	10 UMKM	10 UMKM	100
		1 THL Pengolah Data Perdagangan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah IKM Penerima Bantuan Kemasaran, Sertifikat Halal dan HKI Merek	5 Kemasaran	5 Kemasaran	5 Kemasan	5 Kemasan		5 Kemasan	5 Kemasan	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas KUKMP

Kajian Indikator Kinerja sebagaimana Indikator Kinerja pada Renstra OPD serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas KUKMP adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C 30

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KUKMP KAB. TANAH DATAR S/D TAHUN 2023

NO	Indikator Kinerja	SPM	IKK	KONDISI AWAL	Target Renstra Perangkat Daerah					REALISASI CAPAIAN 2023	Proyeksi			Catatan Analisis
					22	23	24	25	26		24	25	26	
1	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif (%)			51,54	52,42%	0,5	0,5	0,5	0,5	0				
2	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi (%)			5	2%	5	5	5	5	-3,7				
3	Peningkatan Wira Usahawan Pemula (orang)			260	300	300	300	300	300	90				
5	Jumlah IKM Informal menjadi IKM Formal (unit)			30	30	30	30	30	30	600				
6	Sentra IKM Potensial (sentra)			1	2	3	3	3	3	1				
7	Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)			74	10	10	10	10	10	5549				
8	Penambahan pasar yang Representatif			1	1	1	1	1	1	0				
9	Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan baik (pasar)			1	3	3	3	3	3	3				
10	Nilai Predikat sistem akuntabilitas kinerja OPD			71,13	73	74	75	76	77	72,60				
11	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			87,43	72	75	78	80	85					

Dari Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas KUKMP dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Presentase Peningkatan Koperasi Aktif
   Pada tahun 2023 tidak terjadi peningkatan koperasi aktif di Kabupaten Tanah Datar.
2. Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi
   Volume usaha koperasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,7% dari angka tahun sebelumnya.
3. Peningkatan Wirausaha Pemula

Peningkatan wirausaha pemula dihituang dari wirausaha yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan. Total wirausaha yang mendapatkan pelatihan selama tahun 2023 adalah sebanyak 90 orang.

4. Jumlah IKM informal menjadi IKM formal
   Indikator penambahan jumlah IKM formal ditargetkan tahun 2025 sebanyak 30 unit, dimana pada tahun 2023 jumlah IKM Formal bertambah sebanyak 600 unit
5. Jumlah pedagang informal menjadi pedagang formal
   Indikator ini diukur dari jumlah pedagang informal yang melengkapi perizinan usaha sektor perdagangan, dan pada tahun 2023 penambahan pedagang formal adalah sebesar 5.549 pedagang.
6. Penambahan pasar yang representatif
   Indikator pasar yang representatif didiukung dengan revitalisasi terhadap pasar-pasar nagari.Pada tahun 2023 tidak ada revitalisasi pada pasar di lingkup Kabupaten Tanah Datar.
7. Jumlah Pasar Nagari yang terkelola dengan baik (pasar)
   Indikator pengelolaan pasar nagari yang dikelola dengan baik diukur melalui penilaian aspek yang dinilai sebagai berikut :
   - Aspek asksessibilitas
   - Aspek keamanan
   - Aspek kesehatan
   - Aspek kenyamanan
   - Aspek estetika
   - Aspek kecukupan
8. Nilai Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD didapatkan dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar melalui penyebaran kuisioner pada pengguna layanan, yaitu :
   - Peserta pelatihan-pelatihan yagn diadakan di bidang-bidang Dinas KUKMP;
   - Masyarakat yang menerima pelayanan retribusi pada UPT Pengelolaan Pasar;
   - Serta para pengguna layanan langsung lainnya.

Kajian capaian Kinerja Pelayanan Dinas KUKMP sampai dengan tahun 2023 juga dapat diuraikan pada rincian data capaian sebagai berikut :

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Program dan Kegiatan Dinas KUKMP Kab.Tanah Datar Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah	1. Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumberdaya dan penguasaan teknologi 2. Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan 3. Meningkatkan kualitas produk industri 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sektor industri	1. Peningkatan daya saing sektor industri 2. Pengembangan dan peningkatan sentra industri.
Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing	1. Meningkatnya usaha perdagangan dalam negeri 2. Meningkatnya ekspor non migas daerah	1. Memperkuat pasar dalam negeri 2. Peningkatan pengawasan barang dan jasa 3. Peningkatan dan penguatan kelembagaan BPSK 4. Mengembangkan komoditi dan pasar ekspor daerah	1. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan memperkuat jaringan distribusi 2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri 3. Peningkatan efektifitas pengawasan perlindungan konsumen 4. Pningkatan kinerja BPSK kab/kota 5. Peningkatan kualitas pelayanan ekspor 6. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor 7. Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri 8. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor tradisional dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			perluasan pasar ekspor non tradisional

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya JumlahPendapatan Masyarakat melalui Peran Koperasi dan UKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	Meningkat kan tatakelola koperasi yang sesuai jati diri koperasi, berbasis sistem informasi	Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
		Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha, permodalan, pembiayaan anggota dan SDM pengelola dan pembina Koperasi	Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaranserta pemupukan modal sendiri
		Meningkatkan kompetensi manajerial, standarisasi dan perkuatan produk , akses pembiayaan dan pemasaran produk UKM	Peningkatan penyelenggara an diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 serta target tahun 2025 terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan dan dicapai pada tahun 2025, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Tanah Datar;
2. Perlunya dilakukan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk peningkatan perannya dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
3. Pengembangan UMKM secara online yang masih belum optimal karena masih berada pada tahap pengembangan untuk memenuhi tuntutan globalisasi ekonomi;
4.

Untuk pencapaian kinerja tahun 2025 dapat dirumuskan Isu Strategis sebagai berikut :

1. Perlunya penataan kelembagaan Koperasi untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat;
2. Peningkatan kelembagaan UMKM dan jiwa kewirausahaan;
3. Perlunya peningkatan daya saing produk IKM melalui peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, diversifikasi produk dan pengembangan pemasaran secara digital;
4. Pemenuhan standarisasi produk, pengawasan keamanan produk serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk IKM daerah agar dapat bersaing baik tingkat lokal, regional, nasional maupun ekspor;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha.

Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan dan pembinaan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Dampak dari inflasi pada tahun 2025 yang akan berdampak pada kemampuan usaha kecil dalam pengembangan usaha;
2. Perkembangan digitalisasi perdagangan menjadi tantangan bagi pengusaha kecil untuk dapat berkompetisi dengan produk sejenis dan dari daerah lain, bahkan dari negara lain;
3. Terbatasnya sektor usaha riil yang dilaksanakan koperasi sehingga pengembangannya menjadi terbatas;
4. Perubahan pola kehidupan masyarakat dengan beradaptasi dengan digitalisasi perdagangan menjadi tantangan bagi pengelolaan pasar-pasar nagari untuk lebih meningkatkan pelayanan.

Dari berbagai tantangan di atas, peluang untuk pengembangan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Potensi pengembangan usaha koperasi melalui pengembangan koperasi modern dan perubahan ke pola syariah;
2. Besarnya jumlah UMKM dan produk-produk unggulan daerah sebagai potensi wadah usaha masyarakat untuk dapat bersaing secara global melalui digitalisais perdagangan.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Tabel Rancantan Awal RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**5.200.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**3.989.425.327**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**45.191.644**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**27.500.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DKUKMP)	DKUKMP	Jumlah Jenis Dokumen Renstra dan Renja yang Disusun	4 Dokumen	5.195.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DKUKMP)	Jumlah Jenis Dokumen Renstra dan Renja yang Disusun	DKUKMP	4 Dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DKUKMP	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 Dokumen	31.992.775	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Disusun	DKUKMP	6 Dokumen	1.500.000
		1 THL Pengolah Data	12 Bulan			1 THL Pengolah Data		12 Bulan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKUKMP	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	1 Tahun	8.003.369	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	DKUKMP	1 Tahun	1.000.000
	DKUKMP	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen			Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	DKUKMP	4 Dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.395.499.869**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.675.292.660**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKUKMP	Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	1 Tahun	4.380.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	3.650.328.260

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKUKMP	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	2 Laporan	15.499.869	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	DKUKMP	2 Laporan	24.964.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**30.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DKUKMP	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	8 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-
Administrasi Umum Perangkat Daaerah				**176.595.487**	**Administrasi Umum Perangkat Daaerah**				**63.703.867**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKUKMP	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 Jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKUKMP	30 Jenis	1.600.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKUKMP	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	1 Tahun	21.834.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKUKMP	Jumlah Barang yang Dicetak dan Jumlah Dokumen yang Digandakan	1 Tahun	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Jumlah Dokumen yang Digandakan	DKUKMP	1 Tahun	15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKUKMP	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Jenis	7.168.312	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKUKMP	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Disediakan	1 tahun	12.451.725	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Disediakan	DKUKMP	1 tahun	1.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulitasi SKPD	DKUKMP	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	1 Tahun	110.141.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulitasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	DKUKMP	1 Tahun	30.903.867

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**221.998.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**94.464.400**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKUKMP	Jumlah Materai, Perangko dan Paket Pengiriman yang Disediakan	1 Tahun	1.998.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Perangko dan Paket Pengiriman yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKUKMP	Jumlah Tagihan Telepon, Tagihan Volume Air yang Digunakan, KWH Listrik dan Tagihan Internet	1 Tahun	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Tagihan Volume Air yang Digunakan, KWH Listrik dan Tagihan Internet	DKUKMP	1 Tahun	70.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKUKMP	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	15 Jenis	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	DKUKMP	15 Jenis	23.964.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**330.715.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**128.464.400**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKUKMP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 2)	5 Unit	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 2)	DKUKMP	5 Unit	123.964.400
	DKUKMP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 4)	6 Unit			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 4)	DKUKMP	6 Unit	
	DKUKMP	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	11 Unit			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DKUKMP	11 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKUKMP	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	10 Jenis	10.715.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	DKUKMP	10 Jenis	3.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKUKMP	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Kantor, 2 UPT	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	DKUKMP	1 Kantor, 2 UPT	1.500.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**6.246.000.000**	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**782.928.800**
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				**150.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**				**-**
Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				**150.000.000**	**Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**-**
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksanananya Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam	3 Angkatan	150.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				-
	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam	3 Angkatan						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAAN KOPERASI				**100.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAAN KOPERASI**				**-**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**100.000.000**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**-**
Pengawasan Kekuatan, Kesahatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya Bimtek Pengawasan Koperasi	15 Koperasi (30 Orang Pengurus)	50.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesahatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi				-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya Monev Dana Bergulir dan Bantuan Sosial	25 Koperasi/LKM	50.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				-
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				**400.000.000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**-**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam				**400.000.000**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**				**-**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	25 Koperasi/LKM	400.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota				
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				**450.000.000**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				**-**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**450.000.000**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**-**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	78 Orang Pengurus dan Pengawas Koperasi	450.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				**376.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**250.000.000**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**376.000.000**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**250.000.000**
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi	70 Koperasi	376.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi	Kabupaten Tanah Datar	70 Koperasi	250.000.000
		Terlaksananya Pembinaan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT	30 orang pengurus			Terlaksananya Pembinaan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT		30 orang pengurus	
		Terlaksananya revitalisasi dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	3 koperasi			Terlaksananya revitalisasi dan pembubaran koperasi yang tidak aktif		3 koperasi	
		Terlaksananya pembinaan dan penilaian koperasi berpretasi	3 koperasi			Terlaksananya pembinaan dan penilaian koperasi berpretasi		3 koperasi	
		Terlaksananaya Penyuluh koperasi	30 anggota kelompok			Terlaksananaya Penyuluh koperasi		30 anggota kelompok	
		Terlaksananaya Perkuatan Modal	1 koperasi			Terlaksananaya Perkuatan Modal		1 koperasi	
		Bantuan Keuangan untuk Dekopinda	1 tahun			Bantuan Keuangan untuk Dekopinda		1 tahun	
		1 THL Analis Koperasi	12 Bulan			1 THL Analis Koperasi		12 Bulan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				**4.250.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				-
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan				**4.250.000.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan**				-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Perizinan, Penguaatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					**Perizinan, Penguaatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Tanah Datar	Evaluasi dan Monitoring pendataan PL-KUMKM	14 Kecamatan	25.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
		Bantuan UMKM untuk 75 Nagari	75 Nagari						
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya Sosialisasi Kemitraan dengan UMKM	30 UMKM	25.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro				
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya legalitas usaha mikro kecil menengah	30 UMKM	25.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Tanah Datar	UMKM yang difasilitasi permodalannya	75 Nagari	4.150.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Tanah Datar	Koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan	60 UMKM	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan		0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan				
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				**520.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**532.928.800**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				**520.000.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				**532.928.800**
Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pelatihan label dan kemasan serta fasilitasi UMKM, Standarisasi, Mutu	50 UMKM	520.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	Terlaksananya pelatihan label dan kemasan serta fasilitasi UMKM, Standarisasi, Mutu	Kabupaten Tanah Datar	50 UMKM	532.928.800

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Produk Pembuatan Stiker	50 UMKM		Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Produk Pembuatan Stiker		50 UMKM	
		Terlaksananya pelatihan PIRT, NIB dan fasilitasi untuk sertifikat halal				Terlaksananya pelatihan PIRT, NIB dan fasilitasi untuk sertifikat halal			
		Terlaksananya pelatihan market place dan wirausaha pemula serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM	50 UMKM			Terlaksananya pelatihan market place dan wirausaha pemula serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM		50 UMKM	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**2.881.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**459.709.320**
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				**76.000.000**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**				**-**
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				**76.000.000**	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**				**-**
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kabupaten Tanah Datar	Terbitnya administrasi unutk pelaku usaha	50 dokumen	76.000.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				-
		Koordinasi dengan OPD Terkait	10 pertemuan						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA				**1.400.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA**				**325.787.600**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DISTRIBUSI PERDAGANGAN					**DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				**1.400.000.000**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**325.787.600**
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Serikat C Batusangkar	Pelaksanaan pengelolaan pasar	1 Pasar	1.000.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaksanaan pengelolaan pasar	Pasar Serikat C Batusangkar	1 Pasar	225.787.600
	Pasar Serikat C Batusangkar	Tenaga Harian Lepas	10 Orang			Tenaga Harian Lepas	Pasar Serikat C Batusangkar	10 Orang	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMP	Tersedianya dokumen perencanaan pasar	1 DED	200.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya dokumen perencanaan pasar	DKUKMP	1 DED	100.000.000
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				**100.000.000**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**-**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMP	Terbitnya Peraturan Nagari Tentang Pasar	3 Pasar	70.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				-
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMP	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola pasar	10 Pasar	30.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				-
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				**400.000.000**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**23.964.400**
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				**300.000.000**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**				**23.964.400**
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKUKMP	Terpantaunya Fluktuasi Harga	260 Dokumen	300.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terpantaunya Fluktuasi Harga	DKUKMP	260 Dokumen	23.964.400

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pasar Serikat C Batusangkar	Pemeliharaan Running Text	1 Pasar		pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemeliharaan Running Text	Pasar Serikat C Batusangkar	1 Pasar	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**100.000.000**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**-**
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabupaten Tanah Datar	Terawasinya ketersediaan pupuk sesuai RDKK	14 kecamatan	25.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				-
	DKUKMP	Tersedianya laporan pengawasan	2 Dokumen						
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	DKUKMP	Terlindunginya konsumen	14 Kecamatan	75.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				**55.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**				**-**
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pamerang Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**55.000.000**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pamerang Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**-**
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Kota	DKUKMP	Terlaksananya sosialisasi ekspor kerja sama dengan PPEI	1 kegiatan	55.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Kota				-
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				**175.000.000**	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**62.028.520**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				**175.000.000**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**				**62.028.520**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Tanah Datar	Pelaksanaan Tera Ulang UTTP	400 UTTP	60.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Tera Ulang UTTP	Kabupaten Tanah Datar	400 UTTP	62.028.520

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Tanah Datar	Pelaksanaan pengawasan/penyuluhan UTTP	400 UTTP	65.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				-
	Kabupaten Tanah Datar	Pengawan Barang dalam kemasan	1 Pasar Serikat						
Penyidikan Metrologi Legal	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya penyidikan di pasar nagari	20 UTTP	50.000.000	Penyidikan Metrologi Legal				-
	DKUKMP	Tersedianya laporan penyidikan metrologi legal	4 Dokumen						
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				**775.000.000**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**				**47.928.800**
Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				**775.000.000**	**Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**				**47.928.800**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya promosi produk unggulan daerah melalui pameran berskala nasional	1 Kali	230.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi produk unggulan daerah melalui pameran berskala nasional	Kabupaten Tanah Datar	1 Kali	47.928.800
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabuapten/Kota	Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pelatihan digital marketing dan komunkasi yang efektif	1 Kali	230.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabuapten/Kota				-
	Kabupaten Tanah Datar	Bimtek Digital Branding Strategy	1 Kali						
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	DKUKMP	Terlaksananya Sosialisasi PermendagRI terkait perizinan perdagangan	2 Kali	315.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				-
	Kabupaten Tanah Datar	Pemetaan dan penyatuan data dengan Dinas PMPTSP Kab. Tanah Datar	1 Kegiatan						
	DKUKMP	Pemeliharaan Website dan peningkatan traffic pengunjung	1 Kegiatan						

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TOTAL				**14.327.000.000**					**5.232.063.447**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar memberikan akses pada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan Pembangunan di daerah. Usulan rencana Pembangunan dapat berasal dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat Nagari, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten hingga Tingkat Provinsi.

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang yang telah diusulkan melalui aplikasi SIPD oleh pihak Nagari/Kecamatan dikoordinir dan diverifikasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya usulan tersebut akan diteruskan pada OPD terkait untuk dihimpun dalam Penyusuna Renja OPD.

Akan tetapi untuk tahun 2025 tidak terdapat usulan Masyarakat yang ditujukan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel TC 3-2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritasi pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L		KETERKAITAN DENGAN TUPOKSI DINAS KUKMP		
		Keterkaitan Struktural	**Strategi**	**Kebijakan**
KEMENTERIA'N KOPERASI DAN UKM				
1 2 3 4	Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor Meningkatnya daya saing koperasi dan Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak da Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperas	(1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Penguatan kelembagaan dan SDM Koperasi dan UMKM	a. Peningkatan SDM Pengelolaan Kopera b. Peningkatan jiwa kewirausahaan pelaku usaha c. Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM d. Peningkatan Akses Permodalan UMKM
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
1	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasiona	(1) Bidang Perindustrian	1. Peningkatan mutu produk melalui Penerapan dan inovasi teknologi tepat guna 2. Peningkatan nilai tambah produk melalui sertifikasi, peningkatan	a. Peningkatan SDM dalam penerapan teknologi tepat guna b. Pembinaan IKM melelui sentra-sentra industri potensial
2 3	Meningkatnya pengembanga n inovasi dan penguasaan teknologi Meningkatnya daya saing industri melalui			a. Fasilitasi sertifikasi produk IKM b. Fasilitasi kemasan sesuai standar c. Pengembangan pemasaran dan promosi

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L		KETERKAITAN DENGAN TUPOKSI DINAS KUKMP		
		Keterkaitan Struktural	**Strategi**	**Kebijakan**
4	pengembangan standardisasi industry Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi		mutu kemasan dan promosi	
KEMENTERIAN PERDAGANGAN				
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan	(1) Bidang Perdagangan	(1) Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	a. Fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan daerah
2	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa		(2) Peningkatan SDM dan manajemen pengelolaan pasar	Penambahan sarana dan prasarana pasar yang representatif
3	Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha		(3) Peningkatan SDM dan manajemen pengelolaan pasar	Peningkatan pemahaman manajemen dan pengelolaan keuangan pengelola pasar
			(4) Peningkatan perlindungan terhadap konsumen dalam aktifitas perdagangan	a. Peningkatan akurasi alat UTTP melalui tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal b. Penyediaan informasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya c. Pengawasan peredaran barang dan jasa

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Adapun rumusan Tujuan dan Sasaran Dians KUKMP adalah sebagaimana tabel berikut :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	**Pengembangan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM**	Menguatnya kelembangaan Koperasi dan UMKM	Berkembangya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Persentase Peningkatan Koperasi Aktif (%) 2 Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi (%) 3 Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit) 4 Peningkatan Wira Usahawan Pemula (orang)
2.	**Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dibidang Industri dan Perdagangan**	Meningkatnya kontribusi sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB	1. Meningkatnya daya saing industri daerah	1 Jumlah IKM Informal menjadi IKM Formal (unit) 2 Persentase Peningkatan Volume Usaha IKM (%)
			2. Berkembangnya perdagangan daerah	1 Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang) 2 Penambahan pasar yang Representatif 3 Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan baik (pasar)
3.	**Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan pelayanan publik**	Meningkatkatnya kinerja dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat sistem akuntabilitas kinerja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada Tema Pembangunan, prioritas pembangunan dan isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar, maka Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar menyusun 6 Program, 11 Kegiatan dan 23 sub kegiatan pada tahun.

Adapun distribusi secara umum anggaran tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

I.	**SEKRETARIAT : Rp. 3.989.425.327,-**
II.	**Bidang Koperasi & UMKM : Rp. 782.928.800,-**
III.	**Bidang Perdagangan : Rp. Rp. 459.709.320,-**

Adapun program-program strategis untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bidang Koperasi dan UMKM	
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp. 250.000.000,-
2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp. 532.928.800

Bidang Perdagangan	
1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 76.000.000,-
2. PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 23.964.400,-
3. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 62.028.520,-
4. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp. 47.928.800

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, serta isu-isu strategis yang dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya Rumusan Program dan Kegiatan Dinas KUKMP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tanah Datar

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2						**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**								
2	**17**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**3.989.425.327**				**5.250.000.000**
2	**17**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**27.500.000**				**47.695.000**
2	17	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DKUKMP)	Jumlah Jenis Dokumen Renstra dan Renja yang Disusun	DKUKMP	4 Dokumen	25.000.000	APBD		4 Dokumen	5.195.000
2	17	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Disusun	DKUKMP	6 Dokumen	1.500.000	APBD		6 Dokumen	32.500.000
							1 THL Pengolah Data	DKUKMP	12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	17	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	DKUKMP	1 Tahun	1.000.000	APBD		1 Tahun	10.000.000
							Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	DKUKMP	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**17**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.675.292.660**				**4.177.355.200**
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	3.650.328.260	APBD		1 Tahun	4.160.355.200
2	17	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	DKUKMP	2 Laporan	24.964.400	APBD		2 Laporan	17.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**				**30.000.000**
2	17	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	DKUKMP	8 Orang	-	APBD		8 Orang	30.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daaerah**				**63.703.867**				**221.000.000**
2	17	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKUKMP	30 Jenis	1.600.000	APBD		30 Jenis	13.000.000
2	17	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	22.000.000
2	17	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Jumlah Dokumen yang Digandakan	DKUKMP	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	15.000.000
2	17	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKUKMP	8 Jenis	-	APBD		8 Jenis	6.000.000
2	17	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Disediakan	DKUKMP	1 tahun	1.200.000	APBD		1 tahun	15.000.000
2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulitasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	DKUKMP	1 Tahun	30.903.867	APBD		1 Tahun	150.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**94.464.400**				**401.998.000**
2	17	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Perangko dan Paket	DKUKMP	1 Tahun	500.000	APBD		1 Tahun	1.998.000

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Pengiriman yang Disediakan							
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Tagihan Volume Air yang Digunakan, KWH Listrik dan Tagihan Internet	DKUKMP	1 Tahun	70.000.000	APBD		1 Tahun	200.000.000
2	17	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	DKUKMP	15 Jenis	23.964.400	APBD		15 Jenis	200.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**128.464.400**				**371.951.800**
2	17	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 2)	DKUKMP	5 Unit	123.964.400	APBD		5 Unit	180.000.000
							Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 4)	DKUKMP	6 Unit		APBD		6 Unit	
							Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DKUKMP	11 Unit		APBD		11 Unit	
2	17	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	DKUKMP	10 Jenis	3.000.000	APBD		10 Jenis	12.000.000
2	17	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	DKUKMP	1 Kantor, 2 UPT	1.500.000	APBD		1 Kantor, 2 UPT	179.951.800
2	**17**					**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**782.928.800**				**6.246.000.000**
2	**17**	**02**				**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**				-				**200.000.000**
2	**17**	**02**	**2**	**01**		**Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan**				-				**200.000.000**

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	17	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanananya Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam	Kab. Tanah Datar	3 Angkatan	-	APBD		3 Angkatan	200.000.000
							Terlaksananya Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam	Kab. Tanah Datar	3 Angkatan				3 Angkatan	
2	**17**	**03**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAAN KOPERASI**				-				**100.000.000**
2	**17**	**03**	**2**	**01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				-				**100.000.000**
2	17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesahatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Pengawasan Koperasi	Kab. Tanah Datar	15 Koperasi (30 Orang Pengurus)	-	APBD		15 Koperasi (30 Orang Pengurus)	50.000.000
2	17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monev Dana Bergulir dan Bantuan Sosial	Kab. Tanah Datar	25 Koperasi/LKM	-	APBD		25 Koperasi/LKM	50.000.000
2	**17**	**04**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				-				**400.000.000**
2	**17**	**04**	**2**	**01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**				-				**400.000.000**
2	17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Kab. Tanah Datar	25 Koperas		APBD		25 Koperas	400.000.000
2	**17**	**05**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				-				**400.000.000**
2	**17**	**05**	**2**	**01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi**				-				**400.000.000**

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						yang Wilayah Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar	78 Orang Pengurus dan Pengawas Koperasi		APBD		78 Orang Pengurus dan Pengawas Koperasi	400.000.000
2	**17**	**06**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**250.000.000**				**376.000.000**
2	**17**	**06**	**2**	**01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**250.000.000**				**376.000.000**
2	17	06	**2**	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi	Kab. Tanah Datar	70 Koperasi	250.000.000	APBD		70 Koperasi	376.000.000
							Terlaksananya Pembinaan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT		30 orang pengurus				30 orang pengurus	
							Terlaksananya revitalisasi dan pembubaran koperasi yang tidak aktif		3 koperasi				3 koperasi	
							Terlaksananya pembinaan dan penilaian koperasi berpretasi		3 koperasi				3 koperasi	
							Terlaksananaya Penyuluh koperasi		30 anggota kelompok				30 anggota kelompok	
							Terlaksananaya Perkuatan Modal		1 koperasi				1 koperasi	
							Bantuan Keuangan untuk Dekopinda		1 tahun				1 tahun	
							1 THL Analis Koperasi		12 Bulan				12 Bulan	
2	**17**	**07**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA**				-				**4.250.000.000**

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
2	**17**	**07**	**2**	**01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguaatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				-				**4.250.000.000**
2	17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Evaluasi dan Monitoring pendataan PL-KUMKM	Kab. Tanah Datar	14 Kecamatan		APBD		14 Kecamatan	25.000.000
							Bantuan UMKM untuk 75 Nagari		75 Nagari				75 Nagari	
2	17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Sosialisasi Kemitraan dengan UMKM	Kab. Tanah Datar	30 UMKM		APBD		30 UMKM	25.000.000
2	17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya legalitas usaha mikro kecil menengah	Kab. Tanah Datar	30 UMKM		APBD		30 UMKM	25.000.000
2	17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM yang difasilitasi permodalannya	Kab. Tanah Datar	75 Nagari		APBD		75 Nagari	4.150.000.000
2	17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan	Kab. Tanah Datar	60 UMKM		APBD		60 UMKM	25.000.000
2	**17**	**08**				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**532.928.800**				**520.000.000**
2	**17**	**08**	**2**	**01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				**532.928.800**				**520.000.000**
2	17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya pelatihan label dan kemasan serta fasilitasi UMKM, Standarisasi, Mutu Produk Pembuatan Stiker	Kab. Tanah Datar	50 UMKM	532.928.800	APBD		50 UMKM	520.000.000

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Terlaksananya pelatihan PIRT, NIB dan fasilitasi untuk sertifikat halal		50 UMKM				50 UMKM	
							Terlaksananya pelatihan market place dan wirausaha pemula serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM		50 UMKM				50 UMKM	
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**459.709.320**				**3.081.000.000**
3	**30**	**02**				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**				**-**				**76.000.000**
3	**30**	**02**	**2**	**05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**				-				**76.000.000**
3	30	02	2	5	01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Terbitnya administrasi unutk pelaku usaha	Kab. Tanah Datar	50 dokumen	-	APBD		50 dokumen	76.000.000
							Koordinasi dengan OPD Terkait		10 pertemuan				10 pertemuan	
3	**30**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**325.787.600**				**1.500.000.000**
3	**30**	**03**	**2**	**01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**325.787.600**				**1.500.000.000**
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaksanaan pengelolaan pasar	Pasar Serikat C Batusangkar	1 Pasar	225.787.600	APBD		1 Pasar	1.050.000.000
							Tenaga Harian Lepas	Pasar Serikat C Batusangkar	10 Orang				10 Orang	
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya dokumen perencanaan pasar	DKUKMP	1 DED	100.000.000	APBD		1 DED	250.000.000
3	**30**	**03**	**2**	**02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				-				**100.000.000**

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbitnya Peraturan Nagari Tentang Pasar	DKUKMP	3 Pasar	-	APBD		3 Pasar	70.000.000
3	30	03	2	02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola pasar	DKUKMP	10 Pasar	-	APBD		10 Pasar	30.000.000
3	**30**	**04**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**23.964.400**				**450.000.000**
3	**30**	**04**	**2**	**02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**				**23.964.400**				**350.000.000**
3	30	04	2	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terpantaunya Fluktuasi Harga	DKUKMP	260 Dokumen	23.964.400	APBD		260 Dokumen	350.000.000
							Pemeliharaan Running Text	Pasar Serikat C Batusangkar	1 Pasar				1 Pasar	
3	**30**	**04**	**2**	**03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				-				**100.000.000**
3	30	04	2	03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terawasinya ketersediaan pupuk sesuai RDKK	Kab. Tanah Datar	14 kecamatan	-	APBD		14 kecamatan	25.000.000
							Tersedianya laporan pengawasan	DKUKMP	2 Dokumen				2 Dokumen	
3	30	04	2	03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlindunginya konsumen	DKUKMP	14 Kecamatan	-	APBD		14 Kecamatan	75.000.000
3	30	05				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**				-				**55.000.000**
3	**30**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pamerang Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				-				**55.000.000**
3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Kota	Terlaksananya sosialisasi ekspor kerja sama dengan PPEI	DKUKMP	1 kegiatan	-	APBD		1 kegiatan	55.000.000

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**30**	**06**				**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**62.028.520**				**200.000.000**
3	**30**	**06**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**				**62.028.520**				**200.000.000**
3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Tera Ulang UTTP	Kab. Tanah Datar	400 UTTP	62.028.520	APBD		400 UTTP	70.000.000
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaksanaan pengawasan/penyuluhan UTTP	Kab. Tanah Datar	400 UTTP	-	APBD		400 UTTP	70.000.000
							Pengawan Barang dalam kemasan	Kab. Tanah Datar	1 Pasar Serikat				1 Pasar Serikat	
3	30	06	2	01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya penyidikan di pasar nagari	Kab. Tanah Datar	20 UTTP	-	APBD		20 UTTP	60.000.000
							Tersedianya laporan penyidikan metrologi legal	DKUKMP	4 Dokumen				4 Dokumen	
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**				**47.928.800**				**800.000.000**
3	**30**	**07**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**				**47.928.800**				**800.000.000**
3	30	07	2	01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi produk unggulan daerah melalui pameran berskala nasional	Kab. Tanah Datar	1 Kali	47.928.800	APBD		1 Kali	250.000.000
3	30	07	2	01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabuapten/Kota	Terlaksananya pelatihan digital marketing dan komunkasi yang efektif	Kab. Tanah Datar	1 Kali	-	APBD		1 Kali	250.000.000
							Bimtek Digital Branding Strategy	Kab. Tanah Datar	1 Kali				1 Kali	
3	30	07	2	01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya Sosialisasi PermendagRI terkait perizinan perdagangan	DKUKMP	2 Kali	-	APBD		2 Kali	300.000.000
							Pemetaan dan penyatuan data dengan	Kab. Tanah Datar	1 Kegiatan				1 Kegiatan	

KODE						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Dinas PMPTSP Kab. Tanah Datar							
							Pemeliharaan Website dan peningkatan traffic pengunjung	DKUKMP	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
										5.232.063.447				**14.577.000.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan Rencana Strategis yang akan disahkan dalam RPJM Tahun 2021-2016 serta isu-isu strategis yang dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya, Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas KUKMP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**3.989.425.327**				**5.250.000.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**27.500.000**				**47.695.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DKUKMP)	Jumlah Jenis Dokumen Renstra dan Renja yang Disusun	DKUKMP	4 Dokumen	25.000.000	APBD		4 Dokumen	5.195.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Disusun	DKUKMP	6 Dokumen	1.500.000	APBD		6 Dokumen	32.500.000
	1 THL Pengolah Data	DKUKMP	12 Bulan		APBD		12 Bulan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	DKUKMP	1 Tahun	1.000.000	APBD		1 Tahun	10.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	DKUKMP	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3.675.292.660**				**4.177.355.200**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	3.650.328.260	APBD		1 Tahun	4.160.355.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	DKUKMP	2 Laporan	24.964.400	APBD		2 Laporan	17.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-				**30.000.000**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	DKUKMP	8 Orang	-	APBD		8 Orang	30.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daaerah				**63.703.867**				**221.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKUKMP	30 Jenis	1.600.000	APBD		30 Jenis	13.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	22.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Jumlah Dokumen yang Digandakan	DKUKMP	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	15.000.000

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKUKMP	8 Jenis	-	APBD		8 Jenis	6.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Disediakan	DKUKMP	1 tahun	1.200.000	APBD		1 tahun	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulitasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	DKUKMP	1 Tahun	30.903.867	APBD		1 Tahun	150.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**94.464.400**				**401.998.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Perangko dan Paket Pengiriman yang Disediakan	DKUKMP	1 Tahun	500.000	APBD		1 Tahun	1.998.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Tagihan Volume Air yang Digunakan, KWH Listrik dan Tagihan Internet	DKUKMP	1 Tahun	70.000.000	APBD		1 Tahun	200.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	DKUKMP	15 Jenis	23.964.400	APBD		15 Jenis	200.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**128.464.400**				**371.951.800**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 2)	DKUKMP	5 Unit	123.964.400	APBD		5 Unit	180.000.000
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 4)	DKUKMP	6 Unit		APBD		6 Unit	
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DKUKMP	11 Unit		APBD		11 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	DKUKMP	10 Jenis	3.000.000	APBD		10 Jenis	12.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	DKUKMP	1 Kantor, 2 UPT	1.500.000	APBD		1 Kantor, 2 UPT	179.951.800

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**782.928.800**				**6.246.000.000**
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				-				**200.000.000**
Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				-				**200.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanananya Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam	Kab. Tanah Datar	3 Angkatan	-	APBD		3 Angkatan	200.000.000
	Terlaksananya Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam	Kab. Tanah Datar	3 Angkatan				3 Angkatan	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAAN KOPERASI				-				**100.000.000**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-				**100.000.000**
Pengawasan Kekuatan, Kesahatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Pengawasan Koperasi	Kab. Tanah Datar	15 Koperasi (30 Orang Pengurus)	-	APBD		15 Koperasi (30 Orang Pengurus)	50.000.000
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monev Dana Bergulir dan Bantuan Sosial	Kab. Tanah Datar	25 Koperasi/LKM	-	APBD		25 Koperasi/LKM	50.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				-				400.000.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam				-				**400.000.000**

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Kab. Tanah Datar	25 Koperas		APBD		25 Koperas	400.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				-				**400.000.000**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-				**400.000.000**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar	78 Orang Pengurus dan Pengawas Koperasi		APBD		78 Orang Pengurus dan Pengawas Koperasi	400.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				**250.000.000**				**376.000.000**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**250.000.000**				**376.000.000**
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi	Kab. Tanah Datar	70 Koperasi	250.000.000	APBD		70 Koperasi	376.000.000
	Terlaksananya Pembinaan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT		30 orang pengurus				30 orang pengurus	
	Terlaksananya revitalisasi dan pembubaran koperasi yang tidak aktif		3 koperasi				3 koperasi	
	Terlaksananya pembinaan dan penilaian koperasi berpretasi		3 koperasi				3 koperasi	
	Terlaksananaya Penyuluh koperasi		30 anggota kelompok				30 anggota kelompok	
	Terlaksananaya Perkuatan Modal		1 koperasi				1 koperasi	
	Bantuan Keuangan untuk Dekopinda		1 tahun				1 tahun	
	1 THL Analis Koperasi		12 Bulan				12 Bulan	

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				-				**4.250.000.000**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguaatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				-				**4.250.000.000**
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Evaluasi dan Monitoring pendataan PL-KUMKM	Kab. Tanah Datar	14 Kecamatan		APBD		14 Kecamatan	25.000.000
	Bantuan UMKM untuk 75 Nagari		75 Nagari				75 Nagari	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Sosialisasi Kemitraan dengan UMKM	Kab. Tanah Datar	30 UMKM		APBD		30 UMKM	25.000.000
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya legalitas usaha mikro kecil menengah	Kab. Tanah Datar	30 UMKM		APBD		30 UMKM	25.000.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM yang difasilitasi permodalannya	Kab. Tanah Datar	75 Nagari		APBD		75 Nagari	4.150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan	Kab. Tanah Datar	60 UMKM		APBD		60 UMKM	25.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				**532.928.800**				**520.000.000**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				**532.928.800**				**520.000.000**
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya pelatihan label dan kemasan serta fasilitasi UMKM, Standarisasi, Mutu Produk Pembuatan Stiker	Kab. Tanah Datar	50 UMKM	532.928.800	APBD		50 UMKM	520.000.000
	Terlaksananya pelatihan PIRT, NIB dan fasilitasi untuk sertifikat halal		50 UMKM				50 UMKM	

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terlaksananya pelatihan market place dan wirausaha pemula serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM		50 UMKM				50 UMKM	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**459.709.320**				**2.981.000.000**
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				**-**				**76.000.000**
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				-				**76.000.000**
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Terbitnya administrasi unutk pelaku usaha	Kab. Tanah Datar	50 dokumen	-	APBD		50 dokumen	76.000.000
	Koordinasi dengan OPD Terkait		10 pertemuan				10 pertemuan	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				**325.787.600**				**1.400.000.000**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				**325.787.600**				**1.300.000.000**
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaksanaan pengelolaan pasar	Pasar Serikat C Batusangkar	1 Pasar	225.787.600	APBD		1 Pasar	1.050.000.000
	Tenaga Harian Lepas	Pasar Serikat C Batusangkar	10 Orang				10 Orang	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya dokumen perencanaan pasar	DKUKMP	1 DED	100.000.000	APBD		1 DED	250.000.000
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				-				**100.000.000**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbitnya Peraturan Nagari Tentang Pasar	DKUKMP	3 Pasar	-	APBD		3 Pasar	70.000.000

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola pasar	DKUKMP	10 Pasar	-	APBD		10 Pasar	30.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				**23.964.400**				**450.000.000**
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				**23.964.400**				**350.000.000**
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terpantaunya Fluktuasi Harga	DKUKMP	260 Dokumen	23.964.400	APBD		260 Dokumen	350.000.000
	Pemeliharaan Running Text	Pasar Serikat C Batusangkar	1 Pasar				1 Pasar	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-				**100.000.000**
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terawasinya ketersediaan pupuk sesuai RDKK	Kab. Tanah Datar	14 kecamatan	-	APBD		14 kecamatan	25.000.000
	Tersedianya laporan pengawasan	DKUKMP	2 Dokumen				2 Dokumen	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlindunginya konsumen	DKUKMP	14 Kecamatan	-	APBD		14 Kecamatan	75.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				**-**				**55.000.000**
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pamerang Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-				**55.000.000**
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Kota	Terlaksananya sosialisasi ekspor kerja sama dengan PPEI	DKUKMP	1 kegiatan	-	APBD		1 kegiatan	55.000.000
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				**62.028.520**				**200.000.000**

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				**62.028.520**				**200.000.000**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Tera Ulang UTTP	Kab. Tanah Datar	400 UTTP	62.028.520	APBD		400 UTTP	70.000.000
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaksanaan pengawasan/penyuluhan UTTP	Kab. Tanah Datar	400 UTTP	-	APBD		400 UTTP	70.000.000
	Pengawan Barang dalam kemasan	Kab. Tanah Datar	1 Pasar Serikat				1 Pasar Serikat	
Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya penyidikan di pasar nagari	Kab. Tanah Datar	20 UTTP	-	APBD		20 UTTP	60.000.000
	Tersedianya laporan penyidikan metrologi legal	DKUKMP	4 Dokumen				4 Dokumen	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				**47.928.800**				**800.000.000**
Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				**47.928.800**				**800.000.000**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi produk unggulan daerah melalui pameran berskala nasional	Kab. Tanah Datar	1 Kali	47.928.800	APBD		1 Kali	250.000.000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabuapten/Kota	Terlaksananya pelatihan digital marketing dan komunkasi yang efektif	Kab. Tanah Datar	1 Kali	-	APBD		1 Kali	250.000.000
	Bimtek Digital Branding Strategy	Kab. Tanah Datar	1 Kali				1 Kali	
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya Sosialisasi PermendagRI terkait perizinan perdagangan	DKUKMP	2 Kali	-	APBD		2 Kali	300.000.000
	Pemetaan dan penyatuan data dengan Dinas PMPTSP Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
	Pemeliharaan Website dan peningkatan traffic pengunjung	DKUKMP	1 Kegiatan				1 Kegiatan	

Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			TOTAL	**5.232.063.447**				

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD, agar dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum (KU) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Batusangkar, Agustus 2025
KEPALA DINAS KUKMP
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. Hendra Setyawan, M.Si
NIP. 19720710 199203 1 007

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026. dan Peraturan Bupati Nomor tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Renja ini memuat Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yang memuat rencana program dan kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Batusangkar, Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR

ABDURRAHMAN HADI, M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19790723 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 27

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 29

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . 35

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L..... 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD..... 36

3.3 Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V : PENUTUP..... 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perakiraan maju. Kebijakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dituangkan dalam Renja Tahun 2025.

Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dengan substansinya menjabarkan visi, misi dan arah pengelolaan upaya Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 1 tahun kedepan .

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam jangka waktu satu tahun.

Sesuai dengan visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"** maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tertuang pada Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah untuk mendukung misi :

1. Misi ke 1 (satu) yang berbunyi "Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya"
2. Misi ke 2 (dua) yang berbunyi "Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Dan Perluasan Lapangan Kerja Yang Berbasis Pertanian, Industri Dan UMKM"
3. Misi ke 3 (tiga) yang berbunyi "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing"

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja OPD
b. Penyusunan Rancangan Renja OPD
c. Pelaksanaan Forum SKPD
d. Penetapan Renja OPD

Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun mengacu pada rancangan akhir RKPD dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berkewajiban menyempurnakan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan.

Renstra RKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selaras dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memperhatikan juga Renja K/L terkait. Renja OPD Provinsi terkait khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang ditangani dan atau dibiayai Provinsi dan atau pemerintah pusat melalui dana APBN dan atau APBD Provinsi. Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
n. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun dengan maksud memberikan arah dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayananan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga periode Renstra tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 49 (empat puluh Sembilan) subkegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 92,44%. Berikut penjabaran singkat mengenai program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.880.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.038.500,- persentase 78,3%

Output sub kegiatan ini berupa tersusunnya 1 (satu) dokumen.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.729.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.714.250,- persentase 99,68%

Output sub kegiatan ini berupa tersusunnya 5 (lima) dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPPA dan RKA/DPPA Pergeseran).

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.400.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.174.250,- persentase 95,81%

Output sub kegiatan ini berupa tersusunnya 4 (empat) dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) dan Laporan Monitoring Evaluasi.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.395.500.487,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.344.734.330,- persentase 98,5%.

Output sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji pada 32 ASN dan tunjangan ASN Tahun 2023.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.171.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.158.100,- persentase 99,59%.

Output sub kegiatan ini berupa tersusunnya 2 (dua) laporan semester dan laporan keuangan akhir tahun.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- persentase 100%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor .

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.361.390,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.304.100,- persentase 99,67%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya Alat Tulis Kantor.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.134.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.134.250,- persentase 100%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.425.000,- persentase 95,14%.

Output sub kegiatan ini berupa langganan 8 (delapan)

surat kabar harian dan mingguan.

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.820.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.351.950,- persentase 93,13%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu .

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 49.841.580,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.479.500,- persentase 99,27%.

Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 35.842.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.000.000,- persentase 89,28%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) unit Laptop

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 900.000,- persentase 100%.

Output sub kegiatan ini berupa pembelian materai 90 lembar materai 10.000.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 48.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.114.591,- persentase 93,99%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya listrik, air, telepon dan internet.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 77.577.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.509.400,- persentase 99,91%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya peralatan kebersihan dan 3 (tiga) jasa tenaga lainnya.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 233.247.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 228.728.065,- persentase 98,06%.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya BBM/pelumas, suku cadang dan biaya service 6 unit kendaraan roda empat dan 44 unit kendaraan roda dua, pembayaran pajak kendaraan dinas serta pembayaran honorarium 1 (satu) orang jasa tenaga lainnya.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.710.000,- persentase 94,9%.

Output sub kegiatan ini berupa perbaikan dan service peralatan kantor.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.997.000,- persentase 99,91%.

Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya perbaikan atap gedung/kantor aula serta perbaikan mushalla.

B. PROGRAM PENATAAN DESA

1. Kegiatan Penyelenggaraaan Penataan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.396.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.346.500,- persentase 99,07%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya sebanyak 25 (dua puluh lima) nagari.

C. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase 0%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) dokumen.

D. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.842.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.625.000,- persentase 92,35%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan 1 (satu) dokumen.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.093.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 997.200,- persentase 32,24%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa dengan 3 (tiga) dokumen.

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.150.000,- persentase 86,3%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa untuk 75 (tujuh puluh lima) Nagari.

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase 0%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah

Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dengan 5 (lima) dokumen.

e. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.884.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.404.920,- persentase 94,6%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas dengan 25 orang aparatur.

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11.562.574,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.010.500,- persentase 95,23%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan 1 (satu) laporan.

g. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.031.526.501,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.947.220.765,- persentase 97,91%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dar 54 (lima puluh empat) nagari dengan 1 (satu) laporan.

h. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.318.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.310.000,- persentase 99,85%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Laporan penyusunan profil desa dengan 75 (tujuh puluh lima) dokumen.

i. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase 0%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah pengelolaan aset desa dengan 1 (satu) dokumen.

j. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase 0%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah penetapan dan penegasan batas desa dengan 2 (dua) nagari.

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.761.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.166.700,- persentase 76,41%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat adalah 1 (satu) dokumen.

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.023.848.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.863.321.726,- persentase 92,07%

Output sub kegiatan ini berupa meningkatnya kapasitas 7 (tujuh) Lembaga yaitu LKAAM, KAN, Posyandu, Badan Pengelola Sistem Pengelolaan Air Minum (BPSPAM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM, terfasilitasinya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perguruan Tinggi dan pelatihan Kapasitas Adat KAN di seluruh Nagari.

c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 36.012.760,- dengan

realisasi sebesar Rp. 33.349.800,- persentase 92,61%

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya 2 (dua) dokumen yaitu :

1. Laporan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag)
2. Laporan Pembentukan Bumnag Bersama.

d. Fasilitasi Pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.198.124,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.181.000,- persentase 99,89%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah laporan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna adalah 1 (satu) laporan.

e. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 66.850.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.904.055,- persentase 97,09%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah laporan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat adalah 1 (satu) laporan.

f. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.235.626.884,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.227.791.314,- persentase 99,37%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah dokumen fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga adalah 1 (satu) dokumen.

F. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.358.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.817.500,- persentase 76,93%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah dokumen GDPK tingkat Kabupaten/Kota adalah 1 (satu) dokumen.

b. Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI, SLTP/MTS, jalur non formal dan informal

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14.649.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.180.900,- persentase 96,8%.

Output sub kegiatan ini terealisasi berupa Jumlah satuan pendidikan yang terfasilitasi adalah 2 (dua) satuan pendidikan.

G. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal

a. Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 148.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 129.545.200,- dengan persentase 87,41%

Output sub kegiatan ini berupa penyediaan sarana KIE di Kecamatan pada 14 Balai Penyuluh KB.

b. Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KB

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.063.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 960.455.500,- dengan persentase 90,34%

Output sub kegiatan ini berupa terealisasinya dana bantuan operasional penyuluh KB pada 14 Balai Penyuluh KB dan operasional Penggerakkan Program KKBPK di Balai Penyuluh Keluarga Berencana

2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.234.818.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.225.435.470,- dengan persentase 99,24%

Output sub kegiatan ini berupa jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan adalah 1.016 orang.

3. **Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota**

   a. Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya

      Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.198.000,- dengan persentase 99,99%

      Output sub kegiatan ini berupa jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya adalah 12 laporan

   b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

      Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.061.312.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 564.228.050,- dengan persentase 53,16%

      Output sub kegiatan ini berupa jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah 2148 orang.

   c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB

      Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.037.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 744.100.000,- dengan persentase 71,7%

      Output sub kegiatan ini berupa jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB adalah 1 unit.

4. **Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**

   a. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB

      Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 277.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 275.418.350,- persentase 99,25%

Output sub kegiatan ini berupa pembinaan terhadap kampung KB dalam rangka Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB.

H. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

a. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 148.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 129.545.200,- dengan persentase 87,41%

Output sub kegiatan ini berupa penyediaan sarana KIE di Kecamatan pada 14 Balai Penyuluh KB.

b. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 48.899.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.908.900,- dengan persentase 97,97%

Output sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) adalah 2 laporan

2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah/kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

a. Pendayagunaan mitra kerja kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.105.990 dengan

realisasi sebesar Rp. 8.470.400,- dengan persentase 93,02%

Output sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Hasil Pendayagunaan mitra kerja kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) adalah 2 laporan

b. Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.308.931.139,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.153.250.484,- dengan persentase 93,26%

Output sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja adalah 2 laporan

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tanah Datar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
URUSAN	URUSAN BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2		4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					NON URUSAN									
2	**13.01**	**01**	**2**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
2	13.01	**01**	2.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
2	13.01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50
2	13.01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Dokumen Hasil DPA-SKPD	30 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	15 dokumen	50
2	13.01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 dokumen	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	12 laporan	60
2	13.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**									
2	13.01	01	**2.02**	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	222 orang	74 orang	37 orang	37 orang	100	37 orang	111 orang	50
2	13.01	01	**2.02**	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	50
2	13.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
2	13.01	01	**2.05**	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	12 orang	7 orang	0 orang	0	1 orang	12 orang	30
2	13.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	13.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	50
2	13.01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	50
2	13.01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	50

2	13.01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	16 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	24 dokumen	50
2	13.01	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	13.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180 laporan	60 laporan	30 laporan	30 laporan	100	1 laporan	90 laporan	50
2	13.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	13.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan								
2	13.01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	46 unit	8 unit	7 unit	2 unit	28.5714	4 unit	10 unit	21.739
2	13.01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	0 paket	0 paket	0
2	13.01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	0 paket	0 paket	0
2	13.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	13.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	13.01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	13	01	2	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	13.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	13.01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	408 unit	136 unit	68 unit	68 unit	100	68 unit	204 unit	50
2	13.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	0 paket	0 paket	0
2	13.01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	390 unit	130 unit	65 unit	65 unit	100	65 unit	195 unit	50
2	13.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	18 unit	6 unit	3 unit	3 unit	100	2 unit	9 unit	50
2	13.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 paket	0 paket	1 paket	0 paket	0	2 paket	0 paket	0
2	13.01	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	0 paket	0 paket	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	**2.13**				**PROGRAM PEMBERDAYAAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Rangka Peningkatana Kesejahteraan**								
2	**2.13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terindentifikasi dan terinventarisasinya masyarakat hukum adat serta terfasilitasinya Nagari dalam pendataan peraturan nagari tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018)**								
2	2.13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50

2	2.13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50
2	2.13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	42 lembaga	14 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	100	7 lembaga	21 lembaga	50
2	2.13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 paket	0 paket	2 paket	0 paket	0	2 paket	0 paket	0
2	2.13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	50
2	2.13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	2.13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	2.13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	2.13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	33.333
2	13.02	02			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Meningkatnya Kualitas Penataan Desa**								
2	**13.02**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**									
2	13.02	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	4 nagari	0 nagari	0 nagari	0 nagari	0	0 nagari	0 nagari	0
2	13.02	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 nagari	0 nagari	0 nagari	0 nagari	0	0 nagari	0 nagari	0
2	13.02	02	2.01	03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	375 nagari	25 nagari	25 nagari	25 nagari	100	25 nagari	50 nagari	13.333
2	13.02	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	300 nagari	0 nagari	0 nagari	0 nagari	0	0 nagari	0 nagari	0

2	13.03	03			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Meningkatnya kerjasama nagari dan dengan dunia usaha/ lembaga**								
2	13.03	03	2.01		**Fasilitasi kerjasama antar desa**									
2	13.03	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	18 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	13.03	03	2.01	02	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	18 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	50
2	13.03	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	13.04	04			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**								
2	13.04	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**									
2	13.04	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50
2	13.04	04	2.01	02	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	21 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0	3 dokumen	6 dokumen	28.571
2	13.04	04	2.01	03	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	450 dokumen	150 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	100	75 dokumen	225 dokumen	50
2	13.04	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	29 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	15 dokumen	51.724
2	13.04	04	2.01	05	Pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1275 org	100 org	25 org	25 org	100	54 org	125 org	9.8039
2	13.04	04	2.01	06	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	13.04	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	13.04	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	13.04	04	2.01	09	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	laporan	2 laporan	100
2	13.04	04	2.01	11	Fasilitasi peyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	450 dokumen	150 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	100	75 dokumen	225 dokumen	50
2	13.04	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50
2	13.04	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	8 nagari	4 nagari	2 nagari	2 nagari	0	2 nagari	6 nagari	75
2	13.04	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0
2	13.04	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0

2	**2.14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
2	**2.14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKAN**							
2	**2.14**	**02**	**2.01**		**Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	**Terlaksananya Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk**							
2	2.14	02	2.01	02	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	33.333
2	2.14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	6 dokumen	dokumen	1 dokumen	dokumen	0	1 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai isu lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6 dokumen	dokumen	1 dokumen	dokumen	0	1 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	02	2.01	09	Advokasi, sosialiasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur formal dan informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	12 satuan pendidikan	4 satuan pendidikan	2 satuan pendidikan	2 satuan pendidikan	100	2 satuan pendidikan	6 satuan pendidikan	50
2	2.14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	450 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0	0 organisasi	0 organisasi	0
2	2.14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	250 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0
2	**2.14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk**							
2	2.14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	17 rumah data	0 rumah data	0 rumah data	0 rumah data	0	0 rumah data	0 rumah data	0
2	2.14	02	2.02	09	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0

2	**2.14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**PASANGAN USIA SUBUR TIDAK INGIN ANAK LAGI (UNMEET NED) TIDAK TERLAYANI KB**							
2	**2.14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal**	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana**							
2	2.14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	138 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100	1 unit	46 unit	33.333
2	2.14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	84 laporan	28 laporan	14 laporan	14 laporan	100	14 laporan	42 laporan	50
2	2.14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKPBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKPBPK	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
2	**2.14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Terfasilitasinya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**							
2	2.14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5000 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0	0 organisasi	0 organisasi	0
2	2.14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0
2	2.14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	6000 kader	2000 kader	1016 kader	1016 kader	100	1000 kader	3016 kader	50.267
2	**2.14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusian Alkont**							
2	2.14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	72 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0
2	2.14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12888 org	4296 org	2148 org	2148 org	100	1754 org	6444 org	50
2	2.14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	156 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100	1 unit	6 unit	3.8462
2	2.14	03	2.03	11	Dukungan Operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0

2	**2.14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**	**Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**								
2	2.14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0	0 organisasi	0 organisasi	0
2	2.14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	2.14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	102 kampung KB	4 kampung KB	17 kampung KB	4 kampung KB	23.5294	2 kampung KB	8 kampung KB	7.8431
2	2.14	03	2.04	04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0
2	**2.14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**	**PERSENTASE KEAKTIFAN POKTAN**								
2	**2.14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**								
2	2.14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	32 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0	0 kelompok	0 kelompok	0
2	2.14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, PEK/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Poktan yang mendapat Pelatihan	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0
2	2.14	04	2.01	06	Penyediaan biaya Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	84 kelompok	28 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	100	14 kelompok	42 kelompok	50
2	2.14	04	2.01	07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	50
2	**2.14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melaui Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga]**	**Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga**								
2	2.14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan PEK/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0	0 organisasi	0 organisasi	0

2	2.14	04	2.02	02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi keluarga kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejateraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	50
2	2.14	04	2.02	03	Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Mitra dan organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan PEK/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0	0 organisasi	0 organisasi	0
	2.14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayananan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana tergambar pada **Table T-C.30**

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kinerja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	
1	Jumlah regulasi/aturan yang dilahirkan dan dilaksanakan			10	15	15	15	10		15	15	
2	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (BumNag bersama yang terbentuk)			3	3	1	1	5		1	1	
3	Jumlah kampung keluarga berkualitas kategori berkelanjutan (paripurna)			1	1	1	1	2		1	1	
4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)			21,2	20,3	19,3	18,2	14,11		19,3	18,2	
5	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan			1	2	1	1	1		1	1	
6	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja			BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Belum optimalnya KAN / Pemerintah Nagari dalam penyiapan regulasi tentang adat salingka nagari.
2. Kurang berkembangnya sentra ekonomi terpadu di Nagari
3. Peningkatan kampung keluarga berkualitas (berkembang, mandiri, paripurna)
4. Masih rendahnya pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya partisipasi pria dalam ber KB
5. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan Reproduksi
6. Belum optimalnya pengembangan/pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB
7. Pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yakni sebagai pelaksana teknis operasional yang merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan keluarga dengan memberdayakan serta melayani KB melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

Untuk itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Penguatan pemahaman tentang adat salingka nagari
2. Penguatan pemahaman tentang tata cara lahirnya suatu produk hukum
3. Meningkatkan kapasitas pengelola lembaga ekonomi masyarakat BumNag dan BumNag bersama
4. Penguatan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga
5. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk
6. Penguatan kapasitas Faskes dan jaringan/jejaring yang melayani keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
7. Peningkatan kualitas/ketahanan remaja dan penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja
8. Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan kader PPKBJ dan Sub PPKBJ dalam penyuluhan program *Bangga Kencana*

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun mengacu pada rancangan awal RKPD dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar pemutakhiran Renja OPD dan sebaliknya setelah proses pembandingan, renja OPD menjadi dasar penambahan dan pengurangan terhadap rancangan awal. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap rancangan awal sehingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada **Tabel C.31** sebagai berikut:

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH DATAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	NON URUSAN				**4,269,391,038**	**NON URUSAN**				**4,063,093,135**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				**4,269,391,038**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**				**4,063,093,135**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**12,630,000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3,354,000**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PMDPPKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	3,880,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PMDPPKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	804,000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Dinas PMDPPKB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Dokumen Hasil DPA-SKPD	5 dokumen	4,875,000	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Dinas PMDPPKB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Dokumen Hasil DPA-SKPD	5 dokumen	974,800	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	3,875,000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	1,575,200	
	Administrasi Keuangan				**3,753,803,938**	**Administrasi Keuangan**				**3,680,607,065**	
	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Dinas PMDPPKB	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 orang/bulan	3,750,429,938	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Dinas PMDPPKB	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 orang/bulan	3,679,932,265	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	3,374,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	674,800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**5,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,500,000**	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas PMDPPKB	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	5,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas PMDPPKB	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	2,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**98,618,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**56,599,070**	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas PMDPPKB	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3,000,000	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas PMDPPKB	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	600,000	
	Penyediaan bahan logistik	Dinas PMDPPKB	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	15,049,000	Penyediaan bahan logistik	Dinas PMDPPKB	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	3,609,500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMDPPKB	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	6,749,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMDPPKB	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1,749,800	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMDPPKB	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	3,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMDPPKB	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	1,220,000	
	Fasilitas kunjungan tamu	Dinas PMDPPKB	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	5,820,000	Fasilitas kunjungan tamu	Dinas PMDPPKB	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1,356,500	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PMDPPKB	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	65,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PMDPPKB	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	48,063,270	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**16,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PMDPPKB	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	16,000,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PMDPPKB	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	-	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**126,091,800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**121,285,700**
Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	450,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan 380,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	45,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan 45,000,000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	80,641,800	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas PMDPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan 75,905,700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**257,247,300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**198,747,300**
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas PMDPPKB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66	unit	233,247,300	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas PMDPPKB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66	unit 193,247,300
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PMDPPKB	Jumlah peralatan yang dipelihara	65	unit	14,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PMDPPKB	Jumlah peralatan yang dipelihara	65	unit 3,500,000
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas PMDPPKB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	10,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas PMDPPKB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit 2,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**5,072,199,720**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**1,989,469,462**
PROGRAM PEMBERDAYAAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Rangka Peningkatana Kesejahteraan**			**2,581,047,600**	**PROGRAM PEMBERDAYAAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Rangka Peningkatana Kesejahteraan**		**1,452,024,950**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**Terindentifikasi dan terinventarisasinya masyarakat hukum adat serta terfasilitasinya Nagari dalam pendataan peraturan nagari tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018)**			**2,581,047,600**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Terindentifikasi dan terinventarisasinya masyarakat hukum adat serta terfasilitasinya Nagari dalam pendataan peraturan nagari tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018)**		**1,452,024,950**
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	dokumen	75,000,000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	dokumen -
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	dokumen	725,164,400	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	dokumen 635,588,100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	lembaga	1,430,718,800	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	lembaga 752,328,800
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	dokumen	100,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	dokumen 23,206,250
Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	laporan	75,000,000	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	laporan 3,912,600
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	laporan	175,164,400	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	laporan 36,989,200
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		**Meningkatnya kerjasama nagari dan dengan dunia usaha/ lembaga**			**75,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Meningkatnya kerjasama nagari dan dengan dunia usaha/ lembaga**		**1,500,000**
Fasilitasi kerjasama antar desa					**75,000,000**	**Fasilitasi kerjasama antar desa**				**1,500,000**
Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3	dokumen	75,000,000	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3	dokumen 1,500,000

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**			**2,416,152,120**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**		**535,944,512**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					**2,416,152,120**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**				**535,944,512**
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	dokumen	300,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	dokumen 8,341,000
Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3	dokumen	150,000,000	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3	dokumen -
Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75	dokumen	53,192,920	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75	dokumen -
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	6	dokumen	1,457,959,200	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	6	dokumen 494,531,012
Pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tanah Datar	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	225	orang	300,000,000	Pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tanah Datar	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	225	orang 29,072,500
Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	laporan	60,000,000	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	laporan -
Fasilitasi peyusunan profil desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Profil Desa	75	dokumen	25,000,000	Fasilitasi peyusunan profil desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Profil Desa	75	dokumen 4,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	75	dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	75	dokumen -
Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa	Tanah Datar	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5	nagari	20,000,000	Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa	Tanah Datar	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5	nagari -
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**8,187,682,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**6,975,881,672**
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		**LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKAN**			**105,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKAN**		**9,408,230**
Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas		**Terlaksananya Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk**			**105,000,000**	**Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas**		**Terlaksananya Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk**		**9,408,230**
Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen	75,000,000	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen 6,478,250
Advokasi, sosialiasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur formal dan informal	Tanah Datar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	6	Satuan pendidikan	30,000,000	Advokasi, sosialiasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur formal dan informal	Tanah Datar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	6	Satuan pendidikan 2,929,980
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		**PASANGAN USIA SUBUR TIDAK INGIN ANAK LAGI (UNMEET NED) TIDAK TERLAYANI KB**			**5,479,382,000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**PASANGAN USIA SUBUR TIDAK INGIN ANAK LAGI (UNMEET NED) TIDAK TERLAYANI KB**		**4,636,034,692**
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana**			**1,847,400,000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal**		**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana**		**1,325,455,992**
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tanah Datar	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	14	unit	455,000,000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tanah Datar	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	14	unit 430,000,000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	14	laporan	942,400,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	14	laporan 862,400,000
Pengendalian Program KKPBPK	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKPBPK	2	laporan	450,000,000	Pengendalian Program KKPBPK	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKPBPK	2	laporan 33,055,992

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		**Terfasilitasinya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**2,080,000,000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Terfasilitasinya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**1,814,596,700**
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tanah Datar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,000 Orang	2,080,000,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tanah Datar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,000 Orang	1,814,596,700
Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota		**Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusian Alkont**		**1,164,732,000**	**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota**		**Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusian Alkont**		**1,128,732,000**
Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Tanah Datar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	25,200,000	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Tanah Datar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	25,200,000
Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1804 orang	915,647,000	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1804 orang	885,647,000
Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB	Tanah Datar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit	223,885,000	Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB	Tanah Datar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit	217,885,000
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB		**Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**		**387,250,000**	**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**		**Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**		**367,250,000**
Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tanah Datar	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	30 Kampung KB	387,250,000	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tanah Datar	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	30 Kampung KB	367,250,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA		**PERSENTASE KEAKTIFAN POKTAN**		**2,603,300,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**		**PERSENTASE KEAKTIFAN POKTAN**		**2,330,438,750**
Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		**Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**		**175,000,000**	**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**		**Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**		**17,138,750**
Penyediaan biaya Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	Tanah Datar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14 kelompok	25,000,000	Penyediaan biaya Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	Tanah Datar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14 kelompok	11,000,000
Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	150,000,000	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	6,138,750
Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melaui Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga]		**Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga**		**2,428,300,000**	**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melaui Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga]**		**Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga**		**2,313,300,000**
Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi keluarga kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejateraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Tanah Datar	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	20,000,000	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi keluarga kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejateraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Tanah Datar	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	-
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 laporan	2,408,300,000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 laporan	2,313,300,000
TOTAL				**17,529,272,758**	**TOTAL**				**13,028,444,269**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada rancangan akhir renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

TABEL T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Diantara program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mendukung program nasional tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah membagi dalam dua urusan yakni :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama dalam hal percepatan penanggulangan stunting.

Untuk kedua urusan tersebut telah ditetapkan program kegiatan, sub kegiatan guna mendukung kebijakan nasional dimaksud.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemantasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu satu tahun ke depan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar konsisten

dengan tugas pokok dan fungsi, secara kolektif menggambarkan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dengan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi tersebut.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memberikan fokus pada penyusunan program/kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dicapai dan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis.

Adapun sasaran rencana kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar terlaksananya program kerja yang telah disusun selama 1 (satu) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya regulasi yang dilahirkan oleh KAN / pemerintah nagari tentang adat salingka nagari.
2. Berkembangnya sentra ekonomi terpadu
3. Meningkatnya jumlah kampung Keluarga Berkualitas
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Usulan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 direncanakan terdiri dari 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
I	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2.	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
II	**Administrasi Keuangan**
4.	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS
5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
6.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
7.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8.	Penyediaan bahan logistic
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11.	Fasilitas kunjungan tamu
12.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
13.	Penyediaan jasa surat menyurat
14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
18.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**
VII	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
19.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
20.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
21.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
22.	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
23.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
C	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**
VIII	**Fasilitasi kerjasama antar desa**

24.	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota
D	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
IX	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**
25.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
26.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
27.	Pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
28.	Fasilitasi peyusunan profil desa
E	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
X	**Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**
29.	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota
30.	Advokasi, sosialiasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur formal dan informal
F	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
XI	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal**
31.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
32.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB
33.	Pengendalian Program KKPBPK
XII	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**
34.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
XIII	**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota**
35.	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
36.	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
37.	Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB
XIV	**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**
38.	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
G	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**

XV	**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**
39.	Penyediaan biaya Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS
40.	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)
XVI	**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melaui Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga]**
41.	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PMDPPKB KABUPATEN TANAH DATAR

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA 2025 (TAHUN RENCANA)				CATT.PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	URUSAN BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR	KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
					NON URUSAN						**4,063,093,135**				**7,112,880,030**
2	**13.01**	**01**	**2**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**						**4,063,093,135**				**7,112,880,030**
2	13.01	**01**	2.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**3,354,000**				**44,500,000**
2	13.01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PMDPPKB	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMDPPKB	1 dokumen	804,000	DAU		1 dokumen	10,500,000
2	13.01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Dinas PMDPPKB	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Dokumen Hasil DPA-SKPD	Dinas PMDPPKB	5 dokumen	974,800	DAU		5 dokumen	14,000,000
2	13.01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PMDPPKB	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMDPPKB	4 dokumen	1,575,200	DAU		4 dokumen	20,000,000
2	13.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**						**3,680,607,065**				**5,966,380,030**
2	13.01	01	**2.02**	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Dinas PMDPPKB	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PMDPPKB	34 orang/bulan	3,679,932,265	DAU		34 orang/bulan	5,955,880,030
2	13.01	01	**2.02**	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas PMDPPKB	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMDPPKB	2 laporan	674,800	DAU		2 laporan	10,500,000
2	13.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**2,500,000**				**60,000,000**
2	13.01	01	**2.05**	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas PMDPPKB	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas PMDPPKB	7 orang	2,500,000	DAU		7 orang	60,000,000
2	13.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**56,599,070**				**434,000,000**
2	13.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas PMDPPKB	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PMDPPKB	1 paket	600,000	DAU		1 paket	14,000,000
2	13.01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Dinas PMDPPKB	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas PMDPPKB	1 paket	3,609,500	DAU		1 paket	80,000,000
2	13.01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMDPPKB	Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PMDPPKB	1 paket	1,749,800	DAU		1 paket	60,000,000
2	13.01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMDPPKB	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PMDPPKB	8 dokumen	1,220,000	DAU		8 dokumen	15,000,000
2	13.01	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Dinas PMDPPKB	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas PMDPPKB	1 laporan	1,356,500	DAU		1 laporan	55,000,000
2	13.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PMDPPKB	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PMDPPKB	1 laporan	48,063,270	DAU		1 laporan	210,000,000

2	13.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**121,285,700**					**253,000,000**
2	13.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMDPPKB	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMDPPKB	1 laporan	380,000	DAU		1 laporan		8,000,000
2	13.01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMDPPKB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMDPPKB	1 laporan	45,000,000	DAU		1 laporan		90,000,000
2	13	01	2	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas PMDPPKB	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMDPPKB	1 laporan	75,905,700	DAU		1 laporan		155,000,000
2	13.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**198,747,300**					**355,000,000**
2	13.01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas PMDPPKB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas PMDPPKB	66 unit	193,247,300	DAU		66 unit		260,000,000
2	13.01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PMDPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Dinas PMDPPKB	65 unit	3,500,000	DAU		65 unit		40,000,000
2	13.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas PMDPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMDPPKB	3 unit	2,000,000	DAU		3 unit		55,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**1,989,469,462**					**4,465,000,000**
2	**2.13**				**PROGRAM PEMBERDAYAAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**-**	**Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Rangka Peningkatana Kesejahteraan**			**1,452,024,950**					**3,520,000,000**
2	**2.13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**-**	**Terindentifikasi dan terinventarisasinya masyarakat hukum adat serta terfasilitasinya Nagari dalam pendataan peraturan nagari tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018)**			**1,452,024,950**					**3,520,000,000**
2	2.13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	- Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	1 dokumen	635,588,100	DAU		1 dokumen		100,000,000
2	2.13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	- Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tanah Datar	7 lembaga	752,328,800	DAU		7 lembaga		2,765,000,000
2	2.13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tanah Datar	2 dokumen	23,206,250	DAU		2 dokumen		175,000,000
2	2.13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tanah Datar	1 laporan	3,912,600	DAU		1 laporan		180,000,000
2	2.13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tanah Datar	1 laporan	36,989,200	DAU		1 laporan		300,000,000
2	13.03	03			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**			**Meningkatnya kerjasama nagari dan dengan dunia usaha/ lembaga**			**1,500,000**					**200,000,000**
2	13.03	03	2.01		**Fasilitasi kerjasama antar desa**						**1,500,000**					**200,000,000**
2	13.03	03	2.01	02	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	Tanah Datar	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Tanah Datar	3 dokumen	1,500,000	DAU		3 dokumen		200,000,000

2	13.04	04			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**			**535,944,512**					**745,000,000**
2	13.04	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**						**535,944,512**					**745,000,000**
2	13.04	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Tanah Datar	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tanah Datar	1 dokumen	8,341,000	DAU		1 dokumen		185,000,000
2	13.04	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Tanah Datar	6 dokumen	494,531,012	DAU		6 dokumen		200,000,000
2	13.04	04	2.01	05	Pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tanah Datar	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Tanah Datar	225 orang	29,072,500	DAU		225 orang		280,000,000
2	13.04	04	2.01	11	Fasilitasi peyusunan profil desa	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Tanah Datar	75 dokumen	4,000,000	DAU		75 dokumen		80,000,000
2	**2.14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6,975,881,672**					**9,803,765,000**
2	**2.14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKAN**			**9,408,230**					**225,000,000**
2	**2.14**	**02**	**2.01**		**Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**			**Terlaksananya Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk**			**9,408,230**					**225,000,000**
2	2.14	02	2.01	02	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	- Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tanah Datar	1 dokumen	6,478,250	DAU		1 dokumen		50,000,000
2	2.14	02	2.01	09	Advokasi, sosialiasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur formal dan informal	Tanah Datar	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Tanah Datar	6 Satuan pendidikan	2,929,980	DAU		6 Satuan pendidikan		175,000,000
											-					-
2	**2.14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**PASANGAN USIA SUBUR TIDAK INGIN ANAK LAGI (UNMEET NED) TIDAK TERLAYANI KB**			**4,636,034,692**					**9,069,150,000**
2	**2.14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal**			**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana**			**1,325,455,992**					**2,441,000,000**
2	2.14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tanah Datar	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanah Datar	14 unit	430,000,000	DAK		14 unit		250,000,000
2	2.14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Tanah Datar	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanah Datar	14 laporan	862,400,000	DAK		14 laporan		1,795,000,000
2	2.14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKPBPK	Tanah Datar	Terlaksananya pengendalian program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKPBPK	Tanah Datar	2 laporan	33,055,992	DAU		2 laporan		396,000,000
2	**2.14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**Terfasilitasinya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**1,814,596,700**					**2,083,000,000**
2	2.14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tanah Datar	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tanah Datar	1,000 Orang	1,814,596,700	DAU		1,000 Orang		2,083,000,000

2	**2.14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota**			**Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusian Alkont**			**1,128,732,000**				**3,506,150,000**
2	2.14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Tanah Datar	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tanah Datar	1 laporan	25,200,000	DAK		1 laporan	103,000,000
2	2.14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tanah Datar	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tanah Datar	1804 orang	885,647,000	DAK		1804 orang	1,207,000,000
2	2.14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB	Tanah Datar	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tanah Datar	1 unit	217,885,000	DAK/ DAU		1 unit	2,196,150,000
2	**2.14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**			**Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**			**367,250,000**				**1,039,000,000**
2	2.14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tanah Datar	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Tanah Datar	30 Kampung KB	367,250,000	DAK		30 Kampung KB	1,039,000,000
2	**2.14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**			**PERSENTASE KEAKTIFAN POKTAN**			**2,330,438,750**				**509,615,000**
2	**2.14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**			**Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**			**17,138,750**				**419,615,000**
2	2.14	04	2.01	06	Penyediaan biaya Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	Tanah Datar	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tanah Datar	14 kelompok	11,000,000	DAU		14 kelompok	200,000,000
2	2.14	04	2.01	07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Tanah Datar	- Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tanah Datar	1 laporan	6,138,750	DAU		1 laporan	219,615,000
2	**2.14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melaui Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga]**			**Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga**			**2,313,300,000**				**90,000,000**
	2.14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tanah Datar	- Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tanah Datar	1 laporan	2,313,300,000	DAK /DAU		1 laporan	90,000,000
					T O T A L						**13,028,444,269**				**21,381,645,030**

BAB IV
RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan. Sebagaimana Tabel Rencana Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 terlampir.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

KODE					URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA 2025				CATT.PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	URUSAN BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
					NON URUSAN				**4,063,093,135**				**7,112,880,030**
2	**13.01**	**01**	**2**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4,063,093,135**				**7,112,880,030**
2	13.01	**01**	2.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3,354,000**				**44,500,000**
2	13.01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMDPPKB	1 dokumen	804,000	DAU		1 dokumen	10,500,000
2	13.01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Dokumen Hasil DPA-SKPD	Dinas PMDPPKB	5 dokumen	974,800	DAU		5 dokumen	14,000,000
2	13.01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMDPPKB	4 dokumen	1,575,200	DAU		4 dokumen	20,000,000
2	13.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**				**3,680,607,065**				**5,966,380,030**
2	13.01	01	**2.02**	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PMDPPKB	34 orang/bulan	3,679,932,265	DAU		34 orang/bulan	5,955,880,030
2	13.01	01	**2.02**	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMDPPKB	2 laporan	674,800	DAU		2 laporan	10,500,000
2	13.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,500,000**				**60,000,000**
2	13.01	01	**2.05**	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas PMDPPKB	7 orang	2,500,000	DAU		7 orang	60,000,000
2	13.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**56,599,070**				**434,000,000**
2	13.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PMDPPKB	1 paket	600,000	DAU		1 paket	14,000,000
2	13.01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas PMDPPKB	1 paket	3,609,500	DAU		1 paket	80,000,000
2	13.01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PMDPPKB	1 paket	1,749,800	DAU		1 paket	60,000,000
2	13.01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PMDPPKB	8 dokumen	1,220,000	DAU		8 dokumen	15,000,000
2	13.01	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas PMDPPKB	1 laporan	1,356,500	DAU		1 laporan	55,000,000
2	13.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PMDPPKB	1 laporan	48,063,270	DAU		1 laporan	210,000,000

2	13.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**121,285,700**					**253,000,000**
2	13.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMDPPKB	1	laporan	380,000	DAU		1	laporan	8,000,000
2	13.01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMDPPKB	1	laporan	45,000,000	DAU		1	laporan	90,000,000
2	13	01	2	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMDPPKB	1	laporan	75,905,700	DAU		1	laporan	155,000,000
2	13.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**198,747,300**					**355,000,000**
2	13.01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas PMDPPKB	66	unit	193,247,300	DAU		66	unit	260,000,000
2	13.01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Dinas PMDPPKB	65	unit	3,500,000	DAU		65	unit	40,000,000
2	13.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMDPPKB	3	unit	2,000,000	DAU		3	unit	55,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**1,989,469,462**					**4,465,000,000**
2	**2.13**				**PROGRAM PEMBERDAYAAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Rangka Peningkatana Kesejahteraan**				**1,452,024,950**					**3,520,000,000**
2	**2.13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terindentifikasi dan terinventarisasinya masyarakat hukum adat serta terfasilitasinya Nagari dalam pendataan peraturan nagari tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018)**				**1,452,024,950**					**3,520,000,000**
2	2.13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanah Datar	1	dokumen	635,588,100	DAU		1	dokumen	100,000,000
2	2.13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tanah Datar	7	lembaga	752,328,800	DAU		7	lembaga	2,765,000,000
2	2.13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tanah Datar	2	dokumen	23,206,250	DAU		2	dokumen	175,000,000

2	2.13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tanah Datar	1	laporan	3,912,600	DAU		1	laporan	180,000,000
2	2.13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tanah Datar	1	laporan	36,989,200	DAU		1	laporan	300,000,000
2	**13.03**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Meningkatnya kerjasama nagari dan dengan dunia usaha/ lembaga**				**1,500,000**					**200,000,000**
2	13.03	03	2.01		**Fasilitasi kerjasama antar desa**					**1,500,000**					**200,000,000**
2	13.03	03	2.01	02	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Tanah Datar	3	dokumen	1,500,000	DAU		3	dokumen	200,000,000
2	**13.04**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**				**535,944,512**					**745,000,000**
2	13.04	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**					**535,944,512**					**745,000,000**
2	13.04	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tanah Datar	1	dokumen	8,341,000	DAU		1	dokumen	185,000,000
2	13.04	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Tanah Datar	6	dokumen	494,531,012	DAU		6	dokumen	200,000,000
2	13.04	04	2.01	05	Pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Tanah Datar	225	orang	29,072,500	DAU		225	orang	280,000,000
2	13.04	04	2.01	11	Fasilitasi peyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Tanah Datar	75	dokumen	4,000,000	DAU		75	dokumen	80,000,000
2	**2.14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**6,975,881,672**					**9,803,765,000**
2	**2.14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKAN**				**9,408,230**					**225,000,000**
2	**2.14**	**02**	**2.01**		**Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	**Terlaksananya Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk**				**9,408,230**					**225,000,000**
2	2.14	02	2.01	02	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tanah Datar	1	dokumen	6,478,250	DAU		1	dokumen	50,000,000
2	2.14	02	2.01	09	Advokasi, sosialiasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur formal dan informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Tanah Datar	6	Satuan pendidikan	2,929,980	DAU		6	Satuan pendidikan	175,000,000
										-					-

2	**2.14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**PASANGAN USIA SUBUR TIDAK INGIN ANAK LAGI (UNMEET NED) TIDAK TERLAYANI KB**				**4,636,034,692**					**9,069,150,000**
2	**2.14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal**	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana**				**1,325,455,992**					**2,441,000,000**
2	2.14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanah Datar	14	unit	430,000,000	DAK		14	unit	250,000,000
2	2.14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanah Datar	14	laporan	862,400,000	DAK		14	laporan	1,795,000,000
2	2.14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKPBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKPBPK	Tanah Datar	2	laporan	33,055,992	DAU		2	laporan	396,000,000
2	**2.14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Terfasilitasinya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**1,814,596,700**					**2,083,000,000**
2	2.14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tanah Datar	1,000	Orang	1,814,596,700	DAU		1,000	Orang	2,083,000,000
2	**2.14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusian Alkont**				**1,128,732,000**					**3,506,150,000**
2	2.14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tanah Datar	1	laporan	25,200,000	DAK		1	laporan	103,000,000
2	2.14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tanah Datar	1804	orang	885,647,000	DAK		1804	orang	1,207,000,000
2	2.14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tanah Datar	1	unit	217,885,000	DAK/ DAU		1	unit	2,196,150,000
2	**2.14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**	**Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB**				**367,250,000**					**1,039,000,000**
2	2.14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Tanah Datar	30	Kampung KB	367,250,000	DAK		30	Kampung KB	1,039,000,000

2	**2.14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**	**PERSENTASE KEAKTIFAN POKTAN**			**2,330,438,750**					**509,615,000**
2	**2.14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**			**17,138,750**					**419,615,000**
2	2.14	04	2.01	06	Penyediaan biaya Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tanah Datar	14 kelompok	11,000,000	DAU		14 kelompok		200,000,000
2	2.14	04	2.01	07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tanah Datar	1 laporan	6,138,750	DAU		1 laporan		219,615,000
2	**2.14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melaui Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga]**	**Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga**			**2,313,300,000**					**90,000,000**
	2.14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tanah Datar	1 laporan	2,313,300,000	DAK /DAU		1 laporan		90,000,000
					T O T A L				**13,028,444,269**					**21,381,645,030**

BAB V

RENCANA DAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pengadaan tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah berupa Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah lembaga teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah daerah dalam pelaksana teknis operasional yang merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan keluarga dengan memberdayakan serta melayani KB melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja ini memberi arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk masa 1 (satu) tahun ke depan yang terencana dan terkoordinasi secara harmonis.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar beserta pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang. Tentunya kedepan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan dapat memberi warna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dan terlaksananya percepatan pembangunan daerah pada tahun terakhir dan pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 dalam berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 4415030
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.7.2/12/PMDPPKB-2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyususunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanah Datar.

b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan sebagaimana tersebut huruf a di atas perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.7.2/12/PMDPPKB-2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.7.2/12/PMDPPKB-2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dan lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana tersebut diktum kesatu bertugas :
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Berdasarkan Renstra OPD.
4. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
5. Menelaah rancangan awal RKPD.
6. Perumusan Tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan tujuan dan sasaran daerah.
7. Menelaah usulan program dan kegiatan.
8. Perumusan kegiatan prioritas.
9. Penyajian Awal dokumen rancangan Renja OPD.

KETIGA : Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR

ABDURRAHMAN HADI, M.Si
NIP. 197907231998101001

Tembusan : Kepada Yth.
Yth. 1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan) di Batusangkar
2. Wakil Bupati Tanah Datar (sebagai laporan) di Batusangkar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.7.2/12/PMDPPKB-2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Abdurrahman Hadi, S.STP, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Herru Rachman, S.STP, MM	Sekretaris	Wakil Penanggungjawab
3.	Mauliddia Siska, S.Sos	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.	Rifka Akbar, S.STP, MM	Kabid Pemerintahan dan Keuangan	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Keuangan
5.	Reri Warman, SKM	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB	Koordinator Bidang PPKB
6.	Yendrizal	Perencana Ahli Muda	Anggota
7.	Lisa Sukmawati, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR

ABDURRAHMAN HADI, M.Si
NIP. 197907231998101001

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANAH DATAR

JALAN SOEKARNO HATTA NO 10A

BATUSANGKAR

KATA PENGANTAR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk berdasarkan PERDA Kabupaten Tanah Datar Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada RPJMD 2021-2026 dan Rencana Stategis (Renstra) Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 serta dokumen perencanaan lainnya.

Untuk mengetahui gambaran pelaksana program/kegiatan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagai upaya Pemantapan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka telah disusun Rencana Kerja (RENJA), yang sekaligus merupakan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan pertama dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026.

Penyusunan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara umum disusun dengan menggunakan narasi dan secara deskriptif diformulasikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, Aalisis Kienerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan awal SKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Penulisan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tentunya diharapkan merupakan penyempurnaan dari penyusunan RENJA tahun yang lalu, namun untuk kesempurnaan yang lebih baik dimasa datang sangat diperlukan saran dan masukan yang sifatnya konstruktif.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RENJA ini disampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga sehingga dapat terwujud laporan ini.

Batusangkar, Agustus 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. ARMEN YUDI, M.Si
NIP. 19681229 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SK KEPALA DISDUKCAPIL KAB. TANAH DATAR NOMOR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.
- 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA K/L
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

- 5.1 KESIMPULAN

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Soekarno-Hatta No. 10 A Batusangkar, Telp. (0752) 574420- Fax.
BATUSANGKAR 27211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 400.12.1/024/DUKCAPIL –TD/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ,

Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dengan menetapkannya dalam Peraturan Kepala Dinas ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah .....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 400.12.150/024/DUKCAPIL-TD/2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);

14.Peraturan Bupati .....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 400.12.1/034/DUKCAPIL-TD/2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024

14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini :

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud diktum kesatu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatif masyarakat

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2025

KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan /atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab sepenuhnya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Agustus 2024
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. ARMEN YUDI, M.Si
NIP. 19681229 198903 1 006

Tembusan Yth :
1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten dan sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional.

Untuk melaksanakan program yang ada dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra), Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD, yang meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rencana awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir hingga penetapan yang memuat program RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selanjutnya Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan OPD selama 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan disinkronkan dengan Renstra SKPD.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baiksejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat diera globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang saat ini telah mengalami perubahan. Dan itu merupakan hal yang wajar, seharusnya dapat direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalampenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Program RPJMD urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertampung dalam program dan kegiatan yang diwujudkandalam visi dan misi Dinas Dukcapilyang menjadi RENSTRA Dinas. Pelaksanaan Visi dan Misi dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas dalam bentuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 (selanjutnya disebut Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar) yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Kerjatahun 2025 dilakukan berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang berorientasi pada proses dan hasil yangingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421;

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4817);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6178);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);

n. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana KerjaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiltahun 2025 disusun dengan maksudagar perencanaan, program dan kegiatan dapat terlaksana dan terarah sesuai visi dan misi Dinas.

Rencana KerjaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiltahun 2025 bertujuan agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana kegiatan tahun 2025 yang dapat merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengansistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANANPERANGKAT DAERAH

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA K/L

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Sesuai dengan pengalokasian anggaran tahun 2023 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan *5 program, 15 kegiatan dan 27 sub kegiatan.* Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu adalah untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan seberapa besar realisasi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1 (T-C.29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
2	**12**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
2	12	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	5	Dokumen	100%
2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	Laporan	5	Laporan	100%
2	**12**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/ bulan	22	Orang/ bulan	21	Orang/ bulan	21	Orang/ bulan	100%	21	Orang/ bulan	21	Orang/ bulan	100%
2	12	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	2	Laporan	100%
2	**12**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**															
2	12	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	18	1	Orang	15	Orang	1	Orang	7%	21	Orang/ bulan	21	Orang/ bulan	100%
2	12	1	2	5	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	130	Orang	0	Orang	130	Orang	0	Orang	0%	130	Orang	130	Orang	100%
2	**12**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	1	Paket	100%
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	Paket	3	Paket	1	Paket	33%	3	Paket	3	Paket	100%
2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	1	Paket	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)				Target Program dan Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	4	Paket	100%
2	12	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
2	12	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%
2	12	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%					
2	**12**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
2	12	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	Unit	5	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	12	Unit	12	Unit	100%
2	12	01	2	07	09	Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0%					
2	**12**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%
2	**12**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
2	12	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	12	Unit	100%
2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	34	Unit	34	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	Unit	35	Unit	100%
2	12	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit						1	Unit	1	Unit	100%
2	12	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	2	Unit	100%
2	**12**	**02**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**															
2	**12**	**02**	**2**	**01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**															
2	12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5	Dokumen	5	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	5	Dokumen	5	Dokumen	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)				Target Program dan Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2	12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk												-		
2	**12**	**02**	**2**	**02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**															
2	12	02	2	02	02	Pengadaan dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendafataran penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia												-		
2	**12**	**02**	**2**	**03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**															
2	**12**	**02**	**2**	**02**		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendafatataran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10	Dokumen	10	Dokumen	22	Dokumen	22	Dokumen	100%	20	Dokumen	20	Dokumen	100%
2	12	02	2	03	03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
2	12	02	2	03	07	Komunikasi, Informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendafataran penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	75	Orang	75	Orang	75	Orang	75	Orang	100%	75	Orang	75	Orang	100%
2	**12**	**03**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**															
2	**12**	**03**	**2**	**01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**															
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen Atas Pelaporan Peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting												-		
2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5	Layanan	5	Layanan	5	Layanan	5	Layanan	100%	5	Layanan	5	Layanan	100%
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**															
2	**12**	**04**	**2**	**01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**															
2	12	04	2	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	38	Dokumen	38	Dokumen	38	Dokumen	38	Dokumen	100%	38	Dokumen	38	Dokumen	100%
2	**12**	**04**	**2**	**03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											-				
2	12	04	2	03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dlm penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												-		
2	12	04	2	03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%
2	12	04	2	03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Adminduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												-		
2	**12**	**04**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Adminduk**													-		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)				Target Program dan Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2	12	04	2	04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pendayagunaan data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pendayagunan data Kependudukan												-		
2	**12**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**															
2	**12**	**05**	**2**	**01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**															
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lainnya	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	3	Dokumen	100%

Penempatan program dan kegiatan Tahun 2023 disusun berdasarkan/ disesuaikan dengan pembagian tugas pokok dan fungsi:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang telah rampung dibuat dan telah dilaksanakan kegiatan dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   Dana dianggarkan Rp.5.999.900,00 dengan realisasi Rp.5.980.100,00 atau 99,67% dan fisik 100%.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, Pergeseran Anggaran tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2023 telah rampung dibuat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

   Dana dianggarkan Rp.9.443.364,00 dengan realisasi Rp.9.414.700,00 atau 99,70% dan fisik 100%.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

   Output dari kegiatan ini adalah Laporan Kinerja (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2023. Pembuatan laporan-laporan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habis tahun berjalan (setelah 31 Desember 2022), semua laporan telah dapat diselesaikan

   Dana dianggarkan Rp.8.971.500,00 dengan realisasi Rp.8.969.500,00 atau 99,98% dan fisik 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Disdukcapil Tahun 2023 untuk 21 orang.

   Dana dianggarkan Rp.2.462.376.306,00 dengan realisasi Rp.2.434.186.745,00 atau 98,86% dan fisik 100%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyusunan laporan keuangan juga serupa dengan laporan kinerja, dibuat setelah 31 Desember 2022. Mulai tanggal 5 Januari 2023 telah mulai dilakukan pengumpulan bahan dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022.

Dana dianggarkan Rp.7.558.600,00 dengan realisasi Rp.7.558.600,00 atau 100% dan fisik 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Realisasi kegiatan ini berupa diikutinya Bimtek Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (MRSPBE) untuk 1 orang, bertempat di BPSDM Provinsi Sumbar dan diselenggarakan oleh GTA Provinsi Sumbar

Dana dianggarkan Rp.1.180.000,00 dengan realisasi Rp.1.180.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor.

Realisasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi dengan baik

Dana dianggarkan Rp.1.996.000,00 dengan realisasi Rp.1.993.000,00 atau 99,85% dan fisik 100%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi kinerja sesuai dengan terget kebutuhan akan bahan alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer (catridge, tinta), untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terpenuhi dengan baik.

Dana dianggarkan Rp.3.350.000,00 dengan realisasi Rp.3.350.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor

Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar terpenuhi dengan baik.

Dana dianggarkan Rp.40.000.000,00 dengan realisasi Rp.39.989.000,00 atau 99,97% dan fisik 100%.

d. Sub Kegiatan Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Realisasi kinerja sesuai dengan target, berupa cetak Kwitansi, cetak formulir, cetak Bon Minyak NCR, cetak lembar disposisi, cetak Map Kop Dinas dan penggandaan terpenuhi dengan baik

Dana dianggarkan Rp.21.525.851,00 dengan realisasiRp.21.525.700,00 atau 100% dan fisik 100%.

e. Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan penyediaan bahan bacaan berupa Koran/ surat kabar harian dan mingguan terlaksana dengan baik

Dana dianggarkan Rp.5.044.000,00 dengan realisasi Rp.5.025.000,00 atau 99,62% dan fisik 100%.

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik

Dana dianggarkan Rp.9.970.400,00 dengan realisasi Rp.9.970.400,00 atau 100% dan fisik 100%.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana dengan baik

Dana dianggarkan Rp.88.466.754,00 dengan realisasi Rp.88.451.548,00 atau 99,98% dan fisik 100%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 3 (tiga) paket alat perekaman KTP-el Enrollment, 2 (dua) unit Filling Kabinet, 1 (satu) unit alat penghancur kertas, 1 (satu) unit Kamera, dan 1 (satu) unit alat Podcast

Dana dianggarkan Rp.328.400.000,00 dengan realisasi Rp.328.400.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
      Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan.
      Dana dianggarkan Rp.1.620.000,00 dengan realisasi Rp.1.620.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
   b. Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
      Realisasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancar.
      Dana dianggarkan Rp.201.690.018,00 dengan realisasi Rp.193.760.191,00 atau 96,07% dan fisik 100%.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Realisasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan kantor terlaksana selama 1 tahun.
      Dana dianggarkan Rp.3.500.000,00 dengan realisasi Rp.3.500.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan penyediaan jasa pemelihraan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional
      Realisasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 6(enam) unit kendaraan dinas roda empat dan 6(enam) unit kendaraan dinas roda dua dan semua pajak kendaran dinas baik roda empat maupun roda dua telah dibayar lunas dan tepat waktu.
      Dana dianggarkan Rp.114.169.650,00 dengan realisasi sebesar Rp.114.036.088,00 atau 99,88% dan fisik 100%.
   b. Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
      Sub kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan 5(lima) unit PC, 5 (lima) unit Laptop,5 (lima) unit printer, 5(lima) unit AC
      Dana dianggarkan Rp.20.000.000,00 dengan realisasi Rp.20.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini terealisasi berupapembayaran honor 2 (dua) orang THL, perbaikan atap ruangan pelayanan, serta perbaikan WC.

Dana dianggarkan Rp.97.898.000,00 dengan realisasi Rp.94.797.850,00 atau 96,83% dan fisik 100%

II. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

a. Sub Kegiatan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk

Sub kegiatan ini terealisasi berupapembayaran honorarium 6(enam) orang THL, penerbitan (KTP-el) 23.889 keping, perekaman (KTP-el) 4.178 jiwa, penerbitan KK Nasional 33.520 KK, Kartu identitas Anak (KIA) 9.472 keping, penerbitan surat pindah 18.341 lembar, penerbitan surat datang 12.034 lembar, penerbitan dispensasi pindah dan datang 365 kk.

Dana dianggarkan Rp.165.000.000,00 dengan realisasi Rp.161.008.750,00 atau 97,58% dan fisik 100%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk

a. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Sub kegiatan ini terealisasi berupa terbayarkannya honorarium Tim Administrasi Kependudukan dan dukungan layanan perekaman KTP-el secara yanling

Dana dianggarkan Rp.235.022.500,00 dengan realisasi Rp.221.283.500,00 atau 94,15% dan fisik 100%.

b. Sub Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk

Sub kegiatan ini terealisasi dengan tersedianya Video Layanan Administrasi Kependudukan

Dana dianggarkan Rp.15.380.000,00 dengan realisasi Rp.15.380.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

III. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan pencatatan Sipil

      Sub kegiatan ini tidak terealisasi berupa pembayaran honorarium 5 (lima) orang THL, penerbitan akta kelahiran sebanyak 107.944 akat, pencetakan 2 akta perkawinan non muslim, penerbitan 1.046 akta kematian.

      Dana dianggarkan Rp.144.913.000,00 dengan realisasi Rp.142.602.210,00 atau 98,41% dan fisik 100%.

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database Kependudukan
   a. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

      Sub kegiatan ini terealisasi berupapenandatanganan naskah perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan38 (tiga puluh delapan) OPD.
      dengan realisasi Rp.9.964.500,00 atau 100% dan fisik 100%.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

      Sub kegiatan ini terealisasi berupa dukungan Akses SIAK di Nagari dan Keamanan Aplikasi OASE DUKCAPIL

      Dana dianggarkan Rp.9.790.000,00 dengan realisasi Rp.9.970.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

V. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan.Penyusunan Profil Kependudukan
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

      Sub kegiatan ini terealisasi berupa pencetakan buku agregat kependudukan dan buku profil kependudukan

      Dana dianggarkan Rp.39.388.000,00 dengan realisasi Rp.39.334.000,00 atau 99,86% dan fisik 100%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANANPERANGKAT DAERAH

Motto pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar adalah "CERMAT" (Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Akurat dan Transparan), dari motto pelayanan ini diharapkan hal sebagai berikut:

1. Dapat melayani masyarakat yang lebih profesional, efektif, efisien, dan transparan.
2. Tuntutan terhadap aparat yang lebih profesional dan beretika dalam pelayanan.
3. Aparatur dapat berprilaku melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana dan terbuka serta bertanggung jawab.

Untuk mendorong tercapainya Program Unggulan Bupati Tanah Datar yang terdapat pada point 4, berbunyi yaitu "Peningkatan layanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten"
Dalam menerapkan progul Bupati tersebut telah sejalan dengan VisiDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Tanah Datar, yaitu:
"Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Masyarakat"

Agar terwujudnya Visi Dinas, maka disusun Misi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima dan dekat dengan masyarakat
2. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk
3. Mewujudkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir
4. Mewujudkan masyarakat sadar administrasi kependudukan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi agar dapat diterima oleh pemangku kepentingan,maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah melakukan beberapa upaya perbaikan sistim dan prosedur pelayanan antara lain:
Menetapkan Standar Pelayanan yang berbasis online **"Trisula Dukcapil Membahana (Tiga Sistem Utama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Membahagiakan Masyarakat Tanah Datar)"** ,

website oasedukcapil.tanahdatar.go.id,Whats App no. 08116600678, dan pemberdayaan PRN(Petugas Registrasi Nagari).

Hal ini merupakan tindak lanjut program Dukcapil Go Digital dari Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mulai dicanangkan pada akhir tahun 2019.

a. Menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan standar Pelayanan yang baru, agar pemohon lebih tertib, teratur dan dapat dilayani dengan adil.
b. Menghimbau, menyarankan dan memberi edukasi pada masyarakat untuk melakukan sendiri pengurusan dokumen kependudukan secara online.
c. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dengan stakeholder seperti Wali Nagari, Camat, KUA, Rumah Sakit Umum , Puskesmas, dan Rumah Sakit Bersalin Swasta, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Tanah Datar, Pengadilan Agama Batusangkar dan Kota Padang Panjang serta Kantor Imigrasi Bukittinggi, dalam pelayanan adminduk yang terintegrasi.
d. Meningkatkan kualitas SDM ASN Dukcapil, operator KTP-el Kecamatan dan Petugas Registrasi Nagari dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan online dengan memberikan Bimtek.
e. Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas Standar Pelayanan yang dilaksanakan, pada tahun 2023
f. Meningkatkan predikat kepatuhan yang di nilai oleh Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat terhadap kepatuhan standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

TABEL 2.2 (T-C.30)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Dukcapil					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024 + 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Penduduk yang wajib yang telah memiliki KTP-el			100%	100%	100%	100%	100%	96.43%	98.58%	98.62%	100%	
2	Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran			95%	97%	98%	99%	100%	96.58%	97.93%	98.31%		
3	Persentase penduduk yang meninggal memiliki akta kematian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Jumlah Anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)			30%	40%	50%	60%	70%	31.64%	51.02%	50.66%	99.88%	
5	Persentase Penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	15 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan administrasi kependudukan			86%	88%	90%	92%	95%		92.46%	90,44%	95%	
8	Rata-rata lama waktu pengurusan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, Akta, dll)			1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
9	Predikat Akuntabilitas Kinerja				BB (74)	BB (75)	BB(76)	BB (77)	BB (74,21)	BB (74,40)	BB (74,70)	BB (75)	
10	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan			1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	18 Inovasi	22 Inovasi	28 Inovasi	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD sebagai berikut:

1. Persentase Penduduk yang wajib yang telah memiliki KTP-el
   Jumlah capaian kepemilikan KTP-el sampai triwulan IV Tahun 2023, sebesar 98,62%, didapatkan dari besaran realisasi penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP-el dibagi dengan jumlah wajib KTP-el keseluruhan, percepatan capaian kinerja perekaman dapat dilakukan melalui perekaman keliling ke sekolah-sekolah SLTA sederajat, pelayanan terhadapat masyarakat berkebutuhan khusus seperti Odgj, Sakit, cacat dan lansia serta percepatan pelayanan yang dilakukan di 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.
2. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran
   Jumlah capaian kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sampai triwulan IV Tahun 2023, sebesar 98,31% didapatkan dari besaran realisasi kepemilikan akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak usia 0-18 tahun, percepatan capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran melalui pelayanan secara on-line, pelayanan melalui PRN, pelayanan melalui RSU, RS Bersalin, Puskesmas dan Klinik bersalin.
3. Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian
   Jumlah capaian kepemilikan akta kematian sampai triwulan IV Tahun 2023, sebesar 100% didapatkan dari besaran realisasi jumlah akta kematian yang diterbitkan bagi jumlah kematian yang dilaporkan, percepatan capaian kinerja kepemilikan akta kematian melalui pelayanan secara online dan pelayanan laporan harian yang disampaikan oleh PRN.
4. Persentase jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
   Jumlah capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai triwulan IV Tahun 2023, sebesar 50,66%, di dapatkan dari besaran realisasi dokumen KIA yang dicetak dibagi dengan jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari (wajib KIA), percepatan capaian kepemilikan KIA melalui pelayanan secara online yang dilakukan oleh guru-guru SD dan SLTP sederajat.
5. Pesentase penduduk yang telah memiliki akta perkawinan
   Jumlah capaian kepemilikan Akta Perkawinan sampai triwulan IV Tahun 2023, sebesar 100%, hal ini didapatkan dari jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang dilaporkan, percepatan capaian kepemilikan akta perkawinan melalui sosialisasi dan pelayanan secara langsung dan tatap muka.

6. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama

   Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, sudah ada 38 OPD yang memanfaatkan data kependudukan yang ditandai dengan penandatangan 38 Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
7. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui link://bit.ly/survey-IKM-2022 dengan nilai yang diperoleh 90,44%, penilaian IKM ini dilakukan untuk periode 1 Juli s/d 31 Desember 2023
8. Rata-rata lama waktu pengurusan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, Akta, dll)

   Dengan penerapan tiga model pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yaitu: website oasedukcapil (https://oasedukcapil.tanahdatar.go.id), WhatApp 08116600678, dan Petugas Registrasi Nagari, sehingga target kinerja rata-rata lama waktu pengurusan dokumen kependudukan dapat terealisasi selama 1 hari/bisa ditunggu, dan pengiriman dokumen secara online dalam bentuk pdf
9. Inovasi yang diterapkan dan dikembangkan

   Dari 18 Inovasi yang telah diterapkan dan dikembangkan oleh Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 2023 ada tambahan 4 Inovasi baru yang mengusung antara lain:

   - MUDA SAKA UTAMI (Mutakhirkan Data Status Kawin utk Tanah Datar Madani)
   - BAJOJO (Buat Akta dari Jorong ke Jorong)
   - PANDU KOBARAN RINDU (Penerbitan Dokumen Kependudukan Korban Bencana dan Kebakaran Ringankan Duka)
   - PAKET SMART PAPA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Tanah datar Selesaikan Masalah Anti Ribet dan Terpadu Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Batusangkar)

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Menyikapi Perkembangan dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan tuntasnya data kependudukan yang terintegrasi dan dipedomani oleh semua pihak, maka dapat dihimpun beberapa Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan selama tahun 2023 sebagai berikut :

Mendekatkan pelayanan Dukcapil secara online pada masyarakat.

a. Meningkatkan jalinan kerjasama pemanfaatan data Dukcapil pada OPD melalui perjanjian kerjasama.
b. Melakukan sosisalisasi pemanfaatan data bagi instansi pengguna, khusus registrasi data penduduk untuk urusan kesehatan, sosial, perbankan, dll.
c. Menyarankan dan mengharuskan OPD pengguna memanfaatkan Smart Card Reader dalam membaca data penduduk.
d. Melakukan pemutakhiran data penduduk dengan mengoptimalkan kinerja Petugas Registrasi Nagari.
e. Optimalisasi pelayanan online administrasi kependudukan melalui sosialisasi dan publikasi pelayanan Dukcapil di ujung jari.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Secara umum Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 yang terdiri dari program dan kegiatan sesuai tabel terlampir :

TABEL 2.4 (Tabel T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS AKHIR						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**8,621,438,596**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4,352,972,443**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**8,621,438,596**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**4,352,972,443**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**7,551,438,596**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3,736,108,043**	
I	***Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah***					***38,000,000***	***Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah***					***16,437,998***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukcapil	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukcapil	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10,754,664	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dukcapil	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	13,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dukcapil	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	-	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Tersedianyan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	16,000,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Tersedianyan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5,683,334	
II	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***					***4,599,438,596***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***					***2,810,188,493***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	4,575,938,596	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2,805,128,493	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukcapil	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	23,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukcapil	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,060,000	
III	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***					***445,000,000***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***					***62,500,000***	
1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dukcapil	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	100,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dukcapil	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2,500,000	
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dukcapil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	130 Orang	345,000,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dukcapil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	90 Orang	60,000,000	
IV	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***					***1,197,000,000***	***Administrasi Umum***					***306,901,252***	
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dukcapil	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	735,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dukcapil	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200,000,000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS AKHIR						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukcapil	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukcapil	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1,996,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik	Dukcapil	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75,000,000	Penyediaan Bahan Logistik	Dukcapil	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,901,834	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dukcapil	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	65,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dukcapil	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dukcapil	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dukcapil	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Dukcapil	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20,000,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Dukcapil	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8,000,000	
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dukcapil	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	275,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dukcapil	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76,003,418	
8							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis elektronik pada SKPD	Dukcapil	Terlaksananya Duakungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen (APA SNI ISO/IEC 27701)	-	
V	***Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah***					***400,000,000***	***Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah***					***136,450,000***	
1							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ atau Kendaraan Dinas/ Jabatan	Dukcapil	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/ Jabatan yang disediakan	-	-	
2	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Dukcapil	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit alat perekaman Enrollment (alat perekaman KTP el Kec), 4 unit laptop, dan 4 unit PC	400,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dukcapil	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit alat perekaman Enrollment (alat perekaman KTP-el Kec), 1 unit laptop, dan 1 paket CCTV IP CAM	136,450,000	
3	Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Dukcapil	tersedianya Gedung Kantor an Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bagnunan Lainnya Yang disediakan		-	
VI	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***					***465,000,000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***					***210,677,500***	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dukcapil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dukcapil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,620,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet	Dukcapil	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	245,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet	Dukcapil	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	205,557,500	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dukcapil	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	215,000,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dukcapil	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,500,000	
VII	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***					***407,000,000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***					***192,952,800***	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS AKHIR						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak. dan perizinan kendaran dinas/operasional atau lapangan	Dukcapil	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit kendaraan roda 4, dan 6 unit kendaraan roda 2	235,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak. dan perizinan kemdaran dinas/operasional atau lapangan	Dukcapil	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit kendaraan roda 4, dan 6 unit kendaraan roda 2	125,000,000	
2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dukcapil	Terlaksannya Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	115,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dukcapil	Terlaksannya Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	57,952,800	
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dukcapil	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	34 Unit	50,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dukcapil	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	24 Unit	10,000,000	
4	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Dukcapil	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	2 Unit	7,000,000	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Dukcapil	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara		-	
B	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**580,000,000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**470,830,400**	
I	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***					***275,000,000***	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***					***163,330,400***	
1							Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Tersedianya Pendataan penduduk Non Perma nen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	5,000,000	
2	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dukcapil	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	275,000,000	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dukcapil	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	158,330,400	
II	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***					***305,000,000***	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***					***307,500,000***	
1	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendafataran penduduk	Dukcapil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	20 Dokumen	225,000,000	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendafataran penduduk	Dukcapil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	305,500,000	
2	Komunikasi , informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	Dukcapil	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kpd Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	75 Orang	80,000,000	Komunikasi , informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	Dukcapil	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kpd Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	100 Orang	2,000,000	
C	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**205,000,000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**136,942,000**	
I	***Pelayanan Pencatatan Sipil***					***205,000,000***	***Pelayanan Pencatatan Sipil***					***136,942,000***	
1							Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas Pelaporan peristiwa Penting	Dukcapil	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas pelaporan peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 Dokumen	5,000,000	
2	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Dukcapil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	205,000,000	peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Dukcapil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	131,942,000	
3							Bimbingan Tekhnis terkait Pencatatan Sipil	Dukcapil	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Terkait Pencatatan Sipil		-	
D	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**160,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**8,200,000**	
I	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan***					***85,000,000***	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan***					***1,500,000***	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS AKHIR					CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dukcapil	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	39 Dokumen	85,000,000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dukcapil	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	398 Dokumen	1,500,000	
II	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan***					***75,000,000***	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan***					***6,700,000***	
1	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dukcapil	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	75,000,000	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dukcapil	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	6,700,000	
E	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**125,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**892,000**	
I	***Penyusunan Profil Kependudukan***					***125,000,000***	***Penyusunan Profil Kependudukan***					***892,000***	
1	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dukcapil	Tersusunnya Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lainnya	Jumlah Dokumen Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lainnya	3 Dokumen	125,000,000	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dukcapil	Tersusunnya Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lainnya	Jumlah Dokumen Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lainnya	3 Dokumen	892,000	

Dari hasil analisis akhir dari rancangan RKPD Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, ada beberapa penambahan sub kegiatan dari sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra OPD diantaranya:

1. Penambahan sub kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan ditujukan untuk mendata penduduk Tanah Datar yang berdomisili dan bekerja di luar Tanah datar, demi terciptanya data kependudukan yang akurat.
2. Penambahan Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini dititik beratkan pada pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan Buku Pokok Pemakaman (BPP) demi tercapainya tertib adminsitrasi dan validitas data kependudukan

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerah. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melaui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Nagari, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten Tanah Datar hingga tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang yang telah di usulkan melalui Aplikasi SIPD oleh pihak Nagari/ Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Bappeda dab Litbang Kabupaten Tanah Datar. Usulan tersebut akan diteruskan ke OPD terkait untuk dilakukan Penyusunan Renja OPD tersebut. Namun untuk Tahun 2024 tidak terdapat usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Datar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA K/L

Diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendukung semangat perubahan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 dan 109 Tahun 2019. Perubahan Perundang-undang ini, secara garis besar akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat,adapun perubahan kebijakan-kebijakan tersebut adalah sbb :

a. Data Dinas Dukcapil merupakan satu-satunya data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: alokasi anggaran, Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum dan pencegahan kriminal.
b. Seluruh Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) mulai dari tingkatan Jorong, Nagari, Kecamatan sampai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini akan mendorong dalam pengurusan Dokumen Kependudukan,sehingga penduduk memiliki dokumen adminduk.
c. Pelayanan pencetakan KTP Elektronik mulai tahun 2015 tidak lagi dipusatkan di Kementerian Dalam Negeri tetap dilimpahkan ke Kabupaten/Kota, sehingga proses pelayanan Perekaman dan pencetakan sudah dapat dilakukan lebih cepat di Daerah masing-masing.
d. Masa berlakunya KTP Elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup, hal ini akan memudahkan masyarakat dan menghemat Anggaran Pemerintah.
e. Pelayanan yang berbasis online **"Trisula Dukcapil Membahana (Tiga Sistem Utama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Membahagiakan Masyarakat Tanah Datar)"** , melalui Whats App no. 08116600678, website oasedukcapil.tanahdatar.go.id, dan pemberdayaan PRN(Petugas Registrasi Nagari).

   Hal ini merupakan tindak lanjut program Dukcapil Go Digital dari Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mulai dicanangkan pada akhir tahun 2019.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.2.1 *Tujuan*

Tujuan merupakan penjabaran Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai yang dapat mendukung program unggulan Bupati yaitu : Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan untuk wilayah yangjauh dari ibukota kabupaten. Tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar diperoleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan Misi. Hasil analisis silang tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan strategis adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien".

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dan terukur yang akan dicapai. Penetapan sasaran diperlukan untuk penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam pelaksanaan operasional kegiatan tiap tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kemudian dari masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran terkait secara terukur dan terkonsentrasi, penjabaran singkat mengenai sasaran adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.2.2.2 Meningkatnyakualitas pelayanan publik

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

	TUJUAN		SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.	1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam salah satuMisi Kabupaten Tanah Datar adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien yaitu Peningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk melakukan berbagai terobosan demi terwujudnya tujuan Misi tersebut, diantaranya:

1. Pemeliharaan dan penggantian alat-alat perekaman dan pencetakan KTP-el di Kecamatan secara bertahap.

   Alat-alat perekaman KTP-el yang berada di Kecamatan rata-rata sudah dimanfaatkan melebihi masa ekonomis peralatan tersebut, sehingga beberapa dari alat-alat tersebut tidak dapat bekerja secara optimal.Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pemeliharaan dan penggantian sehingga nantinya alat-alat tersebut dapat bekerja secara optimal.Pemeliharaan dan penggantian alat perekaman dan pencetakan KTP-el yang berada di Kecamatan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dalam hal ini untuk tahun pertama ini akan di prioritaskan bagi Kecamatan terluar di Kabupaten Tanah Datar
2. Percepatan penyelesaian perekaman KTP-el Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan satu terobosan dalam mencapai percepatan penyelesaian perekaman KTP-el dengan melakukan inovasi untuk melakukan perekaman secara mobile, sehingga pelayanan dapat dilakukan sampai kepelosok Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, pelayanan door to door.
3. Peningkatan sumber daya aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

   Peningkatan sumber daya aparatur memang sangat dibutuhkan baik pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri, sumber daya aparatur Kecamatan sampai kepada sumber daya aparatur yang ada di Nagari. Hal ini kita lakukan melalui bimtek dan pelatihan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun sehingga regenerasi aparatur tidak akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat

4. Melakukan pemutakhiran data kependudukan dengan melibatkan koordinasi kerja dengan Petugas Registrasi Nagari dengan memaksimalkan monitoring dan evaluasi.
5. Pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Pemanfaatan data secara optimal oleh lembaga-lembaga/ instansi pengguna lainnya yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan optimalisasi pemanfaaatan fungsi elektronik KTP-el melalui penggunaan smartcard reader (alat pembaca) KTP-el, diharapkan dapat membantu berbagai program daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga program dan kegiatan tersebut dapat tepat sasaran dan tepat guna

Untuk mewujudkan terobosan di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjabarkannya dalam beberapa kegiatan yang berasal dari APBD tahun anggaran 2025 diantaranya:

TABEL 3.3 (T-C.33)

RUMUSAN/RENCANA/PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4		6	7	8	9	10	11
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**4,352,972,443**			**10,453,938,596**
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4,352,972,443**			**10,453,938,596**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,736,108,043**			**8,678,938,596**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**16,437,998**			**54,500,000**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukcapil	8 Dokumen	APBD	10,754,664		8 Dokumen	25,000,000
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukcapil	0 Dokumen	APBD	-		5 dokumen	13,500,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianyan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	3 Laporan	APBD	5,683,334		3 Laporan	16,000,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**2,810,188,493**			**4,599,438,596**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	22 Orang/bulan	APBD	2,805,128,493		22 Orang/bulan	4,575,938,596
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukcapil	2 Laporan	APBD	5,060,000		2 Laporan	23,500,000
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**62,500,000**			**435,000,000**
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dukcapil	2 Orang	APBD	2,500,000		18 Orang	100,000,000
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dukcapil	90 Orang	APBD	60,000,000		150 Orang	335,000,000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**306,901,252**			**1,508,000,000**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Dukcapil	1 Paket	APBD	1,996,000		1 Paket	15,000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukcapil	2 paket	APBD	200,000,000		2 paket	750,000,000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dukcapil	1 Paket	APBD	10,901,834		1 Paket	85,000,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukcapil	3 Paket	APBD	10,000,000		3 Paket	75,000,000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	12	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dukcapil	0 Dokumen	APBD	-		4 Dokumen	13,000,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dukcapil	1 Laporan	APBD	8,000,000		1 Laporan	20,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukcapil	1 Laporan	APBD	76,003,418		1 Laporan	275,000,000
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukcapil	0 Dokumen (APA SNI ISO/IEC 27701)	APBD	-		1 Dokumen (APA SNI ISO/IEC 27701)	275,000,000
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**136,450,000**			**1,400,000,000**
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dukcapil		APBD	-		2 unit	1,000,000,000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukcapil	1 unit alat perekaman Enrollment (alat perekaman KTP-el Kec), 1 unit laptop, dan 1 paket CCTV IP CAM	APBD	136,450,000		2 unit alat perekaman/pencetakan KTP-el, 2 unit laptop, dan 2 unit PC	400,000,000
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dukcapil		APBD	-			
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**210,677,500**			**265,000,000**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukcapil	1 Laporan	APBD	1,620,000		1 Laporan	5,000,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukcapil	1 Laporan	APBD	205,557,500		1 Laporan	245,000,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukcapil	1 Laporan	APBD	3,500,000		1 Laporan	15,000,000
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**192,952,800**			**417,000,000**
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukcapil	6 unit kendaraan roda 4, dan 6 unit kendaraan roda 2	APBD	125,000,000		6 unit kendaraan roda 4, dan 6 unit kendaraan roda 2	235,000,000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Dukcapil	24 Unit	APBD	10,000,000		34 Unit	50,000,000
2	12	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	Dukcapil		APBD	-		1 Unit	7,000,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksannya Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukcapil	2 unit	APBD	57,952,800		2 unit	125,000,000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**470,830,400**			**730,000,000**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**						**163,330,400**			**425,000,000**

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	**12**	**02**	**2.01**	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	Dukcapil	1 Dokumen	APBD	5,000,000		1 Dokumen	150,000,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan , penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	5 Dokumen	APBD	158,330,400		5 Dokumen	275,000,000
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**						**307,500,000**			**305,000,000**
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	6 Dokumen	APBD	305,500,000		6 Dokumen	225,000,000
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kpd Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kpd Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	100 Orang	APBD	2,000,000		100 Orang	80,000,000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**136,942,000**			**760,000,000**
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil									760,000,000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, Panatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dukcapil	1 Dokumen	APBD	5,000,000		1 Dokumen	150,000,000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dukcapil	5 Layanan	APBD	131,942,000		5 Layanan	275,000,000
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Tekhnis Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dukcapil		APBD	-		1 laporan	335,000,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**8,200,000**			**160,000,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Panyajian Database Kependudukan**						**1,500,000**			**85,000,000**
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	Dukcapil	38 Dokumen	APBD	1,500,000		39 Dokumen	85,000,000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Meningkatkan Pemanfaatan data kependudukan				**6,700,000**			**75,000,000**
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	1 Laporan	APBD	6,700,000		1 Laporan	75,000,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**892,000**			**125,000,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**						**892,000**			**125,000,000**
2	12	04	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan lainnya	Tersusunnya Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lainnya	Jumlah Dokumen Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lainnya	Dukcapil	3 Dokumen	APBD	892,000		3 Dokumen	125,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN.

Untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi perlu dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut disediakan anggaran dalam bentuk pagu indikatif sebesar Rp. 4.352.972.443,-(empatmilyar tiga ratuslima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empatratus empat puluh tigarupiah), yang berasal dari APBD tahun 2025 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

I. Kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

III. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   3. Penyediaan bahan Logistik Kantor
   4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Penyediaan jasa surat menyurat
   2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
   3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

VII. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan
   2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
   3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

I. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
   2. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk

II. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   1. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
   2. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

I. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
   1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
   2. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan

I. Kegiatan Pengumpulen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian Data Base Kependudukan

1. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

II. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

I. Kegiatan Penyusunan profil kependudukan

1. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sesuai dengan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh bidang di lingkungan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datardalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan rencana kinerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta tujuan dan sasaran rencana kinerja serta program/kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan dituangkan kedalam Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datarsebagaimana tertuang dalam Renjaini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah propinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

Batusangkar, Agustus 2024
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. ARMEN YUDI, M.Si
NIP. 19681226 198903 1 006

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TANAH DATAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.352.972.443,00**							**10.453.938.596,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.272.473.025,00**							**10.063.938.596,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.272.473.025,00**							**10.063.938.596,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***	-			**100 %**	**3.655.608.625,00**						-	**8.288.938.596,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaiak Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen	16.437.998,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	54.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	10.754.664,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.683.334,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	-			2 Dokumen 14 Bulan	2.810.188.493,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	4.599.438.596,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.805.128.493,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		4.575.938.596,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5.060.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		23.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	-			130 orang 15 orang	60.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	60.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan* *Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan*	-			15 Paket 15 Paket 2 Laporan 60 Paket 4 Dokumen 1 Laporan 26 Paket	228.901.834,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	1.218.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.901.834,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	-			6 Unit	136.450.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	1.400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	136.450.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	210.677.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	265.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.620.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	205.557.500,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		245.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud Yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya*	-			2 Unit 34 Unit 1 Unit 11 Unit	192.952.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	417.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	125.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		235.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	10.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	57.952.800,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk***	-			**100 %**	**470.830.400,00**						-	**730.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk*	-			4 Dokumen	163.330.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	425.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				5 Dokumen	158.330.400,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwqa penting terkait pendaftaran penduduk* *Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapat komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendafataran penduduk*	-			20 Dokumen 75 Nagari	307.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	305.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				6 Dokumen	305.500.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				100 Orang	2.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil***	**-**			**100 %**	**136.942.000,00**						**-**	**760.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	136.942.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	425.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	131.942.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan***	-			**100 %**	**8.200.000,00**						-	**160.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan*	-			38 Dokumen	1.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				40 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			2 Laporan	6.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	6.700.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan***	-			**100 %**	**892.000,00**						-	**125.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain*	-			3 Dokumen	892.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				3 Dokumen	892.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	**NON URUSAN**						**80.499.418,00**							**390.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**80.499.418,00**							**390.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***	-			**100 %**	**80.499.418,00**						-	**390.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan* *Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	-			130 orang 15 orang	2.500.000,00		-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2.500.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan* *Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan*	-			15 Paket 15 Paket 2 Laporan 60 Paket 4 Dokumen 1 Laporan 28 Paket	77.999.418,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	290.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.996.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	76.003.418,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**4.352.972.443,00**							**10.453.938.596,00**	



2025

RECANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025





DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN TANAH DATAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan dan penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 akan dijadikan acuan dan pedoman bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi untuk penyusunan dan penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar ini disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar ini bermanfaat sebagai acuan kegiatan pembangunan pangan dan perikanan di Kabupaten Tanah Datar.

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH DATAR

HARFIAN FIKRI, S.Sos
NIP. 19680525 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab I.	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun Lalu	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pangan dan Perikanan	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan	17
	2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan	25
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
Bab III.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan	34
	3.1 Telaahan Kebijakan Nasional	34
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Perikanan	36
	3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	37
Bab IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	46
Bab V.	Penutup	47
LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta perkiraan anggaran. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pangan dan Perikanan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pembangunan Pangan dan Perikanan masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD 2021-2026 yang berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama komoditas-komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan perikanan juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan.

Peran strategis pangan dan perikanan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, distribusi dan konsumsi pangan, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pangan dan perikanan sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian daerah, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dalam menjalankan tugas Daerah, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati ini Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan perikanan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2022;
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
10. Perbup no 24 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar bermaksud untuk mewujudkan komitmen dan arah pembangunan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang realistis untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan.

Adapun tujuan rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah dan pedoman kepada setiap aparatur pada unit kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan program selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi daerah.

2. Menjadikan rencana kerja OPD sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.
3. Merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan program/kegiatan secara menyeluruh pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.
4. Dapat menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good goverment*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pangan dan Perikanan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan
- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pangan dan Perikanan

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun mendatang.

Pada tahun anggaran 2023, dana yang dialokasikan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pangan dan Perikanan berjumlah Rp. 5.447.550.746,- (Lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Perikanan pada tahun 2023 berupa urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan adalah 8 program, 16 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pangan dan Perikanan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pangan dan Perikanan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pangan dan Perikanan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pangan dan Perikanan yang bersangkutan.

Realisasi pencapaian kinerja keuangan pemerintah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

- Target Pendapatan sebesar Rp. 135.940.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 112.792.000,- (82,97 %).

- Anggaran Belanja sebesar Rp. 5.447.550.746,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 5.177.643.609,- (95,05 %).

Rincian realisasi keuangan per kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Dinas Pangan dan Perikanan terdiri dari :

   Pendapatan Retribusi

- Pendapatan Retribusi merupakan pendapatan dari kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan untuk memungut pendapatan atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah, yaitu retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2023 dengan Anggaran Rp. 135.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp112.792.000,- (82,97 %).

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan per kegiatan pada Dinas Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023

Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan -Retribusi Daerah ▪ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan	135.940.000,-	112.792.000,-	82,97
Jumlah	135.940.000,-	112.792.000,-	82,97

1. Belanja

- Pada tahun anggaran 2023 anggaran belanja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 5.447.550.746,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 5.177.643.609,- (95,05 %).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar

Dinas Pangan dan Perikanan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Caaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
								K	Rp	K	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG											
2	09					Pangan											
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	5,081,745,535	93,29	3,655,309,434	4,155,600,347	2,229,650,446	53.65	3,846,519,189	2,229,650,446	53.65
2	09	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	190,000,000	99,74	61,500,100	55,267,735	22,901,000	41.44	80,399,950	22,901,000	41.44

2	09	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah Jenis dokumen Laporan	100	105,000,000	99,49	30,884,400	28,521,840	11,822,500	41.45	46,160,500	11,822,500	41.45
							Jumlah Monitoring							-			-
							Pembayaran Jasa Non PNS							-			-
2	09	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	85,000,000	100	30,615,700	26,745,895	11,078,500	41.42	34,239,450	11,078,500	41.42
							Pembayaran Jasa Non PNS							-			-
2	09	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100	3,598,321,535	92,86	3,170,148,590	3,746,318,549	2,059,385,580	54.97	3,291,484,663	2,059,385,580	28.85
2	09	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	3,508,321,535	92,79	3,139,541,690	3,717,321,868	2,047,253,080	55.07	3,259,516,463	2,047,253,080	55.07
2	09	01	2	02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	90,000,000	99,99	30,606,900	28,996,681	12,132,500	41.84	31,968,200	12,132,500	41.84
							Pembayaran Jasa Non PNS							-			-
2	09	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	35,000,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-
2	09	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengkuti diklat	100	35,000,000			1,500,000	-	-	-	-	-

2	03	01	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100	655,000,000	99,86	126,415,616	84,559,263	36,458,910	43.12	134,696,808	36,458,910	43.12
2	09	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	100	35,000,000	99,29	901,000	438,000	241,000	55.02	2,998,500	241,000	55.02
2	09	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	100	45,000,000	99,64	13,667,000	5,006,000	3,149,000	62.90	24,322,900		62.90
2	09	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	100	50,000,000	99,99	11,528,150	4,495,000	1,947,500	43.33	18,123,750		43.33
							Jumlah dokumen yang digandakan							-			-
2	09	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100	15,000,000	100.00	1,500,000	-	-	-	3,435,000		-

2	09	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	100	45,000,000	99,93	5,196,400	2,000,000	1,464,100	73.21	11,253,000	1464100	73.21
2	09	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi keluar daerah	100	380,000,000	99,88	93,623,066	72,620,263	29,657,310	40.84	74,563,658	29,657,310	40.84
2	09	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	198,400,000	85,78	81,060,428	94,158,000	38,295,356	40.67	88,957,493.00	38,295,356	40.67
2	09	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko dan Materai	100	5,000,000	100.00	1,000,000	200,000	198,000	99.00	2,190,000	198,000	99.00
2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan internet	100	90,000,000	77,61	46,565,028	59,200,000	20,972,356	35.43	38,517,993	20,972,356	35.43
2	09	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	100	83,400,000	99,99	33,495,400	29,758,000	12,133,000	40.77	30,249,500	12,133,000	40.77
							Pembayaran jasa Non PNS							-			-

2	09	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat pendingin (AC) yang terpelihara	100	20,000,000	-	-	5,000,000	4,992,000	-	18,000,000		-
2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	100	405,024,000	97,65	216,184,700	173,796,800	72,609,600	41.78	250,980,275	72,609,600	41.78
2	09	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, roda 2	100	300,000,000	97,26	183,812,900	144,108,400	60,665,900	42.10	194,758,025	60,665,900	42.10
							Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, roda 3							-			-
							Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, roda 4							-			-
							Terpiliharanya kendaraan dinas operasional roda 2							-			-
							Terpiliharanya kendaraan dinas operasional roda 3							-			-

							Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 3							-			-
							Jumlah Tenaga Supir							-			-
2	09	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpiliharanya perlengkapan gedung kantor	100	25,000,000	99,67	1,993,400	1,500,000	145,600	9.71	19,976,250	145,600	9.71
							Terpiliharanya peralatan gedung kantor							-			-
							Tersedianya peralatan kantor							-			-
2	09	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100	80,024,000	99,99	30,378,400	28,188,400	11,798,100	41.85	36,246,000	11,798,100	41.85
							Jasa THL (Tenaga Keamanan)							-			-
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang difasilitasi	100	500,000,000	100	680,266,100	-	-	-	501,120,000		-
2	09	02	2	01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Tersedianya infrastruktur lumbung pangan	100	500,000,000	100	680,266,100	-	-	-	501,120,000	-	-

2	09	02	2	01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya sarana lumbung pangan masyarakat (Mesin heller, gudang lumbung pangan, lantai jemur, rumah RMU)	100	500,000,000	100	680,266,100	-	-	-	501,120,000	-	-
							Honor fasilitator kegiatan							-			-
							Jasa pembuatan RAB dan desain							-			-
2	03	01	01	15	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur				-	-	-	-	-			-
2	03	01	01	15	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				-	-	-	-	-			-
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100	1,090,000,000	99,51	110,534,000	37,024,000	35,770,524	-	724,087,665	35,770,524	-
2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis dokumen penyediaan dan penyaluran bahan pangan pokok	100	295,000,000	97,96	19,920,600	2,000,000	1,210,000	60.50	34,733,500	1,210,000	60.50
2	09	03	2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Buku NBM	100	100,000,000	99,19	3,448,100	-	-	-	-	-	-

2	09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terbinanya Kelembagaan distribusi Pangan	100	45,000,000	97,6	5,979,000	-	-	-	11,192,250	-	-
2	09	03	2	01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan	100	150,000,000	97,77	10,493,500	2,000,000	1,210,000	60.50	23,541,250	-	60.50
2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		100	170,000,000	99,97	70,279,400	35,024,000	34,560,524	98.68	126,144,015	34,560,524	98.68
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar	100	170,000,000	99,97	70,279,400	35,024,000	34,560,524	98.68	126,144,015	34,560,524	98.68
2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian kelompok bahan pangan	100	625,000,000	99,46	20,334,000	-	-	-	563,210,150	-	-
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan (DAU)	100	625,000,000	99,46	20,334,000	-	-	-	563,210,150	-	-
							Kelompok P2L yang difasilitasi							-			-
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	400,000,000	98,98	62,124,480	33,299,200	30,943,230	92.92	47,992,250	30,943,230	-

2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	400,000,000	99,98	62,124,480	33,299,200	30,943,230	92.92	47,992,250	30,943,230	-
2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya balita rawan pangan	100	400,000,000	99,98	62,124,480	33,299,200	30,943,230	92.92	47,992,250	30,943,230	92.92
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	100	65,000,000	98,61	9,657,400	-	-	-	20,288,500	0	-
2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengawasan kemanan pangan segar	100	65,000,000	98,61	9,657,400	-	-	-	20,288,500	-	-
2	09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian sampel pangan segar	100	65,000,000	98,61	9,657,400	-	-	-	20,288,500	-	-
							Alat Rapid tes							-			-
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								-			-
3	25					Kelautan dan Perikanan								-			-
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	100	900,000,000	99,13	59,282,850	4,462,400	755,000	-	693,492,260	755,000	-

3	25	03	2	01		Pengelolaan Penagkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalm 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan penangkapan ikan	100	900,000,000	99,13	59,282,850	4,462,400	755,000	16.92	693,492,260	755,000	16.92
3	25	03	2	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	100	400,000,000	99,13	59,282,850	4,462,400	755,000	16.92	148,942,500	755,000	16.92
							Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Bagi Nelayan Salingka Danau Singkarak							-			-
3	25	03	2	01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana prasarana kegiatan penangkapan ikan	100	500,000,000			-	-	-	544,549,760		-
							terlaksanannya sosialisasi kegiatan							-			-
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	100	1,705,000,000	99,08	554,803,345	331,385,547	113,969,500	9.57	1,229,516,825	113,969,500	9.57
3	25	04	2	02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase capaian pemberdayaan pembudidaya ikan	100	550,000,000	98,37	223,127,145	12,882,947	1,510,000	11.72	260,270,831	1,510,000	11.72

3	25	04	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian bantuan pada kelompok pembudidaya ikan	100	550,000,000	98,37	223,127,145	12,882,947	1,510,000	11.72	260,270,831	1,510,000	11.72
3	25	04	2	04		Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Persentase pengelolaan pembudidaya ikan	100	1,155,000,000	99,57	331,676,200	318,502,600	112,459,500	35.31	969,245,994	112,459,500	35.31
3	25	04	2	04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Statistik Perikanan	100	50,000,000	97,06	4,975,100	-	-	-	11,085,800	-	-
3	25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI yang terfasilitasi	100	600,000,000	0	-	-	-	-	169,972,150	-	-
							Jumlah Pokdakan yang difasilitasi					-	-	-	-	-	-
							Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)					-	-	-	-	-	-
3	25	04	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudadayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Non PNS	100	455,000,000	99,63	320,921,300	318,502,600	112,459,500	35.31	779,552,594	112,459,500	35.31
							Sewa Lahan							-			-
							Tersedianya sarana budidaya Ikan BBI							-			-
							Percontohan Budidaya Ikan							-			-

3	25	04	2	04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Obat yang Dibeli	100	50,000,000	98	5,779,800	-	-	-	8,635,450	-	-
							Jumlah Uji Labor							-			-
							Terlaksananya temu Teknis hama dan Penyakit ikan							-			-
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan	100	290,000,000	99,86	45,666,000	200,000,000	25,212,200	12.61	51,335,650	25,212,200	12.61
3	25	06	2	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		100	290,000,000	99,86	45,666,000	200,000,000	25,212,200	12.61	51,335,650	25,212,200	12.61
3	25	06	2	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan forikan Nagari Pembinaan Pokhlasar/UPI penyuluhan dan fasilitasi makanan asal ikan, terlaksananya lomba masak ikan tingkat Kabupaten dan Propinsi, terlaksananya pelatihan bina mutu, terlaksananya pelatihan diversifikasi pengolahan	100	290,000,000	99,86	45,666,000	200,000,000	25,212,200	12.61	51,335,650	25,212,200	12.61
TOTAL								100	10,031,745,535	95,05	5,177,643,609	4,761,771,494	2,436,300,900	51.16		2,436,300,900	

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tabel 2.2 Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Ket
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	31.041.916,-	100,00	30.884.400,- 99,49	Sisa Anggaran Rp. 157.516,-
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.615.996,-	100,00	30.615.700,- 100	Sisa Anggaran Rp. 296,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (A)	**61.657.912.-**	**100,00**	**61.500.100,- 99,74**	**Rp. 157.812,-**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kegiatan ini terealisasi berupa biaya penyusunan perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahun 2023 serta belanja jasa Tenaga Harian Lepas (THL).

Dana yang dianggarkan Rp. 31.041.916,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.884.400,-(99,49%) dengan sisa anggaran Rp. 157.516,-

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa biaya penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD (LKJIP), Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ), Laporan Tahunan kegiatan serta belanja jasa Tenaga Harian Lepas (THL). Dana yang dianggarkan Rp. 30.615.996,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.615.700,- (100%) dengan sisa anggaran Rp. 296,-

II. Tabel 2.3 Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	30.608.947,-	100,00	30.606.900,- 99,99	Sisa Anggaran Rp. 2.047,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (A)	**30.608.947,-**	**100,00**	**30.606.900,- 99,99**	**Rp. 2.047,-**

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun serta belanja jasa Tenaga Harian Lepas (THL).

Dana yang dianggarkan Rp. 30.608.947,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.606.900,- (99,99%) dengan sisa anggaran Rp. 2.047,-

III. Tabel 2.4 Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	907.400,-	100,00	901.000,- 99,29	Sisa Anggaran Rp. 6.400,-
2. Penyediaan bahan logistik kantor	13.716.289,-	100,00	13.667.000,- 99,64	Sisa Anggaran Rp. 49.289,-
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.529.063,-	100,00	11.528.150,- 99,99	Sisa Anggaran Rp. 913,-
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,-	100,00	1.500.000,- 100	Sisa Anggaran Rp. 0,00,-
5. Fasilitasi kunjungan tamu	5.200.000,-	100,00	5.196.400,- 99,93	Sisa Anggaran Rp. 3.600,-
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi	93.733.860,-	100,00		Sisa Anggaran

dan konsultasi SKPD			93.623.066,- 99,88	Rp. 110.794,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (A)	**126.586.612,-**	**100,00**	**126.415.616,- 99,86**	**Rp. 170.996,-**

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor untuk kelancaran proses administrasi perkantoran seperti bola lampu, kabel listrik.

Dana yang dianggarkan Rp. 907.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 901.000,- (99,29%) dengan sisa anggaran Rp. 6.400,-

Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan alat tulis kantor seperti pena, buku, kertas dan lain-lain untuk kelancaran proses administrasi perkantoran.

Dana yang dianggarkan Rp. 13.716.289,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.667.000,- (99,64%) dengan sisa anggaran Rp.49.289,- disetor ke kas daerah.

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian blanko laporan perjalanan Dinas, Kop surat Dinas, Kwitansi NCR, Blanko surat keluar, Blanko SPPD, Blanko daftar hadir, Lembar disposisi, Blanko surat masuk dan keluar.

Dana yang dianggarkan Rp. 11.529.063,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.528.150,-(99,99%) dengan sisa anggaran Rp. 913,-

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran langganan surat kabar. Dana yang dianggarkan Rp. 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,-(100%) dengan sisa anggaran Rp. 0,00,-

7. Fasilitasi kunjungan tamu

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu untuk kelancaran proses administrasi perkantoran.

Dana yang dianggarkan Rp.5.200.000,-dan terealisasi sebesar Rp.5.196.400,- (99,93%) dengan sisa anggaran Rp. 3.600,-

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa biaya mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah untuk kelancaran kegiatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 93.733.860,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.623.066,-(99,88%) dengan sisa anggaran Rp. 110.794,-

IV. Tabel 2.5 Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,-	100,00	1.000.000,- 100,00	Sisa Anggaran Rp. 0.00,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60.000.000,-	100,00	46.565.028,- 77,61	Sisa Anggaran Rp.13.434.972,-
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	33.500.000,-	100,00	33.495.400,- 99,99	Sisa Anggaran Rp. 4.600,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (A)	**94.500.000,-**	**100,00**	**81.060.428,- 85,78**	**Rp. 13.439.572,-**

9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian materai (materai 10.000 sebanyak 100 lembar).

Dana yang dianggarkan Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,-(100%) dengan sisa anggaran Rp. 0.00,-

10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran Rekening Telepon, listrik dan Air yaitu :

- Dinas Pangan dan Perikanan di Pagaruyung
- 6 unit BBI

Dana yang dianggarkan Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.565.028,-(77,61%) dengan sisa anggaran Rp. 13.434.972,-

11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat-alat kebersihan kantor dan bahan pembersih untuk kantor Dinas Pangan dan Perikanan dan jasa Tenaga Harian Lepas (THL).

Dana yang dianggarkan Rp. 33.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.495.400,- (99,99%) dengan sisa anggaran Rp. 4.600,-

V. Tabel 2.6 Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional /lapangan	189.000.000,-	100,00	183.812.900,- 97,26	Sisa Anggaran Rp. 5.187.100,-
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.000.000,-	100,00	1.993.400,- 99,67	Sisa Anggaran Rp. 6.600,-
3. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	30.381.200,-	100,00	30.378.400,- 99,99	Sisa Anggaran Rp. 2.800,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (A)	**221.381.200,-**	**100,00**	**216.184.700,- 97,65**	**Rp. 5.196.500**

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran jasa service, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak pembayaran perpanjangan izin kendaraan untuk kendaraan roda 4 sebanyak 9 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 32 unit.

Dana yang dianggarkan Rp. 189.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.812.900,- (97,26%) dengan sisa anggaran Rp. 5.187.100,-

13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini terealisasi berupa biaya service 2 (dua) unit printer dan 7 (tujuh) unit laptop dan komputer PC.

Dana yang dianggarkan Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.993.400,- (99,67%) dengan sisa anggaran Rp. 6.600,-

14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan gedung Dinas Pangan dan Perikanan beserta belanja jasa Tenaga Harian Lepas (THL).

Dana yang dianggarkan Rp. 30.381.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.378.400,- (99,99%) dengan sisa anggaran Rp. 2.800,-

VI. Tabel 2.7. Realisasi Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	680.292.500,-	100,00	680.266.100,- 100,00	Sisa Anggaran Rp. 26.400 ,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (B)	**680.292.500,-**	**100,00**	**680.266.100,- 100,00**	**Rp. 26.400,-**

15. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

Kegiatan ini terealisasi berupa monitoring refitalisasi penggilingan padi kecil (PPK) dan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Provinsi mengenai penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan alsintan pengolahan hasil pertanian.

Dana yang dianggarkan Rp. 680.292.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 680.266.100,- (100 %) dengan sisa anggaran Rp. 26.400 ,-

VII. Tabel 2.9 Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	3.476.250,-	100,00	3.448.100,- 99,19	Sisa Anggaran Rp. 28.150,-
1. Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	6.126.140,-	100,00	5.979.000,- 97,60	Sisa Anggaran Rp. 147.140,-
2. Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	10.732.300,-	100,00	10.493.500,- 97,77	Sisa Anggaran Rp. 238.800,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (C)	**20.334.690,-**	**100,00**	**19.920.600,- 97,96**	**Rp. 414.090,-**

16. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan.

Dana yang dianggarkan Rp. 3.476.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.448.100,- (99,19%) dengan sisa anggaran Rp. 28.150,-

17. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan pada lembaga distribusi pangan masyarakat sebanyak 12 Gapoktan.

Dana yang dianggarkan Rp. 6.126.140,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.979.000,- (97,60%) dengan sisa anggaran Rp. 147.140,-

18. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan pada 17 lumbung pangan masyarakat dan terlaksananya bazar layanan pangan murah, aman, segar dan halal (Balay Pamurah) setiap hari Jumat dihalaman Dinas Pangan dan Perikanan.

Dana yang dianggarkan Rp. 10.732.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.493.500,- (97,77%) dengan sisa anggaran Rp. 238.800,-

VIII. Tabel 2.10. Realisasi Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70.301.676,-	100,00	70.279.400,- 99,97	Sisa Anggaran Rp. 22.276 ,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (B)	**70.301.676,-**	**100,00**	**70.279.400,- 99,97**	**Rp. 22.276,-**

19. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebanyak 5.800 kg beras.

Dana yang dianggarkan Rp. 70.301.676,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.279.400,- (97,77%) dengan sisa anggaran Rp. 238.800,-

IX. Tabel 2.11. Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	20.444.650,-	100,00	20.334.000,- 99,46	Sisa Anggaran Rp. 110.650,-

RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (E)	**20.444.650,-**	**100,00**	**543.621.750,- 99,46**	**Rp. 110.650,-**

20. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan pangan lokal bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), lomba pangan lokal tingkat Propinsi Sumatera Barat dan pembinaan kepada 8 Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima bantuan hibah dari Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.

Dana yang dianggarkan Rp. 20.444.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.334.000,- (99,46%) dengan sisa anggaran Rp. 110.650,-

X. Tabel 2.11. Realisasi Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Pelaksanan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	62.763.200,-	100,00	62.124.480,- 98,98	Sisa Anggaran Rp. 638.720,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (D)	**62.763.200,-**	**100,00**	**62.124.480,- 98,98**	**Rp. 638.720,-**

21. Pelaksanan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terealisasi berupa penyerahan paket sembako kepada 101 balita di Kecamatan Batipuh, X Koto dan Lintau Buo Utara.

Dana yang dianggarkan Rp. 62.763.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.124.480,- (98,98%) dengan sisa anggaran Rp. 638.720,-

XI. Tabel 2.12. Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	9.793.600,-	100,00	9.657.400,- 98,61	Sisa Anggaran Rp. 136.200,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (E)	**9.793.600,-**	**100,00**	**9.657.400,- 98,67**	**Rp. 136.200,-**

22. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini terealisasi berupa pengujian mutu dan keamanan pangan segar di Kecamatan X Koto, pendataan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (penggilingan padi) dan pembinaan serta pengawasan pelaku usaha keamanan pangan.

Dana yang dianggarkan Rp. 9.793.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.657.400,- (98,61%) dengan sisa anggaran Rp. 136.200,-

XII. Tabel 2.13. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	59.602.167,-	100,00	59.282.850,- 99,46	Sisa Anggaran Rp. 319.317,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (F)	**59.602.167,-**	**100,00**	**59.282.850,- 99,46**	**Rp.319.317,-**

23. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan perahu sebanyak 7 unit untuk Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuh Selatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 59.602.167,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.282.850,- (99,46 %) dengan sisa anggaran Rp. 319.317,-

XIII. Tabel 2.14. Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	226.213.500,-	100,00	223.127.145,- 98,64	Sisa Anggaran Rp. 3.086.355,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (G)	**226.213.500,-**	**100,00**	**223.127.145,- 98,64**	**Rp. 3.086.355,-**

24. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan bantuan benih ikan, pengadaan pakan dan pengadaan kolam terpal, mesin pembuat pelet untuk Pokdakan dan Pokmaswas.

Dana yang dianggarkan Rp. 226.213.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 223.127.145,- (98,64 %) dengan sisa anggaran Rp. 3.086.355,-

XIV. Tabel 2.15. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 Daerah Kab/Kota	5.125.770,-	100,00	5.125.100,- 99,99	Sisa Anggaran Rp. 670,-
2. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 Daerah Kab/Kota	321.700.773,-	100,00	320.921.300,- 99,76	Sisa Anggaran Rp. 779.473,-
3. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan				

budidaya dalam 1 Daerah Kab/Kota	5.897.940,-	100,00	5.779.800,- 98,00	Sisa Anggaran Rp. 118.140,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (G)	**332.724.483,-**	**100,00**	**331.826.200,- 99,73**	**Rp. 898.283,-**

25. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terealisasi berupa diterbitkannya buku statistik perikanan yang bersisi data perikanan budidaya dan tangkap.

Dana yang dianggarkan Rp. 5.125.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.125.100,- (99,99 %) dengan sisa anggaran Rp. 670,-

26. Penjaminan Ketersedian Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan calon induk, pakan dan benih ikan, pembayaran kontrak sewa lahan BBI sebanyak 4 unit, dan pembayaran honor 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Dana yang dianggarkan Rp. 321.700.773,- dan terealisasi sebesar Rp. 320.921.300,- (99,76 %) dengan sisa anggaran Rp. 779.473,-

27. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan obat-obatan ikan. Dana yang dianggarkan Rp. 5.897.940,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.779.800,- (98,00%) dengan sisa anggaran Rp. 118.140,-

XV. Tabel 2.16. Realisasi Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (%)	
1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	45.730.725,-	100,00	45.666.000,- 99,86	Sisa Anggaran Rp. 64.725,-
RERATA PENCAPAIAN			**45.666.000,-**	

KINERJA PROGRAM (H)	**45.730.725,-**	**100,00**	**99,86**	**Rp. 64.725,-**

28. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya penyuluhan dan fasilitasi makanan asal ikan bagi anak TK di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang dan Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, terlaksananya lomba masak serba ikan tingkat Kecamatan dan tingkat Propinsi Sumatera Barat serta pembinaan Poklasar sebanyak 4 kelompok.

Dana yang dianggarkan Rp. 45.730.725 dan terealisasi sebesar Rp. 45.666.000,- (99,86%) dengan sisa anggaran Rp. 64.725,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pangan dan perikanan. Indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dapat dikaji dari Indikator Kinerja Kunci dalam bidang pangan dan perikanan meliputi ketersediaan energi dan protein perkapita, penguatan cadangan pangan, skor pola pangan harapan, pengawasan dan pembinaan pangan, produksi dan konsumsi ikan. Selain itu indikator kinerja pelayanan perikanan berdasar pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanah Datar meliputi peningkatan produksi ikan.

Tabel. 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			87,50	87,75	88	88,25	89,87	90,84	91	91,5	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			81,5	82	82,5	83	82,9	90,03	90,5	91	
3	Peningkatan Produksi Perikanan (ton)			1.963,26	2.465,37	3.000,39	3.569,4	12.827,81	13.002,81	15.225	15.576	

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100%. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut :

1. Sangat berhasil : Capaian Kinerja > 100%
2. Berhasil : 80 – 100%
3. Cukup berhasil : 60 – 79%
4. Tidak berhasil : <60%

Tabel. 2.18 Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2023

	Misi : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,15 83,2	90,84 90,3	100,77 108,53
2	Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan	- Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan Produksi perikanan (ton)	12.955,27	13.002,81	100,37
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan DPP	Predikat akuntabilitas kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Sangat Baik	BB Sangat Baik	BB 94,78

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian IKU Sasaran strategis Pangan dan Perikanan diindikasikan **berhasil** dan **sangat berhasil.**

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia di dunia, pangan juga merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda serta dapat memicu gejolak sosial dan ketidakstabilan politik jika tidak dapat tertangani dengan baik. Agar individu tidak kekurangan gizi akses setiap individu terhadap pangan harus dijamin. Akses pangan setiap individu sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara terus menerus. Ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh dan sesuai dengan persyaratan gizi.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga,

dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya.

Sasaran meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal diukur berdasarkan kepada dua indikator yaitu :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Tabel 2.15 Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target tahun 2024	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87	88,04	101,20	87,25	89,87	103,30	90,15	90,84	100,77	100,77	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	80,5	86,4	106,67	81	82,9	102,35	83,2	90,3	108,53	90,5	

A. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Pola Pangan Harapan (PPH) ketersedian disusun untuk menyeimbangan antara keberagaman pangan yang tersedia untuk kemudian dikomsumsi oleh masyarakat. Keberagaman ketesedian pangan dibutuhkan untuk mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia di lingkungan dan di pasaran. Kondisi inilah yang mendasari dibutuhkannya hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan. Skor pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan digunakan untuk perencanaan penyediaan pangan yang beragam ideal yang di tunjukkan dengan skor 100 untuk pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	90,15	90,84	100,77

Tabel 2.17 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	% Peningkatan
1	Skor PPH Ketersediaan	88,04	89,87	90,84	1

Berdasarkan hasil skor PPH Ketersediaan, skor ketersediaan pangan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh pola pemanfaatan lahan pertanian dan minat masyarakat. Namun dibanding dengan target ideal, skor PPH belum mencapai target ideal namun masih didominasi oleh ketersediaan padi-padian. Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan. Kelompok padi-padian, umbi-umbian, buah dan sayur sudah tergolong mandiri pangan sedangkan kelompok minyak dan lemak, kacang-kacangan dan gula masih kurang.

Penghitungan skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan didasarkan pada :

a. Angka Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)

   Angka Ketersediaan energi diperoleh dari hasil perkalian suatu komoditas dalam gram dan kandungan kalori dalam komoditas tersebut dibagi dengan hasil perkalian jumlah penduduk dan 365 hari.

b. Angka Ketersediaan Protein (Gr/Kap/hari)

   Angka Ketersediaan protein diperoleh dari hasil perkalian suatu komoditas dalam gram dan kandungan protein dalam komoditas tersebut dibagi dengan hasil perkalian jumlah penduduk dan 365 hari.

Tabel 2.18 Angka Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2020 - 2023

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	% Peningkatan
1	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	6.610	6.641	6.650	6.923	1 %
2	Angka Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	174,26	174,26	174,69	175,37	1 %

Berdasarkan tabel 2.18 terlihat bahwa capaian kinerja angka ketersediaan energi pada tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 1 % begitupun dengan angka ketersediaan protein meningkat sebesar 1 %.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target antara lain berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi komoditas yang mengandung protein nabati dan hewani, sosialisasi dan pembinaan terkait dengan ketersediaan protein di tingkat rumah tangga.

B. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Departemen Pertanian Tahun 2001, yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6% serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya berdasarkan hasil perkalian antara proporsi energi dan masing-masing kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor PPH. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100.

Dalam penghitungan Skor PPH Konsumsi, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun serta vitamin dan mineral/zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33,33%. Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Untuk kelompok pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula), total kontribusi energy (% AKG) adalah 74%. Bobot untuk kelompok pangan ini adalah 0,5 (berasal dari nilai 33,3% dibagi 74%).
b) Untuk kelompok pangan sumber protein (kacang –kacangan dan pangan hewani) dengan total kontribusi energy 17 %, diperoleh bobot 2,0 (berasal dari 33,3% sibagi 17%)
c) Untuk kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan total kontribusi energy 6%, diperoleh bobot 5,0 (berasal dari 33,3% dibagi 6%).
d) Kelompok pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energy 3% akan diperoleh bobot 0,0 yang berasal dari nilai 0% dibagi 3. Bobot 0,0 untuk kelompok pangan lainnya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi bumbu dan minuman tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi).

Dalam rangka memudahkan penghitungan skor PPH Badan Ketahanan Pangan Masyarakat Kementerian Pertanian RI telah menyusun aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data SUSENAS. Sumber data berasal dari tahun sebelum penghitungan (data tahun 2023). Maka data skor PPH konsumsi yang ditampilkan ini adalah data skor PPH konsumsi kondisi tahun 2023. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan tingkat keberagaman konsumsi pangan penduduk seperti terlihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	83,2	90,3	108,53

Berdasarkan Tabel 2.19 terlihat bahwa skor PPH Konsumsi Kabupaten Tanah Datar adalah 90,3 dengan target ideal skor PPH adalah 100. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi penduduk belum beragam dan bergizi seimbang. Beberapa konsumsi kelompok pangan yang sudah melebihi anjuran adalah konsumsi beras.

Tabel 2.20 Angka Konsumsi Energi dan Protein Tahun 2021 - 2023

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	% Peningkatan
1	Angka konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr) *	2.045	2.146	2.082,5	(1)
2	Angka Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hr) **	59	58,4	57,1	(1)

Keterangan : *) Angka Konsumsi energi ideal 2.150 kkal/kap/hr

**) Angka Konsumsi energi ideal 57 gr/kap/hr

Tabel. 2.21
Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk
Kabupaten Tanah Datar

No.	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ kapita	%	% AKP**)
1	Padi-Padian	1.191,1	57,2	56,7	26,3	46,0	46,1
2	Umbi-Umbian	34,4	1,7	1,6	0,5	0,9	0,9
3	Pangan Hewani	243,7	11,7	11,6	20,2	35,3	35,4
4	Minyak dan Lemak	301,0	14,5	14,3	0,0	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	40,2	1,9	1,9	0,4	0,7	0,7
6	Kacang-Kacangan	60,9	2,9	2,9	4,6	8,1	8,1
7	Gula	63,7	3,1	3,0	0,0	0,1	0,1
8	Sayur dan Buah	117,7	5,6	5,6	3,9	6,9	6,9
9	Lain-Lain	29,9	1,4	1,4	1,1	2,0	2,0
	Total	2.082,5	100,0	99,2	57,1	100,0	100,2

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi 2.150 kkal/kapita/hari
**) Angka Kecukupan Protein 57 gram/kapita/hari

Tabel 2.21 menunjukan bahwa tingkat kecukupan energi penduduk Kabupaten Tanah Datar sebesar 2.082,5 kkal/kapita/hari. Tingkat kecukupan protein penduduk sebesar 57,1 gram/kapita/hari

atau. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein penduduk Kabupaten Tanah Datar belum mencukupi standar angka kecukupan gizi ideal.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya diversifikasi pangan meningkatkan keragaman komoditas pangan dilakukan optimalisasi pekarangan. Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan secara intensif melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture),* antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal yang disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom),* sehingga kelestarian alampun tetap terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui konsep P2L, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam, pemberdayaan intensif kepada ibu rumah tangga yang terwadahi dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan teknologi budidaya tanam pada pekarangan.

Dalam rangka penurunan konsumsi beras dilakukan upaya antara lain pembinaan, sosialisasi terkait konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga serta peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal.

2. Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran meningkatnya produksi perikanan diukur dari indikator peningkatan produksi perikanan. Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan berasal dari peningkatan jumlah poduksi komoditi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap di danau dan perairan umum lainnya.

Berikut ini adalah capaian produksi perikanan tahun 2023 dibandingkan dengan target.

Tabel 2.23. Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Kab. Tanah Datar Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan produksi perikanan (ton)	3.568	12.089,50	363,81	12.560,51	12.827,81	102,13	12.955,27	13.002,81	100,37

Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja peningkatan produksi perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya + produksi perikanan tangkap (kumulatif produksi perikanan) dikurangi dengan jumlah produksi perikanan di tahun 2023 (13.002,81 ton).

Formulasi penghitungan persentase realisasi terhadap target yaitu peningkatan jumlah produksi ikan/target peningkatan produksi ikan x 100 (jumlah peningkatan produksi ikan dibagi target produksi ikan dikalikan 100).

Tabel 2.23 menunjukkan bahwa peningkatan produksi ikan tahun 2023 sebesar 13.002,81 ton atau tercapai 100,37% terhadap target tahun 2023 dan bisa disimpulkan realisasi **Sangat Tinggi.**

Produksi ikan yang terdiri atas produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pembangunan perikanan dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Program pengembangan perikanan budidaya dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM pembudidaya ikan baik teknis dan maupun manajerial serta fasilitasi terhadap akses teknologi.

Program peningkatan produksi perikanan tangkap dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan upaya utamanya adalah pemberdayaan nelayan kecil, meningkatkan sarana prasarana serta peningkatan kelestarian sumber daya perikanan.

1. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan diukur oleh 2 indikator yaitu predikat akuntabilitas kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.24. Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 - 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Target tahun 2024	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Predikat akuntabilitas kinerja	B	BB	72,20	BB	BB	72,45	BB	90
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	85,99	Sangat Baik	Sangat Baik	94,78	BB	90

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga instrument ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah kajian data yang memuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pangan dan Perikanan kepada masyarakat.

Unsur pelayanan yang disurvei yaitu :

U1. Persyaratan
U2. Prosedur
U3. Waktu Pelayanan
U4. Biaya/Tarif
U5. Produk Layanan
U6. Kompetensi Pelaksanaan
U7. Perilaku Pelaksana
U8. Maklumat Pelayanan
U9. Penanganan Pengaduan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan perikanan.

Dalam rangka pengembangan pangan dan perikanan di Kabupaten Tanah Datar, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan dalam merumuskan kebijakan pangan berdasarkan isu strategis dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan sehingga ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan dapat terwujud di masa mendatang.

Identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar antara lain sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah
2. Masih kurangnya pengawasan keamanan pangan
3. Belum tercukupinya kebutuhan benih masyarakat
4. Harga pakan ikan relatif mahal sehingga tidak terjangkau oleh pembudidaya ikan

5. Belum teratasinya hama dan penyakit ikan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pangan dan perikanan di Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan
2. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu diatas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan
3. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan ke pangan lokal
4. Pola konsumsi masih tergantung pada komoditi padi/beras atau karbohidrat
5. Alih fungsi lahan, pertambahan jumlah penduduk mengancam ketersediaan pangan
6. Masih terdapat pangan yang belum mememuhi standar keamanan pangan.
7. Persaingan dengan daerah tetangga sebagai penghasil produk perikanan
8. Meningkatnya standarisasi permintaan pasar tentang kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk.

Peluang yang ada dalam pengembangan pangan dan perikanan :

1. Pertambahan jumlah penduduk merupakan pasar produk pangan dan perikanan
2. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang semakin tinggi memberi peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat
3. Perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan tranportasi menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan pangan dan perikanan.
4. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi penghasil pangan dan perikanan belum dikelola secara optimal
5. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang pada percepatan perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat.
6. Meningkatnya kuantitas dan harga permintaan komoditi perikanan.

Berdasarkan permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pangan dan Perikanan dirumuskan isu-isu strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun depan yaitu :

1. Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan
2. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan
3. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang oleh dokumen perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan tangkap dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD									
	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR									
	Tahun Perencanaan : 2025									
	Nama Organisasi	**(1.20.07) DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**								
	Rekapitulasi Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan									
No	**Rancangan Awal RKPD**					**Hasil Analisis Kebutuhan**				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**
	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				**4,493,749,636**					**4,493,749,636**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4,004,081,086**					**4,004,081,086**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**4,004,081,086**					**4,004,081,086**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3,921,081,086**					**3,921,081,086**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**55,267,735**					**55,267,735**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa Non PNS	5 dokumen 1 orang	28,521,840	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa Non PNS	5 dokumen 1 orang	28,521,840
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa Non PNS	2 dokumen 1 orang	26,745,895	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa Non PNS	2 dokumen 1 Orang	26,745,895
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3,530,124,951**					**3,530,124,951**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan dan Perikanan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	3,501,128,270	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan dan Perikanan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	3,501,128,270
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa non PNS	2 dokumen 1 orang	28,996,681	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa non PNS	2 dokumen 1 orang	28,996,681
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**0**					**0**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah ASN mengikuti diklat	10 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah ASN mengikuti diklat	10 orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**120,500,000**					**120,500,000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik yang disediakan	3 jenis	500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik yang disediakan	3 jenis	500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis alat tulis kantor	39 Jenis	7,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis alat tulis kantor	39 Jenis	7,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	13 Jenis 63.864 lembar	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	13 Jenis 63.864 lembar	5,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Jenis	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Jenis	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah makan dan minum tamu dan rapat yang disediakan	1 Tahun	5,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah makan dan minum tamu dan rapat yang disediakan	1 Tahun	5,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi keluar daerah	12 Bulan	103,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi keluar daerah	12 Bulan	103,000,000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**94,000,000**					94,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pangan dan Perikanan	Tersedianya Materai	1 Tahun	500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pangan dan Perikanan	Tersedianya Materai	1 Tahun	500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah kwh listrik, tagihan air,listrik dan telepon	12 Bulan	60,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah kwh listrik, tagihan air,listrik dan telepon	12 Bulan	60,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan Pembayaran jasa non PNS	22 Jenis 1 Orang	33,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan Pembayaran jasa non PNS	22 Jenis 1 Orang	33,500,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**121,188,400**					**121,188,400**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 2 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 3 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 4 Pembayaran jasa non PNS Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda	30 Unit 1 Unit 8 Unit 1 orang 30 Unit 1 Unit 8 Unit	90,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pangan dan Perikanan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 2 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 3 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 4 Pembayaran jasa non PNS Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 3 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 8	30 Unit 1 Unit 8 Unit 1 orang 30 Unit 1 Unit 8 Unit	90,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 Tahun	3,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara Pembayaran jasa non PNS	1 Unit 1 Orang	28,188,400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 Unit 1 Orang	28,188,400
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				-					-
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Kab/Kota				-					-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Tersedianya infrastruktur lumbung pangan	13 unit	-	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Tersedianya infrastruktur lumbung pangan	13 unit	-

	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				**53,000,000**					**51,000,000**
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Pangan				**2,000,000**					**-**
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Pembinaan kelembagaan lumbung pangan	14 kelompok	2,000,000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua	Pembinaan kelembagaan lumbung pangan	14 kelompok	2,000,000
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen an Konsumen Wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari			-					-
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Terbinanya kelembagaan distribusi pangan	12 kelompok	-	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Terbinanya kelembagaan distribusi pangan	12 kelompok	-
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				**36,000,000**					**36,000,000**
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Pengadaan cadangan pangan	15 ton	36,000,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Pengadaan cadangan pangan	15 ton	36,000,000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				**15,000,000**					**15,000,000**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekerangan Jumlah peserta pelatihan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal Penyusunan pola pangan harapan (PPH) Kab. Tanah Datar Promosi penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal	20 kelompok 20 Orang 1 dok 3 kegiatan	15,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekerangan Jumlah peserta pelatihan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal Penyusunan pola pangan harapan (PPH) Kab. Tanah Datar Promosi penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal	20 kelompok 20 Orang 1 dok 3 kegiatan	15,000,000

	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				**30,000,000**					**30,000,000**
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				**30,000,000**					**30,000,000**
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Terfasilitasinya balita rawan pangan Terfasilitasinya masyarakat rawan pangan nagari mandiri pangan	50 balita 6 kelompok	30,000,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari		50 balita 6 kelompok	30,000,000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				-					-
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah				-					-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Terlaksananya pengujian mutu dan keamanan pangan segar	10 Sampel	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Terlaksananya pengujian mutu dan keamanan pangan segar	10 Sampel	-
2	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**489,668,550**					**489,668,550**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				**4,925,000**					**4,925,000**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				**4,925,000**					**4,925,000**
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	2 jenis	4,925,000		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	2 jenis	4,925,000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap		-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap		-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				**334,743,550**					**334,743,550**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				**5,000,000**					**5,000,000**
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan	15 kelompok	5,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan	15 kelompok	5,000,000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				**329,743,550**					**329,743,550**
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah dokumen statistik perikanan	1 dokumen	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah dokumen statistik perikanan	1 dokumen	-
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah BBI yang terfasilitasi, Paket percontohan Nila di Kolam/ Tambak, Paket Percontohan Budidaya Gurame, Paket Budidaya Lele di Kolam terpal, Sarana dan prasarana budidaya ikan hias air tawar, Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.	2 BBI 12 Paket 6 Paket 4 Paket 2 paket 4 Paket	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Jumlah BBI yang terfasilitasi, Paket percontohan Nila di Kolam/ Tambak, Paket Percontohan Budidaya Gurame, Paket Budidaya Lele di Kolam terpal, Sarana dan prasarana budidaya ikan hias air tawar, Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.	2 BBI 12 Paket 6 Paket 4 Paket 2 paket 4 Paket	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembayaran jasa non PNS Sewa Lahan tersedianya sarana budidaya ikan BBI	6 Orang 4 lahan 6 BBI	329,743,550				6 Orang 4 lahan 6 BBI	329,743,550

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembayaran jasa non PNS Sewa Lahan tersedianya sarana budidaya ikan BBI	6 Orang 4 lahan 6 BBI	329,743,550				6 Orang 4 lahan 6 BBI	329,743,550
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis obat yang dibeli Jumlah uji Labor Terlaksananya sosialisasi hama dan penyakit ikan	6 Orang 4 lahan 6 BBI	-				3 Jenis 3 paket 2 Kali	-
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**150,000,000**					**150,000,000**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				**150,000,000**					**150,000,000**
	Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Pembinaan forikan Nagari Pembinaan Poklahsar/UPI Penyuluhan dan fasilitasi makanan asal ikan Terlaksananya lomba masak tingkat Kabupaten dan Propinsi Terlaksananya Lomba mewarnai untuk anka TK Terlaksananya pelatihan Bina Mutu Terlaksananya pelatihan diversifikasi pengolahan	20 Nagari 20 kelompok 15 kelompok 2 Kali 50 anak 10 kelompok 19 kelompok	150,000,000		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	Pembinaan forikan Nagari Pembinaan Poklahsar/UPI Penyuluhan dan fasilitasi makanan asal ikan Terlaksananya lomba masak tingkat Kabupaten dan Propinsi Terlaksananya Lomba mewarnai untuk anka TK Terlaksananya pelatihan Bina Mutu Terlaksananya pelatihan diversifikasi pengolahan	20 Nagari 20 kelompok 15 kelompok 2 Kali 50 anak 10 kelompok 19 kelompok	150,000,000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam konteks perencanaan pembangunan pangan dan perikanan di Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pangan dan Perikanan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pangan dan perikanan.

Usulan-usulan pembangunan bidang pangan dan perikanan yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari dan Kecamatan Tahun 2023 umumnya telah diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan seperti pengadaan benih ikan, pakan, pengembangan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan serta pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan petani dan pembudidaya ikan.

Usulan masyarakat yang banyak ditujukan ke Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar adalah usulan benih ikan dan pakan, bibit tanaman serta peralatan pertanian dan perikanan (lampiran).

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan Kecil				
1	Perlunya pendistribusian bantuan benih dan pakan ikan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat	Nagari Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab Kab.Tanah Datar	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang difasilitasi pembentukan dan	1 paket	
2	Perlunya percontohan budidaya ikan untuk peningkatan pendapatan masyarakat seperti percontohan budidaya lele, Mas, Nila, Patin dan Gurame	Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kab.Tanah Datar	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang difasilitasi pembentukan dan	1 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

RPJMN 2020 – 2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi " Indonesia 2014 Berdaulat, adil dan Makmur". Arah pembangunan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV " Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokokh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing".

Dalam menerapkan visi presiden tersebut, Badan Pangan Nasional menetapkan visi sebagai berikut " Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong ". Pencapain visi tersebut melalui Misi Badan Pangan Nasional yaitu :

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan visi untuk mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP 2020 – 2024 adalah " Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan".

Pencapaian Visi tersebut melalui Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM KP dan pengembangan inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif. Mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Visi Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat " ***Terwujudnya institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal***". Mencapai visi tersebut dilakukan dengan 5 misi yaitu :

1. Mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal;
2. Mewujudkan keterjangkauan pangan masyarakat;
3. Mewujudkan keamanan pangan segar;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan koordinasi dengan stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat diatas, dapat dilihat keterkaitan kinerja antara Dinas Pangan dan Perikanan dengan Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat adalah :" ***Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kerakyatan Tahun 2024"***. Untuk mencapai visi diupayakan melalui misi : ***Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, daya saing, kesempatan kerja dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.***

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat diatas, dapat dilihat keterkaitan kinerja antara Dinas Pangan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat yaitu fokus terhadap kedaulatan pangan dan pengembangan perikanan.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Ket
A	Nasional 1. Pengelolaan sumber daya ekonomi 2. Peningkatan nilai tambah ekonomi	RPJMN 2020 - 2024	
B	Provinsi 1. Meningkatkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Arah gerak Sumbar 2021 – 2024	

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 terdiri dari tiga rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM , peningkatan infrastruktur dan daya saing produk unggulan daerah
2. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM dan peningkatan nilai tambah serta daya saing produk unggulan daerah
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintah.

Berdasarkan Tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, Dinas Pangan dan Perikanan sangat berperan dalam melaksanakan tema pembangunan tersebut.

Dinas Pangan dan Perikanan masuk dalam salah satu dinas yang berada pada prioritas pertama pembangunan tahun 2025 yaitu " Peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil pertanian". Isu Strategis Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 terdiri dari 14 isu. Salah satu isu yaitu peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian yang bernilai ekonomis tinggi.

Berpedoman pada Tema pembangunan, prioritas pembangunan dan isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan, serta visi Dinas Pangan dan Perikanan yaitu "Terwujudnya Kemandirian Pangan dan Peningkatan Produksi Perikanan yang berbasis Sumber Daya Lokal, Berorientasi Agribisnis dan Minabisnis serta Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat" maka ditetapkan tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2025.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya kualitas Ketahanan Pangan

   Meningkatkan ketahanan pangan pada skala rumah tangga dengan pengukuran Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

   Pola Pangan Harapan berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor Pola Pangan Harapan yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi.

   Pola pangan masyarakat yang mengacu pada Pola Pangan Harapan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi pangan. Program diversifikasi bukan

bertujuan untuk mengganti bahan pangan pokok beras dengan sumber karbohidrat lain, tetapi untuk mendorong peningkatan sumber zat gizi yang cukup kualitas dan kuantitas, baik komponen gizi makro maupun gizi mikro .

2. Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan

   Pendapatan masyarakat perikanan tergantung pada pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. Pendapatan masyarakat perikanan akan berpengaruh pada kualitas hidup mereka. Peran serta pemerintah dalam menyusun program-program pembangunan yang membantu masyarakat perikanan akan sangat membantu dalam pencapaian kesejahteraan mereka. Peran pemerintah antara lain memfasilitasi sarana dan

   prasarana perikanan bagi kelompok pembudidaya ikan, kelompok nelayan dan kelompok pengolah ikan.

   Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran pembangunan pangan dan perikanan yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 adalah :

   - Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
   - Meningkatnya produksi perikanan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Berpedoman pada Tema pembangunan, prioritas pembangunan dan isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan, serta visi Kepala Daerah, maka Dinas Pangan dan Perikanan menyusun Program dan kegiatan prioritas tahun 2025 sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 sebagai berikut :

I. Program Pendukung

A. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kegiatan :

I. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

I. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam Rangka Stabillisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
3. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

II. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

III. Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Sub Kegiatan :

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan :

I. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 Daerah Kab/Kota

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan :

I. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan

F. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

I. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau rawa dan genangan air lainnya.

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

G. Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

I. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Sub. Kegiatan :

1. Pelaksanaan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil

II. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam Satu Daerah Kab/Kota
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam Satu Daerah Kab/Kota
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

H. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan :

I. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub. Kegiatan :

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kelompok sasaran dari program-program Dinas Pangan dan Perikanan adalah kelompok tani, kelompok wanita tani, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Tahun Perencanaan : 2025

Nama Organisasi | **(1.20.07) DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

Rekapitulasi Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**9**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**4,066,081,086**			**4,726,321,535**
2	**9**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3,921,081,086**			**4,211,321,535**
2	**9**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**55,267,735**			**85,000,000**
2	09	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa Non PNS	Dinas Pangan dan Perikanan	5 dokumen 1 orang	28,521,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen 1 orang	35,000,000
2	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa Non PNS	Dinas Pangan dan Perikanan	2 dokumen 1 Orang	26,745,895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen 1 Orang	50,000,000
2	**9**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,530,124,951**			**3,548,321,535**
2	09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan dan Perikanan	33 Orang	3,501,128,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Orang	3,508,321,535
2	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Pembayaran jasa non PNS	Dinas Pangan dan Perikanan	2 dokumen 1 orang	28,996,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen 1 orang	40,000,000

2	**9**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**			**0**
2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti diklat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	10 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 orang	0
2	**9**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**92,500,000**			**190,000,000**
2	09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik yang disediakan	Dinas Pangan dan Perikanan	3 jenis	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 jenis	5,000,000
2	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	1 tahun	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun	0
2	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	39 Jenis	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39 Jenis	20,000,000
2	09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	Dinas Pangan dan Perikanan	13 Jenis 63.864 lembar	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Jenis 63.864 lembar	20,000,000
2	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Jenis	-
2	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu dan rapat yang disediakan	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	25,000,000
2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi keluar daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	12 Bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	120,000,000
2	**9**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**94,000,000**			**178,000,000**
2	09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	3,000,000
2	09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah kwh listrik, tagihan air,listrik dan telepon	Dinas Pangan dan Perikanan	12 Bulan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	125,000,000
2	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan Pembayaran jasa non PNS	Dinas Pangan dan Perikanan	22 Jenis 1 Orang	33,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Jenis 1 Orang	50,000,000

2	**9**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**149,188,400**			**210,000,000**
2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 2 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 3 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIRnya, roda 4 Pembayaran jasa non PNS Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 3 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 8	Dinas Pangan dan Perikanan	30 Unit 1 Unit 8 Unit 1 orang 30 Unit 1 Unit 8 Unit	118,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit 1 Unit 8 Unit 1 orang 30 Unit 1 Unit 8 Unit	150,000,000
2	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua	1 Tahun	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	10,000,000.00
2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Pembayaran jasa non PNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	1 Unit 1 Orang	28,188,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit 1 Orang	50,000,000

2	**9**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**				**-**			**-**
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Kab/Kota				**-**			**-**
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya infrastruktur lumbung pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	13 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Khusus	13 unit	-
2	**9**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**53,000,000**			**300,000,000**
2	**09**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan**				**2,000,000**			**30,000,000**
2	09	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terbinanya kelembagaan distribusi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	12 kelompok	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kelompok	-
2	09	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pembinaan kelembagaan lumbung pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	14 kelompok	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 kelompok	30,000,000
2	**9**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**				**36,000,000**			**170,000,000**
2	09	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan cadangan pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	15 ton	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 ton	170,000,000
2	**9**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan**				**15,000,000**			**100,000,000**

2	09	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekerangan Jumlah peserta pelatihan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal Penyusunan pola pangan harapan (PPH) Kab. Tanah Datar Promosi penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	20 kelompok 20 Orang 1 dok 3 kegiatan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Khusus	20 kelompok 20 Orang 1 dok 3 kegiatan	100,000,000
2	**9**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				**30,000,000**			**150,000,000**
2	**9**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**30,000,000**			**150,000,000**
2	09	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya balita rawan pangan Terfasilitasinya masyarakat rawan pangan nagari mandiri pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	50 balita 6 kelompok	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 balita 6 kelompok	150,000,000
2	**9**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				**62,000,000**			**65,000,000**
2	**9**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**				**62,000,000**			**65,000,000**
2	09	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengujian mutu dan keamanan pangan segar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	10 Sampel	62,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Sampel	65,000,000
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**554,668,550**			**1,030,000,000**
3	**25**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**19,925,000**			**150,000,000**
3	**25**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan**				**19,925,000**			**150,000,000**
3	25	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	2 jenis	19,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 jenis	150,000,000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-
3	**25**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**384,743,550**			**600,000,000**
3	**25**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**				**55,000,000**			**200,000,000**
3	25	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	15 kelompok	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 kelompok	200,000,000
3	**25**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**329,743,550**			**400,000,000**
3	25	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	1 dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	-
3	25	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI yang terfasilitasi, Paket percontohan Nila di Kolam/ Tambak, Paket Percontohan Budidaya Gurame, Paket Budidaya Lele di Kolam terpal, Sarana dan prasarana budidaya ikan hias air tawar, Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	2 BBI 12 Paket 6 Paket 4 Paket 2 paket 4 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 BBI 12 Paket 6 Paket 4 Paket 2 paket 4 Paket	-

3	25	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran jasa non PNS Sewa Lahan tersedianya sarana budidaya ikan BBI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	6 Orang 4 lahan 6 BBI	329,743,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Orang 4 lahan 6 BBI	400,000,000
3	25	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis obat yang dibeli Jumlah uji Labor Terlaksananya sosialisasi hama dan penyakit ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	3 Jenis 3 paket 2 Kali	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jenis 3 paket 2 Kali	-
3	**25**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				**150,000,000**			**280,000,000**
3	**25**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan**				**150,000,000**			**280,000,000**
3	25	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko.	Pembinaan forikan Nagari Pembinaan Poklahsar/UPI Penyuluhan dan fasilitasi makanan asal ikan Terlaksananya lomba masak tingkat Kabupaten dan Propinsi Terlaksananya Lomba mewarnai untuk anka TK Terlaksananya pelatihan Bina Mutu Terlaksananya pelatihan diversifikasi pengolahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Nagari	20 Nagari 20 kelompok 15 kelompok 2 Kali 50 anak 10 kelompok 19 kelompok	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Nagari 20 kelompok 15 kelompok 2 Kali 50 anak 10 kelompok 19 kelompok	280,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan pangan dan perikanan serta mencapat target sasaran utama Dinas Pangan dan Perikanan, dibutuhkan dukungan dana yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (dana APBN, APBD dan DAK). Pendanaan pemerintah akan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat yaitu fokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pangan dan perikanan.

Penggunaan dana pemerintah akan dilakukan sesuai tepat sasaran dan memiliki manfaat ekonomi, serta memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menutut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran I.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar. Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Pangan dan Perikanan berupaya seoptimal mungkin mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan pangan dan perikanan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari OPD terkait serta Pemerintah Propinsi dan Pemerintah pusat.

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH DATAR

HARFIAN FIKRI, S.Sos
NIP. 19680525 198809 1 001

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan dan penulisan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dapat dirampungkan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar sebagai dasar dan acuan adalah *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017* tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas sekaligus sebagai instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dan capaian kinerja dari kinerja pada tahun 2023. Disamping itu Renja juga menjadi acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, dimana penyusunan program dan kegiatannya didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan konstribusi dalam penyusunan dan penulisan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga berbagai usaha yang dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Tanah Datar terbebas dari permasalahan sosial dapat diwujudkan.

Batusangkar, Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR

H. AFRIZON, S.Ag
NIP. 19721202 199903 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–OPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

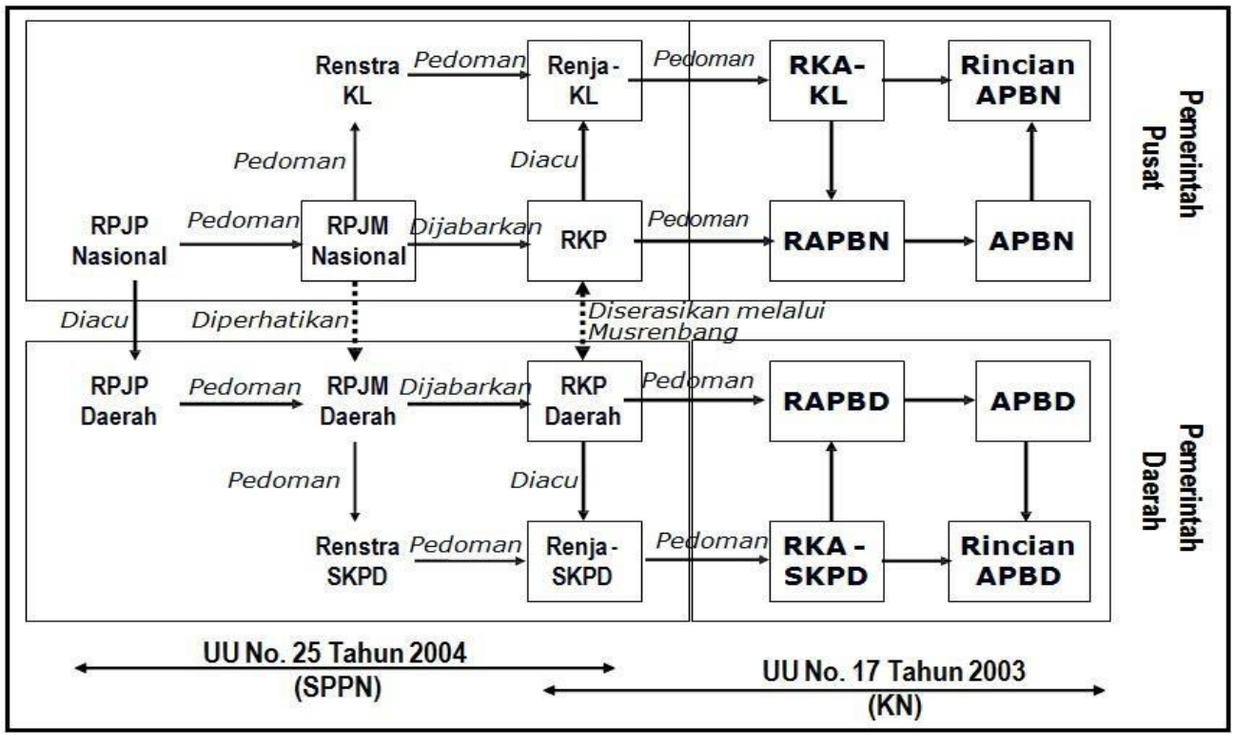
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam ***Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tahun 2017*** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu OPD teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Untuk melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar didukung oleh personil sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Jumlah	Ket.
1	Kepala Dinas	1	
	Sekretariat		
2	Sekretaris	1	
3	Perencana Ahli Muda	1	
4	Analis Kebijakan Ahli Muda	1	
5	Analis Perencanaan dan Program Kegiatan	1	
6	Pengadministrasi Umum	2	
7	Penata Laporan Keuangan	1	
8	Bendahara	1	
9	Verifikator Keuangan	1	
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	
11	Pengemudi	1	
	Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial		
12	Kabid.	1	

13	Pekerja Sosial Madya	1	
14	Pekerja Sosial Ahli Muda	3	
15	Pekerja Sosial Penyelia	2	
16	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1	
17	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	
	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin.	1	
18	Kabid.	1	
19	Pekerja Sosial Ahli Muda	3	
20	Pekerja Sosial Ahli Pertama	2	
	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
21	Kabid.	1	
22	Analis Kebijakan Ahli Muda	2	
23	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	
	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
24	Kabid.	1	
25	Analis Kebijakan Ahli Muda	2	
26	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	1	
27	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	

Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan Relawan Sosial Yang Tersedia sebagai berikut :

No	Kecamatan	Pekerja Sosial Masyarakat	PSP (Pekerja Sosial Profesional)	TKSK	TAGANA	Fasilitator SLRT	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	X Koto	88	-	1	1	10	100
2	Batipuh	145	-	1	1	8	155
3	Batipuh Selatan	15	-	1	2	4	22
4	Pariangan	63	-	1	3	6	73
5	Rambatan	79	-	1	1	6	87
6	Lima Kaum	88	-	1	3	5	97
7	Tanjung Emas	19	-	1	-	4	24
8	Padang Ganting	21	1	1	1	2	26
9	Lintau Buo	46	-	1	-	4	51
10	Lintau Buo Utara	26	-	1	1	8	36
11	Sungayang	23	1	1	2	5	32
12	Sungai Tarab	41	1	1	5	10	58
13	Salimpaung	81	-	1	2	6	90

14	Tanjung Baru	36	-	1	-	2	39
Jumlah Total		771	3	14	22	80	890

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Undang - Undang No. 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pecegahan KDRT
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tanah Datar.
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
11. Instruksi Bupati Tanah Datar Nomor 463/06/Sosial-2018 Tentang Implementasi Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement Dalam Rencana Kerja Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan dan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2023 serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah untuk memasukkan program/ kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sisitematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu.
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran
- 3.1 Telaahan dan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun berjalan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun Berjalan 2023
Kabupaten Tanah Datar

Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
3							4	5			6		7		8		9		10		11		12	13
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.				**100**	**9,818,716,744**	**90.86**	**8,920,835,629**	**100**	**34.077.202.822**	**96,11**	**30.228.466.226**	96	**39.149.301.855**	96	95		
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL.				**100**	**9,098,921,319**	**90.51**	**8,235,177,533**	**100**	**33.080.805.082**	**96,11**	**29.391.060.105**	**93**	**37.626.237.638**	93	92		
1	**06**	**01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				100	4,499,459,324	90.035	3,972,699,065	100	4.234.757.601	96,11	3.955.538.382	98	7.928.237.447	98	95		
1	**06**	**01**	**2.01**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				100	44,994,675	93.53	31,777,600	100	11.005.000	98	4.674.000	96	36.451.600	96	94		
1	**06**	**01**	**2.01**	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	100	4,995,275	99.56	3,164,300	100	2.064.000	99	1.362.000	99	4.526.300	99	98	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.01**	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100	29,999,600	98.36	22,660,550	100	5.173.000	98	1.392.000	98	24.052.550	98	96	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.01**	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	100	9,999,800	82.68	5,952,750	100	3.768.000	97	1.920.000	90	7.872.750	90	79	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				100	4,057,094,269	98.295	3,622,619,796	100	3.766.617.395	99	3.578.412.056	99	7.201.031.852	99	99		
1	**06**	**01**	**2.02**	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	100	4,048,744,394	97.12	3,616,390,596	100	3.763.613.395	100	3.575.680.056	99	7.192.070.652	99	99	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.02**	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dok	100	8,349,875	99.47	6,229,200	100	3.004.000	98	2.732.000	99	9.233.200	99	99	Dinsos	

L	**06**	**01**	**2.05**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				100	8,910,000	66.67	1,100,000	100	13.371.050	99	9.522.500	83	14.471.050	83	80		
1	**06**	**01**	**2.05**	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	ASN	100	8,910,000	66.67	1,100,000	100	13.371.050	99	9.522.500	83	14.471.050	83	80	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				100	125,338,780	93.03	97,815,923	100	63.764.156	99	54.054.000	82	161.580.079	82	81		
1	**06**	**01**	**2.06**	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor yang Disediakan	13	Jenis	100	2,545,400	95.03	2,419,000	100	5.000.000	100	5.000.000	98	7.419.000	98	97	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.06**	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31	Jenis	100	16,826,480	100	16,826,250	100	17.539.800	99	13.256.000	100	34.366.050	100	98	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.06**	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Pengandaan yang Disediakan	12	Jenis	100	8,991,800	100	7,126,023	100	8.080.100	98	6.271.000	99	15.206.123	99	98	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.06**	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peranturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Macam	100	8,750,000	64	5,600,000	100	5.000.000	100	4.940.000	82	10.600.000	82	80	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.06**	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan Tamu	172	porsi	100	4,742,100	99.56	3,540,750	100	9.321.500	99	8.120.000	99	12.862.250	99	98	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.06**	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	52	kali	100	83,483,000	99.56	62,303,900	100	18.822.756	98	16.467.000	99	81.126.656	99	97	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**50,754,500**	**89.83**	**43,353,578**	**100**	**79.000.000**	100	**57.119.061**	95	**122.353.578**	95	95		
1	**06**	**01**	**2.08**	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	578	buah	100	2,256,000	99.73	2,250,000	100	5.000.000	100	1.500.000	100	7.250.000	100	99	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.08**	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1000	m3	100	24,600,000	76.48	18,814,578	100	50.000.000	100	31.619.661	88	68.814.578	88	87	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.08**	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	jenis	100	23,898,500	93.27	22,289,000	100	24.000.000	99	23.999.400	96	46.289.000	96	95	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				100	212,367,100	98.86	176,032,168	100	301.000.000	82	251.756.765	90	477.032.168	90	89		
1	**06**	**01**	**2.09**	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	unit	100	159,491,100	96.58	154,032,168	100	185.000.000	98	148.242.285	97	339.032.168	97	95	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.09**	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	unit	100	3,000,000	100	3,000,000	100	20.000.000	50	7.523.000	75	23.000.000	75	73	Dinsos	
1	**06**	**01**	**2.09**	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	unit	100	49,876,000	100	19,000,000	100	96.000.000	98	95.991.480	99	115.000.000	99	98	Dinsos	

1	06	02					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				100	320,209,400	81.24	217,215,312	100	235.103.415	98	227.020.750	91	452.318.727	91	90		
1	06	02	2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				100	320,209,400	81.24	217,215,312	100	235.103.415	98	227.020.750	91	452.318.727	91	90		
1	06	02	2.03	02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan TKSK dalam memberikan pelayanan sosial di tingkat kecamatan	14	org	100	30,408,250	95.64	20,066,875	100	22.632.900	97	20.771.400	96	42.699.775	96	95	Dinsos	
1	06	02	2.03	03			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan pada KUBE Keluarga miskin	20	klpk	100	111,183,550	80.09	64,284,200	100	146.320.000	98	143.620.850	89	210.604.200	89	88	Dinsos	
1	06	02	2.03	04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyuluhan sosial pada PMKS dan PSKS	3	lbg	100	95,109,625	94.6	94,434,469	100	62.390.115	97	60.003.500	96	156.824.584	96	95	Dinsos	
1	06	02	2.03	05			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya kegiatan LK3 dan terlaksananya penyuluhan sosial pada PMKS dan PSKS	160	org	100	51,497,800	68.12	23,449,568	100	3.760.400	99	2.625.000	84	27.209.968	84	83	Dinsos	
1	06	04					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				100	2,109,941,825	89.31416667	1,968,413,300	100	27.709.574.799	98	24.542.833.403	94	29.677.988.099	94	92		
1	06	04	2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				100	1,944,272,050	90.99	1,837,696,900	100	2.391.504.819	100	2.033.540.600	96	4.229.201.719	96	95		
1	06	04	2.01	01			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupten/Kota	75	nagari	100	1,459,075,000	87.86	1,146,000,000	100	750.000.000	100	702.000.000	94	1.896.000.000	94	93	Dinsos	
1	06	04	2.01	06			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250	org	100	19,259,875	92.58	13,372,700	100	1.185.410.000	100	934.429.000	96	1.198.782.700	96	95	Dinsos	
1	06	04	2.01	08			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	100	461,107,175	96.54	675,174,200	100	456.094.819	100	397.111.600	98	1.131.269.019	98	96	Dinsos	

l	**06**	**04**	**2.02**				**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**100**	165,669,775	87.64	130,716,400	100	25.318.069.980	97	22.509.292.803	92	25.448.786.380	92	91		
1	**06**	**04**	**2.02**	03			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75	nagari	100	64,929,525	72.34	35,840,000	100	20.841.100	100	19.522.250	86	56.681.100	86	85	Dinsos	
1	**06**	**04**	**2.02**	05			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan kabupaten/Kota	100	org	100	91,437,950	99.84	88,000,800	100	3.228.000	100	3.054.000	100	91.228.800	100	100	Dinsos	
1	**06**	**04**	**2.02**	07			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	org	100	9,302,300	90.75	6,875,600	100	25.294.000.880	90	22.486.716.553	90	25.300.876.480	90	90	Dinsos	
1	**06**	**05**					**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**100**	**1,737,298,600**	**97.9875**	**1,676,566,750**	**100**	**746.504.467**	**95**	**523.788.800**	82	**2.423.071.217**	95	94		
1	**06**	**05**	**2.02**				**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				100	542,998,850	95.98	483,076,700	100	746.504.467	95	523.788.800	82	1.229.581.167	95	94		
1	**06**	**05**	**2.02**	01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota yang Didata	14	kec	100	118,050,000	92.97	75,804,700	100	8.916.700	100	5.491.800	96	84.721.400	96	96	Dinsos	
1	**06**	**05**	**2.02**	02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100	%	100	424,948,850	98.98	407,272,000	100	556.840.240	90	518.297.000	94	964.112.240	94	93	Dinsos	
1	**06**	**06**					**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**100**	**332,057,345**	**97.85**	**308,499,343**	**100**	**121.644.000**	**100**	**109.174.000**	99	**430.143.343**	99	99		
1	**06**	**06**	**2.01**				**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				100	332,057,345	97.85	308,499,343	100	121.644.000	100	109.174.000	99	430.143.343	99	99		
1	**06**	**06**	**2.01**	04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabuaten/Kota	430	org	100	332,057,345	97.85	308,499,343	100	121.644.000	100	109.174.000	99	430.143.343	99	99	Dinsos	
1	**06**	**07**					**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**100**	**99,954,825**	**94.85**	**91,783,763**	**100**	**33.220.800**	**99**	**32.704.770**	97	**125.004.563**	97	96		
1	**06**	**07**	**2.01**				**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**				100	99,954,825	94.85	91,783,763	100	33.220.800	99	32.704.770	97	125.004.563	97	96		
1	**06**	**07**	**2.01**	02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	TMP	100	99,954,825	94.85	91,783,763	100	33.220.800	99	32.704.770	97	125.004.563	97	96	Dinsos	
2	**08**	**02**					**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				100	446,831,650	98.61	416,082,530	100	856.365.500	98	698.778.167	98	1.272.448.030	98	98		

2	**08**	**02**	**2.01**				**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**100**	**68,420,000**	**98.86**	**36,277,100**	**100**	**29.647.500**	**99**	**28.130.100**	**99**	**64.407.200**	**99**	**98**		
2	**08**	**02**	**2.01**	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	100	10,369,900	98.79	4,946,200	100	3.946.600	99	3.314.200	99	8.260.400	99	98	Dinsos	
2	**08**	**02**	**2.01**	03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangnan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	100	58,050,100	98.92	31,330,900	100	25.700.900	98	24.815.900	98	56.146.800	98	97	Dinsos	
2	**08**	**02**	**2.02**				**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**100**	**119,534,850**	**98.26**	**96,716,080**	**100**	**265.000.000**	**98**	**248.924.507**	**98**	**345.640.587**	**98**	**98**		
2	**08**	**02**	**2.02**	02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	75	org	100	119,534,850	98.26	96,716,080	100	265.000.000	98	248.924.507	98	345.640.587	98	98	Dinsos	
2	**08**	**02**	**2.03**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**100**	**258,876,800**	**98.72**	**283,089,350**	**100**	**561.718.000**	**99**	**421.723.560**	**99**	**704.812.910**	**99**	**99**		
2	**08**	**02**	**2.03**	02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3	orgnissi	100	253,365,000	97.43	279,887,150	100	549.900.000	98	412.808.560	98	692.695.710	98	97	Dinsos	
2	**08**	**02**	**2.03**	03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	org	100	5,511,800	100	3,202,200	100	11.818.000	99	8.915.000	100	12.117.200	100	100	Dinsos	
2	**08**	**03**					**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**100**	**64,108,550**	**46.02**	**36,497,100**	**100**	**19.985.000**	**99**	**19.258.500**	**95**	**55.755.600**	**95**	**93**		
2	**08**	**03**	**2.01**				**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**100**	**64,108,550**	**88.43**	**33,235,900**	**100**	**14.485.000**	**99**	**13.758.500**	**95**	**46.994.400**	**95**	**93**		

2	08	03	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Progam dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39	opd	100	22,602,150	81.94	12,712,100	100	6.150.000	99	5.423.500	90	18.135.600	90	88	Dinsos	
2	08	03	2.01	02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14	kec	100	41,506,400	94.92	20,523,800	100	8.335.000	98	8.335.000	100	28.858.800	100	99	Dinsos	
2	**08**	**03**	**2.02**				**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/ Kota**				100	-	3.61	3,261,200	100	5.500.000	99	5.500.000	95	8.761.200	95	94		
2	08	03	2.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Mmerlukan Koordinasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	100		3.61	3,261,200	100	5.500.000	99	5.500.000	95	8.761.200	95	94	Dinsos	
2	**08**	**02**	**2.01**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK.**				100	39,344,900	99.97	24,380,250	100	19.530.640	98	19.505.400	99	43.885.650	99	99		
2	**08**	**02**	**2.01**				**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				100	39,344,900	99.97	24,380,250	100	19.530.640	98	19.505.400	99	43.885.650	99	99		
2	08	02	2.02	01			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dok	100	39,344,900	99.97	24,380,250	100	19.530.640	98	19.505.400	99	43.885.650	99	99	Dinsos	
2	**08**	**06**					**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				100	34,769,450	99.99	41,010,700	100	42.256.800	99	41.882.400	99	82.893.100	99	99		
2	**08**	**06**	**2.02**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				100	34,769,450	99.99	41,010,700	100	42.256.800	99	41.882.400	99	82.893.100	99	99		

2	08	06	2.02	03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8	forum	100	34,769,450	99.99	41,010,700	100	42.256.800	99	41.882.400	99	82.893.100	99	99	Dinsos	
2	**08**	**07**					**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				100	134,740,875	72.34	167,687,516	100	58.259.800	99	57.981.654	95	225.669.170	98	97		
2	**08**	**07**	**2.01**				**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				100	45,741,075	98.48	81,088,500	100	21.224.800	98	20.957.004	99	102.045.504	99	99		
2	08	07	2.01	01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Progam dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	100	45,741,075	99.33	28,829,000	100	21.224.800	98	20.957.004	99	49.786.004	99	99	Dinsos	
2	**08**	**07**	**2.02**				**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				100	88,999,800	46.205	86,599,016	100	37.035.000	99	37.024.650	98	123.623.666	98	96		
2	08	07	2.02	01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	100	88,999,800	82.75	58,765,116	100	37.035.000	99	37.024.650	98	95.789.766	98	96	Dinsos	

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
   A. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yang anggaran nya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mana realisasi anggarannya hanya sebesar Rp.1.392.000,- dari anggaran sebesar Rp.5.173.000,- atau 26,91%.
   B. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yang anggaran nya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mana realisasi anggarannya hanya sebesar Rp.1.920.000,- dari anggaran sebesar Rp.3.768.000,- atau 50,96%.
   Hal ini disebabkan karena kesalahan administrasi pencairan dana.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu seluruh kegiatan pada tahun anggaran 2023 kecuali 2 (dua) sub kegiatan diatas.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 tidak ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Adapun pencapaian kinerja pembangunan dibidang sosial maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Minimal Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh PP Nomor Tahun 2018 Tentang SPM terdiri dari :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar

				Target Renstra Dinas Sosial PPPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		
NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	Bukan warga Kab. Tanah Datar.
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar tersebut untuk indikator SPM Daerah Kabupaten/ Kota, indicator SPM Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti yang tidak ditangani Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar, karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut bukan warga Kabupaten Tanah Datar. Mereka berasal dari daerah lain dan keberadaan mereka pada umumnya musiman.

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Capaian kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Persentase PPKS yang Terlayani. Tahun 2022 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani sebanyak 1.113 orang yang terdiri dari 196 orang penyandang disabilitas, 266 orang lanjut usia miskin, 315 orang anak terlantar dan 336 orang kelompok rentan (bencana alam puting beliung dan kebakaran).

.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Seiring perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi, memberi dampak pada permasalahan sosial dan ketenagakerjaan yang semakin rumit dan kompleks. Pada satu sisi perkembangan teknologi memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, disisi lain juga menimbulkan dampak negatif. Untuk menyikapi dampak negatif yang timbul akibat perkembangan teknologi yang semakin berpengaruh terhadap perikehidupan sosial masyarakat dan ketenagakerjaan sangat diperlukan upaya preventif dan kuratif baik dari pemerintah selaku penentu kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima program.

Isu-isu strategis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkembang saat ini adalah :

A. **Bidang Sosial :**

1. Masalah Kemiskinan.
2. Sarana dan prasarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum memadai.
3. Terbatasnya Penanganan PMKS, artinya masih rendahnya kualitas pelayanan publik dibidang sosial seperti terhadap penyandang cacat, baik Penyandang cacat berat maupun penyandang cacat mampu latih, anak terlantar, keluarga fakir miskin dan lanjut usia terlantar keluarga miskin.
4. Makin berkembang dan kompleksnya permasalahan sosial, terutama permasalahan yang berhubungan dengan anak dan remaja seperti pelecehan seksual, anak dengan kekerasan dan penggunaan narkoba .
5. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang belum optimal, artinya masih kurangnya tenaga atau lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang ada belum mampu memberikan kontribusi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial itu sendiri.
6. Kurang terlaksananya penyuluhan dan bimbingan mental sosial kepada masyarakat terutama PMKS.
7. Kurangnya sarana dan prasarana penanganan bencana alam maupun bencana sosial yaitu tenda dan kendaraan roda 4 untuk bencana.

B. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

1. Rendahnya peran serta perempuan dalam kelembagaan eksekutif, legislative dan yudikatif
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender.
3. Belum optimalnya lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Belum optimalnya implementasi anggaran yang responsive gender pada OPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD digunakan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai Dinas Sosial PPPA dengan melakukan pengentrian awal Renja pada aplikasi SAKIP Tanah Datar dan e-SAKIP Reviu yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) berdasarkan anggaran OPD yang disepakati.

Bahwa perencanaan program dan kegiatan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar tentunya berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah- langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Sosial PPPA.

Program dan kegiatan yang diusulkan tersebut dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial maupun kebijakan daerah lainnya.

Rencana program kegiatan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar, maka apabila terjadi perbedaan dengan hasil analisis yang dibuat seperti terdapat rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD atau Program/ Kegiatan yang tidak cocok atau sama tetapi besarannya berbeda hal itu dikarenakan dalam pembuatan rancangan awal RKPD hanya mencantumkan perkiraan Program/ Kegiatan pada awal tahun, dimana dalam perkembangannya mungkin ada penambahan atau perubahan Program/ Kegiatan berdasarkan usulan dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga proses tersebut bisa dilakukan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar yang langsung ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten pada tahun 2023 tidak ada.

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Tanah Datar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan melalui:
    a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
    b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan
    c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar

Visi	*Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang terbebas dari permasalahan sosial*
Misi 2	*1. Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap Penyandang Permasalahan Sosial (PMKS)* *2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak*
Tujuan	*Sasaran*
1. Pemberdayaan Masyarakat miskin	*1. Menurunnya jumlah penduduk miskin* *2. Meningkatnya pelayanan terhadap penduduk miskin*
1. Pemberdayaan dan Pelayanan Penyandang Permasalahan Sosial (PMKS)	*1. Menurunnya jumlah Penyandang Permasalahan Sosial (PMKS)* *2. Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Permasalahan Sosial (PMKS)*
3. Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber potensi kesejahteraan sosial	*1. Meningkatnya peran serta dan kualitas potensi kesejahteraan sosial*
4. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	*1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak* *2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan* *3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender*

Tujuan dan sasaran rencana kerja yang disusun berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Persentase PMKS yang tertangani.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan, dengan Indikator Kinerja Persentase Pemberdayaan perempuan rawan ekonomi.

Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan Indikator Kinerja Rasio KDRT dan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak.

Sasaran 4 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja : Predikat Nilai Akuntabiltas Kinerja dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.3. Program dan Kegiatan.

a. Pada SPM Dinas Sosial PPPA mempunyai tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan sasaran indikatornya Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdiri dari :
   1. Angka Kemiskinan
   2. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
   3. Indek Pembangunan Gender (IPG).

b. Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial adalah program/ kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan dengan bentuk penanganan pemberian bansos uang kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia miskin.

Jumlah Program yang diusulkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 program dan 22 kegiatan dengan sumber dana seluruhnya DAU.
Semua program dan kegiatan dilakukan di dalam Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tanah Datar
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANoG SOSIAL**				**3.111.400.000,00**				**3.978.040.000,00**
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**475.400.000,00**				**522.940.000,00**
1	**6**	**2**	**2,03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**475.400.000,00**				**522.940.000,00**
1	6	2	2,03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Orang	275.000.000,00
1	6	2	2,03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								

						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	75.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Orang	82.940.000,00
1	6	2	2,03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Keluarga	55.000.000,00
1	6	2	2,03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Lembaga	82.500.000,00
1	6	2	2,03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Sertifikat	27.500.000,00
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**1.685.000.000,00**				**1.853.500.000,00**
1	**6**	**4**	**2,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**1.570.000.000,00**				**1.727.000.000,00**
1	6	4	2,01	1	Penyediaan Permakanan								

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	1.100.000.000,00
1	6	4	2,01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	77.000.000,00
1	6	4	2,01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Orang	550.000.000,00
1	**6**	**4**	**2,02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**115.000.000,00**				**126.500.000,00**
1	6	4	2,02	3	Penyediaan Permakanan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	55.000.000,00
1	6	4	2,02	5	Penyediaan Alat Bantu								

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	44.000.000,00
1	6	4	2,02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	27.500.000,00
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**696.000.000,00**				**1.508.100.000,00**
1	**6**	**5**	**2,01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**				**75.000.000,00**				**825.000.000,00**
1	6	5	2,01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar								
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Orang	825.000.000,00
1	**6**	**5**	**2,02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**621.000.000,00**				**683.100.000,00**
1	6	5	2,02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	23.100.000,00
1	6	5	2,02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Keluarga	660.000.000,00
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**170.000.000,00**				**0,00**
1	**6**	**6**	**2,01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**170.000.000,00**				**0,00**

1	6	6	2,01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	0,00
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**85.000.000,00**				**93.500.000,00**
1	**6**	**7**	**2,01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**				**85.000.000,00**				**93.500.000,00**
1	6	7	2,01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Makam	93.500.000,00
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1.125.000.000,00**				**995.500.000,00**
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**690.000.000,00**				**726.000.000,00**
2	**8**	**2**	**2,01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**90.000.000,00**				**99.000.000,00**
2	8	2	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota								

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokum en	44.000.000,00
2	8	2	2,01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39 Peran gkat Daerah	55.000.000,00
2	**8**	**2**	**2,02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**70.000.000,00**				**77.000.000,00**
2	8	2	2,02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
						Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Organi sasi	77.000.000,00
2	**8**	**2**	**2,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**530.000.000,00**				**550.000.000,00**

2	8	2	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	550.000.000,00
2	8	2	2,03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokum en	0,00
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**90.000.000,00**				**77.000.000,00**
2	**8**	**3**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**40.000.000,00**				**22.000.000,00**
2	8	3	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokum en	22.000.000,00
2	8	3	2,01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								

						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39 Peran gkat Daerah	0,00
2	**8**	**3**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**50.000.000,00**				**55.000.000,00**
2	8	3	2,02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	-		15 Orang	55.000.000,00
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**50.000.000,00**				**55.000.000,00**
2	**8**	**5**	**2,01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**50.000.000,00**				**55.000.000,00**
2	8	5	2,01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokum en	55.000.000,00
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**75.000.000,00**				**82.500.000,00**

2	**8**	**6**	**2,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**75.000.000,00**					**82.500.000,00**
2	8	6	2,02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokum en	82.500.000,00
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**220.000.000,00**					**55.000.000,00**
2	**8**	**7**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**50.000.000,00**					**55.000.000,00**
2	8	7	2,01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39 Perangkat Daerah	55.000.000,00

2	**8**	**7**	**2,02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**170.000.000,00**				**0,00**
2	8	7	2,02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	0,00
X													
X	**XX**				**-**				**4.874.987.206,00**				**5.322.885.926,00**
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.874.987.206,00**				**5.322.885.926,00**
X	**XX**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**30.000.000,00**				**33.000.000,00**
X	XX	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokum en	5.500.000,00
X	XX	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokum en	22.000.000,00
X	XX	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.500.000,00
X	**XX**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.159.987.206,00**				**4.575.985.926,00**
X	XX	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	4.154.987.206,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Orang /bulan	4.570.485.926,00
X	XX	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.500.000,00
X	**XX**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**20.000.000,00**				**2.200.000,00**
X	XX	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	2.200.000,00
X	**XX**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**195.000.000,00**				**214.500.000,00**
X	XX	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.500.000,00

X	XX	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	55.000.000,00
X	XX	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	22.000.000,00
X	XX	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	16.500.000,00
X	XX	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokum en	11.000.000,00
X	XX	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	15.000.000,00	-		20 Laporan	16.500.000,00
X	XX	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	88.000.000,00
X	**XX**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**75.000.000,00**				**82.500.000,00**
X	XX	1	2,07	5	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Unit	82.500.000,00
X	**XX**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**79.000.000,00**				**86.900.000,00**
X	XX	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.500.000,00
X	XX	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	55.000.000,00
X	XX	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	26.400.000,00
X	**XX**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**316.000.000,00**				**327.800.000,00**
X	XX	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	185.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	203.500.000,00
X	XX	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	2.200.000,00
X	XX	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	111.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	122.100.000,00
TOTAL									**9.111.387.206,00**				**10.296.425.926,00**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya didasarkan pada usulan dari sekretariat dan bidang-bidang. Program dan kegiatan serta pendanaan yang tercantum dalam Renja Dinsos PPPA merupakan indikasi yang hendak dicapai pada tahun anggaran 2025 dan bersifat indikatif. Renja ini disusun mengacu pada RPJMD 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 dan telah disesuaikan dengan Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Sebelum ditetapkan Renja dibahas terlebih dahulu sebagai bahan perumusan prioritas program dan kegiatan strategis yang direncanakan pada tahun anggaran 2025.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersumber dari anggaran APBD tahun 2025, dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu. Dengan adanya Renja tahun 2025 , diharapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan sinergis dengan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ***rencana tindak lanjut*** yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini perlu disusun beberapa kaidah -kaidah yang terkait pelaksanaan Program/Kegiatan yang meliputi :

1. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
2. Mempedomani Urusan yang telah diatur sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

Batusangkar, Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR

H. AFRIZON, S. Ag, M.Pd
NIP. 19721202 199903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Koto Piliang Telp. (0752) 71037, Kode Pos 27211 BATUSANGKAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TANAH DATAR
NOMOR : 900/05/DINSOS PPPA-2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679

3. Undang-undang *Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang* Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-undang *Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang* Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 900/05/DINSOS PPPA 2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar;

9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data dan informasi serta menelaah aturan yang terkait penyusunan renja Dinas Sosial PPPA.
2. Menyusun dokumen renja Dinas Sosial PPPA tahun 2025 sesuai tahapan dan tata cara penyusunan renja.
3. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen renja Dinas Sosial PPPA.

KETIGA : Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial PPPA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 5 JANUARI 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TANAH DATAR

AFRIZON S.Ag
NIP.19721202 199903 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 900/05/DINSOS PPPA 2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Afrizon,S.Ag.M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Heldiyas, SH	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Ferdinandus, SE	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Drs. Aslamudin, M.Si	Kabid PSPFM	Anggota
5.	Suci Indriani, S.Pd	Kabid RPJS	Anggota
6.	Yuri Yasmin,SH,M.Si	Kabid PPK PA	Anggota
7.	Bulqis, SKM	Kabid PUG PP	Anggota
8.	Fuad Zain, A.Md	Analis Perencanaan dan Program	Anggota

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 5 JANUARI 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. TANAH DATAR

AFRIZON S.Ag.M.Pd
NIP.19721202 199903 1 003



RENCANA KERJA AKHIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita sampaikan kepada Allah Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan pedoman untuk anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renja ini, sehingga Renja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Rencana Kerja ini, tentu jauh dari kesempurnaan, untuk itu dimohon saran kritik yang positif demi penyempurnaannya.

Semoga Allah.SWT senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Batusangkar, Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KABAKARAN

KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. MUKHLIS
NIP. 19690819 198902 1 001

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan system perencanaan nasional. Begitu dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah(OPD) harus mengacu pada system perencanaan daerah.

Untuk mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang menindaklanjuti program RPJMD dan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan OPD selama 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan ada yang ada pada Rencana Kerja (Renja) harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan disinkronkan dengan Renstra OPD.

Renja OPD disusun dengan menyusun rancangan awal Renja, menyusun rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan rancangan akhir; Renja.

Pemerintah yang baik *(good governance)*merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di era globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini telah mengalami perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya dapat direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan

yang terarah dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah maka daerah akan mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu ditampung dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian diwujudkan menjadi visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, kemudian ditindaklanjuti pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 , selanjutnya disebut Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya dilator belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja yang disusun olen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 56 tahun 2010 tentang pembentukan daerah.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten/ Kota
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah Tahun 2021-2026
17. Peraturan Bupati Tanah Datar No. 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dengan mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2023 ,

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 ini adalah:

a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 .
b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian rancangan Renja OPD , meliputi :

- KATA PENGANTAR

- DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review terhadap rancangan awal OPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V PENUTUP

- LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Sesuai dengan pengalokasian anggaran tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan 23 sub kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan program tersebut dimasukkan dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2026, berikut capaian kinerja pada masing – masing program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar pada tahun anggaran 2023 :

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

11 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA. Dana yang dianggarkan Rp 10.00.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.988.500,- atau 99,89% dan fisik 100%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan LKjIP, LKPJ dan LPPD. Dana yang dianggarkan Rp.4.998.250,- dengan realisasi Rp 4.991.000,- atau 99,85% dan fisik 100%.

12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub Kegiatan :

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan ini teraliasasi berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP selama 14 Bulan. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.646.318.207,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.598.652.123,- atau 98,97% dan fisik 100 %

b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Dana yang dianggarkan Rp.4.998.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.718.000,- atau 94,39 % dan fisik 100%.

13 Administrasi Kepegawaian Perangkar Daerah

Dengan sub kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
Kegiatan ini terealisasi berupa Bintek bagi 5 orang pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.560.000,- atau 98,24 % dengan fisik 100 %.

14 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa Penyediaan senter kepala, bola lampu, saklar dan penggantian kabel. Dana yang dianggarkan Rp.5.999.100,- dengan realisasi Rp. 5.999.000 ,- atau 99,98% dan fisik 100%.

b. Penyediaan bahan logistik kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat tulis kantor. Dana yang dianggarkan Rp.21.430.500,- dengan realisasi Rp. 21.297.500,- 99,28% dan fisik 100%.

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan barang cetak dan penggandaan. Dana yang dianggarkan Rp.12.939.875,- dengan realisasi Rp. 12.564.750,- atau 97,10% dan fisik 100%.

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran langganan surat kabar harian dan mingguan. Dana yang dianggarkan Rp. 7.000.000,- dengan realisasi Rp. 6.990.000,- atau 99,86% dan fisik 100%.

e. Fasilitasi kunjungan tamu.

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu.

Dana yang dianggarkan Rp. 10.819.600,- dengan realisasi Rp. 10.804.800,- atau 99,86% dan fisik 100%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

Dana yang dianggarkan Rp.113.186.000,- dengan realisasi Rp. 64.394.222,- atau 99,75% dan fisik 100%.

15 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini berupa pembelian materai. Dana yang dianggarkan Rp.1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100 % dan fisik 100 %

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik. Dana yang dianggarkan Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp. 40.447.106,- atau 80,89 dan fisik 100%.

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini terealisasi pembelian super pel, sabun cuci tangan, rinso, sapu lantai dan pengharum ruangan.

Dana yang dianggarkan Rp.3.497.600,- dengan realisasi Rp. 3.495.000,- atau 99,93% dan fisik 100%.

‘7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah umum

a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya, pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas opersional atau lapangan

Kegiatan Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran BBM pajak , Kir, STNK dan pembayaran SIM sopir Pemadam Kebakaran untuk 5 unit kendaraan Pemadam Kebakaran, 6 unit kendaraan operasional dinas roda empat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua. Dana yang dianggarkan Rp.357.468.750,- dengan realisasi Rp. 357.118.202,- atau 99,90% dan fisik 100%.

b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini terealisasi berupa servis laptop, computer dan printer. Dana yang dianggarkan Rp. 8.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.994.500,- atau 99,93% dan fisik 100%.

8. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan

a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan

Kegiatan ini terealisasi berupa

1. Kasus Trantibum : 6 kasus
2. Patroli sebanyak : 372 ka//li
3. Pengamanan Pengawalan sebanyak : 474 kali
4. Pengawalan : 15 kali

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.95.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 94.904.500,- (99,90 %) dan fisik 120 %

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui penertiban sebanyak 50 Kali

Kegiatan ini teralisasi berupa: penertiban pasar, penertiban pelanggaran trantibum. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.47.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 46.800.000 (99,57%) dan fisik 208%

9. Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
   a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

      Kegiatan ini berupa pengawasan dan razia terhadap pelanggaran terhadap 4 Perda. Penegakan Perda tersebut dilakukan melalui razia sendiri Satpol PP dan razia bersama Polres Tanah Datar dan Kodim 0307 sebanyak 269 kali dengan kasus 31 kasus dengan rincian:

      - Perda Nomor 4 Tahun 2010/2023 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum : 23 kasus
      - Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung : 8 kasus

      Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.022.059.400 dengan realisasi sebesar Rp. 1.006.119.611,- (98,44 %) dan capaian kinerja 269 %.

10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
    a. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS

       Kegiatan ini berupa pengiriman personil untuk mengikuti diklat PPNS Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.740.000 dengan realisasi sebesar Rp. 36.258.494 (70,08 %) dan capaian kinerja 100%.

11. Kegiatan Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota
    a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

       Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kebakaran dan pengawasan racun api yang dilakukan ke Instansi Pemerintah dan Nagari-nagari. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.320.000 dengan realisasi

sebesar Rp. 10.200.000,- (98,84 %) dan capaian kinerja 100 %.

b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemadaman kebakaran dalam wilayah managemen kebakaran dan membantu kebakaran pada Kabupaten tetangga jika di butuhkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan 72 kali pemadaman dalam wilayah managemen kebakaran , 1 kali di luar WMK dan 176 kali animal rescue. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.930.574.400 dengan realisasi sebesar Rp. 1.930.375.600,- (99,99 %) dan capaian kinerja 94,44 %.

12. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran

Kegiatan ini dilaksanakan berupa sosialisasi pembentukan Relawan Kebakaran pada 2 Nagari di Kabupaten tanah Datar.Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.848.000,- (98,03 %) dan capaian kinerja 100 %

13. Investigasi Kejadian Kebakaran

a. Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian, pengujian, penyebab kejadian kebakaran

Kegiatan ini dilaksanakan berupa laporan yang merupakan hasil penelitian, pengujian dan penyebab kejadian kebakaran sebanyak 40 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.848.000,- (97,50%) dan capaian kinerja 100 %

Dari hasil evaluasi renja sampai dengan tahun 2023, Target kinerja kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Evaluasi Renja s/d 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan. Realisasi capaian renja s.d 2023 yang telah dievaluasi 37%. Ini disebabkan penyesuaian anggaran dengan kemapuan daerah
2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Realisasi capaian renja s.d 2023 yang telah dievaluasi 27%. Ini disebabkan penyesuaian anggaran dengan kemapuan daerah
3. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, capaian renja s.d 2023 yang telah dievaluasi 16%. Ini disebabkan penyesuaian anggaran dengan kemapuan daerah
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya Realisasi capaian renja s.d 2023 yang telah dievaluasi 16,67%. Ini disebabkan penyesuaian anggaran dengan kemapuan daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar untuk kelancaran penyelenggaraaan tugas-tugas pemerintah untuk peningkatan pelayanan di bidang pembagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur dan Persandian Subbidang Pemerintahan Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar sebagai fasilitator dan advisor dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar dalam ra

ngka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman serta menyelenggakan perlindungan masyarakat.

2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, aparatur, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, dan perlengkapan ;

3. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar dengan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;

4. Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD meliputi bidang : Pemerintahan umum, pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, pertanahan, kerjasama, pemberdayaan nagari, pembinaan administrasi nagari, hubungan masyarakat, media dan penerangan masyarakat, pengolahan, pengembangan sistem informasi dan persandian;

5. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Daerah dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

6. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran berupa :

   a. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran.
   b. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
   c. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
   d. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Analisis terhadap Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar di lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Tanah Datar dan cenderung diluar kendali.

Pada Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Pelayanan Dasar dan Wajib. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan polisi pamong Praja bahwa Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketertraman serta menyelenggarakan perlindungan masayarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi kabupaten/kota dan Peraturan Meteri dalama Negeri nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota, penerapan SPM adalah yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, aman serta menjaga bahaya bencana kebakaran.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan Satpol PP dan Damkar tahun 2023 4 buah Perda dan Perkada,
   dengan target penegakan 100 kali dengan realisasi 269 kali . Perda yang ditegakkan:
   - Perda Nomor 4 Tahun 2010/2023 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa Rokok
- Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

2. Penyelenggaraan trantibum. Selama tahun 2023 telah dilakukan penyelenggaran trantibum sebanyak
   a. Kasus Trantibum : 6 kasus
   b. Patroli sebanyak : 372 ka//li
   c. Pengamanan Pengawalan sebanyak : 474 kali
   d. Pengawalan : 15 kali
3. Penyelenggaraan linmas. Pada tahun 2023 telah di kukuhkan limas nagari melalui SK Bupati sebanyak 1185 orang dari 75 nagari di kabupaten Tanah Datar.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap respon time. Dari 68 kejadian kebakaran 72 kejadian telah di tanggapi dalam waktu maksimal 15 menit
5. Penyelenggaraan penyelamatan non kebakaran selama tahun 2023 telah dilaksanakan 15 jenis penyelamatan dan 176 kali rescue

2.3.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar adalah :

a. Kekurangan personil Satpol PP.
   luas Kabupaten 1.336 Km2 , dan 14 kecamatan, Satpol PP hanya mempunyai 0rang anggota PNS 22 orang dan 32 orang anggota THL Penegak Perda,
b. Kurangnya Kendaraan operasional SatPol PP. Saat ini Satpol PP hanya memiliki 2 unit mobil patroli, 4 unit kendaraan roda 2 .
c. Kurangnya sarana pendukung pekerjaan Satpol PP seperti body protector, tameng, tongkat, seragam PDH, PDL, senter.

d. Personil Satpol PP banyak yang belum mendapatkan pelatihan dasar
e. Kurang nya personil Pemadam Kebakaran yang hanya memiliki 60 orang personil yang tersebar pada 4 posko
f. sarana dan prasana pemadam kebakaran belum memadai seperti mobil operasional pemadam kebakaran, fire suit, pakaian PDH, sepatu safety dll.
g. Kurang nya sarana dan prasarana pendukung. Pemadam Kebakaran hanya memiliki 4 buah posko, memiliki 6 unit mobil Damkar.
h. Belum memiliki perlengkapan rescue yang memadai
i. Indikator kinerja Utama pada Satpol PP Damkar dan belum mencakup seluruh SPM pada Satpol PP dan Damkar
j. Kegiatan yang ada pada Satpol PP Damkar dan belum mencakup pencapaian SPM pada Satpol PP dan Damkar.
k. Masih kurangnya kemampuan SDM pada Satpol PP dan Damkar, sehingga perlu dilaksanakan diklat teknis dan fungsional
l. Belum optimal pelaksanaan tugas trantibum dan pelanggaran trantibum belum di tindak lanjuti secara yustisial atau non yustisial
m. Belum optimal pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada dan pelanggaran Perda belum ditindak lanjuti secara yustisial atau non yustisial
n. Kegiatan penyelamatan non kebajaran yang telah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir belum di dukung oleh perlengkapan dan anggaran kegiatan.

2.3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif serta produktif.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Tanah Datar adalah ”

Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah "

Misi adalah penjabaran visi yaitu pernyataan-pernyataan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan. Misi memberi arahan kepada para pelaku pembangunan dalam pemanfaatan sumberdaya secara ekonomis, efektif dan efisien. Apabila visi dijadikan acuan dasar dalam merumuskan tujuan maka misi menjadi acuan dasar dalam merumuskan sasaran.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas Misi Kabupaten Tanah Datar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam mengemban visi dan misi Kepala Daerah, Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas untuk dapat

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien."

dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntable efektif dan efisien	1 Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan trantibum dan fungsi linmas 2 Meningkatnya Pelayanan Pencegahan pengendalian,

		pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaram dalam wilayah managamen kebajaran dengan waktu tanggap sesuai respon time

Sedangkan visi yang akan di wujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar adalah : ***" Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar melalui Pelayanan Prima Cepat dan Tanggap "***

Dengan visi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar didukung dengan Misi sebagai berikut :

1. Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan, perlindungan masyarakat dan pencegahan bahaya kebakaran.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang professional menjunjung tinggi hak azasi manusia.
3. Membangun hubungan kerja sama dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2.3.3 **PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Datar mengenai ketertiban umum dan ketentramanan masyarakat sangat banyak dan komplek. Adapun isu-isu yang berkembang dan sangat sering terjadi adalah sebagai berikut :

1. Sosial
   - Merosotnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah .
   - Berkurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran
   - Turunnya ekonomi masyarakat.
   - Tindakan kriminal semakin variatif.
   - LGBT
   - Pandangan apatis kepada aparat penegak Peraturan Daerah .

- Kurang memahami hukum dan peraturan perundang-undangan ditengah masyarakat
- Berkurangnya rasa peduli terhadap tataruang sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya.

2. Kerawanan Sosial
   - Angka Kemiskinan yang mengarah kepada pelanggaran tibum tranmas
   - Kurangnya kehati-hatian dan pemahaman masyarakat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
3. Isu Strategis Kerawanan Sosial
   - Perebutan Sumber Daya Alam (SDA) yang dipahami me ndatangkan untung besar tanpa mempertimbangkan lingkungan dan regulasi.
   - Perebutan lahan tapal batas antar wilayah yang saling berbatasan yang menimbulkan konflik antar wilayah.
   - Saling klaim kepemilikan lahan ditengah masyarakat
   - Perkembangan media social yang dengan mudah menyebarkan isu melalaui media social/online, fb, IG, WA, twitter yang dapat membuat kerawanan di bidang ipoleksosbud di tengah masyarakat
   - Perlawanan terhadap aparat keamanan (penegak Perda) Perlawanan terhadap regulasi karena fakta kecurigaan dan kurangnya sosialisasi.

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA K/L

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang pelayanan wajib dasar dan PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : ***" Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran".***

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sesuai dengan Renstra adalah:

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntable, Efektif dan Efiesien."

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraam trantibum dan fungsi linmas
2. meningkatnya Pelayanan Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaram dalam wilayah managamen kebajaran dengan waktu tanggap sesuai respon time

dengan strategi Renja tahun 2025

1. Menyusun program penegakan Perda dan Perkada ,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat
2. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Perkada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi peningkatan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
4. Meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada

Arah kebijakan :

1. Menyusun anggaran untuk terlaksananya penegakan perds dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada
4. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan perkada
5. Melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat meliputi: deteksidan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan , penertiban dan unjuk rasa

6. melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembinaan masrarakat
7. Melengkapi sarana dan prasarana operasional Satpol PP
8. Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap SDM Satpol PP
9. Koordinasi dengan camat, instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
10. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada
11. Melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran
12. Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam kebakaran
13. Pelatihan dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar yang akan dituangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 3 Program dan 10 kegiatan , 23 sub kegiatan dengan rincian program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
B		**Administrasi Keuangan perangkat Daerah**
	3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
C		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
D		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	6	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7	Penyediaan Bahan Logostik Kantor
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	9	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
E		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**

11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah

F **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantordan Bangunan Lainnya

G **Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

17 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
18 Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
19 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum

H **Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**

20 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

I **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**

21 Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS

J **Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota**

22 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
23 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Renja Akhir Tahun 2025, terdapat pengurangan 10 kegiatan dan pengurangan anggaran sebesar Rp. 276.635.403 dengan mengutamakan program prioritas. Pengurangan ini sesuai dengan kemampuan daerah.

Pada Renja awal 2025 belum dihitung gaji PPPK Satpol PP sebanyak 8 orang, sehingga dalam renja akhir dihitung sesuai dengan kebutuhan. Mobil Pemadam kebakaran yang semula ada dalam renja awal 2025 tidak ada dalam program dan kegiatan Renja akhir 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar

Rencana kerja Satpol PP dan Damkar yang akan dituangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 3 Program dan 10 kegiatan , 23 sub kegiatan dengan jumlah dana sebesar **Rp.10.218.834.687** dengan rincian pada tabel berikut (terlampir):

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-202 sesuai dengan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dang fungsinya yang memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan rencana kinerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD serta tujuan dan sasaran rencana kinerja serta program/Kegiatan untuk tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan menyesuaikan dengan kemampuan daerah yang ada sehingga ada beberapa prioritas kegiatan yang tidak masuk dalam Renja tahun 2025 untuk dapat menjadi prioritas kembali pada Renja 2026

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar ini akan dituangkan kedalam Program dan Kegiatan setiap tahunnya.Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renja ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari OPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya dan menjadi pedoman untuk penyusunan renja Tahun 2026.

Dengan segala keterbatasan kemampuan daerah dalam penyusun Renja tahun 2025 ini namun diharapkan pada perencanaan tahunberikutnya kita dapat menyusun renja ini lebih baik lagi dengan memperhatkan kendala yang ada pada OPD yaitu penambahan personil, kelengkapan sarana dan prasaran dan serta personilyang sesuai dengan kualifikasi jabatannya sehingga tercapai ketentraman dak ketertiban umum ditengah masyarakat.

Batusangkar, Juli 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TANAH DATAR

Drs. MUKHLIS
NIP. NIP. 19690819 198902 1 001

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Perintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023 yang di evaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan
																			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan Iv												
1	2			3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12				14=7+13		15=14/6x100%	
		1	05					Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		%	Ribuan Rupiah	%	K	Ribuan Rupiah	K	
		1	05									55,798,069,505.00			17,971,830,126.00			10,457,032,188.00			1,180,174,709.00			2,891,403,465.00			2,474,297,728.00						8,076,259,991.00	77.23%		26,048,090,117.00		47%
		1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang terlayani administrasi serta sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik'	100	%	35,444,202,095.00			11,290,272,383.00			6,575,303,633.00			744,477,248.00			2,062,092,092.00			1,778,835,096.00						5,174,853,981.00	79%		16,465,126,364.00		46%
		1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip Perangkat Daerah	100	%	59,989,500.00			19,876,250.00			14,998,250.00			-			10,082,500.00			-			4,897,000.00			14,979,500.00	100%		34,855,750.00		58%
		1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan	30	Dokumen	30,000,000.00	10	Dokumen	9,969,000	5	Dok	10,000,000	2	dok	-	1	Dok	5,091,500.00	1	Dok	-	1	dok	4,897,000	5	dok	100%	9,988,500.00	100%	15	19,957,500.00	50.00	% 67%
		1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	18	Dokumen	29,989,500.00	5	Dokumen	9,907,250	3	Dok	4,998,250	3	dok	4,991,000.00									3	lap	100%	4,991,000.00	100%	8	14,898,250.00	44.44	50%
1		1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan	0		29,757,034,847.00			9,870,304,666.00			5,822,959,358.00			690,024,385.00			1,953,180,791.00			916,473,799.00			1,043,691,148.00			4,603,370,123.00	79%	0	14,473,674,789.00		49%
		1	05	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	84	Bulan	29,647,034,847.00	28	Bulan	9,850,412,666	14	Bulan	5,812,959,358	3	bulan	690,024,385.00	5	bulan	1,950,484,791.00	3	bulan	916,473,799.00	3	bulan	1,041,669,148	14	bulan	100%	4,598,652,123.00	79%	42	14,449,064,789.00	50.00	49%
		1	05	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedia laporan administrasi dan keuangan	72	Bulan	50,000,000.00																					-		0	-	0.00	0%
		1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen laporan	12	Dokumen	60,000,000.00	4	Dok	19,892,000	2	Dok	10,000,000	2	dok				2,696,000.00						2,022,000	2	dok	100%	4,718,000.00	47%	6	24,610,000.00	50.00	41%
		1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas Aparatur	100	%	114,752,500.00			162,672,550.00			120,000,000.00			-			-			-			24,560,000.00			24,560,000.00		0	187,232,550.00	0.00	163%
		1	05	01	2	05		Pengadaan pakaian dinas dan atributnya belengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya				64	stel	21,725,000															-	stel		-		64	21,725,000.00		
		1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	140	ASN	114,752,500.00	22	PNS	140,947,550	10	PNS	120,000,000		PNS							5	PSN	24,560,000	5	PNS		24,560,000.00		27	165,507,550.00	19.29	144%
		1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan aparatur	100	%	1,059,067,950.00			348,616,657.00			181,770,975.00			8,355,000.00			27,783,000.00			38,310,000.00			47,441,550.00			121,889,550.00	67%	0	470,506,207.00	0.00	44%
		1	05	01	2	06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	60	Jenis	35,994,600.00	20	jenis	11,996,000	10	jenis	5,999,100	4	jenis	449,000.00	2	jenis	1,568,000.00				4	jenis	3,981,000	10	jenis	100%	5,998,000.00	100%	30	17,994,000.00	50.00	50%
		1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	150	jenis	130,046,000.00	65	jenis	42,650,500	25	jenis	21,452,500	12	jenis	1,905,000.00	5	jenis	5,503,500.00	5	jenis	8,581,500.00	3	jenis	5,307,500	25	jenis	100%	21,297,500.00	99%	90	63,948,000.00	60.00	49%
		1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah dokumen yang di gandakan	60	jenis	89,999,250.00	32	jenis	29,814,800	10	jenis	14,999,875	3	jenis		3	jenis	1,337,500.00	3	jenis	2,335,000.00	1	jenis	8,892,250	10	jenis	100%	12,564,750.00	84%	42	42,379,550.00	70.00	47%
		1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	42	jenis	51,000,000.00	15	jenis	16,955,000	7	jenis	8,500,000	2	jenis		2	jenis	3,030,000.00	2	jenis	3,180,000.00	1	jenis	780,000	7	jenis	100%	6,990,000.00	82%	22	23,945,000.00	52.38	47%
		1	05	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumkah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	6	Tahun	67,392,100.00	2	Tahun	21,244,950	1	Tahun	10,819,500	0.25	tahun	1,621,000.00	0.25	tahun	1,404,000.00	0.25	tahun	3,633,500.00	0.25	tahun	4,145,800	1.0	tahun	100%	10,804,300.00	100%	3	32,049,250.00	50.00	48%
		1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dalam dan luar daerah	6	Tahun	684,636,000.00	2	Tahun	225,955,407	1	Tahun	120,000,000	0.25	tahun	4,380,000.00	0.25	tahun	14,940,000.00	0.25	tahun	20,580,000.00	0.25	tahun	24,335,000	1.0	tahun	100%	64,235,000.00	54%	3	290,190,407.00	50.00	42%
		1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%	2,034,908,998.00			33,567,000.00			37,500,000.00													-		0	33,567,000.00	0.00	2%
		1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	6	paket	334,908,998.00	1	Paket	33,567,000			37,500,000	0												-		1	33,567,000.00	16.67	10%
2		1	05	01	2	07		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan		0		1,700,000,000.00																			-		0	-		0%
		1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Meningkatnya jasa pelayanan perkantoran	100	%	362,983,600.00			93,563,556.00			55,497,600.00			5,860,013.00			6,684,951.00			15,703,415.00			16,693,727.00			44,942,106.00	81%	0	138,505,662.00	0.00	38%
		1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 3000, jumlah materai 6000	6	paket	11,998,000.00	2	Tahun	3,940,000.00	1	Tahun	2,000,000									1	tahun	1,000,000.00				1,000,000.00		3	4,940,000.00	50.00	41%
		1	05	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan jaringan internet	6	Tahun	330,000,000.00	2	Tahun	82,643,556	1	Tahun	50,000,000	0.25	Tahun	5,860,013.00	0.25	Tahun	6,024,951	0.25	Tahun	14,838,415	0.25	tahun	13,723,727	1.00	Tahun	100%	40,447,106.00	81%	3	123,090,662.00	50.00	37%
		1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	6	Tahun	20,985,600.00	2	Tahun	6,980,000	1	Tahun	3,497,600	0.25	Tahun		0.25	Tahun	660,000	0.25	Tahun	865,000	0.25	tahun	1,970,000	1.0	Tahun	100%	3,495,000.00	100%	3	10,475,000.00	50.00	50%
		1	05	01	2	08	05	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebeluer kantor	6	Tahun	-																			-		0	-	0.00	
		1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	100	%	2,055,464,700.00	100	%	761,671,704.00	100	%	342,577,450.00			40,237,850.00			64,360,850.00			112,885,250.00			147,628,752.00			365,112,702.00	107%	100	1,126,784,406.00	####	55%
		1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan dibayarkan nya pajak kendaraan dinas dan operasional	6	Tahun	1,887,464,700.00	2	Tahun	705,728,704	1	Tahun	314,577,450	0.25	Tahun	40,037,850.00	0.25	Tahun	64,360,850	0.25	Tahun	109,770,250	0.25	tahun	142,949,252	1	Tahun	100%	357,118,202.00	114%	3	1,062,846,906.00	50.00	56%
		1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6	tahun	48,000,000.00	2	Tahun	15,960,000	1	Tahun	8,000,000	0.25	Tahun	200,000.00	0.25	Tahun	-	0.25	Tahun	3,115,000	0.25	tahun	4,679,500	1	Tahun	100%	7,994,500.00	100%	3	23,954,500.00	50.00	50%
		1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantordan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	tahun	120,000,000.00	2	Tahun	39,983,000	1	Tahun	20,000,000		Tahun	-		Tahun									-	Tahun	0%	-	0%	2	39,983,000.00	33.33	33%
												-																			-		0	-		
	Sasaran 1																														-		0	-		
	Meningkanya penyelenggaraan penanganan kebakaran dan penyelamatan							Program Pencegahan Penanggulanagn penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.5	%	13,690,163,835.00	2.5	%	4,297,317,219.00			2,277,724,730.00			265,420,800.00	74	-	512,453,473.00			419,752,032.00			519,697,100.00	74		1,717,323,405.00	75%	76.5	6,014,640,624.00	####	44%
		1	05	04	2	01		Pencegahan, pengendalian, pemadamaan penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Indek penyelesaian kasus kebakaran dalam wilayah managemen kebakaran sesuai respon time	100	%	13,217,663,835.00	100	%	4,008,315,429.00			2,202,724,730.00			265,420,800.00	74	-	512,453,473.00			418,627,032.00			506,099,100.00	74		1,702,600,405.00	77%	174	5,710,915,834.00	####	43%
		1	05	04	2	01	01	Pencegahan Kebakaran dalam kabupaten/Kota	Jumlah penyuluhan kebakaran	84	Kecamatan	140,999,850.00	28	Kecamaatan	45,027,575	14	Kecamaatan	23,199,975	1	kecamatan		3	kecamatan	2,100,000.00	3	kecamatan	4,050,000.00	7	kec	4,050,000	14	kecamatan	100%	10,200,000.00	44%	42	55,227,575.00	50.00	39%
		1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	600	Kejadian	11,390,004,000.00	186	Kejadian	3,805,716,130	100	Kejadian	2,043,912,755	43	kejadian	265,420,800.00	71	kejadian	510,353,473.00	74	kejadian	414,577,032.00	61	kejadian	502,049,100	249	kejadian	249%	1,692,400,405.00	83%	435	5,498,116,535.00	72.50	48%
										378	THL	-				63	THL															-		0	-	0.00	
		1	05	04	2	01	06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penangulanga kebakarann dan alat pelindung diri	Sarana dan prasarana pemadadam kebakaran yang dipenuhi	5	Paket	936,659,985.00	4	Paket	157,571,724.00	1	Paket	135,612,000													-	paket		-		4	157,571,724.00	80.00	17%
		1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebaran	Jumlah anggota pemadam yang memperoleh pelatihan	0	ASN	500,000,000.00																			-		0	-		0%
		1	05	04	2	01	09	Penyelenggeraan kerjasama dan koordinasi perbatasan antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran daerah perbatasan yang tertangani	0		250,000,000.00																			-		0	-		0%
		1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya proteksi kebakarana pada bangunan pemerintah dan swasta	100	%	222,500,000.00			227,753,190.00			15,000,000.00													-		0	227,753,190.00	0.00	102%
		1	05	04	2	02	01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah instansi, BUMN , sekolah, Swasta yang terdata	90	Bangunan	222,500,000.00	15	Bangunan	227,753,190	15	Bangunan	15,000,000													-		15	227,753,190.00	16.67	102%
		1	05	04	2	03		Investigasi kejadian kebakaran	Persentase penyebab kejadian kebakaran yang terinvestigasi	85	%	-			28,313,000.00			20,000,000.00						1,125,000.00						8,723,000.00			9,848,000.00		0	38,161,000.00	0.00	
		1	05	04	2	03	01	Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pemgujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigas			-	37	laporan	28,313,000	40	Bangunan	20,000,000.00				0				10	laporan	1,125,000.00	30	lap	8,723,000	40	lap		9,848,000.00		77	38,161,000.00		
		1	5	4	2	4		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Indeks penyelesaian pemadaman kebakaran sesuai dengan respon time oleh balakar	75	%	250,000,000.00			32,935,600.00			20,000,000.00												4,875,000.00			4,875,000.00		0	37,810,600.00	0.00	15%
		1	5	4	2	4	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai dengan respon time	75	Nagari	250,000,000.00																			-		0	-	0.00	0%
		1	5	4	2	4	02	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Nagari yang telah membentuk Balakar	75		-	7	Nagari	32,935,600	4	nagari	20,000,000.00				0							2	nagari	4,875,000	2	nagari		4,875,000.00		9	37,810,600.00	12.00	
		1	5	4	2	5		Penyelengaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap komdisi membahatyakan manusia	Indeks penyelesaian kasus penyelamatan non kebakaran	90	%	-						20,000,000.00													-		0	-	0.00	
		1	5	4	2	5	01	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang m,enimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia		125	kali	-				30	kali	20,000,000													-		0	-	0.00	
	Meningkanya penyelenggaraan trantibum dan linmas							Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraam trantibum dan fungsi linmas	100	%	6,663,703,575.00			2,384,240,524.00			1,604,003,825.00			170,276,661.00			316,857,900.00			275,710,600.00			384,978,950.00			1,184,082,605.00	74%	0	3,568,323,129.00	0.00	54%
		1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyelenggaraan Linmas	100	%	-																			-		0	-	0.00	
									Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	100	%	2,042,633,425.00			580,061,000.00			486,787,400.00			9,777,600.00			46,891,400.00			38,239,300.00			46,796,200.00			141,704,500.00		0	721,765,500.00	0.00	35%
		1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan pengawalan	Jumlah patroli, pengamanan dan	1440	patroli	662,052,000.00	836	patroli	216,620,800	360	kali	188,412,000	93	patroli	6,627,600.00	91	patroli	29,681,400.00	92	patroli	27,419,300.00	96	patroli	31,176,200	372	patroli	103%	94,904,500.00	50%	1208	311,525,300.00	83.89	47%

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Perintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023 yang di evaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan	
																			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan Iv										
1	2				3			4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12					14=7+13		15=14/6x100%	
								cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pebgawalan		2160	pengamanan		883	pengamanan		360	kali		113	pengamanan		148	pengamanan		99	pengamanan		114	pengamanan		474	pengamanan	**132%**	-		**1357**	-	**62.82**	
										144	pengawalan		27	pengawalan						pengawalan								15	kali		15	pengawalan		-		**42**	-	**29.17**	
		1	05	02	2	01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan	Jumlah penertiban, penanganan unjuk rasa dan huru hara	864	penertiban	780,644,500.00	276	penertiban	239,194,200	144	kali	126,633,000	13	penertiban	3,150,000.00	12	penertiban	17,210,000.00	12	penertiban	10,820,000.00	13	penertiban	15,620,000	50	penertiban	**35%**	46,800,000.00	37%	**326**	285,994,200.00	**37.73**	37%
								Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		12	unjuk rasa		4	unjuk rasa						unjuk rasa											-	unjuk rasa		-		**4**	-	**33.33**	
										12	kerusuhan masa		0	kerusuhan masa						kerusuhan masa											-	kerusuhan masa		-		**0**	-	**0.00**	
		1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah linmas, dan pembinaan linmas	**6178**	linmas	140,742,475.00	2209	linmas	50,986,000	**1804**	**linmas**	42,148,500		linmas								**1135**	**linmas**		1,135	linmas		-		**3344**	50,986,000.00	**54.13**	36%
		1	05	02	2	01	05	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah ASN yang dilatih	**0**	orang																			-			-		**0**	-		
		1	05	02	2	01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah razia dan penindakan gabungan bersama instansi penegak hukum lainnya	**300**	kali	459,194,450.00	82	kali	73,260,000	40	kali	74,838,900												-			-		**82**	73,260,000.00	**27.33**	16%
		1	05	02	2	01	08	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya sarana dan prasarana	**5**	Paket					**1**	**paket**	54,755,000												-			-		**0**	-	**0.00**	
		1	**05**	**02**	**2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	Indeks Penegakan Peraturan Daerah	**0**		**4,460,122,150.00**			**1,763,634,264.00**			**1,062,216,425.00**			**160,499,061.00**			**269,966,500.00**			**237,471,300.00**			**338,182,750.00**	-			**1,006,119,611.00**	95%	**0**	**2,769,753,875.00**		62%
		1	05	02	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	**90**	pengusaha	82,499,700.00	15	kali	12,135,000	20	sekolah/badan usaha	13,499,950												-			-		**15**	12,135,000.00	**16.67**	15%
		1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda bersangsi hukum yang di awasai	**0**	Perda, 38 THL	4,377,622,450.00	165	Perda	1,751,499,264	100	**kali**	1,048,716,475	**89**	**kali**	160,499,061.00	**77**	**kali**	269,966,500.00	**64**	**kali**	237,471,300.00	**39**	**kali**	338,182,750	269	**kali**	**269%**	1,006,119,611.00	96%	**434**	2,757,618,875.00		63%
										186	THL		**31**	**THL**		**31**	**THL**		**31**	**THL**										31	**thl**		-		**62**	**-**	**33.33**	
		1	05	02	2	02	03	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan perkada	Jumlah tindakan penangan atas pelanggaran Perda	**0**	kausu																			-			-		**0**	-		
		1	**05**	**02**	**2**	**03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya kapasitas PPNS**	**0**		**160,948,000.00**			**40,545,260.00**			**55,000,000.00**												-			**36,258,494.00**		**0**	**76,803,754.00**		48%
		1	05	02	2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Rakor dan pembinaan PPNS	**12**	kali	160,948,000.00	3	Kali	40,545,260	2	Kali	55,000,000										2	kali	36,258,494	2	kali	0	36,258,494.00	66%	**5**	76,803,754.00	**41.67**	48%

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :

RENCANA PROGRAM KEGIATAN OPD TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No rekening						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**					**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				**10,495,470,090**				**8,926,414,961**
1	**05**													
1	**05**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				10,495,470,090				8,926,414,961
1	**05**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**9,998,250**				**9,998,250**
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	PolPPdamkar	5 Dokumen	5,000,000	APBD		5 Dokumen	5,000,000
1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	PolPPdamkar	3 laporan	4,998,250	APBD		3 Dokumen	4,998,250
1	**05**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan perangkat Daerah**				**5,003,064,015**				**4,890,026,789**
1	05	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	PolPPdamkar	14 Bulan	4,993,064,015	APBD		14 Bulan	4,880,026,789
1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	PolPPdamkar	2 laporan	10,000,000	APBD		2 Dokumen	10,000,000
1	**05**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**10,000,000**				**18,072,500**
1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	PolPPdamkar	1 ASN	10,000,000	APBD		10 ASN	18,072,500
1	**05**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**202,378,675**				**174,990,975**
1	05	01	2	06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	PolPPdamkar	1 Paket	5,999,100	APBD		10 Jenis	5,999,100
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	PolPPdamkar	1 Paket	21,452,500	APBD		25 jenis	21,452,500
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	PolPPdamkar	1 Paket	14,999,875	APBD		10 jenis	14,999,875
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	PolPPdamkar	1 paket	8,500,000	APBD		7 jenis	8,500,000
1	05	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan makan minum tamu dan rapat yang disediakan	PolPPdamkar	1 laporan	11,427,200	APBD		1 Tahun	10,819,500
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PolPPdamkar	1 laporan	140,000,000	APBD		1 Tahun	113,220,000
1	**05**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**25,000,000**				**-**
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	PolPPdamkar	1 paket	25,000,000	APBD			
1	**05**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**				**59,997,600.00**				**60,495,600.00**
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	PolPPdamkar	1 laporan	1,500,000.00	APBD		1 Tahun	1,998,000.00
1	05	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	PolPPdamkar	1 laporan	55,000,000	APBD		1 Tahun	55,000,000
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PolPPdamkar	1 laporan	3,497,600	APBD		1 Tahun	3,497,600
1	**05**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**370,074,550**				**342,577,450**
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	PolPPdamkar	19 unit	342,074,550	APBD		Roda 4 (7 unit), roda 6(5 unit), roda 2 (6 unit)	314,577,450
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PolPPdamkar	11 unit	8,000,000	APBD		1 tahun	8,000,000
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantordan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	PolPPdamkar	4 gedung	20,000,000	APBD		1 tahun	20,000,000
1	**05**	**02**	**2**	**01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**245,045,000**				**332,032,400**
1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pebgawalan	umlah kasus ganggunan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan da penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	PolPPdamkar	10 kasus	108,412,000	APBD		1 tahun	108,412,000
1	05	02	2	01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	PolPPdamkar	15 kasus	126,633,000	APBD		1 tahun	126,633,000

No rekening						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	jumlah dokumenyang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	PolPPdamkar	1 Dokumen	10,000,000	APBD		75 Magari	22,148,500
1	**05**	**02**	**2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**				**968,262,400**				**738,295,025**
1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	PolPPdamkar	100 laporan	968,262,400	APBD		100 kali, 32 orang	724,795,075
1	**05**	**02**	**2**	**03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**				**15,000,000**				**26,192,000**
1	05	02	2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	jumlah laporan hasil Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	PolPPdamkar	1 laporan	15,000,000	APBD		1 PPNS	26,192,000
1	**05**	**04**	**2**	**01**		**Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota**				**3,531,649,600**				**2,255,233,972**
1	05	04	2	01	01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	PolPPdamkar	14 Dokumen	23,199,975	APBD		14 Kecamatan	23,199,975
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	PolPPdamkar	70 kejadian	1,758,449,625	APBD		100 kasus, 64 orang	1,894,702,000
1	05	04	2	01	06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah paket Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	PolPPdamkar	2 paket	1,750,000,000	APBD		1 Paket	187,331,997
1	**05**	**04**	**2**	**03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**				**15,000,000**				-
1	05	04	2	03	01	Imvestigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah laporan investigasi kejadian kebakaran	PolPPdamkar	15 laporan	15,000,000			15 laporan	
1	**05**	**04**	**2**	**04**		**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**				**15,000,000**				**50,000,000**
1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah relawan pemadam kebakaran yang di bentuk	PolPPdamkar	2 Nagari	15,000,000	APBD		10 Nagari	50,000,000
1	**05**	**04**	**2**	**05**		**Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**				**25,000,000**				-
1	05	04	2	05	01	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan Operasi Pencariaan dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia	PolPPdamkar	50 kali	25,000,000	APBD		25 kali	

Batusangkar, Juli 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. MUKHLIS
NIP.19690819 198902 1 001

RIVEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				**10,495,470,090**	**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				**10,495,470,090**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10,495,470,090	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				10,495,470,090
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**9,998,250**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**9,998,250**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PolPPdamkar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PolPPdamkar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	5,000,000
2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PolPPdamkar	Jumlah laporan capaian kinerja	3 laporan	4,998,250	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PolPPdamkar	Jumlah laporan capaian kinerja	3 laporan	4,998,250
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah				**5,003,064,015**	**Administrasi Keuangan perangkat**				**5,003,064,015**
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	PolPPdamkar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4,993,064,015	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	PolPPdamkar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4,993,064,015
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	PolPPdamkar	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	10,000,000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	PolPPdamkar	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	10,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**10,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**10,000,000**
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PolPPdamkar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 ASN	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PolPPdamkar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 ASN	10,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**202,378,675**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**202,378,675**
7	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PolPPdamkar	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5,999,100	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PolPPdamkar	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5,999,100
8	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	PolPPdamkar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	21,452,500	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	PolPPdamkar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	21,452,500
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PolPPdamkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	14,999,875	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PolPPdamkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	14,999,875
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PolPPdamkar	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	8,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PolPPdamkar	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	8,500,000
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PolPPdamkar	Jumlah laporan makan minum tamu dan rapat yang disediakan	1 laporan	11,427,200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PolPPdamkar	Jumlah laporan makan minum tamu dan rapat yang disediakan	1 laporan	11,427,200
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PolPPdamkar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	140,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PolPPdamkar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	140,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**25,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**25,000,000**
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	PolPPdamkar	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	1 paket	25,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	PolPPdamkar	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	1 paket	25,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah				**59,997,600.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**				**59,997,600.00**
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PolPPdamkar	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1,500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PolPPdamkar	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1,500,000.00
15	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	PolPPdamkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	55,000,000	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	PolPPdamkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	55,000,000

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	PolPPdamkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	3,497,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	PolPPdamkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	3,497,600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**370,074,550**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**370,074,550**
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PolPPdamkar	Jumlah kendaraan operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	342,074,550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PolPPdamkar	Jumlah kendaraan operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	342,074,550
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	PolPPdamkar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	8,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	PolPPdamkar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	8,000,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantordan Bangunan Lainnya	PolPPdamkar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantordan Bangunan Lainnya	PolPPdamkar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung	20,000,000
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**245,045,000**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**245,045,000**
20	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	PolPPdamkar	umlah kasus ganggunan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan da penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	10 kasus	108,412,000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pebgawalan	PolPPdamkar	umlah kasus ganggunan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan da penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	10 kasus	108,412,000
21	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	PolPPdamkar	jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15 kasus	126,633,000	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	PolPPdamkar	jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15 kasus	126,633,000
22	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	PolPPdamkar	jumlah dokumenyang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	10,000,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	PolPPdamkar	jumlah dokumenyang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	10,000,000
23	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	PolPPdamkar	Jumlah razia bersama dengan penegak hukum	100 kali		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	PolPPdamkar	Jumlah razia bersama dengan penegak hukum	100 kali	
24	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	PolPPdamkar	Tersedianya sarana dan prasarana Satpol PP (tongkat, sarung tongkat, body protektor, tameng			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	PolPPdamkar	Tersedianya sarana dan prasarana Satpol PP (tongkat, sarung tongkat, body protektor, tameng		
	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				**968,262,400**	**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**				**968,262,400**
25	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	PolPPdamkar	Jumlah peserta sosialisasi	250 orang		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	PolPPdamkar	Jumlah peserta sosialisasi	250 orang	
26	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	PolPPdamkar	jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 laporan	968,262,400	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	PolPPdamkar	jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 laporan	968,262,400
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				**15,000,000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**				**15,000,000**
27	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	PolPPdamkar	jumlah laporan hasil Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	1 laporan	15,000,000	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	PolPPdamkar	jumlah laporan hasil Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	1 laporan	15,000,000
	Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota				**3,531,649,600**	**Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota**				**3,531,649,600**

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	PolPPdamkar	jumlah dokumen Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	23,199,975	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	PolPPdamkar	jumlah dokumen Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	23,199,975
29	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	PolPPdamkar	jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	70 kejadian	1,758,449,625	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	PolPPdamkar	jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	70 kejadian	1,758,449,625
30	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	PolPPdamkar	Jumlah paket Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	2 paket	1,750,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	PolPPdamkar	Jumlah paket Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	2 paket	1,750,000,000
31	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah anggota pemadam yang memperoleh pelatihan	3 orang'		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah anggota pemadam yang memperoleh pelatihan	3 orang'	
32	Penyelenggeraan kerjasama dan koordinasi perbatasan antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah kasus kebakaran di daerah perbatasan	10 kasus		Penyelenggeraan kerjasama dan koordinasi perbatasan antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah kasus kebakaran di daerah perbatasan	10 kasus	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				-	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**				-
33	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran		Jumlah instansi, BUMN , sekolah, Swasta yang terdata sarana dan prasaran proteksi kebakaran	15 bangunan		Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran		Jumlah instansi, BUMN , sekolah, Swasta yang terdata sarana dan prasaran proteksi kebakaran	15 bangunan	
	Investigasi Kejadian Kebakaran				**15,000,000**	**Investigasi Kejadian Kebakaran**				**15,000,000**
34	Imvestigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah laporan investigasi kejadian kebakaran	15 laporan	15,000,000	Imvestigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah laporan investigasi kejadian kebakaran	15 laporan	15,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran				**15,000,000**	**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**				**15,000,000**
35	Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah relawan pemadam kebakaran yang di bentuk	2 Nagari	15,000,000	Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	PolPPdamkar	Jumlah relawan pemadam kebakaran yang di bentuk	2 Nagari	15,000,000
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia				**25,000,000**	**Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**				**25,000,000**
36	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia	PolPPdamkar	Jumlah laporan Operasi Pencariaan dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia	50 kali	25,000,000	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia	PolPPdamkar	Jumlah laporan Operasi Pencariaan dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia	50 kali	25,000,000

Batusangkar, Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. MUKHLIS

NIP.19690819 198902 1 001

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan Penting
			3		8

Batusangkar, September 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. MUKHLIS

NIP.19690819 198902 1 001

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH DATAR
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Jorong/Nagari/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.

Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah prioritas program yang diikuti dengan pagu anggaran Organisasi Pemerintah Daerah untuk diajukan ke pemerintah daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar, Rencana Strategis Departemen Kesehatan serta aspirasi masyarakat. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran-lampiran indicator program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan struktur organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan meyelenggarakan fungsi : ” perumusan kebijakkan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ”. Untuk itu diperlukan adanya suatu acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sitematis dapat dipedomani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara terarah dan terukur.

Proses penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinkes 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun keempat program jangka menengah karena capaian sasaran Strategis disusun lima tahun RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

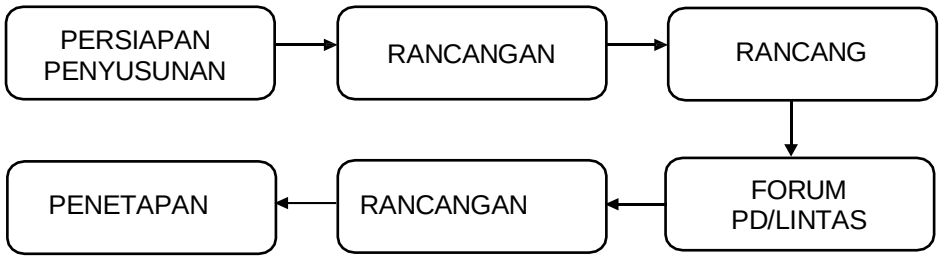
Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
   Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
   a. Pengolahan data dan informasi

b. Analisis gambaran pelayanan OPD
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
f. Perumusan tujuan dan sasaran
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
h. Perumusan kegiatan prioritas
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
k. Pembahasan forum OPD

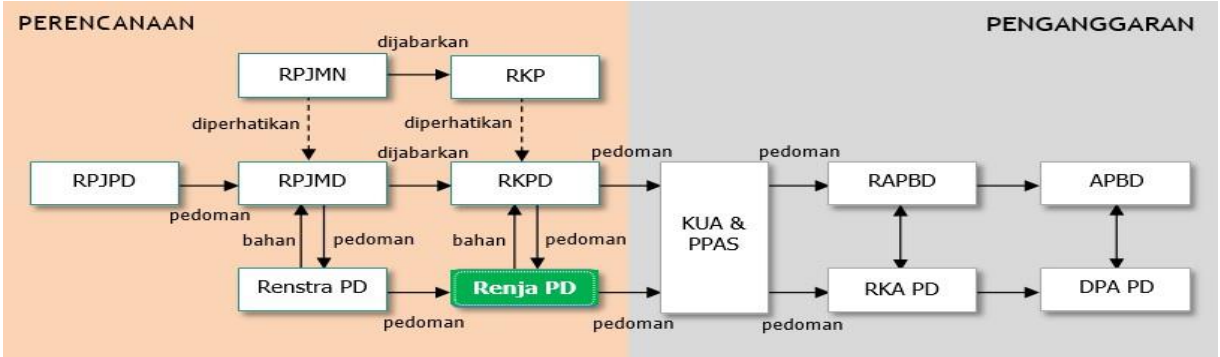
3. Penyusunan rancangan
   Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Kesehatan Tanah Datar Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Dinas Kesehatan.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

Tahapan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar



Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Dalam mewujudkan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai, untuk pelaksanaan program dan kegiatan mengacu kepada tugas dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kesehatan antara lain :

1. Undang _ undang Pembentukan Daerah no 12 tahun 1956
2. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
7. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbahrui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Tanah Datar;
12. Peraturan Daerah No. 45 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang RKPD tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan dan menjalankan program dan kegiatan bidang kesehatan.
2. Untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program di sektor kesehatan sesuai target-target yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan yang disinkronkan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Mencermati hubungan Renja Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya jelas cukup relevan, sebagaimana dapat diuraikan antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dan payung hukum adalah RPJM daerah.
3. Renja Perangkat Daerah yang telah dirumuskan menjadi kerangka acuan dalam membuat Rencana Kerja Tahunan.

Dalam membuat rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan disejalankan dengan RPJM Propinsi dan Nasional.

1.4. Sistimatika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimasika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkes Tahun 2023 dan Capaian Renstra 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan IV Dinas Kesehatan tahun 2023

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik dan memenuhi target (indikator), namun masih ada indikator yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya perubahan petunjuk teknis / peraturan Jampersal pada BOK Kabupaten Tahun 2022 yang berakibat kepada pelaksanaan kegiatan terlambat.
2. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya mekanisme baru mengenai tahap pencairan dan tatacara pencairan anggaran pada DAK Nonfisik BOK Kabupaten Tahun 2023, sehingga puskesmas masih ragu dalam pelaksanaan mekanisme tersebut.

Kondisi ini disebabkan karena upaya pelayanan kesehatan yang sudah semakin ditingkatkan, informasi kesehatan yang semakin meluas, pemanfaatan ketersediaan anggaran kesehatan lainnya dalam meningkatkan pencapaian target yang ditetapkan dan lain sebagainya.

Namun secara umum pelaksanaan kegiatan dan program bidang kesehatan tahun 2023 terlaksana secara baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci untuk pencapaian indikator sasaran kegiatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada matrik evaluasi renja 2023 :

Berdasarkan matrik evaluasi renja 2023 capaian kerja Dinas Kesehatan s.d Triwulan IV adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100	100	100	100			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100	100	100	100			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100	100	100	100			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100		100	100	100	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Pelayanan BLUD									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD x koto I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD x koto II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD singgalang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batipuh I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batipuh II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batipuh Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rambatan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rambatan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pariangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lima Kaum I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lima Kaum II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pagaruyung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjung Emas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Padang Ganting	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lintau Buo Utara I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lintau Buo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lintau Buo Utara II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungayang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Tarab I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Tarab II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gurun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Salimpaung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjung Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	100							
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	100						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		100	100	100	100			
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		100	100	100	100			
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	100					100	100	100
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan pendukung fasiltas pelayanan kesehatan yang dipelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100		100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	100	100	100	100	100	100	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	100
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								-	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100	100	100	100			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota									
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	100	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	100					100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota									
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		100	100	100	100			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	100	100	100	100	100	100	100
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								-	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	100	100	100	100	100	100	100
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatnya rumah makan / Restoran yang memenuhi syarat kesehatan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prorgram dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase makanan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah media promosi dan informasi sadar Hidup Sehat di cetak	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Tabel I
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Saat Ini / Capaian Tahun Sebelumnya	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tercapainya SPM Bidang Kesehatan	100%	100%
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Tercapainya Angka kunjungan pelayanan kesehatan dasar	1,5	1.5
		Persentase penduduk yang menjadi peserta SJSN bidang kesehatan	88,37	100
		Persentase Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas	100	100
3	Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu	100	100
		Persentase Kasus Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Yang Ditangani Sesuai Standar	100	100
		Persentase Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	100
4	Meningkatkan Pemerataan Jumlah, Jenis dan Kualitas Tenaga, Sarana dan Prasarana Kesehatan	Tercapainya Peningkatan Pemenuhan Jenis Tenaga, Kualitas Tenaga, sarana prasarana kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas sesuai standar	90%	100%
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih	Terwujudnya manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%
6	Meningkatkan Pengembangan Inovasi Kesehatan	Terwujudnya Inovasi yang diterapkan dan berkelanjutan	7	9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2023 secara umum dapat terlaksana dengan baik, beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- Masih kurangnya beberapa jenis ketenagaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan.
- Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terbatasnya pelayanan yang dapat diberikan.

- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

- Memanfaatkan secara maksimal sumber daya sarana dan prasarana, tenaga dan dana yang tersedia untuk mencapai sasaran / target indikator kinerja bidang kesehatan yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan melakukan pertemuan rutin dengan puskesmas, pertemuan rutin mingguan dan bulanan, dimana dalam pertemuan dapat dikemukan permasalahan-permasalahan yang ada secara lebih dini sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya secara dini.
- Meningkatkan promosi kesehatan melaui media baik media online maupun media cetak.
- Meningkatkan kapasitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pertemuan kepada tenaga kesehatan.

Namun ada beberapa hal yang dapat menjadi pendorong keberhasilan pencapaian pembangunan bidang kesehatan tahun 2023 antara lain :

- Tersedianya dana penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik secara partial ataupun penuh, yang dibiayai oleh APBN, APBD propinsi dan APBD Kabupaten, sehingga masyarakat dalam kategori miskin, hampir miskin dan tidak mampu karena penyakit yang dideritanya dapat dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
- Adanya dana dari APBD propinsi dan APBN yang membantu tercapainya target / indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti : Jamkesmas, Biaya Operasional Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2023, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar telah diselenggarakan dengan baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat diperoleh dari Nilai hasil evalaluasi terhadap penetapan kinerja dan indikator kinerja utama dalam Rencana Srategis Dinas Kesehatan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar.
3. Dalam pencapaian sasaran secara umum telah berhasil diwujudkan dengan baik.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	129	126	124	122	119	22	21,45	126	124	122	119	
2	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	72,60	100	100	100	100	100	
3	Angka persalinan dengan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.02	11.02	11.002	11	11	12.07	9,87	11.02	11.002	11	11	
5	Cakupan kunjungan KN Lengkap	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100	94,8	58,48	100	100	100	100	
6	Persentase balita gizi buruk	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0.08	0.08	0.08	0.078	0.076	1.18	0,27	0.08	0.08	0.078	0.076	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
7	Cakupan pelayanan anak balita	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Anak Balita	100	100	100	100	100	55.08	100	100	100	100	100	
8	Angka pelayanan skrining anak sekolah	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	45,8	100	100	100	100	100	
9	Angka skrining usia produktif (skrining factor resiko penyakit menular dan tidak menular)	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100	100	100	100	100	24,04	100	100	100	100	100	
10	Angka pelayanan kesehatan lansia	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	52,3	100	100	100	100	100	
11	Angka pelayanan kesehatan pada pasien Diabetes melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Angka pelayanan kesehatan Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertens	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
13	Angka pelayanan kesehatan ODGJ berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	100	100	100	90,7	100	100	100	100	100	
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Prevalensi HIV AIDS (persen) dari total populasi	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.032	0,007	0.022	0.022	0.022	0.022	
16	Angka kepesertaan jaminan kesehatan		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	80.09.00	85	90	95	98	81,4		85	90	95	98	
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	83,49	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Puskesmas		Operasional Pelayanan Puskesmas	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
20	Jumlah Pustu		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
21	Jumlah Rumah Sakit		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	Jumlah Penduduk								374.543	375.327					
23	Rasio Puskesmas per satuan penduduk		Pembangunan Puskesmas	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0.06	0,06	0,061	0,061	0,061	0,061	
24	Rasio Pustu per satuan penduduk		Pembangunan Puskesmas	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0.18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
25	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0.01	0,01	0,011	0,011	0,011	0,011	
26	Jumlah Posyandu		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	
27	Jumlah Balita			23140	23424	23712	24000	24299	21.809	21.913	23424	23712	24000	24299	
28	Rasio Posyandu per Satuan Balita		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	26,1	25,77	25,47	25,16	24,85	27.69	27,56	25,77	25,47	25,16	24,85	
29	Jumlah Dokter Umum		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	120	120	120	120	120	92	88	120	120	120	120	
30	Jumlah Dokter Gigi		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	30	30	33	36	39	26	35	30	33	36	39	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
31	Jumlah Dokter Spesialis		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	33	33	36	39	43	46	22	33	36	39	43	
32	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	30,67	32,15	33,62	34,03	34,69	24,5	0,23	32,15	33,62	34,03	34,69	
33	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8,07	8,07	8,81	9,57	10,33	6,94	0,09	8,07	8,81	9,57	10,33	
34	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8,88	8,88	9,57	10,33	11,39	36.84	0,06	8,88	9,57	10,33	11,39	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
35	Jumlah Perawat		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	515	515	530	542	545	318	550	515	530	542	545	
36	Jumlah Bidan		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	462	462	479	488	490	346	493	462	479	488	490	
37	Rasio Perawat per 100.000 penduduk		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	138,55	138,5	141,45	144,07	144,30	85	146,54	138,5	141,45	144,07	144,30	
38	Rasio Bidan per 100.000 penduduk		Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	124,29	124,29	128,84	129,73	129,74	92,38	131,35	124,29	128,84	129,73	129,74	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
39	Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11,2	11,5	18,6	17,6	16	12.07	9,87	11,5	18,6	17,6	16	
40	Angka kelangsungan hidup bayi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	988,8	980,5	981,4	982,4	984	987,3	990,13	980,5	981,4	982,4	984	
41	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup			16	19,5	18,6	17,6	16	13.08	2,23	19,5	18,6	17,6	16	
42	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup			8,7	12,2	11,6	11	10	10.05	6,65	12,2	11,6	11	10	
43	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	129,76	217	205	194	183	328	85,82	217	205	194	183	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
44	Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	90	92	94	96	81,8	100	90	92	94	96	
45	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	89	91	93	95	100	100	89	91	93	95	
46	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Pengadaan Obat, Vaksin	55,2	95	95	95	95	26,7	66,33	95	95	95	95	
47	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	84	86	88	90	100	100	84	86	88	90	
48	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		Pengadaan Obat, Vaksin	59,2	95	95	95	95	26,3	70,56	95	95	95	95	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
49	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20,1	100	100	100	100	27,4	21,8	100	100	100	100	
50	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
51	Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	67,35	90	90	90	90	83,54	197	90	90	90	90	
52	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,42	0	0,5	0,5	0,5		0,1	0	0,5	0,5	0,5	
53	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
54	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92	100	100	100	100	87	90	100	100	100	100	
55	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
56	Penderita diare yang ditangani		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
57	Angka kejadian malaria		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,0005	1	1	1	1	0	0,002	1	1	1	1	
58	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25	10	25	25	25	0.032	0,007	10	25	25	25	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
59	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	63	69,3	76,23	83,85	88,04	100	83,49	69,3	76,23	83,85	88,04	
60	Cakupan kunjungan bayi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	52,72	75	80	85	90	29,2	58,48	75	80	85	90	
61	Cakupan puskesmas		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6.19	1,64	6,19	6,19	6,19	6,19	
62	Cakupan puskesmas pembantu		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18,05	18,05	18,05	18,05	18,05	18.05	0,89	18,05	18,05	18,05	18,05	
63	Cakupan kunjungan ibu hamil K4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	70,6	90	92	94	96	72,6	100	90	92	94	96	
64	Cakupan pelayanan nifas		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90	89	91	93	95	100	100	89	91	93	95	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
65	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	32	100	100	100	100	100	
66	Cakupan pelayanan anak balita		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	41,2	75	80	85	90	55,8	100	75	80	85	90	
67	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	
68	Cakupan pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	83,49	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)
69	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
70	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Dengan berbagai pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Tanah Datar maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan 6 Pilar Transformasi Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Transformasi Layanan Primer yaitu Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya mencegah agar masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi.
- Transformasi Layanan Rujukan yaitu fokus pada peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan
- Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan yaitu Transformasi ini meliputi upaya peningkatan ketahanan penanggulangan medis dan penguatan resiliensi di masa krisis kesehatan.
- Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan yaitu Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar, yang pada saat ini sudah dilaksanakan secara terpisah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat mencapai UHC.
- Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan agar siap menghadapi berbagai jenis penyakit yang akan datang.
- Transformasi Teknologi Kesehatan yaitu meningkatkan dan mengembangan teknologi dan digitalisasi di sektor kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Di dalam rancangan RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 Anggaran Dinas Kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp. 173.720.821.452,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dari jumlah RKPD kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 1.033.944.233.525,- (Satu Triliun Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Dinas Kesehatan										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**256,726,301,023**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**164,424,857,308**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**199,998,668,788**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**98,211,663,647**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**113,597,962,037**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**64,188,894,661**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**57,574,030,037**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**1,645,006,000**	
	Pembangunan Puskesmas					Pembangunan Puskesmas					
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab Tanah Datar	5 Unit	46,526,623,352		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab Tanah Datar	0 Unit	1,000,000	
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					

							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Kab Tanah Datar	5 Unit	o	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Kab Tanah Datar	4 unit	3,750,250,000		Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Kab Tanah Datar	4 unit	40,076,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya					
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab Tanah Datar	20 Unit	4,518,696,685		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab Tanah Datar	20 Unit	1,603,930,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Kab Tanah Datar	30 Paket	1,900,000,000		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Kab Tanah Datar	30 Paket	0	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	1 Unit	79,860,000		Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	1 Unit	0	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	2 Unit	798,600,000		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	2 Unit	0	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**55,399,132,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**44,843,574,721**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.542 Orang	433,232,000		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.542 Orang	374,182,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.282 Orang	415,000,000		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.282 Orang	132,052,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.269 Orang	499,400,000		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.269 Orang	388,590,903	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	19.839 Orang	189,200,000		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	19.839 Orang	112,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	72.054 Orang	330,200,000		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	72.054 Orang	30,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					

		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	163.041 Orang	71,500,000		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	163.041 Orang	100,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	35.677 Orang	104,500,000		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	35.677 Orang	112,500,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	92.288 Orang	110,000,000		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	92.288 Orang	103,800,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.797 Orang	110,000,000		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.797 Orang	100,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	735 Orang	187,000,000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	735 Orang	165,050,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					

		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.000 Orang	132,000,000		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.000 Orang	104,898,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.900 Orang	192,500,000		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.900 Orang	50,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	385,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	125,464,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	220,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	58,933,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	303,600,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	198,400,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	88,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	15,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional					

						Lainnya					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	88,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	50,000,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	308,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	222,784,517	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab Tanah Datar		181,500,000		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab Tanah Datar		80,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab Tanah Datar		104,500,000		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab Tanah Datar		27,279,500	
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	132,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	80,000,000	

	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	374,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	109,900,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	41,500,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	41,873,540,501	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab Tanah Datar		187,000,000		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab Tanah Datar		50,000,000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	308,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	60,000,000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab Tanah Datar	23 Unit	2,475,000,000		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab Tanah Datar	23 Unit	0	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	5,970,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	119,200,300	

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				**283,800,000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**				**45,000,000**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	283,800,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	45,000,000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**341,000,000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**152,582,420**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab Tanah Datar	1 Unit	38,500,000		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab Tanah Datar	1 Unit	11,000,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					
		Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	302,500,000		Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	141,582,420	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				**498,300,000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**562,100,000**	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				**88,000,000**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**				**61,390,000**	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	88,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	61,390,000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				**85,800,000**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**				**221,645,000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	85,800,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	221,645,000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				**236,500,000**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**				**15,000,000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	236,500,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	15,000,000	

	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				**88,000,000**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**				**264,065,000**	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	50 Unit	88,000,000		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	50 Unit	264,065,000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga					Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga					
		Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen			Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				**1,601,700,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**1,462,199,000**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,151,700,000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1,359,945,000**	

	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	1,151,700,000		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	1,359,945,000	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**450,000,000**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**102,254,000**	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	450,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	102,254,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**84,300,706,751**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**80,000,679,186**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**268,800,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**50,317,659**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	123,600,000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	20,929,259	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanah Datar	7 Laporan	145,200,000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanah Datar	7 Laporan	29,388,400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**80,328,680,549**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**78,287,160,229**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Datar	750 Orang/ bulan	80,082,030,549		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Datar	750 Orang/ bulan	78,278,660,229	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tanah Datar	2 Laporan	246,650,000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tanah Datar	2 Laporan	8,500,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**-**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**0**	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Tanah Datar	4 Dokumen			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Tanah Datar	4 Dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**471,480,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**807,623,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					

		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	93,170,000		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	2,460,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Tanah Datar	100 Orang	378,310,000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Tanah Datar	100 Orang	805,163,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tanah Datar	10 Orang			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tanah Datar	10 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**728,667,802**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**38,255,865**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	17 Paket	133,022,802		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	17 Paket	2,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	73 Paket	182,685,000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	73 Paket	12,124,440	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	13 Paket	130,000,000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	13 Paket	6,196,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					

	undangan					Perundang-undangan					
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	5 Dokumen	15,000,000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	5 Dokumen	1,200,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tanah Datar	20 Laporan	55,000,000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tanah Datar	20 Laporan	4,067,760	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Datar	80 Laporan	212,960,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Datar	80 Laporan	12,667,665	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**120,455,500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**3,000,000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kab Tanah Datar				Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kab Tanah Datar	2 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Unit	120,455,500		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Unit	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**499,923,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**369,170,432**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tanah Datar	1 Laporan	119,790,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tanah Datar	1 Laporan	130,725,680	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Laporan	247,033,600		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Laporan	184,160,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	2 Laporan	133,100,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	2 Laporan	54,284,752	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,882,699,300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**445,152,001**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tanah Datar	35 Unit	445,885,000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tanah Datar	35 Unit	315,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Tanah Datar	50 Unit	57,434,300		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Tanah Datar	50 Unit	37,152,000	
	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel					

		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	10 Unit	15,000,000		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	10 Unit	1,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	22 Unit	60,000,000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	22 Unit	4,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	4 Unit	1,197,900,000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	4 Unit	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	1 Unit	39,930,000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	1 Unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	23 Unit	66,550,000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	23 Unit	8,000,001	
	UPT Puskesmas X Koto I				**1,927,813,711**	**UPT Puskesmas X Koto I**				**1,248,676,040**	

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**1,116,499,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**573,966,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,116,499,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**573,966,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	1,116,499,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	573,966,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**811,313,712**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**674,709,200**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**811,313,712**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**674,709,200**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	811,313,712	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	674,709,200	
	UPT Puskesmas X Koto II				**2,301,752,502**	**UPT Puskesmas X Koto II**				**1,393,695,687**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**998,800,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**591,800,260**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**998,800,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**591,800,260**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	998,800,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	591,800,260	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,302,952,502**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**801,895,427**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,302,952,502**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**801,895,427**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	1,302,952,502	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	801,895,427	
	UPT Puskesmas Singgalang				**1,488,999,999**	**UPT Puskesmas Singgalang**				**828,631,504**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**857,999,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**357,345,260**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**857,999,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**357,345,260**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	857,999,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	357,345,260	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**631,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**471,286,244**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**631,000,000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**471,286,244**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	631,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	471,286,244	

	UPT Puskesmas Batipuh I				**2,383,900,000**	**UPT Puskesmas Batipuh I**				**1,615,941,465**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**919,800,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**620,570,420**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**919,800,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**620,570,420**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	919,800,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	620,570,420	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,464,100,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**995,371,045**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,464,100,000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**995,371,045**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	1,464,100,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	995,371,045	
	UPT Puskesmas Batipuh II				**1,859,174,151**	**UPT Puskesmas Batipuh II**				**1,076,391,629**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**899,799,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**387,818,260**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**899,799,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**387,818,260**	

	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	899,799,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	387,818,260	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**959,374,152**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**688,573,369**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**959,374,152**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**688,573,369**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	959,374,152	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	688,573,369	
	UPT Puskesmas Batipuh Selatan				**2,056,834,515**	**UPT Puskesmas Batipuh Selatan**				**1,264,652,340**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**1,114,400,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**485,780,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,114,400,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**485,780,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh Selatan	2 Dokumen	1,114,400,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh Selatan	2 Dokumen	485,780,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**942,434,515**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**778,871,500**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**942,434,515**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**778,871,500**	

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh Selatan	1 Unit Kerja	942,434,515	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh Selatan	1 Unit Kerja	778,871,500	
	UPT Puskesmas Rambatan I				**2,448,907,866**	**UPT Puskesmas Rambatan I**				**1,394,628,840**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**924,000,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**627,828,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**924,000,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**627,828,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	924,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	627,828,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,524,907,866**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**766,800,000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,524,907,866**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**766,800,000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	1,524,907,866	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	766,800,000	
	UPT Puskesmas Rambatan II				**2,398,990,847**	**UPT Puskesmas Rambatan II**				**1,331,208,410**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**996,600,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**621,199,840**	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**996,600,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**621,199,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	996,600,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	621,199,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,402,390,847**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**710,008,570**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,402,390,847**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**710,008,570**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	1,402,390,847	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	710,008,570	
	UPT Puskesmas Pariangan				**3,541,880,869**	**UPT Puskesmas Pariangan**				**1,520,774,476**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**1,047,200,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**680,086,420**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,047,200,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**680,086,420**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Pariangan	2 Dokumen	1,047,200,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Pariangan	2 Dokumen	680,086,420	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2,494,680,869**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**840,688,056**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**2,494,680,869**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**840,688,056**	

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Pariangan	1 Unit Kerja	2,494,680,869	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Pariangan	1 Unit Kerja	840,688,056	
	UPT Puskesmas Lima Kaum I				**4,359,873,909**	**UPT Puskesmas Lima Kaum I**				**1,962,677,383**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**1,124,199,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**776,214,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,124,199,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**776,214,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	1,124,199,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	776,214,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3,235,673,910**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,186,462,543**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**3,235,673,910**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**1,186,462,543**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	3,235,673,910	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	1,186,462,543	
	UPT Puskesmas Lima Kaum II				**1,205,499,999**	**UPT Puskesmas Lima Kaum II**				**761,185,840**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**599,499,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**360,235,840**	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**599,499,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**360,235,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	599,499,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	360,235,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**606,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**400,950,000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**606,000,000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**400,950,000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	606,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	400,950,000	
	UPT Puskesmas Pagaruyung				**1,165,240,988**	**UPT Puskesmas Pagaruyung**				**718,567,357**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**588,495,267**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**298,710,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**588,495,267**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**298,710,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	588,495,267	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	298,710,840	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**576,745,721**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**419,856,517**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**576,745,721**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**419,856,517**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	576,745,721	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	419,856,517	
	UPT Puskesmas Tanjung Emas				**2,382,904,334**	**UPT Puskesmas Tanjung Emas**				**1,842,089,205**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**962,500,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**654,142,260**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**962,500,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**654,142,260**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	962,500,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	654,142,260	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,420,404,334**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,187,946,945**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,420,404,334**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**1,187,946,945**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	1,420,404,334	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	1,187,946,945	
	UPT Puskesmas Padang Ganting				**2,224,444,605**	**UPT Puskesmas Padang Ganting**				**1,102,451,967**	

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**861,300,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**515,857,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**861,300,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**515,857,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Padang Ganting	2 Dokumen	861,300,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Padang Ganting	2 Dokumen	515,857,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,363,144,605**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**586,594,127**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,363,144,605**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**586,594,127**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Padang Ganting	1 Unit Kerja	1,363,144,605	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Padang Ganting	1 Unit Kerja	586,594,127	
	UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I				**2,683,346,775**	**UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I**				**1,700,875,238**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**887,699,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**684,721,680**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**887,699,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**684,721,680**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	887,699,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	684,721,680	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,795,646,776**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,016,153,558**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,795,646,776**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**1,016,153,558**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	1,795,646,776	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	1,016,153,558	
	UPT Puskesmas Lintau Buo				**2,665,064,599**	**UPT Puskesmas Lintau Buo**				**1,778,471,782**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**819,499,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**683,902,420**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**819,499,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**683,902,420**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo	2 Dokumen	819,499,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo	2 Dokumen	683,902,420	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,845,564,600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,094,569,362**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,845,564,600**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**1,094,569,362**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo	1 Unit Kerja	1,845,564,600	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo	1 Unit Kerja	1,094,569,362	
	UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II				**2,173,821,551**	**UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II**				**1,559,975,467**	

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**722,699,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**698,151,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**722,699,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**698,151,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	722,699,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	698,151,840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,451,121,552**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**861,823,627**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,451,121,552**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**861,823,627**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	1,451,121,552	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	861,823,627	
	UPT Puskesmas Sungayang				**2,750,976,800**	**UPT Puskesmas Sungayang**				**1,488,981,000**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**1,216,600,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**570,981,000**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,216,600,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**570,981,000**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungayang	2 Dokumen	1,216,600,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungayang	2 Dokumen	570,981,000	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,534,376,800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**918,000,000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,534,376,800**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**918,000,000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungayang	1 Unit Kerja	1,534,376,800	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungayang	1 Unit Kerja	918,000,000	
	UPT Puskesmas Sungai Tarab I				**1,883,702,991**	**UPT Puskesmas Sungai Tarab I**				**1,221,882,479**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**1,056,000,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**537,830,420**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,056,000,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**537,830,420**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	1,056,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	537,830,420	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**827,702,991**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**684,052,059**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**827,702,991**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**684,052,059**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	827,702,991	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	684,052,059	
	UPT Puskesmas Sungai Tarab II				**1,986,056,620**	**UPT Puskesmas Sungai Tarab II**				**1,248,215,489**	

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**989,999,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**435,772,000**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**989,999,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**435,772,000**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	989,999,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	435,772,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**996,056,621**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**812,443,489**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**996,056,621**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**812,443,489**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	996,056,621	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	812,443,489	
	UPT Puskesmas Gurun				**1,058,076,393**	**UPT Puskesmas Gurun**				**662,196,139**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**605,000,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**284,752,840**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**605,000,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**284,752,840**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	605,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	284,752,840	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**453,076,393**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**377,443,299**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**453,076,393**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**377,443,299**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	453,076,393	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	377,443,299	
	UPT Puskesmas Salimpaung				**2,391,593,212**	**UPT Puskesmas Salimpaung**				**1,948,561,944**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**1,050,499,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**694,876,420**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,050,499,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**694,876,420**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Salimpaung	2 Dokumen	1,050,499,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Salimpaung	2 Dokumen	694,876,420	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,341,093,213**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,253,685,524**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,341,093,213**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**1,253,685,524**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Salimpaung		1,341,093,213	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Salimpaung		1,253,685,524	
	UPT Puskesmas Tanjung Baru				**2,156,274,999**	**UPT Puskesmas Tanjung Baru**				**1,184,080,260**	

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**791,999,999**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**501,280,260**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**791,999,999**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**501,280,260**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tanjung Baru	2 Dokumen	791,999,999	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tanjung Baru	2 Dokumen	501,280,260	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,364,275,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**682,800,000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**1,364,275,000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**682,800,000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tanjung Baru	1 Unit Kerja	1,364,275,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tanjung Baru	1 Unit Kerja	682,800,000	
	UPT Instalasi Farmasi				**5,232,500,000**	**UPT Instalasi Farmasi**				**4,895,408,318**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**5,232,500,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**4,858,903,640**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**4,721,000,000**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**4,822,398,962**	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab Tanah Datar	1 Paket	4,721,000,000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab Tanah Datar	1 Paket	4,822,398,962	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**511,500,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**36,504,678**	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	511,500,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	36,504,678	
					256,726,301,023					**164,424,857,308**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	Dinas Kesehatan				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Puskesmas				
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab Tanah Datar	0 Unit	
		Pembanguna Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Tanah Datar	5 Unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
		Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Kab Tanah Datar	4 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya				
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab Tanah Datar	20 Unit	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Kab Tanah Datar	30 Paket	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
		Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	1 Unit	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	2 Unit	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.542 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.282 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.269 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	19.839 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	72.054 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	163.041 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	35.677 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	92.288 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.797 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	735 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.000 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.900 Orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab Tanah Datar		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab Tanah Datar		
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab Tanah Datar		
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab Tanah Datar	23 Unit	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab Tanah Datar	1 Unit	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	50 Unit	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga				
		Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanah Datar	7 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Datar	750 Orang/ bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tanah Datar	2 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Tanah Datar	100 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	17 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	73 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	13 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	5 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tanah Datar	20 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Datar	80 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tanah Datar	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	2 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tanah Datar	35 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Tanah Datar	50 Unit	
	Pemeliharaan Mebel				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	10 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	22 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	4 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	23 Unit	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	UPT Puskesmas X Koto I				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas X Koto II				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Singgalang				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Batipuh I				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Batipuh II				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Batipuh Selatan				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh Selatan	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh Selatan	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Rambatan I				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Rambatan II				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Pariangan				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Pariangan	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Pariangan	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Lima Kaum I				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Lima Kaum II				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Pagaruyung				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Tanjung Emas				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Padang Ganting				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Padang Ganting	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Padang Ganting	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Lintau Buo				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Sungayang				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungayang	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungayang	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Sungai Tarab I				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Sungai Tarab II				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Gurun				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	
	UPT Puskesmas Salimpaung				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Salimpaung	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Salimpaung		
	UPT Puskesmas Tanjung Baru				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Puskesmas				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tanjung Baru	2 Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tanjung Baru	1 Unit Kerja	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
	UPT Instalasi Farmasi				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengadaan Obat, Vaksin				
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab Tanah Datar	2 Paket	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai				
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab Tanah Datar	1 Paket	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab Tanah Datar	1 Paket	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

3.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipasif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daeah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten, musrenbang tingkat propinsi dan musrenbang tingkat nasional, rencana kerja yang dibuat mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021 – 2026 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimum dengan segala sumber daya yang ada.

Rencana pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun anggaran 2025 yang dilakukan disesuaikan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Peningkatan Pelayanan BLUD

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas- luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan *Critical Success Factor* yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terukur dan dapat dicapai. Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.3 Program dan Kegiatan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Kesehatan								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**256,726,301,023**			**282,398,931,125**
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**199,998,668,788**			**218,162,004,942**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**113,597,962,037**			**122,507,453,000**
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**57,574,030,037**			**38,089,131,000**
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas								
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab Tanah Datar	5 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	46,526,623,352	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	30,794,500,000
	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Kab Tanah Datar	4 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,750,250,000	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan		2,732,175,000
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	20 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4,518,696,685	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	2,196,150,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Kab Tanah Datar	30 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,900,000,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	30 Paket	1,400,000,000
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	1 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	79,860,000	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pe meliharaan	1 Unit	87,846,000
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab Tanah Datar	2 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	798,600,000	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pe meliharaan	2 Unit	878,460,000
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**55,399,132,000**			**83,731,042,000**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.542 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	433,232,000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4542 Orang	1,465,552,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.282 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	415,000,000	Jumlah Ibu Bersalin yang Menda patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4282 Orang	446,500,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.269 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	499,400,000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Menda patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4269 Orang	549,340,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	19.839 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	189,200,000	Jumlah Balita yang Menda patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19839 Orang	208,120,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	72.054 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	330,200,000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.054 Orang	583,220,000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	163.041 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71,500,000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Menda patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	163.041 Orang	78,650,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	35.677 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104,500,000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Menda patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.677 Orang	114,950,000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan	Kab Tanah Datar	92.288 Orang	Dana Transfer Umum-	110,000,000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Menda patkan Pelayanan	92.288 Orang	121,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Dana Alokasi Umum		Kesehatan Sesuai Standar		
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.797 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110,000,000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.797 Orang	121,000,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	735 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	187,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	735 Orang	205,700,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	3.000 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132,000,000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Menda patkan Pelayanan Sesuai Standar	3.000 Orang	145,200,000
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab Tanah Datar	4.900 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192,500,000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Me ndapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.900 Orang	211,750,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	385,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokum en	423,500,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	242,000,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	303,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	333,960,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	88,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	96,800,000
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	88,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	96,800,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	308,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	338,800,000
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang	Kab Tanah Datar		Dana Transfer Umum-	181,500,000	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang	1 Orang	199,650,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Dana Alokasi Umum		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab Tanah Datar		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104,500,000	Jumlah Peny alahguna NAPZA yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan	1 Orang	114,950,000
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokum en	145,200,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	374,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokum en	411,400,000
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	41,500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokum en	66,550,000,000
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								
						Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan	Kab Tanah Datar		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	187,000,000	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgun aan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan	1 Orang	205,700,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Sekolah					Sekolah		
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	308,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyel enggaraan K abupaten/Kot a Sehat	1 Dokum en	338,800,000
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab Tanah Datar	23 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,475,000,000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten /Kota	23 Unit	2,722,500,000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,970,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaa n Dini dan Respon Wabah	1 Dokum en	7,260,000,000
1	**2**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**					**283,800,000**			**312,180,000**
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	283,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokum en	312,180,000
1	**2**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**341,000,000**			**375,100,000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab Tanah Datar	1 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38,500,000	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjut i Perizinannya	1 Unit	42,350,000
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	302,500,000	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	1 Dokumen	332,750,000
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**498,300,000**			**548,130,000**
1	**2**	**4**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**					**88,000,000**			**96,800,000**
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	88,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengen dalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	96,800,000
1	**2**	**4**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin**					**85,800,000**			**94,380,000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengen dalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	94,380,000
1	**2**	**4**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**					**236,500,000**			**260,150,000**
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	236,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengen dalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	1 Dokumen	260,150,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Maka n/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
1	**2**	**4**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					**88,000,000**			**96,800,000**
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	50 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	88,000,000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Ma kanan-Minu man Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	96,800,000
1	2	4	2.06	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga								
						Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokum en	
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**1,601,700,000**			**2,533,740,000**
1	**2**	**5**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,151,700,000**			**1,266,870,000**
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,151,700,000	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberd ayaan Masyarakat	2 Dokumen	1,266,870,000
1	**2**	**5**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**450,000,000**			**1,266,870,000**
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyel enggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1,266,870,000
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**84,300,706,751**			**92,572,681,942**
1	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**268,800,000**			**295,603,000**
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tanah Datar	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	123,600,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	135,883,000
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab Tanah Datar	7 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	145,200,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	7 Laporan	159,720,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**80,328,680,549**			**88,356,433,604**
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Datar	750 Orang/ bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80,082,030,549	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang/ bulan	88,090,233,604
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tanah Datar	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	246,650,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	266,200,000
1	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**471,480,000**			**516,428,000**
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93,170,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	102,487,000
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Tanah Datar	100 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	378,310,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	413,941,000
1	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**728,667,802**			**660,126,098**
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	17 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133,022,802	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listr ik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	14,632,508
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	73 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	182,685,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket	197,653,500
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	13 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130,000,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	13 Paket	139,089,500
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tanah Datar	5 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Und angan yang Disediakan	5 Dokum en	14,494,590
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tanah Datar	20 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55,000,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	60,000,000
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Datar	80 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	212,960,000	Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	234,256,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**120,455,500**			**132,501,050**
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120,455,500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	132,501,050
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**499,923,600**			**549,915,960**
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tanah Datar	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	119,790,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	131,769,000
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tanah Datar	4 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	247,033,600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	271,736,960
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tanah Datar	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133,100,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	146,410,000
1	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1,882,699,300**			**2,061,674,230**
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tanah Datar	35 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	445,885,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	490,473,500
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Tanah Datar	50 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57,434,300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	63,177,730
1	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	10 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	14,641,000
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tanah Datar	22 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	58,564,000
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	4 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,197,900,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,317,690,000
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kab Tanah Datar	1 Unit	Dana Transfer Umum-	39,930,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	43,923,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Dana Alokasi Umum		Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		
1	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tanah Datar	23 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66,550,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	23 Unit	73,205,000
					UPT Puskesmas X Koto I					**1,927,813,711**			**2,120,595,083**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1,116,499,999**			**1,228,150,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,116,499,999**			**1,228,150,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,116,499,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,228,150,000
X													
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**811,313,712**			**892,445,083**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**811,313,712**			**892,445,083**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	811,313,712	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	892,445,083
					UPT Puskesmas X Koto II					**2,301,752,502**			**2,531,927,753**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**998,800,000**			**1,098,680,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**998,800,000**			**1,098,680,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	998,800,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,098,680,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,302,952,502**			**1,433,247,753**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,302,952,502**			**1,433,247,753**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,302,952,502	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,433,247,753
					UPT Puskesmas Singgalang					**1,488,999,999**			**1,571,081,991**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**857,999,999**			**943,800,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**857,999,999**			**943,800,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. X Koto	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	857,999,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	943,800,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**631,000,000**			**627,281,991**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**631,000,000**			**627,281,991**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. X Koto	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	631,000,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	627,281,991
					UPT Puskesmas Batipuh I					**2,383,900,000**			**2,629,290,000**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**919,800,000**			**1,018,780,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**919,800,000**			**1,018,780,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	919,800,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,018,780,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,464,100,000**			**1,610,510,000**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,464,100,000**			**1,610,510,000**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,464,100,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,610,510,000
					UPT Puskesmas Batipuh II					**1,859,174,151**			**2,045,091,567**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**899,799,999**			**989,780,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**899,799,999**			**989,780,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	899,799,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	989,780,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**959,374,152**			**1,055,311,567**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**959,374,152**			**1,055,311,567**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	959,374,152	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,055,311,567
					UPT Puskesmas Batipuh Selatan					**2,056,834,515**			**2,295,077,967**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1,114,400,000**			**1,258,400,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,114,400,000**			**1,258,400,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Batipuh Selatan	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,114,400,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,258,400,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**942,434,515**			**1,036,677,967**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**942,434,515**			**1,036,677,967**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Batipuh Selatan	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	942,434,515	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,036,677,967
					UPT Puskesmas Rambatan I					**2,448,907,866**			**3,760,548,957**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**924,000,000**			**1,016,400,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**924,000,000**			**1,016,400,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	924,000,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,016,400,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,524,907,866**			**2,744,148,957**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,524,907,866**			**2,744,148,957**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,524,907,866	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,744,148,957
					UPT Puskesmas Rambatan II					**2,398,990,847**			**2,773,658,653**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**996,600,000**			**1,096,260,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**996,600,000**			**1,096,260,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Rambatan	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	996,600,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,096,260,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,402,390,847**			**1,677,398,653**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,402,390,847**			**1,677,398,653**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Rambatan	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,402,390,847	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,677,398,653
					UPT Puskesmas Pariangan					**3,541,880,869**			**2,694,549,932**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1,047,200,000**			**1,151,920,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,047,200,000**			**1,151,920,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Pariangan	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,047,200,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,151,920,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2,494,680,869**			**1,542,629,932**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**2,494,680,869**			**1,542,629,932**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Pariangan	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	2,494,680,869	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,542,629,932
					UPT Puskesmas Lima Kaum I					**4,359,873,909**			**4,795,785,565**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1,124,199,999**			**1,236,620,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,124,199,999**			**1,236,620,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,124,199,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,236,620,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3,235,673,910**			**3,559,165,565**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**3,235,673,910**			**3,559,165,565**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	3,235,673,910	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,559,165,565
					UPT Puskesmas Lima Kaum II					**1,205,499,999**			**1,193,114,450**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**599,499,999**			**659,450,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**599,499,999**			**659,450,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lima Kaum	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	599,499,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	659,450,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**606,000,000**			**533,664,450**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**606,000,000**			**533,664,450**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lima Kaum	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	606,000,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	533,664,450
					UPT Puskesmas Pagaruyung					**1,165,240,988**			**1,088,165,088**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**588,495,267**			**647,344,795**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**588,495,267**			**647,344,795**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	588,495,267	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	647,344,795

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**576,745,721**			**440,820,293**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**576,745,721**			**440,820,293**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	576,745,721	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	440,820,293
					UPT Puskesmas Tanjung Emas					**2,382,904,334**			**2,625,894,768**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**962,500,000**			**1,058,750,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**962,500,000**			**1,058,750,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tj. Emas	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	962,500,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,058,750,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,420,404,334**			**1,567,144,768**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,420,404,334**			**1,567,144,768**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tj. Emas	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,420,404,334	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,567,144,768
					UPT Puskesmas Padang Ganting					**2,224,444,605**			**2,446,889,066**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**861,300,000**			**947,430,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**861,300,000**			**947,430,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Padang Ganting	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	861,300,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	947,430,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,363,144,605**			**1,499,459,066**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,363,144,605**			**1,499,459,066**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Padang Ganting	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,363,144,605	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,499,459,066
					UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I					**2,683,346,775**			**2,951,681,454**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**887,699,999**			**976,470,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**887,699,999**			**976,470,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	887,699,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	976,470,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,795,646,776**			**1,975,211,454**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,795,646,776**			**1,975,211,454**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,795,646,776	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,975,211,454
					UPT Puskesmas Lintau Buo					**2,665,064,599**			**2,931,571,060**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**819,499,999**			**901,450,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**819,499,999**			**901,450,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	819,499,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	901,450,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,845,564,600**			**2,030,121,060**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,845,564,600**			**2,030,121,060**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,845,564,600	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,030,121,060
					UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II					**2,173,821,551**			**2,391,203,707**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**722,699,999**			**794,970,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**722,699,999**			**794,970,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Lintau Buo Utara	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	722,699,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	794,970,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,451,121,552**			**1,596,233,707**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,451,121,552**			**1,596,233,707**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Lintau Buo Utara	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,451,121,552	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,596,233,707
					UPT Puskesmas Sungayang					**2,750,976,800**			**3,026,074,480**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1,216,600,000**			**1,338,260,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,216,600,000**			**1,338,260,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungayang	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,216,600,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,338,260,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,534,376,800**			**1,687,814,480**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,534,376,800**			**1,687,814,480**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungayang	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,534,376,800	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,687,814,480
					UPT Puskesmas Sungai Tarab I					**1,883,702,991**			**2,072,073,291**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1,056,000,000**			**1,161,600,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,056,000,000**			**1,161,600,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,056,000,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,161,600,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**827,702,991**			**910,473,291**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**827,702,991**			**910,473,291**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	827,702,991	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	910,473,291
					UPT Puskesmas Sungai Tarab II					**1,986,056,620**			**2,170,362,284**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**989,999,999**			**1,089,000,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**989,999,999**			**1,089,000,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	989,999,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,089,000,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**996,056,621**			**1,081,362,284**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**996,056,621**			**1,081,362,284**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	996,056,621	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,081,362,284
					UPT Puskesmas Gurun					**1,058,076,393**			**1,163,884,032**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**605,000,000**			**665,500,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**605,000,000**			**665,500,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Sungai Tarab	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	605,000,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	665,500,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**453,076,393**			**498,384,032**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**453,076,393**			**498,384,032**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Sungai Tarab	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	453,076,393	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	498,384,032
					UPT Puskesmas Salimpaung					**2,391,593,212**			**2,630,752,535**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1,050,499,999**			**1,155,550,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1,050,499,999**			**1,155,550,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Salimpaung	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,050,499,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,155,550,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,341,093,213**			**1,475,202,535**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,341,093,213**			**1,475,202,535**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Salimpaung			1,341,093,213			1,475,202,535
					UPT Puskesmas Tanjung Baru					**2,156,274,999**			**2,371,902,500**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**791,999,999**			**871,200,000**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**791,999,999**			**871,200,000**
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kec. Tanjung Baru	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	791,999,999	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	871,200,000
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1,364,275,000**			**1,500,702,500**
X	**XX**	**1**	**2.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**1,364,275,000**			**1,500,702,500**
X	XX	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Tanjung Baru	1 Unit Kerja	Pendapatan dari BLUD	1,364,275,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,500,702,500
					UPT Instalasi Farmasi					**5,232,500,000**			**7,955,750,000**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**5,232,500,000**			**7,955,750,000**
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**4,721,000,000**			**7,393,100,000**
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab Tanah Datar	1 Paket		4,721,000,000	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	1 Paket	7,393,100,000
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**					**511,500,000**			**562,650,000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Tanah Datar	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	511,500,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	562,650,000
TOTAL										**256,726,301,023**			**282,398,931,125**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut berasal dari APBD yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan. Kegiatan yang dibiayai dana DAK antara lain Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program Jamkesmas, program Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan lain sebagainya.

Dengan amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka untuk pembiayaan dibidang kesehatan dengan berbagai sumber diharapkan dapat dialokasikan sebesar 10 % dari total APBD Kabupaten (diluar gaji), diharapkan dengan kondisi tersebut maka program dan kegiatan bidang kesehatan yang mencakup berbagai aspek pembangunan sektor kesehatan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Dengan alokasi dana yang tersedia maka upaya untuk lebih meningkatkan pembiayaan dibidang kesehatan harus lebih ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesehatan dapat lebih ditingkatkan.

Pada tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar dan APBN dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Rincian	2025	2026
1	Pagu Anggaran	**Rp. 164.424857.308,-**	**Rp. 282.398.931.125**
2	Jumlah Program	**4**	**4**
3	Jumlah Kegiatan	**18**	**18**
4	**Jumlah Sub Kegiatan**	**114**	**114**

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan komitmen dari Kepala Dinas dan seluruh staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai suatu Dinas di Kabupaten Tanah Datar yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kerja pembangunan bidang kesehatan yang telah dibentuk ini diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi segala kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya diharapkan agenda pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.

Untuk lebih tercapainya visi dan misi Dinas Kesehatan Kabuparten Tanah Datar usulan untuk 2025 agar dapat terakomodir.

GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

Batusangkar, 29 Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Datar

dr. Hj. Yesrita Zedrianis, M.Kes
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650906 199903 2001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS KESEHATAN

Jln. Sutan Alam Bagagarsyah – Telp. No. (0752) 71081.
BATUSANGKAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor : 000.7.2.3/687/DINKES-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor12);

5. Peraturan…

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bidang Kesehatan Tahun 2025.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal 25 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH DATAR

YESRITA ZEDRIANIS

GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 000.7.2.3/687/DINKES-2024
TANGGAL 25 JANUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

No.	Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris
4	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Ketua Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Ketua Koordinator Bidang
8	Pengelola Data	Anggota
9	Pengelola Pemamfaatan Barang Milik Daerah	Anggota
10	Operator	Anggota

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH DATAR

YESRITA ZEDRIANIS

RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN SUTAN ALAM BAGAGARSYAH
TLP. NOMOR (0752) 71833 - 71892. FAX. (0752) 71892
WEBSITE tanahdatar.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadapan sang pencipta Allah Subhanahu wata'ala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan serta pendanaan pendidikan tahun 2025 dari berbagai sumber yaitu APBD Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar juga merupakan pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, serta pihak lain yang berkepentingan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, dan disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon saran demi penyempurnaannya dimasa mendatang.

Batusangkar, Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Datar

INHENDRI ABAS, S.Pd.M.M
NIP. 19690620 199312 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 5

2.2 Capaian Kinerja 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 17

3.1 Telaah Kebijakan Nasional dan Renja K/L 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 19

3.3 Program dan Kegiatan..... 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....23

BAB V PENUTUP 47

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln.Sultan Alam Bagagarsyah Telp/Fax : (0752) 71833/71892
BATUSANGKAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : 800/ 307 /DIKBUD/2024

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Menteri .....

Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR :800 / 347 /DIKBUD-2024
TANGGAL : Agustus 2024

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6179:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tantang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023, target kinerja Tahun 2024 yang terukur baik sasaran maupun indikator sasarannya, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dengan *output* dan *outcome* yang jelas serta sumber pembiayaannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR

INHENDRI ABAS, S.Pd.MM
NIP. 19690620 199312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Wakil Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
4. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
6. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:

a. RPJPD;
b. RPJMD;
c. Renstra Perangkat Daerah;
d. RKPD;
e. Renja Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam rencana strategis perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 1 (Satu) tahun. Rencana kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Sebelum ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah maka salah satu tahapan dalam penyusunan Renja adalah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2025. Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga didasarkan pada data-data pendidikan dan kebudayaan dan hasil evaluasi kinerja tahun-

tahun sebelumnya. Data-data pendidikan dan kebudayaan didapatkan dari berbagai sumber seperti profil pendidikan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 mengacu Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026. Disamping itu rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Datar juga mengacu kepada program strategis pada Rencana Strategis serta Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah, Renja Sekretaria DPRD disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan,
2. Penyusunan Rancangan Awal,
3. Penyusunan Rancangan,
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Ahir, dan
6. Penetapan

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka :

1. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenan
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenan
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan pembangunan (Musrenbang)

4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), Indikator kinerja keluaran (Output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan perkiraan maju

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 didasarkan pada landasan formil dan landasan materil. Landasan formil adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta karya

5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 100 tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Sedangkan yang menjadi landasan materil Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah:

1. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dan stakeholder pendidikan yang dirangkum melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nagari, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, Forum Internal SKPD Pendidikan, Forum Antar SKPD dan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kabupaten serta menjeMput program dan kegiatan yang belum terakomodir pada Rencana Kerja tahun 2024.
2. Berbagai literatur yang dapat mendukung penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai gambaran awal dalam menyusunan Rencana Kerja 2025.
2. Sebagai gambaran program dan kegiatan untuk merealisasikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Tanah Datar.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini adalah untuk menggambarkan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 terdiri dari lima bab, dengan rincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

- 1.1 Latar belakang masalah
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Pelanggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 difokuskan pada pembahasan antara lain evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, review terhadap rencana awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam urusan wajib Pemerintah Daerah, dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 444.819.720.007 dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 412.579.148.841 atau sebesar 92.75%. Berikut rincian realisasi belanja :

1. **Program penunjang urusan pemerintahan daerah**

   Program ini terdiri atas 7 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 354.142.369.306,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 327.877.309.981,- atau 92.58%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indicator kinerja keluaran (output) kegiatan sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

   a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 102.641.883,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.963.398,- atau 96.42%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan. Kegiaan ini terdiri dari 2 sub kegiatan :

      - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 54.178.148,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.963.648 atau 94.07%. target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan.

- Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD dengan anggaran Rp. 16.317.807 dengan realisasi sebesar Rp. 15.980.250,- atau 97.93%. target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 32.145.928,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.019.500,- atau 99.61%. target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.352.969.847.594,- dengan realisasi sebesar Rp. 326.820.213.766,- Atau 92.59%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 352.910.009.162,- realisasi sebesar Rp. 326.760.517.966,- atau 92.59%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 39.333.532,- realisasi Rp. 39.190.900,- atau 99.64%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.504.900,- realisasi Rp. 20.504.900,- atau 100%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 188.713.612,- dengan realisasi Rp. 159.882.180,- atau 84.72%. Target kinerja tercapai 100 % sesuai yang direncanakan
   - Penatausahaan barang milik daerah dengan anggaran Rp. 188.713.612,- realisasi Rp. 159.882.180,- atau 84.72%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 7.500.000,- realisasi sebesar Rp. 1.350.000,- atau 18.00%. Target kinerja tercapai 100% dari yang direncanakan
   - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- realisasi sebesar Rp. 1.350.000,- atau 18.00%. Target kinerja tercapai 100% dari yang direncanakan
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 184.024.017,- realisasi sebesar Rp. 179.217.481,- atau 97.39%. Target kinerja tercaai 100% sesuai yang direncanakan.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp. 9.996.500,- realisasi sebesar Rp. 9.449.000,- atau 94.52%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan bahan logistic kantor dengan anggaran Rp. 55.176.810,- realisasi sebesar Rp. 55.006.850,- atau 99.69%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 28.640.580,- realisasi sebesar Rp. 28.640.500,- atau 100%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi Rp. 14.320.00,- atau 95.47%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Fasilitasi kunjungan tamu anggaran sebesar Rp. 9.507.400,- realisasi sebesar Rp. 8.413.600,- atau 88.50%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yag direncanakan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 65.702.727,- realisasi sebesar Rp. 63.387.531,- atau 96.48%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran Rp. 348.213.000 realisasi sebesar Rp. 301.821.056,- atau 86.68%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
    - Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp. 999.000,- realisasi sebesar Rp. 990.000 atau 99.10%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang sudah direncanakan
    - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dengan anggaran Rp. 184.000.000,- realiasasi sebesar Rp. 139.242.556,- atau 75.68%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
    - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp. 163.214.000,- realisasi sebesar Rp. 161.588.500,- atau 99.00. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dengan anggaran Rp. 341.429.200,- realisasi sebesar Rp. 315.862.100,- atau 92.51%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dengan anggaran Rp. 260.265.200,- realisasi sebesar Rp. 236.396.600,- atau 90.83%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 16.000.000,- realisasi Rp. 15.989.960,- atau 99.94%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan dengan anggaran Rp. 65.164.000,- realisasi sebesar Rp. 63.475.540,- atau 97.41%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

2. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp. 54.744.850.701,- realiasasi sebesar Rp. 51.786.477.158,- atau 94.60%, terdiri dari 17 sub kegiatan, dengan rincian :

- Penambahan ruang kelas dengan anggaran Rp. 199.700.000,- realisasi sebesar Rp. 196.610.810,- atau 98.41%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah anggaran Rp. 325.683.600,- realisasi sebesar Rp. 323.838.500,- atau 99.43%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran Rp. 2.186.453.467,- realisasi sebesar Rp. 1.773.997.896,- atau 81.14%. Target kinerja tercapai 96%
- Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas dengan anggaran Rp. 4.501.190.600,- realisasi Rp. 3.821.801.498,- atau 84.91%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Rehabilitasi sedang/ berat sarana, prasarana dan utilitas dengan anggaran Rp. 347.286.000,- realisasi Rp. 325.732.120,- atau 93.79%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengadaan mebel sekolah dengan anggaran Rp. 90.000.000,- realisasi Rp. 86.946.000,- atau 96.61%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengadaan perlengakapan sekolah dengan anggaran Rp. 162.890.000,- realisasi sebesar Rp. 157.278.904,- atau 96.56%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

- Pengadaan perlengkapan siswa dengan anggaran Rp. 2.844.180.000,- realiasasi sebesar Rp. 2.471.192.500,- atau 86.89%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan anggaran Rp. 1.029.340.000 realisasi sebesar Rp. 998.429.600,- atau 97.00%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyelenggaraan proses belajar mengajar dan ujian bagi peserta didik dengan anggaran Rp. 47.690.000,- realisasi sebesar Rp. 26.100.200,- atau 54.73%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembinaan, minat, bakat dan kreatifitas siswa dengan anggaran Rp. 59.420.000,- realisasi sebesar Rp. 50.623.600,- atau 85.20%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dengan anggaran Rp. 6.686.920.000,- realisasi sebesar Rp. 5.637.886.800,- atau 84.31%. Target kinerja tercapai sesuai yang direncanakan
- Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar dan anggaran Rp. 478.480.000,- realisasi sebesar Rp. 161.933.605,- atau 33.84%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan anggaran Rp. 18.460.000,- realisasi Rp. 16.304.400,- atau 88.32%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengelolaan dana BOS sekolah dasar dengan anggaran Rp. 33.682.700.000,- realisasi Rp. 33.684.565.225,- atau 100,01%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS dengan anggaran Rp. 58.500.000,- realisasi Rp. 47.027.800,- atau 80.39%. Target kinerja tercapai 100 sesuai yang direncanakan
- Pembangunan laboratorium sekolah dengan anggaran Rp. 2.025.877.034,- realisasi Rp. 2.006.207.700,- atau 99.03%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp. 24.443.520.000,- realisasi sebesar Rp. 22.050.772.996,- atau 90.21%. terdiri dari 18 sub kegiatan, dengan rincian:
   - Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU dengan anggaran Rp. 568.631.600,- realisasi Rp. 489.432.741,-. Target kinerja tercapai 100% sesuai yag direncanakan

- Pembangunan perpustakaan sekolah dengan anggaran Rp. 552.448.000,- realisasi Rp. 494.163.048,- atau 89.45%. target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembangunan laboratorium sekolah dengan anggaran Rp. 1.240.994.398,- realisasi Rp. 1.06.521.684,- atau 85.94%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembangunan asrama sekolah dengan anggaran Rp. 2.298.460.000,- realisasi Rp. 1.969.463.805,- atau 85.69%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembangunan sarana, prasarana utilitas sekolah dengan anggaran Rp. 103.132.000,- realisasi Rp. 0,-. Kegiatan tidak terlaksana karena ada permasalahan SMP2 Batusangkar
- Rehabilitasi ruang unit kesehatan sekolah dengan anggaran Rp. 47.626.000,- realisasi Rp. 46.643.750,- atau 97.94%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah dengan anggaran Rp. 331.875.001,- realisasi Rp. 270.317.221,- atau 81.45%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana utilitas sekolah dengan anggaran Rp. 107.779.001,- realisasi 77.217.019,- atau 71.64%. Target kinerja tercapai 80% yang yang direncanakan
- Pengadaan perlengkapan siswa dengan anggaran Rp. 2.210.840.000,- realisasi Rp. 1.965.729.900,- atau 88.91%. target tercapai 100% sesuai dengan yang direncanakan
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan anggaran Rp. 190.000.000,- realisasi Rp. 189.106.300,- atau 99.53%. Target tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik dengan anggaran Rp. 344.720.000,- realisasi Rp. 275.670.117,- atau 79.97%. Target tercapai sesuai yang direncanakan
- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan anggaran Rp. 60.140.000,- realisasi Rp. 47.280.200,- atau 78.27%
- Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dengan anggaran Rp. 1.991.590.000,- realisasi sebesar Rp.1.831.072.500,- atau 91.94%. Target kinerja tercapai sesuai yang direncanakan
- Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama dengan anggaran Rp. 517.270.000,- realisasi Rp. 216.360.060,- atau 41.83%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 4.227.000,- atau 42.27%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengelolaan dana BOS SMP dengan anggaran Rp. 11. 973.000.000,- realisasi Rp. 11.708.546.752,- atau 97.79%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP dengan anggaran Rp. 19.500.000,- realisasi Rp. 16.768.400,- atau 85.99%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

c. Pengelolaan Anak Usia Dini dengan anggaran Rp. 8.320.083.000,- realisasi Rp. 7.915.173.149,- atau 95.13%. terdiri dari 10 sub kegiatan, dengan rincian :
   - Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dengan anggaran Rp. 123.630.140,- realisasi Rp. 122.514.984,- atau 99.10%. Target kinerja tercapai 100% dari yang direncanakan
   - Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD dengan anggaran Rp. 633.638.540,- realisasi Rp. 632.329.953,- atau 99.79%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Rehabilitasi gedung/ ruang kelas/ruang guru PAUD dengan anggaran Rp. 387.399.320,- realisasi Rp. 385.946.406,- atau 99.62%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Pengadaan perlengkapan siswa PAUD dengan anggaran Rp. 80.000.000,- realisasi Rp. 38.387.500,- atau 47.98%. Target tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan anggaran Rp. 188.000.000,- realisasi Rp. 182.543.000,- atau 97.10%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Penyelenggaraan proses belajar PAUD dengan anggaran Rp. 90.000.000,- realisasi Rp. 82.344.200,- atau 91.49%
   - Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD dengan angggaran Rp. 1.348.570.000,- realisasi Rp. 1.256.925.300,- atau 93.20%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan PAUD dengan anggaran Rp. 336.135.000,- realisasi Rp. 127.783.310 atau 38.02%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   - Pembinaan kelembagaan dan maajemen PAUD dengan anggaran Rp.95.710.000,- realisasi Rp. 94.992.100,- atau 99.25%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

- Pengelolaan dana BOP PAUD dengan anggaran Rp. 5.037.000.000,- realisasi Rp. 4.991.406.396,- atau 99.09%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan dengan anggaran Rp. 1.836.910.000,- realisasi Rp. 1.409.765.995,- atau 76.75%. Terdiri dari 6 sub kegiatan, dengan rincian:

- Penyediaan biaya personil peseta didik nonformal/ kesetaraan dengan anggaran Rp. 38.450.000,- realisasi Rp. 3.973.000,- atau 10.33%. target kinerja tercapai 100 sesuai yang direncanakan
- Penyelengaraan proses belajar nonformal/ kesetaraan dengan anggaran Rp. 24.010.000,- realisasi Rp. 15.159.850,- atau 63.14%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan dengan anggaran Rp. 199.450.000,- realisasi Rp. 140.346.400,- atau 70.37%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan dengan anggaran Rp. 90.000.000,- realisasi Rp. 68.170.745,- atau 75.75%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pembinaan kelembagaan manajemen pendidikan noformal/kesetaraan dengan anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 5.416.000,- atau 54.16%. Target tercapai 100% sesuai yang direncanakan
- Pengelolaan dana BOP Kesetaraan dengan anggaran Rp. 1.475.000.000,- realisasi Rp. 1.176.700.000,- atau 79.78%. Target tercapai 100% sesuai yang direncanakan

3. Program Pengembangan Kurikulum

a. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar dengan anggaran Rp. 65.842.000,- realisasi Rp. 5.316.600,- atau 8.07%. Target hanya 80% tercapai dari yang direncanakan

- Pelatihan penyusunan kurikulum matan local dengan anggaran Rp. 65.842.000,- realisasi Rp. 5.316.600,- atau 8.07%. Target hanya 80% tercapai dari yang direncanakan

b. Penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal dengan anggaran Rp. 37.151.000,- realisasi Rp. 13.054.000,- atau 35.14%. Target kinerja tercapai 90% dari yang direncanakan

- Penyusunan kompetensi dasar muatan local pendidikan anak usia dini dan nonformal dengan anggaran Rp. 37.151.000,- realisasi Rp. 13.054.000,- atau 35.14%. Target kinerja tercapai 90% dari yang direncanakan

4. **Program Pengembangan Kebudayaan**
   a. Pengelolaan kebuadayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota
      - Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dengan anggaran Rp. 149.032.000,- realisasi Rp. 103.041.906,- atau 69.14%. Target kinerja tercapai 100% dari yang direncanakan

5. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**
   a. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota
      - Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dengan anggaran Rp. 815.000.000,- realisasi Rp. 758.548.200,- atau 93.07%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

6. **Program Pembinaan sejarah**
   a. Pembinaan sejarah local dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
      - Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah local dengan anggaran Rp. 89.560.000,- realisasi Rp. 75.320.700,- atau 84.10%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

7. **Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya**
   a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota
      - Pendaftaran objek diduga cagar budaya dengan anggaran Rp. 77.690.000,- realisasi Rp. 39.275.025,- atau 50.55%. Target tercapai 100% sesuai yang direncanakan
   b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota
      - Pengembangan Cagar budaya dengan anggaran Rp. 48.570.000,- realisasi Rp. 34.028.400,- atau 29.94%. Target tercapai 100% sesuai yang direncanakan

8. **Program Pengelolaan Permuseuman**
   a. Pengelolaan museum kabupaten/ kota
      - Perlindungan, pengembangan, pemanfaaan koleksi secara terpadu dengan anggaran Rp. 49.142.000,- realisasi Rp. 41.118.790,- atau 83.67%. Target kinerja tercapai 100% sesuai yang direncanakan

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diatas sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKA DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
1	2																			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	ANGGARAN
											81%	826,605,311,493		444,819,720,007	92%	412,579,149,477	68%	1,237,518,858,740	92%	92.75%
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan pendidikan dan	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan dinas**		**2,343,022,952,277**	**98%**	**678,746,135,119**	**80%**	**354,142,369,306**	**100%**	**327,877,309,981**	**93%**	**1,006,463,562,920**	100%	92.58%
		1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja dinas**	**80%**	**2,368,249,450**	**100%**	**254,291,295**	**80%**	**102,641,883**	**100%**	**98,963,398**	**100%**	**353,254,693**	100%	96.42%
		1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Profil	100%	1,417,499,675	100%	131,387,829	3 dokumen	54,178,148	100%	50,963,648	100%	182,351,477	100%	94.07%
		1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA ,DPA yang disusun	100%	395,499,900	100%	36,478,494	4 dokumen	16,317,807	100%	15,980,250	100%	52,458,744	100%	97.93%
		1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun (LKPJ, LKjIP, LPPD, dan SPM)	100%	555,249,875	100%	86,424,972	4 dokumen	32,145,928	100%	32,019,500	100%	118,444,472	100%	99.61%
		1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pengelolaaan**		**2,321,813,612,902**	100%	**676,665,644,804**	**100%**	**352,969,847,594**	100%	**326,820,213,766**	100%	**1,003,485,858,570**	**100%**	92.59%
		1	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan		2,320,456,863,477	100%	676,538,753,179	12 bulan	352,910,009,162	100%	326,760,517,966	100%	1,003,299,271,145	100%	92.59%
		1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun dan honor THL		821,249,750	100%	84,719,375	1 dokumen	39,333,532	100%	39,190,900	100%	123,910,275	100%	99.64%
		1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun		535,499,675	100%	42,172,250	14 dokumen	20,504,900	100%	20,504,900	100%	62,677,150	100%	100.00%
		1	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pengelolaaan barang milik daerah**		**4,061,999,975**	100%		**80%**	**188,713,612**	**100%**	**159,882,180**	**100%**		**100%**	84.72%
		1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang		4,061,999,975	100%	286,503,495	2 dokumen	188,713,612	100%	159,882,180	100%	446,385,675	100%	84.72%
		1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Meningkatnya kompetensi ASN Dikbud**		**309,500,000**	80%	**11,965,000**	**80%**	**7,500,000**	**100%**	**1,350,000**	**90%**	**13,315,000**	**100%**	18.00%
		1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut						**306 orang**	**-**		-				
		1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat		309,500,000	80%	11,965,000	5 orang	7,500,000	100%	1,350,000	90%	13,315,000	100%	18.00%
		1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kelancaran pelaksanaan**		**3,374,762,550**	100%	**451,708,293**	**80%**	**184,024,017**	100%	**179,217,481**	100%	**630,925,774**	100%	97.39%

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		1	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen Instalasi Listrik kantor		154,996,500	100%	19,816,400	1 tahun	9,996,500	100%	9,449,000	100%	29,265,400	100%	94.52%
		1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan		974,273,100	100%	124,449,529	1 tahun	55,176,810	100%	55,006,850	100%	179,456,379	100%	99.69%
		1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang		664,999,850	100%	79,979,850	1 tahun	28,640,580	100%	28,640,500	100%	108,620,350	100%	100.00%
		1	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan		150,000,000	100%	27,447,000	1 tahun	15,000,000	100%	14,320,000	100%	41,767,000	100%	95.47%
		1	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan		223,987,100	100%	20,893,400	1 tahun	9,507,400	100%	8,413,600	100%	29,307,000	100%	88.50%
		1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		1,206,506,000	100%	179,122,114	1 tahun	65,702,727	100%	63,387,531	100%	242,509,645	100%	96.48%
		1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah**		**3,700,000,000**	100%	**57,507,000**	**70%**	**-**	0%	**-**	50%	**57,507,000**	0%	0.00%
		1	**01**	**01**	2	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah kendaraan dinas yang diadakan**		**1,550,000,000**	0	**-**			0%	-	0%	-		
		1	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laptop dan komputer PC yang		2,150,000,000	100%	57,507,000	2 unit	-	0%	-	50%	57,507,000	0%	0.00%
		1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Meningkatan pelayanan dinas**		**2,468,891,000**	100%	**596,213,484**	**80%**	**348,213,000**	100%	**301,821,056**	100%	**898,034,540**	100%	86.68%
		1	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Perangko, Materai dan Benda POS		21,999,000	100%	1,980,000	1 tahun	999,000	100%	990,000	100%	2,970,000	100%	99.10%
		1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah jasa air, listrik dan telepon		1,511,900,000	100%	334,984,084	1 tahun	184,000,000	100%	139,242,556	100%	474,226,640	100%	75.68%
		1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jenis alat kebersihan yang disediakan serta		934,992,000	100%	259,249,400	1 jenis dan 4 THL	163,214,000	100%	161,588,500	100%	420,837,900	100%	99.00%
		1	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor**		**4,925,936,400**	**100%**	**708,805,243**	**100%**	**341,429,200**	**100%**	**315,862,100**	**100%**	**1,024,667,343**	**100%**	92.51%
		1	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan KIRnya		1,760,936,400	100%	474,072,939	1 tahun	260,265,200	100%	236,396,600	100%	710,469,539	100%	90.83%
		1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis alat kantor yang dipelihara		240,000,000	100%	35,024,600	1 tahun	16,000,000	100%	15,989,960	100%	51,014,560	100%	99.94%
		1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor yang direhab		2,100,000,000		-				-		-	0%	
		1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan THL		825,000,000	100%	199,707,704	1 tahun	65,164,000	100%	63,475,540	100%	263,183,244	100%	97.41%
		1	**01**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**		100%	919,651,869,365	69%	**145,616,529,443**		**89,448,356,701**	97%	**83,669,993,275**	47%	**227,780,802,668**	28%	93.54%
	Terpenuhinya kebutuhan	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan**	**100%**	**828,517,754,340**	**87%**	**136,789,495,473**	**80%**	**89,345,363,701**	**97%**	**83,651,622,675**	**82%**	**218,940,714,698**	**84%**	93.63%
	Tercapainya penerapan kemerdekaan	**1**	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah**	**100%**	**522,795,110,950**	**102%**	**85,279,855,161**	**80%**	**54,744,850,701**	**100%**	**51,786,477,158**	**85%**	**135,060,124,619**	**79%**	94.60%
		1	01	02	2.01	01	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlengkapinya Ruang Belajar Bagi peserta didik		**43,204,750,000**	0.5	**236,523,641**		**199,780,000**	100%	196,610,810	75%	433,134,451	100%	98.41%
		1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun		10,231,923,225	100%	1,657,118,162	7 unit			-	50%	1,657,118,162	0%	0.00%
		1	01	02	2.01	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS SD yang dibangun		7,542,316,950	100%	546,262,556	6 unit	325,683,600	100%	323,838,500	100%	870,101,056	100%	99.43%
		1	01	02	2.01	05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun		16,387,574,725	100%	1,986,148,470	8 unit	-		-	50%	1,986,148,470	0%	0.00%

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah ruang ibadah, dan jamban siswa dan guru		26,540,988,975	100%	3,935,598,565	29 paket	2,186,453,467	100%	1,773,997,896	100%	5,709,596,461	100%	81.14%
		1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab		27,412,924,125	96%	2,106,843,107	7 sekolah	4,501,190,600	100%	3,821,801,498	98%	5,928,644,605	100%	84.91%
		1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang direhab		21,835,557,450	100%	435,332,965	3 unit	-		-	50%	435,332,965	0%	0.00%
		1	01	02	2	##	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab		21,690,125,000	0%	-				-	0%	-	0%	
		1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah jamban siswa dan guru SD yang direhab		8,808,411,725	100%	347,433,367	2 paket	347,286,000	100%	325,732,120	100%	673,165,487	100%	93.79%
		1	01	02	2.01	14	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah mobiler yang disediakan		2,419,817,500	100%	142,964,000	4 paket	90,000,000	100%	86,946,000	100%	229,910,000	100%	96.61%
		1	01	02	2.01	16	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan		48,159,844,775	50%	116,349,025	4 paket	162,890,000	100%	157,278,904	75%	273,627,929	100%	96.56%
		1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah buku perlengkapan siswa yang disediakan		36,911,212,500	100%	189,513,900	2 paket	2,844,180,000	100%	2,471,192,500	100%	2,660,706,400	100%	86.89%
							Pemeliharaan rutin rumah dinas Kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang dipelihara					1 paket	-		-				
		1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik dari eluarga kurang mampu yang menerima bantuan biaya pendidikan			50%	216,603,910	1 paket	-		-	25%	216,603,910	0%	
		1	01	02	2.01	22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan		20,615,536,250	100%	2,076,412,875	14 paket	1,029,340,000	100%	998,429,600	100%	3,074,842,475	100%	97.00%
		1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta asesmen nasional		3,661,211,900	110%	143,171,120	5.000 orang	47,690,000	100%	26,100,200	105%	169,271,320	100%	54.73%
		1	01	02	2.01	25	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah even yang diikuti dalam Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, dan jumlah siswa yang mengikuti OSN dan FLSN.		3,949,408,400	100%	111,813,065	12 cabang olah raga dan 200 orang	59,420,000	100%	50,623,600	100%	162,436,665	100%	85.20%
		1	01	02	2.01	27	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar				50%	5,691,615,500		6,686,920,000	100%	5,637,886,800	75%	11,329,502,300	100%	84.31%
		1	01	02	2.01	27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah PTK yang mengikuti uji kompetesi, yang mengikuti bimtek peningkatan kompetensi, dan lomba kreatifitas PTK SD		5,399,999,650	71.16%	110,776,050	110 orang dan 150 orang	478,480,000	100%	161,933,605	86%	272,709,655	100%	33.84%
		1	01	02	2.01	28	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SD yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan		2,209,621,050	50%	30,473,375	300 sekolah	18,460,000	100%	16,304,400	75%	46,777,775	100%	88.32%
		1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang difasilitasi biaya		213,416,537,500	100%	65,085,143,268	35.359 orang,	33,682,700,000		33,684,565,225	50%	98,769,708,493	0%	100.01%
		1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana Bos	Operasional tim manajemen BOS dan THL		2,397,349,250	100%	113,758,240	300 sekolah dan 1 orang THL	58,500,000	100%	47,027,800	100%	160,786,040	100%	80.39%

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		1	01	02	2.01	31	Pembangunan laboratorium sekolah dasar	Jumlah laboratorium sekolah dasar yang dibvangun					9 unit	2,025,877,034	100%	2,006,207,700	0%			99.03%
		1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama**		**221,273,662,175**	75%	**35,581,430,267**	**80%**	**24,443,520,000**	**100%**	**22,540,206,373**	**65%**	**58,627,440,890**	**71%**	92.21%
		1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang		**4,800,000,000**	-	-	**1 unit**	568,631,600	100%	489,432,741	50%	489,432,741	100%	
		1	01	02	2.02	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS SMP yang dibangun		**2,800,000,000**	1	**261,891,270**	**1 unit**	-	0%	-	25%	261,891,270	0%	
		1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium				1	**1,307,120,350**	**3 unit**	1,240,994,398	100%	1,066,521,684	75%	2,373,642,034	100%	
		1	01	02	2.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun		**4,800,000,000**	-	**552,448,000**		552,448,000	100%	494,163,684	0%	1,046,611,684		
		1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang dibangun		**18,500,000,000**	-	-		2,298,460,000	100%	1,969,463,805	0%	1,969,463,805		
		1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah ruang ibadah, jumlah jamban siswa dan		17,944,999,725	100%	334,707,757	1 unit	1,875,244,000	100%	1,871,685,240	100%	2,206,392,997	100%	99.81%
		1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab		25,593,974,750	100%	3,113,386,070	6 ruang	103,132,000		-	50%	3,113,386,070	0%	0.00%
		1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi sedang/berat ruang GURU sekolah	Jumlah ruang guru SMP yang direhab		6,719,552,300	50%	501,969,759			0%	-	25%	501,969,759	0%	0.00%
		1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi sedang/berat rung unit kesehatan sekolah						1 ruang	47,626,000	100%	46,643,750				
		1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang direhab		7,009,139,700	100%	938,468,036	1 ruang	331,875,001	100%	270,317,221	100%	1,208,785,257	100%	81.45%
		1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah laboratorium sekolah yang direhab		5,461,479,750	100%	1,364,711,165	2 ruang		0%	-	50%	1,364,711,165	0%	0.00%
		1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah jamban siswa dan guru SMP yang direhab		3,813,392,200	100%	276,816,367		107,779,001	100%	77,217,019	100%	354,033,386	100%	71.64%
		1	01	02	2	##	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang diadakan		2,399,999,875	0%	-			0%	-	0%	-		
		1	01	02	2.02	27	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Mobiler yang disediakan		8,915,276,075	100%	73,815,200		-	0%	-	50%	73,815,200	0%	0.00%
		1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan siswa	Jumlah peserta didik yang kurang mampu yang		3,700,000,000	50%	155,256,970	1000 orang	2,210,840,000	100%	1,965,729,900	75%	2,120,986,870	100%	
		1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan		238,599,900	100%	441,596,750	1 paket	-	0%	-	50%	441,596,750	0%	0.00%
		1	01	02	2.02	35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			4,186,609,750	100%	949,930,275	7 paket	190,000,000	100%	189,106,300	100%	1,139,036,575	100%	99.53%
		1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan		5,189,599,925	88%	584,414,695	4.000 orang, 3 sekolah dan	344,720,000	100%	275,670,117	94%	860,084,812	100%	79.97%
		1	01	02	2.02	38	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa SMP yang mengikuti asesmen		4,049,999,725	100%	65,920,090	8 cabang	60,410,000	100%	47,280,200	100%	113,200,290	100%	78.27%
		1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi				50%	1,689,330,000	242 orang	1,991,590,000	100%	1,831,072,500	75%	3,520,402,500	100%	

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		1	01	02	2.02	40	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah	Jumlah siswa SMP yang dibina dan berprestasi dalam bidang OSN dan FLS2N, serta jumlah		6,340,638,925	58.05%	206,980,300	1 kegiatan	517,270,000	100%	216,360,060	79%	423,340,360	100%	41.83%
		1	01	02	2.02	41	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah PTK yang mengikuti uji kompetesi,		1,099,999,750	50%	24,993,200		10,000,000	100%	4,227,000	25%	29,220,200		42.27%
		1	01	02	2.02	42	Pengelolaan dana BOS Sekolah menengah	Jumlah SMP yang dilakukan pembinaan		87,106,000,000	100%	22,967,259,599	49 sekolah	11,973,000,000		11,708,546,752	50%	34,675,806,351	0%	97.79%
		1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasistas Pengelolaan dana BOS Sekolah menengah	Jumlah siswa SMP yang difasilitasi biaya oparasional.		604,399,825	100%	36,295,275	55 sekolah	19,500,000	100%	16,768,400	100%	53,063,675	100%	85.99%
		1	01	02	2.02	44	Rehab sedang/berat ruang TU	Operasional manajemen BOS SMP dan THL			50%	99,497,157			0%	-	25%	99,497,157		0.00%
		1	01	02	2.02	45	Rehab sedang/berat ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang TU yang direhab			50%	187,069,982			0%	-	25%	187,069,982		0.00%
		1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan**		**57,092,281,590**	80%	**13,056,465,996**		**8,320,083,000**	**100%**	**7,915,173,149**	**90%**	**20,971,639,145**	**113%**	95.13%
		1	01	02	2.03	01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang	Jumlah ruang guru dan Kepala yang dibangun		3,181,505,030	100%	431,036,921	2 unit	123,630,140	100%	122,514,984	100%	553,551,905	100%	99.10%
		1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun		6,007,406,450	100%	414,693,940	8 unit	633,638,540	100%	632,329,953	100%	1,047,023,893	100%	99.79%
		1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Jumlah ruang kelas yang direhab		1,150,000,000	0%	-		387,399,320	100%	385,946,406	50%	385,946,406	100%	
		1	01	02	2.03	05	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,	Jumlah jamban siswa dan guru yang direhab		900,000,000	0%	-			0%	-	0%	-	0%	
		1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan dasar peserta didik yang		558,000,000	50%	35,168,900	2500 orang	80,000,000	100%	38,387,500	75%	73,556,400	100%	
		1	01	02	2.03	12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang		2,123,570,635	100%	437,157,580	3 paket	188,000,000	100%	182,543,000	100%	619,700,580	100%	97.10%
		1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	Operasional Manajemen Paud dan THL		740,199,750	100%	101,289,545	350 lembaga	90,000,000	100%	82,344,200	100%	183,633,745	100%	91.49%
		1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi				50%	1,269,490,275	668 orang	1,348,570,000	100%	1,256,925,300	75%	2,526,415,575	100%	
		1	01	02	2.03	16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan	Jumlah PTK Paud yang mengikuti bimtek kompetensi mengikuti		2,699,999,725	66.13%	109,993,325	40 Orang	336,135,000	100%	127,783,310	83%	237,776,635	100%	38.02%
		1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah TK yang dilakukan pembinaan		515,000,000	50%	12,332,200		95,710,000	100%	94,992,100	75%	107,324,300	100%	99.25%
		1	01	02	2.03	18	Pengelolaan dana BOP Paud	Jumlah anak didik Paud yang difasilitasi melalui		39,216,600,000	100%	10,245,303,310	352 lembaga	5,037,000,000		4,991,406,396	50%	15,236,709,706	0%	99.09%
		1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan**		**27,356,699,625**	92%	**2,871,744,049**	**80%**	**1,836,910,000**	**89%**	**1,409,765,995**	**88%**	**4,281,510,044**	**74%**	76.75%
		1	01	02	2.04	01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang	Jumlah ruang praktek pendidikan non formal		**6,000,000,000**		**423,052,264**	**1 ruang**	**-**	10%	-		423,052,264	10%	0.00%
		1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidik				1	**9,999,900**	**1 paket**	**-**	10%	-	30%	9,999,900	10%	0%
		1	01	02	2.04	10	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun		**3,830,000,000**	-	**-**			0%	-	0%	-		
		1	01	02	2.04	11	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan		**590,000,000**	-	**-**		38,450,000	100%	3,973,000	0%	3,973,000		
		1	01	02	2.04	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang		**3,600,000,000**	1	**228,638,520**	**7 paket%**	**-**	0%	-	25%	228,638,520	0%	0.00%
		1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah peserta didik/warga belajar yang		751,299,825	100%	41,930,750	34 orang	24,010,000	100%	15,159,850	100%	57,090,600	100%	63.14%

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pamong/tutor yang mendapatkan insentif			100%	98,847,225	57 orang	199,450,000	100%	140,346,400	100%	239,193,625	100%	70.37%
		1	01	02	2.04	15	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan	Jumlah PTK Non Formal yang mengikuti seleksi Apresiasi, bimtek pelatihan kompetensi.		1,144,599,925	100%	46,922,165	60 orang	90,000,000	100%	68,170,745	100%	115,092,910	100%	75.75%
		1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	opeasional penilik		234,999,875	50%	12,652,900		10,000,000	100%	5,416,000	75%	18,068,900	100%	54.16%
		1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Jumlah peserta didik yang difasilitasi melalui biaya		11,205,800,000	100%	2,009,700,325	707 orang	1,475,000,000	100%	1,176,700,000	100%	3,186,400,325	100%	79.78%
		1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini		18,162,447,325	80%	59,088,050		102,993,000	**200%**	18,370,600	40%	72,142,050		17.84%
		1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**	**Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal**		**14,337,447,400**	**-**			**65,842,000**	**100%**	**5,316,600**	**0%**			
		1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter		6,899,018,650	-	-				-	0%	-		
		1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum		3,812,018,750	-	-		65,842,000	100%	5,316,600	0%	5,316,600		
							Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1,706,410,000	-	-				-	0%	-		
							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1,920,000,000	-	-				-	0%	-		
		1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan**			**3,824,999,925**	80%	**59,088,050**	**-**	**37,151,000**	**100%**	**13,054,000**	**40%**	**72,142,050**		35.14%
		1	01	03	2	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah pendidik Paud dan PNF yang mengikuti pelatihan penyusunan Kompetensi Dasar Kurikulum Paud dan PNF		1,725,000,000	-	-		**37,151,000**	100%	13,054,000	0%	13,054,000		
		1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		949,999,925	80%	59,088,050			0%	-	40%	59,088,050		0.00%
		1	01	03	2.02	03	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1,150,000,000	0%	-			0%	-	0%	-		
																				0.00%
		1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan		72,971,667,700	39%	8,767,945,920	80%			-	19%	**8,767,945,920**		0.00%

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		1	01	04	2.01		Pemerataaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			72,971,667,700	39%	**8,767,945,920**				-	19%	8,767,945,920		0.00%
		1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK Dikdas yang diberi bantuan transportasi dan jumlah pendidik PAUD yang menerima insentif		71,819,399,925	50%	8,631,114,920			0%	-	25%	8,631,114,920		0.00%
		1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK dinilai kinerjanya dan yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dan honor THL		1,152,267,775	28%	136,831,000			0%	-	14%	136,831,000		0.00%
		2	**22**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN**			**31,856,036,760**	**77%**	**2,242,646,931**		**1,228,994,000**	**80%**	**1,031,846,221**	**64%**	**3,274,493,152**	**70%**	83.96%
		2	**22**	**02**			**POGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah OPK yang dikelola**		**3,750,000,000**	**50%**	**678,183,781**		**149,032,000**	**50%**	**103,041,906**	**50%**	**781,225,687**	**50%**	
		2	**22**	**02**	**01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya**			**3,750,000,000**	**50%**	**36,177,500**		**149,032,000**	**100%**	**103,041,906**	**75%**	**139,219,406**	**100%**	
		2	22	02	01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinventarisir		3,100,000,000	1	36,177,500	1 OPK	149,032,000	100%	103,041,906	75%	139,219,406	100%	
		2	22	02	01	02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	terwujudnya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan		650,000,000	-	-			0%	-	0%	-		
		2	**22**	**02**	**03**		**Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten/kota**			**250,000,000**	**1**	**642,006,281**		**-**	**0%**	**-**	25%	642,006,281	**0%**	
		2	22	02	03	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek	Jumlah pemangku adat yang diberdayakan untuk melakukan pembinaan		250,000,000	-	-			100%		0%	-		
		2	22	02	03	03	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat				1	642,006,281	5 paket	-	0%	-	25%	642,006,281	0%	
	Terwujudnya kelestarian Cagar Budaya	**2**	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional**		**5,599,999,810**	**100%**	**711,669,150**	**70%**	**815,000,000**	**100%**	**758,548,200**	**75%**	**1,470,217,350**	**50%**	93.07%
	Meningkatnya pembinaan SDM dan tata	2	22	03	2.01		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah	Jumlah pelaku seni yang produktif		5,599,999,810	100%	711,669,150		815,000,000	100%	758,548,200	75%	1,470,217,350	50%	93.07%
	Meningkatnya perlindungan,	2	22	03	2.01	01	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian	Jumlah seniman yang diberdayakan pada satuan pendidikan		4,349,999,810	100%	454,059,650	30 seniman	815,000,000	100%	758,548,200	100%	1,212,607,850	100%	93.07%
		2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan	Jumlah Penerima Sertifikat Terhadap Pelaku Seni		1,250,000,000	0%	-			0%	-	0%	-		

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		2	22	03	2.01	03	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang terstandar			100%	257,609,500	5 lembaga kesenian	-	0%	-	50%	257,609,500	0%	0.00%
		2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Meningkatnya kualitas pembinaan sejarah**		**6,054,999,950**	**100%**	**64,528,000**	**70%**	**89,560,000**	**100%**	**75,320,700**	**100%**	**139,848,700**	**100%**	84.10%
		2	22	04	2.01		Pembinaaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen sejarah yang dibukukan		6,054,999,950	100%	64,528,000		89,560,000	100%	75,320,700	100%	139,848,700	100%	84.10%
		2	22	04	2.01	01	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah pemangku adat yang diberdayakan untuk melakukan pembinaan tentang filosofi ABS-SBK kepada peserta didik		2,849,999,950	100%	64,528,000	20 orang	89,560,000	100%	75,320,700	100%	139,848,700	100%	84.10%
		2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Pembuatan Website dan Bank Data Sejarah Lokal dalam 1 Daerah		1,630,000,000	0%	-			0%	-	0%	-		
							Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana pembinaan sejarah		1,575,000,000	0	0			0%	-	0%	-		0.00%
		2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN**	**Meningkatnya publikasi cagar budaya dan**		**6,481,037,000**	63%	**133,882,800**	**70%**	**126,260,000**	**50%**	**53,816,625**	**41%**	**187,699,425**	**50%**	42.62%
		2	22	05	2.01		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota			2,831,037,000	63%	58,766,800		77,690,000	100%	39,275,025	41%	98,041,825	100%	50.55%
		2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftar		1,500,000,000	0.5	31,871,000	20 Cagar budaya		100%	-	75%	31,871,000	100%	0.00%
		2	22	05	2.01	02	Penetapan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dipublikasikan		1,331,037,000	63%	26,895,800		77,690,000	100%	39,275,025	31%	66,170,825		50.55%
		2	**22**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan cagar budaya peringkat**			**3,650,000,000**	**100%**	**75,116,000**		**48,570,000**	**0%**	**14,541,600**	**50%**	**89,657,600**	**0%**	**29.94%**
		2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yang dilindungi		1,200,000,000	0.5	44480000	10 Objek		0%	-	25%	44,480,000	0%	
		2	22	05	2.01	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah benda yang diduga cagar budaya yang diteliti untuk ditetapkan jadi benda cagar budaya		1,250,000,000	50%	30,636,000		48,570,000	100%	14,541,600	25%	45,177,600		29.94%
		2	22	05	2.01	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah CB dimanfaatkan		1,200,000,000	0%	-			0%	-	0%	-		
		2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Meningkatnya pengelolaan permusiuman**		**9,970,000,000**	70%	**654,383,200**	**70%**	**49,142,000**	**100%**	**41,118,790**	**55%**	**695,501,990**	**100%**	83.67%
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum kabupaten/kota	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		9,970,000,000	100%	654,383,200		49,142,000	100%	41,118,790	100%	695,501,990	100%	83.67%
		2	22	06	2.01	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		5,220,000,000	100%	200,524,300		49,142,000	100%	41,118,790	100%	241,643,090	100%	83.67%
		2	22	06	02.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan	Jumlah SDM permuseuman yang		1,400,000,000	0.5	24,744,400	40 Orang	-	0%	-	25%	24,744,400	0%	0.00%
		2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan akses masyarakat	Jumlah koleksi museum yang dipromosikan			50%	308,932,500			0%	-	25%	308,932,500		0.00%
		2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan pemeliharaan sarana	Jumlah sarana dan prasaran museum yang		1,900,000,000	50%	120,182,000			0%	-	25%	120,182,000		0.00%

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	
		2	22	06	02.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang		1,450,000,000		-			0%	-		-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tanah Datar

NO	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Meningkatnya pembinaan SDM dan tata kelola lembaga budaya	1 Persentase Peningkatan SDM Bidang Lembaga Budaya dan Pranata Budaya	57.45%	64.55%	71.64%	78.73%	41.31%	55.47%	60.64%	65.38%	
2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	1 Persentase Peningkatan Objek Pamajuan Kebudayaan (OPK) yang diinventarisir.	26.67%	35.56%	44.44%	53.33%	31.94%	28.70%	34.44%	40.25%	
		2 Persentase pemanfaatan OPK dalam peningkatan kesejahteraan	6.86%	10.39%	15.49%	20.59%	10.47%	14.07%	15.39%	20.28%	

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025

			masyarakat								
		3	Persentase objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya tingkat kabupaten yang dikelola	50%	56%	62%	69%	59.37%	64.08%	68.22%	74.42%	
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Pendidikan	1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini	100%	100%	100%	100%	70.09%	65.81%	80%	85%	
		2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	89.28%	88.03%	100%	100%	
		3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18	100%	100%	100%	100%	96.16%	80%	85%	90%	

		tahun dalam Pendidikan Kesetaraan									
4	Tercapainya penerapan kebijakan merdeka belajar	1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum - SD -SMP	65.64% 70.71%	68.64% 78.71%	72.64% 76.71%	77.64% 84.71%	54.26% 68.12%	55.47% 70.08%	58.57% 75.55%	62.15% 80.22%	
		2 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum -SD -SMP	34.37% 49.14%	49.80% 58.50%	54.80% 67.50%	59.80% 76.50%	40.02% 56.45%	41.41% 58.24%	45.51% 62.25%	49.50% 66.25%	
		3 Persentase sekolah akreditasi A dan B - SD/MI	96.31%	96.70%	97.09%	97.48%	96.47%	92.65%	97.09%	99.18%	

		- SMP/MTs	87.89%	88.70%	89.51%	90.32%	91.18%	89.42%	89.51%	85.40%	
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efesien, efektif dan akuntabel	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	72.00	72.5	72.75	73.00	72.44	72.41	72.50	72.75	
6.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00	100	100	100	100	91.01	93.25	95	
		1 Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	2	2	2	2	

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi indikator
dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100%. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja
dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai
berikut :

1. Sangat berhasil : Capaian Kinerja > 100%
2. Berhasil : 80 – 100%
3. Cukup berhasil : 60 – 79%
4. Tidak berhasil : <60%

Analisis Capaian Kinerja Pendidikan dan kebudayaan dapat diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINEJA (PERJANJIAN KINERJA)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Meningkatnya pembinaan SDM dan tata kelola lembaga budaya	1 Persentase Peningkatan SDM Bidang Lembaga Budaya dan Pranata Budaya	64,55%	55,47%	85,93%
2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	1 Persentase Peningkatan Objek Pamajuan Kebudayaan (OPK) yang diinventarisir.	35,66%	28,70%	80,48%
		2 Persentase pemanfaatan OPK dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	10,39%	14,07%	135,42%
		3 Persentase objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya tingkat kabupaten yang dikelola	70.22%	64,08%	91,26%
3	Terpenuhinya kebutuhan	1 Tingkat Partisipasi warga	100 %	65,81%	65,81%

	dasar SPM bidang Pendidikan	negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini			
		2 Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar	100 %	88,03%	88,03%
		3 Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	80 %	80%	100%
4	Tercapainya penerapan kebijakan merdeka belajar	1 Kemampuan Literasi - SD - SMP	68,64% 78,71%	55,47% 70,08%	80,81% 89,04%
		2 Kemampuan Numerasi - SD - SMP	49,80% 58,50%	41,41% 58,24%	83,15% 99,56%
		3 Persentase sekolah akreditasi A dan B - SD/MI - SMP/MTs	96,70 % 88,70 %	92,65% 89,42%	95,81% 100,81%
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efesien, efektif dan akuntabel	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	72,50	72,41	99,88%
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 (Sangat	91,01	91,01%

			Baik)		
6	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2	100%

1. **Tujuan I Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berdasarkan ABS-SBK**

   Sasaran I : Meningkatnya pembinaan SDM dan tata kelola lembaga budaya.

   Sasaran meningkatnya pembinaan SDM dan tata kelola lembaga budaya dengan indikator kinerja Persentase SDM Bidang Lembaga Adat dan Pranata Budaya. Pada tahun 2023, tercatat 2.113 SDM bidang budaya, dari jumlah tersebut yang aktif adalah sebanyak 1.172 orang atau 55,47% terbatasnya anggaran sehingga berdampak pada aktivitas SDM budaya.

   Sasaran II : Meninngkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan

   Pada sasaran terdapat 3 indikator yaitu :

   a. Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang diinventarisir.

      Jumlah OPK dikabupaten Tanah Datar diperkirakan sebanyak 554 OPK, yang telah dinventarisir sampai tahun 2023 adalah 159 OPK atau sekitar 28,70%.

   b. Persentase pemanfaatan OPK dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

      Pada tahun 2023, jumlah pemanfaatan OPK untuk kesejahteraan masyarakat 78 dari 554 atau 14,07 % dari OPK yang ada di Tanah Datar

   c. Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya tingkat kabupaten yang dikelola

      Dari 554 OPK yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 355 atau 64,08% diantaranya telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

   Dalam rangka mewujudkan misi pertama pemerintah daerah telah mengalokasikan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong berkembangnya seni dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan lanjutan pembangunan 1 unit Balai Adat Nagari yaitu Balai Adat Nagari Andaleh, program niniak mamak turun ke 4 sekolah, dan pembinanaan terhadap 8 komunitas budaya, pembinana terhadap 20 komunitas kesenian melalui program kerjasama, pembinaan seni melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) di 4 (empat) sekolah serta bantuan peralatan seni dan budaya kepada 18 kelompok seni dan budaya.

   Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 80 Sanggar Seni di kabupaten Tanah Datar. Dari jumlah tersebut sebanyak 65 (81,25%) Sanggar Seni yang aktif dan

melaksanakan berbagai kegiatan seni. Adapun bentuk kegiatan seni yang ada pada sanggar seni di kabupaten Tanah Datar adalah Randai, Salawaik Dulang, Silat, Tari, Pasambahan, Musik, Nyanyi, Teater, Dikia Mundam, Qasidah, Talempong dan Alu Katentong. Semua sanggar seni tersebut tersebar di wilayah kabupaten Tanah Datar dan diramaikan oleh masyarakat dan anak sekolah.

2. Tujuan II : Meningkatnya Mutu Pendidikan
   a. Sasaran I : Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Pendidikan

      Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM dimana salah satunya SPM bidang pendidikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yaitu Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.

      Pada Sasaran ini terdapat 3 indikator yaitu :

      1) Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini

         Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini dihitung berdasarkan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam). Pada tahun 2023 jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 7.131 sedang jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) seluruhnya adalah 10.836 orang, dengan tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 65.81%

         Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan Partisipasi warga negara dalam pendidikan anak usia dini, diantaranya adalah pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paud. Disamping itu mulai tahun 2019 telah dicanangkan program Wajib Paud 1 tahun oleh pemerintah, yang mewajibkan setiap anak usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan pra sekolah minimal 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar.

Dari segi pendidik dan tenaga kependidikan, untuk jenjang TK masih terdapat 1 orang Kepala Sekolah dan 138 orang Guru yang belum memiliki ijazah S.1 yang kesemuanya itu adalah guru-guru TK yang berada di sekolah-sekolah swasta dibawah nauangan Yayasan.

2) Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar.

Tingkat Partisipasi warga negara 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar dihitung berdasarkan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pada tahun 2023 jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) adalah sebesar 49.372 orang, sedang jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun seluruhnya adalah 56.085 orang. Dari angka tersebut diperoleh tingkat Partisipasi warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) dalam Pendidikan Dasar sebesar 88,03.

Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Disamping itu juga pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap tahun banyak guru PNS yang memasuki usia pensiun sehingga terdapat kekurangan guru hampir ditiap sekolah. Pemenuhan pendidik di sekolah yang terdapat kekurangan guru diupayakan melalui pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi PPPK telah dimulai sejak tahun 2019, baru pada tahun 2021 terbit SK PPPK sebanyak 55 orang, pada tahun 2021 diseksi kembali dan pada 2022 terbit pula SK sebanyak 122 orang, dan pada tahun 2023 terbit SK sebanyak 634 orang. Jumlah guru PPPK sampai tahun 2023 berjumlah 811 orang dengan rincian guru TK 3 orang, guru SD 651 orang dan guru SMPN 157 orang.

Untuk mengatasi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan diluar PPPK pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk bantuan transportasi kepada 1.161 orang pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang diangkat komite sekolah pada jenjang SD dan SMP, untuk PTK Paud sebanyak 714 orang dan PTK Pendidikan Nonformal sebanyak 57 orang.

3) Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan

Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah warga negara yang mengikuti pendidikan kesetaraan dibagi dengan jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan.

Pada tahun 2023, jumlah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah, yang mengikuti pendidikan kesetaraan sebanyak 1.371 pada 2 (dua) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Tanah Datar.

Kalau kita perhatikan indikator SPM diatas belum mencapai angka 100%, kondisi ini merupakan hal yang wajar bagi kabupaten Tanah Datar karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum terhitungnya anak-anak yang belajar di Pondok Pesantren tertentu dan ada sebahagian anak-anak Tanah Datar bersekolah di daerah tetangga seperti, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan lain-lain.

Selanjutnya perhitungan angka partisipasi pada setiap jenjang pendidikan memakai data Dapodik per 31 Desember 2023 dan data siswa dari Kantor Kementerian Agama Tanah Datar tahun 2023. Data secara nasional akan dirilis oleh Kemendikbud pada bulan Maret 2024 melalui Flatform Rapor Pendidikan, dan kemungkinan akan terjadi perbedaan data nantinya.

b. Sasaran II : Tercapainya penerapan kebijakan merdeka belajar

Pada sasaran ini terdapat 3 indikator yaitu :

1) Kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional

Literasi adalah kemapuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasi dan teks fiksi).

Kemampuan Literasi diukur berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang dilaksanakan secara on line pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2023. Pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan secara sampling terhadap siswa kelas V SD dan siswa kelas VII SMP. Perhitungan rata-rata kemampuan leterasi siswa dirilis secara nasional oleh Kementerian Dikbud dan Ristek pada bulan Maret 2023. Pada tahun 2023 persentase peserta didik yang telah mencapai kemampuan leterasi minimum berdasarkan hasil Asesmen Nasional adalah sebagai berikut :

- SD = 70,64
- SMP = 82,12

Secara proporsi untuk kemampuan literasi, 70,64% siswa SD telah mencapai kompetensi literasi minimum atau naik 5,10% dari tahun 2022 yaitu 65,54%. Dan 82.12% siswa SMP telah mencapai kompetensi literasi minimum atau naik 11,41% dibanding tahun 2022 yaitu 70,71 .

Dilihat dari rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra adalah sebagai berikut :

- SD = 55,47
- SMP = 70,08

Dari capaian diatas, perlu intervensi kemampuan membaca siswa SD dan SMP agar para siswa memiliki kompetensi dalam membaca teks informasi dan teks sastra.

2) Kemampuan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional

Kemampuan Numerasi adalah kemampuan untuk menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa dan unsur-unsur dalam teks informasional (non fiksi) dan sastra.

Sama dengan literasi , perhitungan kemampuan numerasi siswa dirilis secara nasional oleh Kementerian Dikbud dan Ristek pada bulan Maret 2023. Pada tahun 2023 kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional adalah sebagai berikut :

- SD = 52,9
- SMP = 62,09

Secara proporsi, 52,90% peserta didik SD kabupaten Tanah Datar telah mencapai kompetensi minimun untuk numerasi atau mengalami peningkatan sebesar 18,53% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 34,37% dan 62,09% peserta didik SMP telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi atau mengalami kenaikan 12,95% dari tahun 2022 yaitu 49,14%.

Kalau dilihat dari rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi domain bilangan, aljabar, geometri, Data dan ketidakpastian adalah sebagai berikut :

- SD = 41,41
- SMP = 58,24

Untuk mendorong peningkatan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi siswa pemerintah pusat mulai tahun 2021 telah meluncurkan program sekolah dan guru penggerak. Sampai tahun 2023 terdapat 34 sekolah penggerak yang dibiayai oleh pemerintah pusat di Kabupaten tanah Datar yang terdiri dari :

- 8 lembaga Paud
- 22 SD
- 6 SMP

Pada awalnya sekolah penggerak diatas merupakan katalisator sekolah penggerak di Tanah Datar, dan sekolah-sekolah tersebutlah yang menjadi pilot proyek pelaksanaan kurikulum merdeka. Melalui sekolah penggerak dilaksanakan kurikulum Merdeka dimana melalui kurikulum Merdeka proses pembelajaran terdiferensiasi atau fokus kepada siswa. Pelaksanaan kurikulum merdeka akan melahirkan profil Pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berprilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Disamping itu ada juga guru penggerak, guru penggerak dilatih oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kurikulum mardeka, disamping itu mereka juga dituntut untuk mengimbaskan kepada guru lainnya melalui kelompok kerja guru. Guru penggerak juga dipersiapkan untuk calon Kepala Sekolah dan Calon pengawas nantinya. Sampai tahun 2023 telah tercatat 121 orang guru penggerak TK, SD dan SMP se Kabupaten tanah Datar.

Pada tahun 2023 masih terdapat sekitar 135 orang guru SD dan 42 orang SMP yang belum memiliki ijazah S.1, hal ini merupakan guru yang telah lanjut usia dan akan memasuki masa pensiun sehingga tidak mungkin lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S.1.

Disamping pada tahun 2023 telah dilakukan peningkatan kompetensi melalui pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk SMP, disamping itu juga banyak pendidikan dan latihan baik secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Persentase sekolah akreditasi A dan B

Akreditasi sekolah merupakan salah satu alat ukur peta mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Hasil akreditasi mencerminkan potret setiap butir standar nasional pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Adapun 8 standar nasional pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Hasil peringkat akreditasi sekolah idealnya adalah nilai A namun pencapaian nilai B sudah menunjukan pencapaian sesuai standar

nasional. Pada tahun 2023, dari 317 SD/MI yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yang terakreditasi A dan B berjumlah 290 sekolah (92,65%). Dan dari 104 SMP/MTs, 93 (89,42) terakreditasi A dan B.

2.3 Isu-isu Penting Pelanggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok ***"melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan kebudayaan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan"***. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan paud dan pnf, bidang sekolah dasar, bidang smp, bidang gtk dan bidang kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan paud dan pnf, bidang sekolah dasar, bidang smp, bidang gtk dan bidang kebudayaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendidikan paud dan pnf, bidang sekolah dasar, bidang smp, bidang gtk dan bidang kebudayaan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
    1. Seksi kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasara; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
   1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
   2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
   3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
   1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
   2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
   3. Seksi Kesenian.
h. Unit Pelaksana Teknis;
i. Kelompok Jabatan Fungsional

Identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar antara lain sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum mencapai target
2. Belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan baik dari segi kuliatas maupun kuantitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD digunakan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan melakukan pengentryan awal Renja pada aplikasi SAKIP Tanah Datar dan e-SAKIP Reviu yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) berdasarkan anggaran OPD yang disepakati

Rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang oleh dokumen perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan baik,efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Bahwa perencanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar tentunya berdasarkan pada dokumen Renstra SKPD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Datar tahun 2025 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar. Dimana dalam perkembangnya mungkin ada penambahan atau perubahan program kegiatan berdasarkan usulan dari pada pemangku kepentingan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga proses tersebut bisa dilakukan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

TABEL T.C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Catatan Penting
No	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**564,820,674,597**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**				**499,309,927,553**	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5		12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan administrasi kantor yang ditata**		**397,760,950,540**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan administrasi kantor yang ditata**		**427,430,724,679**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dilahirkan**		**475,000,000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dilahirkan**		**116,191,100**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	300,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	75,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	41,191,100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tanah Datar	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (LKPJ, LKjIP, LPPD, dan SPM)		100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tanah Datar	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (LKPJ, LKjIP, LPPD, dan SPM)		-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Meningkatnya pengelolaaan administrasi keuangan**		**393,030,950,540**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Meningkatnya pengelolaaan administrasi keuangan**		**426,194,460,079**	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tanah Datar	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		392,780,950,540	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tanah Datar	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		426,123,443,579	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah laporan semester dan tunjangan guru (profesi) yang disalurkan dan 1 orang THL		150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah laporan semester dan tunjangan guru (profesi) yang disalurkan dan 1 orang THL		71,016,500	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**750,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**142,740,700**	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun		750,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang		77,740,700	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kualitas aparatur		100,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kualitas aparatur		65,000,000	
3	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Datar	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat		50,000,000	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Datar	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Meningkatnya administrasi dan pelayanan umum**		**605,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya administrasi dan pelayanan umum**		**241,136,400**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah listrik kantor yang dipenuhi		20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah listrik kantor yang dipenuhi		10,000,000	
2	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah dan jenis alat kebersihan yang disediakan		175,000,000	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah dan jenis alat kebersihan yang disediakan		70,500,000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan		125,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan		50,000,000	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan		25,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan		25,000,000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tanah Datar	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan		35,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tanah Datar	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan		35,000,000	
1	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		225,000,000	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		50,636,400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**500,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**70,000,000**	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		350,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		70,000,000	

2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laptop dan printer yang diadakan		500,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laptop dan printer yang diadakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**430,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**411,800,000**	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Perangko, Materai dan Benda POS		5,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Perangko, Materai dan Benda POS		185,000,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tanah Datar	Jumlah volume air, listrik dan telepon		250,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tanah Datar	Jumlah volume air, listrik dan telepon		226,800,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan honor THL		175,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan honor THL		-	
	Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				995,000,000	**Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**386,996,400**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan honor THL		300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan honor THL		244,396,400	
2	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		45,000,000	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		10,000,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah gedung kantor yang direhab		500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah gedung kantor yang direhab		42,600,000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang disediakan dan THL		150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang disediakan dan THL		90,000,000	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				**161,634,724,057**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**				**71,021,587,874**	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu sesuai standar nasional pendidikan**		**159,399,424,057**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu sesuai**		**69,239,176,398**	

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah dasar**		**111,360,000,000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah dasar**		**42,022,972,000**	
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Tanah Datar	Terlengkapinya Ruang Belajar Bagi peserta didik		10,500,000,000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Tanah Datar	Terlengkapinya Ruang Belajar Bagi peserta didik			
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru yang dibangun		2,100,000,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru yang dibangun		237,107,700	
3	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang UKS SD yang dibangun		1,575,000,000	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang UKS SD yang dibangun		-	
4	Pembangunan perpustakaan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun		3,150,000,000	Pembangunan perpustakaan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun		558,136,400	
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun.		5,250,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun.		-	
6	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas SD yang direhab		4,200,000,000	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas SD yang direhab		-	
7	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru yang direhab		5,250,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru yang direhab		-	
8	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab		5,250,000,000	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab		200,000,000	
9	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru SD yang direhab		2,100,000,000	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru SD yang direhab		-	
10	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Mebel siswa yang diadakan		315,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Mebel siswa yang diadakan		3,000,000,000	
11	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan		9,975,000,000	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan		827,790,000	
12	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlahsiswa yang kurang mampu yang memperoleh perlengkapan dasar		8,925,000,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlahsiswa yang kurang mampu yang memperoleh perlengkapan dasar		-	
13	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Kab. Tanah Datar			500,000,000	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Kab. Tanah Datar			33,407,100,000	
14	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan		3,675,000,000	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan		75,000,000	
15	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimal (AKM)		735,000,000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimal (AKM)		1,478,063,700	

16	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah even yang diikuti dalam Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, jumlah siswa yang mengikuti OSN dan FLSN dan jumlah siswa SD berprestasi yang mengikuti studi banding		787,500,000	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah even yang diikuti dalam Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, jumlah siswa yang mengikuti OSN dan FLSN dan jumlah siswa SD		27,400,000	
17	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidi bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Kab. Tanah Datar			10,000,000,000	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidi bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Kab. Tanah Datar			-	
18	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya Kompetensi PTK SD		900,000,000	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya Kompetensi PTK SD		301,924,800	
			PTK SD Calon Pengawas Sekolah					PTK SD Calon Pengawas Sekolah		-	
19	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah SD yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		472,500,000	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah SD yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		1,291,049,400	
20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah Siswa SD yang menerima biaya Operasional sekolah		35,175,000,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah Siswa SD yang menerima biaya Operasional sekolah		-	
21	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan dana BOS dan honor THL		525,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan dana BOS dan honor THL		209,000,000	
22	Pembangunan Laboratorium sekolah dasar	Kab. Tanah Datar			500,000,000	Pembangunan Laboratorium sekolah dasar	Kab. Tanah Datar			410,400,000	
23	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah dasar	Kab. Tanah Datar			250,000,000	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah dasar	Kab. Tanah Datar				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama**		**30,106,365,011**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama**		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama**		**19,074,355,000**	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tanah Datar			250,000,000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tanah Datar			293,973,000	
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangunan		292,903,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangunan		461,980,000	

3	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang UKS SMP yang dibangun		460,287,500	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang UKS SMP yang dibangun		329,489,451	
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun		1,200,000,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perpustakaan SMP yang		-	
5	Pembangunan laboratorium	Kab. Tanah Datar	Jumlah laboratorium yang terbangun		328,895,973	Pembangunan laboratorium	Kab. Tanah Datar	Jumlah laboratorium yang terbangun		-	
6	Pembangunan ruang serbaguna/aula	Kab. Tanah Datar			150,000,000	Pembangunan ruang serbaguna/aula	Kab. Tanah Datar			2,484,066,645	
7	Pembangunan Asrama Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah asrama sekolah yang dibangun		4,000,000,000	Pembangunan Asrama Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah asrama sekolah yang dibangun		89,488,788	
8	Pembangunan fasilitas parkir	Kab. Tanah Datar			250,000,000	Pembangunan fasilitas parkir	Kab. Tanah Datar			506,866,800	
9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Jamban Siswa, Jumlah Ruang Ibadah, Jumlah Dam/Gerbang, Jumlah Aula/Gor yang dibangun		208,265,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Jamban Siswa, Jumlah Ruang Ibadah, Jumlah Dam/Gerbang, Jumlah Aula/Gor yang dibangun		644,749,324	
10	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab		2,751,935,124	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab		200,000,000	
11	Rehabilitasi sedang/berat ruang GURU sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru SMP yang direhab		1,000,000,000	Rehabilitasi sedang/berat ruang GURU sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang guru SMP yang direhab		670,895,834	
12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di rehab		89,052,450	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di rehab		-	
13	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang direhab		505,952,900	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang direhab		-	
14	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah laboratorium sekolah yang direhab		642,430,762	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah laboratorium sekolah yang direhab		-	
15	Rehabilitasi sedang/berat ruang serbaguna/aula	Kab. Tanah Datar	Jumlah laboratorium sekolah yang direhab		750,000,000	Rehabilitasi sedang/berat ruang serbaguna/aula	Kab. Tanah Datar	Jumlah laboratorium sekolah yang direhab		1,100,000,000	
16	Rehab sedang/berat fasilitas parkir	Kab. Tanah Datar			50,000,000	Rehab sedang/berat fasilitas parkir	Kab. Tanah Datar			226,350,000	
17	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Jamban, Jumlah Mushallah, Jumlah Lapangan Upacara yang direhab		665,810,000	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Jamban, Jumlah Mushallah, Jumlah Lapangan Upacara yang direhab		-	
18	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah mebel sekolah yang diadakan		450,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah mebel sekolah yang diadakan		10,917,500,000	

19	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan		1,500,000,000	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan SMP yang		35,000,000	
20	Pengadaan Perlengkapan siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang kurang mampu yang memperoleh perlengkapan dasar		50,000,000	Pengadaan Perlengkapan siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang kurang mampu yang memperoleh perlengkapan dasar		164,400,000	
21	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah pertama	Kab. Tanah Datar	jumlah siswa kurang mampu yang memperoleh perlengkapan sekolah		257,500,000	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah pertama	Kab. Tanah Datar	jumlah siswa kurang mampu yang memperoleh perlengkapan sekolah		-	
22	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku yang diadakan		50,000,000	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku yang diadakan		453,237,358	
23	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan		493,593,900	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan		496,357,800	
24	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah siswa SMP mengikuti asesmen kompetensi minimal (AKM), jumlah SMPN mendapat dana operasional peningkatan mutu, dan THL		261,446,602	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah siswa SMP mengikuti asesmen kompetensi minimal (AKM), jumlah SMPN mendapat dana operasional peningkatan mutu, dan THL			
25	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah siswa SMP yang dibina dan berprestasi dalam bidang OSN dan FLS2N, jumlah event yang diikuti dalam KOSN, dan jumlah siswa SMP yang berprestasi yng mengikuti studi banding.		800,000,000	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Kab. Tanah Datar	Jumlah siswa SMP yang dibina dan berprestasi dalam bidang OSN dan FLS2N, jumlah event yang diikuti dalam KOSN, dan jumlah siswa SMP yang			
26	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Kab. Tanah Datar			1,298,863,750	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Kab. Tanah Datar				
27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kompetensi PTK SMP		406,928,050	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kompetensi PTK SMP			

28	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah SMP yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		200,000,000	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Tanah Datar	Jumlah SMP yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas			
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	Kab. Tanah Datar	Jumlah Siswa SMP yang menerima biaya Operasional sekolah		10,917,500,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	Kab. Tanah Datar	Jumlah Siswa SMP yang menerima biaya Operasional			
30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tanah Datar	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan dana BOS		75,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tanah Datar	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan dana BOS			
31	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/ kepala sekolah/TU	Kab. Tanah Datar			452,134,396	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/ kepala sekolah/TU	Kab. Tanah Datar				
32	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia		2,321,535,000	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia			
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan anak usia dini**		**10,062,189,650**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan anak usia dini**		**8,417,110,874**	
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas yang dibangun		400,000,000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas yang dibangun		-	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah sarana bermain yang dibangun		650,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah sarana bermain yang dibangun		2,727,140,000	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas yang direhab		200,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang kelas yang direhab		372,810,000	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru yang direhab		150,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru yang direhab		-	
5	Penyediaan biaya personil peserta Didik PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang memperoleh biaya personil (bantuan siswa tidak mampu)		100,000,000	Penyediaan biaya personil peserta Didik PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang memperoleh biaya personil (bantuan siswa tidak mampu)		4,553,400,000	
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan dasar peserta didik yang kurang mampu yang disediakan		150,000,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah perlengkapan dasar peserta didik yang kurang mampu yang disediakan		-	

7	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		500,000,000	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		431,979,000	
										-	
8	Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	Kab. Tanah Datar	Operasional Manajemen BOP Paud dan THL		145,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	Kab. Tanah Datar	Operasional Manajemen BOP Paud dan THL		56,520,398	
9	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Paud	Kab. Tanah Datar			2,649,449,400	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Paud	Kab. Tanah Datar			-	
10	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Paud	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kompetensi PTK PAUD		347,740,250	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Paud	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kompetensi PTK PAUD		-	
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Kab. Tanah Datar	Jumlah TK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		40,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Kab. Tanah Datar	Jumlah TK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		76,934,000	
12	Pengelolaan Dana BOP Paud	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik Paud yang memperoleh biaya operasional		4,680,000,000	Pengelolaan Dana BOP Paud	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik Paud yang memperoleh biaya operasional		198,327,476	
13	Pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi (TIK) untuk PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah operator Dapodik yang di latih		35,000,000	Pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi (TIK) untuk PAUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah operator Dapodik yang di latih		-	
14	Sosialisssi dan Advokasi kebijakan bisang pendidikan	Kab. Tanah Datar			15,000,000	Sosialisssi dan Advokasi kebijakan bisang pendidikan	Kab. Tanah Datar				
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan non formal**		**4,177,200,000**	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**		**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan non formal**		**1,507,150,000**	
1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru non formal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang praktek pendidikan non formal yang dibangun		1,200,000,000	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru non formal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah ruang praktek pendidikan non formal yang dibangun		125,000,000	
2	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun		840,000,000	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun		16,950,000	

3	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik		64,000,000	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik		-	
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		600,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		1,358,200,000	
5	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Operasional pendidikan kesetaraan		75,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Operasional pendidikan kesetaraan		7,000,000	
6	Penyiapan dan Tindak lanjut evaluasi satuan PNF/ Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah lembaga dan pendidikan yang di evaluasi		50,000,000	Penyiapan dan Tindak lanjut evaluasi satuan PNF/ Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah lembaga dan pendidikan yang di evaluasi		-	
7	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan		142,500,000	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan		-	
8	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kompetensi PTK Non Formal		37,100,000	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya kompetensi PTK Non Formal		-	
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	opeasional penilik		35,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	opeasional penilik		-	
10	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah siswa kesetaraan yang menerima biaya operasional pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C		1,053,600,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah siswa kesetaraan yang menerima biaya operasional pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C		225,015,000	
11	Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah lembaga/ satuan PNF/ Kesetaraan yang bisa bekerjasama dengan Dunia Usaha		35,000,000	Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah lembaga/ satuan PNF/ Kesetaraan yang bisa bekerjasama dengan Dunia			
12	Penyelenggaraan Ujian bagi peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan		25,000,000	Penyelenggaraan Ujian bagi peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Jumlah peserta didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan			
13	Koordinasi Perencanaan dan supervisi dan evaluasi layanan Bidang	Kab. Tanah Datar	Jumlah satuan/ kegiatan yang terkendala dengan baik		20,000,000	Koordinasi Perencanaan dan supervisi dan evaluasi layanan Bidang	Kab. Tanah Datar	Jumlah satuan/ kegiatan yang terkendala dengan baik			

3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		Persentase satuan pendidikan yan g menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal		1,925,300,000	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		Persentase satuan pendidikan yan g menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal		-	
	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar		Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar		1,690,000,000	**Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**		Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar		-	
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar			420,000,000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar			-	
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar			420,000,000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar			-	
3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan dasar yang disusun dan disediakan		350,000,000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan dasar yang disusun dan disediakan		-	
4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum		500,000,000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanah Datar	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum			
										-	
	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal		Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal		235,300,000	**Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal**		Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal		-	
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tanah Datar	Jumlah pendidik Paud dan PNF yang mengikuti pelatihan penyusunan Kompetensi Dasar Kurikulum Paud dan PNF		150,000,000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tanah Datar	Jumlah pendidik Paud dan PNF yang mengikuti pelatihan penyusunan Kompetensi Dasar		-	

2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tanah Datar			50,000,000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tanah Datar				
3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan non formal yang disusun dan disediakan		35,300,000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan non formal yang disusun dan disediakan			
4	Pelaksanaan penilaian/penelaahan Buku teks Muatan Lokal PAUD dan PNF	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan non formal yang disusun dan			Pelaksanaan penilaian/penelaahan Buku teks Muatan Lokal PAUD dan PNF	Kab. Tanah Datar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter			
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang layak		230,000,000	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang			
1	Pemerataaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		230,000,000	Pemerataaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
2	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya profesionalisme PTK		130,000,000	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya profesionalisme PTK			
3	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya profesionalisme PTK		100,000,000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya profesionalisme PTK			
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN				**5,425,000,000**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN**				**500,000,000**	

5	**POGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Jumlah OPK yang dikelola		5,425,000,000	**POGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Jumlah OPK yang dikelola		500,000,000	
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			200,000,000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar				
2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinventarisir		50,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinventarisir			
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Tanah Datar			150,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Tanah Datar				
2											
4	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			550,000,000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah	Kab. Tanah Datar				
5	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Tanah Datar			150,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Tanah Datar				
6	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	Kab. Tanah Datar	terwujudnya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan		150,000,000	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	Kab. Tanah Datar	terwujudnya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan			
7	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Tanah Datar			250,000,000	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Tanah Datar				
8	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			400,000,000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar				
9	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	Kab. Tanah Datar	Jumlah pemangku adat yang diberdayakan untuk melakukan pembinaan tentang filosofi ABS-SBK kepada peserta didik		150,000,000	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	Kab. Tanah Datar	Jumlah pemangku adat yang diberdayakan untuk melakukan pembinaan			
10	Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Tanah Datar			100,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Tanah Datar			400,000,000	
11	Penyediaan sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Tanah Datar			150,000,000	Penyediaan sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Tanah Datar			25,000,000	
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Jumlah Sanggar Seni yang aktif**		**1,050,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Jumlah Sanggar Seni yang aktif**			
1	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Tanah Datar	Jumlah pelaku seni yang produktif		550,000,000	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah pelaku seni yang produktif			

2	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Kab. Tanah Datar	Jumlah seniman yang diberdayakan pada satuan pendidikan		350,000,000	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Kab. Tanah Datar	Jumlah seniman yang diberdayakan pada satuan pendidikan			
3	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Penerima Sertifikat Terhadap Pelaku Seni		200,000,000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Penerima Sertifikat Terhadap Pelaku Seni			
4	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Tanah Datar			200,000,000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Tanah Datar				
5	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			150,000,000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar				
6	Pembinaan Sumber daya manusia, lembaga dan Pranata Kebudayaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang terstandar		150,000,000	Pembinaan Sumber daya manusia, lembaga dan Pranata Kebudayaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang terstandar			
7	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Jumlah sejarah lokal yang digali**		**600,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Jumlah sejarah lokal yang digali**			
1	Pembinaaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen sejarah yang dibukukan		600,000,000	Pembinaaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Tanah Datar	Jumlah dokumen sejarah yang dibukukan			
2	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar	Jumlah sejarah lokal yang dibukukan		50,000,000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar	Jumlah sejarah lokal yang dibukukan			
3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Tanah Datar	Pembuatan Website dan Bank Data Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		50,000,000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Tanah Datar	Pembuatan Website dan Bank Data Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			
4	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Kab. Tanah Datar	terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana pembinaan sejarah		500,000,000	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Kab. Tanah Datar	terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana pembinaan sejarah			
8	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan		725,000,000	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan			
1	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Kab. Tanah Datar	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dipublikasikan		350,000,000	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Kab. Tanah Datar	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dipublikasikan			
2	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftar		300,000,000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftar			
3	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB yang ditetapkan		50,000,000	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB yang ditetapkan			
4	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			375,000,000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar				

5	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB yang dilindungi		75,000,000	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB yang dilindungi		75,000,000	
6	Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB yang dikembangkan		50,000,000	Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB yang dikembangkan			
7	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB dimanfaatkan		250,000,000	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar	Jumlah CB dimanfaatkan			
8	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			200,000,000	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar				
9	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			100,000,000	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar				
10	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerha Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar			100,000,000	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerha Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar				
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		Jumlah museum yang dikelola		1,700,000,000	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		Jumlah museum yang dikelola			
1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya pengelolaan permusiuman		1,700,000,000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar	Meningkatnya pengelolaan permusiuman			
2	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Kab. Tanah Datar	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		300,000,000	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Kab. Tanah Datar	Jumlah koleksi museum yang dilindungi			
3	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Tanah Datar	Jumlah SDM permuseuman yang dibina dan ditingkatkan mutunya		200,000,000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Tanah Datar	Jumlah SDM permuseuman yang dibina dan ditingkatkan mutunya			
4	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Tanah Datar			200,000,000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Tanah Datar				
5	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Tanah Datar	Tersediaan terpeliharanya sarana dan prasarana Museum		600,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Tanah Datar	Tersediaan terpeliharanya sarana dan prasarana Museum			

6	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Tanah Datar	Jumlah sarana dan prasarana museum yang direvisi		400,000,000	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Tanah Datar	Jumlah sarana dan prasarana museum yang direvisi			

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarat

Usulan-usulan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari dan Kecamatan Tahun 2023 serta usulan dari Pokok-pokok pikiran dewan umumnya telah diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti Rehab utilitas sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, pengadaan alat kesenian dan batuan sosial bagi siswa tidak mampu, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. (terlampir)

TABEL T-C.32.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	4 Paket	
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah sekolah yang diadakan	5 Paket	
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personal peserta didik	2 Paket	
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	1 Paket	
5	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kabupaten Tanah Datar	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2 Paket	
6	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah sedang/berat ruang kelas yang direhab	2 Paket	
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	1 Paket	
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personal peserta didik	3 Paket	
9	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	1 Paket	
10	Pembangunan Ruangan Kelas Baru	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah sedang/berat ruang kelas yang di bangun	1 Paket	
11	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana utilitas sekolah	Kabupaten Tanah Datar	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	3 Paket	
12	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Kabupaten Tanah Datar	Jumlah seniman yang diberdayakan pada satuan pendidikan	6 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mendukung pencapaian nawacita kedua dan tujuan kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang diciptakan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam gambar 3.3.1



Gambar 3.31 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui :

(1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;

(2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;

(3) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan

(4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:
(1) Ekosistem pendidikan;

(2) Guru;

(3) Pedagogi;

(4) Kurikulum; dan

(5) Sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru. Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat

formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio. Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024 Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Parangkat Daerah

Dengan berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RPJMD tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya pembinaan SDM dan tata kelola lembaga budaya	1 Persentase Peningkatan SDM Bidang Lembaga Budaya dan Pranata Budaya	78,73%
2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	1 Persentase Peningkatan Objek Pamajuan Kebudayaan (OPK) yang diinventarisir.	53,33%
		2 Persentase pemanfaatan OPK dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	7%
		3 Persentase objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya tingkat kabupaten yang dikelola	69%
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Pendidikan	1 Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun	100 %

			dalam Pendidikan Usia Dini	
		2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar	100 %
		3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %
4	Tercapainya penerapan kebijakan merdeka belajar	1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum - SD -SMP	 69,64% 79,71%
		2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum -SD -SMP	 50,80% 59,50%
		3	Persentase sekolah akreditasi A dan B - SD/MI - SMP/MTs	 97,48% 90,32%
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efesien, efektif dan akuntabel	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	72,75%
6.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	2 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	90,75% Sangat Baik) 2

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan meliputi :
   a. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   b. Administrasi keuangan perangkat daerah
   c. Administrasi barang milik daerah perangkat daerah
   d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   e. Administrasi umum perangkat daerah
   f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   h. Pemeliharaan barang miliki daerah penunjang urusan pemerintah daerah

2. Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan meliputi :
   a. Pengelolaan sekolah dasar
   b. Pengelolaan sekolah menengah pertama
   c. Pengelolaan pendidikan anak usia dini
   d. Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan
3. Program Pengembangan Kurikulum
   a. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar
   b. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan non formal
4. Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   a. Pemerataaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
   a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Kesenian Daerah
   a. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
   b. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan Sejarah
   a. Pembinaaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
   b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Permuseuman, kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan Program dan kegiatan untuk menunjang pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana berikut :

Tabel. T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH DATAR

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Jumlah Pagu	Sumber dana			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**499,309,927,553**			**651**	**543,585,402,900**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan administrasi kantor yang ditata**			**427,563,324,679**			**100%**	**402,055,000,000**
1	**01**	**01**	**2**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dilahirkan**			**116,191,100**			**12 dokumen**	**145,000,000**
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kab. Tanah Datar	4 dokumen	75,000,000	DAU		4 dokumen	95,000,000
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (LKPJ, LKjIP, LPPD, dan SPM)	Kab. Tanah Datar	4 dokumen	41,191,100	DAU		4 dokumen	50,000,000
1	**01**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pengelolaaan administrasi keuangan**			**426,194,460,079**			**-**	**400,190,000,000**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Tanah Datar		426,123,443,579	DAU		1 tahun	400,000,000,000
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan semester dan tunjangan guru (profesi) yang disalurkan dan 1 orang THL	Kab. Tanah Datar		71,016,500	DAU		1 dokumen	90,000,000
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			-	DAU		12 dokumen	100,000,000
1	**01**	**01**	2		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**142,740,700**			**-**	**80,000,000**
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun	Kab. Tanah Datar		77,740,700	DAU		2 dokumen	80,000,000

1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Kab. Tanah Datar		65,000,000	DAU		10 orang	100,000,000
1	**01**	**01**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya administrasi dan pelayanan umum**			**241,136,400**			**-**	**405,000,000**
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah listrik kantor yang dipenuhi	Kab. Tanah Datar		10,000,000	DAU		1 tahun	15,000,000
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah dan jenis alat kebersihan yang disediakan	Kab. Tanah Datar		70,500,000	DAU		1 tahun	100,000,000
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kab. Tanah Datar		50,000,000	DAU		1 tahun	70,000,000
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Kab. Tanah Datar		25,000,000	DAU		1 tahun	50,000,000
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan	Kab. Tanah Datar		35,000,000	DAU		1 tahun	50,000,000
1	01	01	2.06	0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Kab. Tanah Datar		50,636,400			1 tahun	120,000,000
1	**01**	**01**	2		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**70,000,000**			**-**	**100,000,000**
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop dan printer yang diadakan	Kab. Tanah Datar		70,000,000	DAU		18 unit	100,000,000
1	**01**	**01**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**411,800,000**			**-**	**400,000,000**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah volume air, listrik dan telepon	Kab. Tanah Datar		185,000,000	DAU		1 tahun	200,000,000
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan honor THL	Kab. Tanah Datar		226,800,000	DAU		1 tahun	200,000,000
1	**01**	**01**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**386,996,400**			-	490,000,000
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan honor THL	Kab. Tanah Datar		244,396,400	DAU		1 tahun	250,000,000

1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kab. Tanah Datar		10,000,000	DAU		1 tahun	20,000,000
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kab. Tanah Datar		42,600,000	DAU		1 unit	100,000,000
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang disediakan dan THL	Kab. Tanah Datar		90,000,000	DAU		1 tahun	120,000,000
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**				**71,246,602,874**			**623**	**140,686,652,900**
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu sesuai standar nasional pendidikan**			**71,014,587,874**			**90%**	**139,786,652,900**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah dasar**			**42,022,972,000**			**11**	**72,325,000,000**
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun	Kab. Tanah Datar		237,107,700			100%	2,100,000,000
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS SD yang dibangun			-			100%	1,575,000,000
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun	Kab. Tanah Datar		558,136,400			100%	3,150,000,000
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun.			-			100%	5,250,000,000
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel siswa yang diadakan			-			100%	315,000,000
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan			-			100%	9,975,000,000
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Utilitas sekolah yg di Rehab	Kab. Tanah Datar		200,000,000			100%	2,100,000,000
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah even yang diikuti dalam Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, jumlah siswa yang mengikuti OSN dan FLSN dan jumlah siswa SD berprestasi yang mengikuti studi banding			-			100%	787,500,000

1	01	02	2.01	0026	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidi bagi satuan pendidikan sekolah dasar		Kab. Tanah Datar		3,000,000,000				10,000,000,000
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Meningkatnya Kompetensi PTK SD	Kab. Tanah Datar		827,790,000				900,000,000
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SD yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas			-			100%	472,500,000
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD yang menerima biaya Operasional sekolah	Kab. Tanah Datar		33,407,100,000			100%	35,175,000,000
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan dana BOS dan honor THL	Kab. Tanah Datar		75,000,000			100%	525,000,000
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium sekolah dasar		Kab. Tanah Datar		1,478,063,700				500,000,000
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlahsiswa yang kurang mampu yang memperoleh perlengkapan dasar	Kab. Tanah Datar		27,400,000			100%	8,925,000,000
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlengkapinya Ruang Belajar Bagi peserta didik			-			100%	10,500,000,000
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah jamban siswa dan guru SD yang direhab	Kab. Tanah Datar		301,924,800			100%	2,100,000,000
1	01	02	2.01	0050	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Asesmen Kompetensi Minimal (AKM)			-			100%	735,000,000
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	Kab. Tanah Datar		1,291,049,400			100%	4,200,000,000
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar				-				500,000,000
1	01	02	2.01	0053	Bimbingn Teknis, Pelatihan, dan/atau magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidaang pendidikan	Jumlah Bimtek Pendidik	Kab. Tanah Datar		209,000,000				500,000,000
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan	Kab. Tanah Datar		410,400,000			100%	3,675,000,000
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama**			**19,074,355,000**				

1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangunan	Kab. Tanah Datar		293,973,000	DAU dan DAK		4 Paket	300,000,000.00
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS SMP yang dibangun	Kab. Tanah Datar		461,980,000	DAU dan DAK		5 Paket	475,000,000.00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan laboratorium	Jumlah laboratorium yang terbangun	Kab. Tanah Datar		329,489,451	DAU dan DAK		3 Paket	330,000,000.00
1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang dibangun			-	DAU		1 Sklh	2,000,000,000
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban Siswa, Jumlah Ruang Ibadah, Jumlah Dam/Gerbang, Jumlah Aula/Gor yang dibangun			-	DAU		4 Paket	250,000,000.00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	Kab. Tanah Datar		2,484,066,645	DAU dan DAK		8 Paket	250,000,000.00
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di rehab	Kab. Tanah Datar		89,488,788	DAU dan DAK		3 Paket	90,000,000.00
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang direhab	Kab. Tanah Datar		506,866,800	DAU dan DAK		4 Paket	505,952,900
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah	Jumlah laboratorium sekolah yang direhab	Kab. Tanah Datar		644,749,324	DAU dan DAK		4 Paket	650,000,000.00
1	01	02	2.02	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Utilitas sekolah yg di Rehab	Kab. Tanah Datar		200,000,000	DAU		100%	300,000,000
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Jamban, Jumlah Mushallah, Jumlah Lapangan Upacara yang direhab	Kab. Tanah Datar		670,895,834	DAU dan DAK		4 Paket	1,500,000,000.00
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan			-				100,000,000
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah pertama	jumlah siswa kurang mampu yang memperoleh perlengkapan sekolah			-	DAU		50 Peserta Didik	260,000,000.00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa SMP yang dibina dan berprestasi dalam bidang OSN dan FLS2N, jumlah event yang diikuti dalam KOSN, dan jumlah siswa SMP yang berprestasi yng mengikuti studi banding.			-				150,000,000

1	01	02	2.02	0039	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama		Kab. Tanah Datar		1,100,000,000	DAU		128 orang	1,100,000,000.00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Meningkatnya kompetensi PTK SMP	Kab. Tanah Datar		226,350,000	DAU		2460 orang	450,000,000.00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SMP yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas			-	DAU			250,000,000
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	Jumlah Siswa SMP yang menerima biaya Operasional sekolah	Kab. Tanah Datar		10,917,500,000	DAK Non Fisik		57 satuan pendidik	10,917,500,000.00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan dana BOS	Kab. Tanah Datar		35,000,000	DAU			75,000,000
1	01	02	2.02	0058	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah siswa SMP mengikuti asesmen kompetensi minimal (AKM), jumlah SMPN mendapat dana operasional peningkatan mutu, dan THL	Kab. Tanah Datar		164,400,000	DAU		3 Satuan Pendidikan	950,000,000.00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlah peserta didik yang kurang mampu yang memperoleh perlengkapan dasar			-	DAU		1 Paket	2,400,000,000.00
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/ kepala sekolah/TU		Kab. Tanah Datar		453,237,358	DAU dan DAK		5 Paket	480,000,000.00
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan	Kab. Tanah Datar		496,357,800	DAU dan DAK		8 Paket	500,000,000.00

1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan anak usia dini**			**8,417,110,874**				
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana bermain yang dibangun			-	DAU dan DAK		11 TKN, SKB1, SKB 2	75,000,000.00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Paud		Kab. Tanah Datar		2,727,140,000	DAU		725 orang	2,700,000,000
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Paud	Meningkatnya kompetensi PTK PAUD	Kab. Tanah Datar		372,810,000	DAU		420 orang	375,000,000

1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah TK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas			-	DAU		345 Lembaga	220,000,000.00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP Paud	Jumlah peserta didik Paud yang memperoleh biaya operasional	Kab. Tanah Datar		4,553,400,000	DAK	Jumlah menyesuaikan dengan keputusan mentri		4,800,000,000.00
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang di bangun			-				20,000,000.00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Kab. Tanah Datar		431,979,000	DAU dan DAK		11 Lembaga	450,000,000.00
1	01	02	2.03	0049	Rehab sedang/ berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU				-				275,000,000.00
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kab. Tanah Datar		56,520,398				75,000,000.00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah jamban siswa dan guru yang direhab			-	DAU dan DAK		5 Lembaga	225,000,000.00
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan peserta didik PAUD	Jumlah perlengkapan dasar peserta didik yang kurang mampu yang disediakan			-				120,000,000
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	Kab. Tanah Datar		76,934,000			20 Paket	300,000,000.00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	Operasional Manajemen BOP Paud dan THL	Kab. Tanah Datar		198,327,476	DAU	termasuk kegiatan penurunan stunting	341 lembaga dan 1 THL siswa PAUD	240,000,000.00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab			-	DAU dan DAK		11 Lembaga	50,000,000.00
1	**01**	**02**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan non formal**			**1,507,150,000**				
1	01	02	2	0014	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan	Kab. Tanah Datar		125,000,000	DAU		50 orang	160,000,000.00
1	01	02	2	0015	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Meningkatnya kompetensi PTK Non Formal	Kab. Tanah Datar		16,950,000	DAU		70 orang	50,000,000.00

1	01	02	2	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	opeasional penilik			-	DAU		10 lembaga	50,000,000.00
1	01	02	2	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa kesetaraan yang menerima biaya operasional pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C	Kab. Tanah Datar		1,358,200,000	DAK Non Fisik		720 orang	1,358,200,000.00
1	01	02	2	0018	Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah lembaga/ satuan PNF/ Kesetaraan yang bisa bekerjasama dengan Dunia Usaha	Kab. Tanah Datar		7,000,000	DAU		10 Lembaga	35,000,000.00
1	01	02	2	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang di Rehab			-	DAU dan DAK			20,000,000.00
1	01	02	2	0041	Rehabilitasi sedang/ berat sarana prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan	Jumah Rehabilitasi sedang/ berat sarana prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan yang dilakukan			-	DAU			120,000,000.00
1	01	02	2	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional pendidikan kesetaraan			-	DAU		140 orang	200,000,000.00
1	01	02	2	0052	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun			-	DAK		2 ruang	20,000,000.00
1	01	02	2	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	Kab. Tanah Datar		225,015,000	DAU dan DAK		2 paket	250,000,000.00
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase satuan pendidikan yan g menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal			**-**			100%	**255,000,000**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**	Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar			-			2	160,000,000
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				-			100%	50,000,000
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan dasar yang disusun dan disediakan			-			100%	50,000,000
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum			-			100%	60,000,000

1	**01**	**03**	**2**		**Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal**	Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal			-			600	95,000,000
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				-	APBD		364 PAUD, 2 SKB dan 9 PKBM	35,000,000.00
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan non formal yang disusun dan disediakan			-	APBD		600	60,000,000.00
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN**				**500,000,000**			**27**	**843,750,000**
2	**22**	**02**			**POGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah OPK yang dikelola			500,000,000			2	843,750,000
2	22	02	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			-	62,500,000
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinventarisir			-	DAU		5 OPK	62,500,000.00
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**425,000,000**				125,000,000
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Adat		Kab. Tanah Datar		400,000,000	DAU		10 satuan pendidikan	125,000,000.00
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Kab. Tanah Datar		25,000,000				
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Sanggar Seni yang aktif**			**-**				**437,500,000**
2	**22**	**03**	2.01		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku seni yang produktif			**-**				437,500,000
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah seniman yang diberdayakan pada satuan pendidikan			-	DAU		20 Satuan pendidikan, 3 Komunikasi seni budaya dan	437,500,000.00
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah sejarah lokal yang digali**			**-**			**5**	**125,000,000**
2	22	04	2		Pembinaaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen sejarah yang dibukukan			**-**			-	125,000,000

2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dibukukan			-	DAU		40 orang tenaga sejarah	62,500,000.00
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Pembuatan Website dan Bank Data Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			-	DAU		2 Sejarah lokal	62,500,000.00
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan			75,000,000			20	93,750,000
2	22	05	2.01		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				-				93,750,000
2	22	05	2.01	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yang dilindungi	Kab. Tanah Datar		75,000,000	DAU		10 jupel	93,750,000.00

BAB V
PENUTUP

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar Sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar harus mampu mengelola pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten ini dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pengelolaan pendidikan memerlukan suatu program yang terencana. Salah satu bentuk program tersebut ádalah Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ini selayaknya menjadi tolok ukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri, namun di lain sisi rencana ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan sehingga kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Batusangkar, Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR

INHENDRI ABAS, S.Pd, MM
NIP. 19690620 199312 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN

TANAH DATAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN

2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Badan menuju Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar yang responsive dan aspiratif.

Batusangkar, Agustus 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198901 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023**	9
	2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	14
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Sekretariat DPRD	15
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	18
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Renja	18
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	19
	3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	24
BAB V	**PENUTUP**	25

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun. Renja OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun perencanaan tahunan yang dananya bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Disamping itu Renja OPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan perencanaan

Dipindai dengan CamScanner

program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi seluruh Aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya sehingga target Kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan Baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan Strategis yang perlu ditindak lanjuti atau di antisipasi.

Dengan adanya Rencana kerja ini maka seluruh proses kegiatan pelaksanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar berjalan dengan Sistem yang jelas dan terukur, baik disegi Ketahanan Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dipindai dengan CamScanner

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171)
14) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222).
15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958)
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Dipindai dengan CamScanner

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Refitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organsasi Kemasyarakatan
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekrusor Narkotika.
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

28) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;
29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30) Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman perencanaan program/ kegiatan tahun 2025 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis di Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan keadaan 1 (satu) tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat terwujud sehingga menciptakan kondisi yang kondusif dan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1) Rencana Kerja OPD merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan Indikator Kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Priode 2021-2026 dan hasilnya dari proses ini adalah berupa Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Dipindai dengan CamScanner

2) Perencanaan Kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan target kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
3) Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.
4) Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan Program Kegiatan ke dalam KUA PPAS dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGAT TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subjek pelaku Pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Keberhasilan suatu proses perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan Pembangunan di tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar terlampir.

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar sepanjang Tahun 2023:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1) Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dengan capaian fisik 66.08 %.

b) Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja.

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dengan capaian fisik 80.9%

Dipindai dengan CamScanner

2) Administasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan gaji dan Tujuangan ASN

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol Kab. Tanah Datar dengan capaian fisik 93.68%.

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Badan Kesbangpol Kab. Tanah Datar dengan capaian fisik 95.8 %

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Intansi Listrik/Penerangan Bangunan Badan

Realisasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung Bandan Bandan Kesbangpol terpenuhi dan berfungsi dengan baik dengan capaian fisik 100 %

b) Penyediaan Bahan Logistik Badan

Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Bandan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar terpenuhi dengan baik dengan capaian fisik 99.98 %

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Realisasi kinerja sesuai dengan target, berupa cetak lembar disposisi, cetak kop surat, map dan penggandaan terpenuhi dengan baik dengan capaian fisik 99.98 %

d) Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk rapat internal Badan Kesbangpol maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik dengan capaian fisik 87.34 %

e) Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana dengan baik dengan capaian fisik 100 %

Dipindai dengan CamScanner

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan dengan capaian fisik 99.5%

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancer dengan capaian fisik 73.47%

c) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Badan

Realisasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan Bandan terlaksana selama 1 tahun dengan capaian fisik 99.85 %

5) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas

Realisasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua dengan capaian fisik 97.86 %

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi kinerja sesuai dengan target dengan capaian fisik 98.8 %

c) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Badan dan Bangunan Lainnya

Realisasi kinerja sesuai dengan target, terealisasi berupa Pembayaran Honor 1 (satu) Orang THL dan perbaikan gedung Bandan dengan capaian fisik 100%.

Dipindai dengan CamScanner

2. **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

1) Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karekter Kebangsaan

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Output sub kegiatan ini fasilitasi upacara hari besar nasional namun karena keterbatasan anggaran akibat recofussing anggaran tahun 2023 sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dengan realisasi sebesar (88.82%)

3. **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Dem

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan politik di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada 9 (sembilan) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pemilu tahun 2019-2024. Dengan capaian (99.24 %)

b) Sub Kegiatan penyusunan program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan politik di Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi pemberian bantuan Hibah sebesar 40% kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan PILKADA Tahun 2024 dengan capaian kegiatan (100%).

4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT**

   a) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas evaluasi dan mediasi sengketa Ormas dan Ormas Asing di daerah

   Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi pendaftaran Ormas dan LSM pada Badan Kesabngpol Kab. Tanah Datar dengan capaian kegiatan (99.91%)

5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL DAN BUDAYA**

   a) Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah.

   Output sub kegiatan ini berupa pemantauan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tanah Datar dengan capaian (99.98%)

6. **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

   Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksaan Pemantapan Kewapadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

   a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

   *Output sub k*egiatan ini berupa terselenggaranya 12 kali rapat-rapat forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) dan pemantauan kegiatan masyarakat pada 10 titik dalam rangka liburan Lebaran dan malam pergantian tahun oleh tim gabungan dari Polres Tanah Datar, Polres

Dipindai dengan CamScanner

Padang Panjang, Kodim Tanah Datar, Pol PP, Dishub dan Dinas Kesehatan. Dengan capaian (99.85%)

b) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi penanganan konflik yang terjadi ditengah masyarakat yang bekerjasama dengan Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar dan Polres Kota Padang Panjang. Dengan capaian (99.94%)

c) Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi pemantauan forum kewaspadaan dini masyarakat sebanyak 75 orang pada 75 Nagari se-Kabupaten Tanah Datar namun dalam pelaksanaan kegiatannya belum maksimal karena keterbatasan anggaran tahun 2023. Dengan capaian (99.86%)

d) Pelaksanaan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi rapat-rapat dengan FORKOPIMDA yang menyakut isu strategis Daerah. Dengan capaian (93.52%)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar meningkat sangat signifikan dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ada beberapa urusan pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol diantaranya :

1. Rekomendasi Penelitian yang diminta Dinas PMPTSP Naker
2. Rekomendasi Izin Keramaian

Dipindai dengan CamScanner

3. Surat keterangan melapor bagi LSM, Yayasan dan Perkumpulan
4. Surat Keterangan Keberadaan Partai Politik
5. Fasilitas Surat Keterangan Terdaftar Ormas ke Kemendagri
6. Fasilitasi Pelaksanaan Upacara

Untuk urusan pelayanan administrasi yang ada di Badan Kesbangpol telah berjalan dengan baik pada indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dari tahun ke tahun.

Faktor yang menunjang kinerja pelayanan tersebut adalah :

1) Sudah adanya SOP pelayanan
2) Staf yang ada mampu bekerja dengan maksimal
3) Suasana Bandan yang nyaman

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BANDAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar terdapat isu- isu penting yaitu :

1) Belum maksimalnya pembinaan Idiologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara dan pengembangan demokrasi kepada masyarakat karena Keterbatasan anggaran.
2) Makin tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba, miras dan LBGT dan meningkatnya kasus penderita HIV dan AIDS.
3) Belum maksimalnya penyelesaian konflik tanah ulayat, karena persoalan budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
4) Belum maksimalnya peran dan fungsi staf kesbangpol sebagai bagian dari Intelijen daerah karena keterbatasan personil yang memiliki pendidikan intelijen.
5) Meningkatnya kasus asusila dan kriminilitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya terjadinya permasalahan sebagai berikut :

1) Belum optimalnya kegiatan sosialisasi karena keterbatasan anggaran.
2) Keterbatasan personil pada Bandan Kesbangpol
3) Keterbatasan sumberdaya Intelijen di Bandan Kesbangpol

Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelaksanaan tugas antara lain:

1) Adanya komitmen Pimpinan Daerah untuk kelancaran tugas-tugas Kesbangpol.
2) Adanya dukungan Forkopimda dalam menciptakan stabilitas Ipoleksosbudhankam
3) Terjalinnya koordinasi dengan Intelijen BIN, BAIS dan Intelijen di jajaran Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan,
4) Terjalinnya koordinasi dengan OPD dan Instansi vertikal di daerah.
5) Adannya soliditas pada jajaran Kesbangpol

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Bahwa perencanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar tentunya berdasarkan pada dokumen Rencana Trategis (Renstra) SKPD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Kesbangpol .

Program dan kegiatan yang diusulkan tersebut dalam upaya mengakomodir rencana kerja Badan Kesbangpol guna mendukung fungsi Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar.

Rencana program kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar. Review terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar tertuang dalam tabel berikut :

2.5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Sebagai OPD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 bahwa tugas pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Bupati yang didelegasikan pada Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian

Dipindai dengan CamScanner

bhineka tunggal ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan.
5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan
7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar adalah Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
- Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota
- Pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Dipindai dengan CamScanner

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026, menetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tenteram dan damai dengan ditunjang pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat pada upaya penyelesaian masalah dan deteksi dini.
3. Mewujudkan sistem politik yang demokratis dan beradab.
4. Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba.

Berdasarkan tujuan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar menetapkan Sasaran Renja Tahun 2025, sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	1 Meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi masyarakat pada upaya penyelesaian masalah dengan deteksi dini terhadap pertumbuhan kelompok radikal, konflik, dan gangguan keamanan yang tengah terjadi ditengah masyarakat.
2	Terwujudnya sistem politik yang demokratis dan beradab	2 Meningkatkan peran serta masyarakat dan partai politik dalam pelaksanan pemilu 3 Peningkatan pemahaman pengurus partai politik dan Ormas terhadap peraturan perundang-undangan
3	Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba	4 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat dan narkoba

Dipindai dengan CamScanner

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bandan Kesbangpol Tahun 2025 terdiri 5 (lima) Program 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan

Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan, ditetapkanlah program kerja Bandan Kesbangpol yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebasgai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kab. Tanah Datar terdiri dari:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Dipindai dengan CamScanner

SKPD

Administrasi Keuangan perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Bandan
- Penyediaan Bahan Logostik Bandan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Bandan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bandandan Bangunan Lainnya

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauaran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
- Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Nagara, Karekter Bangsa, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dipindai dengan CamScanner

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Dipindai dengan CamScanner

Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar mempunyai 5 (lima) Program 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan, Program dan Kegiatan untuk tahun 2025 terlampir.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun sebagai pedomam rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2025.

Untuk keberhasilan Rencana Kerja tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang memadai, sehingga dapat diwujudkan program unggulan Bupati yang terkait dengan misi ke 5 (lima) "Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien".

Rencana Kerja merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2025.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati perkenankan kami untuk menyampaikan ribuan terima kasih atas semua dukungan moral dan materil kepada semua pihak (Pimpinan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pimpinan dan satuan kerja terkait), sehingga Penyusunan Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT, Amin ya robbal'alamin.

Batusangkar, Agustus 2024
KEPALA BADAN KESBANGPOL

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198901 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

RENJA AKHIR

TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pengawasan Inspektorat Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu Perencanaan Pengawasan Jangka Menengah dan Perencanaan Pengawasan Tahunan. Dokumen perencanaan pengawasan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pengawasan yang nantinya dituangkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan hasil kinerja pengawasan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak.

Substansi Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan ini mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang memuat ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, unit kerja yang diperiksa, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, jumlah tenaga, anggaran pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Rencana Kerja Pengawasan Tahunan memuat materi pemeriksaan yang meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebangaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renja ini adalah :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kinerja program dan kegiatan baik yang skala prioritas maupun yang bersifat penunjang sesuai target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan yang disingkronkan dengan Visi dan Misi daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Inspektorat Daerah secara umum dapat terlaksana dengan baik, berikut informasikan pencapaian renja Inspektorat Daerah sebagai berikut :

a. Persentase Penyimpangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Persentase Penyimpangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah	0,0049 %	0,0038 %	0,00438 %	0.00386 %	113,95 %	98,36%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diukur dari persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Kriteria dari indikator ini adalah total jumlah kerugian negara/daerah dibagi dengan total anggaran . Hasil pengukuran pada indikator ini maka diperoleh nilai 0,00386%, dengan capaian 98,36%. Penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah pada Kabupaten Tanah Datar rendah yaitu 0,00386% dari total anggaran. Target dari indikator kinerja persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar 0,0038%, hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi sebesar 0,00386%. Ini berarti tingkat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah pada Kabupaten Tanah Datar rendah atau kecil, dari total seluruh anggaran Kabupaten Tanah Datar, penyimpangan yang merugikan negara/daerah berkisar 0,0438%.

Angka penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah berasal dari total temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan atau Pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta temuan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan pada obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat (PKPT) Tahun 2023, obyek pemeriksaan ada sebanyak 379, Sedangkan realisasi pemeriksaan sebanyak 434 obyek pemeriksaan dengan rincian:

1. Audit sebanyak 66 Laporan
2. Reviu sebanyak 245 Laporan
3. Evaluasi 117 Laporan
4. Monitoring 6 Laporan

- **Faktor Keberhasilan**

  Peran APIP dalam melaksanakan pengawasan adalah sebagai *Quality Assurance, Consulting Partner* yang diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan komprehensif. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diketahui melalui temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah. Diharapkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas eksternal, kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

- **Faktor Kegagalan**

  a) Kurangnya komitmen dari pengelola keuangan (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada OPD dalam pengelolaan keuangan menerapkan prinsip efesien, efektif dan ekonomis dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  b) Penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan

  c) Rendahnya kompetensi Bendahara sebagai pengelola keuangan dalam memahami peraturan tentang keuangan.

- **Langkah- Langkah Antisipatif**

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Inspektorat adalah sebagai antisipasi tidak terjadi kesalahan/ meminimalisir temuan dengan Early Warning System (EWS) agar tingkat kepatuhan pengelola keuangan OPD dengan aturan :

a) Mengeluarkan Surat Edaran agar OPD melaksanakan pengelolaan keuangan dengan prinsip efektif, efesien dan ekonomis dan taat dengan azaz kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

b) Mengeluarkan surat Bupati terkait Pengadaan Barang dan Jasa agar dokumen kontrak diteliti terlebih dahulu oleh bagian Administrasi Pembangunan (AP) dan Bagian Hukum (Legal Drafting) dan memastikan status penyedia yang memenangkan tender serta pengawasan yang memadai oleh pengawas dan PPK/PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan.

c) Melakukan reviu kontrak pemeriksaan, pembinaan dan monitoring ke OPD sehingga OPD tetap melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan.

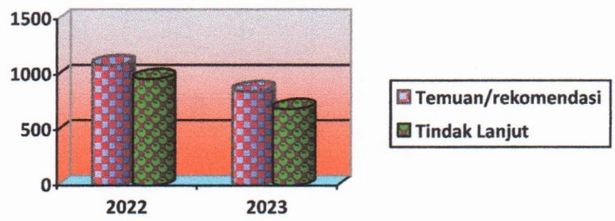
Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala.

b. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal /Eksternal Yang Telah Ditindaklanjuti

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Yang Telah Ditindaklanjuti	90%	90%	84,63%	84,35%	94,03%	93,72%

Hasil Pemantauan tindak lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 dari jumlah temuan telah ditindak lanjuti sebesar 84,35 %.

Dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut



Untuk indikator persentase hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti diatas,dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya :

- **Faktor keberhasilan**

  Inspektorat Daerah selalu melakukan pendampingan kepada OPD dan Nagari agar obyek pemeriksaan dalam menindak lanjuti temuan dari auditor harus sesuai dengan rekomendasi dan menekankan pada OPD bahwa OPD juga harus aktif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

- **Faktor kegagalan**

  a) Masih terhadap temuan yang berindikasi kerugian Negara/Daerah belum dapat ditindak lanjuti disebabkan karena menyangkut pihak ketiga.

b) Masih rendahnya pemahaman dari OPD bagaimana langkah langkah dalam melaksanakan tindak lanjut, dan obyek pemeriksaan juga belum taat pada ketentuan bahwa tindak lanjut paling lama 60 hari sejak LHP diterima oleh obyek pemeriksa.

- **Langkah-langkah antisipatif**
  a) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
  b) Selalu mendorong OPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan.
  c) Memonitoring perkembangan tindak lanjut pada obyek pemeriksaan.

Program yang mendukung untuk capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

c. Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Berpredikat BB

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
3	Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Berpredikat BB	76%	77%	51,28%	56,41%	67,47%	73,26 %

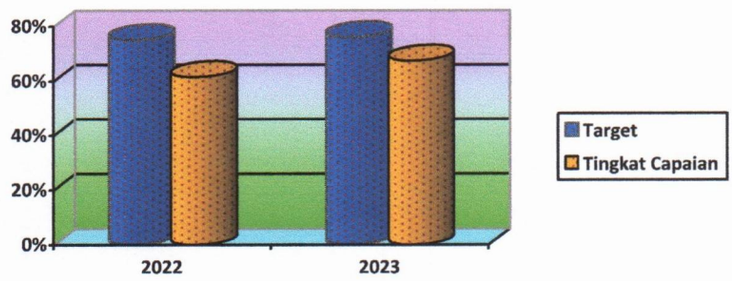
Dari tabel diatas dapat diuraikan indikator Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Berpredikat BB ditetapkan dengan target 77%. Dan ini telah dilaksanakan dengan capaian 73,26% yaitu hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat dengan berpredikat BB adalah 22 OPD. Jika dibandingan Tahun 2022 dari target 76% dengan capaian 67,47%

Hasil evaluasi Inspektorat terhadap 39 OPD terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daearh berpredikat BB adalah 22 OPD dengan capaian 73,26%, sedangkan OPD dengan nilai B adalah sebanyak 17 OPD.

Adapun OPD yang implementasinya bernilai BB adalah :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayan
4. Dinas Kesehatan

5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
10. Dinas Pertanian
11. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
12. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
13. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15. RSUD Prof.Dr.M.Ali Hanafiah
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17. Dinas Pangan Perikanan
18. Kecamatan Rambatan
19. Kecamatan Lima Kaum
20. Kecamatan Lintau Buo
21. Kecamatan Sungai Tarab
22. Kecamatan Pariangan



Indikator Persentase hasil evaluasi pada OPD yang implementasi SAKIP berprediket B dan BB diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- **Faktor keberhasilan**

  Dalam melakukan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD Inspektorat Daerah secara intensif berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dalam hal pengimplementasian SAKIP pada OPD.

- **Faktor kegagalan**

  a) Perubahan target capaian kinerja terjadi pada akhir tahun setelah dilakukannya evaluasi. Seharusnya perubahan ini dilakukan pada

pertengahan tahun. Sehingga ada upaya perbaikan terhadap implementasi SAKIP sebelum dilakukan evaluasi.

b) Dengan keterbatasan tenaga pengawas yang lebih memahami dan berpengalaman dalam melakukan evaluasi kinerja, aparat pengawas masih mampu bekerja secara optimal.

c) Masih lemahnya SDM dalam pembuatan Laporan Kinerja OPD ini sehingga, masih banyaknya nilai Laporan Kinerja OPD yang rendah.

- **Langkah-langkah antisipatif**

a) Koordinasi yang lebih komprehensif demi meningkatnya kualitas pembinaan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja OPD;

b) Ketegasan dari Kepala OPD untuk mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki akuntabilitas kinerja dalam merumuskan capaian indikator kinerja OPD.

c) Meningkatkan SDM aparatur yang membuat Laporan Kinerja sehingga lebih memahami cara pembuatan Laporan Kinerja ini.

Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala .

d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kelima Unsur SPIP Secara Memadai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
4	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai	80%	80%	64,1%	100%	80,13%	100%

Dari target kinerja awalnya 80 % yaitu 11 OPD perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai.

Realisasi capaian adalah 39 OPD dari 39 OPD yang ada, dan hasil pengukuran kinerja capaian kinerja ini adalah 100 %.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- **Faktor keberhasilan**

Penilaian Maturitas SPIP tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar secara berkelanjutan telah melakukan Bimbingan Teknis tehadap OPD dalam rangka penerapan SPIP secara memadai.

- **Faktor kegagalan**

  Masih rendahnya tingkat pengetahuan OPD dalam penerapan SPIP ini, sehingga penerapan SPIP belum optimal.

- **Langkah-langkah antisipatif**

  a) Perlu dilakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang Penerapan SPIP kepada seluruh OPD karena Penilaian Mandiri SPIP menggunakan aplikasi yang harus di lakukan oleh masing – masing OPD setiap tahunnya, untuk hasil yang maksimal diperlukan dana untuk mensosialisasikan aplikasi SPIP tersebut.

  b) Melaksanakan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tentang Penerapan SPIP ini yang nara sumbernya berasal dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

  c) Koordinasi yang lebih komprehensif lagi demi meningkatnya penerapan dan pelaksanaan SPIP yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja OPD;

  d) Ketegasan dari pimpinan OPD terkait untuk mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki akuntabilitas kinerja dalam merumuskan capaian indikator kinerja OPD.

  e) Peningkatan SDM aparatur dalam Penerapan SPIP pada OPD nya.

Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.

e. Tingkat Kapabilitas Pengawas Internal Pemerintah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
5	Tingkat Kapabilitas Pengawas Internal Pemerintah	Level 3	Level3	Level 2 (Nilai 2,62)	Level 3	100%	100%

Dengan telah tercapainya Kapabilitas APIP Level III,berarti kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar telah tercapai dengan baik. Ini tidak terlepas dari kerja keras dan usaha keras APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat mencapai Level III. Ini berarti capaian kinerja inspektorat Daerah indikator ini sangat bagus dengan capaian 100%.

Untuk mewujudkan kapabilitas APIP Ke Level III , Inspektorat Daerah tidak menganggarkan dana kegiatan, karena keterbatasan anggaran. Tapi dari anggaran yang ada Inspektorat Daerah dapat memanfaatkannnya secara efektif dan efesien sehingga target Level III tercapai.

Untuk indikator tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- **Faktor keberhasilan**

  Dengan keterbatasan personil yang ada baik untuk Jabatan Fungsional Tertentu seperti Auditor, auditor kepegawaian dan Pengawas Pemerintah dan Jabatan Fungsional Umum, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terus berusaha dan berupaya untuk mencapai level 3 dengan pemenuhan 6 elemen yang dipersyaratkan.

- **Faktor kegagalan**

  Tidak adanya Pemenuhan Alokasi Anggaran Pengawasan Inspektorat sesuai dengan ketentuan dan penambahan personil untuk menduduki jabatan fungsional umum maka dikhawatirkan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar akan tidak optimal dalam melakukan administrasi pengawasan. Dan syarat dalam pemenuhan elemen pada Kapabilitas APIP ini tidak akan terpenuhi lagi.

- **Langkah-langkah antisipatif**

  Berupaya untuk memenuhi seluruh elemen yang ada dalam pemenuhan kapabilitas APIP level 3.

Program yang mendukung untuk capaian kinerja ini tidak ada program dan kegiatan khusus . Seluruh Program yang ada pada Inspektorat Daerah dimanfaatkan untuk mencapai indikator kinerja ini.

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**		**16.060.855.068,00**		**7.546.392.691**	**7.501.290.041**	**99,94%**	**6.374.324.938**		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**12.385.755.068,00**		**6.315.666.956**	**6.271.380.572**	**99,30%**	**5.985.150.187**		
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**		**80.000.000,00**		**13.380.300**	**13.219.100**	**98,80%**	**3.498.000**		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Jenis Dokumen/Laporan	60.000.000,00		8.874.700	8.865.200	99,89%	2.398.000		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi, dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Dokumen/laporan	15.500.000,00		4.505.600	4.353.900	96.63%	1.100.000		
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**		**6.737.805.068,00**		**4.981.652.511**	**4.956.691.697**	**99,50%**	**5.538.454.616**		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	6.722.805.068,00		4.976.152.511	4.951.107.497	99,50%	5.537.354.616		
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen/laporan	15.000.000,00		5.500.000,00	5.484.200	99,71%	1.100.000		
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**		**925.000.000,00**		**153.000.000**	**143.814.164**	**94%**	**30.600.000**		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	00		00	00	0%	00		
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas	75.000.000,00		8.000.000	7.980.000	99,75%	1.000.000		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatiahan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Diklat	935.000.000,00		145.000.000	135.834.164	93,68%	29.600.000		
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**1.207.500.000,00**		**261.154.370**	**259.225.829**	**99,26%**	**65.109.500**		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	6.500.000,00		2.000.200	1.984.000	99,18%	400.000		
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	420.000.000,00		46.658.000	46.271.875	99,17%	12.000.000		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	82.500.000,00		28.000.000	27.950.663	99,82%	5.042.800		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan jumlah dokumen yang digandakan	71.500.000,00		15.967.900	15.967.400	99,99%	3.001.700		
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00		8.000.000	6.624.000	82,80%	00		
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dana makan minum tamu dan rapat yang disediakan	75.000.000,00		16.993.300,00	16.986.400	99,96%	4.065.000		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan dan luar daerah	540.000.000,00		143.534.670,00	143.441.391	99,94%	40.600.000		

6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.250.000.000,00**		**426.800.000**	**426.779.068**	**99,99%**	**00**		
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 4	0,00		414.400.000	414.400.000	100%	00		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	350.000.000,00		12.400.000	12.379.068	99,83%	00		
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ruang Kerja Fungsional dan Ruang Arsip	1.900.000.000,00		00	00	0			
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**215.050.000,00**		**116.380.975**	**112.802.692**	**96,93%**	**103.332.299**		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah materai dan perangko	1.650.000,00		1.000.000	1.000.000	100%	500.000		
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah kwh listrik, jumlah tagihan telepon dan jaringan internet	61.600.000,00		54.349.475	50.778.290	93,43%	45.349.475		
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang dibayarkan	151.800.000,00		61.031.500	61.024.402	99,99%	57.482.824		
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**809.000.000,00**		**363.298.800**	**358.948.022**	**98,80%**	**244.155.772**		
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang dibayarkan pajak dan KIR serta terpelihara kendaraan dinas operasional	555.500.000,00		294.298.800	290.149.622	**98,59%**	202.583.848		
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur	16.500.000,00		00	00	**0%**	00		
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	137.500.000,00		20.000.000	19.897.000	**99,49%**	3.500.000		
6	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	,00			0,00	**0%**	0,00		
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	180.400.000,00		49.000.000	48.901.400	**99,80%**	38.071.924		
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**2.387.000.000,00**		**1.200.275.735**	**1.199.459.469**	**99,93%**	**379.174.751**		
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**2.288.000.00,00**		**1.151.975.735**	**1.151.159.469**	**99,93%**	**354.174.751**		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan kinerja dan keuangan	360.800.000,00		200.000.000	199.687.100	**99,84%**	91.520.951		
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan kinerja dan keuangan	385.000.000,00		161.908.800	161.872.100	**99,98%**	90.128.800		
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Juml;ah Reviu laporan kinerja dan keuangan	223.300.000,00		372.749.319	372.643.000	**99,97%**	84.200.000		
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Juml;ah Reviu laporan keuangan dan kinerja	495.000.000,00		112.000.000	111.900.000	**99,91%**	24.500.000		
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah nagari/desa yang di audit	467.500.000,00		223.434.000	223.275.500	**99,93%**	35.000.000		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	356.400.000,00		81.883.616	81.781.769	**99,88%**	28.825.000		
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**99.000.000,00**		**48.300.000**	**48.300.000**	**100%**	**25.000.000**		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan Tertentu	99.000.000,00		48.300.000	48.300.000	**100%**	25.000.000		
6	**01**	**03**			**PROGRAM PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**1.288.100.000,00**		**30.450.000**	**30.450.000**	**100%**	**10.000.000,00**		
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**		1.288.100.000,00		**30.450.000**	**30.450.000**	**100%**	**10.000.000,00**		

6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		325.600.000,00		10.000.000	10.000.000	100%	00		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		139.700.000,00		7.350.000	7.350.000	100%	00		
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi		360.800.000,00		4.500.000	4.500.000	100%	10..000.000,00		
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas		462.000.000,00		8.600.000	8.600.000	100%	00		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

sudah berjalan baik sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah			0,0050 %	0,0049%	0,0048 %	0,0047 %	0,0046 %	131,57 %	98,36%	140%	150%	
2	Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan berpredikat BB			75%	76%	77%	78%	79%	61,53%	73,26%	65%	65%	
3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai			80%	80%	80%	80%	80%	80,13 %	100 %	97%	97%	
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti			90%	90%	90%	90,50%	90,80	84,71%	93,72%	95%	95%	
5	Tigkat Kapabilitas pengawas intern pemerintah			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		100%	100 %	100%	100%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Melakukan identifikasi isu – isu strategis pembangunan sangat penting dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) agar pembangunan yang direncanakan tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan identifikasi dan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Belum terpadunya program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme antara aparat penegak hukum (APH) dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Antara APH dengan APIP masih berjalan dengan program dan kegiatan masing-masing dalam pemberantasan korupsi.
2. Masih belum optimalnya peran pengawasan Inspektorat Daerah, dengan indikasi masih minimnya anggaran pengawasan
3. Masih kurangnya independensi APIP dalam melaksanakan tugas, karena adanya intervensi terhadap kegiatan dan hasil pengawasan.
4. Dalam penyelenggaraan tugas yang dilakukan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) sulit dibedakan antara peran Auditor, PPUPD dan Auditor Kepegawaian.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan antara lain transportasi, alat ukur pengawasan, perangkat teknologi dan informasi serta gedung dan bangunan yang belum memenuhi standar yang baik.
6. Kesejahteraan APIP kurang memadai berupa pemberian tunjangan khusus dan penghargaan atas resiko dalam melaksanakan tugas.
7. Belum terpadunya program pengawasan kegiatan antar APIP yakni antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang berdampak terhadap implikasinya yakni terjadinya pengawasan yang tumpang tindih.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD/Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Inspektorat Daerah.

Sejalan dengan visi misi Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah maka fungsi dan tugas Inspektorat terkait erat dengan pencapaian misi 3 memujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan harapan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip–prinsip clean goverment dan good governance dapat berjalan sesuai harapan.

Adapun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

TABEL 2.4 REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH DATAR

Nama OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**8.071.140.789**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.308.554.906**	
	INSPEKTORAT DAERAH					**INSPEKTORAT DAERAH**					
A	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**				**902.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**				**1.590.146.935**	
I	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**797.000.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**1.455.146.935**	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Pengawasan Kinerja dan tenaga Harian yang dibayarkan	1 tahun	185.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dan tenaga Harian yang dibayarkan	40 Laporan	235.000.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Pengawasan Keuangan yang dilaksanakan	1 tahun	140.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80 Laporan	265.000.000	
3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Reviu Kinerja yang dilaksanakan	1 tahun	175.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Laporan Reviu Kinerja	1 tahun	195.146.935	
4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Reviu Keuangan yang dilaksanakan	1 tahun	57.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 tahun	175.000.000	
5	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Pengawasan Desa yang dilaksanakan	1 tahun	195.000.000	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75 Laporan	500.000.000	

6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah monev tindak lanjut yang dilaksanakan	1 tahun	45.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	85.000.000	
II	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**105.000.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**135.000.000**	
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	1 tahun	105.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	2 Laporan	135.000.000	
B	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**				**38.470.322.000**	**Program Perumusan Kebijakan**				**1.288.100.000**	
I	**Pendampingan dan Asistensi**				**38.470.322.000**	**Pendampingan dan Asistensi**				**1.288.100.000**	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Terlaksananya Peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3, pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Keuangan Nagari yang sesuai ketentuan dan Pelaksanaan Koordinasi terkait pengawasan dan tindak lanjut kepada pihak terkait	1 Tahun	5.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	40 Perangkat Daerah	15.000.000	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Terlaksananya Zona Intergritas menuju Wlayah bebas korupsi	1 Tahun	5.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan	6 Perangkat Daerah	25.000.000	

			dan penilaian mandiri reformasi birokrasi					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahaan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Terlaksananya aksi pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait Pungli	1 Tahun	20.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahaan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahaan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	35.000.000	
4	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Terlaksananya SPIP (BPKP) dan Survey Penilaian Integritas (KPK)	1 Tahun	8.470.322	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas)	40 Perangkat Daerah	50.000.000	
B	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.785.570.467**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**7.593.407.971**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu**		**6.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**20.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah jenis dokumen laporan	6 Laporan	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah jenis dokumen laporan	2 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000	

II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu**		**6.534.170.467** **6.537.670.467**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.367.584.936**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Terlaksananya pembayaran gaji ASN	1 Tahun	6.534.170.467	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	6.357.584.396	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah jenis dokumen/laporan	**2 laporan**	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah Llaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**2 laporan**	10.000.000	
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**75.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**1.010.000.000**	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	Jumlah Pejabat Fungsional tertentu yang dinilai angka kreditnya	1 Tahun	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	3.500.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	1 Tahun	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	436.000.000	
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran dan ketersediaan sarana dan prasarana**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**291.323.575**	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik yang disediakan	7 Jenis	400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik yang disediakan	1 Paket	2.500.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 unit laptop dan 3 unit printer	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	61 jenis	7.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	25.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah barang yang dicetak dan jumlah dokumen yang digandakan	14 jenis	6.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	17.500.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Tahun	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	1.200.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	1 Tahun	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi ke luar Daerah	1 Tahun	95.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	185.123.575	
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**15.000.000**	
1	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	1 Tahun	00	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	15.000.000	

2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Inspektorat			00		Inspektorat	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	0	
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**58.900.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**215.050.000**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah materai dan perangko	193 buah materai 3000 dan 220 buah materai 6000	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Jumlah Volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan jaringan internet	1 tahun	55.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	65.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan dan Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	1 tahun	58.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Lapporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	61.000.000	
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**332.500.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tenaga sopir yang dibayarkan	6 unit roda 4 dan 8 unit roda 2	205.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	235.000.000	

2	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Terpeliharanya mebeleur	4 jenis	1.200.000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	2.500.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	31 Jenis	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	25 unit	20.000.000	
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Inspektorat	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	34 Jenis	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Inspektorat			0	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	38.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 menyatakan bahwa Inspektorat ditambah fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, disamping fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023, tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan:

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program kegian dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:
   1. Kegiatan Pengawasan
   2. Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP Level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
   3. Sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
b. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah.

   Besaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten diatas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

   Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan sebagaimana tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 700.1.1/8737/SJ Tanggal 9 Desember 2022.

Selanjutnya berdasarkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi terintegrasi pemerintah daerah melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) pada area intervensi ke empat yakni pengawasan APIP, untuk mendukung pengawasan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu perlu dukungan penyediaan anggaran yang cukup bagi APIP, dimana dokumen penilaian

laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, memuat kepatuhan terhadap Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 Nomor 19 Tahun 2023, Jika tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 untuk disertakan dokumen keberatan disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor: 11 Tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ dan Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang memuat terkait Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan, dimana Kepala Daerah agar memenuhi kecukupan anggaran pengawasan dengan dengan mengambil langkah kebijakan strategis berupa :

1. Alokasi dan Penggunaan anggaran pengawasan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembinaan serta pengawasan (tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan) yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah dengan klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Penggunaan alokasi anggaran pengawasan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD dan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meliputi:
   a) Kegiatan Pengawasan;
   b) Peningkatan Kapalitas APIP, meliputi:
      1) Maturitas system pengendalian internal pemerintah;
      2) Penerapan manajemen risiko;
      3) Penguatan integritas dan antikorupsi; dan
      4) Mengikuti pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis paling kurang 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per orang.
   c) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
3. Mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (JFA) paling kurang 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per orang.
4. Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara bersama-sama akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan pada Pemerintah Daerah pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sehingga anggaran pengawasan pada Pemerintah Daerah telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan APBD

5. Mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Inspektorat Daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
   a) Besaran alokal anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah namun lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya; dan
   b) Besaran alokal anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional di perangkat daerah lainnya.

Sehingga dengan adanya aturan tersebut diatas maka sesuai anggaran pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 8.071.140.789,- seharusnya menjadi 16.060.855.068,- (enam belas milyar enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) dari Total APBD Kabupaten Tanah Datar, dan sesuai RKPD 2025 jumlah anggaran sebesar Rp. 8.071.140.789.- masih belum memenuhi sesuai aturan yang berlaku.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rancangan rencana kerja Inspektorat tahun 2025 telah dirumuskan secara bersama seluruh bagian dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil rapat penyusunan program dan kegiatan tersebut selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat lebih kepada memberikan masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan arah dan Kebijakan Nasional Pemerintah bidang pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dilingkungan pemerintah daerah khusus kabupaten Tanah Datar, dan hal sudah sejalan dengan visi dan misi yaitu menciptakan Pemerintahan yang Baik (*GoodGovernance)* dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governtment)* .
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Propinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas penegawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dalam upaya mendukung kebijakan pengawasan Nasional tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja secara profesional, independen dan selalu mengawal dalam tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan penyalahgunaan keuangan daerah, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menimbulkan kerugian negara dan daerah yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah pada khususnya, hal ini didukung oleh Kepala Daerah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi dan menurunkan kasus korupsi. Dalam kaitan itu, upaya pemberantasan korupsi hendaknya terus ditingkatkan, karena apabila dana-dana tersebut tidak dikorupsi maka akan dapat digunakan untuk Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inspektorat Daerah Tanah Datar dalam pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam mencegah, mendeteksi, menangkal kejadian atau tindakan penyimpangan dini dilingkungan pemerintah daerah melalui peningkatan kapabilitas APIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak akan melindungi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan keuangan daerah untuk hal-hal yang dapat merugikan daerah, hal ini dilakukan dalam rangka pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Pemeriksaan tidak akan bermanfaat apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai, dan hanya akan merupakan pemborosan terhadap dana yang digunakan bagi pemeriksaan itu sendiri. Untuk itu dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN kedepan kami mengharapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan proses perencanaan program dan penganggaran secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Menekankan agar pengelolaan APBD sejak penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga dapat dilaksanakan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Mengarahkan perangkat daerah untuk menerapkan penganggaran yang taat azas dan berorientasi pada prestasi kerja atau melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan pertanggung jawaban pelaksaanaan APBD Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP).
5. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
6. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
7. Bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara/daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Ket
A	Nasional		
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	
2.	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.	
B	Provinsi		
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		
2.	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)		

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan Bupati Tanah Datar. Hal ini merupakan pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengakomodasikan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan sasaran utama dari rencana kerja adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*).

Berdasarkan rumusan Misi Inspektorat Daerah disusunlah tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut :

a. Tujuan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun adalah:
    1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
    2. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan aparatur pemerintahan terhadap peraturan yang berlaku serta kebijakan, instruksi yang telah ditetapkan.
    3. Meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat dalam pengawasan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.
    4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta melakukan tindakan pencegahan dini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
b. Sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah:
    1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur Pengawasan.
    2. Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel.
    3. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan melalui yang efektif dan efesien serta mampu mendorong kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai ketentuan.
    4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran		Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1	Persentase penyimpangan kerugian Negara/Daerah	0,046 %
2	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2	Jumlah Perangkat Daerah yang Implementasi SAKIP berpredikat BB	79 %
3	Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Perangkat Daerah (OPD)	3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai	80 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti	90,80%
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	5	Tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah	Level 3

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya pengawasan secara berkelanjutan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun program dan kegiatan kerja. Program dan kegiatan tersebut mengacu pada visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar serta kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi Bupati Tanah Datar khususnya dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional terutama dalam meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Rincian Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
   Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Pengawasan Kinerja dan tenaga Harian yang dibayarkan.
   Dana yang dianggarkan sebesar Rp 185.000.000,00

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
   Sub Kegiatan ini dianggarkan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
   Dana yang dianggarkan sebesar Rp 140.000.000,00

c. Reviu Laporan Kinerja.
   Sub Kegiatan ini dianggarkan Reviu Laporan Kinerja.
   Dana yang dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00

d. Reviu Laporan Keuangan.
   Sub Kegiatan ini dianggarkan Reviu Laporan Keuangan.
   Dana yang dianggarkan sebesar Rp 57.000.000,00

e. Pengawasan Desa.
   Sub Kegiatan ini dianggarkan Pengawasan Desa.
   Dana yang dianggarkan sebesar Rp 195.000.000,00

f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
   Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
   Dana yang dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00

2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 105.000.000,00

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1 Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk pelaksanaan Peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3, pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Keuangan Nagari yang sesuai ketentuan dan Pelaksanaan Koordinasi terkait pengawasan dan tindak lanjut kepada pihak terkait.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 38.470.322,00

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk pelaksanaan ZI, WBK dan PMPRB.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 8.470.322,00

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk penyusunan 6 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000,00

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk penyusunan 2 laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 6.534.170.467,00

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk penyusunan 2 laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000,00

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai selama 1 Tahun.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 0,00

b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi selama 1 Tahun.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk penyediaan 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 400.000,00

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,00

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk penyediaan ATK Kantor 1 Paket.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,00

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk barang yang dicetak dan jumlah dokumen yang digandakan 1 Paket.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp.6.500.000,00

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 0,00

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk makan minum tamu.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi ke luar Daerah.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp.95.000.000,00

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel
Sub Kegiatan ini dianggarkan pengadaan mebel selama 1 Tahun.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 0,00

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini dianggarkan pengadaan untuk ruang kerja fungsional dan ruang arsip
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 00,00

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk 150 buah materai 10.000
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 700.000,00

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk tagihan air, listrik dan telpon selama 1 Tahun
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,00

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk alat kebersihan dan tenaga kebersihan selama 1 Tahun
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 58.200.000,00

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini diangarkan untuk pembayaran pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas 6 unit roda 4 dan 8 unit roda 2
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 205.000.000,00

b. Pemeliharaan Mebel
Sub kegiatan ini diangarkan untuk Pemeliharaan 10 unit Mebel
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000,00

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini dianggarkan untuk 15 jenis peralatan kerja
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diangarkan untuk rehab gedung

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 38.000.000,00

Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TANAH DATAR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	6	8	9	10
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.071.140.789,00**				**16.494.985.575 ,00**
6	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**902.000.000,00**				2.387.000.000
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**797.000.000,00**				**2.288.000.000, 00**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dan tenaga Harian yang dibayarkan	Inspektorat	80 Laporan	185.000.000	APBD Kab		80 Laporan	360.800.000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	80 Laporan	140.000.000	APBD Kab		80 Laporan	385.000.000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	42 Laporan	175.000.000	APBD Kab		42 Laporan	223.300.000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	80 Laporan	57.000.000	APBD Kab		80 Laporan	495.000.000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat	75 Laporan	195.000.000	APBD Kab		75 Laporan	467.500.000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Inspektorat	10 Dokumen	45.000.000	APBD Kab		10 Dokumen	356.400.000

6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**105.000.000**			1 Tahun	**99.000.000,00**
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		2 Laporan	105.000.000			2 Laporan	99.000.000,00
6	01	03			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**38.470.322.000**	APBD Kab		0	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**				**38.470.322.000**				**1.288.100.000,00**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	40 perangkat daerah	5.000.000	APBD Kab		40 perangkat daerah	325.600.000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	6 perangkat daerah	5.000.000	APBD Kab		6 perangkat daerah	139.700.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	2 kegiatan	20.000.000	APBD Kab		2 kegiatan	360.800.000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	40 perangkat daerah	8.470.322	APBD Kab		40 perangkat daerah	462.000.000
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.785.570.467**				**12.819.885.575**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6.000.000**				**88.000.000,00**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	6 Dokumen	3.500.000	APBD Kab	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Laporan	71.500.000

											Perangkat Daerah		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	3 Laporan	2.500.000	APBD Kab		3 Laporan	16.500.000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.537.670.467**				**6.731.398.817, 50**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	47 orang	6.534.170.467	APBD Kab		47 orang	7.395.085.575
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	2 Laporan	3.500.000	APBD Kab		2 Laporan	15.000.000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**75.000.000**				**284.312.500**
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	1 Tahun	00	APBD Kab		1 Tahun	82.500.000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	1 Tahun	75.000.000	APBD Kab		1 Tahun	935.000.000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**148.900.000**				**592.723.278,00**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Inspektorat	1 Paket	400.000	APBD Kab		7 jenis	7.150.000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Inspektorat	1 Paket	35.000.000	APBD Kab		1 Paket	462.000.000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Inspektorat	1 Paket	7.000.000	APBD Kab		1 Paket	82.500.000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	6.500.000	APBD Kab		1 Paket	71.500.000

6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Inspektorat	4 Dokumen	00	APBD Kab		4 Dokumen	13.200.000
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	1 Laporan	5.000.000	APBD Kab		1 Laporan	82.500.000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	1 Laporan	95.000.000	APBD Kab		1 Laporan	594.000.000
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**00,00**				
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Inspektorat	47 Unit	00	APBD Kab		47 Unit	385.000.000
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	1 Unit	00	APBD Kab		1 Unit	1.500.000.000.00
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**58.900.000**				**215.050.000,00**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	1 Laporan	700.000	APBD Kab		1 Laporan	1.650.000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	3 Laporan	55.000.000	APBD Kab		3 Laporan	61.600.000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Laporan	58.200.000	APBD Kab		1 Laporan	151.800.000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**249.200.000**			1 Tahun	**582.187.500,00**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat	13 unit	205.000.000	APBD Kab		13 unit	555.500.000

6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Inspektorat	10 unit	1.200.000	APBD Kab		10 unit	16.500.000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat	8 unit	5.000.000	APBD Kab		8 unit	47.437.500
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Inspektorat	1 unit	38.000.000	APBD Kab		1 unit	180.400.000

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, adalah merupakan amanat dari ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjelaskan Perangkat Daerah diharuskan menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan mengacu kepada penjabaran dan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025, dalam upaya mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan Inspektorat khususnya dan program pemerintah daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja aparatur pengawasan.

Batusangkar, 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Tanah Datar

DESI RIMA, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19651212 199403 2 005